



RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026

"Peraturan Daerah Kota Dumai
Nomor 6 Tahun 2021

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026"

Dumai Kota Idaman

PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN 2021



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALI KOTA DUMAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALI KOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Wali Kota adalah Walikota Dumai
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
9. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
10. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

11. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
12. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
13. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
21. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
25. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
26. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

27. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
28. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
29. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
30. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
31. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
32. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
33. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
34. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
35. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
36. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
37. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
38. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
39. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
40. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
41. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
42. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
43. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu

- tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
44. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.
 45. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
 46. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/ kota.
 47. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
 48. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
 49. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
 50. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
 51. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi.
 52. Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya adalah Daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan, Analisis Isu-Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan, Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah, Indikator dan Target Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026, dan Pedoman Transisi serta kaidah pelaksanaan.
- (3) Kerangka Pendanaan dan Target Kinerja Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat indikatif.

- (4) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sitematika sebagai berikut:
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Permasalahan dan isu strategis daerah;
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI : Srategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah;
 - g. BAB VII : Kerangka pendanaan pembangunan dan prorgan Perangkat Daerah; dan
 - h. BAB VIII : Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - i. BAB IX : Penutup.
- (5) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat dan bersifat indikatif.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Wali Kota melalui BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kesesuaian antara capaian indikator kinerja pembangunan daerah dengan target yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekomendasikan terjadinya penyesuaian indikator kinerja pembangunan daerah tanpa merubah subsatansi RPJMD, maka penyesuaian indikator kinerja pembangunan daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 5

Perubahan dan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar mencakup antara lain : bencana alam dan non alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Wali Kota melalui Perangkat Daerah terkait wajib menyusun RKPD untuk tahun pertama periode Wali Kota berikutnya dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Daerah ini

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 24 Agustus 2021

WALI KOTA DUMAI,



Diundangkan di Dumai
pada tanggal 24 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,



LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 4 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU (8.38.A / 2021)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT dan atas rahmat karunia-Nya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 dapat diselesaikan. Penyusunan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 didasarkan kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 disusun untuk menentukan arah kebijakan bagi perencanaan pembangunan Kota Dumai dengan menyelaraskan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, isu strategis, program strategis, kerangka pendanaan, indikator kinerja, dan gambaran pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Dumai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai, Renstra dan Renja OPD dalam merencanakan Program Prioritas dan Kegiatan-kegiatan setiap tahunnya yang menyentuh kebutuhan masyarakat Kota Dumai demi “Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

WALI KOTA DUMAI,

H. PAISAL,SKM, MARS

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.2 DASAR HUKUM	I-3
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I-6
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN	I-15
1.5 SISTEMATIKA PENULIASAN	I-15
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA DUMAI	
2.1 SEJARAH KOTA DUMAI	II-1
2.2 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II-2
2.2.1 KARAKTERISTIK LOKASI DAN WILAYAH	II-2
2.2.2 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH	II-20
2.2.3 WILAYAH RAWAN BENCANA	II-22
2.2.4 DEMOGRAFI	II-25
2.3 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II-36
2.3.1 FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI	II-36
2.3.2 FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL	II-67
2.3.3 FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA	II-81
2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM	II-85
2.4.1 FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR	II-85
2.4.2 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	II-114
2.4.3 FOKUS URUSAN PEMERINTAH PILIHAN	II-167
2.4.4 FOKUS URUSAN PENUNJANG	II-175
2.5 ASPEK DAYA SAING DAERAH	II-182
2.5.1 FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH	II-182
2.5.2 FOKUS FASILITAS WILAYAH/ INFRASTRUKTUR	II-182
2.5.3 FOKUS IKLIM BERINVESTASI	II-184
2.5.4 FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA	II-189
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	
3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU(2016-2020)	III-2
3.1.1 KINERJA PELAKSANAAN APBD	III-2
3.1.2 ANALISIS PEMBIAYAAN DAERAH	III-23
3.1.3 NERACA DAERAH	III-28
3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU	III-35

3.2.1	PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN	III-35
3.3	KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2021-2026	III-38
3.3.1	PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA	III-38
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH		
4.1	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	IV-1
4.1.1	IdentifikasiPermasalahan Pembangunan Daerah	IV-1
4.1.2	IdentifikasiPermasalahanUntukPemenuhanPenyelenggaraanUrusanPe merintahan Daerah (UrusanWajib/Pilihan)	IV-1
4.2	ISU-ISU STRATEGIS	IV-19
4.2.1	Isu Strategis Kebijakan Nasional yang terkaitdengan Kota Dumai	IV-20
4.2.2	Isu Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039	IV-25
4.2.3	Isu Pembangunan Daerah dengan Kabupaten Tetangga	IV-29
4.2.4	Isu Strategis Kebijakan Nasional yang terkait dengan Kota Dumai	IV-31
4.2.5	Isu Strategis Kebijakan Provinsi yang Terkait dengan Kota Dumai (RPJM Provinsi Riau 2019-2024)	IV-32
4.2.6	Isu-Isu Strategis Kota Dumai	IV-33
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN		
5.1	VISI PEMBANGUNAN KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026	V-1
5.2	MISI PEMBANGUNAN KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026	V-2
5.3	TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026	V-5
5.4	KESELARASAN MISI RPJMD KOTA DUMAI DENGAN MISI RPJMD PROVINSI RIAU	V-7
5.5	TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026	V-7
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		
6.1	STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026	VI-1
6.2	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA DUMAI TAHUN 2016-2021	VI-4
6.3	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026	VI-22
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		
		VII-1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		
		VIII-1
BAB IX PENUTUP		
9.1	PROGRAM TRANSISI	IX-1
9.2	KAIDAH PELAKSANAAN	IX-2

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

Tabel 1.1 Tahapan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Kota Dumai 2005-2025.....	10
Tabel 1.2 Tahapan Kebijakan Tahap IV (2021-2026) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Dumai 2005-2025	11

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA DUMAI

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Dumai	3
Tabel 2. 2 Pembagian Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan dan Kelurahan di Kota Dumai	4
Tabel 2. 3 Tinggi Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2020	5
Tabel 2. 4 Sungai-sungai yang Mengalir Menurut Kecamatan di Kota Dumai	8
Tabel 2. 5 Suhu dan Kelembaban Udara Kota Dumai Tahun 2020	9
Tabel 2. 6 Perkembangan Jumlah Hari Hujan di Kota Dumai, 2010-2020.....	10
Tabel 2. 7 Perkembangan Jumlah Curah Hujan di Kota Dumai Tahun 2010-2020	10
Tabel 2. 8 Peruntukan Penggunaan Lahan di Kota Dumai Tahun 2019-2030	11
Tabel 2. 9 Perkembangan Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Dumai 2015-2020	23
Tabel 2.10 Indikator Kependudukan Kota Dumai, 2010-2020	26
Tabel 2.11 Perkembangan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai, 2010-2020.....	27
Tabel 2.12 Perkembangan Kepadatan Penduduk Kota Dumai dan Kecamatan, 2010-2020.....	29
Tabel 2.13 Perkembangan Sex Rasio Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Dumai, 2015-2020	31
Tabel 2.14 Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Dumai, 2015-2020	29
Tabel 2.15 Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Dumai Tahun 2010-2020	38
Tabel 2.16 Perkembangan Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Dumai	39
Tabel 2.17 Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Dumai Tahun 2010-2020.....	42
Tabel 2.18 Perkembangan Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Dumai Tahun 2010-2020	44
Tabel 2.19 Perkembangan Kontribusi PDRB Kota Dumai Terhadap PDRB Provinsi Riau, 2010-2020	45
Tabel 2. 20 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektoral Kota Dumai Tahun 2011-2020	51
Tabel 2. 21 Perkembangan PDRB Perkapita Kota Dumai dan PDRB Perkapita Provinsi Riau Tahun 2010-2020	53
Tabel 2. 22 Perkembangan Ekonomi Wilayah Menurut Tipologi Klassen Kota Dumai, 2011-2020.....	55
Tabel 2. 23 Perkembangan Inflasi Bulanan dan Inflasi Tahunan (Y on Y) Kota Dumai dan Provinsi Riau Tahun 2015-2020.....	56
Tabel 2. 24 Perkembangan Inflasi Sektoral Kota Dumai, 2011-2020.....	58
Tabel 2. 25 Perkembangan Indikator Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2010-2020.....	61
Tabel 2. 26 Perkembangan Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tahun 2010-2020	68
Tabel 2. 27 Perkembangan Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas Melek Huruf, 2010-2020	69
Tabel 2. 28 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional.....	70
Tabel 2. 29 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional, 2010-2020	72
Tabel 2. 30 Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Dumai Tahun 2015-2020	73
Tabel 2. 31 Perkembangan Angka Balita Gizi Buruk Kota Dumai Tahun 2015-2020.....	73
Tabel 2. 32 Perkembangan Angka Balita Gizi Buruk Menurut Kecamatan Kota Dumai, 2016-2020	74
Tabel 2. 33 Perkembangan Penerima Batuan Iuran (PBI) dari APBD Kota Dumai dan APBN.....	76
Tabel 2. 34 Perkembangan Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK), 2015-2020.....	77
Tabel 2. 35 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Dumai, 2015-2020	77
Tabel 2. 36 Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja dari Angkatan Kerja Kota Dumai, 2015-2020	78
Tabel 2. 37 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Dumai, 2015-2020.....	80
Tabel 2. 38 Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja Kota Dumai, 2015-2020.....	81

Tabel 2. 39 Implementasi Budaya Melayu Riau dalam Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar Kota Dumai, 2015-2020	82
Tabel 2. 40 Implementasi Nilai-nilai Agama pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	82
Tabel 2. 41 Implementasi Nilai-nilai Agama pada Pendidikan SMP/MTs Kota Dumai, 2015-2020	83
Tabel 2. 42 Kinerja Sasaran Berkaitan Dengan Seni Dan Budaya Kota Dumai Tahun 2020	83
Tabel 2.43 Indikator Kinerja Berdasarkan Jumlah Pembinaan Cabor dan Jumlah Klub Olahraga.....	85
Tabel 2.44 Perkembangan Jumlah Fasilitas, Siswa dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK sederajat Kota Dumai, 2016-2020	85
Tabel 2.45 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai, 2015-2020	86
Tabel 2.46 Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTS Kota Dumai, 2015-2020	86
Tabel 2.47 Perkembangan Angka Putus Sekolah SD dan SMP di Kota Dumai, 2016-2020.....	88
Tabel 2.48 Perkembangan Angka Kelulusan SD dan SMP di Kota Dumai, 2016-2020.....	89
Tabel 2.49 Perkembangan Angka Melanjutkan dari SD ke SMP di Kota Dumai, 2016-2020.....	90
Tabel 2.50 Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs dan Rasio Siswa terhadap Ruang kelas di Kota Dumai Tahun 2016-2020.....	91
Tabel 2.51 Perkembangan Kondisi Ruang Kelas SD di Kota Dumai Tahun 2016-2020.....	92
Tabel 2.52 Perkembangan Kondisi Ruang Kelas SMP di Kota Dumai, 2016-2020.....	94
Tabel 2.53 Perkembangan Rasio Guru terhadap Muird SD/MI dan SMP/MTs di Kota Dumai.....	95
Tabel 2.54 Rasio Guru terhadap Siswa Menurut Kecamatan di Kota Dumai TA. 2020/2021	95
Tabel 2.55 Perkembangan Jumlah Guru Berkualifikasi S1/D4 dan Bersertifikasi Kota Dumai,	96
Tabel 2.56 Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Kota Dumai, 2016-2020	97
Tabel 2.57 Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Menurut Kecamatan Kota Dumai 2016-2020	99
Tabel 2.58 Perkembangan Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran diKota Dumai 2016-2019	100
Tabel 2.59 Perkembangan Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Menurut Kecamatan Kota Dumai 2016-2020	101
Tabel 2.60 Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Dumai	102
Tabel 2.61 Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2016-2020	104
Tabel 2.62 Rasio Cakupan Pelayanan Rumah Sakit di Kota Dumai per 1.000 Penduduk.....	105
Tabel 2.63 Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kota Dumai, 2011-2020.....	105
Tabel 2.64 Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk Kota Dumai,2011-2020.....	106
Tabel 2.65 Jumlah Tenaga Medis di Sarana Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Kota Dumai	108
Tabel 2.66 Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2020	108
Tabel 2.67 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Menurut Kecamatan di Kota Dumai 2016-2020.....	113
Tabel 2.68 Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi	113
Tabel 2.69 Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Terduga Tuberkulosis Menurut Kecamatan di Kota Dumai, 2016-2020.....	115
Tabel 2.70 Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Menurut Kecamatan	117
Tabel 2.71 Cakupan Pelayanan Balita di Kota Dumai Tahun 2016-2020.....	118
Tabel 2.72 Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Per Kecamatan Dumai	120
Tabel 2.73 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Per Kecamatan Kota Dumai,2016-2020....	122
Tabel 2.74 Perkembangan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan di Kota Dumai, 2016-2020	124
Tabel 2.75 Sebaran Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2019	125
Tabel 2.76 Perkembangan Jumlah Puskesmas dan Rasio Puskesmas per 100.000 Penduduk di Kota Dumai Tahun 2011-2019.....	126
Tabel 2.77 Sebaran Puskemas Pembantu di Kota Dumai Tahun 2019.....	126
Tabel 2.78 Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Dumai Tahun 2011-2019	127

Tabel 2.79 Daftar Ketersediaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Sampah Medis (SW 100) Kota Dumai Tahun 2019.....	128
Tabel 2.80 Daftar Puskesmas yang memiliki Genset dan Sumur Bor Dalam Tahun 2019	129
Tabel 2.81 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Dumai Tahun 2010-2020.....	139
Tabel 2.82 Kondisi Jalan di Kota Dumai Per Kecamatan Tahun 2018-2019	140
Tabel 2.83 Panjang Jalan yang Dilalui Roda Empat di Kota Dumai Tahun 2010-2019.....	141
Tabel 2.84 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2011-2019.....	141
Tabel 2.85 Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Dumai Tahun, 2012-2020	142
Tabel 2.86 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Kota Dumai, 2011-2019 ...	144
Tabel 2.87 Perkembangan Penyediaan Sanitasi Rumah Tangga Kota Dumai, 2014- 2020.....	145
Tabel 2.88 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB Kota, 2011-2019.....	146
Tabel 2.89 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Tahun 2015-2020	146
Tabel 2.90 Perkembangan Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Penduduk dan Bagi Rumah Tangga Miskin Kota Dumai Tahun 2016-2020.....	147
Tabel 2.91 Kawasan Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni Kota Dumai Tahun 2015-2020.....	147
Tabel 2.92 Lokasi Lingkungan dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Dumai Tahun 2019.....	148
Tabel 2.93 Perkembangan Penyediaan Jalan Lingkungan Kota Dumai Tahun 2017- 2020	149
Tabel 2.94 Perkembangan Penyediaan PJU Kota Dumai Tahun 2017-2020.....	150
Tabel 2.95 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Dumai Tahun 2012-2020	151
Tabel 2.96 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2020	152
Tabel 2.97 Persentase Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kota Dumai Tahun 2011-2020	152
Tabel 2.98 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Dumai, 2011-2020	153
Tabel 2.99 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Dumai Tahun 2011-2020	153
Tabel 2.100 Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kota Dumai, 2011-2018.....	154
Tabel 2.101 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Dumai Tahun 2011-2019.....	154
Tabel 2.102 Rekapitulasi Kejadian Kebakaran Permukiman di Kota Dumai Tahun 2013-2018	155
Tabel 2.103 Aspek Sosial Kota Dumai Tahun 2012-2018.....	157
Tabel 2.104 Data Ketenagakerjaan Kota Dumai Tahun 2016-2020.....	159
Tabel 2.105 Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Dumai Tahun 2016- 2020.....	161
Tabel 2.106 Perkembangan Jumlah Pengangguran Terbuka di Kota Dumai, 201-2020.....	162
Tabel 2.107 Keselamatan dan Perlindungan di Kota Dumai Tahun 2014- 2020	163
Tabel 2.108 Perselisihan Buruh dan Pengusaha di Kota Dumai, 2014-2020	163
Tabel 2.109 Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Dumai Tahun 2017	165
Tabel 2.110 Perkembangan Rasio Jumlah Lulusan Sarjana S1 dan S2 terhadap Jumlah Penduduk Kota Dumai	166
Tabel 2.111 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Yang Dilatih Kota Dumai, 2011-2019	166
Tabel 2.112 Partisipasi Perempuan di Instansi Pemerintah Kota Dumai,2015-2020	167
Tabel 2.113 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Dumai, 2014-2019.....	168
Tabel 2.114 Jumlah Pelaku Seks Bebas Bagi Remaja dan Pengaruh Negatif Globalisasi Bagi Anak dan Remaja Tahun 2014-2018.....	168
Tabel 2.115 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IGD) Kota Dumai Tahun 2017-2020	170
Tabel 2.116 Indikator Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai 2016-2019	171
Tabel 2. 117 Ketersediaan Pangan Utama Kota Dumai Tahun 2010-2020.....	172
Tabel 2. 118 Jumlah Produksi, Kebutuhan Konsumsi dan Pasokan Komoditas Pangan (Ton) Kota Dumai Tahun 2018 dan 2020	173
Tabel 2. 119 Pencapaian Skor pola Harapan Pangan Kota Dumai Tahun 2017-2021	173
Tabel 2. 120 Jumlah Alih Fungsi Lahan dari Pertanian menjadi Non Pertanian Kota Dumai	174

Tabel 2. 121 Permasalahan Pertanahan yang Sedang Ditangani.....	177
Tabel 2. 122 Permasalahan Pertanahan yang Sedang Ditangani.....	184
Tabel 2. 123 Permasalahan Pertanahan Yang Sudah Diselesaikan	184
Tabel 2. 124 Hasil Pengujian Kualitas Air Sumur di Kota Dumai, 2017-2019	185
Tabel 2. 125 Ambang Batas Baku Mutu Air Sumur	186
Tabel 2. 126 Perkembangan Hasil Pengujian Kualitas Air Laut di Kota Dumai, 2017-2019.....	187
Tabel 2. 127 Ambang Batas Baku Mutu Air Sungai Kota Dumai Tahun 2019	187
Tabel 2. 128 Perkembangan Suhu Rata-rata di Kota Dumai Tahun 2010-2020	188
Tabel 2. 129 Perkembangan Suhu Rata-rata di Kota Dumai Tahun 2016-2020	188
Tabel 2. 130 Hasil Analisa Polusi Udara Ambien di Kota Dumai Tahun 2019.....	188
Tabel 2. 131 Persentase Penanganan Sampah di Kota Dumai Tahun 2010-2019	189
Tabel 2.132 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2010-2019	190
Tabel 2. 133 Kepemilikan KTP Tahun 2014-2020.....	191
Tabel 2. 134 Ketersediaan <i>Database</i> Kependudukan Skala Provinsi Tahun 2015-2020	191
Tabel 2. 135 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Tahun 2015-2019	192
Tabel 2. 136 Jumlah Kerjasama Pemanfaatan Data dan Pelayanan Dokumen Kependudukan.....	192
Tabel 2. 137 Jumlah Cakupan penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	193
Tabel 2. 138 Perkembangan Indikator Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Dumai	193
Tabel 2. 139 Total Fertility Rate Kota Dumai Tahun 2020.....	195
Tabel 2. 140 Cakupan Peserta KB Aktif Kota Dumai Tahun 2012-2020	195
Tabel 2. 141 Cakupan Contraseptive Prevalence Rate (CPR), PUS bukan peserta KB, Unmetneed dan PUS yang Bukan Target Program KB Per Kecamatan.....	197
Tabel 2. 142 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Dumai, 2010-2018	198
Tabel 2. 143 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Baik Penumpang Masuk (Datang) maupun Keluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2012-2020.....	199
Tabel 2. 144 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2010-2020.....	200
Tabel 2. 145 Aspek Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Angkutan Umum Dan Barang Di Kota Dumai Tahun 2015-2019	200
Tabel 2. 146 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2010-2018	201
Tabel 2. 147 Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2010-2020	201
Tabel 2. 148 Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2010-2019.....	202
Tabel 2. 149 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai (Rp.) Tahun 2010-2020	202
Tabel 2. 150 Perkembangan Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu di Kota Dumai 2015-2020	203
Tabel 2. 151 Aplikasi Fungsional yang Digunakan Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2020	203
Tabel 2. 152 Website Milik Pemerintah Daerah di Kota Dumai Tahun 2015-2020.....	206
Tabel 2. 153 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016-2020	206
Tabel 2. 154 Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2016-2020.....	207
Tabel 2. 155 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2011-2020	207
Tabel 2. 156 Jumlah Pendamping Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2015-2020	208
Tabel 2.157 Rekapitulasi Perkembangan UMKM Menurut Kecamatan di Kota Dumai, 2016-2019	208
Tabel 2. 158 Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Dumai Tahun 2010 – 2019	209
Tabel 2. 159 Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Dumai Tahun 2016-2020	209
Tabel 2. 160 Persentase Nilai Realisasi PMA dan PMDN Kota Dumai Tahun 2011-2020	210
Tabel 2. 161 Jumlah Organisasi Pemuda Kota Dumai Tahun 2010-2019.....	211
Tabel 2. 162 Jumlah Organisasi Olahraga Kota Dumai Tahun 2010-2019	211
Tabel 2.163 Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2010-2018.....	212
Tabel 2.164 Jumlah Kegiatan Olahraga Kota Dumai 2010-2019.....	212
Tabel 2.165 Publikasi Buku Statistik Kota Dumai Tahun 2010-2020.....	213

Tabel 2.166 Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kota Dumai, 2010-2018.....	215
Tabel 2.167 Jumlah Perpustakaan Kota Dumai Tahun 2010-2019.....	216
Tabel 2.168 Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk	216
Tabel 2.169 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kota Dumai 2016-2019	217
Tabel 2.170 Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Kota Dumai Tahun 2016-2020	217
Tabel 2.171 Dokumen Arsip yang Tersimpan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2012-2019	218
Tabel 2. 172 Jumlah Produksi Perikanan, Cakupan Konsumsi Ikan dan Cakupan Binaan Kelompok Nelayan	218
Tabel 2.173 Produksi Perikanan Laut (Kg) di Kota Dumai Tahun 2011-2020	220
Tabel 2. 174 Produksi Perikanan Budidaya (Kg) di Kota Dumai Tahun 2011 – 2020	221
Tabel 2. 175 Jenis Destinasi Wisata Kota Dumai Tahun 2011-2019.....	222
Tabel 2. 176 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Dumai Tahun 2011-2019.....	222
Tabel 2. 177 Produktivitas Tanaman Padi Di Kota Dumai Tahun 2011-2019	223
Tabel 2. 178 Luas, Prosuksi dan Produktivitas Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kota Dumai Tahun 2015-2020.....	223
Tabel 2.179 Populasi dan Produksi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kota Dumai Tahun 2015-2020.....	224
Tabel 2. 180 Perkembangan Jumlah Penyuluh Pertanian di Kota Dumai Tahun 2017 – 2021	226
Tabel 2.181 Rekapitulasi Kelompok Tani Berdasarkan Kelas Kelompok Kota Dumai	226
Tabel 2.182 Rekapitulasi Kelompok Tani yang Telah Dibina 2015-2019	227
Tabel 2.183 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Dumai Tahun	227
Tabel 2.184 Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB Kota Dumai Tahun 2010-2020	228
Tabel 2.185 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Dumai Tahun 2016-2020.....	228
Tabel 2.186 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB Kota Dumai, 2010-2020	229
Tabel 2.187 Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Dumai 2015-2020.....	229
Tabel 2.188 Jumlah dan Jenis Industri Kreatif di Kota Dumai Tahun 2019	229
Tabel 2.189 Pertumbuhan Sektor Penggalian Kota Dumai 2015-2020.....	231
Tabel 2.190 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Retribusi Daerah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Belanja Pendidikan, dan Belanja Kesehatan Kota Dumai Tahun 2011-2020	233
Tabel 2.191 Jumlah ASN Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin dan Jumlah ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (PIM) Kota Dumai Tahun 2011-2019.....	235
Tabel 2.192 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah (Pejabat Eselon II) Kota Dumai Tahun 2010-2020.....	235
Tabel 2.193 Indeks Profesionalitas ASN Kota Dumai Tahun 2017-2021	236
Tabel 2.194 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2015-2020...	237
Tabel 2.195 Persentase Rekomendasi yang Selesai Ditindaklanjuti, 2015-2020	238
Tabel 2.196 Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Dumai, 2016-2020	241
Tabel 2.197 Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Non Pangan dan Pangan Rumah Tangga Per Kapita Kota Dumai Tahun 2016-2020	242
Tabel 2.198 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Dumai, 2016-2020.....	243
Tabel 2.199 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Dumai, 2016-2020	244
Tabel 2.200 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Baik Penumpang Masuk (Datang) Maupun Keluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2012-2020	245
Tabel 2.201 Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Dumai, 2016-2020	246
Tabel 2.202 Persentase Luas Wilayah Industri Kota Dumai, 2016-2020	246
Tabel 2.203 Data Jumlah Restoran Jasa Makanan/Minum Kota Dumai, 2015-2019.....	247
Tabel 2.204 Perkembangan Jumlah Hotel di Kota Dumai	247
Tabel 2.205 Angka Kriminalitas di Kota Dumai 2010-2020.....	248
Tabel 2.206 Lama Proses Perijinan di Kota Dumai	248

Tabel 2.207 Perizinan yang Diberikan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2011-2019.....	250
Tabel 2.208 Persentase Lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai Tahun 2011-2020	253
Tabel 2.209 Persentase Rasio Ketergantungan di Kota Dumai Tahun 2015-2020.....	254
Tabel 2.210 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Dumai Tahun 2016-2020	255

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Tabel 3. 1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2020	5
Tabel 3. 2 Target Dan Realisasi PAD TA. 2016 - 2020	5
Tabel 3. 3 Kontribusi Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan TA. 2016-2020 (Rupiah).....	7
Tabel 3. 4 Perkembangan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai 2016-2020	7
Tabel 3. 5 Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan (Pendapatan Transfer) Tahun 2016 -2020 Rasio Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan.....	10
Tabel 3. 6 Rasio Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan TA. 2016-2020.....	11
Tabel 3. 7 Perkembangan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Dana Perimbangan Kota Dumai 2016-2020	12
Tabel 3. 8 Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2016 – 2020	15
Tabel 3. 9 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2020.....	18
Tabel 3.10 Perbandingan antara Belanja Tidak langsung (BTL) dengan Belanja Langsung (BL) Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016-2020	19
Tabel 3. 11 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Dumai Tahun 2016-2020	20
Tabel 3. 12 Klasifikasi Kinerja Pendanaan Pembangunan Daerah	21
Tabel 3. 13 Kinerja Pendanaan Pembangunan Daerah.....	24
Tabel 3. 14 Defisit Rill Anggaran Kota Dumai Tahun 2016-2020	23
Tabel 3. 15 Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kota Dumai Tahun 2016-2020.....	25
Tabel 3. 16 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Dumai tahun 2016-2020	27
Tabel 3. 17 Neraca Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2020	29
Tabel 3. 18 Ratio Keuangan Kota Dumai Tahun 2016-2020	34
Tabel 3. 19 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Dumai Tahun 2016-2020.....	36
Tabel 3. 20 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Dumai Tahun 2016-2020.....	37
Tabel 3. 21 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2021 s/d 2026 Kota Dumai.....	40
Tabel 3. 22 Perkiraan Belanja Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021-2026	45
Tabel 3. 23 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Dumai Tahun 2021-2026	46
Tabel 3. 24 Perkiraan Kapasitas Riil Keuangan Daerah.....	48
Tabel 3. 25 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Dumai.....	48

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Tabel 4.1 Rekomendasi KLHS terhadap RPJMD Yang Harus Disesuaikan	22
--	----

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Tabel 5.1 Keselarasan Misi RPJPD 2005-2025 dengan Misi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026	6
Tabel 5.2 Keselarasan Misi RPJMD Kota Dumai 2021-2026 dengan Misi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024	7
Tabel 5.3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	10

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Tabel 6.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kota Dumai 2021-2026	3
--	---

Tabel 6.2 Arah Kebijakan Umum Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026.....	5
Tabel 6.3 Tahapan Kebijakan Tahap IV (2021-2026) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Dumai 2005-2025	7
Tabel 6. 4 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kota Dumai 2021-2026	14
Tabel 6.5 Standard Pelayanan Minimal	17
Tabel 6.6 Program Prioritas Kepala Daerah	17
Tabel 6.7 Program Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kota Dumai	22

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026	2
--	---

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Tabel 8. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Dumai Tahun 2021-2026.....	1
Tabel 8. 2 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kota Dumai Tahun 2021-2026.....	4
Tabel 8.3 Indikator Kinerja Terwujudnya masyarakat Dumai yang makmur dan madani pada Tahun 2021.....	11

DAFTAR GAMBAR

BAB. I PENDAHULUAN

Gambar 1. 1 Diagram Alir Penyusunan RPJMD	6
Gambar 1. 2 Tema/ Fokus Tahap Pembangunan Daerah	9
Gambar 1. 3 Gambar 1. 2 Tema/ Fokus Tahap Pembangunan Daerah.....	13
Gambar 1. 4 Sinkronisasi antara RPJPD dan RTRW terhadap RPJMD dan Renstra PD	14

BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA DUMAI

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Dumai	3
Gambar 2.2 Peta Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Dumai	23
Gambar 2.3 Peta Rawan Bencana Banjir Kota Dumai	24
Gambar 2.4 Peta Rawan Bencana Lonsor Kota Dumai	24
Gambar 2.5 Sebaran Kasus Covid 19 di Kota Dumai, 2019	25
Gambar 2.6 Jumlah dan Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Dumai, 2020.....	28
Gambar 2.7 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai, 2020	29
Gambar 2.8 Sex Rasio Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2020.....	32
Gambar 2.9 Piramida Penduduk Kota Dumai Tahun 2020	33
Gambar 2.10 Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Dumai, 2015-2020	35
Gambar 2.11 Kontribusi Sektoral PDRB ADHB Kota Dumai, 2010 dan 2020	39
Gambar 2.12 Kontribusi Sektoral PDRB ADHK Kota Dumai, 2010 dan 2020	43
Gambar 2.13 Posisi Kontribusi PDRB ADHB dan ADHK Kota Dumai dan Kabupaten Kota terhadap Provinsi Riau Tahun 2020	46
Gambar 2.14 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai 2011-2020	49
Gambar 2.15 Trend Perkembangan Pendapatan Per Kapita Menurut PDRB ADHB dan ADHK Kota Dumai 2010-2020	54
Gambar 2.16 Perkembangan Inflasi Kota Dumai dan Provinsi Riau, 2015-2020	57
Gambar 2.17 Perkembangan Inflasi Per Sektor dengan Migas Kota Dumai 2020.....	59
Gambar 2.18 Perkembangan Indeks Gini Kota Dumai dan Provinsi Riau Tahun 2010-2020.....	60
Gambar 2.19 Perkembangan Tingkat Kemiskinan (P1) Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional 2010-2020	63
Gambar 2.20 Perkembangan Indek Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional 2010-2020	64
Gambar 2.21 Perkembangan Indek Keperarahan Kemiskinan (P2) Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional 2010-2020	65
Gambar 2.22 Perkembangan Garis Kemiskinan (P3) Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional 2010-2020	67
Gambar 2.23 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2020.....	71
Gambar 2.24 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2020	72
Gambar 2.25 Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2016-2020.....	98
Gambar 2.26 Perkembangan Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Kota Dumai 2016-2020	100
Gambar 2.27 Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2016-2020	103
Gambar 2.28 Perkembangan Rasio Dokter Per 1.000 Penduduk Kota Dumai, 2011-2020	106
Gambar 2.29 Perkembangan Rasio Tenaga Medis dan Para Medis Per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2020.....	107
Gambar 2.30 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di RS Kota Dumai 2015-2020	109
Gambar 2.31 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Dumai Tahun 2015-2020.....	110

Gambar 2.32 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Dumai Tahun 2010-2020.....	112
Gambar 2.33 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kota Dumai Tahun 2016-2020.....	114
Gambar 2.34 Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Dumai Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021	116
Gambar 2.35 Cakupan Pelayanan Balita di Kota Dumai Tahun 2016-2020	117
Gambar 2.36 Cakupan Pelayanan Usia Pendidikan Dasar di Kota Dumai Tahun 2016-2020.....	120
Gambar 2.37 Cakupan Pelayanan Usia Lanjut di Kota Dumai	122
Gambar 2.38 Trend Penyebaran kasus COVID 19 di Kota Dumai dari minggu ke 10 sampai dengan minggu ke 25 Tahun 2020	133
Gambar 2.39 Pencapaian Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Dumai Dari Tahun 2015 sampai dengan 2019	138
Gambar 2.40 Perbandingan Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Dengan Panjang Jalan Seluruhnya (KM) di Kota Dumai Tahun 2010-2020.....	140

BAB. III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Gambar 3. 1 Perkembangan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2020.....	6
Gambar 3. 2 Perkembangan KFD Kota Dumai tahun 2016-2020.....	8
Gambar 3. 3 Perkembangan Komponen Dana Perimbangan Kota Dumai tahun 2016-2020.....	11
Gambar 3. 4 Perkembangan KFDPi Kota Dumai tahun 2016-2020.....	13
Gambar 3. 5 Realisasi Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020	16

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Gambar 5. 1 Pemetaan Kinerja Misi 1	14
Gambar 5.2 Pemetaan Kinerja Misi 2	15
Gambar 5. 3 Pemetaan Kinerja Misi 3	16
Gambar 5. 4 Pemetaan Kinerja Misi 4	17



BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa tujuan pembangunan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, didalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia dan Konsep Otonomi daerah, maka Pembangunan didaerah pada dasarnya harus selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah berdasarkan jangka waktu perencanaan. Dokumen tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Pada tahun 2020 Kota Dumai akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih kepala daerah periode 2021-2026. Berdasarkan hasil Pilkada tersebut nantinya akan ditetapkan Kepala Daerah terpilih dan dilantik menjadi Walikota dan Wakil Walikota periode 2021-2026. Sebagaimana yang di amanatkan didalam Undang-Undang No 25 tahun 2004 dan Undang-Undang 23 tahun 2014, Kepala Daerah wajib menyusun RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik.

Dalam rangka persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke lima (2021-2026) dari Periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025, sesuai dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai selaku koordinator perencanaan pembangunan didaerah menyusun RPJMD bagi Pemerintahan dalam periode 2021-2026.

RPJMD ini mencakup Agenda Pembangunan periode 2021-2026 dengan mempertimbangkan arahan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025. Adapun Perumusan agenda, sasaran, kebijakan dan strategi pembangunan juga mempertimbangkan dinamika geostrategis dan analisis atas berbagai tantangan utama yang akan dihadapi dalam pembangunan 2021-2026 dengan memperhatikan hasil pelaksanaan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021.

Kejadian Wabah *Corona Virus Disease 19* (Covid 19) yang terjadi pada akhir tahun 2019 dan masih berlanjut sampai saat ini telah merubah semua asumsi-asumsi pembangunan seluruh negara termasuk Indonesia sampai ke tingkat kabupaten/kota juga harus menjadi pertimbangan tersendiri dalam menyuunan rencana pembangunan daerah. Hal ini mengharuskan setiap tingkat pemerintahan mulai menyusun strategi dan arah kebijakan pembangunan yang handal dan responsiv terhadap kejadian bencana non alam agar tidak menjadi krisis yang berkepanjangan. Kejadian Wabah Covid 19 yang memicu krisis kesehatan telah berdampak pada terjadinya perlambatan ekonomi yang diperkirakan akan menyebabkan resesi ekonomi global. indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketenagakerjaan menjadi hal yang harus mendapat perhatian khusus oleh pemerintah karena wabah Covid 19 dan kebijakan pembatasan-pembatasan aktivitas sosial dan fisik menyebabkan adanya ketidakpastian ekonomi diseluruh negara. Oleh sebab itu dibutuhkan rumusan strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah yang sudah mengimplementasikan arah kenormalam baru sehingga harapan untuk menekan penyebaran Covid 19 dapat diwujudkan tanpa menimbulkan perlambatan ekonomi daerah yang signifikan khususnya bagi masyarakat kota Dumai.

Penyusunan RPJMD Kota Dumai tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari tahapan ke IV RPJPD Kota Dumai tahun 2005-2025. Pada RPJPD tersebut Visi yang akan dicapai adalah Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Kokoh, Dengan Masyarakat yang Bertumpu Pada Budaya Melayu, Menuju Dumai Madani yang Hijau. Adapun misi dari visi RPJPD Kota Dumai Tahun 2005-2025 adalah

1. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri;
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, agamis dan berjiwa diri Melayu;

3. Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang;
4. Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik;
5. Mewujudkan Dumai sebagai lingkungan yang hijau.

Selain RPJPD, setiap kebijakan pembangunan juga harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah yang mengatur tentang rencana struktur ruang, rencana pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD adalah: politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (*top-down*); dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politik adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang berasal dari proses politik. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik, bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan *stakeholders* dimaksudkan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Dokumen Rencana hasil proses perencanaan atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan RPJMD dilakukan melalui berbagai tahapan analisis setiap urusan pembangunan, penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan *stakeholders* dan pemangku kepentingan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

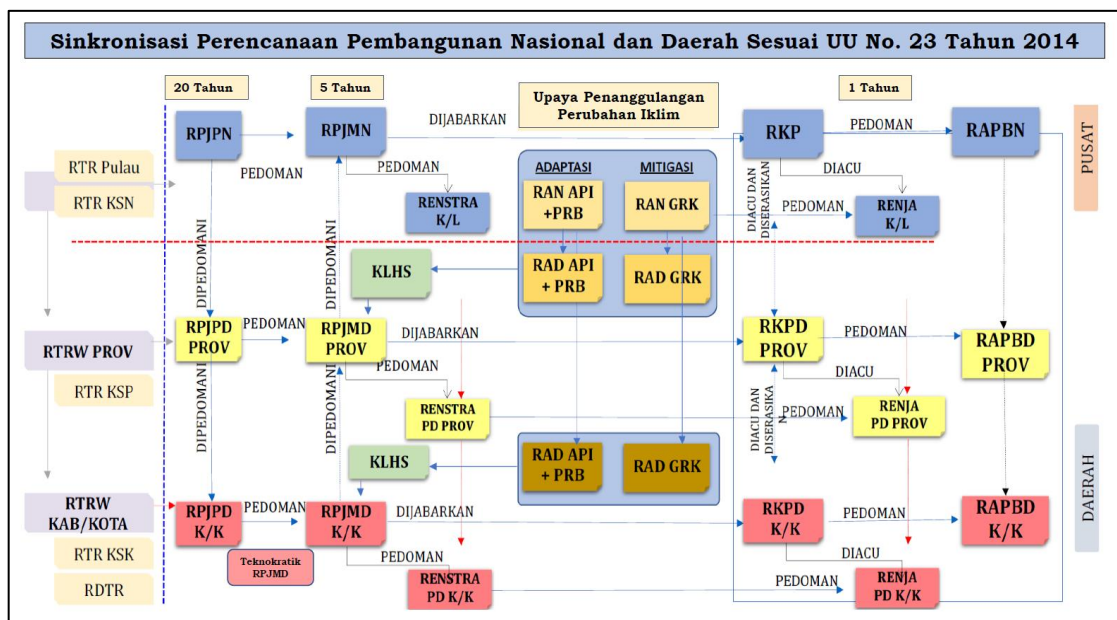
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rancangan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024.
 17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
 18. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruangan Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RPJMD Kota Dumai memperhatikan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Penyusunan RPJMD juga memperhatikan RPJMD Provinsi Riau, dan RPJMN dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan untuk mewujudkan hamonisasi pembangunan daerah yang selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

RPJP Nasional dan RPJP Provinsi yang juga telah diacu dalam RPJP Kota Dumai akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. RPJMD ini akan dijabarkan dalam RKPD dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Sementara RPJMD juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja Perangkat Daerah. Hubungan Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Diagram Alir Penyusunan RPJMD

Selain dokumen RPJPN, RPJMN, RPJPD dan RTRW, dalam penyusunan RPJMD, Pemerintah Kota Dumai juga memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral, yaitu dokumen Kajian lingkungan hidup strategis dan Strategi penanggulangan kemiskinan daerah.

1.3.1 Hubungan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Sesuai dengan amanat Undang-undang no.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional dan Undang-

undang no.23 Tahun 2004 dijelaskan bahwa RPJMD disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah Kota Dumai menyusun RPJMD Kota Dumai dengan mempedomani Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Secara umum RPJMD Kota Dumai akan menterjemahkan 5 (lima) arahan utama Presiden sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024. Adapun ke lima arahan utama presiden tersebut adalah:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun kegiatan-kegiatan strategi pemerintah pusat yang berlokasi di Kota Dumai adalah sebagai berikut:

- Jalan tol trans Sumatera Aceh-lampung, Kota Dumai termasuk bagian dari jalan tol pekanbaru-medan (Rantau Parapat-Sp.Sigambal-Dumai).
- Pembangunan dan pengembangan kilang minyak (Kilang RDMP)
- SPALD-S skala kota (Pembangunan dan Rehabilitasi IPLT);
- Sistem Pengelolaan Persampahan skala kota (TPA)

1.3.2 Hubungan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kota Dumai Tahun 2005-2025

Tahapan pembangunan jangka panjang merupakan penjabaran dari misi dan sasaran pembangunan. Tahapan ini menunjukkan langkah-langkah per lima tahunan yang hendak dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Dumai. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan merupakan cerminan dari tingkat urgensi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pengaturan waktu dan pengadaaan dana. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, namun tetap harus berkesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pokok dan perwujudan visi pembangunan jangka panjang daerah. Pentahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai untuk jangka waktu 20 tahun, terbagi dalam 4 (empat) tahapan atau periode dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai dengan waktu pelaksanaan untuk setiap periode atau tahapan RPJMD selama lima tahun yaitu RPJMD pertama (tahun 2005-2010); RPJMD kedua (tahun 2011-2015); RPJMD ketiga (tahun 2016-2020) dan RPJMD keempat (tahun 2021-2026). RPJMD Kota Dumai 2021-2026 merupakan tahapan IV RPJPD Kota Dumai Tahun 2005-2025. Adapun visi dan misi jangka panjang yang tertuang pada Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 2014 tentang RPJPD Kota Dumai Tahun 2005-2025 adalah:

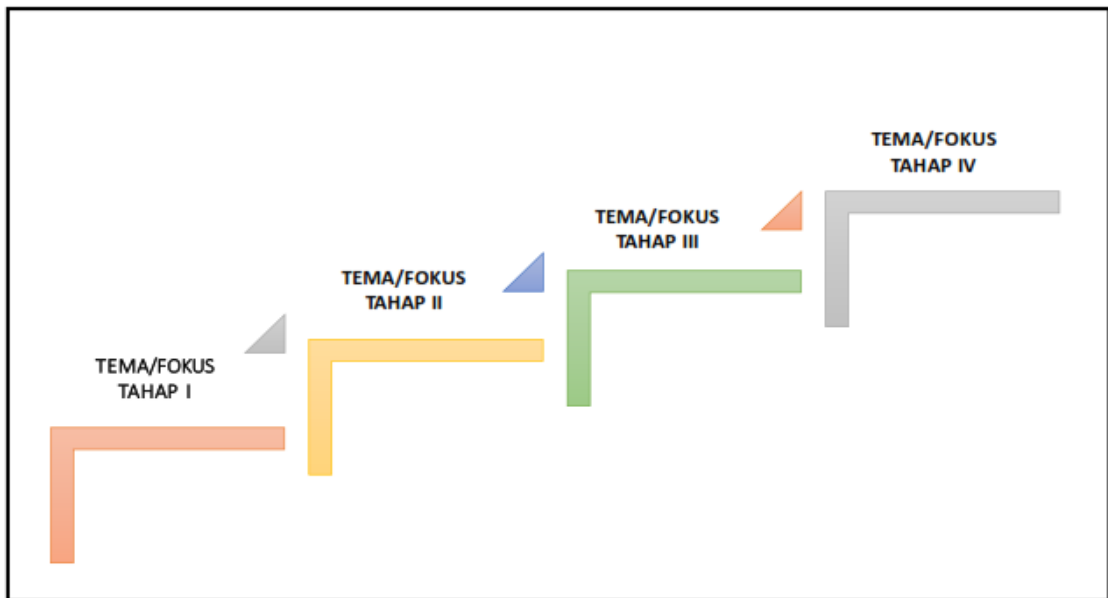
“TERWUJUDNYA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI YANG KOKOH, DENGAN MASYARAKAT YANG BERTUMPU PADA BUDAYA MELAYU, MENUJU DUMAI MADANI YANG HIJAU”

Upaya mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kota Dumai akan dicapai melalui misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri;
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, agamis dan berjati diri Melayu;
3. Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang;
4. Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik;
5. Mewujudkan Dumai sebagai lingkungan yang hijau.

Adapun tahapan pencapaian visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025 dilaksanakan dalam 4 tahapan prioritas pembangunan daerah yang akan dituangkan

implementasinya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai.



Gambar 1.2 Tema/ Fokus Tahap Pembangunan Daerah

Adapun Tahapan Prioritas pembangunan jangka panjang Kota Dumai Tahun 2005-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Tahapan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Kota Dumai 2005-2025

Misi	Prioritas Pembangunan			
	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
	2005 - 2010	2010 - 2015	2015 - 2020	2020 - 2025
Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing	Terbangunnya perekonomian untuk mencapai peningkatan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Dumai agar memiliki kemandirian, kemampuan dan daya saing	Meningkatnya perekonomian untuk mencapai peningkatan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Dumai agar memiliki kemandirian, kemampuan dan daya saing	Meningkatnya perekonomian untuk mencapai peningkatan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Dumai agar memiliki kemandirian, kemampuan dan daya saing	Terwujudnya perekonomian daerah yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera dengan menekankan pada terbangunnya perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, agamis dan berjati diri Melayu	Terbangunnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia melalui upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan produktivitas masyarakat Kota Dumai	Meningkatnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia melalui upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan produktivitas masyarakat Kota Dumai	Meningkatnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia melalui upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan produktivitas masyarakat Kota Dumai	Mengoptimalkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia melalui upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan produktivitas masyarakat Kota Dumai
Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas sesuai daya	Terlaksananya pembangunan di berbagai bidang yang penyediaan infrastrktur	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dalam rangka pemenuhan akses kebutuhan dasar masyarakat serta	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dalam rangka pemenuhan akses kebutuhan dasar	Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dalam rangka pemenuhan akses kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan penunjang lain

Misi	Prioritas Pembangunan			
	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
	2005 - 2010	2010 - 2015	2015 - 2020	2020 - 2025
dukung dan fungsi ruang		kebutuhan penunjang lain di berbagai bidang	masyarakat serta kebutuhan penunjang lain di berbagai bidang	di berbagai bidang
Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik	Mendorong pemerintahan yang memiliki sumberdaya aparatur yang profesional dan berkompetensi sesuai keahlian dibidang masing-masing, serta mendorong pelayanan publik yang terpadu, cepat dan sederhana sehingga tercipta pemerintahan yang baik	Terselenggaranya pemerintahan yang mengembangkan sumberdaya aparatur yang profesional dan berkompetensi dibidangnya, dan pelayanan publik yang secara terpadu, cepat, sederhana dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik	Meningkatnya pemerintahan dalam mewujudkan sumberdaya aparatur yang profesional dan berkompetensi dibidangnya, dan akses pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan primadalam mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang baik	Terwujudnya pemerintahan daerah yang baik melalui sumberdaya aparatur yang profesional dan memiliki kompetensi di bidangnya dan pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima
Mewujudkan lingkungan kota yang hijau	Terbangunnya pegelolaan kota yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan Rencana Tata Ruang Wilayah	Meningkatnya pengelolaan kota yang ramah lingkungan, sesuai daya dukung lingkungan dan mengendalikan pembangunan kota yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan yang sesuai dengan RTRW, dengan mengoptimalkan peran stakeholder.	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan yang sesuai dengan RTRW, dengan mengoptimalkan peran stakeholder.

1.3.3 Hubungan RPJMD Kota Dumai 2012-2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 dijelaskan bahwa visi yang akan dicapai pada akhir perencanaan RPJMD Provinsi Riau adalah terwujudnya Riau yang berdaya saing, bermartabat dan unggul di Indonesia yang diterjemahkan kedalam lima misi pembangunan Provinsi Riau. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam menyusun RPJMD, Pemerintah Kota Dumai memedomani RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Adapun kebijakan pembangunan Provinsi Riau yang berlokasi di kota Dumai, antara lain:

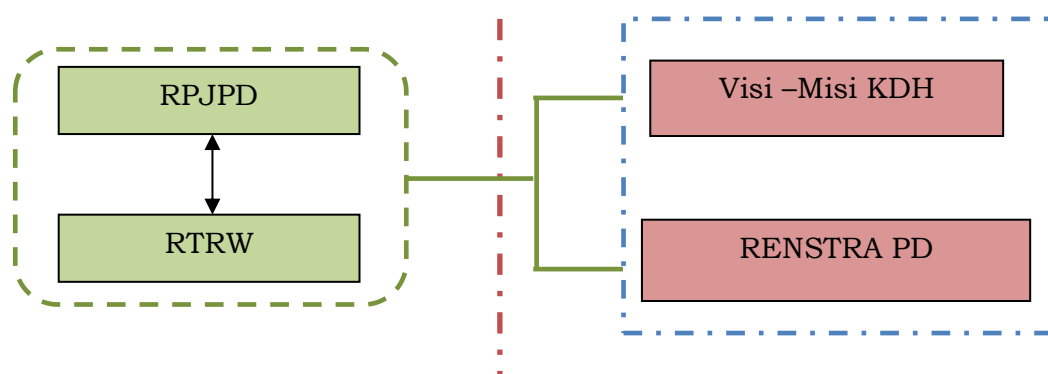
- Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Kereta Api Dumai-Bukit Kayu Kapur sepanjang 24 km pada tahun 2017 melalui SK Gubernur Riau nomor Kpts.584/VII/2017 Tanggal 25 Juli 2017;
- Dumai sebagai pelabuhan utama di tatanan kepelabuhanan Provinsi Riau
- Untuk pelabuhan khusus industri, akan dikembangkan di Selingsing (Dumai);
- Kota Dumai juga ditetapkan sebagai salah satu daerah Pengembangan Kawasan perikanan terpadu berbasis masyarakat;
- Pantai Puak – Dumai ditetapkan termasuk Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN).

1.3.4 Hubungan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dengan RTRW Kota Dumai tahun 2019- 2039.

Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional dijelaskan bahwa konsistensi pemanfaatan ruang dapat dicapai dengan mengintegrasikannya kedalam dokumen rencana pembangunan. Hal ini menekankan bahwa rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial disetiap sektor, lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat disinergis dan berkelanjutan.

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur

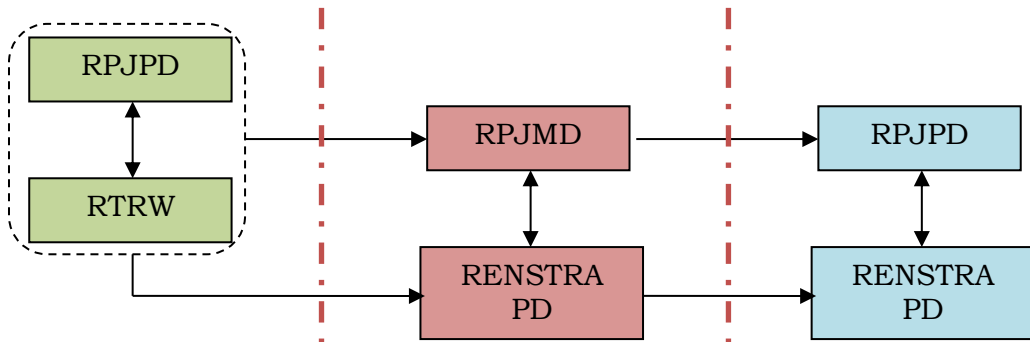
pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berjangka waktu 5 tahun. Rencana tata ruang adalah hasil suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang wilayah. Sinkronisasi antara RTRW dan RPJMD menjadi krusial karena dokumen RPJMD merupakan dokumen rencana pembangunan yang bersifat implementatif dan mengakomodir visi dan misi kepala daerah terpilih. Gambar berikut menggambar konsistensi perencanaan jangka panjang ke jangka menengah



Gambar 1.3 Sinkronisasi antara RPJPD dan RTRW terhadap Visi – Misi KDH dan Renstra PD

Sumber: Bappenas, 2015

Penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJMD) sendiri dilakukan secara paralel dan iteratif dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah oleh masing- masing perangkat daerah. Dalam hal ini, RTRW (rencana tata ruang) juga menjadi acuan dalam penyusunan Renstra perangkat daerah, khususnya bagi urusan-urusan yang bersifat spasial. Urusan-urusan yang bersifat spasial dan memiliki keterkaitan erat dengan rencana tata ruang adalah urusan-urusan yang kegiatannya memiliki implikasi terhadap ruang, misalnya pengembangan infrastruktur (urusan Pekerjaan Umum), pengembangan kawasan industri (urusan industri), penetapan destinasi kawasan pariwisata (urusan pariwisata), dan sebagainya. Kedudukan dan keterkaitan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah (PD) terhadap RTRW dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.4 Sinkronisasi antara RPJPD dan RTRW terhadap RPJMD dan Renstra PD

Sumber: Bappenas, 2015

1.3.5 Hubungan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian lingkungan hidup strategis di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang mengamankan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengamankan bahwa Rencana pembangunan Daerah Pemerintah Daerah menyusun KLHS RPJMD dalam rangka mewujudkan RPJMD sesuai dengan prinsip berkelanjutan.

Hal ini tentu berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamankan bahwa untuk mencapai sasaran TPB mengarahkan Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan salah satunya Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB kabupaten/kota, sehingga dihasilkan rencana aksi TPB yang terukur dan jelas dalam periode waktu tertentu. Secara umum, maksud pembuatan KLHS RPJMD Kota Dumai adalah untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis TPB termuat dalam Rancangan RPJMD Kota Dumai.

1.4 Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan RPJMD Kota Dumai adalah menyediakan dokumen pembangunan daerah untuk periode 2021-2026 tahun.

Tujuan Penyusunan RPJMD Kota Dumai tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan data *performance* dan analisis kinerja pembangunan daerah 5 tahun yang lalu.
2. Memberikan gambaran permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah tahun 2021-2026.
3. Menyediakan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah serta Indikator kinerja pembangunan daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.
4. Menjaga konsistensi rancangan dokumen RPJMD terhadap dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Penyusunan dokumen RPJMD 2021-2026 meliputi:

1. BAB I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

2. BAB II: Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

3. BAB III: Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan di masa lalu yang meliputi kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu yang meliputi proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; serta kerangka pendanaan yang meliputi proyeksi pendapatan dan belanja serta penghitungan kerangka pendanaan.

4. BAB IV: Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan Isu Strategis Kota Dumai Tahun 2021-2026 dengan mempertimbangkan RPJPD Tahap IV dan analisis lingkungan strategis.

5. BAB V: Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Bab ini menguraikan tentang uraian visi kepala daerah terpilih, artikulasi atau penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan visi dan jangka waktunya; pernyataan dan penjelasan masing-masing misi yang merupakan penjabaran dari visi; rumusan dan pernyataan masing-masing tujuan dan sasaran, serta gambaran keterkaitan elemen-elemen perencanaan dalam tabel/matrik.

6. BAB VI: Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kemudian untuk Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

7. BAB VII: Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, dan Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

8. BAB VIII: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini membahas Penetapan indikator kinerja daerah dengan tujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

9. BAB IX: Penutup



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah Kota Dumai memuat sejarah, aspek geografi dan demografi, serta tiga aspek pencapaian kinerja sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah. Ketiga aspek tersebut yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat (ekonomi dan sosial), aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah dan diuraikan sebagai berikut:

2.1. Sejarah Kota Dumai

Kota Dumai merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia, sekitar 188 km dari Kota Pekanbaru. Sebelumnya, Kota Dumai merupakan kota terluas nomor dua di Indonesia setelah Kota Manokwari. Tercatat dalam sejarah, Dumai merupakan sebuah dusun kecil di pesisir timur Provinsi Riau yang kini mulai menggeliat menjadi mutiara di pantai timur Sumatera.

Nama Dumai menurut cerita rakyat tentang Puteri Tujuh, berasal dari kata di lubuk dan umai (sejenis binatang landak) yang mendiami lubuk tersebut. Karena sering diucapkan cepat, lama kelamaan kata-kata tersebut bertaut menjadi d'umai dan selanjutnya menjadi dumai.

Pada era tahun 1930-an, Dumai merupakan suatu dusun nelayan kecil yang terdiri atas beberapa rumah nelayan. Penduduknya bertambah ketika Jepang mendatangkan kaum romusha (pekerja paksa zaman penjajahan Jepang) dari Jawa. Seiring perubahan waktu, terjadi perubahan status Dumai sebagai berikut: 1. Tahun 1945-1959, status Dumai tercatat sebagai desa; 2. Tahun 1959-1963, Dumai masuk dalam wilayah Kecamatan Rupert; 3. Tahun 1963-1964, Dumai berpisah dari Kecamatan Rupert dan berubah status menjadi kawedanan;

Berdasarkan PP No.8 Tahun 1979 tertanggal 11 April 1979, Dumai berubah status menjadi Kota Administratif (merupakan kota administratif pertama di Sumatera dan ke-11 di Indonesia) di bawah Kabupaten Daerah Tingkat (Dati) II Bengkalis.

Berdasarkan UU No.16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829), Dumai berubah status menjadi Kotamadya sehingga menjadi Kotamadya Dati II Dumai. Seiring perkembangan politik di Indonesia, berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 maka Kotamadya Dumai berubah menjadi Kota Dumai. Masa

jabatan WaliKota Dumai pertama dari tanggal 27 April 1999 sehingga tanggal 27 April dijadikan hari ulang tahun Kota Dumai.

Kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Dumai mengalami beberapa kali peningkatan status. Semasa bergabung dengan Kabupaten Bengkalis, Dumai berstatus sebagai Kota Administratif, yang kemudian ditingkatkan menjadi Kota Madya. Setelah diberlakukannya Otonomi Daerah, Dumai dimekarkan menjadi sebuah kota yang berdiri sendiri, berpisah dari Kabupaten Bengkalis. Pada awal pembentukannya, Kota Dumai hanya terdiri atas 3 kecamatan, 13 kelurahan dan 9 desa dengan jumlah penduduk 15.699 jiwa dengan tingkat kepadatan 83,85 jiwa/km².

Filosofis dasar peningkatan status Dumai dalam pengelolaan wilayah administrasi pemerintahan ialah untuk memperpendek rentang kendali, mempercepat tingkat pelayanan dan memperbesar peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, disamping menangkap peluang pengembangan ekonomi.

Kota Dumai dijuluki dengan Kota Pengantin Berseri, PENGANTIN BERSERI adalah singkatan dari Kota PENGANTIN (Pelabuhan, Perdagangan, Tourism dan Industri) BERSERI (Bersih, Semarak, Rukun dan Indah) SEHAT (Sejahtera, Harmonis, Aman dan Tertib).

2.2. Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi Kota Dumai perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi Karakteristik Lokasi dan Wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografis, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kota Dumai.

2.2.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah menjelaskan tentang luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografi, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan di Kota Dumai.

2.2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Dumai Memiliki wilayah perairan seluas 71.393 (tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) hektar dengan luas per kecamatan seperti terlihat pada Tabel 2.1.

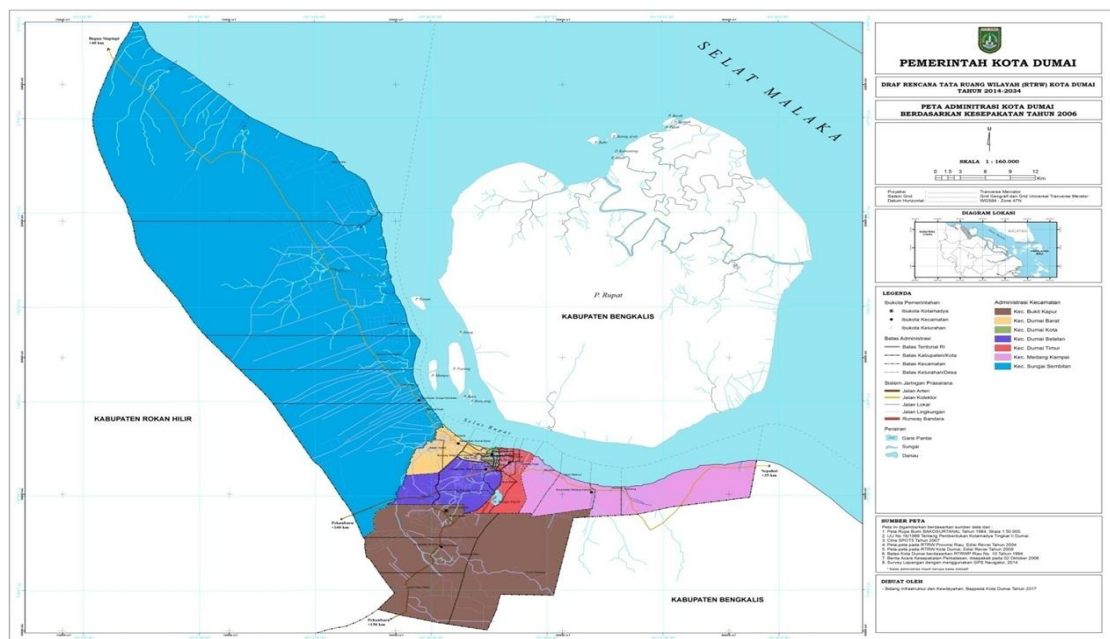
Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Dumai
Tahun 2020

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (km ²)	Presentase Luas Wilayah (%)	Jumlah Kelurahan
1	Bukit Kapur	Bukit Nenas	200,00	11,58	7
2	Medang Kampai	Teluk Makmur	373,00	21,59	4
3	Sungai Sembilan	Lubuk Gaung	975,38	56,47	6
4	Dumai Barat	Purnama	44,98	2,60	4
5	Dumai Selatan	Bukit Datuk	73,50	4,25	5
6	Dumai Timur	Teluk Binjai	47,52	2,75	5
7	Dumai Kota	Laksamana	13,00	0,75	5
Total			1.727,38	100,00	36

Secara administratif Kota Dumai seperti yang dapat dilihat pada

2.1 berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Selat Rupat, Pulau Rupat, dan Selat Malaka
- Sebelah Timur : Kec Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Selatan : Kec Batin Solapan Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Barat : Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir



Gambar 2.1: Peta Administrasi Kota Dumai
 Sumber: Peraturan Daerah Kota Dumai No.15 Tahun 2019

Kota Dumai dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Pembentukan Kabupaten/Kota Baru di

Provinsi Riau sebagai pengejawantahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada awal terbentuknya Kota Dumai meliputi 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Bukit Kapur.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai sehingga menjadi 5 (lima) Kecamatan. Pada tahun 2009, Kota Dumai kembali mengalami pemekaran menjadi 7 (tujuh) Kecamatan, melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan Dumai Kota dan Dumai Selatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelurahan Bagan Besar, Kelurahan Bukit Kapur dan Kelurahan Sungai Geniot, maka saat ini terdapat 7 (tujuh) Kecamatan dan 36 (tiga puluh enam) Kelurahan dengan rincian Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pembagian Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan dan Kelurahan di Kota Dumai Tahun 2019

No	Wilayah Administrasi	
	Kecamatan	Kelurahan
1	Bukit Kapur	1 Bagan Besar
		2 Kayu Kapur
		3 Bukit Nenas
		4 Gurun Panjang
		5 Kampung Baru
2	Dumai Barat	1 Bagan Keladi
		2 Pangkalan Sesai
		3 Purnama
		4 Simpang Tetap Darul Ichsan
3	Dumai Kota	1 Bintang
		2 Dumai Kota
		3 Laksamana
		4 Rimba Sekampung
		5 Sukajadi
4	Medang Kampai	1 Guntung
		2 Mundam
		3 Pelintung
		4 Teluk Makmur
5	Dumai Timur	1 Bukit Batrem
		2 Buluh Kasap
		3 Jaya Mukti
		4 Tanjung Palas
		5 Teluk Binjai
6	Dumai Selatan	1 Bukit Datuk
		2 Bukit Timah
		3 Bumi Ayu
		4 Mekar Sari
		5 Ratu Sima
7	Sungai Sembilan	1 Bangsal Aceh
		2 Basilam Baru
		3 Basilam Baru
		4 Batu Teritip
		5 Lubuk Gaung

Sumber: Peraturan Daerah Kota Dumai No.15 Tahun 2019.

2.2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Posisi astronomis Kota Dumai terletak pada posisi antara 101° 0' 38"-101° 43' 33" Bujur Timur, 01° 26' 50"-02° 15' 40" Lintang Utara dan memiliki luas daratan 206.673,36 (dua ratus enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh enam) hektar.

2.2.1.3 Topografi

Secara topografi, hampir sebagian besar wilayah Kota Dumai merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-15 meter di atas permukaan laut (mdpl) seperti yang terlihat pada Tabel 2.3. Memiliki kemiringan antara 0-3 %, hanya sebagian kecil merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan lereng antara 8-15%.

Tabel 2.3
Tinggi Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2020

No.	Kecamatan	Ketinggian (M DPL)	Jarak ke Ibukota (Km)
1	Bukit Kapur	25-50	5,40
2	Medang Kampai	0-25	17,64
3	Sungai Sembilan	0-25	16,43
4	Dumai Barat	0-25	9,83
5	Dumai Selatan	2-25	6,71
6	Dumai Timur	0-25	10,32
7	Dumai Kota	0-25	9,85

Sumber: BPS Kota Dumai, 2020

Kota Dumai berada di tepi pantai selatan Selat Rupat dengan kondisi topografi yang relatif datar, khususnya di Kecamatan Dumai Barat dan Timur, sedangkan Kecamatan lainnya yaitu Bukit Kapur, Medang Kampai dan Sungai Sembilan, kondisi topografinya sedikit bergelombang. Jika dilihat dari ketinggiannya, daerah yang datar dengan kemiringan lereng 0-2% terdapat sekitar 41.032 Ha (64,90%); daerah yang landai sampai berombak memiliki kemiringan lereng 2-15% seluas 15.642 Ha (24,71%), daerah bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar antara 15-40% seluas 364 Ha (0,58%) dan daerah berbukit memiliki kemiringan lereng >40% sekitar 6.200 Ha (9,81%) yang terletak di bagian Selatan Kota Dumai yaitu Kelurahan Bukit Timah dan Bukit Datuk di Kecamatan Dumai Barat, Kelurahan Bukit Batrem di Kecamatan Dumai Timur, Kelurahan Bukit Nenas, Bukit Kayu Kapur di Kecamatan Bukit Kapur.

Dari kondisi topografinya, diperkirakan Kota Dumai dapat digunakan untuk pembangunan kota namun perkembangannya masih dibatasi oleh kendala-kendala pemanfaatan lahan. Selain untuk kawasan pembangunan

kota, Kota Dumai juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi kegiatan pertanian. Hal ini juga didukung oleh kondisi keadaan tanah pada hamparan wilayah Kota Dumai yang memiliki 2 (dua) kelompok atau golongan tanah, yaitu: pertama jenis tanah Typic Trophaquepts atau Fluvisol Gleik dan jenis kedua adalah Hydric Trophemis atau Humic Histosol. Pembentukan kedua jenis tanah ini tidak lepas dari adanya bentukan lapisan tanah gambut, yang secara historis menjadi lapisan tanah dominan di seluruh wilayah Kota Dumai. Dari beberapa penelitian mengenai karakteristik tanah gambut di wilayah ini menunjukkan bahwa tanah gambut ini memiliki kedalaman hingga 3 m dan rata-rata kedalaman 0,5 m. Apabila dilakukan pengamatan secara komprehensif dengan didasari karakteristik tanah gambut yang dimiliki dan elevasi wilayah rata-rata yang berkisar 2 meter di atas permukaan laut, maka pada hakekatnya kemampuan lahan di Kota Dumai berada pada tingkat kemampuan rendah sampai sedang yang masih memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan.

2.2.1.4 Geologi

Kota Dumai terdiri dari dataran rendah di bagian utara dan sebagian dataran tinggi sebelah selatan. Umumnya struktur tanah terdiri dari tanah *Podsolik* merah kuning dari batuan endapan dan *Alluvial* serta tanah *Organosol* dan *Gley* humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Secara geologi pada medan dataran disusun oleh batuan sedimen berumur muda (Kuarter) berupa alluvium (Qp) dengan bahan penyusun lempung, pasir, kerikil, sisa tumbuhan (gambut), dan rawa gambut, sedangkan pada daerah perbukitannya disusun oleh batuan sedimen berumur tua (Tersier) dengan bahan penyusun batu lumpur kelabu berkarbon terbioturbasikan, batu pasir halus, umumnya kehalusan rendah sampai sangat rendah.

Kemampuan lahan di Wilayah Kota Dumai secara umum sangat baik. Terdapat dua kelompok atau golongan tanah, yaitu Typic Trophaquepts atau Fluvisol Gleik dan Hydric Trophemis atau Humic Histosol. Pembentukan kedua jenis tanah ini tidak lepas dari adanya bentukan lapisan tanah gambut, yang secara historis menjadi lapisan tanah dominan di seluruh wilayah Kota Dumai ini. Dilihat secara topografi, Kota Dumai berada pada lahan bergambut dengan kedalaman 0–3 m dan ketinggian rata-ratanya berkisar 5 meter di atas permukaan laut. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pengaliran air buangan kota agak sulit, dan pada tempat-tempat tertentu sering terjadi banjir terutama pada air laut sedang pasang.

Mengingat bahwa tanah gambut di wilayah Kota Dumai ini rata-rata memiliki kedalaman 0,5m yang berarti tidak terlalu dalam, dan merujuk bahwa

pada lapisan di bawah gambut ini adalah tanah dasar yang memiliki daya dukung yang cukup baik, maka dengan memanfaatkan perkembangan teknologi/geoteknik yang sudah maju, kendala struktur tanah di Kota Dumai ini tidaklah menjadi permasalahan penting dalam upaya membangun infrastruktur perkotaan. Persoalan penting yang harus menjadi dasar pertimbangan dalam upaya mengembangkan berbagai infrastruktur perkotaan, khususnya di bagian wilayah Kota Dumai Lama (Dumai Barat dan Dumai Timur) ini adalah elevasi wilayahnya yang rata-rata hanya berkisar 2 meter di atas permukaan laut.

Terkait dengan pembangunan sistem drainase kota dan karakteristik pasang surut laut yang sangat berpengaruh terhadap muka air sungai, maka diperlukan berbagai upaya, khususnya dengan dukungan teknologi dan manajemen sumber daya kawasan yang memadai. Untuk pengembangan kota, karakteristik kondisi lahan yang demikian berkemampuan rendah untuk mendukung pembangunan infrastruktur perkotaan yang berdimensi dan berskala besar. Hal ini berarti bahwa untuk membangun infrastruktur dimaksud, akan memerlukan teknologi yang lebih maju dan biaya yang lebih besar, namun dengan kemajuan teknologi infrastruktur yang telah berkembang pesat saat ini, maka kendala kemampuan lahan tersebut bukan lagi menjadi kendala penting.

2.2.1.5 Hidrologi

Wilayah Kota Dumai dialiri oleh Sungai Dumai yang membentang dari timur ke barat yang merupakan saluran drainase utama di Kota Dumai. Hidrologi air tanah di Kota Dumai sebagian besar bersifat kurang baik untuk air minum. Kondisi air tanah di Kota Dumai yang berasal dari air tanah dangkal (sumur gali dan sumur pompa) dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter, maupun air tanah dalam (sumur bor), pada umumnya kurang baik. Sebagian lagi, tepatnya di wilayah yang tinggi seperti di Kelurahan Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Batrem, Bukit Timah dan Kecamatan Bukit Kapur memiliki permeabilitas dan porositas yang tinggi yang menjadi sumber air tanah dangkal di Kota Dumai.

Di Kota Dumai terdapat 53 sungai yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai seperti yang tersaji pada Tabel 2.4. Sungai Buluala, Sungai Senepis, dan Sungai Masjid merupakan tiga sungai yang terpanjang.

Tabel 2.4
Sungai-sungai yang Mengalir Menurut Kecamatan di Kota Dumai

No	Kecamatan	Nama Sungai
1.	Bukit Kapur	Sungai Besilang
2.	Medang Kampai	1. Sungai Puak 2. Sungai Kemeli Kecil 3. Sungai Pelintung 4. Sungai Kemeli 5. Sungai Beruang 6. Sungai Selinsing 7. Sungai Guntung 8. Sungai Mundam 9. Sungai Teluk Makmur
3.	Sungai Sembilan	1. Sungai Geniot 2. Sungai Geniot Kecil 3. Sungai Buluhala 4. Sungai Teras 5. Sungai Penyengat 6. Sungai Ilir 7. Sungai Danau 8. Sungai Hulu 9. Sungai Sembilan 10. Sungai Mampu 11. Sungai Mampu Kecil 12. Sungai Nerbit Kecil 13. Sungai Nerbit Besar 14. Sungai Paul 15. Sungai Mesjid 16. Sungai Banain 17. Sungai Saliyo 18. Sungai Bulu Ala 19. Sungai Tambuan 20. Sungai Teritib 21. Sungai Selat Mati 10. Sungai Lubuk Gaung
4.	Dumai Barat	Sungai Mesjid
5.	Dumai Selatan	Sungai Mesjid
6.	Dumai Timur	Sungai Dumai
7.	Dumai Kota	Sungai Dumai

Sumber: BPS Kota Dumai, 2020

2.2.1.6 Kilmatologi

Suhu menjadi salah satu variabel perubahan iklim. Suhu diartikan sebagai ukuran kuantitatif terhadap temperatur, panas dan dingin, diukur dengan termometer. Menurut Tri Cahyonom (2007) suhu adalah keadaan panas atau dinginnya udara. Suhu udara tertinggi di muka bumi merupakan daerah tropis dan makin ke kutub akan semakin dingin. Jika dilihat dari dataran, maka dataran terendah cenderung memiliki suhu yang tinggi dan semakin tinggi dataran suhu cenderung semakin turun. Pengukuran suhu dapat digunakan termometer, baik termometer maksimum dan termometer

minimum. Biasanya pengukuran suhu dinyatakan dalam skala Celcius (C), Reamur (R), dan Fahrenheit (F).

Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut yaitu iklim tropis basah dengan suhu udara pada tahun 2020 berkisar antara 22,40°C-35,05°C, dengan suhu tertinggi terjadi pada bulan Maret yaitu 36,40°C dan suhu terendah terjadi pada bulan Februari yaitu 21,40°C.

Sedangkan kelembaban udara rata-rata di tahun 2020 berkisar antara 49,83%-98,92% dengan kelembaban tertinggi terjadi pada bulan Juni, September, November dan Desember yaitu 100% dan kelembaban terendah terjadi pada bulan Oktober yaitu 43%. Perkembangan suhu udara dan kelembaban menurut bulan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Suhu dan Kelembaban Udara Kota Dumai Tahun 2020

No	Bulan	Suhu Udara (oC)			Kelembaban Udara (%)		
		Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-Rata
1	Januari	34,80	22,80	27,40	98,00	49,00	81,00
2	Februari	35,10	21,40	27,50	99,00	45,00	78,00
3	Maret	36,40	22,20	27,80	98,00	45,00	80,00
4	April	35,70	22,50	26,60	97,00	50,00	84,00
5	Mei	35,60	23,00	27,80	98,00	55,00	85,00
6	Juni	34,50	22,40	27,10	100,00	54,00	85,00
7	Juli	33,80	22,70	26,80	99,00	50,00	84,00
8	Agustus	35,00	22,80	27,80	99,00	44,00	80,00
9	September	34,60	22,00	26,30	100,00	54,00	87,00
10	Oktober	35,90	22,00	27,20	99,00	43,00	81,00
11	November	34,60	22,60	26,70	100,00	52,00	86,00
12	Desember	34,60	22,40	26,30	100,00	57,00	88,00
	Rata-Rata	35,05	22,40	27,11	98,92	49,83	83,25

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka, 2021

Terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Jumlah hari hujan dari tahun 2010-2020 mengalami peningkatan dari 112 hari pada tahun 2010 menjadi 206 hari hujan pada tahun 2020 dengan pertumbuhan setiap tahun sebesar 9,61%.

Jumlah hari hujan terbanyak pada tahun 2020 terjadi pada bulan September dan November masing-masing sebanyak 25 hari dan paling sedikit terjadi bulan Maret sebanyak 11 hari. Perkembangan jumlah hari di Kota Dumai selama periode tahun 2010-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Perkembangan Jumlah Hari Hujan di Kota Dumai, 2010-2020

No	Bulan	Hari Hujan (Hari)											Pertumbuhan / Tahun (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Januari	15	19	13	13	13	13	16	20	14	10	13	1,46
2	Februari	12	6	11	11	11	11	11	21	5	5	13	20,81
3	Maret	12	15	11	11	11	11	9	12	12	8	11	1,77
4	April	13	16	11	11	11	11	17	21	11	15	20	9,20
5	Mei	17	5	14	14	14	14	15	21	19	7	19	25,53
6	Juni	13	9	7	7	7	7	15	6	4	10	15	16,80
7	Juli	17	9	14	14	14	14	13	9	10	5	16	15,17
8	Agustus	13	8	18	18	18	18	9	17	14	7	15	17,21
9	September	-	15	7	7	7	7	13	20	13	8	25	22,53
10	Oktober	-	22	17	17	17	17	15	20	22	23	13	-3,01
11	November	-	26	21	21	21	21	21	20	21	12	25	4,65
12	Desember	-	14	24	24	24	24	24	19	18	9	21	12,78
Jumlah		112	164	168	168	168	168	174	206	163	119	206	9,61

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka, 2021

Sementara itu perkembangan jumlah curah hujan selama tahun 2010-2020 mengalami peningkatan dari 2012 mm³ kemudian meningkat menjadi 2.507 mm³ pada tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,86%. Jumlah curah hujan terbanyak pada tahun 2020 terjadi pada bulan November yaitu 366 mm³ sedangkan terkecil terjadi pada bulan Februari yaitu 74,70 mm³. Perkembangan jumlah curah hujan di Kota Dumai selama periode tahun 2010-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.7. Kondisi klimatologi terutama curah hujan sangat mendukung pengembangan kegiatan sektor pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.

Tabel 2.7
Perkembangan Jumlah Curah Hujan di Kota Dumai, Tahun 2010-2020

No	Bulan	Curah Hujan (MM)											Pertumbuhan /Tahun (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Januari	144,00	182,30	130,00	130,00	200,00	200,00	121,60	411,70	96,60	150,60	78,40	18,25
2	Februari	58,00	29,30	132,00	132,00	150,00	150,00	59,30	418,00	44,30	43,00	74,70	84,05
3	Maret	329,00	45,00	198,00	198,00	201,00	201,00	94,00	182,60	90,70	132,00	69,10	24,38
4	April	207,00	403,40	261,00	261,00	226,00	226,00	194,20	181,00	166,30	177,00	240,50	5,95
5	Mei	330,00	23,30	157,00	157,00	190,00	190,00	358,30	145,00	187,40	86,00	304,10	75,97
6	Juni	331,00	77,40	49,00	49,00	160,00	160,00	64,60	95,00	48,60	185,00	178,50	32,90
7	Juli	425,00	162,10	203,00	203,00	160,00	160,00	122,40	106,70	157,40	93,00	268,00	10,06
8	Agustus	188,00	167,10	499,00	499,00	200,00	200,00	79,70	237,50	79,90	66,00	213,40	40,50
9	September	-	356,30	153,00	153,00	257,00	257,00	171,70	237,80	447,30	79,00	350,40	36,55
10	Oktober	-	260,80	121,00	121,00	290,00	290,00	82,30	179,40	447,30	347,00	153,50	20,36
11	November	-	311,30	313,00	313,00	299,00	299,00	318,00	238,30	289,70	178,00	366,80	6,64
12	Desember	-	230,80	368,00	368,00	258,00	258,00	166,50	166,00	247,30	182,70	209,90	3,15
Jumlah		2.012,00	2.249,10	2.584,00	2.584,00	2.591,00	2.591,00	1.832,60	2.599,00	2.302,80	1.719,30	2.507,30	4,86

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka, 2021

2.2.1.7 Penggunaan Lahan

Peruntukan penggunaan lahan di Kota Dumai terdiri dari Kawasan lindung dan Kawasan budidaya. Kawasan lindung yang terdiri dari kawasan lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya dan kawasan perlindungan setempat serta kawasan konservasi. Sedangkan kawasan budidaya terdiri dari kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan industri dan kawasan pemukiman dapat dilihat pada Tabel 2.8 Peruntukan penggunaan lahan di Kota Dumai seperti yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai tahun 2019-2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Peruntukan Penggunaan Lahan di Kota Dumai
Tahun 2019-2030

No	Rencana Peruntukan Kawasan	Luas (ha)	Proporsi (%)
A. Kawasan Lindung			
1	Kawasan Lindung yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnya		
	a. Kawasan Hutan Lindung		
	b. Kawasan Bergambut		
2	Kawasan Perlindungan Setempat		
	a. Kawasan Taman Wisata Alam	3.567,61	1,73
	b. Sempada Pantai	279,83	0,14
	c. Sempadan Sungai	189,20	0,09
	d. Sempadan Danau	32,25	0,02
	e. Ruang Terbuka Hijau Kota (RTH)	208,95	0,10
3	Kawasan Konservasi		-
	a. Suaka Alam		-
	b. Resapan Air		-
B. Kawasan Peruntukan Budidaya			
1	Kawasan Hutan Produksi		-
	a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas	11.851,26	5,74
	b. Kawasan hutan Produksi Tetap	121.234,68	58,72
	c. Kawasan Hutan Produksi dapat di Konversi	18.870,58	9,14
2	Kawasan Pertanian		-
	a. Kawasan Tanaman Pangan	10.368,75	5,02
	b. Kawasan KP2B		-
	c. Kawasan Hortikultura		-
	c. Kawasan Perkebunan	3.567,47	1,73
3	Kawasan Perikanan	1.051,04	0,51
4	Kawasan Pertambangan dan Energi		-
	a. Kawasan pertambangan mineral logam		-
	a. Kawasan pertambangan Batubara		-
5	Kawasan Industri	7.602,83	3,68
6	Kawasan Perdagangan Jasa	843,45	0,41
7	kawasan Peruntukan pergudangan	253,32	0,12
8	Kawasan Rencana Bandar Udara	670,28	0,32
9	Kawasan Pelabuhan	419,32	0,20
10	Kawasan Pendidikan	17,06	0,01
11	Kawasan Kesehatan	12,81	0,01
12	Kawasan Olahraga	56,79	0,03
13	Ruang Terbuka Non Hijau	14,78	0,01
14	Kawasan Pariwisata	216,89	0,11
15	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	36,11	0,02

16	Kawasan TPA	10,64	0,01
17	Kawasan Pemukiman		-
	a. Kawasan Pemukiman Perkotaan		-
	1. Kawasan Perkantoran	49,93	0,02
	2. Kawasan Perumahan	25.051,00	12,13
	b. Kawasan Pemukiman Perdesaan		-
Total Perntukan Kawasan		206.476,83	100,00
1	Luas Wilayah	206.673,36	
2	Lainnya	196,53	

Sumber RTRW Kota Dumai Tahun 2019-2030

1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, meliputi:

- a) Kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai dan sempadansungai
- b) Kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka marga satwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
- c) Kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir.
- d) Kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.

Kawasan Lindung yang terdapat di Kota Dumai terdiri dari:

A. Kawasan Sempadan Pantai

Kawasan sempadan pantai adalah kawasan tertentu di sepanjang pantai yang ditetapkan sesuai peraturan, dikarenakan mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Sempadan pantai ditetapkan dengan kriteria daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat dan memiliki dataran tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai. Penetapan sempadan pantai di Kota Dumai berada di sepanjang pantai utara dan selatan Kota Dumai.

B. Kawasan Sempadan Sungai

Kawasan sempadan sungai adalah yang ditetapkan di Kota Dumai adalah kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk sungai

buatan/ kanal/ saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai

Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Kriteria sempadan sungai adalah:

- Daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar.
- Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan Perumahan dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai.
- Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan Perumahan dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai

C. Kawasan Lindung Bakau

Kawasan pantai berhutan bakau ditetapkan dengan kriteria koridor di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.

Menurut Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau dilakukan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembang biaknya berbagai biota laut di samping sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya di belakangnya.

Kawasan pantai berhutan bakau di Kota Dumai terdapat di Tembawan, Kelurahan Batu Teritip dengan luas lahan 164 Ha, Hutan bakau yang berada di Teluk Makmur di Kecamatan Medang Kampai dengan luas lahan 39,5 Ha dekat dengan sungai Kembeli Besar dan Alur Sungai Pulau Bungkuk Dua. Sedangkan Hutan Bakau yang terdapat di kawasan muara Sungai Masjid, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat dan Kelurahan Bangsal Aceh di Kecamatan Sungai Sembilan dengan luas lahan 227,50 Ha.

D. Kawasan Danau atau Waduk

Kawasan sekitar Danau atau waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk. Kawasan di sekitar danau atau waduk di Kota Dumai ditetapkan dengan kriteria

sebagai berikut:

- 1) Daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi.
- 2) Daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.

Danau Putri Tujuh merupakan danau alamiah yang terletak di kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur dengan luas 30,61 Ha dan berada di Kawasan Pengembangan Bandara. Selain danau di Kota Dumai juga terdapat rawa di Kelurahan Bukit Batrem dan Tanjung Palas dengan luas 59,93 Ha.

Kawasan sekitar danau khususnya Danau Putri Tujuh di Kota Dumai telah dijadikan tempat wisata. Sebagai kawasan lindung danau dan waduk harus dijaga kelestariannya walaupun telah terjamah oleh kegiatan budidaya. Upaya penanganan untuk kawasan waduk dan danau adalah dengan cara pengawasan dan pembatasan pengembangan kawasan wisata danau yang bertujuan untuk menjaga kelestarian habitat dan ekosistem danau. Perlindungan terhadap kawasan sekitar danau/waduk di wilayah Kota Dumai dilakukan untuk melindungi danau/waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk

E. Kawasan Resapan Air

Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Kawasan air di Kota Dumai memiliki kriteria curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.

Perlindungan terhadap kawasan air di Kota Dumai dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai tahun 2019-2039 telah ditetapkan seluruh sungai memiliki sempadan sungai sebagai bagian dari kawasan lindung yang termasuk di dalam kategori kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya. Dari penetapan sempadan sungai secara keseluruhan di Wilayah Kota Dumai

tersebut, maka Kota Dumai saat sekarang memiliki sempadan sungai seluas 24.300.000 M² Atau 24,3 Km²

F. Kawasan sekitar mata air

Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Kota Dumai tidak memiliki mata air secara khusus, namun terdapat pada setiap alur sungai yang kemudian membentuk sungai besar. Mata air di wilayah Kota Dumai berada pada hulu-hulu sungainya yang berjumlah 60 (enam puluh) sungai dengan 9 (sembilan) buah sungai besar.

G. Ruang Terbuka Hijau (RTH), terdiri dari:

- 1) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah, yaitu ruang terbuka hijau di luar kawasan perkotaan tetapi masih di dalam administrasi Kota Dumai. Di Kota Dumai ruang terbuka hijau wilayah meliputi kawasan suaka margasatwa di Kecamatan Sungai Sembilan dan Hutan Wisata di Kecamatan Bukit Kapur. Jika dibandingkan luas ruang terbuka hijau wilayah Kota Dumai dengan luas Kota Dumai, maka ruang terbuka hijau di Kota Dumai telah memenuhi syarat yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen).
- 2) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan
Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan yaitu ruang terbuka hijau yang terdapat di kawasan perkotaan yang berupa area tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan yang terdapat di Kota Dumai berupa lapangan bola dan lapangan golf.
- 3) Ruang Terbuka Hijau (RTH) lingkungan Perumahan
Ruang Terbuka Hijau (RTH) lingkungan Perumahan yaitu di setiap lingkungan-lingkungan Perumahan. Baik itu berupa pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, dan taman atap bangunan. Ruang terbuka hijau di Kota Dumai tersebar di beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Kapur dengan luas 3.555,64 Ha, Kecamatan Dumai Barat dengan luas 581,16 Ha dan Kecamatan Dumai Timur dengan luas lahan 27,76 Ha

H. Kawasan Hutan Kota

Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh Wali Kota Dumai. Struktur hutan wisata yang merupakan hutan kota

di Kota Dumai ini adalah hutan kota berstrata banyak, yaitu memiliki komunitas tumbuh-tumbuhan selain terdiri dari pepohonan dan rumput, juga terdapat semak dan penutup tanah dengan jarak tanam tidak beraturan. Hutan wisata Kota Dumai ini kawasannya tersebar di Kelurahan Bukit Timah dengan luas 229,1 Ha, Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Barat dengan Luas 290,2 Ha, Kelurahan Tanjung Pasal Kecamatan Bukit Kapur 189,8 Ha; Kelurahan Gurun Panjang Kecamatan Bukit Kapur dengan luas 1.288 Ha. Sehingga total luas hutan wisata di Kota Dumai mencapai 2.741 Ha.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kota Dumai meliputi:

A. Kawasan Perumahan

Kawasan Perumahan adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pertanian yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan . Kawasan Perumahan terdiri dari:

1) Perumahan Perkotaan

Perumahan perkotaan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi Perumahan di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian di perkotaan. Kawasan Perumahan di Kota Dumai terdapat di seluruh Kelurahan di Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Timur.

2) Perumahan Pertanian

Perumahan Pertanian adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi Perumahan di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian di Pertanian. Kawasan Perumahan Pertanian di Kota Dumai terdapat di seluruh Desa selain ibukota Kecamatan.

B. Kawasan Pusat Pemerintahan, terdiri dari Kawasan Perkantoran Tingkat Kota (Kompleks perkantoran lama dan Kompleks Perkantoran Walikota serta Kompleks Perkantoran DPRD yang berlokasi di Jalan Perwira, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur dengan luas lahan 100.000 m²) dan Kawasan Pusat Pemerintahan Kecamatan (Kecamatan Dumai Kota, Medang Kampai, Dumai Timur, Dumai Barat, Dumai Selatan, Bukit Kapur, Sungai Sembilan)

C. Kawasan Pariwisata

Kawasan Pariwisata di Kota Dumai meliputi jenis wisata alam, sejarah, agama, olahraga, dan tirta. Daerah wisata yang memanfaatkan naturalnya kondisi alam, diantaranya adalah kawasan konservasi untuk marga satwa (Harimau Sumatera) yang terdapat di Kecamatan Sungai Sembilan. Pariwisata yang telah dikembangkan dan berbasis hutan wisata ada di Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Timur. Wisata alam yang dipadukan dengan wisata budaya, dikembangkan di Teluk Makmur di Kecamatan Medang Kampai yang di sekitarnya terdapat rumah-rumah tradisional/rumah tua berarsitektur Melayu. Pariwisata alam lainnya yang telah dikembangkan adalah Tasik Bunga Tujuh di Kecamatan Dumai Timur dan wisata budaya yakni yang terkait dengan legenda Makam Puteri Tujuh yang sekarang berada di Kawasan Kilang Operasi Pertamina Unit produksi II di Kota Dumai.

D. Kawasan Industri yang ada di Kota Dumai adalah industri dasar, aneka industri dan industri kecil dan industri besar/ sedang yang tersebar merata di setiap Kecamatan. Industri besar berupa pengolahan kelapa sawit, dan pengolahan minyak bumi dan gas (MIGAS). Untuk kegiatan industri besar, Dumai memiliki industri kelapa sawit/CPO (PT. Bukit Kapur Reksa, PT. S.M.A.R.T. Corporation, PT. Sarana Sawitindo Utama, PT. Inti Benua Perkasatama, dan PT. Sarana Tempa Perkasa) yang banyak berdiri di sekitar pelabuhan dan pertambangan minyak bumi.

E. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan. Pemanfaatan ruang di Kota Dumai untuk kawasan peruntukan perdagangan dan jasa diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

F. Ruang Terbuka Non-Hijau (RTNH)

Ruang terbuka non hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.

G. Kawasan Militer Kota Dumai terletak di antara Kelurahan Bagan Besar dan Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur dengan luas 210,10 Ha. Di dalam konsepsi penataan ruang wilayah Kota Dumai, dipahami bahwa Kota Dumai telah memiliki kawasan militer yang telah eksisting,

sejalan dengan perkembangan Kota Dumai, yakni: TNI-AD, TNI-AL, dan kepolisian. Sedangkan secara khusus TNI-AL memiliki pangkalan TNI-AL yang terletak di kawasan pelabuhan Kota Dumai.

- H. Kawasan Migas dan Non Migas, yaitu: a. Kawasan Migas dan Non Migas yakni kawasan operasional PT. Pertamina UP II Dumai dan rencana kawasan Pelabuhan terpadu yang terletak di antara Kelurahan Jayamukti dan Bukit Palas Kecamatan Dumai Timur dengan luas 247,09 Ha. b. Kawasan Migas dan Non Migas yakni kawasan operasional PT. Chevron Pasific Indonesia yang terletak di Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Timur dengan Luas 459,72 Ha.

- I. Kawasan Bandar Udara Pinang Kampai-Dumai

Bandar Udara Pinang Kampai mempunyai arah landas pacu yaitu *Airstrip* 03-R/W21, yang berarti bahwa ujung-ujung landas pacu (*runway*) Bandar Udara Pinang Kampai ini mempunyai arah 30° dan 210°, yang bermakna bahwa daerah-daerah di daratan di dalam wilayah Kota Dumai yang berada di bawah permukaan udara yang berada langsung di masing-masing ujung landas pacu dari Bandar udara Pinang Kampai ini harus dibatasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan di dalam aturan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Pinang Kampai tersebut, demikian pula kawasan-kawasan yang berada di sisi kiri (sisi barat) dan sisi kanan (sisi timur) dari Bandar Udara Pinang Kampai ini berjarak masing-masing 15 Km dari sumbu landas pacu (*Runway Center Line*) harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Pinang Kampai tersebut

- J. Kawasan Pelabuhan di Kota Dumai meliputi pelabuhan laut yang dikelola oleh Pemerintah yaitu oleh PT. Pelabuhan Indonesia Regional I (mengoperasikan kegiatan pelabuhan untuk penumpang, dan juga bongkar muat barang untuk kepentingan Kota Dumai dan juga untuk kepentingan kota-kota di sekitar Kota Dumai); pelabuhan khusus yang dimiliki oleh PT. Pertamina maupun yang dimiliki PT. Chevron Pacific Indonesia sebagai Pelabuhan khusus bongkar muat bahan bakar minyak dan gas bumi untuk kepentingan ekspor. Selain itu Kota Dumai juga telah memiliki Pelabuhan Khusus untuk bongkar muat *Crude Palm Oil* (CPO) yang dibangun oleh PT. Bukit Kapur Reksa (BKR), terdapat juga Pelabuhan untuk bongkar muat pupuk, khususnya pupuk NPK yang diproduksi oleh PT. Sentana Adidaya Pratama, dimana Pelabuhan yang berada di Pelintung tersebut khusus untuk kegiatan bongkar muat dan pemasaran daerah maupun ke luar negeri.

K. Kawasan Olahraga

Lapangan olahraga merupakan suatu bentuk ruang terbuka yang termasuk ruang terbuka non hijau, sebagai suatu pelataran dengan fungsi utama tempat dilangsungkannya aktivitas olahraga. Lapangan olahraga dalam konteks stata ruang pada prinsipnya sangat didasari oleh aktivitas dari olah raga yang prasarananya direncanakan tersebut, yang memiliki spesifikasi-spesifikasi tertentu sehingga menjadi dasar perhitungan dimensi, perkerasannya dan batas-batas kawasan atau ruang yang harus disediakan.

L. Kawasan Perikanan terdiri dari usaha perikanan laut dan usaha perikanan air tawar. Hasil Produksi Perikanan Laut di Kota Dumai pada tahun 2017 mencapai 930.815 Kg, perikanan kolam mencapai 324.428 Kg sedangkan hasil produksi untuk perikanan tambak mencapai 17.930 Kg.

M. Kawasan Peternakan

Produksi ternak jenis sapi di Kota Dumai mengalami penurunan di tahun 2016 ke 2017. Hal ini terlihat dari banyaknya ternak sapi yang pada tahun 2016 sebanyak 5.061 ekor dan tahun 2017 sebanyak 4.806 ekor. Kondisi ini sama dengan ternak jenis kerbau, kuda, domba, dan babi yang mengalami peningkatan. Pengembangan usaha yang terpadu peternakan dengan pertanian lahan kering diharapkan adanya suatu hubungan yang menguntungkan, di mana sisa hasil dari tanaman pangan dapat dipergunakan untuk bahan makanan ternak dan limbah ternak merupakan pupuk organik untuk peningkatan kesuburan tanah

N. Kawasan Pertanian meliputi penanaman: a. Pangan yang ada di Kota Dumai memproduksi sendiri komoditas yang berupa tanaman pangan yaitu berupa padi sawah, padi ladang, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau. Tidak semua Kecamatan di Kota Dumai pada kondisi saat ini bisa memenuhi kebutuhan akan tanaman pangan, ada beberapa Kecamatan yang memproduksi komoditas tertentu dan ada beberapa Kecamatan yang tidak memproduksi komoditas tertentu. Untuk komoditas padi sawah hanya diproduksi di Medang Kampai, Sungai Sembilan, Dumai Timur, dan Dumai Selatan, b. Tanaman Sayuran di Kota Dumai pada kondisi sekaran pada umumnya bisa memenuhi kebutuhan akan sayuran di Kota Dumai. Hasil analisis menunjukkan produksi sayuran jenis tanaman petsai yang diproduksi di Kecamatan Bukit Kapur, Medang Kampai, Sungai Sembilan, Dumai Barat, dan Dumai Selatan menunjukkan produksi yang bisa memenuhi kebutuhan akan tanaman

petsai Kota Dumai bahkan bisa diekspor. Tanaman bayam yang diproduksi hampir di semua Kecamatan di Kota Dumai, produksi tanaman bayam ini menurut analisis bisa memenuhi kebutuhan akan tanaman bayam di Kota Dumai, c. Tanaman buah-buahan yang ada di Kota Dumai adalah mangga, durian, pisang dan Nenas bisa untuk diekspor.

O. Kawasan Pertanian Lahan Basah

Pertanian Lahan basah adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah di mana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis. Dalam hal ini yang dimaksud adalah sawah. Kriteria untuk kawasan Pertanian Lahan Basah diantaranya memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan Pertanian, ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi, mendukung ketahanan pangan nasional dan dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.

P. Kawasan Pertanian Tanaman Perkebunan

Kawasan perkebunan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan atau perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan maupun bahan baku industri. Kota Dumai mempunyai 5 kawasan perkebunan yaitu:

- 1) Perkebunan Besar Negara/ swasta di Kelurahan Basilam Baru, Kelurahan Tanjung Penyembal, dan Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan dengan Luas 42.907,38 Ha.
- 2) Perkebunan Negara/ Swasta di Kelurahan di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Dumai Barat dengan Luas 1900,56 Ha.
- 3) Perkebunan Negara/ Swasta di Kelurahan Mundam, Kelurahan Tanjung Palas, Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Dumai Timur dengan luas 456,73 Ha
- 4) Perkebunan Negara/ swasta di Kelurahan Gurun Panjang Kecamatan Bukit Kapur dengan Luas 12.915,63 Ha
- 5) Perkebunan Negara/ swasta di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai dengan luas 5.554,37 Ha.

2.2.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan kondisi topografinya yang relative datar, diperkirakan Kota Dumai dapat digunakan untuk pembangunan kota namun perkembangannya masih dibatasi oleh kendala-kendala pemanfaatan lahan karena hampir sebagian besar wilayah Kota Dumai merupakan dataran rendah.

2.2.2.1 Potensi Pengembangan Pertanian (Tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan)

Selain untuk kawasan pembangunan kota, Kota Dumai juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi kegiatan pertanian dan perkebunan karena lapisan tanah dominan yang terhampar di wilayah Kota Dumai merupakan lapisan tanah gambut dengan kedalaman 0-0,5 m. Apabila dilakukan pengamatan secara komprehensif dengan didasari karakteristik tanah gambut yang dimiliki dan elevasi wilayah rata-rata yang berkisar 2 meter di atas permukaan laut, maka pada hakekatnya kemampuan lahan di Kota Dumai berada pada tingkat kemampuan rendah sampai sedang yang masih memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan.

Berdasarkan kondisi klimatologi, Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut (iklim tropis basah) dengan kelembaban udara rata-rata di tahun 2016 berkisar antara 75-83%. Kondisi klimatologi seperti ini sangat mendukung pengembangan perumahan maupun perikanan.

2.2.2.2 Potensi Pengembangan Industri dan Perdagangan

Berdasarkan kondisi geografis, Kota Dumai berada di pesisir pantai bagian timur Pulau Sumatera, terlindungi oleh Pulau Rupat, sehingga sangat strategis untuk berkembang menjadi kota pelabuhan dan kota perdagangan. Berdasarkan kondisi hidrologi, wilayah Kota Dumai dialiri oleh Sungai Dumai yang membentang dari timur ke barat yang merupakan saluran drainase utama di Kota Dumai kecuali pada sebagian wilayah yang lebih tinggi seperti di Kelurahan Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Batrem, Bukit Timah dan Kecamatan Bukit Kapur memiliki permeabilitas dan porositas yang tinggi yang menjadi sumber air tanah dangkal di Kota Dumai. Di wilayah Kota Dumai terdapat 51 sungai besar dan kecil yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai, semuanya bermuara ke Selat Rupat dan Selat Malaka sebagai jalur lalu lintas perdagangan.

2.2.2.3 Potensi Pengembangan Kawasan Perkotaan

Berdasarkan kondisi geologi, umumnya struktur tanah di Kota Dumai terdiri dari tanah *Podsolik* merah kuning dari batuan endapan dan *Alluvial* serta tanah *Organosol* dan *Gley* humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Kemampuan lahan di wilayah Kota Dumai secara umum sangat baik. Kota Dumai berada pada lahan bergambut dengan kedalaman 0-3 m dan ketinggian rata-ratanya berkisar 5 meter di atas permukaan laut. Mengingat bahwa tanah gambut di wilayah Kota Dumai ini memiliki rata-rata kedalaman 0,5 meter dan merujuk bahwa pada lapisan di bawah gambut ini adalah tanah dasar yang memiliki daya dukung yang cukup baik, maka dengan memanfaatkan

perkembangan teknologi/geoteknik yang sudah maju, kendala struktur tanah di Kota Dumai ini tidaklah menjadi permasalahan penting dalam upaya membangun infrastruktur perkotaan. Persoalan penting yang harus menjadi dasar pertimbangan dalam upaya mengembangkan berbagai infrastruktur perkotaan adalah elevasi wilayah khususnya di bagian wilayah Dumai Kota, Dumai Barat dan Dumai Timur yang hanya berkisar 0-3 meter di atas permukaan laut, hal ini mengindikasikan bahwa dalam pengaliran air buangan kota agak sulit, dan pada tempat dan waktu tertentu sering terjadi banjir terutama pada saat air laut sedang pasang. Terkait hal tersebut, maka diperlukan berbagai upaya khususnya dengan dukungan teknologi dan manajemen sumber daya kawasan yang memadai untuk mendukung pembangunan infrastruktur perkotaan yang berdimensi dan berskala besar.

2.2.3 Wilayah Rawan Bencana

Bencana merupakan sesuatu atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

2.2.3.1 Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

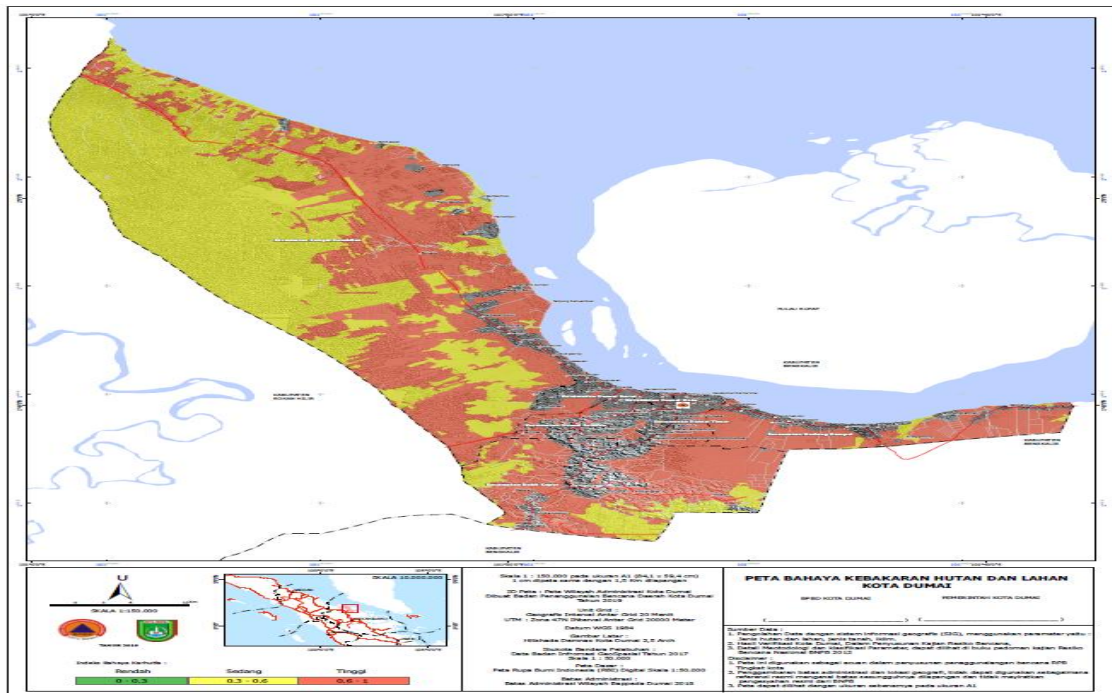
Di Kota Dumai potensi bencana yang diperkirakan terjadi setiap tahunnya adalah kebakaran hutan dan terutama lahan di wilayah Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai, dan Kecamatan Sungai Sembilan. Kebakaran hutan dan lahan tersebut selalu terjadi pada saat datangnya musim kemarau dan pada saat yang bersamaan pada umumnya masyarakat memulai membuka lahan pertanian dan perkebunan. Namun kebakaran hutan dan lahan dapat diantisipasi dengan menumbuhkan kewaspadaan pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasannya serta masyarakat yang sudah mulai sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan selama periode 2015-2016 dan 2018-2020 terjadi peningkatan, dimana bencana kebakaran hutan dan lahan paling banyak terjadi pada tahun 2016 yaitu 259 kejadian dan Kembali turun tahun 2020 sebanyak 79 kejadian. Jika kejadian dilihat mengikut bulan pada tahun 2020, maka kejadian kebakaran hutan lahan terbanyak terjadi pada pada bulan Maret dengan masing-masing 25 kejadian seperti yang tersaji pada Tabel 2.9 berikut.

Tabel 2.9
Perkembangan Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Dumai, 2015-2020

No	Bulan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Januari	0	7	2	0	3	15	45,71
2	Februari	36	53	2	29	20	23	256,99
3	Maret	16	56	3	33	24	25	226,45
4	April	9	8	7	14	8	7	4,21
5	Mei	4	0	5	0	6	0	-60,00
6	Juni	6	10	3	7	5	2	8,29
7	Juli	43	10	3	7	9	3	-10,30
8	Agustus	2	83	1	23	14	3	1.206,70
9	September	11	14	15	2	14	1	90,98
10	Oktober	2	18	1	0	0	0	121,11
11	November	0	0	5	0	3	0	-40,00
12	Desember	0	0	2	0	3	0	-40,00
Jumlah Kejadian		129	259	49	115	109	79	24,33

Sumber: BPBD Kota Dumai Tahun 2020



Gambar 2.2: Peta Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Dumai

2.2.3.2 Kawasan Rawan Bencana Banjir

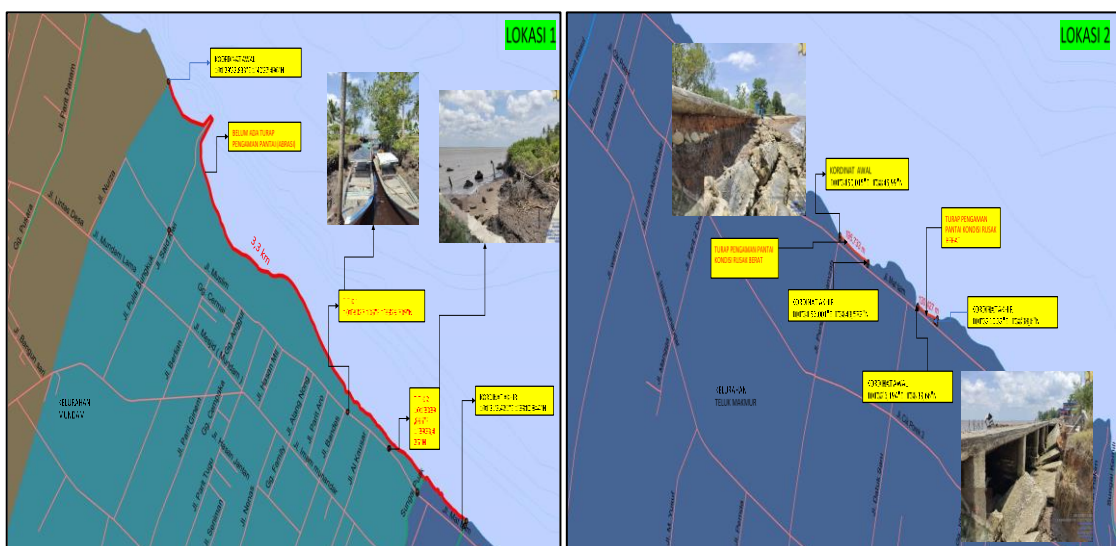
Selain bencana kebakaran hutan dan lahan, masalah banjir hingga saat ini masih menjadi persoalan utama di kawasan pinggiran Kota Dumai. Ketika hujan dan pasang laut naik, kondisi pinggiran kota dan sebagian jalan di tengah kota memprihatinkan. Jika dilihat dari peta rawan bencana banjir seperti yang tersaji pada Gambar 2.3, maka Kecamatan yang memiliki rawan bencana banjir adalah Kecamatan Sungai Sembilan dan Dumai Barat. Hal itu disebabkan hampir sebagian besar daratan di Dumai merupakan lahan gambut, sehingga setiap hujan dan pasang, air selalu tertahan cukup lama.



Gambar 2.3: Peta Rawan Bencana Banjir Kota Dumai

2.2.3.3 Kawasan Rawan Bencana Abrasi

Wilayah pesisir Kota Dumai memiliki kerawanan bencana abrasi, dimana dari tahun ke tahun, garis pantai di sebagian wilayah Pesisir Kota Dumai memiliki kemunduran yang signifikan. Peta rawan longsor tepi pantai akibat abrasi. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi sebagaimana pada Gambar 2.4.



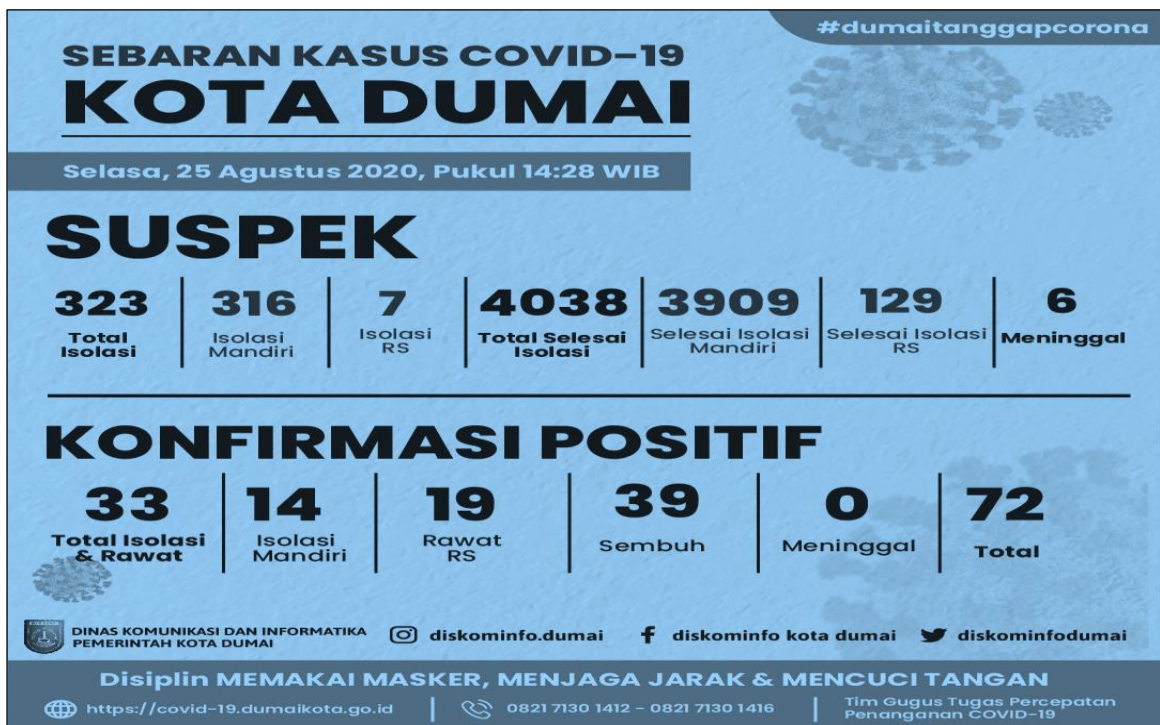
Gambar 2.4: Peta Rawan Bencana Lonsor Kota Dumai

Selain itu terdapat juga potensi angin puting beliung yang disebabkan tingginya potensi dorongan kecepatan angin mencapai lebih dari 30 km/jam.

Kecepatan angin ini dikarenakan faktor masa transisi dari musim kemarau ke musim penghujan.

2.2.3.4 Bencana Non Alam

Saat ini juga, selain bencana alam, Kota Dumai juga menghadapi resiko bencana non alam. Jika melihat fenomena wabah Covid 19 yang mulai terjadi pada akhir tahun 2019 di seluruh Dunia dan berdapak pada Kota Dumai. Wabah Covid 19 yang terjadi telah mempengaruhi pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Gambar berikut memperlihatkan kondisi wabah Covid 19 di Kota Dumai tahun 2020.



Gambar 2.5: Sebaran Kasus Covid 19 di Kota Dumai, 2020
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai, 2020

2.2.4 Demografi

Secara umum data demografi sangat bermanfaat bagi pemerintah untuk digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan khususnya dalam pemenuhan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penduduk seperti pembangunan rumah, ketersediaan air dan listrik serta kebutuhan lainnya terutama pelayanan umum. Hal ini penting untuk menentukan arah kebijakan sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat. Sedangkan bagi keperluan dunia usaha untuk mengidentifikasi target pasar barang dan jasa.

2.2.4.1 Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk Kota Dumai mengalami penambahan dari 253.178 Jiwa tahun 2010 menjadi 316.782 jiwa pada tahun 2020 dengan

laju pertumbuhan penduduk selama periode 2010-2020 sebesar 2,27% per tahun. Penyumbang utama tingginya pertumbuhan penduduk adalah peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk perempuan yang tumbuh lebih tinggi yaitu sebesar 2,34% per tahun sementara peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk laki-laki hanya sebesar 2,21% per tahun selama periode tahun 2010-2020, jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Dalam kurun waktu tersebut laju pertumbuhan penduduk cenderung mengalami peningkatan dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 3,87% dan pertumbuhan penduduk paling rendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 1,12%. Jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Kota di Provinsi Riau, maka Kota Dumai menempati pertumbuhan penduduk tertinggi kedua setelah Kabupaten Pelalawan sebesar 2,82% selama periode tahun 2010-2020. Selain angka kelahiran penduduk, pertumbuhan penduduk Kota Dumai tersebut disebabkan oleh adanya migrasi dari daerah lain baik antara kabupaten kota juga antar provinsi. Kondisi ini terjadi mengingat Kota Dumai merupakan salah wilayah yang sektor industri pengolahan yang mengalami perkembangan dengan pesat terutama industri pengolahan CPO dan industri lainnya.

Tabel 2.10
Indikator Kependudukan Kota Dumai, 2010-2020

Indikator Kependudukan	Tahun											Rata-Rata Pertumbuhan / Tahun (%)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah Penduduk (Jiwa)	253.178	262.976	268.022	274.089	280.109	285.967	291.908	297.638	303.292	308.812	316.782	2,27
Laki-Laki (Jiwa)	130.910	136.313	137.715	140.776	143.900	146.792	149.791	152.731	155.638	158.287	162.769	2,21
Perempuan (Jiwa)	122.268	126.663	130.307	133.313	136.209	139.175	142.117	144.907	147.654	150.525	154.013	2,34
Sex Rasio	107,07	107,62	105,69	105,60	105,65	105,47	105,40	105,40	105,41	105,16	105,69	-0,13
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km)	146,57	152,24	155,16	158,67	162,16	165,55	168,99	172,31	175,58	178,77	183,28	2,26
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (%)	1,12	3,87	1,92	2,26	2,20	2,09	2,08	1,96	1,90	1,82	2,58	2,27
Luas Wilayah (Km2)	1.727,38	1.727,38	1.727,38	1.727,38	1.727,38	1.727,38	1.727,38	1.727,38	1.727,38	1.727,38	1.728,38	0,00

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka, 2021

2.2.4.2 Perkembangan Sebaran Penduduk

Kependudukan merupakan salah satu elemen dasar yang berkaitan dengan wilayah. Perkiraan mengenai kependudukan menurut berbagai karakteristik jumlah dan komposisi penduduk pada suatu wilayah merupakan input dan sekaligus pemanfaat hasil pembangunan. Oleh karena itu data sebaran kependudukan yang sangat penting dalam perencanaan untuk mengetahui permintaan barang dan jasa pelayanan seperti kebutuhan lahan untuk perumahan, pertanian, industri dan utilitas lainnya di masa yang akan datang.

Jika dilihat sebaran penduduk menurut Kecamatan, selama periode 2010-2020 pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Medang Kampai sebesar 5,98% per tahun dan terendah terdapat di Kecamatan Dumai Kota -0,19% per tahun. Sedangkan distribusi penduduk per Kecamatan terbanyak terdapat di Kecamatan Dumai Timur sebesar 21,76% dan distribusi jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Medang Kampai hanya sebesar 5,30% dari jumlah penduduk Kota Dumai pada tahun 2020. Perkembangan sebaran jumlah, pertumbuhan dan distribusi penduduk selama periode 2010-2020 menurut Kecamatan di Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11
Perkembangan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan
Kota Dumai, 2010-2020

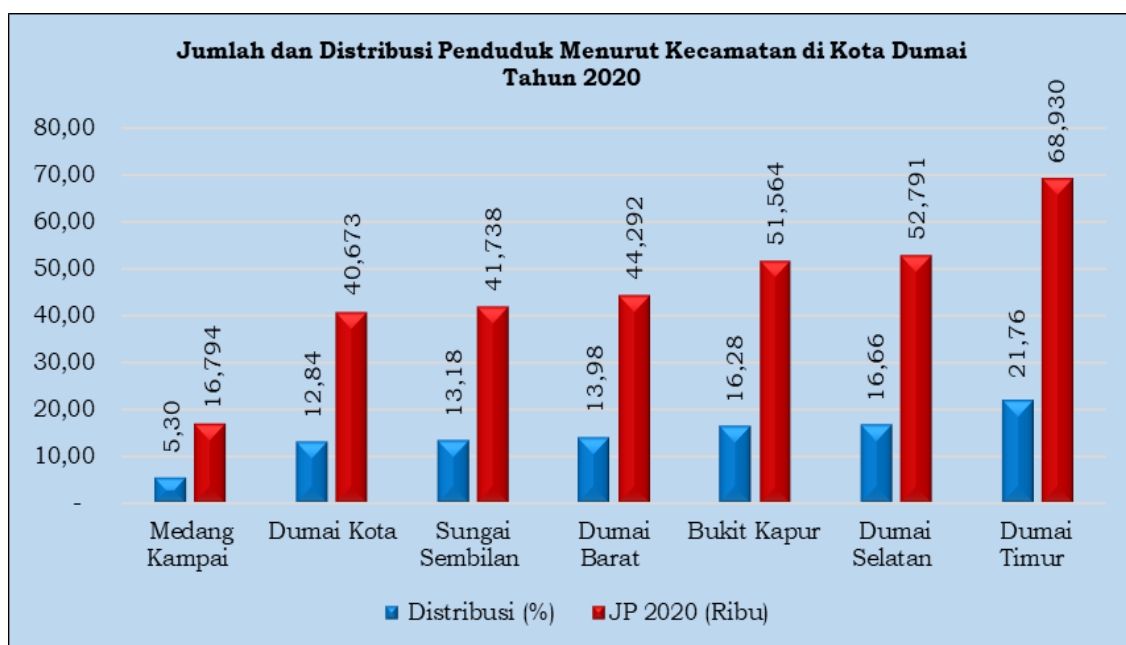
Kecamatan	Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2010-2020											Rata-Rata Pertumbuhan / Tahun (%)	Distribusi Penduduk Tahun
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Bukit Kapur	37.953	39.424	42.082	45.933	42.399	43.403	44.447	45.479	46.522	47.565	51.564	2,69	16,28
Medang Kampai	10.188	10.583	10.983	11.235	11.240	11.470	11.701	11.923	12.140	12.351	16.794	5,98	5,30
Sungai Sembilan	27.465	28.589	29.920	32.065	30.475	31.158	31.860	32.546	33.231	33.909	41.738	4,51	13,18
Dumai Barat	89.968	93.447	38.871	38.608	39.688	40.572	41.479	42.364	43.247	44.119	44.292	1,65	13,98
Dumai Selatan	-	-	48.752	50.429	50.593	51.616	52.645	53.629	54.592	55.523	52.791	1,03	16,66
Dumai Timur	87.604	90.993	58.793	60.482	60.450	61.685	62.932	64.127	65.299	66.435	68.930	2,01	21,76
Dumai Kota	-	-	42.122	41.815	45.264	46.063	46.844	47.570	48.261	48.910	40.673	-0,19	12,84
Kota Dumai	253.178	263.036	271.523	280.567	280.109	285.967	291.908	297.638	303.292	308.812	316.782	2,27	100,00

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka, 2021

Berdasarkan data Tabel 2.11 menunjukkan bahwa terdapat Kecamatan dengan pertumbuhan penduduk di atas rata-rata Kota Dumai selama tahun 2010-2020 tersebar di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Medang Kampai, Sungai Sembilan dan Bukit Kapur.

Ada tiga faktor yang menyebabkan persebaran penduduk penduduk di setiap daerah, yaitu faktor fisiografis, faktor biologis, serta faktor kebudayaan dan teknologi. Secara empiris, penduduk akan banyak dijumpai pada daerah-daerah yang memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi, tersedianya sarana dan prasarana sosial, transportasi yang memadai, serta kondisi sosial ekonomi yang lebih baik serta adanya dukungan kebijakan pemerintah yang lebih terutama dalam penanganan persolaan social dan ekonomi.

Selain itu kesempatan kerja, penduduk lebih suka tinggal di daerah di mana mereka dapat bekerja, tersedia infrastruktur transportasi, kejahatan tingkat kejahatan yang tinggi membuat masyarakat enggan tinggal di suatu daerah karena mereka tidak merasa aman. Perkembangan sebaran jumlah dan distribusi penduduk selama periode tahun 2020 menurut Kecamatan di Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar 2.6 berikut.



Gambar 2.6: Jumlah dan Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2020

2.2.4.3 Perkembangan Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan. Secara umum, tingkat kepadatan penduduk (*population density*) adalah perbandingan banyaknya jumlah penduduk dengan luas daerah berdasarkan satuan luas (km²). Perkembangan kepadatan penduduk Kota Dumai selama periode tahun 2010-2020 menunjukkan terjadinya peningkatan dari 147 jiwa/km² tahun 2010 bertambah menjadi 183 jiwa/km² pada tahun 2020 dengan pertumbuhan 2,27% per tahun.

Kepadatan penduduk yang tinggi di Kecamatan Dumai Kota hal ini dapat dimaklumi jumlah penduduk dan luas wilayahnya didominasi pusat pemukiman, kegiatan perdagangan, jasa dan pelabuhan laut Dumai (pelabuhan ekspor dan penumpang yang cukup ramai). Hal tersebut memberikan andil yang cukup besar terhadap konsentrasi penduduk Kota Dumai.

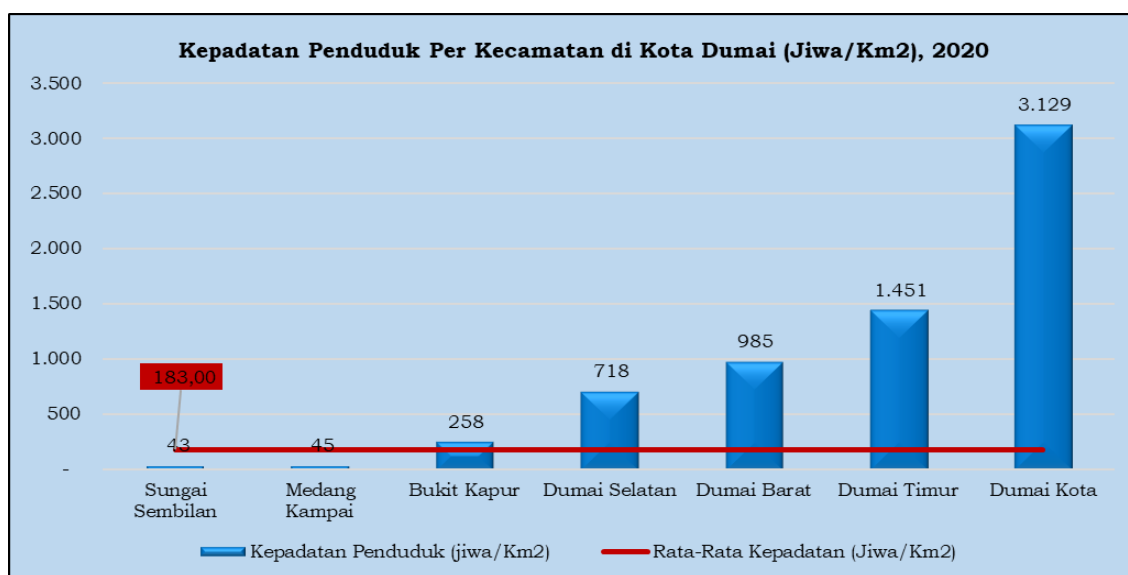
Pada dasarnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di suatu wilayah relatif sama dengan faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk di suatu wilayah. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah: Faktor fisik; Faktor iklim; Faktor tanah; Faktor vegetasi; Faktor suplai air; Faktor kebencanaan & penyakit; Faktor komunikasi; Faktor ekonomi; Faktor politis dan Faktor sumber daya alam. Berikut Tabel 2.12 yang menunjukkan tingkat kepadatan penduduk di Kota Dumai menurut Kecamatan selama periode 2010-2020.

Tabel 2.12
Perkembangan Kepadatan Penduduk Kota Dumai dan Kecamatan
Tahun 2010-2020

Kecamatan	Luas wilayah (Km)	Perkembangan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Dumai, 2010-2020											Rata-Rata Pertumbuhan / Tahun (%)	Kepadatan Tertinggi 2020
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Dumai Kota	13,00	-	-	3.240	3.217	3.482	3.543	3.603	3.659	3.712	3.762	3.129	-0,19	1,00
Dumai Timur	47,52	1.844	1.915	1.237	1.273	1.272	1.298	1.324	1.349	1.374	1.398	1.451	2,01	2,00
Dumai Barat	44,98	2.000	2.078	864	858	882	902	922	942	961	981	985	1,65	3,00
Dumai Selatan	73,50	-	-	663	686	688	702	716	730	743	755	718	1,03	4,00
Bukit Kapur	200,00	190	197	210	230	212	217	222	227	233	238	258	2,69	5,00
Medang Kampai	373,00	27	28	29	30	30	31	31	32	33	33	45	5,98	6,00
Sungai Sembilan	975,38	28	29	31	33	31	32	33	33	34	35	43	4,51	7,00
Kota Dumai	1.727,38	147	152	157	162	162	166	169	172	176	179	183	1,95	0,00

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka, 2021

Jika dilihat kepadatan penduduk per Kecamatan pada tahun 2020 maka Kecamatan dengan kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Dumai Kota yaitu 3.129 jiwa/km² dan paling jarang terdapat di Kecamatan Sungai Sembilan dengan kepadatan sebanyak 43 jiwa/km².



Gambar 2.7: Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2020

Dari 7 Kecamatan yang terdapat di Kota Dumai menunjukkan bahwa hanya ada dua Kecamatan dimana kepadatannya di bawah rata-rata Kota Dumai sebanyak 183 jiwa/km² yaitu Kecamatan Sungai Sembilan dan Medang Kampai masing-masing sebanyak 43 jiwa/km² dan 45 jiwa/km² sementara lima Kecamatan lainnya dengan kepadatan di atas rata-rata Kota Dumai. Jelasnya lihat Gambar 2.7 di atas.

Kepadatan penduduk yang terlalu tinggi cenderung menurunkan kualitas hidup orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut. Hal ini terjadi karena kesempatan kerja dan tempat tinggal yang ada, tidak mampu mengakomodasi jumlah penduduk yang semakin banyak. Sehingga, nantinya

ada orang-orang yang tidak bisa mengakses tempat tinggal ataupun lapangan pekerjaan. Berikut ini adalah beberapa dampak dari kepadatan penduduk yang terlalu tinggi terhadap suatu wilayah.

- 1) Munculnya kawasan-kawasan kumuh (*slum*) dengan tempat tinggal informal serta lingkungan hidup yang tidak layak huni
- 2) Tidak cukupnya lapangan pekerjaan sehingga muncul sektor-sektor informal seperti PKL dan buruh ilegal yang tidak terdokumentasikan dengan baik
- 3) Turunnya kualitas lingkungan dan kualitas hidup masyarakat
- 4) Turunnya *image* estetik dari sebuah perkotaan jika ada permukiman kumuh
- 5) Terganggunya keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat di wilayah tersebut
- 6) Risiko munculnya penyakit dari lingkungan hidup kawasan kumuh yang tidak bersih
- 7) Munculnya kesenjangan sosial yang tinggi antara orang-orang yang sukses dan orang-orang yang tidak mampu mengakses sarana dan prasarana dasar
- 8) Kurangnya sarana dan prasarana dasar untuk menunjang orang-orang yang sangat banyak (kurang lebarnya jalan, kurang banyaknya kereta, kurang baiknya jaringan fiber optik internet, dsb)

Secara umum, kita dapat menyimpulkan bahwa dampak dari suatu daerah yang penduduknya terlalu padat cenderung negatif. Oleh karena itu diperlukan upaya pemerataan pembangunan antar wilayah guna untuk mengurangi kepadatan penduduk pada suatu wilayah dan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan *carrying capacity*.

Pada dasarnya, pemanfaatan teknologi tinggi dan inovasi-inovasi baru dapat meningkatkan kemampuan suatu wilayah untuk menampung penduduk dan aktivitas manusia. Teknologi baru seperti transportasi yang lebih efisien, perumahan vertikal, pengelolaan sampah berteknologi tinggi, dan kemajuan pada penyediaan sarana prasarana dasar dapat meningkatkan *Carrying Capacity* dari suatu wilayah.

2.2.4.4 Perkembangan Sex Rasio Penduduk

Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Rasio Jenis Kelamin (RJK) adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan.

Sex ratio dapat digunakan untuk menunjukkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan. Perkembangan Kota Dumai selama tahun 2015-2020 mengalami penurunan sebesar -0,76% per tahun. Pada tahun 2015, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 149.767 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 138.025 jiwa dengan sex ratio sebesar 108,51. Artinya setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 108 jiwa penduduk laki-laki. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan sex rasio, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 162.769 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 154.013 jiwa dengan sex ratio sebesar 105,69. Artinya setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 105 jiwa penduduk laki-laki.

Penurunan sex rasio tersebut dapat disebabkan oleh tingkat kelahiran, meninggal, imigrasi dan emigrasi perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Pola seleksi alam pada rasio jenis kelamin dapat dipengaruhi oleh kualitas dan stabilitas habitat langsung, serta oleh sifat-sifat sejarah kehidupan, kompetisi dan penyebaran, yang mempengaruhi persaingan lokal pada pasangan atau sumber daya. Perkembangan Sex Rasio Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Dumai, 2015-2020.

Jika dilihat perkembangan sex rasio per Kecamatan maka terdapat Kecamatan yang memiliki penurunan sex rasio tertinggi yaitu Kecamatan Dumai Selatan dengan pertumbuhan sebesar -1,98% per tahun selama tahun 2015-2020 atau turun dari 113,54 tahun 2015 menjadi 105,03 tahun 2020.

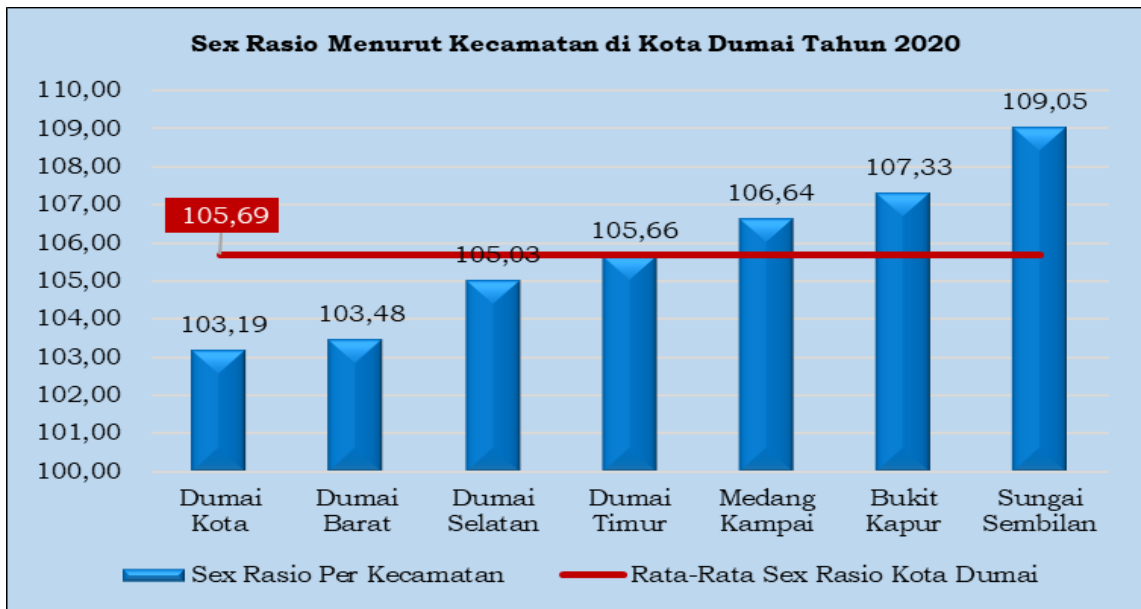
Tabel 2.13
Perkembangan Sex Rasio Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Dumai, 2015-2020

No	Kecamatan	Perkembangan Sex Rasio Penduduk						Rata-Rata Pertumbuhan /Tahun (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Bukit Kapur	109,36	108,14	105,29	108,15	107,88	107,33	-0,32
2	Medang Kampai	110,89	111,10	108,12	111,09	110,84	106,64	-0,01
3	Sungai Sembilan	110,53	108,64	105,78	108,66	108,39	109,05	-0,47
4	Dumai Barat	105,87	103,52	100,82	103,51	103,26	103,48	-0,60
5	Dumai Selatan	113,54	104,74	102,01	104,75	104,49	105,03	-1,98
6	Dumai Timur	107,42	105,14	102,38	105,14	104,88	105,66	-0,58
7	Dumai Kota	104,52	102,10	99,46	102,10	101,86	103,19	-0,62
8	Kota Dumai	108,51	105,40	102,64	105,40	105,16	105,69	-0,76

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka, 2021

Pada tahun 2020 sex rasio terendah terdapat di Kecamatan Dumai Kota sebanyak 103,19 dan tertinggi terdapat di Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 109,05. Berdasarkan Gambar 2.8 dapat dilihat bahwa terdapat 4 Kecamatan dengan sex rasio di atas rata-rata dan 3 Kecamatan di bawah rata-

rata Kota Dumai. Sex rasio penduduk menurut Kecamatan di Kota Dumai tahun 2020 disajikan pada Gambar 2.8 berikut.



Gambar 2.8: Sex Rasio Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2020

Perkembangan data mengenai rasio jenis kelamin atau sex rasio berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Pengembangan pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya laki-laki dan perempuan dalam umur yang sama. Informasi tentang rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen dan keterlibatan perempuan dalam bidang kewirausahaan.

2.2.4.5 Struktur Usia Penduduk

Struktur umur penduduk Kota Dumai menurut kelompok umur dan jenis kelamin sangat penting dilakukan analisis karena hal ini berkaitan dengan distribusi terhadap penduduk dalam usia kerja yang berimplikasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi karena jika penduduk usia kerja bertambah maka juga akan mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan perekonomian serta akan mengurangi tingkat ketergantungan pada orang tua. Pada tahun 2020 jumlah penduduk yang berumur antara 65 tahun hingga di atas 75 tahun sebanyak 11.469 atau 6,62%. Sedangkan

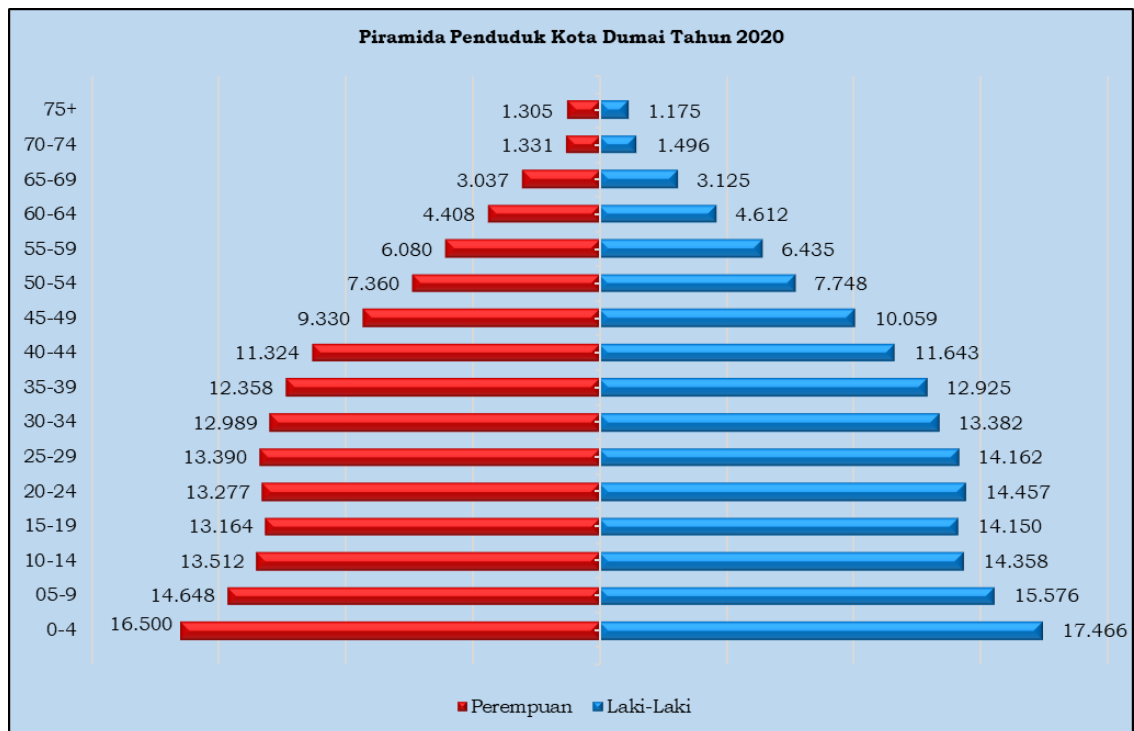
Bila umur dikelompokkan menjadi kelompok umur tidak produktif (0–14 tahun dan 65–75+) dan produktif (15–64 tahun) pada tahun 2020. Maka rasio antara jumlah penduduk produktif sebesar 67,32% atau sebanyak

213.253 jiwa dan sebesar 32,68% atau sebanyak 103.529 jiwa tidak produktif. Kelompok umur tidak produktif (belum produktif) yaitu kelompok umur 0-14 tahun sebanyak 92.060 jiwa atau 29,067% dan kelompok umur tidak produktif 65-75+ sebanyak 11.469 jiwa atau sebesar 3,62%.

Tingginya proporsi umur penduduk belum produktif atau usia dini dan usia sekolah sangat memerlukan perhatian dari aspek peningkatan akses kesehatan dan pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan.

Selain itu pada kelompok umur tidak produktif 65-75+ harus menjadi perhatian terutama terkait dengan peningkatan akses kesehatan melalui penyediaan pangan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan untuk berobat. Kurangnya kedua akses tersebut akan mempengaruhi penurunan kondisi kesehatan yang menyebabkan penurunan angka harapan hidup.

Oleh karena itu harus tetap memperhatikan kelompok umur ini karena lebih rentan terhadap penyakit sehingga diperlukan penyediaan sarana dan prasarana dan perbaikan pelayanan kesehatan dan penyediaan pangan yang berkualitas dengan harga terjangkau. Struktur penduduk menurut kelompok umur Kota Dumai tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.9 berikut.



Gambar 2.9: Piramida Penduduk Kota Dumai Tahun 2020

2.2.4.6 Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk

Dependency Ratio dapat digunakan sebagai indikator yang dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong daerah maju

atau yang sedang berkembang dengan cara membandingkan antara kelompok umur produktif (15-64 tahun) dengan kelompok umur tidak produktif (0-14 dan 64 tahun ke atas). Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif.

Selama periode 2015-2020, perkembangan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) mengalami pertumbuhan sebesar 2,43% per tahun dan usia tidak produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas) tumbuh sebesar 9,90% per tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa terjadinya penurunan rasio ketergantungan sebesar -1,05% per tahun. Penurunan rasio ketergantungan tersebut yang disebabkan oleh laju pertumbuhan usia produktif lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan usia tidak produktif. Hal tersebut dapat terjadi karena angka kelahiran atau fertilitas yang terus mengalami penurunan dan angka kematian atau mortalitas menjelang usia tidak produktif yaitu usia 64 tahun ke atas. Nilai *dependency ratio* Kota Dumai masuk kategori sangat tinggi selama periode 2015-2020 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.14 dan Gambar 2.10 berikut.

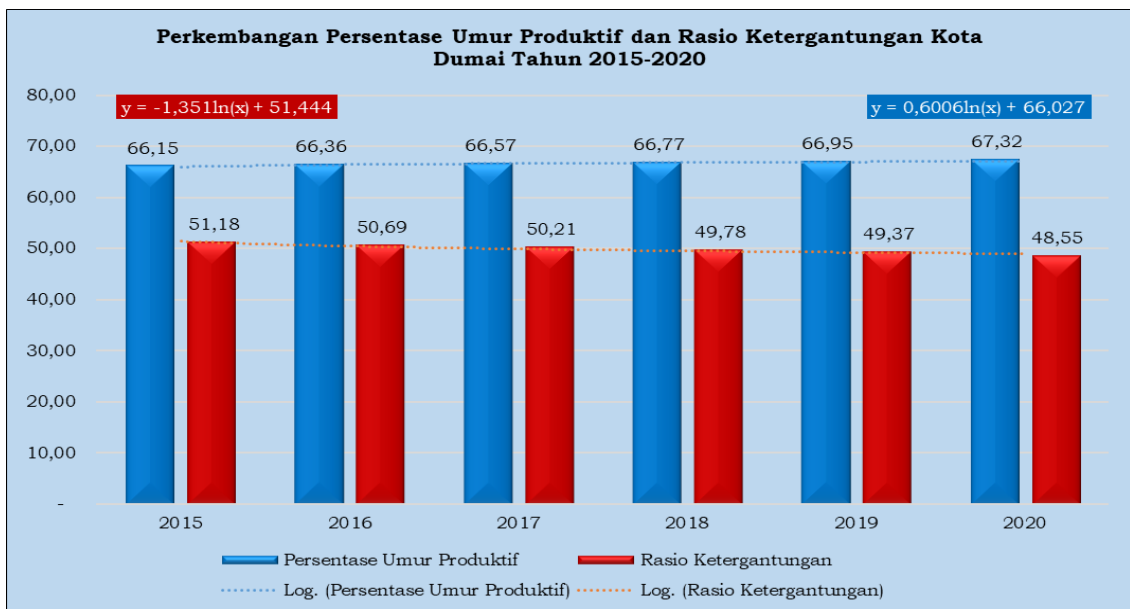
Tabel 2.14
Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Dumai
Tahun 2015-2020

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	0-4	33.727	33.893	33.996	34.063	34.085	33.966	0,14
2	5-9	29.048	29.533	30.038	30.552	31.037	30.224	0,81
3	10-14	26.629	26.932	27.137	27.326	27.494	27.870	0,92
4	15-19	24.984	25.221	25.542	25.875	26.231	27.314	1,81
5	20-24	24.975	24.894	24.750	24.616	24.554	27.734	2,25
6	25-29	26.132	26.646	27.103	27.437	27.614	27.552	1,07
7	30-34	24.797	25.136	25.431	25.765	26.157	26.371	1,24
8	35-39	22.958	23.228	23.488	23.737	24.017	25.283	1,96
9	40-44	19.689	20.415	21.087	21.701	22.183	22.967	3,13
10	45-49	16.750	17.521	18.287	19.047	19.786	19.389	3,00
11	50-54	13.006	13.662	14.346	15.056	15.779	15.108	3,11
12	55-59	9.678	10.299	10.896	11.495	12.108	12.515	5,28
13	60-64	6.193	6.687	7.218	7.767	8.315	9.020	7,81
14	65-69	3.976	4.213	4.470	4.758	5.078	6.162	9,31
15	70-74	1.824	1.933	2.051	2.183	2.330	2.827	9,31
16	75+	1.600	1.695	1.799	1.915	2.044	2.480	9,31
Umur Produktif (15-64 Tahun)		189.162	193.709	198.148	202.496	206.744	213.253	2,43
Umur Belum Produktif (0-14 Tahun)		89.404	90.358	91.171	91.941	92.616	92.060	0,59
Umur Tidak Produktif (65-75+ tahun)		7.401	7.841	8.319	8.855	9.452	11.469	9,31
Persentase Umur Produktif (%)		66,15	66,36	66,57	66,77	66,95	67,32	0,35
Rasio Ketergantungan		51,18	50,69	50,21	49,78	49,37	48,55	-1,05
Jumlah Penduduk (jiwa)		285.967	291.908	297.638	303.292	308.812	316.782	2,07

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka, 2016-2021

Tingginya *dependency ratio* tersebut akan menjadi beban tersendiri bagi pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan umum dan dunia usaha dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan

masyarakat terutama kelompok umur produktif. Upaya yang dapat dilakukan dengan mengimbanginya tingginya *dependency ratio* adalah dengan kenaikan UMR/UMK. UMK Kota Dumai tahun 2020 Rp 3.383.834,29 atau mengalami kenaikan sekitar 5,47 persen dibanding tahun 2019 sebesar Rp. 3.198.738,55. Ini berarti mengalami kenaikan sebesar Rp 185.095,74. Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Dumai, 2015-2020.



Gambar 2.10: Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Dumai, 2015-2020.

Dampak dari tingginya rasio ketergantungan antara penduduk antara lain:

- 1) Penerimaan pajak yang lebih rendah. Pensiunan membayar pajak penghasilan lebih rendah. Oleh karena itu, penduduk usia kerja memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk membayar pajak; belanja pemerintah lebih tinggi. Pemerintah berkomitmen untuk membayar pensiun negara dan manfaat terkait seperti jaminan pendapatan minimum. Ada juga tuntutan yang lebih besar untuk pengeluaran tidak langsung untuk pensiunan. Orang di atas 65 tahun lebih mungkin memerlukan perawatan kesehatan. Oleh karena itu, ada tuntutan yang lebih besar ditempatkan pada pengeluaran pemerintah oleh kenaikan rasio ketergantungan;
- 2) Potensi kenaikan pajak yang lebih tinggi. Tekanan pada keuangan pemerintah dapat menyebabkan tarif pajak yang lebih tinggi pada penduduk pekerja atau produktif, yang dapat menciptakan disinsentif untuk bekerja dan mengurangi pendapatan. Pemerintah mungkin terpaksa

menggunakan lebih banyak pendapatan dari pajak tidak langsung atau pajak kekayaan.

- 3) Dana pensiun yang lebih rendah. Pertambahan pensiunan juga meningkatnya kebutuhan dana pensiun. Juga dapat menyebabkan krisis kredit dan suku bunga rendah. Tekanan untuk menaikkan usia pensiun. Karena kenaikan biaya pensiun, ada tekanan untuk menaikkan usia pensiun baik di sektor swasta maupun sektor publik.
- 4) Daya saing, jika suatu perekonomian mengalami peningkatan rasio ketergantungan yang lebih cepat dari rata-rata global, hal tersebut dapat memengaruhi daya saing internasional dan menyebabkan produktivitas yang lebih rendah dan ini akan menyebabkan penurunan daya saing daerah.

2.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.3.1.1 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator untuk melihat tingkat percepatan perkembangan pembangunan perekonomian suatu daerah, karena PDRB adalah produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu wilayah dengan dukungan faktor-faktor produksi dalam wilayah tersebut mengikut perkembangan harga dan harga konstan. Nilai PDRB yang dihasilkan dalam suatu wilayah terdiri dari PDRB ADHB dan ADHK terhadap 17 lapangan usaha.

Perkembangan nilai PDRB ADHB Kota Dumai dapat digunakan untuk menganalisis pergerakan kegiatan ekonomi masyarakat baik yang disebabkan oleh pertambahan jumlah produksi dan kenaikan harga barang dan jasa, struktur perekonomian sektoral dan struktur perekonomian regional yaitu mengetahui kontribusi Kota Dumai terhadap perekonomian wilayah dan tingkat konsentrasi dan pemerataan perekonomian wilayah di Provinsi Riau.

Tabel 2.15 menunjukkan bahwa nilai PDRB ADHB Kota Dumai dengan migas pada tahun 2010 adalah Rp. 17,49 triliun kemudian meningkat menjadi Rp. 36,32 triliun tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,64% per tahun. Peningkatan nilai PDRB ADHB ini menunjukkan adanya perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat berupa terjadinya peningkatan jumlah produksi dan harga barang/jasa di Kota Dumai.

Sektor dengan perkembangan nilai PDRB ADHB tertinggi adalah industri pengolahan, dimana pada tahun 2010 senilai Rp. 9,23 triliun kemudian meningkat menjadi Rp. 21,78 triliun pada tahun 2020 dengan pertumbuhan sebesar 9,10% per tahun. Sedangkan sector dengan perkembangan nilai PDRB

ADHB terendah adalah jasa perusahaan, pada tahun 2010 hanya sebesar Rp. 710 juta kemudian meningkat menjadi Rp. 1,630 milyar tahun 2020, sebagaimana yang diuraikan pada Tabel 2.15.

Selanjutnya jika diamati perkembangan pertumbuhan secara relative, maka sektor dengan pertumbuhan tertinggi selama periode tahun 2010-2020 adalah pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 28,67% per tahun dengan nilai PDRB ADHB meningkat dari Rp. 9,077 milyar pada tahun 2010 menjadi Rp. 73,720 milyar tahun 2020.

Sedangkan sektor dengan pertumbuhan terendah dalam periode yang sama adalah jasa perusahaan yaitu hanya tumbuh sebesar 4,29% per tahun atau dengan nilai PDRB ADHB Rp. 710 juta pada tahun 2010 kemudian hanya meningkat menjadi Rp. 2,050 milyar tahun 2020. Rendah nilai PDRB ADHB jasa perusahaan disebabkan oleh jumlah perusahaan yang bergerak di sector ini yang terbatas dan jasa yang diberikan pada pihak lain juga masih sangat terbatas. Seperti jasa hukum, jasa akuntan dan pembukuan, jasa pengolahan dan penyajian data, jasa bangunan, arsitek dan teknik, jasa periklanan dan jasa persewaan mesin dan peralatan yang diberikan

Tabel 2.15
Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Dumai Tahun 2010-2020

Kategori	Sektoral	Tahun											Rata-Rata Pertumbuhan/Tahun (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.110.864	1.195.515	1.247.514	1.290.663	1.437.575	1.551.170	1.687.641	1.807.094	1.875.180	1.923.180	2.079.210	6,50
B	Pertambangan dan Penggalian	85.133	87.981	90.719	93.219	108.905	120.472	121.860	116.791	120.040	128.170	129.580	4,43
C	Industri Pengolahan	9.227.341	9.468.326	9.345.365	10.909.916	12.499.495	13.521.271	15.058.108	16.565.051	18.660.480	20.865.620	21.783.300	9,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9.077	8.604	7.674	7.556	11.694	18.026	24.522	27.095	28.100	31.770	73.720	28,67
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.274	3.374	3.520	3.455	3.654	4.045	4.293	4.741	4.880	5.330	5.600	5,58
F	Konstruksi	2.064.270	2.230.761	2.337.085	2.556.625	2.562.176	2.869.884	3.214.658	3.533.022	3.786.760	4.049.170	3.941.630	6,78
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.392.882	3.681.731	3.861.649	4.014.813	4.589.146	4.691.523	5.000.295	5.250.799	5.413.960	5.736.850	5.257.960	4,62
H	Transportasi dan Pergudangan	429.143	477.524	551.241	615.012	727.107	807.764	877.797	918.538	973.790	1.055.630	726.940	6,42
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	99.042	113.142	126.322	162.082	200.382	235.071	260.521	280.817	303.730	319.620	258.810	10,81
J	Informasi dan Komunikasi	127.002	145.290	173.010	198.535	234.989	270.710	294.247	336.154	380.260	418.390	457.240	13,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	322.902	308.614	462.455	578.398	366.129	355.025	365.887	375.459	390.060	397.140	409.210	4,52
L	Real Estate	78.110	87.926	92.715	100.012	113.120	127.215	134.709	143.279	153.050	161.680	164.040	7,76
M,N	Jasa Perusahaan	710	809	965	1.071	1.224	1.419	1.555	1.663	1.840	2.060	1.630	9,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	389.026	407.170	453.574	474.552	494.473	524.616	541.616	553.239	568.680	587.760	590.240	4,29
P	Jasa Pendidikan	67.854	84.449	89.696	96.838	122.921	142.979	149.543	155.051	161.940	177.130	185.340	10,86
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	23.593	25.736	29.853	33.350	37.775	46.880	49.787	53.468	56.820	65.840	77.380	12,74
R,S,T,U	Jasa lainnya	65.249	79.470	83.006	95.672	117.702	142.499	158.356	176.899	196.640	220.030	181.040	11,38
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MIGAS		17.495.472	18.406.421	18.956.363	21.231.766	23.628.467	25.430.570	27.945.396	30.299.161	33.076.210	36.145.360	36.322.880	7,64

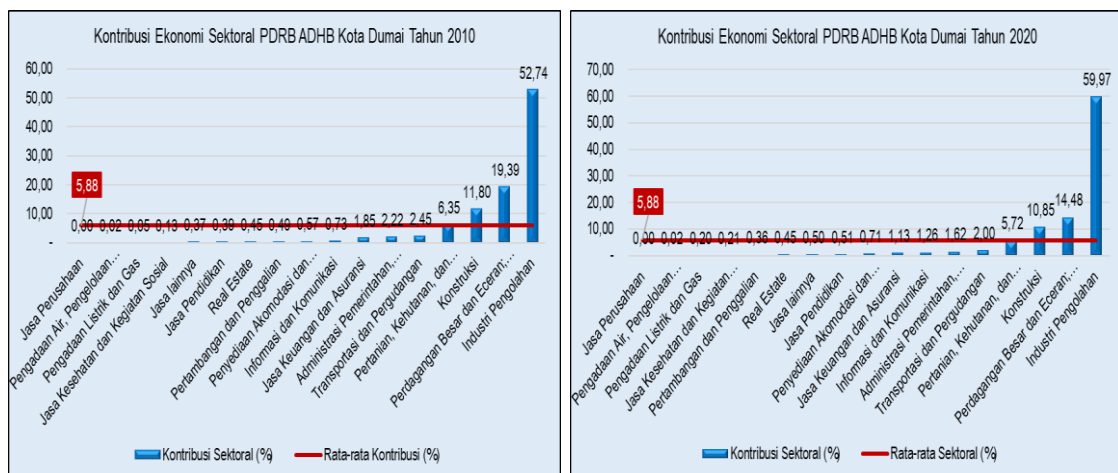
Sumber: BPS, PDRB Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2020

Selanjutnya perkembangan kontribusi sektoral PDRB ADHB terhadap perkembangan perubahan struktur perekonomian Kota Dumai Tahun 2010-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.16 dan Gambar 2.11.

Tabel 2.16 menunjukkan terdapat delapan sektor ekonomi pada PDRB ADHB yang mengalami penurunan kontribusi selama tahun 2010-2020. Sektor dengan penurunan kontribusi tertinggi adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar -2,99% per tahun dan terendah adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menurun sebesar -0,94% per tahun atau turun dari 6,35% pada tahun 2010 menjadi 5,72% pada tahun 2020.

Sebaliknya sektor yang mengalami peningkatan kontribusi sebanyak sembilan sector. Sektor yang mengalami peningkatan kontribusi tertinggi adalah Pengadaan Listrik dan Gas dengan pertumbuhan sebesar 20,20% per tahun dan sector dengan peningkatan pertumbuhan terendah adalah real estate sebesar 0,18% per tahun.

Selanjuta jika diamati dari aspek perubahan struktur ekonomi dari tahun 2010 ke 2020 menunjukkan terjadinya perubahan struktur ekonomi pada enam sector antara lain Jasa Keuangan dan Asuransi; Informasi dan Komunikasi; Pertambangan dan Penggalian; Real Estate; Jasa Pendidikan dan Jasa lainnya. Sektor dengan perubahan struktur yang paling tinggi adalah pertambangan dan penggalian dimana pada tahun 2010 berada di urutan ke 10 dengan kontribusi sebesar 0,49% kemudian mengalami penurunan ke urutan ke 13 dengan kontribusi sebesar 0,36% pada tahun 2020. Jelasnya lihat Gambar 2.11 berikut.



Gambar 2.11: Kontribusi Sektoral PDRB ADHB Kota Dumai, 2010 dan 2020.

Tabel 2.16
Perkembangan Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Dumai Tahun 2010-2020

Kategori	Sektoral	Tahun											Rata-Rata Pertumbuhan/Tahun (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,35	6,50	6,58	6,08	6,08	6,10	6,04	5,96	5,67	5,32	5,72	-0,94
B	Pertambangan dan Penggalian	0,49	0,48	0,48	0,44	0,46	0,47	0,44	0,39	0,36	0,35	0,36	-2,92
C	Industri Pengolahan	52,74	51,44	49,30	51,38	52,90	53,17	53,88	54,67	56,42	57,73	59,97	1,33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05	0,07	0,09	0,09	0,08	0,09	0,20	20,20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	-1,80
F	Konstruksi	11,80	12,12	12,33	12,04	10,84	11,29	11,50	11,66	11,45	11,20	10,85	-0,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,39	20,00	20,37	18,91	19,42	18,45	17,89	17,33	16,37	15,87	14,48	-2,80
H	Transportasi dan Pergudangan	2,45	2,59	2,91	2,90	3,08	3,18	3,14	3,03	2,94	2,92	2,00	-1,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,57	0,61	0,67	0,76	0,85	0,92	0,93	0,93	0,92	0,88	0,71	2,79
J	Informasi dan Komunikasi	0,73	0,79	0,91	0,94	0,99	1,06	1,05	1,11	1,15	1,16	1,26	5,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,85	1,68	2,44	2,72	1,55	1,40	1,31	1,24	1,18	1,10	1,13	-2,57
L	Real Estate	0,45	0,48	0,49	0,47	0,48	0,50	0,48	0,47	0,46	0,45	0,45	0,18
M,N	Jasa Perusahaan	0,0041	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0057	0,0045	1,45
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,22	2,21	2,39	2,24	2,09	2,06	1,94	1,83	1,72	1,63	1,62	-2,99
P	Jasa Pendidikan	0,39	0,46	0,47	0,46	0,52	0,56	0,54	0,51	0,49	0,49	0,51	3,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,13	0,14	0,16	0,16	0,16	0,18	0,18	0,18	0,17	0,18	0,21	4,92
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,37	0,43	0,44	0,45	0,50	0,56	0,57	0,58	0,59	0,61	0,50	3,34
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MIGAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1,59

Sumber: BPS, PDRB Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2020 dan Olahan 2021

Perkembangan nilai PDRB ADHK Kota Dumai dengan migas selama tahun 2010-2020 menunjukkan terjadinya peningkatan sebesar 3,4% per tahun atau naik dari Rp. 17,49 triliun pada tahun 2010 kemudian meningkat menjadi Rp. 24,59 triliun tahun 2020. Peningkatan nilai PDRB ADHK ini menunjukkan adanya perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat melalui peningkatan jumlah produksi barang/jasa di Kota Dumai. Sektor dengan perkembangan nilai PDRB ADHK tertinggi adalah industri pengolahan, dimana pada tahun 2010 senilai Rp. 9,23 triliun kemudian meningkat menjadi Rp. 15,018 triliun pada tahun 2020 dengan pertumbuhan sebesar 5,01% per tahun. Sedangkan sektor dengan perkembangan nilai PDRB ADHK terendah adalah jasa perusahaan, pada tahun 2010 hanya sebesar Rp. 710 juta kemudian meningkat menjadi Rp. 1,050 milyar tahun 2020 dengan pertumbuhan sebesar 4,42% per tahun.

Selanjutnya secara relatif sektor dengan pertumbuhan tertinggi selama tahun 2010-2020 adalah pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 21,71% per tahun dengan nilai PDRB ADHK meningkat dari Rp. 9,077 milyar pada tahun 2010 menjadi Rp. 45,61 milyar tahun 2020. Sedangkan sektor dengan pertumbuhan terendah dan bahkan mengalami kontraksi adalah pertambangan dan penggalian yaitu tumbuh sebesar -0,91% per tahun atau dengan nilai PDRB ADHK pada tahun 2010 yaitu Rp. 85,13 milyar kemudian turun menjadi Rp. 77,49 milyar tahun 2020. Penurunan pertumbuhan tersebut disebabkan oleh penurunan jumlah produksi barang dan jasa pada sektor tersebut, sehingga menyebabkan pengurangan jumlah aktifitas ekonomi termasuk investasi. Pengurangan investasi akibat terjadinya penurunan harga komoditas migas selama periode tahun 2010-2020. Harga migas khususnya harga minyak bumi dunia mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2010 ke 2020 sebesar 33,61% atau turun dari 79,48 USD per barrel pada tahun 2010 menjadi 52,77 USD per barrel pada tahun 2020. Perkembangan nilai dan rata-rata pertumbuhan PDRB ADHK dapat dilihat pada Tabel 2.17 berikut.

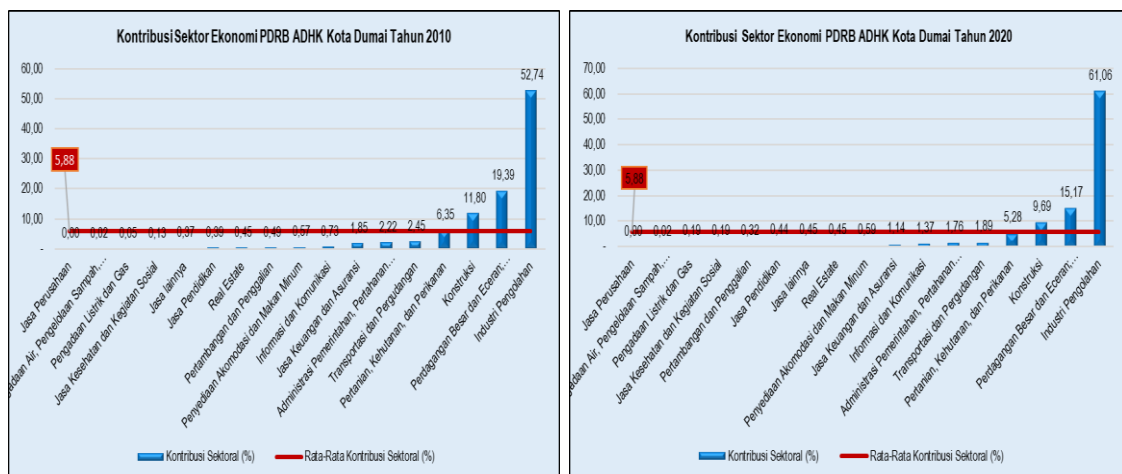
Tabel 2.17
Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Dumai Tahun 2010-2020

Kategori	Sektoral	Tahun											Rata-Rata Pertumbuhan/Tahun (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.110.864	1.132.320	1.131.620	1.119.970	1.138.071	1.139.159	1.152.199	1.190.685	1.223.320	1.247.700	1.299.830	1,59
B	Pertambangan dan Penggalian	85.133	85.550	86.416	86.480	87.259	87.421	83.885	79.732	76.740	78.510	77.490	-0,91
C	Industri Pengolahan	9.227.341	9.771.772	10.035.477	10.414.551	11.059.234	11.357.156	12.069.823	12.657.132	13.605.100	14.580.040	15.018.790	5,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9.077	9.862	10.521	11.612	13.197	14.484	17.108	17.285	17.840	19.140	45.610	21,71
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.274	3.313	3.342	3.363	3.429	3.524	3.518	3.680	3.720	3.950	4.110	2,32
F	Konstruksi	2.064.270	2.041.231	2.117.407	2.181.412	2.081.314	2.119.777	2.184.087	2.300.697	2.360.060	2.458.030	2.383.800	1,50
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.392.882	3.543.891	3.652.938	3.735.617	3.771.270	3.776.044	3.887.613	3.967.113	4.042.840	4.159.510	3.730.220	1,03
H	Transportasi dan Pergudangan	429.143	453.614	503.239	537.461	590.801	602.752	632.138	650.890	675.940	712.130	465.480	1,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	99.042	107.987	123.319	134.379	146.745	150.191	154.067	163.773	174.350	180.950	144.750	4,29
J	Informasi dan Komunikasi	127.002	144.675	170.547	206.134	229.295	245.697	255.850	271.847	287.480	308.200	336.680	10,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	322.902	292.164	397.959	471.333	285.154	265.537	265.884	264.908	270.440	270.750	280.070	0,42
L	Real Estate	78.110	81.754	83.056	86.988	90.249	94.773	96.114	99.410	103.200	108.600	110.400	3,53
M,N	Jasa Perusahaan	710	772	832	884	959	1.032	1.069	1.143	1.250	1.340	1.050	4,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	389.026	402.020	412.484	419.717	421.466	429.989	430.683	431.150	432.380	442.430	432.880	1,09
P	Jasa Pendidikan	67.854	74.950	78.211	82.520	89.918	94.631	95.278	97.723	101.570	107.280	108.790	4,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	23.593	24.430	26.531	28.650	29.385	32.306	32.586	34.376	36.290	40.220	46.100	7,00
R,S,T,U	Jasa lainnya	65.249	71.958	75.947	84.597	94.630	102.020	106.502	115.967	125.950	137.020	109.570	5,75
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MIGAS		17.495.472	18.242.262	18.909.846	19.605.668	20.132.376	20.516.494	21.468.404	22.347.512	23.538.470	24.855.800	24.595.620	3,48

Sumber: BPS, PDRB Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2020

Jika diamati dari aspek perkembangan kontribusi sektoral dari selama tahun 2010-2020 menunjukkan adanya perubahan yang sangat signifikan dimana terdapat delapan sector yang mengalami penurunan kontribusi antara lain Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Pengalihan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Sebaliknya terdapat sembilan sector yang mengalami peningkatan kontribusi dan salah satu sector yang memberikan kontribusi tertinggi adalah industri pengolahan dimana pada tahun 2010 berkontribusi sebesar 52,74% dan meningkat menjadi 61,06% pada tahun 2020. Kondisi ini wajar karena Kota Dumai merupakan salah wilayah yang terdapat di Provinsi Riau dengan jumlah kawasan industri terbanyak terutama yang berskala besar dengan perusahaan multinasional baik yang bergerak dibidang pengolahan migas dan non migas seperti industri pengolahan turunan CPO dan sekaligus menjadikan Kota Dumai sebagai salah satu hub port terhadap ekspor CPO dan turunannya di Provinsi Riau dan bahkan terbesar di Sumatera. Jelasnya lihat Gambar 2.12 berikut.



Gambar 2.12: Kontribusi Sektoral PDRB ADHK Kota Dumai, 2010 dan 2020.

Tabel 2.18
Perkembangan Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Dumai Tahun 2010-2020

Kategori	Sektoral	Tahun											Rata-Rata Pertumbuhan/Tahun (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,35	6,21	5,98	5,71	5,65	5,55	5,37	5,33	5,20	5,02	5,28	-1,78
B	Pertambangan dan Penggalian	0,49	0,47	0,46	0,44	0,43	0,43	0,39	0,36	0,33	0,32	0,32	-4,21
C	Industri Pengolahan	52,74	53,57	53,07	53,12	54,93	55,36	56,22	56,64	57,80	58,66	61,06	1,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,19	18,23
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-1,09
F	Konstruksi	11,80	11,19	11,20	11,13	10,34	10,33	10,17	10,30	10,03	9,89	9,69	-1,92
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,39	19,43	19,32	19,05	18,73	18,40	18,11	17,75	17,18	16,73	15,17	-2,40
H	Transportasi dan Pergudangan	2,45	2,49	2,66	2,74	2,93	2,94	2,94	2,91	2,87	2,87	1,89	-1,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,57	0,59	0,65	0,69	0,73	0,73	0,72	0,73	0,74	0,73	0,59	0,70
J	Informasi dan Komunikasi	0,73	0,79	0,90	1,05	1,14	1,20	1,19	1,22	1,22	1,24	1,37	6,69
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,85	1,60	2,10	2,40	1,42	1,29	1,24	1,19	1,15	1,09	1,14	-2,96
L	Real Estate	0,45	0,45	0,44	0,44	0,45	0,46	0,45	0,44	0,44	0,44	0,45	0,07
M,N	Jasa Perusahaan	0,0041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,0054	0,00	0,82
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,22	2,20	2,18	2,14	2,09	2,10	2,01	1,93	1,84	1,78	1,76	-2,30
P	Jasa Pendidikan	0,39	0,41	0,41	0,42	0,45	0,46	0,44	0,44	0,43	0,43	0,44	1,37
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,13	0,13	0,14	0,15	0,15	0,16	0,15	0,15	0,15	0,16	0,19	3,47
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,37	0,39	0,40	0,43	0,47	0,50	0,50	0,52	0,54	0,55	0,45	2,11
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MIGAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,97

Sumber: BPS, PDRB Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2020 dan Olahan 2021

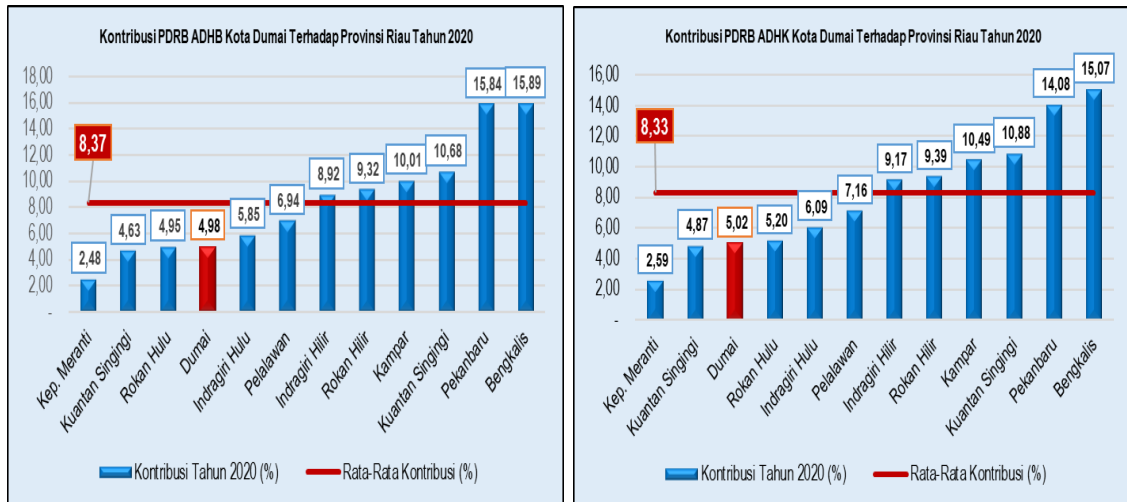
Sementara itu jika dilihat perkembangan kontribusi PDRB ADHB dan ADHK Kota Dumai terhadap perekonomian Provinsi Riau selama tahun 2010-2020 menunjukkan terjadinya peningkatan sebesar 1,34% per tahun atau dengan rata-rata kontribusi sebesar 4,10% per tahun menurut PDRB ADHB. Selanjutnya menurut PDRB ADHK terjadi peningkatan sebesar 1,13% per dengan rata-rata kontribusi per tahun sebesar 4,58% per tahun. Perkembangan kontribusi dan pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel 2.19 berikut.

Tabel 2.19
Perkembangan Kontribusi PDRB Kota Dumai Terhadap PDRB Provinsi Riau Tahun 2010-2020

No	Perkembangan Kontribusi	Tahun											Rata-Rata Pertumbuhan/Tahun (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Kontribusi PDRB HB Kota Dumai terhadap PDRB HB Provinsi Riau	4,50	3,79	3,42	3,51	3,51	3,91	4,10	4,27	4,36	4,70	4,98	4,10
2	Kontribusi PDRB HK Kota Dumai terhadap PDRB HK Provinsi Riau	4,50	4,37	4,29	4,29	4,23	4,33	4,66	4,74	4,88	5,02	5,02	4,58
3	Pertumbuhan Kontribusi PDRB HB Kota Dumai terhadap PDRB HB Provinsi Riau	0,00	-15,76	-9,79	2,45	0,02	11,58	4,73	4,27	1,97	7,97	5,90	1,34
4	Pertumbuhan Kontribusi PDRB HK Kota Dumai terhadap PDRB HK Provinsi Riau	0,00	-2,86	-1,94	0,10	-1,45	2,33	7,73	1,71	2,97	2,68	0,08	1,13

Sumber: BPS, PDRB Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2020 dan Olahan 2021

Selanjutnya dapat dijelaskan tentang perkembangan posisi kontribusi PDRB ADHB dan ADHK Kota Dumai dibandingkan dengan kabupaten kota terhadap Provinsi Riau tahun 2020. Kontribusi PDRB ADHB Kota Dumai berada di posisi ke empat terendah dengan kontribusi sebesar 4,98% dan berada dibawah rata-rata Provinsi Riau sebesar 8,37%. Sedangkan pada PDRB ADHK di urutan ke tiga terendah hanya berkontribusi sebesar 5,02% dan berada dibawah rata-rata Provinsi Riau sebesar 8,33%. Lihat Gambar 2.13 berikut.



Gambar 2.13: Posisi Kontribusi PDRB ADHB dan ADHK Kota Dumai dan Kabupaten Kota terhadap Provinsi Riau Tahun 2020.

Rendahnya posisi kontribusi PDRB ADHB dan ADHK Kota Dumai dibandingkan dengan delapan kabupaten kota lainnya pada tahun 2020, tidak terlepas dari jumlah penduduk yang sedikit atau hanya 4,95% dari jumlah penduduk Provinsi Riau, wilayah produksi menghasilkan barang dan jasa hanya seluas 2,42% dari luas wilayah Provinsi Riau, walaupun memiliki produktivitas pekerja pada 17 lapangan usaha sangat tinggi berada pada posisi ketiga untuk PDRB ADHB sebesar Rp. 281,49 juta per pekerja dan lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Riau sebesar Rp. 270,58 juta per pekerja dan posisi keempat pada PDRB ADHK sebesar Rp. 190,61 per pekerja dan lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Riau sebesar Rp. 183,10 juta per pekerja.

Melihat kondisi ini maka untuk meningkatkan kontribusi Kota Dumai pada perekonomian Provinsi Riau adalah dengan peningkatan investasi pada sector ekonomi terutama sector industri pengolahan dan sector jasa perdagangan yang memiliki nilai tambah tinggi atau dengan kata lain industri berbasis teknologi inovasi dan kreasi sehingga menghasilkan produk dan jasa yang bernilai tinggi.

2.3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi, produktivitas wilayah dan struktur ekonomi wilayah baik struktur perekonomian regional maupun struktur perekonomian sektoral.

Pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran penting dalam menilai kinerja perekonomian wilayah dan tujuan pembangunan wilayah.

Pertumbuhan ekonomi diukur dengan pertambahan PDRB ADHK dengan tahun dasar tertentu untuk mengeliminasi faktor kenaikan harga. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika tingkat kegiatan ekonomi tahun bersangkutan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Adapun manfaat analisis pertumbuhan ekonomi antara lain:

1. Mengetahui kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan daerah dalam kurun waktu tertentu;
2. Menyusun tipologi perkembangan wilayah (tipologi klassen);
3. Dasar penyusunan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perencanaan pembangunan sektoral atau regional;
4. Mengetahui sumber-sumber pertumbuhan ekonomi;
5. Ddasar untuk perumusan kebutuhan investasi;
6. Dasar pembuatan prakiraan bisnis dan target perekonomian wilayah.

Bagian ini secara khusus membahas pertumbuhan ekonomi selama tahun 2010-2020, terutama tahun 2020 akibat kondisi wabah Covid 19 yang melanda seluruh negara termasuk Kota Dumai. Dampak wabah Covid 19 tersebut diperkirakan akan mempengaruhi kinerja beberapa sector ekonomi bahkan akan mengalami kontraksi pertumbuhan seperti:

- Pertambangan dan penggalian, secara umum sector ini juga sangat terpengaruh karena berkurangnya aktifitas ekonomi sector lainnya sebagai pengguna hasil sector pertambangan dan penggalian.
- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sector terkena dampak dari penurunan aktivitas konsumsi dan produksi domestik, serta perdagangan internasional
- Transportasi dan Pergudangan, pada sektor transportasi akan sangat terpengaruh karena terjadinya penurunan pada angkutan udara terutama angkutan penumpang akibat pembatasan mobilitas masyarakat. Sementara aktivitas angkutan barang secara relative diperkirakan tertahan dan cenderung naik karena pengiriman barang sebagai dampak belanja online seiring dengan kebijakan WFH.
- Penyediaan Akomodasi dan Makan minum akan sangat terpengaruh akibat adanya penurunan wisatawan mancanegara dan domestik, pembatasan pergerakan masyarakat sehingga hotel sepi tamu dan restoran hanya bisa melakukan *delivery* atau *take away*, penurunan daya beli masyarakat yang disebabkan oleh menurunnya pendapatan masyarakat

yang berkurangnya aktifitas ekonomi masyarakat terutama berpendapatan rendah.

- Jasa perusahaan, sector ini akan sangat terdampak akibat wabah covid 19 karena penurunan jasa yang diberikan pada pihak lain akibat berkurangnya aktifitas ekonomi masyarakat sehingga berpengaruh terhadap jasa hukum, jasa akuntan dan pembukuan, jasa pengolahan dan penyajian data, jasa bangunan, arsitek dan teknik, jasa periklanan dan jasa persewaan mesin dan peralatan yang diberikan.
- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib juga akan terkena dampak karena pada sector ini mencakup kegiatan yang melibatkan mobilitas masyarakat dalam beraktifitas terutama dengan sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan, perundang-undangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundangan-undangan, kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan negara, keamanan dan keselamatan negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah serta kegiatan jaminan sosial wajib
- Sektor pertanian dan perkebunan diperkirakan Dalam jangka pendek sektor tanaman pangan tidak terganggu, namun akan menyebabkan gangguan pada ekspor dari hasil komoditas perkebunan dan perikanan.
- Sektor Industri diperkirakan menurun. Industri yang terkena dampak diantaranya industri yang tergabung dalam global supply/value chain dan/atau tidak memproduksi kebutuhan, seperti otomotif dan elektronik. Namun terdapat juga industri yang berkembang: industri makanan minuman, produk kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan farmasi.
- Untuk sektor konstruksi diperkirakan menurun karena Aktivitas terhenti seiring dengan penundaan atau penghentian berbagai proyek infrastruktur pemerintah. Aktivitas terhenti seiring dengan penundaan atau penghentian berbagai proyek infrastruktur pemerintah

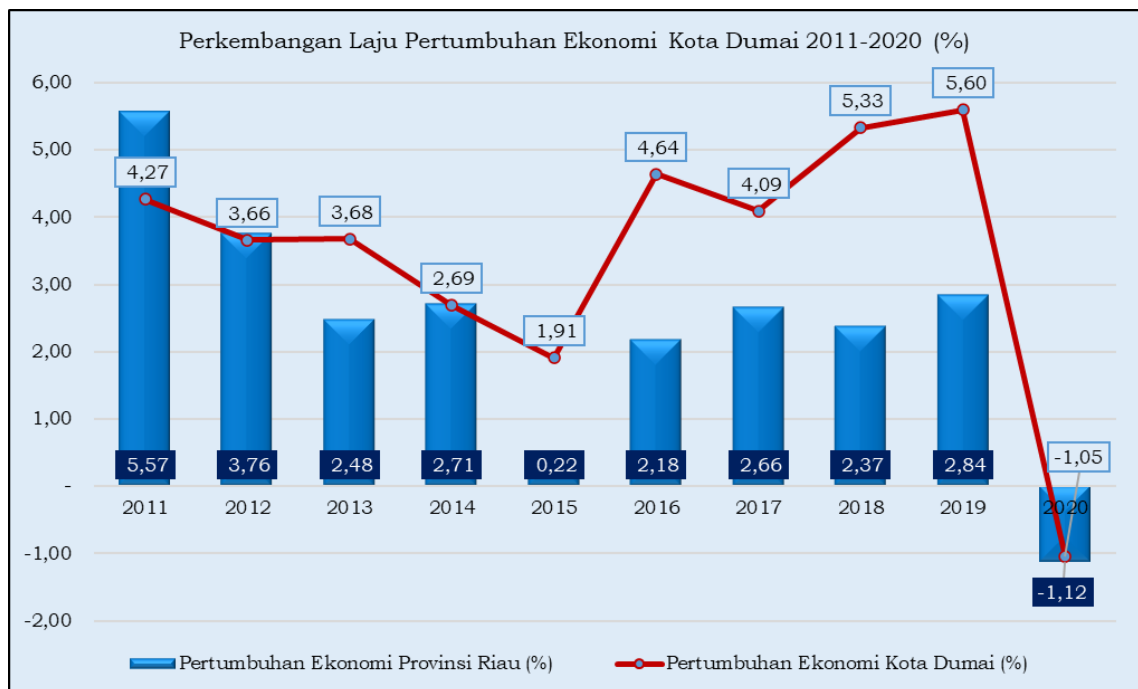
Sedangkan lapangan usaha yang diperkirakan meningkat di saat wabah Covid 19 masih terjadi diantaranya adalah:

- Sektor penyediaan listrik, Meski permintaan listrik industri dan bisnis mengalami penurunan, tetapi permintaan RT meningkat seiring dengan *work from home* (WFH) dan diskon tarif listrik.

- Sektor penyediaan jasa kesehatan diperkirakan Meningkatkan sejalan melonjaknya kebutuhan layanan kesehatan akibat penyebaran COVID-19.
- Sektor jasa informasi dan komunikasi juga diperkirakan meningkat seiring melonjaknya penggunaan data akibat kebijakan WFH.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu memberikan hasil yang positif jika diikuti pula oleh tingginya pertumbuhan penduduk, apalagi jika pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diikuti dengan kualitas sumberdaya manusia yang produktif, maka yang terjadi adalah penurunan produktivitas yang akan menyebabkan kemiskinan dan ketertinggalan pembangunan.

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai tahun 2011-2020 sebagaimana pada Gambar 2.14 menunjukkan sangat fluktuatif, dimana periode 2011-2015 mengalami trend penurunan, kemudian tahun 2015-2019 trend peningkatan dan tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,05%, namun demikian masih di atas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dengan kontraksi sebesar -1,12%.



Gambar 2.14: Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai 2011-2020.

Jika diamati selama periode 2011-2020, hanya pada tahun 2011, 2012 dan 2014 laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai yang berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Sedangkan pada tahun

2013 dan 2015 hingga tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Dumai di atas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau.

Selama periode 2011-2020, sektor yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai adalah Pengadaan Listrik dan Gas dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 21,71% per tahun, diikuti oleh sector Informasi dan Komunikasi dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 10,36% per tahun. Sedangkan sector ekonomi yang memberikan kontribusi terendah dan bahkan cenderung tumbuh negative adalah Pertambangan dan Penggalian.

Selanjutnya khusus pada tahun 2020, kontraksi laju pertumbuhan ekonomi sebesar -1,05% disebabkan oleh tujuh sector ekonomi yang mengalami pertumbuhan negative. Ketujuh sector adalah sector Transportasi dan Pergudangan tumbuh -34,64%; Jasa perusahaan tumbuh -21,64%; Jasa lainnya tumbuh -20,03%; Penyediaan Akomodasi dan Makan minum tumbuh -20,01%; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh -10,32%; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh -2,16%. Negativanya pertumbuhan tujuh sector tersebut tidak terlepas dari adanya pembatasan mobilitas penduduk yang berdampak pada berkurangnya mobilitas barang dan jasa sehingga mempengaruhi penawaran barang dan jasa oleh produsen dan masyarakat.

Kondisi perekonomian secara makro kedepannya tentu akan terpengaruh oleh kepastian kapan berakhirnya wabah Covid 19. Resiko tekanan ekonomi akibat Covid 19 akan menurun jika vaksin untuk penyembuhan Covid 19 bisa cepat ditemukan dan digunakan secara massal namun tidak berdampak negative Kesehatan masyarakat karena penyakit lainnya. Namun akan terjadi sebaliknya jika vaksin yang tepat belum ditemukan, maka tekanan terhadap kegiatan ekonomi akan semakin berat bahkan jika tidak ada kebijakan yang handal terhadap kondisi saat ini maka diperkirakan pertumbuhan ekonomi semakin lambat bahkan bisa cenderung terjadi resesi dalam jangka waktu tertentu.

Tabel 2.20
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektoral Kota Dumai Tahun 2011-2020

Kategori	Sektoral	Tahun											Rata-Rata Pertumbuhan/Tahun (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,00	1,93	-0,06	-1,03	1,62	0,10	1,14	3,34	2,74	1,99	4,18	1,59
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,49	1,01	0,07	0,90	0,19	-4,04	-4,95	-3,75	2,31	-1,30	-0,91
C	Industri Pengolahan	0,00	5,90	2,70	3,78	6,19	2,69	6,28	4,87	7,49	7,17	3,01	5,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,00	8,65	6,69	10,37	13,65	9,75	18,12	1,04	3,21	7,29	138,30	21,71
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	1,21	0,87	0,64	1,95	2,76	-0,16	4,60	1,09	6,18	4,05	2,32
F	Konstruksi	0,00	-1,12	3,73	3,02	-4,59	1,85	3,03	5,34	2,58	4,15	-3,02	1,50
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,00	4,45	3,08	2,26	0,95	0,13	2,95	2,04	1,91	2,89	-10,32	1,03
H	Transportasi dan Pergudangan	0,00	5,70	10,94	6,80	9,92	2,02	4,88	2,97	3,85	5,35	-34,64	1,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,00	9,03	14,20	8,97	9,20	2,35	2,58	6,30	6,46	3,79	-20,01	4,29
J	Informasi dan Komunikasi	0,00	13,92	17,88	20,87	11,24	7,15	4,13	6,25	5,75	7,21	9,24	10,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,00	-9,52	36,21	18,44	-39,50	-6,88	0,13	-0,37	2,09	0,11	3,44	0,42
L	Real Estate	0,00	4,66	1,59	4,73	3,75	5,01	1,41	3,43	3,81	5,23	1,66	3,53
M,N	Jasa Perusahaan	0,00	8,75	7,68	6,23	8,50	7,67	3,61	6,91	9,33	7,20	-21,64	4,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,00	3,34	2,60	1,75	0,42	2,02	0,16	0,11	0,29	2,32	-2,16	1,09
P	Jasa Pendidikan	0,00	10,46	4,35	5,51	8,96	5,24	0,68	2,57	3,94	5,62	1,41	4,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,00	3,55	8,60	7,99	2,56	9,94	0,87	5,49	5,57	10,83	14,62	7,00
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,00	10,28	5,54	11,39	11,86	7,81	4,39	8,89	8,61	8,79	-20,03	5,75
Produk Domestik Regional Bruto Dengan Migas		0,00	4,27	3,66	3,68	2,69	1,91	4,64	4,09	5,33	5,60	-1,05	3,48

Sumber: BPS, PDRB Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2020

2.3.1.3 PDRB Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan indikator terpenting yang menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah, sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil pembangunan. Indikator berhasil tidaknya pembangunan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan regional, bahkan tinggi rendahnya pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai determinasi kemajuan wilayah. Satu hal yang perlu diperhatikan bersama bahwa kemajuan wilayah tidak hanya ditentukan oleh besaran pendapatan regional, tapi juga tergantung dari banyaknya jumlah penduduk.

Oleh karena itu, salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat berdasarkan besarnya kenaikan pendapatan per kapita penduduk. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga Konstan per kapita dapat digunakan untuk menunjukkan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah, serta dapat digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran. PDRB per kapita secara agregatif menunjukkan kemampuan penduduk suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi.

Fungsi penghitungan pendapatan per kapita adalah untuk mengetahui apakah suatu wilayah bisa disebut sejahtera atau tidak. Pengukuran pendapatan per kapita juga berguna dalam menilai keterjangkauan suatu daerah. Ini dapat digunakan bersamaan dengan data soal harga sandang, pangan dan papan. Pendapatan per kapita dapat membantu menentukan apakah terjangkau tidaknya harga sandang, pangan dan papan oleh rata-rata keluarga. Sandang (pakaian) bermakna keharusan menjaga perilaku yang beradab, Pangan (makanan) bermakna keharusan berusaha mewujudkan mimpi agar menjadi nyata, sedangkan Papan (tempat tinggal) bermakna keharusan mampu beradaptasi memberi makna dalam peranan kehidupan harian. Oleh karena itu menjaga rasio harga sandang, pangan dan papan rumah terhadap pendapatan per kapita sangat berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan.

Perkembangan PDRB per kapita harga berlaku dan harga konstan Kota Dumai Tahun 2010-2020 ditunjukkan pada Tabel 2.21, selama periode tersebut PDRB per kapita Harga Berlaku dengan migas menunjukkan tren peningkatan dari Rp. 69,10 Juta per kapita pada tahun 2010 menjadi Rp. 114,66 juta per kapita pada tahun 2020 atau naik dengan pertumbuhan 5,27% per tahun. Sedangkan PDRB per kapita Harga Konstan mengalami peningkatan

dari Rp. 69,10 juta per kapita pada tahun 2010 menjadi Rp. 77,64 juta per kapita pada tahun 2020 atau dengan pertumbuhan 1,19% per tahun.

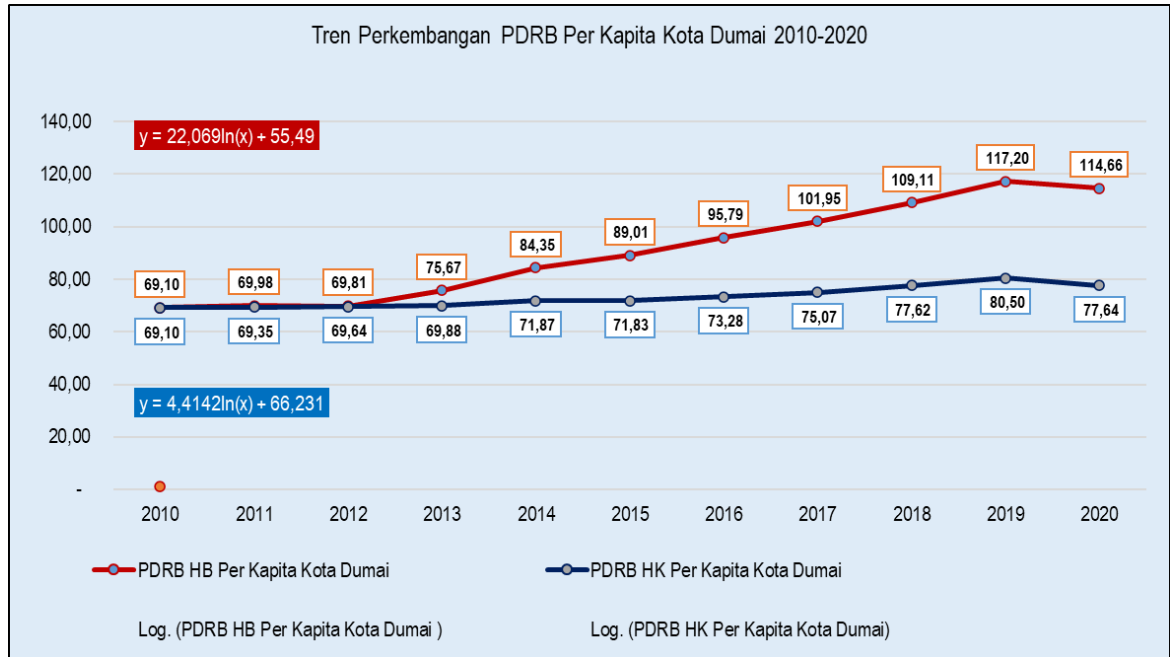
Berdasarkan Tabel 2.21 dapat dilihat bahwa percepatan peningkatan pendapatan per kapita PDRB Harga Berlaku masyarakat Kota Dumai lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Hal tersebut tergambar dari rata-rata per kapita provinsi pada tahun 2010 sebesar Rp. 69,70 juta pada PDRB Harga Berlaku atau lebih tinggi dari per kapita PDRB Harga Berlaku Kota Dumai hanya Rp. 69,10 juta atau PDRB harga berlaku Provinsi Riau lebih tinggi sebesar 0,86%. Namun pada tahun 2020 pendapatan per kapita Kota Dumai menurut PDRB harga berlaku sebesar Rp. 114,66 juta sudah lebih tinggi sebesar 0,55% dari rata-rata pendapatan per kapita Provinsi Riau sebesar Rp. 114,04 juta. Kondisi menunjukkan bahwa adanya kebijakan pemerintah yang mendorong keberhasilan pengembangan ekonomi masyarakat, walaupun jumlah penduduk Kota Dumai bertambah dari 253.178 jiwa pada tahun 2010 menjadi 316.782 jiwa pada tahun 2020 atau sebanyak 25,00% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,27% per tahun.

Tabel 2.21
Perkembangan PDRB Perkapita Kota Dumai dan PDRB Perkapita
Provinsi Riau Tahun 2010-2020

No	PDRB Per Kapita	Tahun											Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	PDRB HB Per Kapita Kota Dumai	69,10	69,98	69,81	75,67	84,35	89,01	95,79	101,95	109,11	117,20	114,66	5,27
2	PDRB HB Per Kapita Provinsi Riau	69,70	84,75	94,24	100,40	108,91	102,55	104,98	106,68	111,47	110,36	114,04	5,28
3	PDRB HK Per Kapita Kota Dumai	69,10	69,35	69,64	69,88	71,87	71,83	73,28	75,07	77,62	80,50	77,64	1,19
4	PDRB HK Per Kapita Provinsi Riau	69,70	72,84	74,99	75,69	76,90	74,79	70,55	70,75	70,72	71,10	76,64	1,01

Sumber: BPS, PDRB Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2020

Trend Perkembangan pendapatan per kapita penduduk Kota Dumai tahun 2010-2020 menurut PDRB harga berlaku dan harga konstan dapat dilihat pada Gambar 2.15 berikut.



Gambar 2.15: Trend Perkembangan Pendapatan Per Kapita Menurut PDRB ADHB dan ADHK Kota Dumai 2010-2020.

Selanjutnya data Perkembangan PDRB per kapita juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat Perkembangan perekonomian wilayah dengan pendekatan Analisis Tipologi Klassen. Basis data yang digunakan adalah besaran pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Analisis Tipologi Klassen dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Kota dengan pertumbuhan ekonomi wilayah acuannya Provinsi dan membandingkan PDRB perkapita wilayah Kabupaten Kota dengan PDRB perkapita wilayah Provinsi. Hasil Tipologi Klassen berupa klasifikasi wilayah yang dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan.

Berdasarkan Tabel 2.22, dihasilkan pengklasifikasian perkembangan perekonomian wilayah Kota Dumai berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen dengan membandingkan antara perkembangan ekonomi wilayah dengan Provinsi Riau tahun 2010-2020.

Hasil analisis Tipologi Klassen untuk Kota Dumai pada tahun 2011, 2012 dan 2014 masuk dalam kategori **wilayah relative tertinggal**, sedangkan pada tahun 2013 masuk dalam kategori **wilayah berkembang cepat**, selanjutnya sejak tahun pada tahun 2016-2020 Kota Dumai mengalami perkembangan perekonomian wilayah yang sangat pesat sehingga masuk dalam kategori **wilayah berkembang cepat tumbuh**. Hal ini terjadi karena Kota Dumai memiliki pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari pada pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi

Riau selama periode tahun 2011-2020, jelasnya sebagaimana tersaji pada Tabel 2.22 berikut.

Tabel 2.22
Perkembangan Ekonomi Wilayah Menurut Tipologi Klassen Kota Dumai
Tahun 2011-2020

No	Laju Pertumbuhan Ekonomi/PDRB HK (r)	PDRB Perkapita (Y)	
		Yi > Y	Yi < Y
1	$ri > r$	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh	Wilayah berkembang cepat
2	$ri < r$	Wilayah maju tapi tertekan	Wilayah relatif tertinggal

Tahun	Indikator				Kategori
	ri: Laju Pertumbuhan PDRB HK Kota Dumai	r: Laju Pertumbuhan PDRB HK Provinsi Riau	Yi: PDRB ADHK per kapita Kota Dumai	Y: PDRB ADHK per kapita Provinsi Riau	
2011	4,27	7,34	69,35	72,84	Wilayah relatif tertinggal
2012	3,66	5,71	69,64	74,99	Wilayah relatif tertinggal
2013	3,68	3,58	69,88	75,69	Wilayah Berkembang Cepat
2014	2,69	4,20	71,87	76,90	Wilayah relatif tertinggal
2015	2,03	-0,29	71,83	74,79	Wilayah Berkembang Cepat
2016	4,14	-3,34	73,28	70,55	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh
2017	4,46	2,70	75,07	70,75	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh
2018	5,35	2,31	77,62	70,72	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh
2019	5,61	2,85	80,50	71,10	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh
2020	-1,07	-1,17	77,64	76,64	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh

Sumber: BPS, PDRB Kota Dumai dan Provinsi Riau 2010-2020 dan Olahan Tahun 2021

Pengembangan ekonomi regional tidak hanya ditujukan untuk peningkatan kemajuan ekonomi tetapi juga untuk peningkatan kemakmuran penduduknya. Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat melalui besarnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga yang bersangkutan (BPS, 2020). Akan tetapi data pendapatan yang akurat sulit diperoleh.

Pendapatan perkapita masyarakat Kota Dumai diperkirakan akan mengalami perubahan seiring terjadinya perubahan nilai PDRB pada sektor-sektor dominan yang ada di Kota Dumai akibat masih mewabahnya Covid 19.

2.3.1.4 Laju Inflasi

Menurut Badan Pusat Statistik, inflasi merupakan indikator ekonomi makro yang mengindikasikan baik buruknya perekonomian suatu daerah. Tingkat inflasi yang tinggi menggambarkan perlambatan laju pertumbuhan

ekonomi. Sebaliknya, meskipun perekonomian secara menyeluruh semakin baik tidak berarti bahwa inflasi tidak terjadi. Terjadinya deflasi juga tidak selalu menunjukkan hal yang positif bagi perekonomian suatu daerah. Dengan kata lain, bahwa yang menjadi indikator perekonomian semakin baik jika angka inflasi suatu daerah stabil dan relatif rendah.

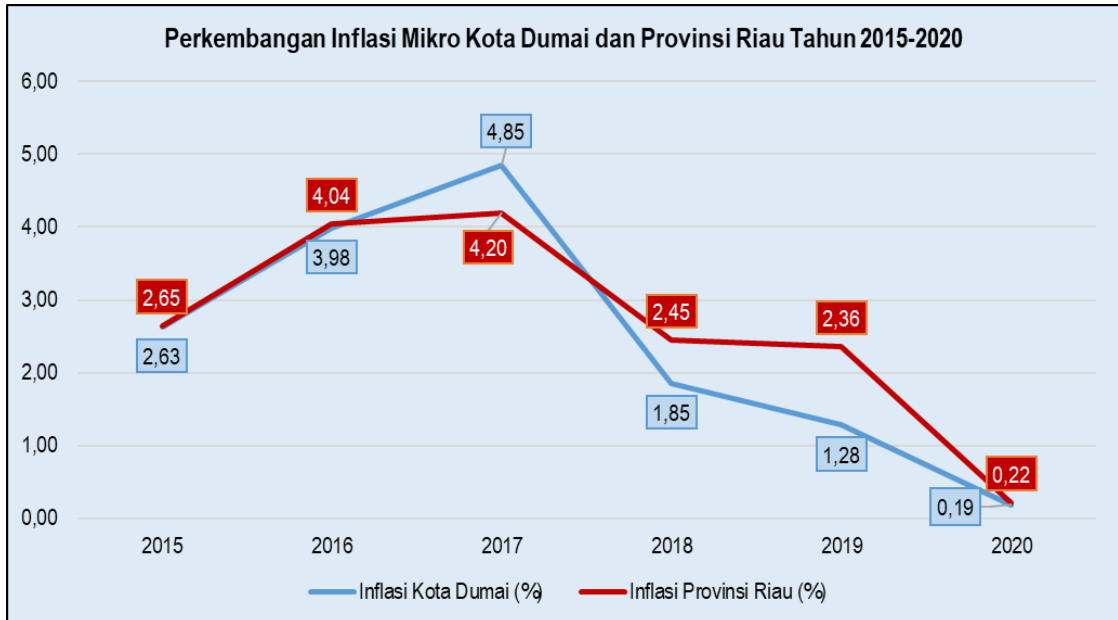
Perkembangan inflasi mikro menurut bulanan Kota Dumai tahun 2015-2020 menunjukkan kondisi yang fluktuatif dimana pada tahun 2015 sebesar 2,63% kemudian meningkat di tahun 2016-2017, kemudian kembali turun dari tahun 2018-2020. Berikut Tabel 2.23 menunjukkan perbandingan Perkembangan inflasi bulanan dan inflasi tahunan (Y on Y) Kota Dumai dengan Provinsi Riau tahun 2015-2020.

Tabel 2.23
Perkembangan Inflasi Bulanan dan Inflasi Tahunan (Y on Y) Kota Dumai dan Provinsi Riau Tahun 2015-2020

Bulan	Tahun						Rata-rata/Tahun (%)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Januari	-0,33	0,65	1,58	0,36	-0,04	0,54	0,46
Februari	-0,68	0,32	1,12	-0,24	-0,32	0,21	0,07
Maret	0,13	0,23	-0,19	0,05	0,07	-0,05	0,04
April	0,38	-0,64	-0,21	0,14	0,35	-0,19	-0,03
Mei	0,98	0,06	0,11	0,16	1,05	0,95	0,55
Juni	0,59	0,79	0,90	0,65	0,80	0,11	0,64
Juli	0,78	0,46	0,05	-0,10	0,41	-0,26	0,22
Agustus	0,55	0,05	0,14	-0,34	-0,25	-0,05	0,02
September	-0,23	0,64	0,05	-0,26	-0,79	-0,02	-0,10
Oktober	0,11	0,47	0,08	0,50	0,05	0,44	0,28
November	-0,02	0,82	0,62	0,70	-0,12	0,37	0,40
Desember	0,39	0,07	0,53	0,22	0,07	0,80	0,35
Kota Dumai	2,63	3,98	4,85	1,85	1,28	0,19	2,46
Provinsi Riau	2,65	4,04	4,20	2,45	2,36	0,22	2,65

Sumber: BPS, Perkembangan Inflasi Kota Dumai dan Provinsi Riau, 2016-2020)

Hal ini sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Kota Dumai secara mikro. Jika dilihat dari kondisi inflasi bulanan tahun 2015-2020 seperti yang tersaji pada Gambar 2.16, terlihat bahwa inflasi tertinggi di Kota Dumai di tahun 2017 sebesar 4,85% dan lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Riau dan terendah tahun 2020 sebesar 0,19% dan lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Provinsi Riau.



Gambar 2.16: Perkembangan Inflasi Kota Dumai dan Provinsi Riau, 2015-2020.

Perkembangan inflasi tersebut menggambarkan suatu keadaan di mana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam waktu tertentu dan umumnya 1 tahun, berdasarkan keparahan, inflasi dikategorikan (i) Inflasi ringan: di bawah 10% setahun, (ii) inflasi sedang: antara 10-30% setahun, (iii) inflasi berat: antara 30-100% setahun, dan (iv) hiperinflasi: di atas 100% setahun. Berdasarkan laju inflasi Kota Dumai tahun 2015-2020 dalam kategori inflasi ringan karena tingkat inflasi tahunan dibawah 10%.

Sementara itu Perkembangan inflasi sektoral tahun 2010-2020 menunjukkan bahwa rata-rata inflasi tertinggi terjadi pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas mencapai 7,45% per tahun dan kondisi ini menggambarkan kebijakan pemerintah dalam menaikkan listrik dan gas sangat berkontribusi terhadap tingginya inflasi pada sektor tersebut dan sektor lainnya. Selanjutnya, sektor penyediaan akomodasi makan dan minum menempati urutan kedua yang mengalami inflasi tertinggi sebesar 6,73% per tahun. Sedangkan rata-rata inflasi terendah selama tahun 2010-2020 adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib hanya sebesar 3,23% per tahun.

Secara teori, inflasi akan mengalami peningkatan jika meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, meningkatnya permintaan barang untuk swasta, harga bahan bakar naik, upah buruh naik dan bertambahnya uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar meningkat dua kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga-harga hingga 100%. Namun berdasarkan data Tabel 2.24 rata-rata inflasi tahun

2010-2020 menunjukkan bahwa inflasi sektoral, dimana semua sektor masuk dalam kategori inflasi ringan atau dibawah 10% dengan rata-rata sebesar 4,29% per tahun.

Tabel 2.24
Perkembangan Inflasi Sektoral Kota Dumai, 2011-2020

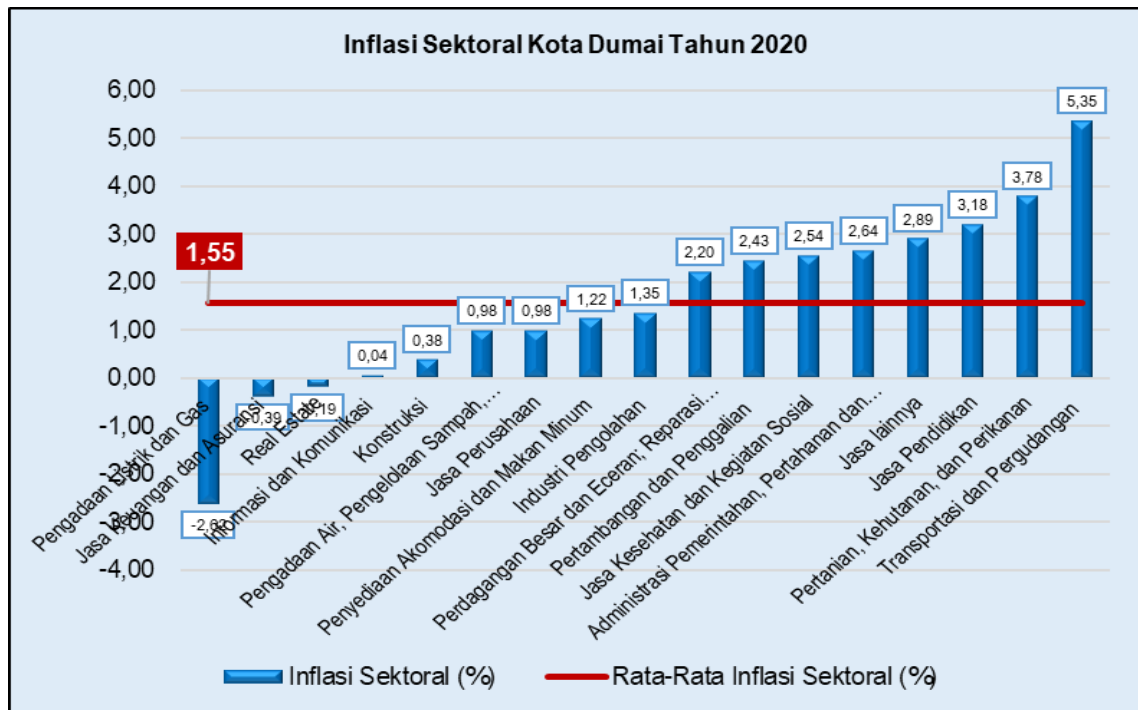
No	Sektor	Tahun										Rata-Rata Inflasi / Tahun (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,58	4,41	4,54	9,61	7,80	7,57	3,62	1,00	0,56	3,78	4,96
B	Pertambangan dan Penggalian	2,84	2,08	2,68	15,78	10,42	5,42	0,83	6,79	4,37	2,43	5,69
C	Industri Pengolahan	-3,11	-3,89	12,49	7,89	5,34	4,79	4,90	4,80	4,34	1,35	4,17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-12,75	-16,40	-10,80	36,19	40,45	15,17	9,36	0,48	5,38	-2,62	7,45
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,84	3,43	-2,50	3,75	7,72	6,32	5,57	1,82	2,86	0,98	3,42
F	Konstruksi	9,29	1,00	6,18	5,04	9,98	8,72	4,33	4,49	2,67	0,38	5,74
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,89	1,76	1,67	13,22	2,10	3,52	2,91	1,18	2,99	2,20	3,69
H	Transportasi dan Pergudangan	5,27	4,05	4,46	7,55	8,89	3,62	1,63	2,09	2,90	5,35	4,50
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,77	-2,23	17,75	13,21	14,62	8,04	1,40	1,60	1,39	1,22	6,73
J	Informasi dan Komunikasi	0,43	1,01	-5,06	6,41	7,51	4,38	7,52	6,97	2,63	0,04	3,53
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,63	10,01	5,60	4,63	4,13	2,93	2,99	1,76	1,70	-0,39	4,38
L	Real Estate	7,55	3,79	2,99	9,02	7,09	4,41	2,83	2,90	0,39	-0,19	4,55
M,N	Jasa Perusahaan	4,70	10,84	4,41	5,36	7,70	5,76	0,02	1,21	4,44	0,98	4,94
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,28	8,57	2,82	3,77	3,99	3,07	2,04	2,50	1,01	2,64	3,23
P	Jasa Pendidikan	12,67	1,78	2,32	16,49	10,52	3,88	1,09	0,49	3,56	3,18	5,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,34	6,81	3,45	10,44	12,88	5,29	1,80	0,67	4,55	2,54	5,69
R,S,T,U	Jasa lainnya	10,44	-1,04	3,47	9,98	12,30	6,45	2,59	2,35	2,85	2,89	5,49
Inflasi kota Dumai		0,90	-0,65	8,03	8,38	5,61	5,02	4,16	3,64	3,49	1,55	4,29

Sumber: BPS, Data Dasar PDRB Kota Dumai Dalam Angka, 2011-2020 dan Estimasi Tenaga Ahli.

Sementara sektor yang mengalami inflasi negatif yaitu sektor Pengadaan Listrik dan Gas; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate dan inflasi dibawah rata-rata inflasi Kota Dumai tahun 2020 adalah sector Informasi dan Komunikasi; Konstruksi; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Jasa Perusahaan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Industri Pengolahan. Sedangkan sector dengan inflasi diatas rata-rata inflasi Kota Dumai adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Pertambangan dan Penggalian; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa lainnya; Jasa Pendidikan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Transportasi dan Pergudangan.

Inflasi tahun 2020 masih termasuk dalam kategori inflasi rendah karena masih kurang dari 10%. Namun demikian ada beberapa sektor yang perlu mendapatkan perhatian terutama terkait dengan sektor yang inflasinya mendekati 10% seperti sektor Transportasi dan Pergudangan. Untuk menjaga gejala inflasi (*volatile food*) melalui penguatan empat pilar strategi yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif (4K); Memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi masyarakat, dan; Memperkuat koordinasi Pemerintah Provinsi dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui

pemantauan harga sehingga empat strategi tersebut dapat dijalankan terutama sinergi meningkatkan ketersediaan pangan melalui korporatisasi dan digitalisasi sumber-sumber pengembangan dan peningkatan produksi barang dan jasa. Inflasi sektoral 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.17 berikut.



Gambar 2.17: Perkembangan Inflasi Per Sektor dengan Migas Kota Dumai 2020

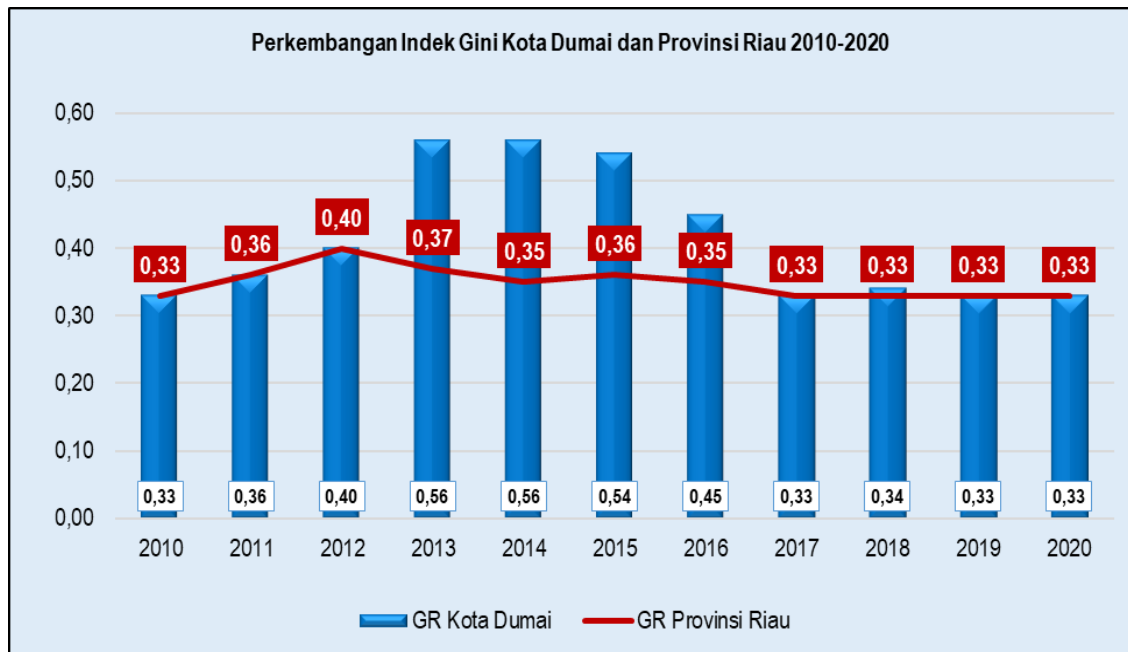
2.3.1.5 Indeks Gini

Distribusi Pendapatan adalah ukuran yang mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu wilayah terhadap penduduknya. Distribusi pendapatan merupakan kriteria yang menunjukkan mengenai penyebaran pembagian pendapatan/kekayaan antar penduduk satu dengan penduduk lainnya dalam wilayah tertentu.

Distribusi pendapatan yang tidak merata mengakibatkan munculnya kesenjangan pendapatan, yaitu perbedaan kemakmuran ekonomi antara kelompok penduduk kaya dengan yang miskin. Dalam artian, penduduk pendapatan riil dari kelompok kaya terus bertambah sedangkan yang miskin terus berkurang atau dengan kata lain pendapatan riil yang kaya tumbuh lebih cepat dari pada yang miskin.

Salah satu indikator untuk mengukur distribusi pendapatan adalah Indeks Gini. Dari hasil pengolahan data statistik kesejahteraan Riau pada tahun 2011-2020, menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan kesenjangan pendapatan masyarakat Kota Dumai masuk pada kategori

ketimpangan tinggi dan sedang: $G > 0,5$ ketimpangan tinggi; $0,35 < G < 0,5$ ketimpangan sedang; $G < 0,35$ ketimpangan ringan.



Gambar 2.18: Perkembangan Indeks Gini Kota Dumai dan Provinsi Riau Tahun 2010-2020

Dari hasil pengolahan data statistik kesejahteraan Riau pada tahun 2010-2020, menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan/kesenjangan pendapatan masyarakat Kota Dumai masuk pada kategori ketimpangan tinggi dan sedang. Secara umum selama kurun waktu 2010-2020 tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Dumai semakin kecil seperti yang tersaji pada Gambar 2.18

Indikator lain yang digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan dalam masyarakat adalah kriteria ketimpangan pendapatan versi Bank Dunia, dimana penduduk dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

- Kelompok 40% termiskin pengeluarannya $< 12\%$ dari keseluruhan pengeluaran Masuk kategori ketimpangan tinggi.
- Kelompok 40% termiskin pengeluarannya $12\% - 17\%$ dari keseluruhan pengeluaran Masuk kategori ketimpangan sedang.
- Kelompok 40% termiskin pengeluarannya $> 17\%$ dari keseluruhan pengeluaran Masuk kategori ketimpangan tinggi

Berdasarkan hasil penghitungan ketimpangan distribusi pendapatan Kota Dumai berdasarkan pendapatan kriteria bank dunia, menunjukkan bahwa secara umum tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Dumai masih termasuk kategori sedang, karena kelompok 40% termiskin pengeluarannya adalah $12,52\%$ dari keseluruhan pengeluaran.

2.3.1.6 Perkembangan Kemiskinan

Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari peningkatan PDRB perkapita belum tentu dinikmati oleh semua penduduk di Kota Dumai karena adanya masih terdapatnya Gap pendapatan antara individu masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya masalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan mencerminkan adanya penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Keterbatasan peluang kesempatan kerja karena keterbatasan sumberdaya modal dan kualitas SDM akan menghambat penduduk untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal. Indikator kemiskinan umumnya menggunakan kriteria garis kemiskinan (*poverty line*) untuk mengukur kemiskinan absolut.

Kemiskinan absolut adalah ukuran angka atau hitungan per kepala (*headcount*) tentang seberapa banyak orang yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan absolut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, perkembangan beberapa indikator kemiskinan seperti jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan (P0), indek kedalaman kemiskinan (P1), indek keparahan kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan (P4) di Kota Dumai tahun 2010-2020 fluktuatif seperti yang tersaji pada Tabel 2.25

Tabel 2.25
Perkembangan Indikator Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2010-2020

No	Indikator Kemiskinan	Tahun											Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Pengurangan/ Pertambahan 2010 ke 2020
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	16,50	13,97	14,11	13,72	13,62	14,97	13,76	13,53	11,19	10,95	9,88	-4,69	-6,62
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,45	5,27	5,24	4,98	4,83	5,26	4,74	4,57	3,71	3,56	3,16	-6,55	-3,29
3	Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,07	0,57	0,99	0,76	0,38	0,59	0,62	0,84	0,46	0,28	0,31	-2,41	-0,76
4	Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	0,26	0,13	0,29	0,16	0,06	0,11	0,13	0,25	0,07	0,05	0,05	5,90	-0,21
5	Garis Kemiskinan (Rp. Bulan/Kapita)	287.975	298.127	311.891	328.158	341.525	353.079	369.624	403.244	418.597	439.152	484.609	5,37	196.634

Sumber: BPS, Provinsi Riau Dalam Angka, 2011-2021)

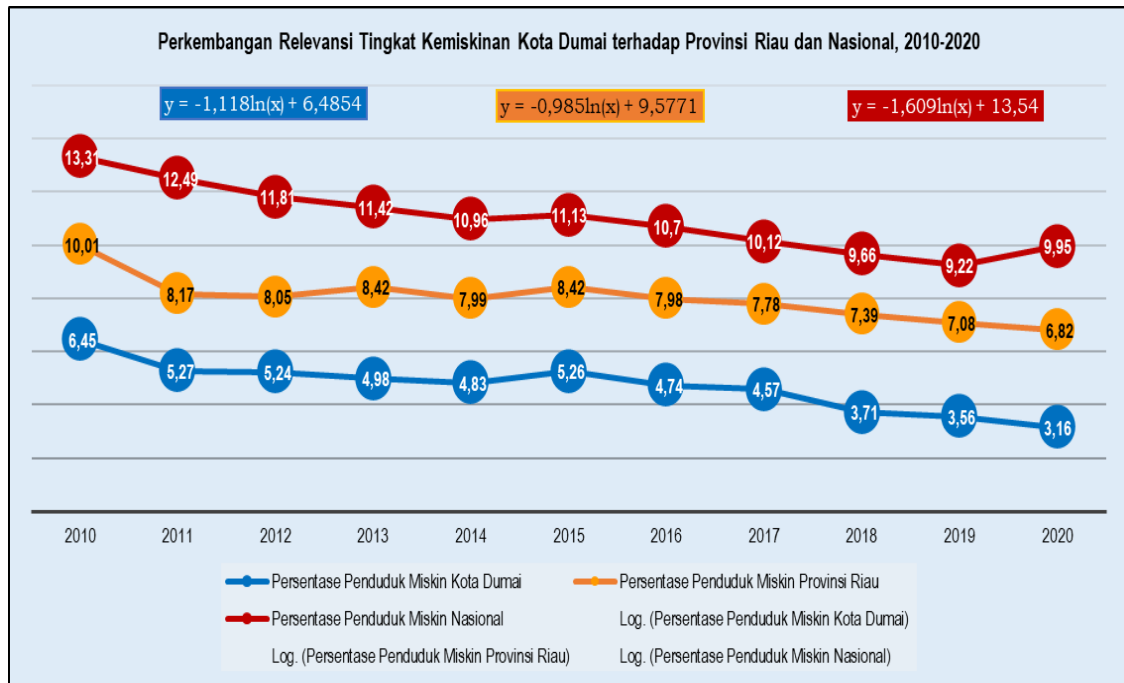
Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Dumai secara signifikan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 tingkat kemiskinan sebesar 6,457%, menurun menjadi 3,16% pada tahun 2020. Selama periode 2010-2020, tingkat kemiskinan rata-rata menurun sebesar -6,55% per tahun dengan pengurangan dari tahun 2010 ke 2020 sebesar -3,29%. Tingkat kemiskinan di Kota Dumai tahun 2020 sebesar 3,16% lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan Provinsi Riau sebesar 6,82% tahun 2020.

Jika dilihat dari trend penurunan tingkat kemiskinan Kota Dumai selama periode tersebut lebih cepat dibandingkan penurunan tingkat

kemiskinan Provinsi Riau. Hal tersebut dapat dilihat dari koefisien persamaan regresi Kota Dumai sebesar -1,118% sementara koefisien persamaan regresi Provinsi Riau sebesar -0,985%, dan koefisien persamaan regresi nasional sebesar -1,609%, artinya penurunan tingkat kemiskinan Kota Dumai lebih cepat pengurangannya sebanyak berbanding Provinsi Riau, namun lebih lambat dari nasional, jelasnya lihat pada Gambar 2.19.

Namun jika diperhatikan Persentase penduduk miskin tertinggi terjadi di tahun 2015. Hal ini disebabkan karena belum adanya Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) di Kota Dumai, sehingga program pengentasan kemiskinan di Kota Dumai masih bersifat parsial atau dapat dikatakan belum terpadu antar Perangkat daerah yang ada di Kota Dumai. Namun setelah tahun 2015 sudah dilakukan penyusunan SPKD sehingga program penanggulangan kemiskinan lebih terarah. Namun demikian harus lebih focus dan terintegrasi dengan OPD terkait agar upaya penanggulangan kemiskinan lebih optimal untuk mengurangi fluktuasi perkembangan indikator kemiskinan.

Upaya yang lebih kuat itu ialah dengan mengusahakan penajaman penanggulangan kemiskinan melalui penargetan pengurangan angka kemiskinan di wilayah Kecamatan prioritas atau kantong kemiskinan di Kota Dumai. Ini penting untuk memastikan basis wilayah prioritas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan harus berjalan efektif dan efisien melalui kordinasi sectoral terutama pengembangan perekonomian masyarakat pada semua sektor dan sub sektor yang banyak digeluti atau sebagai penopang ekonomi masyarakat. Oleh karena itu tiga strategi utama yang harus diperhatikan dalam penanggulangan kemiskinan antara lain strategi peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.



Gambar 2.19: Perkembangan Tingkat Kemiskinan (P1) Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional 2010-2020

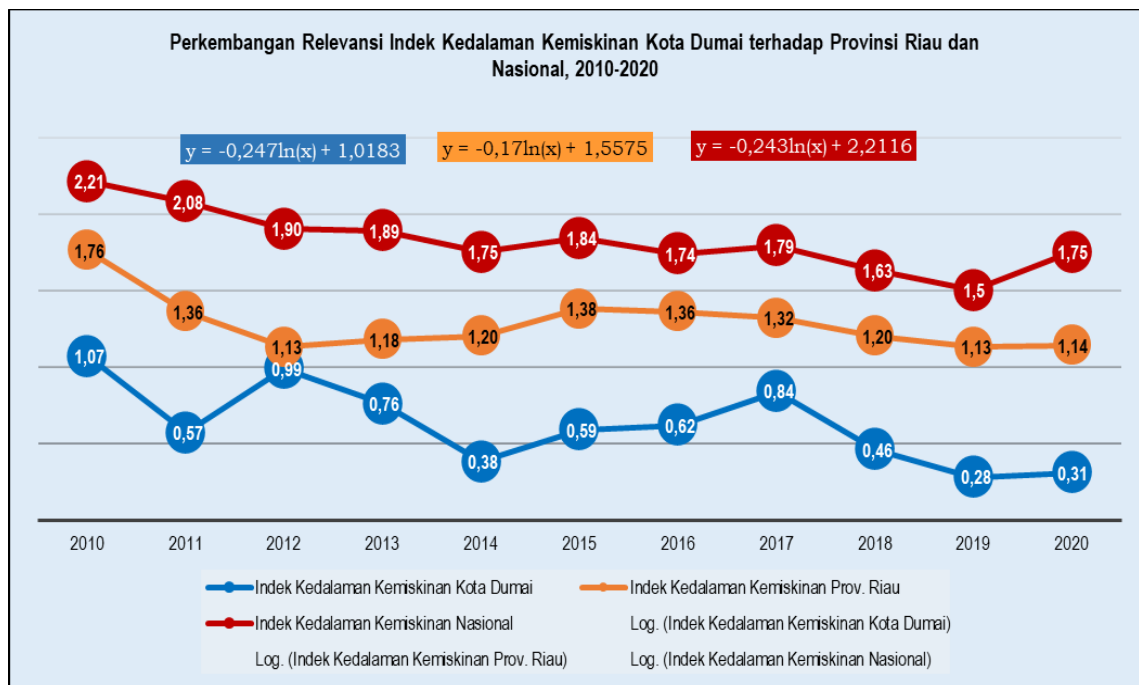
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Alat analisis kemiskinan dapat digunakan untuk mengukur jarak antara rata-rata pendapatan kelompok miskin secara agregat dengan garis kemiskinan (defisit pendapatan). Dengan kata lain, *poverty gap* merupakan selisih antara garis kemiskinan dengan pendapatan rumah tangga miskin untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan bagi rumah tangga yang memiliki pendapatan di atas garis kemiskinan maka dianggap memiliki nilai indeks *poverty gap* sama dengan nol. Ukuran ini telah memenuhi prinsip anonimitas dan monotonisitas, tetapi belum memenuhi prinsip transfer atau sensitivitas distribusional.

Nilai P1 sangat berguna untuk menentukan target sasaran bantuan dan program karena menunjukkan biaya yang dibutuhkan dalam mengentaskan kemiskinan per RTM. Ukuran ini memperlihatkan seberapa banyak dana yang harus dimiliki untuk ditransfer kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) sehingga pendapatan mereka naik di atas garis kemiskinan. Keadaan ini dapat terjadi jika tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat (transfer sempurna). Semakin kecil nilai *poverty gap*, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan bagi RTM.

Perkembangan tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index-P1*), Indeks P1 Kota Dumai pada tahun 2010-2020 mengalami perkembangan pengurangan gap antara pendapatan dengan garis kemiskinan. Misalnya nilai indeks P1 pada tahun 2010 sebesar 1,07%, artinya RTM yang terdapat di Kota Dumai masih kekurangan pendapatan sebanyak 1,071% untuk memenuhi

pengeluaran minimal garis kemiskinan. Namun pada tahun 2020 sudah mengalami pengurangan gap antara pendapatan RTM dengan pengeluaran minimal garis kemiskinan menjadi 0,31%. Jika dilihat indek tersebut menunjukkan bahwa terjadinya perbaikan dalam kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Semakin kecil P1 maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin juga untuk target sasaran bantuan dan program. Artinya kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin rendah.

Pada Gambar 2.20 terlihat bahwa posisi relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Dumai masih berada di bawah rata-rata Provinsi Riau. Artinya wilayah kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskian masih lebih rendah diwilayah ini dibandingkan dengan wilayah lainnya di Provinsi Riau. Namun Kota Dumai memiliki Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) penurunan yang lebih cepat dari Provinsi Riau. Hal tersebut dapat dilihat dari koefisien persamaan regreasi Kota Dumai sebesar $-0,247\%$ sementara koefisien persamaan regresi Provinsi Riau hanya sebesar $-0,170\%$, dan koefisien persamaan regresi nasional sebesar $-0,243\%$, jelasnya lihat pada Gambar 2.20

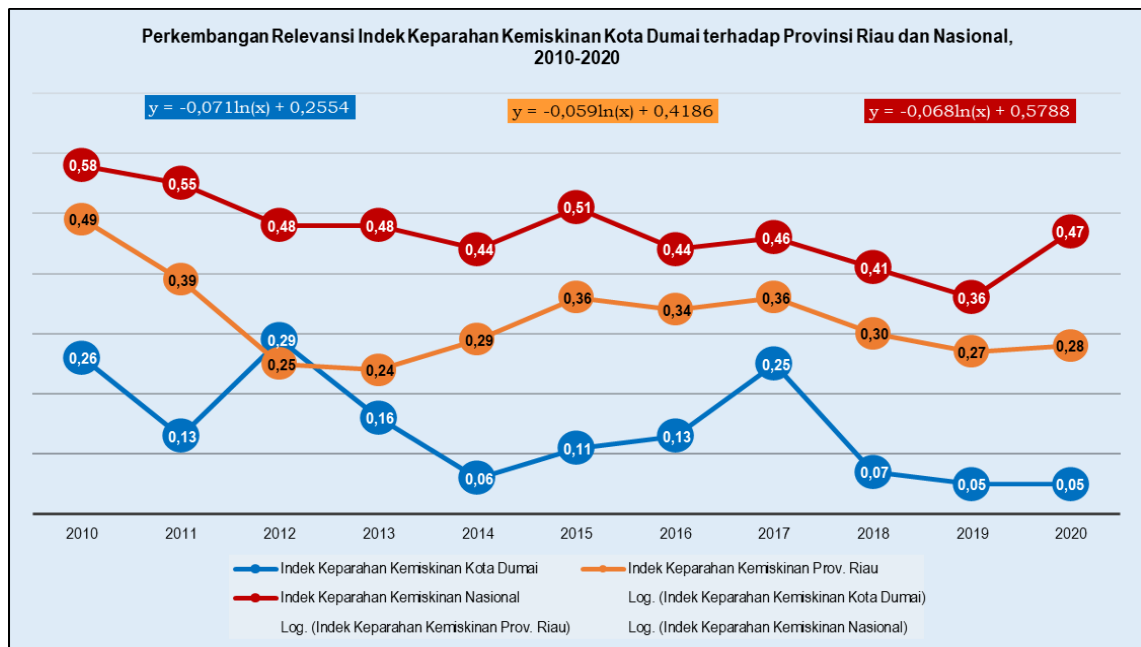


Gambar 2.20: Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional 2010-2020

Indeks Keparahan Kemiskinan *Poverty Gap Index* (P2) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap kemiskinan. Indeks Keparahan

Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan menggambarkan ketimpangan pendapatan antar penduduk miskin. Semakin kecil nilai indeks keparahan kemiskinan, maka distribusi pendapatan diantara masyarakat miskin semakin merata. Pada Gambar 2.21 terlihat bahwa Posisi Relatif Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) Kota Dumai yaitu berada di bawah rata-rata Provinsi Riau dan nasional.

Namun Kota Dumai memiliki percepatan penurunan Keparahkan Kemiskinan (P2) yang lebih naik dari Provinsi Riau. Hal tersebut dapat dilihat dari koefisien persamaan regresi Kota Dumai sebesar -0,071% sementara koefisien persamaan regresi Provinsi Riau hanya sebesar -0,059% dan koefisien persamaan regresi nasional sebesar -0,068%. Namun demikian Kota Dumai harus mendapatkan perhatian secara serius dalam mengurangi keparahan kemiskinan karena perkembangannya mengalami fluktuasi atau variasi antara tahun cukup tinggi dibandingkan wilayah Provinsi Riau dan Nasional, jelasnya lihat Gambar 2.21 berikut.



Gambar 2.21: Perkembangan Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional 2010-2020

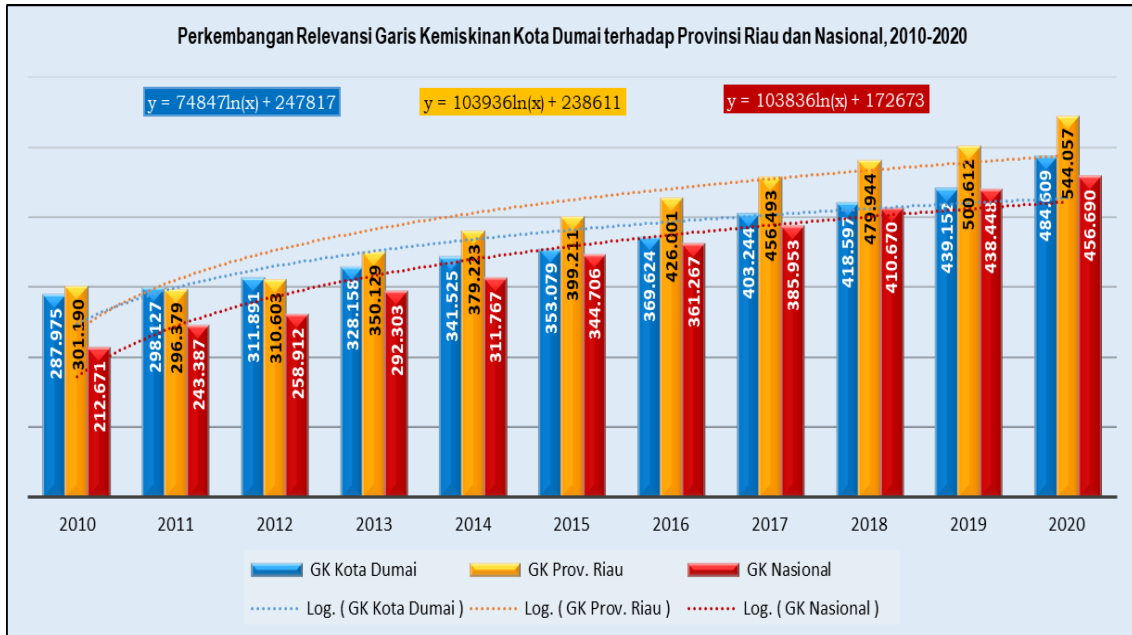
Garis kemiskinan digunakan untuk mengukur kemiskinan absolut. Menurut BPS, garis kemiskinan dihitung dari hasil penjumlahan garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran/kapita/bulan di bawah garis kemiskinan maka akan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Ukuran garis kemiskinan yang paling sering digunakan adalah garis kemiskinan yang dibuat oleh World Bank yaitu US\$ 2/kapita/hari untuk negara yang masuk kategori *developing countries*. Garis kemiskinan digunakan sebagai dasar untuk

mengukur beberapa indikator kemiskinan lainnya jumlah dan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*, P2).

Perkembangan garis kemiskinan Kota Dumai dari tahun 2010-2020 menunjukkan trend atau kecenderungan perlambatan dalam peningkatan, dimana pada tahun 2010 garis kemiskinan Kota Dumai sebesar Rp. 287.975 per bulan per kapita dan pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 484.609 per bulan per kapita dengan peningkatan sebesar 5,53% per tahun lebih tinggi dari rata-rata inflasi makro Kota Dumai hanya sebesar 4,29% per tahun. Kondisi ini menggambarkan bahwa peningkatan angka garis kemiskinan tersebut bukan hanya dipengaruhi oleh peningkatan harga pangan dan non pangan tetapi juga dipengaruhi peningkatan jumlah dan jenis kebutuhan RTM.

Oleh karena itu upaya peningkatan pendapatan RT miskin atau upaya mengurangi beban pengeluaran RT akan mempercepat pengurangan angka kemiskinan di wilayah ini dengan strategi peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar, peningkatan aktifitas pembangunan ekonomi terutama pada lapangan usaha yang banyak digeluti penduduk miskin seperti industri, sektor pertanian melalui peningkatan produktivitas hasil pertanian dan jasa lainnya yang memberikan kontribusi tertinggi pada sektor ekonomi Kota Dumai.

Trend peningkatan garis kemiskinan diwilayah ini terus mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari koefisien persamaan regresi garis kemiskinan Kota Dumai sebesar Rp.74.847 sementara koefisien persamaan regresi Provinsi Riau garis kemiskinan sebesar Rp. 103.936 dan koefisien persamaan regresi garis kemiskinan nasional sebesar Rp. 103.836. Jelasnya lihat Gambar 2.22 berikut.



Gambar 2.22: Perkembangan Garis Kemiskinan (P3) Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional 2010-2020

Kondisi penduduk miskin dalam beberapa tahun terakhir ini yang sudah mampu keluar dari kemiskinan adalah mereka yang hidup di ujung garis kemiskinan yang berarti tidak diperlukan dukungan yang kuat dalam pembangunan untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Namun sejalan dengan berkurangnya kelompok tersebut, kelompok yang berada di bagian paling bawah garis kemiskinanlah yang sekarang harus didukung dalam pembangunan untuk bangkit dan keluar dari kemiskinan seperti membantu mengurangi pengeluaran secara individu dan rumah tangga miskin melalui pemberian beasiswa atau gratis biaya pendidikan dan kesehatan serta bantuan pangan. Karena kelompok ini lebih rumit dan akan menghasilkan angka penurunan tingkat kemiskinan yang berjalan lebih lambat dari sebelumnya.

Berkenaan dengan kebijakan penanganan Covid 19 seperti pembatasan yang ketat terhadap aktifitas sosial dan fisik akan berdampak pada kelompok masyarakat dengan pendapatan yang rendah dan rentan miskin. Kondisi ini akan berdampak pada sektor ketenagakerjaan seperti Pemutusan hubungan kerja dan pengurangan jam kerja semua daerah. Hal ini akan memicu penambahan jumlah masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan.

2.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.3.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people's choices*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk

dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia dalam jangka panjang.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Perkembangan Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kota Dumai, 2010-2020 lihat Tabel 2.26.

Tabel 2.26
Perkembangan Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Dumai, 2010-2020

Indikator	Satuan	Tahun											Rata-Rata Pertumbuhan /Tahun (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Indek Pembangunan Manusiaan (IPM)	Indek	69,55	70,43	71,07	71,59	71,86	72,20	72,96	73,46	74,06	74,64	74,4	0,68
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,67	11,87	12,07	12,27	12,40	12,46	12,75	12,97	12,98	13,10	13,12	1,18
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,36	9,42	9,48	9,54	9,56	9,57	9,58	9,67	9,84	9,85	10,07	0,74
Angka Harapan Hidup	Tahun	69,93	69,95	70,02	70,04	70,05	70,25	70,31	70,37	70,55	70,82	70,93	0,14
Pengeluaran Riil Per Kapita	Rp Juta/kapita	9.593	10.162	10.499	10.735	10.870	11.058	11.531	11.699	12.063	12.453	11751	2,09

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka, 2011-2021

Salah satu aspek kesejahteraan sosial adalah aspek pendidikan. Aspek pendidikan masyarakat akan menggambarkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kota Dumai. Aspek ini digunakan untuk mengukur capaian pendidikan dari aspek angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi dan angka pendidikan yang ditamatkan.

Dalam kondisi wabah Covid 19 yang masih melanda seluruh negara didunia termasuk Kota Dumai dan belum adanya kepastian berakhirnya wabah Covid 19, diperkirakan akan terjadi perubahan capaian-capaian atas aspek pendidikan tersebut. Perubahan-perubahan ini terjadi atas pembatasan-pembatas aktivitas sosial masyarakat dan melambatnya perekonomian. Disamping itu dampak atas upaya penanganan Covid 19 yang salah satunya merumuskan kebijakan belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh akan berdampak pada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dan siswa yang tinggal didaerah yang jauh dari akses internet. Aspek pendidikan pada dasarnya dipengaruhi oleh situasi sosial danekonomi masyarakat sehingga memiliki dampak terhadap kualitas pendidikan dan sekolah individu ditengah-tengah masyarakat.

2.3.2.2 Angka Melek Huruf

Angka melek huruf menunjukkan jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang dapat bisa membaca dan menulis. Angka ini mencerminkan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang tentu saja berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat. Berdasarkan data BPS Kota Dumai, angka melek huruf dari tahun 2016-2020 menunjukkan tren yang sangat baik dengan pertumbuhan sebesar 0,06% per tahun atau naik 98,10% pada tahun 2016 menjadi 99,94% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan keberhasilan program pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai, dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu wujud tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai. Namun demikian masih terdapat penduduk yang masih buta huruf sebesar 1,33 selama periode 2016-2020 dengan kecenderungan penurunan dari 3.829 jiwa pada tahun 2016 turun menjadi 132 jiwa pada tahun 2020. Kondisi ini memerlukan perhatian terutama perlunya Pendidikan non formal untuk mengentaskan jumlah penduduk buta huruf tersebut. Perkembangan jumlah penduduk melek huruf dan buta huruf dapat dilihat pada Tabel 2.27 berikut.

Tabel 2.27
Perkembangan Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas Melek Huruf
Kota Dumai, 2010-2020

No	Penduduk Melek Huruf	Satuan	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	291.908	297.638	303.292	308.812	316.782	1,94
2	Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas	Jiwa	201.550	206.467	211.351	216.196	219.415	2,41
3	Persentase Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas	%	70,34	70,19	71,62	70,71	70,71	0,06
4	Persentase Melek Huruf	%	98,10	98,45	98,36	99,05	99,94	0,24
5	Jumlah Penduduk Melek Huruf	Jiwa	197.721	206.054	207.843	214.110	218.142	2,65
6	Persentase Buta Huruf	%	1,90	0,20	1,66	0,97	0,58	1,33
7	Jumlah Penduduk Buta Huruf	Jiwa	3.829	3.200	3.466	2.054	132	2.809

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Kota Dumai Tahun 2016-2020

2.3.2.3 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Menurut Badan Pusat Statistik angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung rata-rata lama sekolah dibutuhkan informasi: (a) partisipasi sekolah; (b) jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki; (c) ijazah tertinggi yang dimiliki; (d) tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Angka ini digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal

mengenyam pendidikan formal. Tingginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Angka rata-rata lama sekolah masyarakat Kota Dumai selama kurun waktu 2010-2020 terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan 0,74% per tahun, namun memiliki pertumbuhan yang lebih rendah dari Provinsi Riau dan Nasional akan tetapi dari aspek kualifikasi pendidikan penduduk Kota Dumai SMA sudah berada pada level kelas satu di tahun 2020, sementara Provinsi Riau baru setara tamatan SMP dan nasional setara SMP kelas 2. Tingginya rata-rata lama sekolah penduduk Kota Dumai merupakan aset berharga yang berfungsi sebagai penggerak pembangunan. Rata-rata lama sekolah menjadi penting karena menjadi salah satu ukuran kemajuan pembangunan. Hal tersebut diperoleh dari pendidikan formal, vokasi, literasi baca-tulis-hitung karena adanya lembaga pendidikan yang diharapkan relevan dengan dunia bisnis, jumlah lulusan teknisi dan peneliti, jumlah hasil riset, dan jurnal ilmiah jika terdapat lembaga tersebut di suatu wilayah.

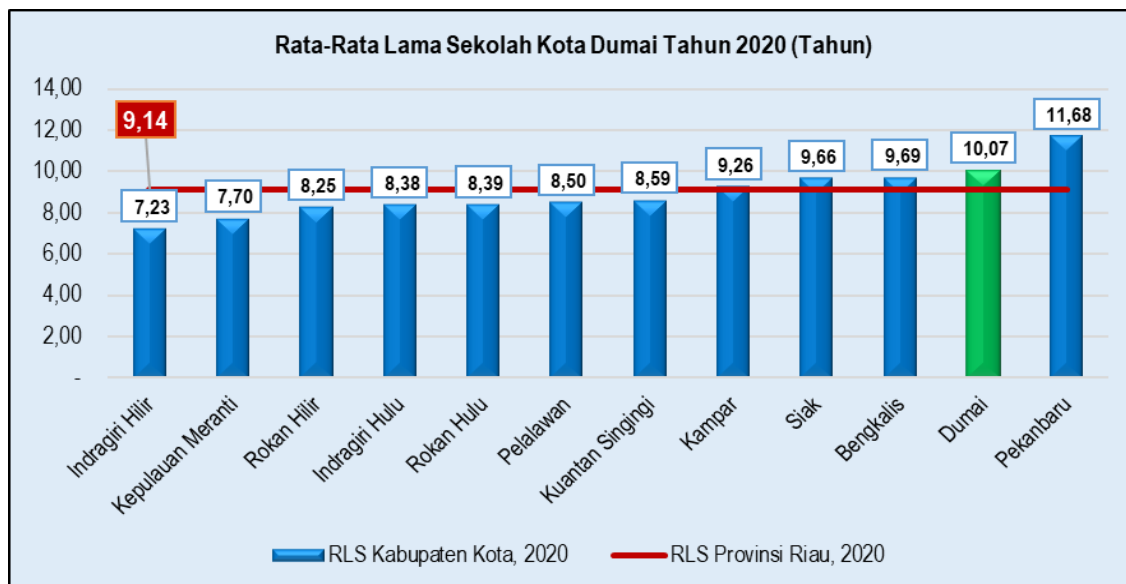
Hal ini dapat dimaklumi karena Kota Dumai merupakan kota industri, dimana tenaga yang terlibat didalamnya mayoritas tenaga yang memiliki keahlian dan merupakan potensi pembangunan perekonomian masyarakat dan sekaligus menjadi indikator kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat Kota Dumai. Perkembangan RLS penduduk Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel 2.28 berikut.

Tabel 2.28
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional, 2010-2020

Wilayah	RLS Tahun											Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kota Dumai	9,36	9,42	9,48	9,54	9,56	9,57	9,58	9,67	9,84	9,85	10,07	0,74
Provinsi Riau	8,25	8,29	8,34	8,38	8,47	8,49	8,59	8,76	8,92	9,03	9,14	1,03
Indonesia	7,46	7,52	7,59	7,61	7,73	7,84	7,95	8,10	8,17	8,34	8,48	1,29

Sumber: BPS Kota Dumai, Provinsi Riau dan Pusat, 2021

RLS Kota Dumai di tingkat Provinsi Riau, menempati urutan kedua dengan nilai sebesar 10,07 tahun dan berada dibawah Kota Pekanbaru. RLS Kabupaten Kota Provinsi Riau tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.23.



Gambar 2.23: Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2020

2.3.2.4 Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Perkembangan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) selama tahun 2010-2020 di Kota Dumai memiliki tren peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,18% per tahun. Pencapaian angka HLS Kota Dumai dari tahun 2010 yaitu sebesar 11,67 tahun meningkat menjadi 13,12 tahun pada tahun 2020 dengan peningkatan sebesar 1,45 tahun.

Jika dilihat angka tersebut HLS Kota Dumai telah menggambarkan pencapaian untuk wajib belajar 12 tahun. Kondisi ini dapat disebabkan oleh income per kapita rumah tangga dan persepsi masyarakat terhadap pendidikan tinggi yang merupakan harapan untuk memperbaiki kehidupan masa depan. Untuk diketahui bahwa Kota Dumai merupakan salah satu Kota yang memprioritas pendidikan sejak lama.

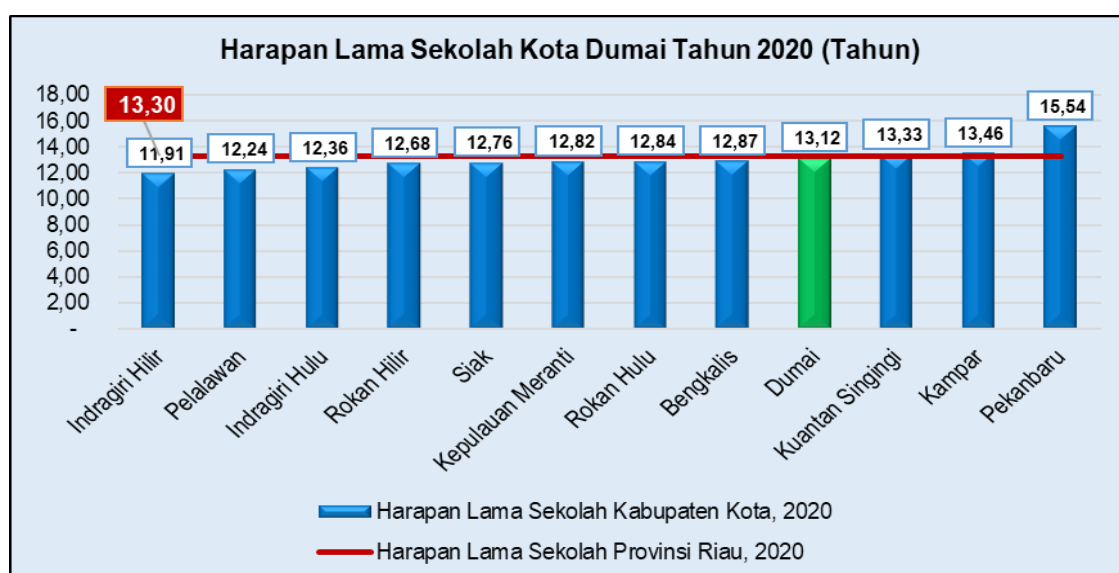
Oleh karena itu melalui program dan kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat dan sosialisasi penting pendidikan tinggi dan universal akan menjadi motor utama dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja dan wilayah serta peningkatan martabat daerah melalui peningkatan daya saing daerah. Perkembangan HLS Kota Dumai 2010-2020, lihat Tabel 2.29 berikut.

Tabel 2.29
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional, 2010-2020

Wilayah	Satuan	Tahun											Rata-Rata Pertumbuhan/Tahun (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kota Dumai	Tahun	11,67	11,87	12,07	12,27	12,40	12,46	12,75	12,97	12,98	13,10	13,12	1,18
Provinsi Riau	Tahun	11,76	11,78	11,79	12,27	12,45	12,74	12,86	13,03	13,11	13,14	13,30	1,24
Indonesia	Tahun	11,29	11,44	11,68	12,10	12,39	12,55	12,72	12,85	12,91	12,95	12,98	1,41

Sumber: BPS Kota Dumai, Provinsi Riau dan Pusat, 2021

Pada tahun 2020 angka HLS Kota Dumai sebesar 13,12 tahun lebih rendah dari HLS Provinsi Riau sebesar 13,30 tahun dan lebih tinggi dari HLS Nasional 12,98 tahun. Posisi HLS Kota Dumai dari 12 kabupaten kota berada di urutan ke 4 dibawah Kabupaten Kuansing, Kampar dan Kota Pekanbaru. Jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.24 berikut.



Gambar 2.24: Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2020

2.3.2.7 Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup merupakan angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup menggambarkan derajat kesehatan suatu wilayah. Semakin tinggi angka harapan hidup, semakin tinggi pula tingkat kesehatan yang telah dicapai oleh penduduk di suatu wilayah. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Dumai dari tahun 2015-2020 cenderung meningkat seperti yang tersaji pada Tabel 2.30. Meningkatnya angka harapan hidup waktu lahir secara tidak langsung memberikan gambaran tentang adanya kemungkinan peningkatan kualitas hidup dan kesehatan dalam masyarakat sehingga dapat menurunkan angka kematian. Keadaan ini terkait

dengan pola hidup sehat masyarakat serta tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai dan mudah untuk dicapai, serta kesadaran yang tinggi untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.

Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu wilayah bisa diminimalisir melalui pelaksanaan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya, termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan program pemberantasan kemiskinan

Tabel 2.30
Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Dumai
Tahun 2015-2020

No	Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Kota Dumai	Tahun	70,25	70,31	70,37	70,55	70,82	70,93	0,193
2	Provinsi Riau	Tahun	70,93	70,97	70,99	71,19	71,48	71,60	0,188
3	Indonesia	Tahun	70,78	70,90	71,06	71,20	71,34	71,47	0,194

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka, 2021

2.3.2.8 Pravalensi Balita Gizi Buruk

Status gizi sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung dan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Pengukuran gizi pada balita difokuskan pada tingkat kecukupan gizinya yang diukur melalui berat badan terhadap umur atau berat badan terhadap tinggi badan yang dilakukan di posyandu.

Dari hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) pada balita di Kota Dumai pada tahun 2020 diperoleh status gizi balita sebagai berikut: persentase balita dengan gizi buruk sebesar 0,017% (3 penderita), persentase balita dengan gizi kurang sebesar 0,44% (182 penderita). Bila dibandingkan dengan target sasaran tahun 2020 dimana persentase balita dengan gizi buruk sebesar < 2% dan persentase balita dengan gizi kurang sebesar <5%, maka pencapaian status gizi balita masih lebih rendah dari target.

Tabel 2.31
Perkembangan Angka Balita Gizi Buruk Kota Dumai Tahun 2015-2020.

Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
Angka Kelahiran Bayi	Bayi	7.732	7.738,00	7.886,00	8.029	8.168	0,44
BBLR	Bayi	130,00	167,00	166,00	151,00	121,00	-9,76
LBW	Bayi	85	167,00	166,00	151,00	121,00	-11,26
Gizi Buruk	Bayi	3,00	5,00	6,00	7,00	3,00	-9,76

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka, 2021

Selama tahun 2016-2020, dimana pada tahun 2016 angka balita gizi buruk dari tujuh Kecamatan hanya terdapat di Kecamatan Dumai Timur sebanyak 3 orang namun pada tahun 2020 terdapat di dua Kecamatan yaitu Dumai Timur dan Bukit Kapur masing-masing 1 dan 2 orang. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.32 berikut.

Tabel 2.32
Perkembangan Angka Balita Gizi Buruk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Angka Balita Gizi Buruk										Pertumbuhan / Tahun (%)
		2016		2017		2018		2019		2020		
		Absolut	/100	Absolut	/100	Absolut	/100	Absolut	/100	Absolut	/100	
1	Dumai Kota	-	-	1,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-25,00
2	Dumai Timur	3,00	0,04	-	-	2,00	0,02	1,00	0,01	1,00	0,01	-37,50
3	Dumai Selatan	-	-	-	-	2,00	0,03	1,00	0,15	-	-	-25,00
4	Dumai Barat	-	-	1,00	0,02	-	-	3,00	0,06	-	-	-50,00
5	Bukit Kapur	-	-	1,00	0,02	1,00	0,02	1,00	0,01	2,00	0,11	-12,50
6	Sungai Sembilan	-	-	1,00	0,03	-	-	1,00	0,02	-	-	-50,00
7	Medang Kampai	-	-	1,00	0,07	1,00	0,06	-	-	-	-	-25,00
	Kota Dumai	3,00	0,01	5,00	0,01	6,00	0,02	7,00	0,02	3,00	0,01	-12,50

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka, 2021

Melalui pemantauan pertumbuhan balita yang dilakukan secara terus menerus setiap bulannya di posyandu terutama pada balita BGM (Bawah Garis Merah) oleh petugas kesehatan, pengadaan PMT (Pemberian Makanan Tambahan), pemberian vitamin balita dan penyuluhan gizi kepada masyarakat khususnya ibu-ibu yang memiliki balita, maka kejadian gizi buruk pada balita dapat diantisipasi. Faktor-faktor yang menyebabkan gizi buruk pada balita antara lain, kualitas kehamilan yang buruk karena kekurangan asupan gizi, kehamilan resiko tinggi (karena usia ibu hamil yang terlalu muda atau terlalu tua) dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR).

Balita yang mengalami gizi buruk tidak hanya terjadi di keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, akan tetapi juga dapat terjadi di keluarga yang tergolong mampu. Hal tersebut disebabkan oleh pola makan anak yang kurang sehat, antara lain kurangnya perhatian orang tua karena terlalu sibuk. Gizi buruk pada balita juga bisa disebabkan karena adanya penyakit penyerta seperti jantung. Selain itu kesadaran masyarakat untuk imunisasi juga masih kurang sehingga anak lebih rentan terhadap penyakit yang dapat mengakibatkan berat badannya rendah.

Permasalahan kesehatan gizi masyarakat yang juga menjadi perhatian Pemerintah adalah stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Anak stunting juga memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis

di masa dewasanya. Permasalahan stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru akan terlihat ketika anak sudah menginjak usia dua tahun. UNICEF mendefinisikan stunting sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi badan di bawah minus (stunting sedang dan berat) dan minus tiga (stunting kronis). Hal ini diukur dengan menggunakan standar pertumbuhan anak yang dikeluarkan oleh WHO. Selain mengalami pertumbuhan terhambat, stunting juga seringkali dikaitkan dengan penyebab perkembangan otak yang tidak maksimal.

Kementerian kesehatan telah menyusun strategi nasional dalam menurunkan stunting. Strateginya antara lain dengan intervensi gizi spesifik atau langsung menasar anak yakni untuk anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Upaya yang dilakukan di antaranya pemberian obat atau makanan untuk ibu hamil atau bayi berusia 0-23 bulan. Juga intervensi gizi sensitif yang dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan, antara lain, penyediaan air bersih atau sanitasi, pendidikan gizi, dan ketahanan pangan dan gizi.

Dalam RPJMN 2020-2024 penekanan angka stunting ditargetkan menjadi 19% pada 2024 dari yang saat ini 30,8% (Risksedas 2018). Upaya ini harus dilakukan dengan semaksimal mungkin dengan intervensi gizi spesifik dan sensitive. Pengukuran stunting dengan menggunakan pengukuran TB/U, anak stunting akan masuk kategori kurang dari -2 standar deviasi (SD), artinya, di dalam grafik pertumbuhan balita akan berada di bawah garis merah. Prevalensi balita pendek (stunting) Kota Dumai sebesar 0,2% (79 penderita), balita kurus sebanyak 93 penderita (0,2%).

Balita yang mengalami gizi buruk tidak hanya terjadi di keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, akan tetapi juga dapat terjadi di keluarga yang tergolong mampu. Hal tersebut disebabkan oleh pola makan anak yang kurang sehat, antara lain kurangnya perhatian orang tua karena terlalu sibuk. Gizi buruk pada balita juga bisa disebabkan karena adanya penyakit penyerta seperti jantung. Selain itu kesadaran masyarakat untuk imunisasi juga masih kurang sehingga anak lebih rentan terhadap penyakit yang dapat mengakibatkan berat badannya rendah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing, maka salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Dumai, Pemerintah Kota Dumai fokus pada penurunan tingkat kematian ibu dan bayi serta peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu bentuk komitmen dan kepedulian Pemerintah Kota Dumai terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terutama bagi

masyarakat yang kurang mampu, maka Pemerintah Kota Dumai memberikan pelayanan kesehatan gratis melalui program jaminan kesehatan masyarakat, tentunya tidak terlepas dari kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sumber dana bantuan iuran bagi masyarakat tersebut bersumber dari APBN dan APBD Kota Dumai, data penerima bantuan iuran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.33

Tabel 2.33
Perkembangan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBD
Kota Dumai dan APBN tahun 2015-2020

Sumber Dana	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
APBD Kota Dumai	66.113	64.514	64.949	66.200	62.249	74.766	2,86
APBN	62.158	62.158	61.414	61.166	89.298	84.057	7,70
Jumlah	128.271	126.672	126.363	127.366	151.547	158.823	4,62

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Selama tahun 2016-2020 Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan dari APBD Kota Dumai mengalami peningkatan sebesar 2,86% per tahun dan dari APBN naik sebesar 7,70% per tahun.

Dengan kata lain penerima PBI dari APBD dan APBN naik dari 40,49% pada tahun 2016 menjadi 50,14% pada tahun 2020 dari jumlah penduduk Kota Dumai dan telah menikmati layanan kesehatan gratis dari Pemerintah Kota Dumai.

2.3.2.9 Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)

Angkatan Kerja merupakan penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Dibagi dengan jumlah penduduk 15 tahun keatas. Jumlah penduduk 15 tahun keatas mengalami pertumbuhan 2,07% per tahun dengan pertumbuhan jumlah Angkatan kerja sebesar 4,17% dengan angka partisipasi angkatan kerja tumbuh sebesar 1,44% per tahun selama periode 2015-2020.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah Angkatan kerja memiliki pertumbuhan yang tinggi dibandingkan dengan partisipasi Angkatan kerja. Hal ini mengindikasikan penawaran jumlah penduduk usia kerja semakin tinggi, tetapi tanpa dibarengi dengan penyiapan lapangan akan mengakibatkan peningkatan angka pengangguran terbuka. Berikut disajikan data Tabel 2.34 mengenai perkembangan Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) Kota Dumai dari Tahun 2015-2020.

Tabel 2.34
Perkembangan Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)
Kota Dumai Tahun 2015-2020

Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)							Pertumbuhan/ Tahun (%)
	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah Penduduk	Jiwa	285.967	291.908	297.638	303.292	308.812	316.782	2,07
Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas	Jiwa	196.563	201.550	206.467	211.351	216.196	224.722	2,72
Jumlah Angkatan Kerja	Orang	120.250	132.113	135.684	136.112	150.323	146.586	4,17
Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	61,18	65,55	65,72	64,40	69,53	65,23	1,44

Sumber: BPS, Provinsi Riau, 2016-2021 dan Data Olahan Tim

2.3.2.10 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam lapangan usaha atau sektor perekonomian.

Tabel 2.35 mengenai perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Dumai dari Tahun 2015-2020. Upaya peningkatan partisipasi Angkatan kerja dapat dilakukan dengan peningkatan investasi pada Industri padat karya dan industri padat modal. Pada kondisi padat karya lebih banyak menggunakan tenaga kerja manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang bersifat untuk mengkreasikan pengembangan diri melalui penyerapan tenaga kerja yang diharapkan akan meningkatkan produktivitas. Peningkatan produktivitas yang bergerak cepat, efisien, penggunaan teknologi tersedia dan dikuasai oleh tenaga kerja pada industri padat karya.

Perkembangan TPAK selama tahun 2015-2020 mengalami pertumbuhan 1,44% per tahun yang disebabkan oleh pertumbuhan jumlah Angkatan kerja lebih rendah yaitu sebesar 4,17% dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja. Perkembangan TPAK selama periode 2015-2020 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.35
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kota Dumai Tahun 2015-2020

Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)							Pertumbuhan/ Tahun (%)
	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah Penduduk	Jiwa	285.967	291.908	297.638	303.292	308.812	316.782	2,07
Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas	Jiwa	196.563	201.550	206.467	211.351	216.196	224.722	2,72
Jumlah Angkatan Kerja	Orang	120.250	132.113	135.684	136.112	150.323	146.586	4,17
Persentase TPAK	%	61,18	65,55	65,72	64,40	69,53	65,23	1,44

Sumber: BPS, Provinsi Riau, 2016-2021 dan Data Olahan Tim

Berdasarkan Tabel 2.35 menunjukkan bahwa TPAK mengalami peningkatan sebesar 1,44% per tahun atau naik dari 61,18% pada tahun 2015 menjadi 65,23% pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk usia kerja lebih rendah dibandingkan dengan angkatan kerja. Hal ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan angka jumlah penduduk yang bekerja.

2.3.2.11 Jumlah Penduduk Bekerja

Jumlah penduduk bekerja adalah jumlah penduduk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha ekonomi. Jumlah penduduk bekerja dari Angkatan kerja mengalami pertumbuhan -1,10% per tahun. Namun jumlah penduduk bekerja mengalami peningkatan dari 117.277 orang pada tahun 2015 menjadi 134.581 orang pada tahun 2020. Kondisi ini terjadi karena pertumbuhan jumlah Angkatan angka lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja. Berikut disajikan data Tabel 2.36 mengenai perkembangan jumlah dan persentase penduduk yang bekerja dari Angkatan Kerja (AK) Kota Dumai dari Tahun 2015-2020.

Tabel 2.36
Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja dari Angkatan Kerja
Kota Dumai Tahun 2015-2020

Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja							Pertumbuhan / Tahun (%)
	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah Penduduk	Jiwa	285.967	291.908	297.638	303.292	308.812	316.782	2,07
Jumlah Penduduk 15-64 Tahun	Jiwa	196.563	201.550	206.467	211.351	216.196	224.722	2,72
Jumlah Angkatan Kerja	Orang	120.250	132.113	135.684	136.112	150.323	146.586	4,17
Jumlah Bekerja	Orang	117.277	117.280	123.550	127.897	140.600	134.581	2,90
Persentase Jumlah Penduduk Bekerja	%	97,53	88,77	91,06	93,96	93,53	91,81	-1,10

Sumber: BPS, Provinsi Riau, 2016-2021 dan Data Olahan Tim

Untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja dari Angkatan kerja yang ada maka kebijakan pembangunan ketenagakerjaan yang harus dilakukan meliputi: (a) pembinaan iklim bagi perluasan lapangan kerja, peningkatan efisiensi dan produktivitas, antara lain dengan menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelatihan produktivitas, penciptaan iklim produktivitas di masyarakat melalui peningkatan fungsi kelembagaan produktivitas; (b) pendayagunaan tenaga kerja produktif, melalui program khusus bagi kelompok angkatan kerja tertentu, seperti tenaga kerja muda terdidik, penganggur dan

setengah penganggur; (c) peningkatan kualitas tenaga kerja antara lain melalui pelatihan keterampilan dengan mengupayakan adanya kemitraan pelatihan tenaga kerja antara penyelenggara dan pengguna tenaga kerja, pengembangan kelembagaan pelatihan; dan (d) pengembangan kesejahteraan tenaga kerja melalui penciptaan hubungan industrial yang serasi dan didukung oleh perbaikan syarat kerja dan perlindungan tenaga kerja khususnya tenaga kerja wanita bekerja. Penduduk yang bekerja adalah yang sekurang-kurangnya bekerja satu jam salam seminggu secara terus-menerus sebelum pencacahan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh pendapatan.

2.3.2.12 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah penduduk yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan penduduk yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. TPT adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kota Dumai mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 11,23% pada tahun 2015 menurun menjadi 8,19% pada tahun 2020 dengan penurunan pertumbuhan sebesar -3,84% per tahun.

Upaya yang harus dilakukan dalam rangka terus mengurangi tingkat pengangguran antara lain membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, meningkatkan peredaran modal usaha, sehingga jumlah tenaga kerja bertambah, menempatkan pencari kerja ke tempat yang sesuai kemampuan, melatih para pencari kerja untuk memiliki jiwa entrepreneur atau membuka usaha sendiri. Berikut disajikan data Tabel 2.37 mengenai perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari Angkatan Kerja Kota Dumai dari Tahun 2015-2020.

Tabel 2.37
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kota Dumai Tahun 2015-2020

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)							Pertumbuhan / Tahun (%)
	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah Penduduk	Jiwa	285.967	291.908	297.638	303.292	308.812	316.782	2,07
Jumlah Penduduk 15-64 Tahun	Jiwa	196.563	201.550	206.467	211.351	216.196	224.722	2,72
Jumlah Angkatan Kerja	Orang	120.250	132.113	135.684	136.112	150.323	146.586	4,17
Jumlah Menganggur	Orang	13.504	11.864	12.130	8.221	9.726	12.005	-0,08
TPT	%	11,23	8,98	8,94	6,04	6,47	8,19	-3,84

Sumber: BPS, Provinsi Riau, 2016-2021 dan Data Olahan Tim

Pengangguran terbuka merupakan angkatan kerja yang belum bekerja dikarenakan belum mendapat pekerjaan atau tidak bekerja. Dalam beberapa tahun terakhir terdapat hal paradoks di Kota Dumai bahwa pertumbuhan ekonomi sudah cukup baik, namun tingkat pengangguran terbuka masih relatif tinggi, agar kedepan arah kebijakan fokus menangani tingkat pengangguran terbuka ini dengan menyediakan lapangan kerja yang seluas luasnya terutama pada sektor pertanian dan industri.

2.3.2.13 Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja

Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja di Kota Dumai menunjukkan perkembangan dengan kecenderungan peningkatan selama periode 2015-2020. Pada tahun 2015 PDRB menurut harga berlaku per tenaga kerja sebesar Rp. 216,84 juta kemudian meningkat menjadi Rp. 269,90 juta pada tahun 2020 dengan pertumbuhan 4,53% per tahun. Sementara laju pertumbuhan menurut PDRB harga konstan per tenaga kerja pada tahun 2015 sebesar Rp. 174,94 juta kemudian mengalami peningkatan menjadi Rp. 182,76 juta pada tahun 2020 dengan pertumbuhan 3,78% per tahun.

Peningkatan laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja baik menurut harga berlaku dan harga konstan tidak terlepas dari terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa selama periode 2015-2020. Artinya peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan lebih tinggi dari pada peningkatan jumlah penduduk yang bekerja. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk bekerja mengalami peningkatan yang lebih rendah dengan pertumbuhan sebesar 2,90% per tahun. Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja di Kota Dumai, 2015-2020 lihat Tabel 2.38 berikut.

Tabel 2.38
Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja
Kota Dumai Tahun 2015-2020

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan / Tahun (%)
1	PDRB HB Kota Dumai	RP. Juta	25.430.570	27.945.396	30.299.161	33.076.210	36.145.360	36.322.880	7,45
2	PDRB HK Kota Dumai	RP. Juta	20.516.494	21.468.404	22.347.512	23.538.470	24.855.800	24.595.620	3,72
3	Jumlah Penduduk Bekerja	Orang	117.277	117.280	123.550	127.897	140.600	134.581	2,90
4	Rasio PDRB HB/TK	Rp. Juta/TK	216,84	238,28	245,24	258,62	257,08	269,90	4,53
5	Rasio PDRB HK/TK	Rp. Juta/TK	174,94	183,05	180,88	184,04	176,78	182,76	0,93
6	Laju Pertumbuhan PDRB HB/TK	%	0	9,89	2,92	5,46	-0,59	4,99	3,78
7	Laju Pertumbuhan PDRB HK/TK	%	0	4,64	-1,19	1,75	-3,94	3,38	0,77

Sumber: BPS, Provinsi Riau, 2016-2021 dan Data Olahan Tim

2.3.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga.

2.3.3.1 Perkembangan Seni Budaya

Kota Dumai berada pada simpul persinggahan mobilitas antar bangsa dan suku, mempunyai konsekuensi tumbuh dan berkembang menjadi kota multikultur. Kondisi ini harus disikapi dengan mewujudkan kehidupan masyarakat Dumai yang harmonis dalam keragaman budaya, suku dan ras serta agama sehingga menjadikan kehidupan masyarakat Dumai yang berkembang dan semakin modern. Untuk mendukung perkembangan tersebut diperlukan tatanan dengan penerapan budaya melayu yang agamis ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial dan ketertiban umum termasuk dalam pengembangan nilai budaya dari aspek pembangunan sarana dan prasarana dengan yang mengarah pada arsitektur melayu dalam pembangunan dan pengembangan perkotaan di Kota Dumai. Terkait penerapan budaya melayu yang agamis, tentunya harus dimulai dari pembinaan generasi penerus terutama implementasi Pendidikan budaya melayu serta implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar.

Pengembangan budaya melayu di Kota Dumai baik dalam tatanan Pendidikan yang kemudian diimplementasikan dalam pola dan tingkah laku kehidupan sehari-hari harus menjadi perhatian. Dalam dunia Pendidikan yang merupakan dasar bagi pembentukan karakter masyarakat melayu yang agamis perlu implementasi budaya melayu dalam kurikulum Pendidikan. Data implementasi budaya melayu dalam kurikulum Pendidikan dasardapat dilihat pada Tabel 2.39 berikut ini:

Tabel 2.39
Implementasi Budaya Melayu Riau dalam Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar Kota Dumai Tahun 2015-2020

Sumber Dana	Jumlah Sekolah	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
SD/MI	107	5,00	66,00	102,00	103,00	107,00	107,00	255,88
Persentase	0	4,67	61,68	95,33	96,26	100,00	100,00	76,32
SMP/MTS	37	24,00	28,00	28,00	28,00	28,00	29,00	4,05
Persentase	0	64,86	75,68	75,68	75,68	75,68	78,38	74,32

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Penerapan kurikulum budaya melayu Riau tingkat sekolah dasar baru diterapkan untuk kelas 4,5 dan 6, sedangkan untuk kelas 3 kebawah belum diajar kurikulum tersebut sebagai kurikulum muatan lokal. Dari kedua tabel di bawah dapat dilihat bahwa penerapan kurikulum muatan lokal budaya melayu Riau pada tahun 2020 di tingkat Sekolah Dasar sudah mencapai 100,00% sedangkan untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama sudah mencapai 78,38% dan dapat disimpulkan bahwa implementasi penerapan kurikulum muatan lokal pada Pendidikan dasar pada tahun 2020 adalah sebesar 89,19%.

Budaya melayu sangat melekat dengan Islam, dalam pembangunan masyarakat harus juga berbasis nilai-nilai agama. Pengembangan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari harus dimulai sejak dini, sekolah juga memegang peranan penting dalam hal ini. Rata-rata pelaksanaan nilai-nilai agama diluar kurikulum wajib pada tingkat sekolah dasar pada tahun 2020 adalah sebesar 85,95%. Data penerapan nilai-nilai agama dalam Pendidikan dasar dapat dilihat dari Tabel 2.40 berikut ini:

Tabel 2.40
Implementasi Nilai-nilai Agama pada Pendidikan SD/MI Kota Dumai Tahun 2015-2020

Kegiatan	Jumlah SD/MI	Tahun											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%
Membaca Yasin Bersama	105	68	64,76	70	66,67	91	86,67	92	87,62	92	87,62	102	97,14
Sholat Zuhur Berjamaah	105	43	40,95	46	43,81	50	47,62	51	48,57	51	48,57	54	51,43
Membaca Ayat Pendek/Hapalan Al-Quran	105	89	84,76	92	87,62	97	92,38	99	94,29	97	92,38	101	96,19
Berdoa setiap memulai pelajaran	105	95	90,48	98	93,33	101	96,19	102	97,14	102	97,14	104	99,05
Rata-Rata	105	73,75	70,24	76,50	72,86	84,75	80,71	86,00	81,90	85,50	81,43	90,25	85,95

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Sedangkan rata-rata pelaksanaan nilai-nilai agama diluar kurikulum wajib (sepaimana disajikan pada Tabel 2.41) pada tingkat sekolah Pendidikan Menengah pada tahun 2015 sebesar 74,29% kemudian meningkat menjadi sebesar 100,00% pada tahun 2020. Komponen tersebut dalam

kurikulum muatan lokal atau adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran yang berfungsi untuk memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan dan kompetensinya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan lingkungannya.

Tabel 2.41
Implementasi Nilai-nilai Agama pada Pendidikan SMP/MTs
Kota Dumai Tahun 2015-2020

Kegiatan	Jumlah SMP/MTs	Tahun											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%
Membaca Yasin Bersama	35	29	82,86	31	88,57	33	94,68	35	100,00	35	100,00	35	100,00
Sholat Zuhur Berjamaah	35	19	54,29	23	65,71	28	79,55	35	100,00	35	100,00	35	100,00
Membaca Ayat Pendek/Hapalan Al-Quran	35	25	71,43	31	88,57	35	100,00	35	100,00	35	100,00	35	100,00
Berdoa setiap memulai pelajaran	35	31	88,57	33	94,29	35	100,37	35	100,00	35	100,00	35	100,00
Rata-Rata	35	26,00	74,29	29,50	84,29	32,78	93,65	35,00	100,00	35,00	100,00	35,00	100,00

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Di Kota Dumai terdapat Lembaga Adat Melayu dan Paguyuban berbagai suku bangsa di Indonesia. Peranan dan keberadaan Lembaga Adat Melayu di Kota Dumai belum maksimal sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu sangat diperlukan penguatan dan peningkatan peranan Lembaga Adat Melayu, serta kerja keras dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Dumai. Pada Tabel 2.42 berikut disajikan data target dan realisasi indikator kinerja sasaran yang berkaitan dengan seni budaya tahun 2020.

Tabel 2.42
Kinerja Sasaran Berkaitan Dengan Seni Dan Budaya
Kota Dumai Tahun 2020

Indikator kinerja sasaran	Satuan	Target Capaian Kinerja 2020	Realisasi sampai Tahun 2020	Capaian Kinerja
Sanggar Seni dan Budaya Yang Dibina	Sanggar	85	40	47,06
Jumlah Grup Kesenian	Buah	40	35	87,50
Jumlah Gedung Kesenian	Unit	1	0	0

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk sanggar seni dan budaya dari target 85 sanggar yang dibina hanya terealisasi 40 sanggar yang dibina. Untuk jumlah grup kesenian dari target 40 grup kesenian hanya terealisasi 35 grup. Sedangkan pembangunan 1 (satu) gedung kesenian belum terealisasi. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se Provinsi Riau, jumlah grup kesenian di Dumai menempati urutan paling bawah, sama halnya dengan Pelalawan.

Rendahnya jumlah grup seni budaya Melayu, minimnya sarana/prasarana seni budaya, belum maksimalnya peranan Lembaga Adat Melayu, dan Pembelajaran seni budaya Melayu Riau di sekolah disebabkan oleh belum maksimalnya kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai.

Festival seni dan budaya diselenggarakan secara rutin di Kota Dumai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Penyelenggaraan festival seni dan budaya dimaksudkan untuk pelestarian seni dan budaya melayu serta penguatan karakter bangsa sehingga generasi muda dapat mengenali dan memahami kesenian dan kebudayaannya sendiri serta dapat meneruskan ke generasi berikutnya antara lain: Festival Layang-layang, Lomba Gasing, Panggung Seni Rakyat, Lomba Pantuan dan Syair, Festival Kompang, Rebana dan Nasyid serta Lomba Masakan Kuliner.

Terdapat beragam jenis warisan budaya tak benda yang hidup dalam keseharian masyarakat melayu di Kota Dumai, antara lain pantun, gurindam, motif tenun, mantra-mantra semah, mendodoi anak, dialek melayu dumai serta warisan budaya tak benda lainnya seperti cerita rakyat yang telah turun temurun berkembang di masyarakat Kota Dumai.

Dalam masyarakat melayu di Kota Dumai, juga terdapat beberapa tradisi lisan yang berkembang dan disampaikan secara turun temurun di tengah-tengah masyarakat. Adapun tradisi lisan dimaksud antara lain adalah cerita putri tujuh, misteri goa pelintung, panglima hitam, bujang manjo, buah bakau belukap jin qunai, asal mula lubuk gaung, panglima jambul, tuk kedondong.

2.3.3.2 Perkembangan Olah Raga

Di Kota Dumai terdapat banyak klub olahraga yang bernaung dibawah KONI Dumai. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai berperan penting dalam membina klub-klub olahraga yang bernaung di bawah KONI Dumai tersebut agar dapat memajukan dan mengharumkan Kota Dumai melalui kompetisi/perlombaan yang diikuti. Oleh karena itu, perlu penguatan dan peningkatan peranan klub olahraga tersebut kedepannya.

Dari data Tabel 2.43 dapat dilihat bahwa pembinaan cabang olahraga dan klub olahraga sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi yang dicapai. Di sisi lain, jika dilihat dari fasilitas olahraga, jumlah fasilitas olahraga di Kota Dumai masih sangat minim dibandingkan dengan yang ada wilayah lainnya di Provinsi Riau. Pada Tabel 2.43 berikut disajikan data berdasarkan jumlah pembinaan cabang dan jumlah klub olahraga.

Tabel 2.43
Indikator Kinerja Berdasarkan Jumlah Pembinaan Cabang dan Jumlah Klub Olahraga Kota Dumai Tahun 2015-2020

Kegiatan	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah pembinaan cabang olahraga	Cabang	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	29,00	1,19
Jumlah Yang Dibina	Cabang	0,00	9,00	0,00	32,00	33,00	34,00	-23,46
Persentase Binaan	%	0,00	0,00	0,00	114,29	117,86	117,24	0,87
Jumlah klub olahraga	Klub	0,00	112	0,00	100	112	112	-22,00
Jumlah Yang Dibina	Klub	0,00	112	0,00	100	112	112	-22,00
Persentase Binaan	%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 2020

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

2.4.1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nilai PAUD ini mencerminkan rasio pendidikan bagi anak-anak. Semakin tinggi nilai, maka berarti semakin banyak pula jumlah siswa pada rentang usia PAUD yang bersekolah, baik di PAUD maupun TK, dengan jenjang usia antara 4-6 tahun. Berdasarkan data dari Pendidikan, tren perkembangan jumlah PAUD dan sederajat justru mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, jumlah TK dan sederajat berjumlah 79 sekolah kemudian bertambah menjadi 128 sekolah pada tahun 2020. Dengan semakin bertambahnya jumlah PAUD atau TK maka mengindikasikan bahwa penduduk pada usia 4 sampai 6 tahun di Kota Dumai semakin meningkat. Pertambahan jumlah fasilitas Pendidikan tersebut diikuti dengan peningkatan jumlah siswa dan guru dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 0,80% dan 1,72% dari tahun 2016-2020, jelasnya lihat Tabel 2.44 berikut.

Tabel 2.44
Perkembangan Jumlah Fasilitas, Siswa dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK Sederajat Kota Dumai Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK/Sederajat	Unit	79	79	101	134	96	8,04
Jumlah Siswa PAUD/TK sederajat	Orang	4.240	4.737	5.234	4.150	4.221	0,80
Jumlah Guru PAUD/TK sederajat	Orang	400	413	426	433	428	1,72

Sumber: BPS dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2021

2) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Menurut Badan Pusat Statistik, angka partisipasi kasar menunjukkan perbandingan antara rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Masih menurut BPS kegunaan APK adalah menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Angka partisipasi kasar di Kota Dumai dari tahun 2015-2020 pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif dengan pertumbuhan 0,51% per tahun dan -0,04% per tahun. Pada tahun 2018 APK Kota Dumai untuk jenjang SD/MI mengalami penurunan dari tahun sebelumnya begitu juga APK jenjang SMP/MT mengalami penurunan. Kondisi ini menggambarkan bahwa penurunan akses masyarakat terhadap layanan Pendidikan.

Tabel 2.45
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2015-2020

No	Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	APK SD/MI	%	107,20	107,79	111,92	100,00	108,33	108,86	0,51
2	APK SMP/MTs	%	91,58	100,18	95,60	78,89	89,16	88,66	-0,04

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka, 2021

3) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat yang berada pada jenjang sekolah tertentu, yang bersekolah. Angka partisipasi murni adalah salah satu tolak ukur yang dijadikan pegangan oleh pemerintah untuk menilai keberhasilan suatu daerah dalam merangsang minat masyarakat untuk bersekolah. Semakin besar nilai APM suatu daerah pada jenjang pendidikan tertentu dapat menjadi indikator keberhasilan program pendidikan suatu daerah.

Tabel 2.46
Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2015-2020

No	Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	APM SD/MI/Paket A	%	96,37	96,50	99,46	98,77	98,93	99,00	0,55

2	APM SMP/MTs/Paket B	%	76,99	88,50	87,66	84,73	84,19	83,24	1,78
---	---------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka, 2021

Berdasarkan Tabel 2.46 di atas, tren Perkembangan Angka Partisipasi Murni dari tahun 2015-2020 fluktuatif dengan kecenderungan pertumbuhan positif yaitu 0,55% per tahun untuk APM SD/MI atau naik dari 96,37% tahun 2015 meningkat menjadi 99,00% dan APM SMP/MTs juga mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun 2015-2020. Secara umum nilai APM SMP/MTs tahun 2015 ke 2020 mengalami peningkatan dari tahun 76,99% kemudian meningkat menjadi 83,24%.

Berfluktuatifnya APM ini juga dipengaruhi oleh menurunnya angka melanjutkan sekolah dari SD ke SMP. Menurunnya angka melanjutkan sekolah tentunya akan menurunkan nilai APM. Kondisi ini harus dicermati oleh Pemerintah Kota Dumai khususnya Dinas Pendidikan, bahwa minat masyarakat untuk bersekolah semakin menurun, jumlah siswa yang bersekolah juga semakin menurun.

4) Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs

Angka putus sekolah menunjukkan jumlah siswa yang putus sekolah. Dengan data ini dapat dilihat jumlah siswa yang putus sekolah, selain itu yang paling utama adalah mencari penyebab mengapa angka putus sekolah naik dan turun. Dalam kurun waktu antara tahun 2016-2020, tren perkembangan angka putus sekolah di Kota Dumai untuk semua jenjang menunjukkan adanya penambahan.

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), angka putus sekolah pada tahun 2016 sebesar 0,003%, namun pada tahun 2020 angka putus sekolah justru naik menjadi 0,096% dengan rata-rata angka putus sekolah selama tahun 2016-2020 sebesar 0,05%. Pada jenjang SMP juga demikian, pada tahun 2016 angka putus sekolah adalah sebesar 0,049%, namun pada tahun 2020 angka putus sekolah mengalami kenaikan menjadi 0,086%.

Kecenderungan naiknya dan turunnya angka putus sekolah dalam beberapa tahun untuk semua jenjang pendidikan di Kota Dumai menunjukkan bahwa ada permasalahan yang cukup serius mengenai minat masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, atau kemampuan masyarakat secara ekonomi untuk mendapatkan fasilitas pelayanan pendidikan menurun. Mulai tahun 2016, data yang disajikan Badan Pusat Statistik adalah angka partisipasi sekolah, yaitu proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut tersaji pada Tabel 2.47.

Tabel 2.47
Perkembangan Angka Putus Sekolah SD dan SMP di Kota Dumai
Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun					Rata-Rata/ Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,003	0,013	0,090	0,052	0,096	0,05
Angka Putus Sekolah SMP/MTS	%	0,049	0,025	0,025	0,098	0,086	0,06

Sumber: Data NPD Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2016-2019 dan 2020 Angka Estimasi Tim.

Beberapa kajian menunjukkan bahwa angka putus sekolah dapat setidaknya ada enam faktor penyebab terjadinya putus sekolah khususnya pada jenjang pendidikan dasar yaitu faktor ekonomi, minat untuk bersekolah rendah, perhatian orang tua yang kurang, fasilitas belajar yang kurang mendukung, faktor budaya dan lokasi atau letak sekolah (Burhannudin dalam Prihatin, 2011). Secara lengkap dijelaskan sebagai berikut.

- a. Faktor ekonomi merupakan faktor pertama penyebab anak putus sekolah. Ketidakmampuan keluarga si anak untuk membiayai segala proses yang dibutuhkan selama menempuh pendidikan atau sekolah dalam satu jenjang tertentu, walaupun pemerintah telah mencanangkan Program Pendidikan Gratis dua belas tahun, namun belum berimplikasi secara maksimal terhadap penurunan jumlah anak putus sekolah.
- b. Kurang perhatian orang tua merupakan faktor kedua. Rendahnya perhatian orang tua terhadap anak dapat disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga atau rendahnya pendapatan orang tua si anak sehingga perhatian orang tua lebih banyak tercurah pada upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Persentase anak yang tidak dan putus sekolah karena rendahnya kurangnya perhatian orang tua.
- c. Fasilitas pembelajaran yang kurang memadai merupakan faktor ketiga. Fasilitas belajar yang tersedia di sekolah, misalnya perangkat (alat, bahan, dan media) pembelajaran yang kurang memadai, buku pelajaran kurang memadai, dan sebagainya. Kebutuhan dan fasilitas belajar yang dibutuhkan siswa tidak dapat dipenuhi siswa dapat menyebabkan turunnya minat anak yang pada akhirnya menyebabkan putus sekolah.
- d. Minat anak untuk sekolah merupakan faktor keempat. Rendahnya minat anak dapat disebabkan oleh perhatian orang tua yang kurang, jarak antara tempat tinggal anak dengan sekolah yang jauh, fasilitas belajar yang kurang, dan pengaruh lingkungan sekitarnya. Minat yang kurang dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan misalnya tingkat pendidikan masyarakat rendah yang diikuti oleh rendahnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan.

Ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam menopang biaya pendidikan yang berdampak terhadap masalah psikologi anak sehingga anak tidak bisa bersosialisasi dengan baik dalam pergaulan dengan teman sekolahnya selain itu adalah peranan lingkungan.

- e. Budaya merupakan faktor kelima yang terkait dengan kebiasaan masyarakat di sekitarnya. Rendahnya kesadaran orang tua atau masyarakat akan pentingnya pendidikan. Perilaku masyarakat pedesaan dalam menyekolahkan anaknya lebih banyak dipengaruhi faktor lingkungan. Mereka beranggapan tanpa bersekolahpun anakanak mereka dapat hidup layak seperti anak lainnya yang bersekolah, oleh karena di desa jumlah anak yang bersekolah lebih banyak dan mereka dapat hidup layak maka kondisi seperti itu dijadikan landasan dalam menentukan masa depan anaknya. Masyarakat di pedesaan lebih banyak mengarahkan anaknya yang masih usia sekolah untuk membantu orang tua dalam mencari nafkah.
- f. Lokasi atau letak sekolah merupakan faktor keenam yang mampu menyebabkan anak putus sekolah. Jarak yang jauh dengan akses yang sulit merupakan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya. Alat transportasi yang kurang serta jarak antara rumah dengan sekolah yang cukup jauh.

5) Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs

Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan, bila angka kelulusan tinggi maka proses pembelajaran di sekolah tersebut berjalan dengan baik, dan apabila angka kelulusan rendah, maka banyak orang yang akan menjustifikasi bahwa pembelajaran yang dilakukan pada satu institusi pendidikan tidak berlangsung dengan baik. Dalam rentang tahun 2016-2020, angka kelulusan untuk jenjang sekolah dasar di Kota Dumai sedikit mengalami perkembangan yang meningkat, pada tahun 2016 angka kelulusan untuk jenjang SD sebesar 100,00% hingga tahun 2020. Sedangkan untuk jenjang SMP, angka kelulusan berfluktuasi, pada tahun 2016 angka kelulusan 99,96% dan pada tahun 2020 angka kelulusan adalah sebesar 100,00%.

Tabel 2.48
Perkembangan Angka Kelulusan SD dan SMP di Kota Dumai
Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun					Rata-Rata/ Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
Angka Kelulusan Sekolah SD/MI	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Angka Kelulusan Sekolah SMP/MTS	%	99,96	100,00	99,98	100,00	100,00	99,99

Sumber: Data NPD Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2016-2019 dan 2020 Angka Estimasi Tim.

6) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Angka melanjutkan siswa dari SD/MI ke SMP/MTs dalam rentang waktu 2016-2020 di Kota Dumai menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif. Angka melanjutkan tertinggi ada pada tahun 2017 dengan nilai 99,86%. Pada tahun 2020 angka melanjutkan adalah sebesar 94,52%.

Angka melanjutkan ini menunjukkan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi semakin besar. Meningkatnya tingkat ekonomi masyarakat dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap pendidikan menjadi salah satu faktor penyebabnya.

Meningkatnya tingkat ekonomi masyarakat, dan juga pendapatan masyarakat, maka masyarakat memiliki kemampuan secara ekonomi untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan tidak segan mengeluarkan uang yang cukup besar untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang terbaik. Selain faktor ekonomi, kesadaran akan pentingnya pendidikan juga mulai dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat berharap dengan pendidikan yang diperoleh oleh anak-anak mereka, maka kehidupan anak-anak mereka pada masa yang akan datang diharapkan akan dapat menjadi lebih baik.

Tabel 2.49
Perkembangan Angka Melanjutkan dari SD ke SMP di Kota Dumai
Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun					Rata-Rata/ Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTS	%	83,80	99,86	97,38	87,73	94,52	92,66

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2020 dan 2020 Merupakan Angka Estimasi Tim.

7) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs serta Rasio Siswa terhadap Ruang Kelas

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk dalam usia sekolah. Dengan demikian, nilai ini juga mencerminkan jumlah sekolah yang ada setiap 10.000 penduduk. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Dumai Dalam Angka, dari tahun 2016-2020, rasio ketersediaan sekolah dibanding dengan penduduk usia sekolah mengalami perkembangan yang positif. Pada tahun 2016 rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI menunjukkan angka 101. Angka ini menunjukkan ada sekitar 38 sekolah SD untuk 10.000

penduduk. Pada tahun 2020 rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI adalah 107 hal ini berarti terdapat sekitar 107 sekolah SD untuk setiap 10.000 penduduk. Untuk jenjang SMP rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTS antara tahun 2015-2020 juga menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2015 menunjukkan nilai 31 dan pada tahun 2020 naik menjadi 37 pada tahun 2020.

Sementara itu rasio siswa per ruang kelas untuk jenjang pendidikan SD menunjukkan terjadinya perbaikan dari 35,58 siswa per kelas tahun 2016 menjadi 31,13 siswa per ruang kelas pada tahun 2020. Kondisi ini terjadi karena jumlah siswa untuk jenjang SD/MI pada tahun 2016 adalah sebanyak 37.788 bertambah menjadi 38.416 siswa pada tahun 2020, dengan pertumbuhan sebesar 0,41% per tahun sementara ruang kelas mengalami penambahan sebesar 3,86% per tahun.

Dari Tabel 2.50 dapat dilihat bahwa rasio jumlah siswa SD/MI terhadap Jumlah ruang kelas pada tahun 2016 yakni 1:35,58 artinya 1 ruang kelas menampung 36 siswa dan kemudian menjadi 1:31 tahun 2020. Jika sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jenjang SD 1 ruang kelas maksimal jumlah siswa sebanyak 28 orang (1:28) sehingga Kota Dumai pada tahun 2020 sudah melebihi standart tersebut, selain itu perlu diingat bahwa Sebagian besar ruang kelas dalam kondisi rusak ringan dan sedang.

Tabel 2.50
Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs dan Rasio Siswa terhadap Ruang kelas di Kota Dumai Tahun 2016-2020

Kegiatan	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
Gedung SD	Unit	101	105	107	107	107	1,79
Gedung SMP	Unit	35	35	36	36	37	3,71
Jumlah Siswa SD	Orang	37.788	38.035	38.315	38.148	38.416	0,41
Jumlah RK SD	Orang	1.062	1.134	1.167	1.167	1.234	3,86
Rasio Siswa/RK SD	Indek	35,58	33,54	32,83	32,69	31,13	-3,26
Jumlah Siswa SMP	Orang	12.260	13.145	13.272	13.274	13.480	2,44
Jumlah RK SMP	Orang	357	404	439	446	454	6,30
Rasio Siswa/RK SMP	Indek	34,34	32,54	30,23	29,76	29,69	-3,53

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2020

Untuk jenjang SMP/MTs, jumlah siswa di tahun 2016 adalah sebanyak 12.260 siswa kemudian bertambah menjadi menjadi 13.480 siswa tahun 2020. Untuk jumlah kelas juga terdapat penambahan dari 357 ruang pada tahun 2016 menjadi 454 ruang pada 2020. Pada Tabel 2.50 di atas juga dapat dilihat bahwa rasio jumlah siswa per jumlah ruang kelas menunjukkan kondisi yang

semakin membaik, dari 1:34,34 tahun 2016 menjadi 1:29,69 pada tahun 2020. Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jenjang SMP, 1 ruang kelas maksimal jumlah siswa sebanyak 32 orang (1:32) sehingga Kota Dumai masih memenuhi SPM.

Namun demikian rasio antara jumlah siswa per ruang kelas dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ada, baik untuk jenjang SD maupun SMP tetap harus menjadi perhatian karena jumlah dan kualitas sekolahnya pun belum merata per Kecamatan di Kota Dumai. Minat sekolah penduduk usia sekolah di Kota Dumai masih tertuju pada sekolah-sekolah yang berada di Kecamatan-Kecamatan di wilayah kota. Hal ini terjadi karena sekolah-sekolah tersebut lebih mudah untuk diakses. Disamping itu sarana dan prasarana pendukung di sekolah tersebut juga lebih lengkap dan lebih baik kualitasnya dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggiran.

8) Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Ruang Kelas Baik

Sarana prasarana sekolah merupakan salah satu komponen dalam pendidikan, yang juga merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh sekolah. Hal ini disebabkan karena keterbatasan fasilitas sekolah serta kurang adanya manajemen yang baik dari pengelola, seperti bangunan sekolah yang rusak, media pembelajaran yang kurang memadai, kurangnya ruang kelas sehingga terdapat satu rombongan belajar ditempatkan di ruang multimedia yang tidak sesuai dengan standar luas ruang kelas, kurangnya perencanaan dalam pengadaan fasilitas sehingga sering terjadi kegiatan pengadaan yang tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan pengguna, pendistribusian sarana yang tidak merata, kurangnya penjagaan dan pemeliharaan sarana prasarana yang telah dimiliki, dan lain sebagainya. Perkembangan kondisi ruang kelas SD tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.51 berikut.

Tabel 2.51
Perkembangan Kondisi Ruang Kelas SD di Kota Dumai Tahun 2016-2020

Kondisi Ruang Kelas SD	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah Ruang Kelas	Unit	1.062	1.134	1.167	1.167	1.234	3,86
Baik	Unit	345	437	476	462	260	-2,77
Rusak Ringan	Unit	548	565	606	603	734	7,90
Rusak Sedang	Unit	62	21	41	41	136	65,20
Rusak Berat	Unit	37	52	44	61	104	33,57
Rusak Total	Unit	70	59	0	0	0	-28,93
Tingkat Baik	%	32,49	38,54	40,79	39,59	21,07	-6,31
Tingkat Rusak Ringan	%	51,60	49,82	51,93	51,67	59,48	3,85

Tingkat Rusak Sedang	%	5,84	1,85	3,51	3,51	11,02	58,78
Tingkat Rusak Berat	%	3,48	4,59	3,77	5,23	8,43	28,43
Tingkat Rusak Total	%	6,59	5,20	0	0	0	-30,27

Sumber: Data NPD Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2016-2020

Ketersediaan fasilitas pendidikan yang layak akan membantu dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar yang baik akan berdampak pada hasil pembelajaran yang baik. Dengan kondisi bangunan yang baik maka tentu saja akan membuat aktifitas belajar siswa menjadi tidak terganggu dan berjalan dengan baik. Persentase kondisi ruang kelas SD dengan kondisi baik tahun selama tahun 2016-2020 tumbuh sebesar -6,31% per tahun. Pada tahun 2020 ruang kelas dalam kondisi baik hanya sebanyak 260 ruang kelas dari 1.234 ruang kelas atau sekitar 21,07%. artinya semakin sedikit ruang kelas dalam kondisi baik dibandingkan tahun 2016 sebesar 32,49%.

Berdasarkan data kondisi ruang kelas SD/MI didominasi oleh ruang kelas dengan kondisi rusak ringan sebesar 59,48% pada tahun 2020. Oleh karena itu upaya melakukan perbaikan ruang kelas harus menjadi prioritas beberapa tahun kedepan. Namun demikian sejak tahun 2018-2020 tidak lagi terdapat ruang kelas dalam kondisi rusak total.

9) Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Ruang Kelas Baik

Berdasarkan data NPD Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2016-2020 dari menunjukkan bahwa persentase ruang kelas SMP dalam kondisi baik yang ada di Kota Dumai tahun selama tahun 2016-2020 berkisar antara 25,04% dengan tren perkembangan yang menurun -7,18% per tahun atau ruang kelas dalam kondisi baik tahun 2016 sebanyak 98 kelas kemudian berkurang menjadi 40 ruang kelas tahun 2020. Sementara itu jumlah ruang kelas dalam kondisi rusak ringan mengalami peningkatan sebesar 17,62% per tahun atau naik dari 191 ruang kelas tahun 2016 menjadi 324 ruang kelas tahun 2020. Kondisi ruang kelas SMP dari tahun 2016 -2020 didominasi oleh ruang kelas dengan kondisi rusak ringan sebesar 71,37% pada tahun 2020.

Oleh karena Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari para pengambil kebijakan di Kota Dumai karena dapat mempengaruhi kelancaran proses belajar dan mengajar sehingga akan mempengaruhi hasil belajar siswa di Kota Dumai. Mengingat pentingnya sarana prasarana dalam kegiatan pembelajaran, maka peserta didik, guru dan sekolah akan terkait secara langsung dalam hal penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana tersebut. Peserta didik akan lebih terbantu dengan dukungan sarana prasarana pendidikan. Hal ini dikarenakan tidak semua peserta didik mempunyai tingkat kecerdasan yang bagus sehingga penggunaan sarana prasarana pendidikan

akan membantu peserta didik, khususnya yang memiliki kelemahan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.

Oleh karena secara tidak langsung sarana prasarana sekolah yang memadai dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam berbagai mata pelajaran. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Cynthia & Megan (2008), yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara kualitas fasilitas sekolah dan prestasi siswa terutama dalam mata pelajaran eksakta. Perkembangan Kondisi Ruang Kelas SMP di Kota Dumai Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.52 berikut.

Tabel 2.52
Perkembangan Kondisi Ruang Kelas SMP di Kota Dumai
Tahun 2016-2020

Kondisi Ruang Kelas SD	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah Ruang Kelas	Unit	357	404	439	446	454	6,30
Baik	Unit	98	81	143	162	40	-0,71
Rusak Ringan	Unit	191	292	235	240	324	17,62
Rusak Sedang	Unit	20	17	51	33	72	66,97
Rusak Berat	Unit	15	7	10	11	18	15,79
Rusak Total	Unit	33	7	0	0	0	-44,70
Tingkat Baik	%	27,45	20,05	32,57	36,32	8,81	-7,18
Tingkat Rusak Ringan	%	53,50	72,28	53,53	53,81	71,37	10,58
Tingkat Rusak Sedang	%	5,60	4,21	11,62	7,40	15,86	57,31
Tingkat Rusak Berat	%	4,20	1,73	2,28	2,47	3,96	10,43
Tingkat Rusak Total	%	9	2	0	0	0	-45,31

Sumber: Data NPD Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2016-2020

10) Rasio Guru/Siswa SD/MI dan SMP/MTs

Angka rasio guru/siswa, merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Nilai ini mencerminkan berapa jumlah siswa yang harus diajar oleh seorang guru. Idealnya memang dalam satu kelas dan terdapat seorang guru, jumlah siswa yang berada di ruangan tersebut tidak boleh terlalu besar, karena akan menyulitkan siswa maupun guru tersebut.

Berdasarkan data *time series* dari Dumai Dalam Angka, pada tahun 2016-2020 menunjukkan terjadinya penurunan jumlah rasio atau perbaikan untuk jenjang Pendidikan SD dari 19,61 siswa per seorang guru menjadi 17,31 siswa per seorang guru tahun 2020 atau turun sebesar 2,20% per tahun. Demikian halnya dengan jenjang Pendidikan SMP mengalami penurunan sebesar -5,05% per tahun atau turun dari 17,98 siswa per seorang guru tahun 2016 menjadi 14,37 siswa per seorang guru tahun 2020.

Kondisi ini menggambarkan bahwa percepatan pertumbuhan penambahan guru lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah siswa setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2018 untuk jenjang Pendidikan SD, dimana jumlah siswa bertambah sementara jumlah mengalami pengurangan hanya 1.849 guru. Jelasnya lebih lanjut lihat Tabel 2.53 berikut.

Tabel 2.53
Perkembangan Rasio Guru terhadap Muird SD/MI dan SMP/MTs di Kota Dumai Tahun 2015-2020

Rasio Guru Terhadap Siswa SD-SMP	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah Siswa SD	Orang	37.788	38.035	38.315	38.148	38.416	0,41
Jumlah Guru SD	Orang	1.927	2.217	1.849	2.093	2.219	4,42
Rasio	Indek	19,61	17,16	20,72	18,23	17,31	-2,20
Jumlah Siswa SMP	Orang	12.260	13.145	13.272	13.274	13.480	2,44
Jumlah Guru SMP	Orang	682	742	881,00	820	938	8,75
Rasio	Indek	17,98	17,72	15,06	16,19	14,37	-5,05

Sumber: Neraca Pendidikan Kota Dumai Tahun 2016-2020

Meskipun rasio guru per siswa untuk jenjang SD selama periode 2016-2020 memenuhi angka ideal berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008. Namun demikian tetap perlu diantisipasi karena perkembangan daerah perkotaan banyak sekolah yang melaksanakan *double shift*.

Untuk jenjang SMP/MTs, rasio siswa guru dalam rentang waktu antara tahun 2016-2020 tren perkembangannya fluktuatif. Meskipun angka ideal rasio guru per siswa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 (1:20). Artinya selama tahun 2016-2020 rasio siswa per guru masih memenuhi SPM pendidikan tersebut. Namun demikian perlu diantisipasi terkait sebaran jumlah siswa terkonsentrasi pada sekolah-sekolah di daerah perkotaan, sehingga penyebaran siswa di daerah pinggiran menjadi sedikit. Oleh sebab itu perlu dilakukan peningkatan ketersediaan dan kualitas sekolah di daerah pinggiran.

Tabel 2.54
Rasio Guru terhadap Siswa Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun Tahun Ajaran 2020/2021

No	Kecamatan	Guru		Siswa		Rasio Guru/Siswa	
		SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP
1	Bukit Kapur	332	151	6.420	1.877	19,34	12,43
2	Medang Kampai	137	54	2.200	636	16,06	11,78
3	Sungai Sembilan	334	129	5.169	1.635	15,48	12,67
4	Dumai Barat	253	141	4.492	2.045	17,75	14,50
5	Dumai Selatan	323	178	5.698	2.942	17,64	16,53

6	Dumai Timur	614	198	10.346	2.983	16,85	15,07
7	Dumai Kota	226	87	4.091	1.362	18,10	15,66
Kota Dumai		2.219	938	38.416	13.480	17,31	14,37

Sumber: Kementerian Pendidikan Nasional, Neraca Pendidikan Kota Dumai Tahun 2020

Dari Tabel 2.54 tersebut juga dapat dilihat bahwa distribusi guru belum merata per Kecamatan sesuai dengan distribusi siswa. Di Kecamatan-Kecamatan yang dekat dengan perkotaan rata-rata jumlah guru per sekolah untuk jenjang SD dan SMP memiliki beban rasio yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kecamatan-Kecamatan yang jauh dari perkotaan. Misalnya jenjang pendidikan SD di Kecamatan Bukit Kapur rasio guru terhadap siswa sebanyak 19,34 siswa. Hal ini juga terjadi karena tingginya minat penduduk usia sekolah di Kota Dumai untuk bersekolah di sekolah-sekolah yang dekat dengan pusat kota.

11) Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV dan Bersertifikasi

Jumlah guru SD yang telah memenuhi kualifikasi S1/D-IV dalam rentang waktu 2016-2020 di Kota Dumai menunjukkan kenaikan sebesar 2,03% per tahun. Sementara persentase guru SD bersertifikasi tumbuh 2,81%. Sementara persentase guru SMP yang telah memenuhi kualifikasi S1/D-IV tumbuh sebesar 3,53%, dan Sementara persentase guru SMP bersertifikasi tumbuh -5,00%. Turunnya persentase guru SMP yang bersertifikasi disebabkan oleh pertambahan jumlah guru lebih tinggi sebesar 8,75% per tahun dibandingkan dengan pertambahan jumlah guru bersertifikasi hanya 2,42% per tahun. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.55 berikut.

Tabel 2.55
Perkembangan Jumlah Guru Berkualifikasi S1/D4 dan Bersertifikasi Kota Dumai Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah Guru SD	Orang	1.927	2.217	1.849	2.093	2.219	4,42
Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	86,40	79,50	90,20	90,70	92,60	2,03
Guru SD Bersertifikasi	Orang	1.575	1.611	1.633	1.113	1.343	-1,88
Persentase Guru SD Sertifikasi	%	54,65	54,65	51,90	53,20	60,53	2,81
Jumlah Guru SMP	Orang	682	742	881	820	938	8,75
Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	83,10	88,80	90,30	91,80	95,40	3,53
Guru SMP Bersertifikasi	Orang	409	445	434	436	449	2,42
Persentase Guru SMP Sertifikasi	%	60,00	60,00	49,30	53,20	47,85	-5,00

Sumber: Data NPD Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2016-2019 dan 2020 Angka Estimasi Tim.

Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV berarti pengetahuan, pemahaman dan informasi yang diperoleh semakin terbuka luas, sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong untuk meningkatkan kualitas mengajar dan mendidik para guru. Peningkatan kualitas mengajar dan mendidik para guru diharapkan akan meningkatkan kualitas anak didik atau siswa serta lulusan, serta mempersiapkan siswa untuk semakin membuka wawasan pengetahuan yang lebih luas di era globalisasi ini.

2.4.1.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Sementara itu bidang kesehatan merupakan unsur lain yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia masyarakat secara umum selain faktor kkuualias pendidikan adalah faktor kualitas kesehatan masyarakat. Terdapat beberapa indikator yang menggambarkan ukuran dari kualitas kesehatan masyarakat. Indikator tersebut adalah Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran, Angka Kematian Balita, Angka Usia Harapan Hidup, Persentase Balita Gizi Buruk.

1) Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran

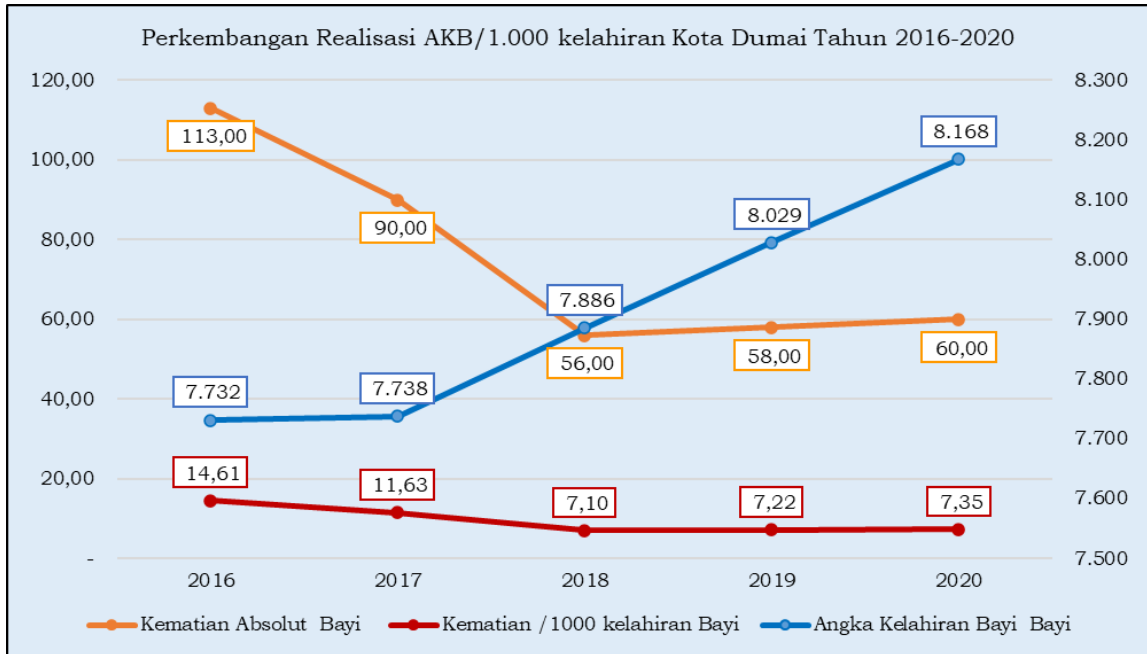
Kematian prenatal merupakan kematian bayi dengan umur kehamilan lebih dari 22 minggu yang lahir dalam keadaan meninggal dalam masa tujuh hari setelah persalinan. Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Selama tahun 2016-2020 realisasi capaian Angka Kematian Bayi sebanyak 14,61 bayi per 1.000 kelahiran hidup tahun 2016 kemudian menurun menjadi 7,35 bayi per 1.000 kelahiran hidup tahun 2020. Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Perkembangan Angka Kematian Bayi 1.000 kelahiran hidup di Kota Dumai dari tahun 2016-2020 pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56
Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran
Kota Dumai Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Angka Kelahiran Bayi	Bayi	7.732	7.738	7.886	8.029	8.168	1,38
2	Kematian Absolut	Bayi	113,00	90,00	56,00	58,00	60,00	-12,78
3	Kematian /1000 kelahiran	Bayi	14,61	11,63	7,10	7,22	7,35	-13,99

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2021

Perkembangan tren Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran hidup di Kota Dumai menunjukkan perbaikan dengan penurunan sebesar -13,99% per tahun, walaupun jumlah kelahiran bayi meningkat dengan pertumbuhan sebesar 1,38% per tahun atau bertambah dari 7.732 bayi tahun 2016 menjadi 8.168 bayi tahun 2020. Perkembangan trend Angka Kematian Bayi 1.000 kelahiran hidup di Kota Dumai dari tahun 2016-2020 pada Gambar 2.25 berikut.



Gambar 2.25: Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2016-2020

Angka Kematian bayi Kecamatan dari tahun 2016-2020 fluktuatif. Angka kematian tertinggi setiap tahunnya terdapat di Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Sungai Sembilan. Rata angka kematian bayi per tahunnya di Kecamatan Medang Kampai sebanyak 14,08/1000 KH dan Kecamatan Sungai Sembilan sebesar 11,67/1000 KH.

Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Penyebab kematian pada bayi umumnya didominasi oleh kasus Asfiksia, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Kelainan bawaan. Banyak faktor yang dapat menyebabkan kenaikan angka kematian bayi antara lain faktor ekonomi, terlambat pertolongan, pengetahuan orang tua masih relatif kurang.

Faktor ekonomi orang tua yang rendah seringkali membuat ibu tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup saat mengandung, sehingga bayi mengalami Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) saat lahir. Pengetahuan dan kesadaran orang tua yang masih rendah, antara lain mengenai pentingnya

asupan gizi yang cukup saat kehamilan, pemeriksaan kehamilan secara rutin ke dokter dan lain-lain juga menjadi salah satu penyebab resiko kematian bayi waktu lahir.

Penyebab kematian bayi juga dapat dikarenakan adanya kelainan bawaan, asfiksia (sesak napas pada saat lahir) dan juga kehamilan dengan resiko tinggi akibat usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua. Angka kematian bayi tahun 2016-2020 per Kecamatan Kota Dumai dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.57
Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Menurut
Kecamatan Kota Dumai Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Angka Kematian Bayi (/1000 Kelahiran Hidup)										Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2016		2017		2018		2019		2020		
		Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	
1	Dumai Kota	17,00	12,51	11,00	8,90	7,00	5,84	7,00	5,74	8,00	6,44	-13,19
2	Dumai Timur	19,00	10,63	14,00	8,40	16,00	9,27	11,00	6,26	8,00	4,48	-17,88
3	Dumai Selatan	26,00	18,48	17,00	12,19	4,00	2,98	7,00	5,12	10,00	7,19	0,66
4	Dumai Barat	8,00	7,25	16,00	14,53	3,00	2,72	7,00	6,24	10,00	8,76	47,23
5	Bukit Kapur	20,00	15,80	16,00	14,37	12,00	9,77	13,00	10,40	10,00	7,87	-14,74
6	Sungai Sembilan	16,00	16,63	12,00	14,18	6,00	6,49	9,00	9,56	11,00	11,48	-0,39
7	Medang Kampai	7,00	20,11	3,00	9,68	8,00	21,92	4,00	10,75	3,00	7,94	-0,63
	Kota Dumai	113,00	14,61	90,00	11,63	56,00	7,10	58,00	7,22	60,00	7,35	-12,69

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2021

Usaha untuk mendukung upaya penurunan kematian bayi antara lain adalah meningkatkan kebersihan (hygiene) dan sanitasi di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat melalui penyediaan air bersih, meningkatkan perilaku hidup sehat, serta kepedulian terhadap kelangsungan dan perkembangan dini anak; pemberantasan penyakit menular, meningkatkan cakupan imunisasi dan, meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi termasuk pelayanan kontrasepsi dan ibu, menanggulangi gizi buruk, kurang energi kronik dan anemi, serta promosi pemberian ASI eksklusif dan pemantauan pertumbuhan bayi.

2) Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak umur kurang dari 5 tahun per 1.000 penduduk. Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi. Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Dumai dari tahun 2016-2020 menunjukkan kecenderungan penurunan, dari 16,88/1000

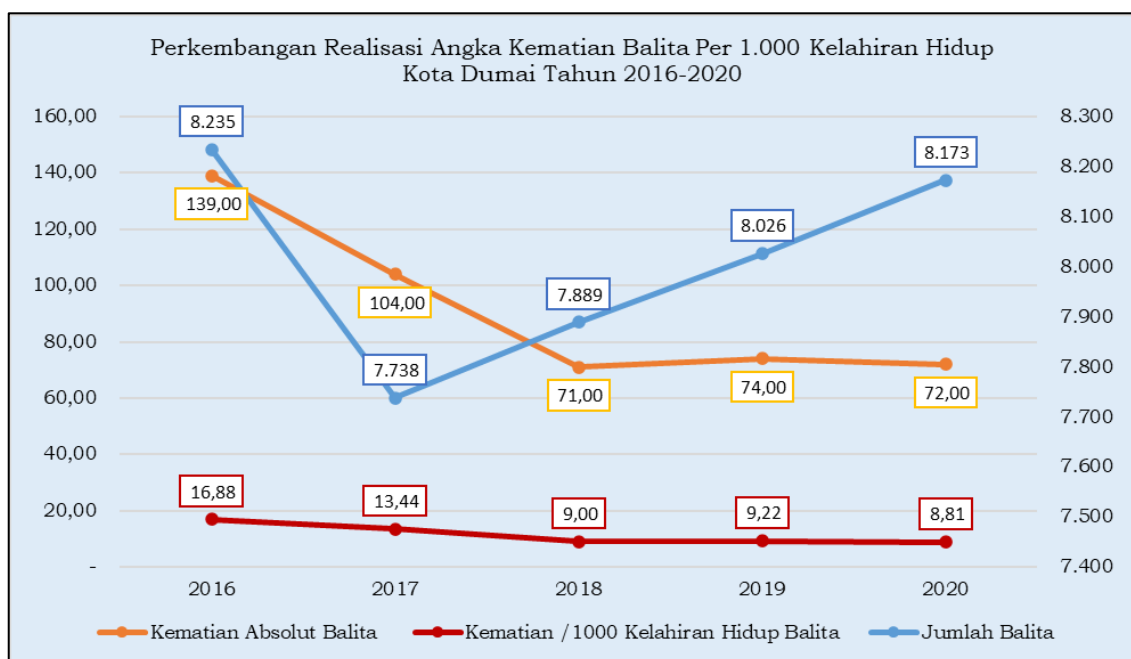
kelahiran hidup tahun 2016 menjadi 8,81/1000 kelahiran hidup bayi di tahun 2020. Perkembangan Perkembangan Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2016-2020, lihat Tabel 2.58.

Tabel 2.58
Perkembangan Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah	Balita	8.235	7.738	7.889	8.026	8.173	-0,13
2	Kematian Absolut	Balita	139,00	104,00	71,00	74,00	72,00	-13,85
3	Kematian /1000 Kelahiran Hidup	Balita	16,88	13,44	9,00	9,22	8,81	-13,85

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2021

Perkembangan tren Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup Kota Dumai menunjukkan perbaikan dengan penurunan sebesar -13,85% per tahun, seiring dengan jumlah balita berkurang dengan pertumbuhan sebesar -0,13% per tahun atau berkurang dari 8.235 balita tahun 2016 menjadi 8.173 balita tahun 2020. Perkembangan trend Angka Kematian Balita 1.000 kelahiran hidup di Kota Dumai dari tahun 2016-2020 pada Gambar 2.26 berikut.



Gambar 2.26: Perkembangan Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2016-2020

Sementara itu Angka Kematian balita per Kecamatan di Kota Dumai dari selama tahun 2016-2020 fluktuatif. Angka kematian tertinggi setiap tahunnya terdapat di wilayah Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Sungai

Sembilan. Rata angka kematian balita per tahunnya di Kecamatan Medang Kampai sebesar 17,45/1000 KH dengan pertumbuhan 4,75% per tahun dan Kecamatan Sungai Sembilan sebesar 15/1000 KH dengan pertumbuhan - 1,08% per tahun. Namun di Kecamatan Dumai Selatan merupakan wilayah dengan pertumbuhan tertinggi angka kematian balita per 1.000 balita sebesar 24,16% per tahun. Usaha untuk mendukung upaya penurunan kematian balita antara lain adalah meningkatkan kebersihan (hygiene) dan sanitasi di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat melalui penyediaan air bersih, meningkatkan perilaku hidup sehat, serta kepedulian terhadap kelangsungan dan perkembangan dini anak; pemberantasan penyakit menular, meningkatkan cakupan imunisasi dan, meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi termasuk pelayanan kontrasepsi dan ibu, menanggulangi gizi buruk, kurang energi kronik dan anemi, serta promosi pemberian ASI eksklusif dan pemantauan pertumbuhan balita. Perkembangan Angka kematian balita tahun 2016-2020 per Kecamatan Kota Dumai dapat dilihat pada Table 2.57 berikut.

Tabel 2.59
Perkembangan Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Angka Kematian Balita Per1000 Kelahiran Hidup										Pertumbuhan / Tahun (%)
		2016		2017		2018		2019		2020		
		Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	
1	Dumai Kota	19,00	13,98	12,00	9,71	7,00	5,84	7,00	5,74	9,00	7,25	-11,45
2	Dumai Timur	24,00	13,42	15,00	9,00	18,00	10,43	13,00	7,39	10,00	5,60	-17,60
3	Dumai Selatan	32,00	22,74	19,00	13,62	4,00	2,98	7,00	5,12	12,00	8,62	5,49
4	Dumai Barat	11,00	9,97	16,00	14,53	6,00	5,45	14,00	12,49	12,00	10,52	24,16
5	Bukit Kapur	28,00	22,12	20,00	16,90	15,00	12,21	17,00	13,60	13,00	10,23	-16,19
6	Sungai Sembilan	18,00	18,71	18,00	21,28	9,00	9,73	11,00	11,69	13,00	13,57	-1,08
7	Medang Kampai	7,00	20,11	4,00	12,90	12,00	32,88	5,00	13,44	3,00	7,94	4,75
	Kota Dumai	139,00	16,88	104,00	13,44	71,00	9,00	74,00	9,22	72,00	8,81	-13,85

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2021

3) Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan maupun

penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan, per 100.000 kelahiran hidup. AKI diperhitungkan pula pada jangka waktu 6 minggu hingga setahun setelah melahirkan. Indikator ini secara langsung digunakan untuk memantau kematian terkait dengan kehamilan.

AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan ibu dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Hal tersebut disebabkan antara lain kurangnya pemahaman ibu hamil tentang resiko yang terkait dengan kehamilan seperti 4 Terlalu (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Sering dan dan jarak Terlalu Dekat) dan juga 3 Terlambat (Terlambat mengambil keputusan di tingkat keluarga, terlambat merujuk, dan terlambat mendapat pelayanan di fasilitas rujukan). Penyebab langsung kematian ibu antara lain: *eklampsi*, pendarahan, *partus macet*, infeksi, *abortus* dan lain-lain. Penyebab tidak langsung antara lain: penyakit infeksi seperti malaria, *thypoid* serta penyakit kronis seperti penyakit jantung, penyakit gula dan penyakit lainnya.

Angka kematian ibu melahirkan berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kondisi ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. Meningkatnya angka kematian ibu ini disebabkan oleh tingginya mobilitas warga pendatang dari luar Kota Dumai. Warga pendatang ini pada umumnya masih kurang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan jarang mau datang ke sarana kesehatan (posyandu, poskeskel dan puskesmas) untuk memeriksakan kesehatannya. Penyebab kematian ibu pada umumnya karena perdarahan dan eklampsi atau pre eklampsi. Perkembangan Angka Kematian Ibu dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.60 berikut:

Tabel 2.60
Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Dumai Tahun 2016-2020

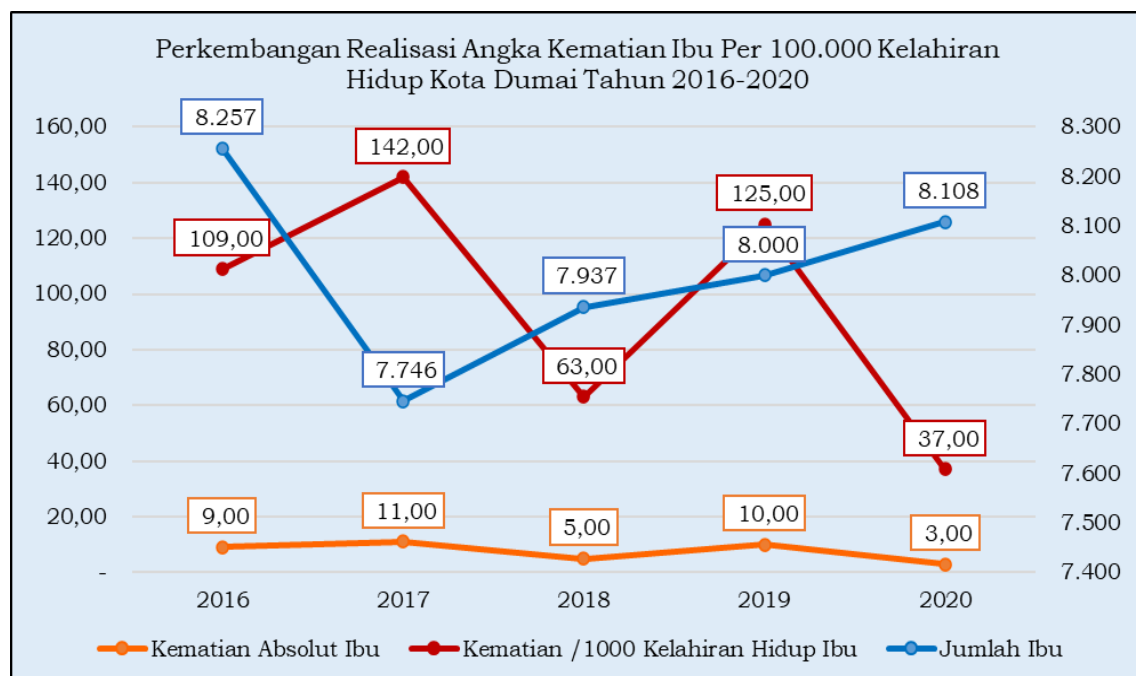
No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah	Ibu	8.257	7.746	7.937	8.000	8.108	-0,39
2	Kematian Absolut	Ibu	9,00	11,00	5,00	10,00	3,00	-0,58
3	Kematian ibu /100.000 KH	Ibu	109,00	142,00	63,00	125,00	37,00	-0,66

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2021

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu menggambarkan tingkat permasalahan

kesehatan ibu dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan ibu balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi. Perkembangan Angka Kematian ibu di Kota Dumai dari tahun 2016-2020 menunjukkan kecenderungan penurunan dari 109/100.000 kelahiran hidup tahun 2016 menjadi 37/100.000 kelahiran hidup bayi di tahun 2020.

Perkembangan tren Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran hidup Kota Dumai menunjukkan perbaikan dengan penurunan sebesar -0,66% per tahun, seiring dengan jumlah ibu melahirkan berkurang dengan pertumbuhan sebesar -0,39% per tahun atau berkurang dari 8.257 ibu tahun 2016 menjadi 8.108 ibu tahun 2020. Perkembangan trend Angka Kematian ibu 100.000 kelahiran hidup di Kota Dumai dari tahun 2016-2020 pada Gambar 2.27 berikut.



Gambar 2.27: Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2016-2020

Dari data angka kematian ibu menurut Kecamatan dari tujuh Kecamatan terdapat tiga Kecamatan yaitu Dumai Kota, Bukit Kapur dan Medang Kampai dan terbanyak di Kecamatan Medang Kampai sebesar 265 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini terjadi karena kurangnya kompetensi tenaga bidan dan perilaku ibu hamil dalam pemeriksaan kehamilan. Kriteria pencatatan data kematian ibu dan bayi di beberapa unit pelayanan kesehatan kadang berbeda-beda, seperti KTP ibu yang merupakan penduduk luar Kota Dumai atau KTP orang tua bayi yang masih Kota Dumai walaupun sudah lama pindah ke luar Kota Dumai ikut tercatat dalam registrasi salah satu penyumbang angka kematian di Kota Dumai.

Tabel 2.61
Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup										Pertumbuhan / Tahun (%)
		2016		2017		2018		2019		2020		
		Absolut	/100.000 KH	Absolut	/100.000 KH	Absolut	/100.000 KH	Absolut	/100.000 KH	Absolut	/100.000 KH	
1	Dumai Kota	1,00	74	2,00	162	-	-	1,00	82	1,00	81	4,54
2	Dumai Timur	5,00	280	1,00	60	1,00	58	4,00	228	-	-	27,68
3	Dumai Selatan	1,00	94	2,00	143	-	-	1,00	73	-	-	-36,86
4	Dumai Barat	0,00	-	3,00	272	1,00	91	1,00	89	-	-	-42,11
5	Bukit Kapur	1,00	169	2,00	169	2,00	163	-	-	1,00	79	-25,89
6	Sungai Sembilan	1,00	104	1,00	118	-	-	2,00	213	-	-	-46,57
7	Medang Kampai	0,00	-	-	-	1,00	274	1,00	269	1,00	265	-0,87
	Kota Dumai	9,00	109	11,00	142	5,00	63	10,00	125	3,00	37	0,14

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2021

4) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Pada tahun 2016-2020 jumlah rumah sakit yang ada di Kota Dumai sebanyak 3 rumah sakit yang terdiri dari 1 rumah sakit milik pemerintah Kota Dumai tipe B yakni RSUD Kota Dumai, 1 rumah sakit milik BUMN tipe D yakni RS Pertamina dan 1 rumah sakit milik TNI/POLRI yakni RS Bhayangkara yang mulai operasional sejak tahun 2007 (Rumah Sakit Pelabuhan sejak tahun 2007 sudah tidak operasional lagi dan berubah status menjadi Balai Pengobatan). Rasio cakupan pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kota Dumai tahun 2016-2020 tersaji pada Tabel 2.62

Dapat dilihat bahwa rasio cakupan pelayanan rumah sakit tahun 2016 adalah sebesar 0,01 turun menjadi 0,001 pada tahun 2020. Data-data tersebut mengindikasikan bahwa terjadi penurunan rasio cakupan pelayanan rumah sakit dari tahun 2016-2020. Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah penduduk yang harus dilayani tapi tidak diiringi oleh penambahan pembangunan rumah sakit. Pada tahun 2020, per 1.000 jumlah penduduk Kota Dumai hanya sebanyak 0,001 yang dapat dilayani oleh rumah sakit.

Tabel 2.62
Rasio Cakupan Pelayanan Rumah Sakit di Kota Dumai per 1.000
Penduduk Tahun 2011-2020

Indikator	Satuan	Tahun										Pertumbuhan / Tahun (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah Rumah Sakit	Unit	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0,00
Jumlah Penduduk	Jiwa	259.913	268.022	274.089	280.109	285.967	291.908	297.638	303.292	308.812	316.782	2,22
Rasio Pelayanan Cakupan Rumah Sakit per 1.000 penduduk	Indek	0,012	0,011	0,011	0,011	0,01	0,01	0,01	0,009	0,009	0,001	-12,99

Sumber: Dinas Kesehatan dan Kota Dumai Dalam Angka, 2020 diolah

5) Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Keberhasilan pelayanan kesehatan di Kota Dumai tidak terlepas dari peran tenaga medis dokter baik dokter spesialis, dokter umum maupun dokter gigi. Jumlah dokter di Kota Dumai selama periode tahun 2011-2020 mengalami perkembangan fluktuasi, dari 106 dokter pada tahun 2011 menjadi 175 dokter pada tahun 2019 kemudian berkurang menjadi 138 dokter tahun 2020.

Tabel 2.63
Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kota Dumai
Tahun 2011-2020

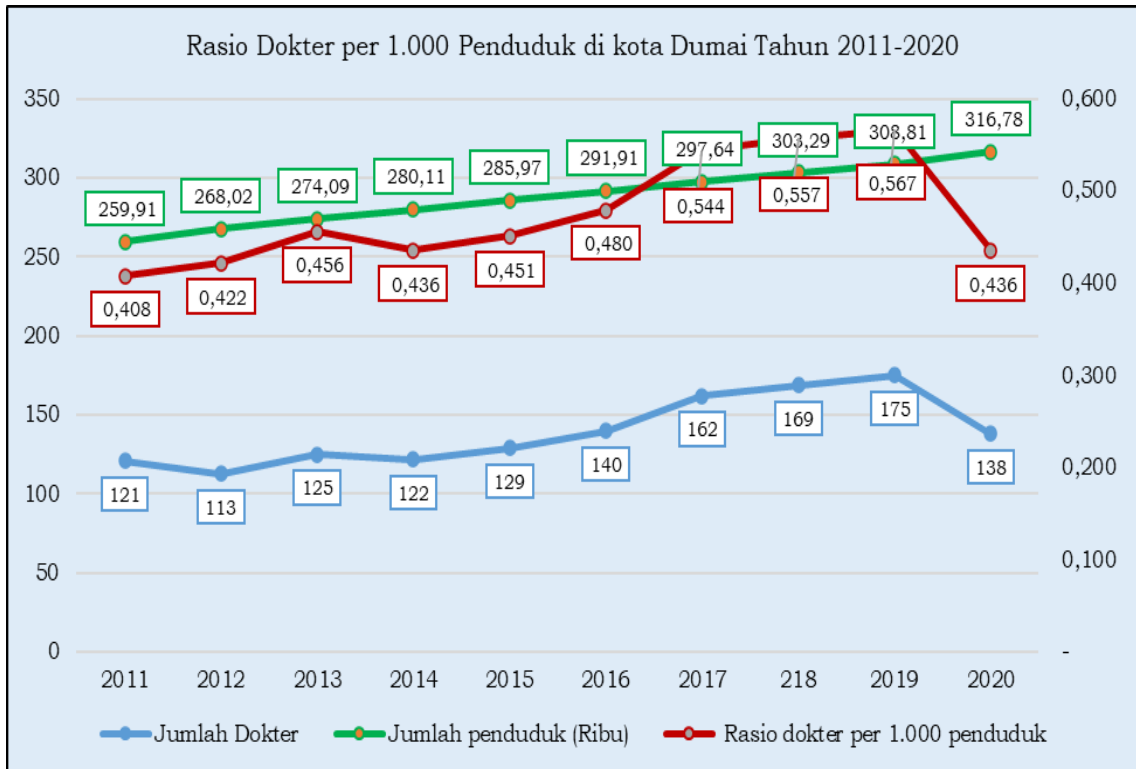
Indikator	Satuan	Tahun										Pertumbuhan / Tahun (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah Dokter	Unit	106	113	125	122	129	140	162	169	175	138	3,50
Jumlah penduduk	Jiwa	259.913	268.022	274.089	280.109	285.967	291.908	297.638	303.292	308.812	316.782	2,22
Rasio dokter per 1.000 penduduk	Indek	0,408	0,422	0,456	0,436	0,451	0,480	0,544	0,557	0,567	0,436	1,26

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2012-2021

Rasio dokter per satuan penduduk pada tahun 2020 adalah sebesar 0,436 yang artinya bahwa setiap 1.000 orang penduduk dilayani oleh 0,436 dokter. Dengan kata lain 1 orang dokter melayani 2.296 penduduk. Jumlah dokter di Kota Dumai mengalami perkembangan fluktuasi, ini disebabkan antara lain karena terdapat perbedaan pendataan di masing-masing unit pelayanan kesehatan.

Hal ini dimungkinkan karena tidak adanya kriteria pendataan dokter praktek di rumah maupun di pusat pelayanan kesehatan, baik meliputi nama maupun alamatnya, sehingga dapat terjadi perhitungan ganda pada saat pendataan. Selain itu adanya pembatasan jumlah praktek tiap dokter menjadi maksimal tiga tempat menyebabkan data jumlah dokter mengalami penurunan. Selain itu penambahan jumlah dokter lebih lambat dibandingkan dengan penambahan jumlah penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk Kota

Dumai, tidak dimbangi dengan pertambahan jumlah dokter sehingga yang melayani tidak seimbang dengan pertambahan jumlah penduduk. Namun demikian masuk masuk kategori yang ditetapkan WHO bahwa seorang dokter maksimal melayani 2.500 penduduk per dokter.



Gambar 2.28: Perkembangan Rasio Dokter Per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2020

6) Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk

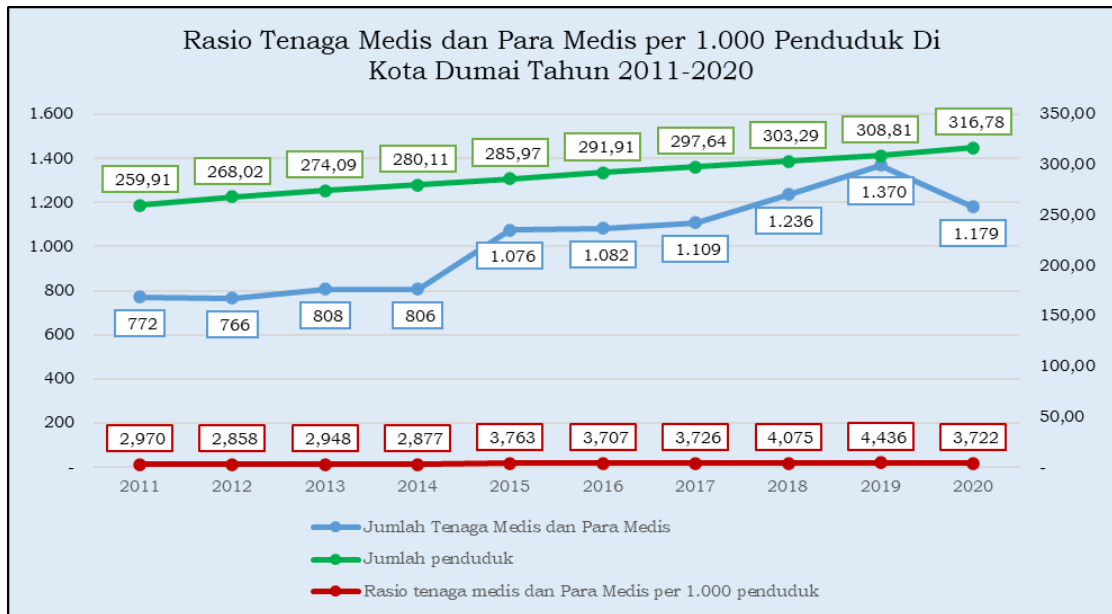
Tenaga medis dan para medis di Kota Dumai meliputi para dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, perawat dan bidan. Peran tenaga medis di mata masyarakat dan dunia sangatlah penting. Tenaga medis memiliki peran sebagai garda terdepan dalam penanganan Kesehatan masyarakat. Hasil pendataan rasio tenaga medis per 1.000 orang penduduk Kota Dumai tahun 2011-2020, menunjukkan peningkatan dari 2,970 tahun 2011 menjadi 3,722 tahun 2020, lihat Tabel 2.64

Tabel 2.64
Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2020

Indikator	Satuan	Tahun										Pertumbuhan / Tahun (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah Tenaga Kesehatan	Unit	772	766	808	806	1.076	1.082	1.109	1.236	1.370	1.179	5,48
Jumlah Tenaga Medis		121	113	125	122	129	140	162	169	175	138	2,04
Jumlah Tenaga Para Medis		651	653	683	684	947	942	947	1.067	1.195	1.041	6,14
Jumlah penduduk	Jiwa	259.913	268.022	274.089	280.109	285.967	291.908	297.638	303.292	308.812	316.782	2,22
Rasio tenaga medis per 1.000 penduduk	Indek	2,970	2,858	2,948	2,877	3,763	3,707	3,726	4,075	4,436	3,722	3,21

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2012-2021

Jika dilihat trend ketersediaan tenaga medis dan para medis menunjukkan terjadinya peningkatan kapasitas dimana pada tahun 2011 seorang tenaga medis dan para medis melayani sebanyak 337 jiwa penduduk kemudian mengalami perbaikan menjadi 269 jiwa penduduk per seorang tenaga medis dan para medis tahun 2020. Perkembangan rasio layanan tenaga Kesehatan pada penduduk Kota Dumai tahun 2011-2020 lihat Gambar 2.29.



Gambar 2.29: Perkembangan Rasio Tenaga Medis dan Para Medis Per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2020

Salah satu penyebab meningkatnya Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita dan Angka Kematian Ibu adalah terbatasnya tenaga kesehatan yang ada di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai khususnya tenaga medis yakni tenaga dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis baik di puskesmas maupun di RSUD Kota Dumai. Pada umumnya kasus kematian bayi, kematian balita dan kematian ibu merupakan kasus kematian dengan rujukan ke rumah sakit.

Dengan ditetapkannya RSUD Kota Dumai menjadi rumah sakit rujukan regional oleh Pemerintah Pusat, maka pasien yang berobat ke RSUD Kota Dumai tidak hanya pasien dari Kota Dumai namun juga pasien dari Kabupaten lain seperti dari Bengkalis dan Rokan Hilir. Pada tahun 2016 total tenaga medis yang ada di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai (RSUD Kota Dumai dan Puskesmas se Kota Dumai) sebanyak 1.097 orang yang terdiri dari dokter spesialis sebanyak 30 orang, dokter umum sebanyak 87 orang dan dokter gigi sebanyak 23 orang, namun pada tahun 2020 jumlah tenaga medis ini bertambah sebanyak 49 orang dokter spesialis, 89 orang dokter umum dan

26 orang dokter gigi. Dengan demikian pada tahun 2020 rasio dokter spesialis sebesar 15 per 100.000 penduduk, rasio dokter umum sebesar 28 per 100.000 penduduk dan rasio dokter gigi sebesar 8 per 100.000 penduduk.

Tabel 2.65
Jumlah Tenaga Medis di Sarana Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Kota Dumai 2016-2020

Uraian Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Medis					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Dokter Spesialis	30	36	32	39	49	14,10
Dokter Umum	87	72	80	100	89	1,97
Dokter Gigi	23	23	21	22	26	3,56
Perawat	425	435	485	565	532	6,13
Bidan	314	331	336	536	415	10,97
Apoteker	41	38	21	65	63	38,60
Asisten Apoteker	17	19	37	-	-	53,25
Gizi	25	25	25	29	31	5,72
Sanitasi	10	10	9	-	-	-36,67
Kesehatan Masyarakat	44	52	67	-	-	-17,66
Teknisi Medis	81	68	67	-	-	-39,17

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2019 dan Kota Dumai Angka 2020-2021

Jika dilihat rasio tenaga medis (dokter) dan paramedis menurut Kecamatan menunjukkan bahwa terdapat hanya tiga Kecamatan yang tidak melebihi standar WHO yaitu 2.500 penduduk per seorang dokter yaitu Kecamatan Dumai Selatan 2.030 penduduk dan Dumai Timur 907 penduduk, selebihnya mengalami kelebihan bahkan di Kecamatan Sungai Sembilan seorang dokter harus melayani penduduk sebanyak 8.346 penduduk atau lebih dari tiga kali lipat dari standart WHO, jelasnya lihat Tabel 2.66 berikut.

Tabel 2.66
Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2020

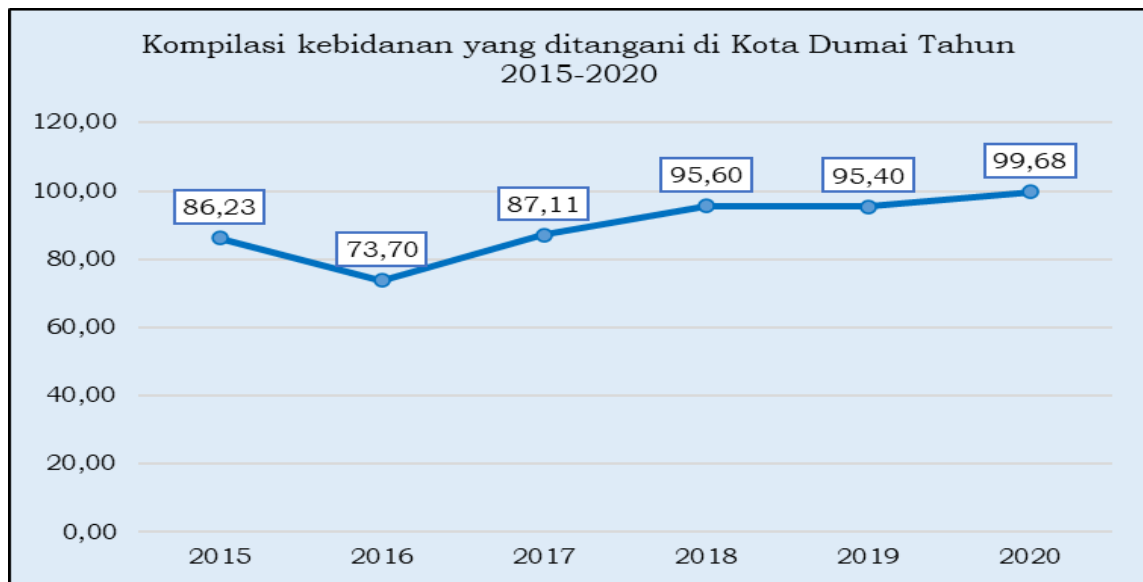
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Rasio Dokter dan Para Medis Terhadap Penduduk						
			Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi	Rasio JP/Penduduk	Rasio Tenaga Kesehatan/Penduduk
1	Bukit Kapur	51.564	9	39	55	3	4	5.729	511
2	Medang Kampai	16.794	5	13	25	1	1	3.359	420
3	Sungai Sembilan	41.738	5	26	45	2	1	8.348	564
4	Dumai Barat	44.292	9	29	58	4	4	4.921	466
5	Dumai Selatan	52.791	26	68	44	7	4	2.030	429
6	Dumai Timur	68.930	76	336	160	44	15	907	124
7	Dumai Kota	40.673	8	21	28	2	2	5.084	767
	Kota Dumai	316.782	138	532	415	63	31	2.296	304

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2021 dan Kota Dumai Angka, 2021

7) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSUD, RSUD PONEK).

Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani adalah Ibu hamil dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas perawatan dan rumah sakit pemerintah/swasta dengan fasilitas PONED dan PONEK (pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar dan pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi komprehensif). Kasus komplikasi kebidanan yang terjadi di Kota Dumai pada tahun 2015-2020 dengan pertumbuhan sebesar 3,54% per tahun atau telah mencapai target indikator kinerja tahun 2020 dengan cakupan 99,68%.



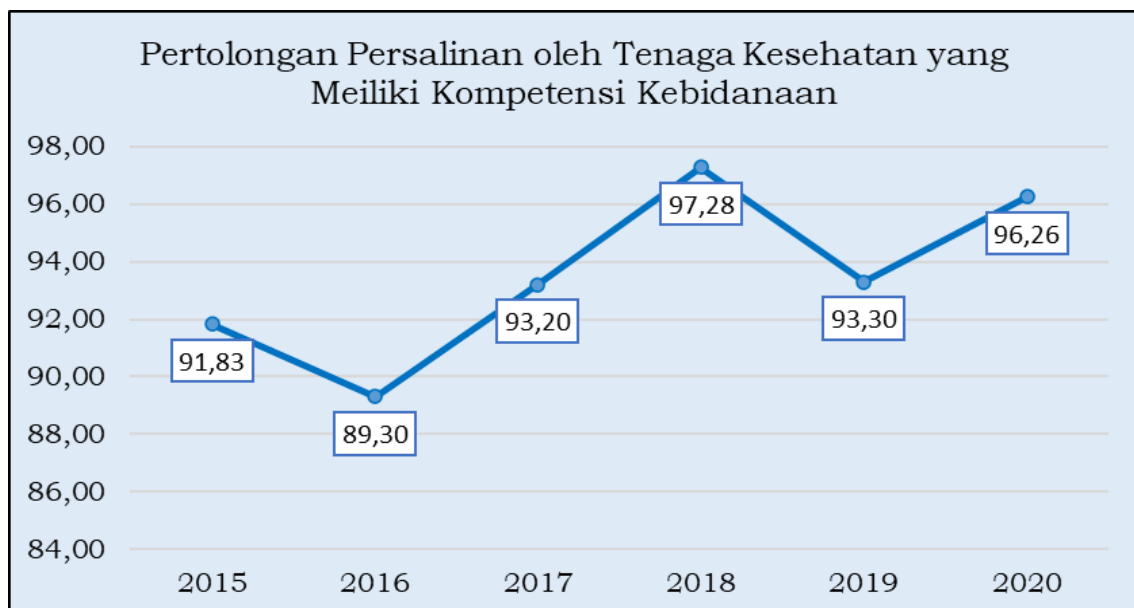
Gambar 2.30: Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di RS Kota Dumai 2015-2020

8) Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Kesehatan balita tidak hanya dipengaruhi oleh kesehatan ibu namun dipengaruhi pula oleh faktor yang lain, diantaranya adalah proses kelahiran/persalinan. Data penolong kelahiran merupakan salah satu indikator kesehatan terutama yang berhubungan dengan tingkat kesehatan ibu dan anak maupun pelayanan kesehatan secara umum. Persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter atau bidan dianggap lebih baik

daripada yang ditolong dukun atau lainnya karena dapat menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan kesehatan, terutama pada saat kelahiran.

Proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih atau cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan adalah perbandingan antara persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya dengan jumlah persalinan seluruhnya, dinyatakan dalam persentase. Mengukur kematian ibu secara akurat adalah sulit, kecuali tersedia data registrasi yang sempurna tentang kematian dan penyebab kematian. Oleh karena itu sebagai proksi indikator digunakan proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih. Dari data cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, selama tahun 2015-2020 cenderung meningkat dengan pertumbuhan sebesar 1,01% per tahun. Berikut ini perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai.



Gambar 2.31: Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanaan di Kota Dumai Tahun 2015-2020

Gambar 2.31 menunjukkan bahwa cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai cenderung naik dari tahun 2015-2020. Pada tahun 2020 angka cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sebesar 96,26%.

Jika dibandingkan dengan target indikator Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai yang menargetkan cakupan sebesar 90%, maka cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai pada tahun 2015-2020 telah melebihi target nasional. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya penduduk yang memilih tenaga

kesehatan sebagai penolong kelahiran utama karena semakin meningkatnya kemampuan penduduk untuk mengakses fasilitas kesehatan.

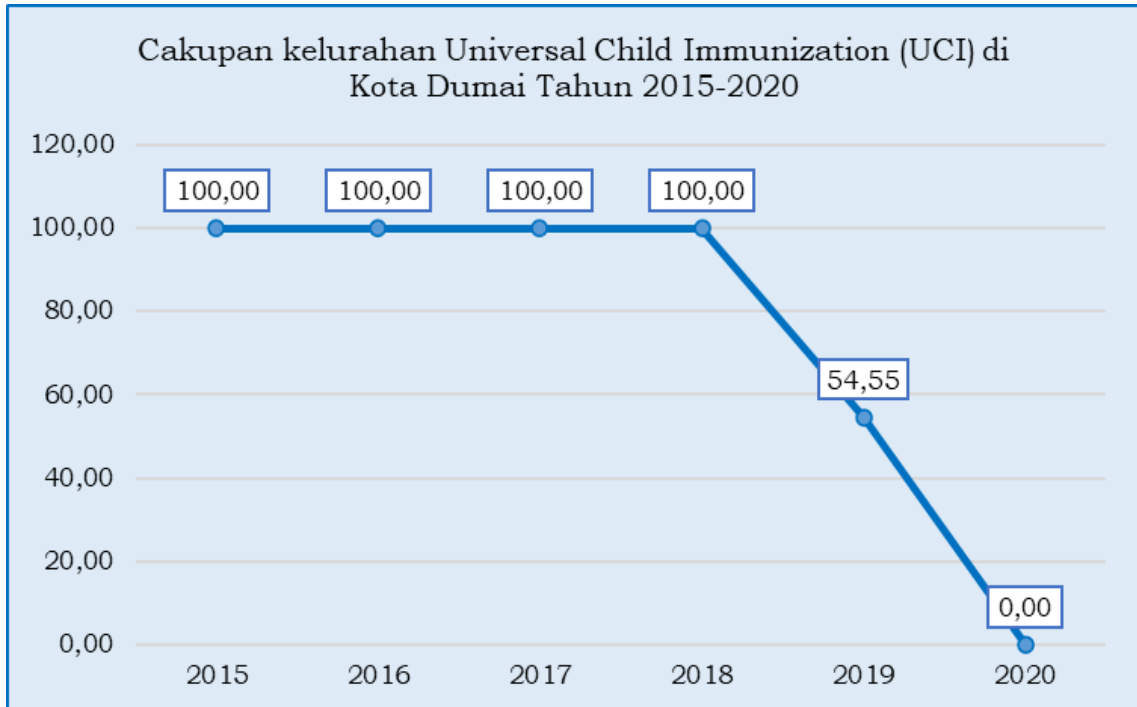
9) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Untuk cakupan kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kota Dumai menunjukkan bahwa masyarakat Kota Dumai telah mendapatkan pelayanan imunisasi baik melalui Posyandu, Puskesmas maupun Rumah Sakit. Keberhasilan upaya imunisasi akan dapat meningkatkan kualitas anak bangsa sebagai penerus perjuangan dimasa mendatang.

Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT/Hib, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak rubella. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis TT. Untuk anak sekolah tingkat dasar meliputi kelas 1 SD sederajat diberikan vaksinasi 1 DT dan campak rubella (MR), kelas 2 dan 5 Sd sederajat diberikan diberikan vaksinasi Td.

Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis Td. Untuk anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis Td.

Kementerian Kesehatan menargetkan pada tahun 2019 seluruh desa/kelurahan mencapai 100% UCI (*Universal Child Immunization*) atau 90% dari seluruh bayi di desa/kelurahan tersebut memperoleh imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari BCG, Hepatitis B, DPT-Hib, Polio dan campak. Imunisasi memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan *Human Development Index* terkait dengan angka umur harapan hidup karena dapat menghindari kematian yang tidak diinginkan. Keberhasilan upaya imunisasi akan dapat meningkatkan kualitas anak bangsa sebagai penerus perjuangan dimasa mendatang. Berikut ini perkembangan cakupan kelurahan UCI di Kota Dumai. Berikut ini gambar cakupan desa/kelurahan UCI di Kota Dumai tahun 2015-2020



Gambar 2.32: Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Dumai Tahun 2010-2020

Selama tahun 2015-2020, cakupan kelurahan UCI mengalami penurunan. Target UCI yang diharapkan sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai adalah 100% kelurahan mencapai UCI. Hal ini disebabkan karena Pandemi Covid 19 tahun 2020, dimana Posyandu balita tidak berjalan, sehingga cakupan kelurahan UCI tidak tercapai. Target UCI yang diharapkan sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai adalah 100% kelurahan mencapai UCI.

Kementerian Kesehatan menetapkan imunisasi sebagai upaya nyata pemerintah untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya untuk menurunkan angka kematian anak. Indikator keberhasilan pelaksanaan imunisasi diukur dengan pencapaian UCI desa/kelurahan, yaitu minimal 80% bayi didesa/kelurahan telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Imunisasi dasar sangat penting diberikan sewaktu bayi (usia 0 – 11 bulan) untuk memberikan kekebalan dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Tanpa imunisasi anak-anak mudah terserang berbagai penyakit, kecacatan dan kematian. GAIN UCI akan dilaksanakan secara bertahap mulai, dengan sasaran seluruh bayi usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi dasar lengkap yaitu BCG, Hepatitis B, DPT-HB Hib, Polio dan campak/MR.

Tabel 2.67
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Menurut Kecamatan di Kota Dumai 2016-2020

No	Kecamatan	Cakupan UCI (%)									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Absolut	% Kelurahan	Absolut	% Kelurahan	Absolut	% Kelurahan	Absolut	% Kelurahan	Absolut	% Kelurahan
1	Dumai Kota	5	100	5	100	5	100	5	100	0	0
2	Dumai Timur	5	100	5	100	5	100	5	100	0	0
3	Dumai selatan	5	100	5	100	5	100	1	20	0	0
4	Dumai Barat	4	100	4	100	4	100	0	0	0	0
5	Bukit Kapur	5	100	5	100	5	100	3	60	0	0
6	Sungai Sembilan	5	100	5	100	5	100	0	0	0	0
7	Medang Kampai	4	100	4	100	4	100	4	100	0	0
	Kota Dumai	33	100	33	100	33	100	18	54,5	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2021

Imunisasi BCG (*Bacillus Calmette-Guerin*) sebanyak 1 (satu) kali dilakukan untuk mencegah penyakit tuberkulosis. Imunisasi BCG diberikan segera setelah bayi lahir di tempat pelayanan kesehatan atau mulai 1 (satu) bulan di Posyandu. Imunisasi hepatitis-B sebanyak 1 (satu) kali untuk mencegah penyakit Hepatitis B yang ditularkan dari ibu ke bayi saat persalinan dan dapat menyebabkan pengerutan hati (*sirosis*) dan kanker hati. Imunisasi terhadap Balita merupakan bagian dari pelayanan kepada Balita, dimana persentase balita yang pernah mendapat imunisasi menurut jenis imunisasi di Kota Dumai. Imunisasi campak untuk mencegah penyakit campak, diberikan pada bayi umur 9 bulan sebagaimana tersaji pada Tabel 2.68 sebagai berikut:

Tabel 2.68
Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kota Dumai, 2016–2020

No	Jenis Imunisasi	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	BCG	98,88	87,93	76,98	84,59	79,53	-4,91
2	Campak	69,74	68,34	66,94	64,58	54,55	-5,78
3	DPT 1, DPT 2 dan DPT 3	86,78	83,11	79,44	76,5	77,08	-2,90
4	Polio 1, 2, 3 dan Polio 4	91,52	87,15	82,78	83,68	80,24	-3,20
5	Hepatitis B1, B2 dan B3	56,88	81,26	81,50	81,74	75,66	9,00

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2017-2021 (2018 Estimasi Tim)

Imunisasi Hepatitis B ini diberikan segera setelah lahir di sarana pelayanan kesehatan. Imunisasi DPT-HB sebanyak 3 (tiga) kali untuk memberi kekebalan pada penyakit difteri, pertusis (batuk rejan), tetanus dan Hepatitis B. Imunisasi ini pertama kali diberikan pada usia bayi 2 (dua) bulan. Kemudian imunisasi berikutnya selisihnya 4 minggu. Pada saat ini pemberian imunisasi DPT dan Hepatitis B dalam program imunisasi dilakukan bersamaan dengan

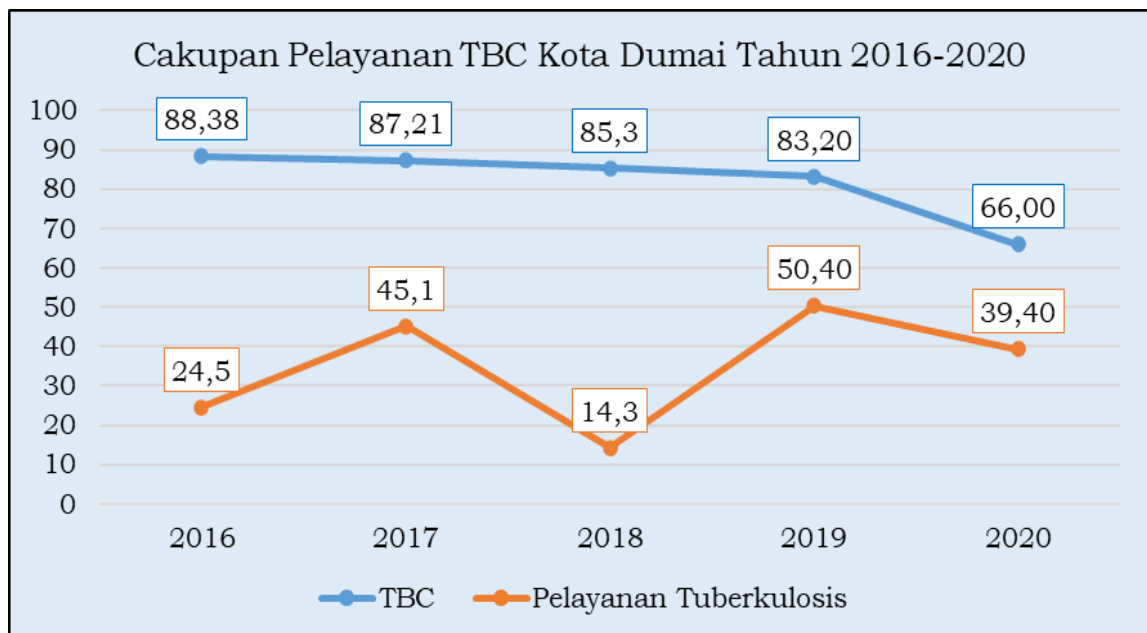
menggunakan vaksin DPT-HB. Imunisasi polio untuk memberikan kekebalan dari penyakit polio dan diberikan sebanyak 4 (empat) kali dengan jeda waktu (jarak) 4 minggu.

10) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Untuk penanggulangan Tuberkulosis Pemerintah memberikan otoritas terhadap kabupaten/kota. Dalam penanggulangan tuberkulosis, WHO telah menetapkan strategi, yang merupakan strategi cost-efektif yaitu strategi DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse) yang artinya pengobatan jangka pendek dengan pengawasan minum obat langsung yang memberikan angka kesembuhan yang tinggi.

Setiap orang terduga Tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan orang terduga TBC meliputi pemeriksaan klinis dilakukan minimal 1 kali dalam setahun berupa pemeriksaan gejala dan tanda, pemeriksaan penunjang dengan pemeriksaan dahak secara bakteriologis dan/ atau radiologis, edukasi perilaku beresiko dan pencegahan penularan, melakukan rujukan jika diperlukan.

Cakupan pelayanan orang terduga Tuberkulosis di Kota Dumai per Kecamatan tahun 2016-2020 masih sangat rendah, belum mencapai 100%. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis di Kota Dumai dari tahun 2016-2020.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2021

Gambar 2.33: Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kota Dumai Tahun 2016-2020

Pada tahun 2020 belum semua Kecamatan belum mencapai target, rata-rata pertahunnya hanya berkisar 39,40%. Cakupan terendah berada di Kecamatan Dumai Timur, rata-rata pertahunnya hanya 17,00% dari target

100%. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya ke fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu kedepan yang masih cakupan masih rendah harus menjadi prioritas utama dalam pelayanan Kesehatan. Cakupan layanan per Kecamatan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.69 berikut.

Tabel 2.69
Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Terduga Tuberkulosis Menurut Kecamatan di Kota Dumai, 2016–2020

No	Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan OrangTerduga Tuberkulosis (%)										Pertumbuhan / Tahun (%)
		2016		2017		2018		2019		2020		
		Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
1	Dumai Kota	229,00	27,40	216,00	53,30	156,00	5,14	575,00	55,10	686,00	58,40	-3,54
2	Dumai Timur	170,00	15,50	205,00	36,90	379,00	8,70	346,00	23,50	320,00	17,00	22,31
3	Dumai selatan	120,00	11,00	324,00	47,80	351,00	10,30	568,00	69,70	392,00	36,90	36,84
4	Dumai Barat	210,00	13,90	410,00	47,80	671,00	24,00	562,00	59,00	491,00	43,10	8,70
5	Bukit Kapur	254,00	26,90	226,00	31,10	348,00	11,20	340,00	55,50	473,00	62,30	10,16
6	Sungai Sembilan	170,00	118,60	309,00	162,00	335,00	14,30	312,00	63,00	202,00	41,70	13,73
7	Medang Kampai	86,00	28,70	94,00	18,00	166,00	17,80	149,00	56,40	101,00	36,70	-10,61
	Kota Dumai	1.239,00	24,50	2.148,00	45,10	2.862,00	14,30	2.852,00	50,40	2.665,00	39,40	24,92

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2021

11) Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan standar kepada ibu bersalin di eilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin meliputi persalinan normal, persalinan komplikasi. Standar persalinan normal yang dilakukan dengan Acuan Persalinan Normal (APN) yang dilakukan, sedangkan persalinan komplikasi mengacu pada buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin tahun 2016-2020 fluktuatif, belum mencapai target 100%.

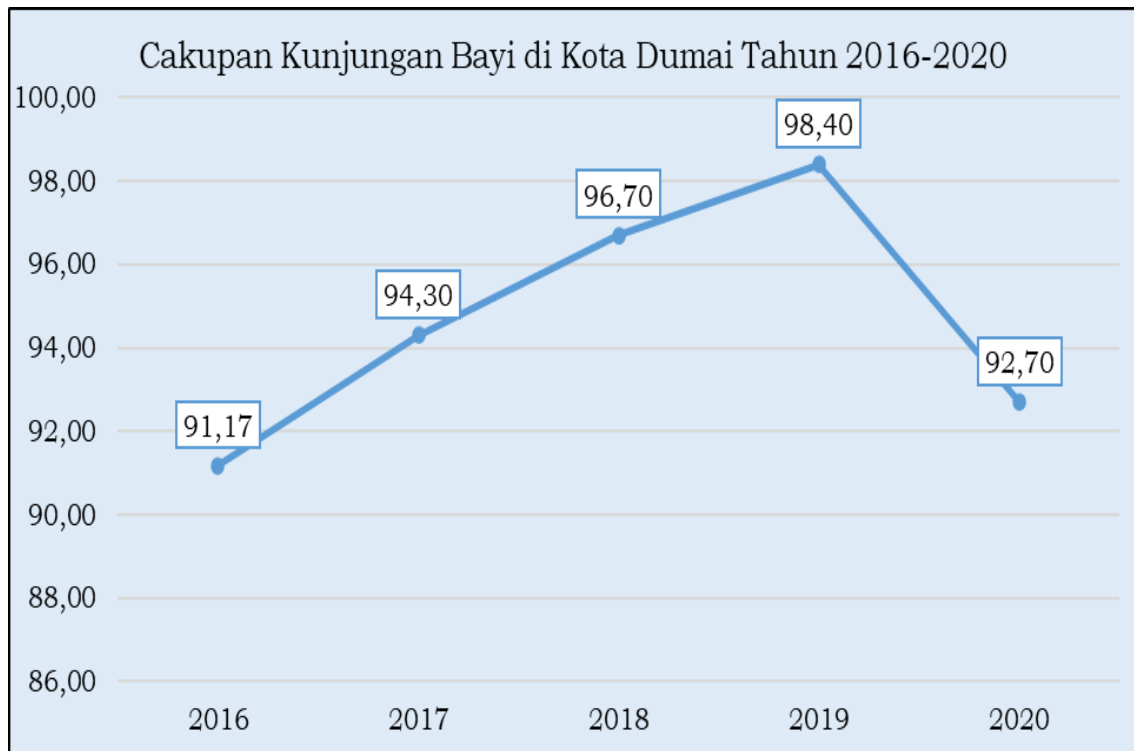
12) Cakupan Kunjungan Bayi

Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali dalam setahun, yaitu satu kali pada umur 29 hari–3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, dan Campak), stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK), manajemen program KIA dalam melindungi bayi sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan. Cakupan kunjungan bayi di Kota Dumai diukur dari jumlah kedatangan ke pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta dengan syarat:

- a. Sampai dengan umur 1 tahun (12 bulan kurang 1 hari) sudah mendapat vitamin A sebanyak 1 kali.

- b. Penimbangan berat badan dilakukan minimal sebanyak 8 kali dalam 1 tahun.
- c. Melakukan pemeriksaan SDIDTK, yaitu pemantauan pertumbuhan perkembangan bayi (tercatat di dalam buku Kesehatan Ibu dan Anak/KIA).

Pada tahun 2016 cakupan kunjungan bayi sebesar 91,17% dan pada tahun 2020 sebesar 92,70%. Bila dibandingkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota yakni sebesar 90%, maka angka tersebut telah melebihi target.



Gambar 2.34: Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Dumai Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021

Pelayanan berdasarkan Kecamatan maka capaian pelayanan tertinggi terdapat di Kecamatan Dumai Timur, Dumai Barat dan Medang Kampai. Jika dilihat ketiga Kecamatan tersebut menunjukkan angka yang melebihi seratus persen karena perkiraan jumlah absolut melebihi dari angka atau target. Bila dibandingkan dengan target sasaran tahun 2020 yakni sebesar 100%, maka angka tersebut belum mencapai target secara keseluruhan.

Perkembangan cakupan kunjungan bayi ke pusat pelayanan kesehatan di Kota Dumai dari tahun 2016-2020 hanya sedikit mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, dimana sebelumnya terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019. Hal ini disebabkan karena Pandemi Covid 19, dimana kegiatan posyandu tidak berjalan. Jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.34 di atas dan per kecamatan Tabel 2.70.

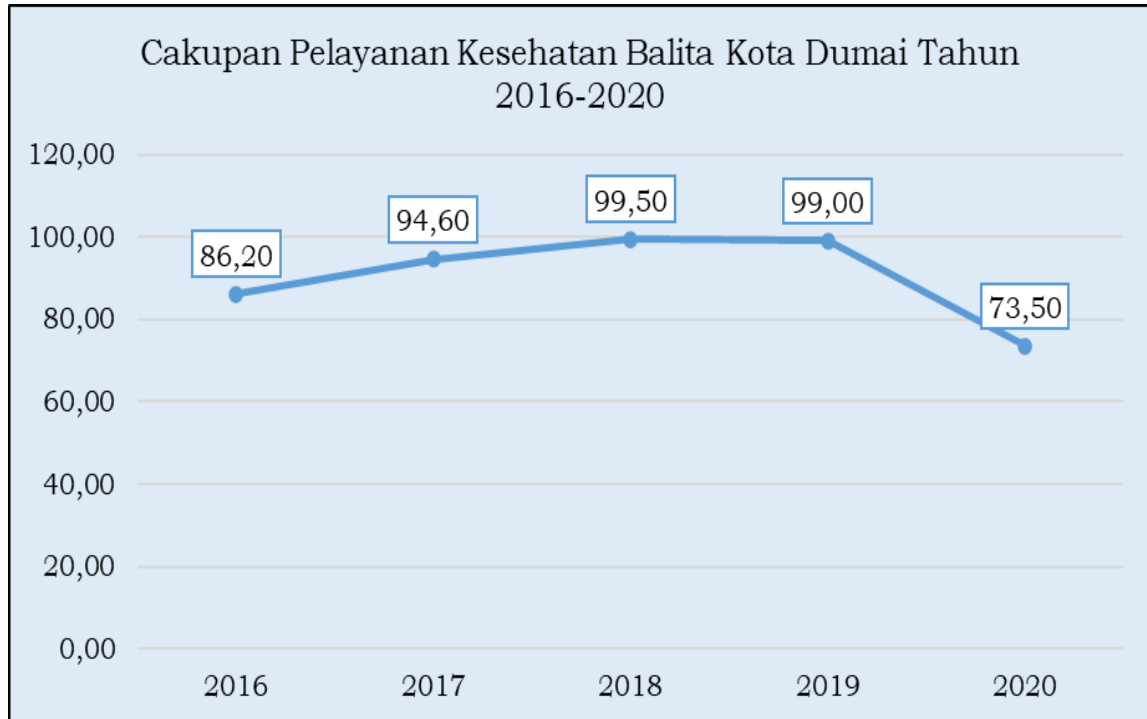
Tabel 2.70
Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Menurut Kecamatan di Kota Dumai, 2016–2020

No	Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%)										Pertumbuhan / Tahun (%)
		2016		2017		2018		2019		2020		
		Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
1	Dumai Kota	1.277	94,00	1.225	99,10	1.188	99,20	1.220	100,00	1.050	84,50	-5,26
2	Dumai Timur	1.754	98,10	1.647	98,80	1.709	99,00	1.756	99,90	1.805	101,00	0,80
3	Dumai selatan	1.315	93,50	1.377	98,70	1.339	99,70	1.348	98,60	1.341	96,40	0,36
4	Dumai Barat	1.075	97,50	1.076	97,70	1.086	98,60	1.111	99,10	1.145	100,40	1,57
5	Bukit Kapur	942	74,40	978	82,70	1.040	84,70	1.155	92,40	1.021	80,30	5,30
6	Sungai Sembilan	856	89,00	727	85,90	908	98,20	940	99,90	814	85,00	-0,89
7	Medang Kampai	332	95,40	309	99,70	357	97,80	370	99,50	397	105,00	2,73
	Kota Dumai	7.551	91,70	7.339	94,80	7.627	96,70	7.900	98,40	7.573	92,70	0,14

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021

13) Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Balita

Pelayanan kesehatan balita adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS). Setiap balita (0-59 bulan) memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang meliputi pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali dalam setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali setahun, pemberian kapsul Vitamin A, pemberian imunisasi dasar lengkap, penimbangan minimal 8 kali dalam setahun yang dilaksanakan melalui pelayanan SDIDTK oleh tenaga kesehatan, ahli gizi, penyuluh kesehatan masyarakat dan petugas sektor lain yang dalam menjalankan tugasnya melakukan stimulasi dan deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang anak. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan anak balita di Kota Dumai dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi seperti terlihat pada grafik berikut ini.



Gambar 2.35: Cakupan Pelayanan Balita di Kota Dumai Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021

Pada tahun 2020, dari pemantauan deteksi dini tumbuh kembang anak balita melalui pemantauan pertumbuhan balita di posyandu, diperoleh cakupan pelayanan kesehatan anak balita (12-59 bulan) sebesar 73,5% (30.927 anak balita) dari 42.098 perkiraan jumlah anak balita. Pelayanan berdasarkan Kecamatan pada tahun 2020, capaian pelayanan tertinggi terdapat di Kecamatan Dumai Timur sebesar 82,90% dan terendah Kecamatan Bukit Kapur hanya mencapai 52,90%. Oleh karena itu kedepan yang masih cakupan masih rendah harus menjadi prioritas utama dalam pelayanan Kesehatan balita. Cakupan layanan per Kecamatan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.71 berikut.

Tabel 2.71. Cakupan Pelayanan Balita di Kota Dumai Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita (%)										Pertumbuhan / Tahun (%)
		2016		2017		2018		2019		2020		
		Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
1	Dumai Kota	4.675	82,80	4.921	95,80	6.130	99,30	5.026	99,20	4.766	74,50	6,164
2	Dumai Timur	6.498	87,50	6.737	97,30	8.788	98,80	7.247	99,30	7.638	82,90	5,495
3	Dumai selatan	5.295	90,60	5.785	99,90	6.916	99,90	5.608	98,70	5.686	74,60	7,549
4	Dumai Barat	4.076	89,00	4.163	91,00	5.651	99,60	4.587	98,50	4.648	79,10	4,561
5	Bukit Kapur	4.325	82,20	4.676	95,20	6.310	99,80	5.111	98,50	3.465	52,90	6,015
6	Sungai Sembilan	3.410	85,10	2.959	84,20	4.761	99,90	3.910	99,90	3.004	60,80	6,125
7	Medang Kampai	1.217	84,20	1.174	91,20	1.882	100,00	1.529	99,20	1.720	88,30	-1,566
	Kota Dumai	29.487	86,20	30.415	94,60	40.438	99,50	33.018	99,00	30.927	73,50	2,855

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021

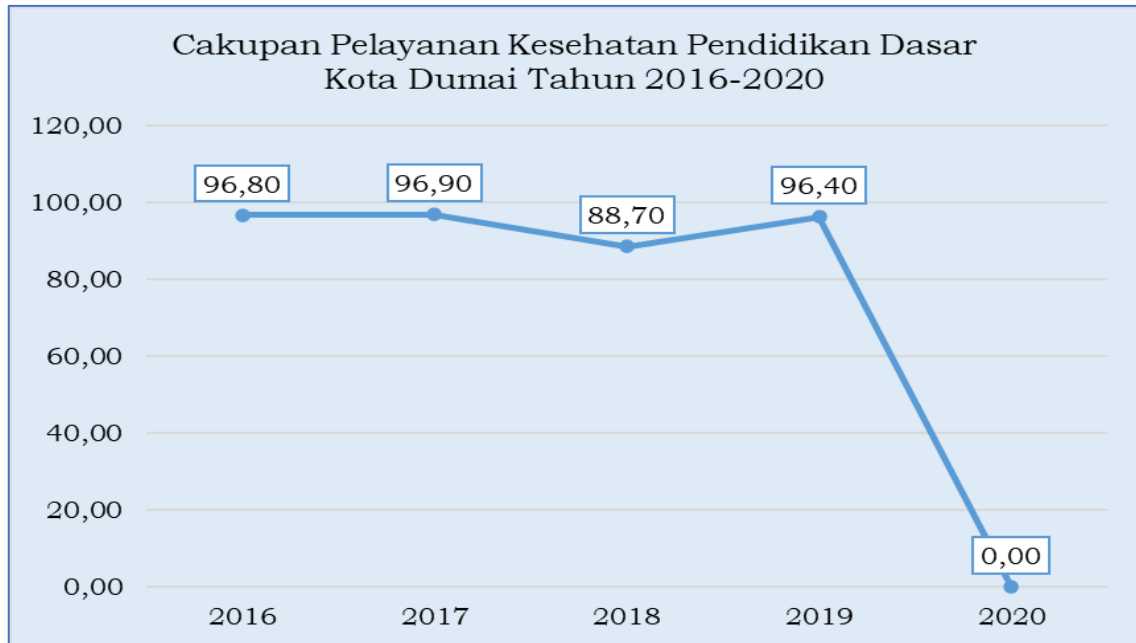
14) Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Anak-anak merupakan kelompok besar masyarakat yang mempunyai tingkatan kesehatan lebih baik dibandingkan dengan kelompok lainnya berdasarkan tingkat kesakitan. Meskipun demikian merupakan kelompok yang rawan terhadap penyakit dan merupakan dasar bagi pendidikan kesehatan selanjutnya. Usaha untuk meningkatkan derajat kesehatan anak melalui pengelolaan di sekolah dengan program Trias UKS, yaitu menanamkan pengetahuan kesehatan pandangan dan kebiasaan hidup sehat untuk diri sendiri dan lingkungannya. Pelayanan kesehatan dalam bentuk pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan. Menciptakan lingkungan sekolah sehat dalam kegiatan ekstrakurikuler.

Setiap anak pada usia pendidikan dasar usia 7 tahun – 15 tahun. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar meliputi skrining kesehatan dan tindak lanjut hasil skrining kesehatan dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah.

Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan luar satuan pendidikan dasar (pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LKPA) dan lainnya meliputi penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, penilaian ketajaman indera. Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan rujukan bila diperlukan, memberikan penyuluhan kesehatan.

Cakupan pelayanan usia pendidikan dasar di Kota Dumai tahun 2016 – 2020 cenderung mengalami penurunan, khususnya tahun 2020 disebabkan karena Pandemi Covid 19, dimana kegiatan sekolah dilakukan secara daring (dalam jaringan) atau pembelajaran jarak jauh sehingga berakibat pada tidak dilaksanakannya pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar di Kota Dumai dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.36: Cakupan Pelayanan Usia Pendidikan Dasar di Kota Dumai Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021

Jika dilihat dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar per Kecamatan di Kota Dumai cukup baik, namun pada tahun 2020 di 7 Kecamatan Kota Dumai cakupan 0% karena terjadinya pandemic COVID 19. Oleh karena itu kedepan yang masih cakupan masih rendah harus menjadi prioritas utama dalam pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar menurut Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.72 berikut:

Tabel 2.72
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
Per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2016 – 2020

No	Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar (%)										Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2016		2017		2018		2019		2020		
		Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
1	Dumai Kota	710	96,50	708	96,60	1.368	91,40	947	89,30	0,00	0,00	-1,765
2	Dumai Timur	1.752	100,00	1.734	100,00	2.116	92,60	2.080	97,70	0,00	0,00	-20,175
3	Dumai selatan	817	94,90	962	93,80	2.481	95,30	2.461	98,10	0,00	0,00	18,912
4	Dumai Barat	741	96,20	660	95,50	1.325	96,10	1.388	97,10	0,00	0,00	1,378
5	Bukit Kapur	1.082	97,50	1.133	95,80	2.108	96,30	2.100	96,90	0,00	0,00	22,597
6	Sungai Sembilan	856	94,10	885	97,50	1.078	56,90	1.277	97,60	0,00	0,00	-18,701
7	Medang Kampai	340	92,10	334	95,70	614	94,50	602	91,90	0,00	0,00	-25,489
	Kota Dumai	6.298	96,80	6.416	96,90	11.090	88,70	10.855	96,40	0,00	0,00	-6,849

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021

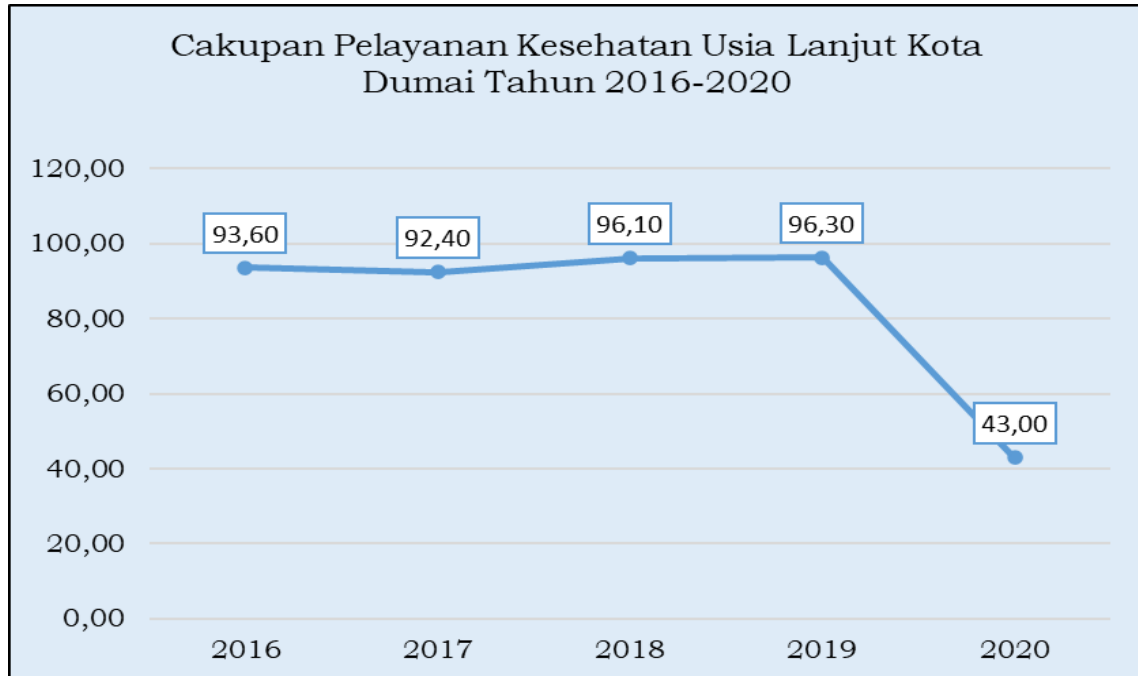
15) Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Pelaksanaan pelayanan kesehatan usia lanjut dibagi ke dalam 3 kategori yaitu Pelayanan kesehatan geriatri di masyarakat, Pelayanan kesehatan geriatri di masyarakat berbasis rumah sakit, dan Pelayanan kesehatan geriatri

berbasis rumah sakit. Masalah kesehatan pada lanjut usia disebabkan oleh kemunduran sel-sel tubuh, sehingga fungsi dan daya tahan tubuh menurun serta faktor resiko terhadap penyakitpun meningkat. Kondisi ini disebabkan oleh malnutrisi, gangguan keseimbangan, kebingungan mendadak. Selain itu, beberapa penyakit yang sering terjadi pada lanjut usia antara lain hipertensi, gangguan pendengaran dan penglihatan, demensia, osteoporosis, dan sebagainya.

Berdasarkan UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomis. Selain itu, Pemerintah wajib menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjut usia untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif. Pelayanan kesehatan lanjut usia bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan lanjut usia yang berkualitas melalui penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang ramah bagi lanjut usia untuk mencapai lanjut usia yang berdayaguna bagi keluarga dan masyarakat. Upaya yang dikembangkan untuk mendukung kebijakan tersebut antara lain meningkatkan upaya kesehatan bagi lanjut usia di pelayanan kesehatan dasar dengan pendekatan Pelayanan Santun lanjut usia, meningkatkan upaya rujukan kesehatan bagi lanjut usia melalui pengembangan Poliklinik Geriatri Terpadu di Rumah Sakit, dan menyediakan sarana dan prasarana yang ramah bagi lanjut usia.

Hal tersebut dapat dilakukan melalui pelayanan kesehatan standar pada usia lanjut dilakukan pada penduduk usia 60 tahun ke atas. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut dalam bentuk edukasi, dan skrining kesehatan pelayanan kesehatan usia lanjut. Pelaksanaan skrining kesehatan pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal sekali dalam setahun meliputi pengukuran tinggi, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan gangguan mental, pemeriksaan gangguan kognitif, pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut, anamnesa perilaku beresiko. Tindak lanjut skrining yaitu membuat rujukan dan melakukan penyuluhan kesehatan. Berikut disajikan cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut di Kota Dumai dari tahun 2016-2020. Cakupan layanan kesehatan pada usia lanjut di Kota mengalami penurunan akibat pandemic Covid 2019 terutama pada tahun 2020 hanya mencapai 43,00%. Perkembangan cakupan layanan Kesehatan usia lanjut dapat dilihat pada Gambar 2.37 berikut.



Gambar 2.37: Cakupan Pelayanan Usia Lanjut di Kota Dumai Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021

Pada kondisi lansia yang tidak mampu merawat dirinya secara penuh dibutuhkan bantuan pelaku rawat/pendamping/pramusila atau lazim disebut *care giver*. Oleh karenanya, peran *care giver* menjadi sangat penting dan perlu dikembangkan aturan, standar dan norma oleh pemerintah yang mengatur pemenuhan kebutuhan *care giver* termasuk pembinaan dan pemenuhan hak para *care giver* itu sendiri. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut menurut Kecamatan di Kota Dumai tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.73 berikut:

Tabel 2.73
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2016 – 2020

No	Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (%)										Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2016		2017		2018		2019		2020		
		Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
1	Dumai Kota	2.237	93,40	2.085	95,70	2.012	95,30	2.114	98,40	973	44,50	-16,067
2	Dumai Timur	2.937	93,30	2.530	86,10	2.961	97,40	3.067	99,10	1.586	50,40	-10,383
3	Dumai selatan	2.324	93,70	2.294	93,40	2.279	96,30	2.332	96,80	864	35,30	-16,224
4	Dumai Barat	1.820	93,70	1.852	95,50	1.837	94,70	1.869	94,70	878	43,70	-13,023
5	Bukit Kapur	2.092	93,80	1.935	92,90	2.053	95,00	2.067	93,90	974	43,50	-0,181
6	Sungai Sembilan	1.589	93,80	1.400	93,90	1.563	96,00	1.571	94,70	614	36,40	-15,292
7	Medang Kampai	574	93,60	494	90,60	640	99,50	595	90,8	302	45,30	-14,069
	Kota Dumai	13.573	93,60	12.590	92,40	13.345	96,10	13.615	96,30	6.191	43,00	-13,438

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021

Jika dilihat dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut per Kecamatan di Kota Dumai cukup baik selama tahun 2016-2019, namun pada tahun 2020 di tujuh Kecamatan Kota Dumai cakupannya hanya mencapai 43%

dan capaian tertinggi terdapat di Kecamatan Dumai Timur sebesar 50,40% dan terendah terdapat di Kecamatan Dumai Selatan sebesar 35,30%. Rendahnya capaian secara umum disebabkan karena terjadinya pandemic COVID 19. Oleh karena itu kedepan yang masih cakupan masih rendah harus menjadi prioritas utama dalam pelayanan Kesehatan pada usia lanjut.

16) Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Kemiskinan dan kesehatan merupakan dua hal yang saling berhubungan. Kemiskinan mempengaruhi kesehatan sehingga orang miskin menjadi rentan terhadap berbagai macam penyakit, karena mereka mengalami gangguan menderita gizi buruk, pengetahuan kesehatan kurang, perilaku kesehatan kurang, lingkungan pemukiman buruk, biaya kesehatan tidak tersedia. Sebaliknya kesehatan mempengaruhi kemiskinan. Derajat kesehatan dapat menekan kemiskinan karena dengan masyarakat yang sehat produktivitas kerja meningkat, pengeluaran berobat rendah, investasi dan tabungan memadai, tingkat pendidikan maju, tingkat fertilitas dan kematian rendah, stabilitas ekonomi mantap.

Salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan milik pemerintah adalah BPJS kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS kesehatan terdiri dari dua kelompok peserta yaitu Penerima Bantuan Iuran dan bukan penerima bantuan iuran. Menurut undang – undang Penerima bantuan iuran (PBI) ditujukan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu. Pemerintah akan menanggung iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat dalam kelompok PBI tersebut. Dengan adanya program BPJS kesehatan, masyarakat miskin peserta BPJS kesehatan penerima bantuan iuran diharapkan akan lebih mudah dalam mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu dan derajat kesehatan masyarakat akan meningkat.

Salah satu bentuk komitmen dan kepedulian Pemerintah Kota Dumai terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, maka Pemerintah Kota Dumai memberikan pelayanan kesehatan gratis melalui program jaminan kesehatan masyarakat, tentunya tidak terlepas dari kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sumber dana bantuan iuran bagi masyarakat tersebut bersumber dari APBN dan APBD Kota Dumai, Pada tahun 2020 terdapat 158.823 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kota Dumai dari target 169.887 peserta. Dengan kata lain, pada tahun 2020 sekitar 103,17% penduduk kurang mampu atau miskin di Kota Dumai telah menikmati layanan kesehatan gratis dari Pemerintah Kota Dumai. Data

penerima bantuan iuran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.74 berikut ini:

Tabel 2.74
Perkembangan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan di Kota Dumai Tahun 2016-2020

Sumber Dana	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
APBD	64.514	64.969	65.960	88.679	84.057	7,87
APBN	62.158	61.414	61.166	62.249	74.766	5,07
Jumlah	126.672	126.383	127.126	150.928	158.823	6,08

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020

Program Jaminan Kesehatan (Jamkesko) Kota Dumai dimulai sejak tahun 2009 dan terus berkembang sampai sekarang. Dimulainya Jamkesko di Kota Dumai dikuatkan melalui Peraturan Walikota Nomor 7 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembebasan Biaya Perawatan di kelas III bagi penduduk Kota Dumai dan selanjutnya diperbaharui melalui Peraturan WaliKota Dumai Nomor 12 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembebasan Biaya Perawatan di kelas III selanjutnya diperbaharui Peraturan WaliKota Dumai Nomor 42 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kota Dumai bagi masyarakat Kota Dumai tahun 2019. Kegiatan yang dilakukan antara lain pelaksanaan jaminan kesehatan (JKN) di puskesmas, pembinaan pelayanan jaminan kesehatan ke puskesmas dan pembayaran belanja premi asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.

Kuota Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan iuran (PBI) dari APBN maupun APBD tidak diperuntukkan seluruh masyarakat. Kartu Indonesia Sehat dari APBN dan APBD diperuntukkan untuk warga miskin kurang mampu yang memiliki NIK bagi yang mampu dianjurkan untuk mengurus sesuai ketentuan, yakni bayar premi. Untuk meningkatkan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan verifikasi dan validasi data PBI JKN yang bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan data agar terwujudnya ketepatan sasaran pemakai PBI-JKN di Kota Dumai. Perubahan data dimaksud seperti meninggal, pindah keluar kota atau telah menjadi mampu sehingga kuota yang kosong dapat dialihkan ke masyarakat lain yang tidak mampu.

17) Cakupan Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (*basic six*) dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan, inovasi serta

kebijakan pemerintah daerah setempat. Puskesmas mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pusat pembangunan berwawasan kesehatan
- b. Pusat pemberdayaan masyarakat
- c. Pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer
- d. Pusat pelayanan kesehatan perorangan primer

Sarana bangunan puskesmas dan puskesmas pembantu yang ada yang merupakan bangunan hibah dari pemerintah Kabupaten Bengkalis karena adanya pemekaran Kota Dumai, pada umumnya sudah berumur tua dan kondisinya sudah mulai rusak. Seluruh kelurahan di Kota Dumai telah memiliki poskeskel, namun masih ada sebanyak 9 poskeskel lagi yang belum memiliki bangunan sendiri (masih menumpang/menyewa). Karena minimnya anggaran di Dinas Kesehatan untuk melakukan rehabilitasi puskesmas dan jaringannya termasuk poskeskel mengakibatkan tidak semua puskesmas dan jaringannya bisa dilakukan rehabilitasi secara maksimal. Dari 10 puskesmas, 13 puskesmas pembantu dan 24 poskeskel yang ada pada umumnya kondisinya rusak ringan (di wilayah kerja puskesmas perkotaan seperti wilayah kerja puskesmas Dumai Kota, Dumai Barat, Jaya Mukti, Bumi Ayu, Purnama dan Bukit Kapur), sedang maupun berat (di wilayah kerja puskesmas pedesaan seperti wilayah kerja puskesmas Sungai Sembilan, Medang Kampai, Bukit Kayu Kapur dan Bukit Timah).

Tabel 2.75
Sebaran Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2019

Kecamatan	Nama Puskesmas	Non Rawat Inap	Rawat Inap	Jumlah Tempat Tidur
Dumai Timur	1. Jaya Mukti	√		
Dumai Barat	2. Dumai Barat	√		
	3. Purnama	√		
Bukit Kapur	4. Bukit Kapur		√	12
	5. Bukit kayu Kapur			
Sungai Sembilan	6. Sungai Sembilan		√	9
Medang Kampai	7. Medang Kampai		√	15
Dumai Kota	8. Dumai Kota	√		
Dumai Selatan	9. Bumi Ayu	√		
	10. Bukit Timah	√		

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2019

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Dumai, cakupan pelayanan puskesmas sampai tahun 2019 telah menjangkau seluruh Kecamatan di Kota Dumai dengan rasio 142,86 seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.75. Adapun perkembangan jumlah puskesmas dan rasio puskesmas per 100.000 penduduk di Kota Dumai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 tersaji pada Tabel 2.76.

Tabel 2.76
Perkembangan Jumlah Puskesmas dan Rasio Puskesmas per 100.000
Penduduk di Kota Dumai Tahun 2011-2019

Tahun	Jumlah Penduduk Kota Dumai	Jumlah Puskesmas	Rasio Puskesmas Per 100.000 penduduk
2011	259.913	9	3,46
2012	268.022	9	3,36
2013	274.089	9	3,28
2014	280.109	10	3,57
2015	285.967	10	3,50
2016	291.908	10	3,43
2017	297.638	10	3,36
2018	303.292	10	3,30
2019	308.812	10	3,24

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2019

Cakupan efektif adalah sebagian dari manfaat kesehatan potensial, yang lebih kepada sistem kesehatan yang sesungguhnya diterima dalam pelayanan sesuai dengan kapasitas puskesmas yang tersedia. Pelayanan yang berkualitas harus mempertimbangkan beberapa aspek dimensi jumlah kualitas sarana dan prasarana yang perlu diperhatikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya safety/keamanan, patient focus (Pelayanan yang berfokus pada pasien), Technical competence (Kompetens teknis yang di miliki oleh pemberi layanan kesehatan).

18) Cakupan Puskesmas Pembantu

Jumlah Puskesmas Pembantu di Kota Dumai sampai dengan tahun 2019 sebanyak 13 unit yang tersebar di beberapa kelurahan. Berikut ini sebaran puskesmas pembantu di Kota Dumai.

Tabel 2.77
Sebaran Puskemas Pembantu di Kota Dumai Tahun 2019

Kecamatan	Nama Puskesmas Pembantu
Dumai Barat	1. Parit Pisang Mas
Dumai Kota	2. Rimba Sekampung
Bukit Kapur	3. GurunPanjang
	4. Simpang Murini
Sungai Sembilan	5. Suka Damai
	6. Basilam Baru
	7. Simpang Pulau
	8. Kampung Sejati
	9. Sungai Sepit
	10. Sungai Teras
	11. Bulu Hala
	12. Tianjung
Medang Kampai	13. Pelintung

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2019

Puskesmas pembantu berfungsi meluaskan jangkauan pelayanan puskesmas dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dari tahun 2011 sampai tahun 2019 jumlah puskesmas pembantu yang ada tetap., Cakupan Puskesmas Pembantu seperti yang terlihat pada Tabel 2.78 berikut.

Tabel 2.78
Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Dumai
Tahun 2011-2019

Indikator	Tahun								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Puskesmas Pembantu	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Jumlah Seluruh Kelurahan	32	33	33	33	33	33	33	33	33
Rasio Puskesmas Pembantu	40,62	39,39	39,39	39,39	39,39	39,39	39,39	39,39	42,09

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2019

19) Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat,

- a. Semua puskesmas harus memiliki fasilitas persalinan dan UGD 24 jam, kondisi saat ini baru 4 puskesmas di 4 Kecamatan yang memiliki fasilitas persalinan dan UGD 24 jam yaitu: puskesmas Medang Kampai, Sungai sembilan, Bukit kapur dan Dumai barat.
- b. Puskesmas wajib memiliki kecukupan jumlah dan jenis alat kesehatan, sarana dan prasarana, kondisi saat ini di Kota Dumai rata-rata puskesmas baru memiliki \pm 45% dari 100% kecukupan jumlah dan jenis alat kesehatan, sarana dan prasarana.

Akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di seluruh Kota Dumai, terutama di wilayah kerja puskesmas yang memiliki daerah sulit dijangkau karena kondisi geografis dan terbatasnya transportasi dan infrastruktur (jalan, jembatan dan listrik) seperti wilayah kerja puskesmas Sungai Sembilan, Bukit Kayu Kapur dan Medang Kampai. Kondisi di atas menyebabkan petugas kesehatan sulit dalam menjangkau masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan dan masyarakatpun sulit mengakses sarana pelayanan kesehatan.

Dengan kondisi wilayah kerja Puskesmas Sungai Sembilan yang luas dan juga memiliki daerah sulit dijangkau, serta kondisi jalan dan infrastruktur lainnya yang belum memadai mempengaruhi akses masyarakat yang perlu mendapatkan pelayanan rujukan ke RSUD Kota Dumai khususnya pasien gawat darurat atau rujukan kasus maternal neonatal resti dan komplikasi. Meskipun ada tersedia puskesmas keliling air (speedboat), namun karena jumlahnya hanya 1 unit dan muatannya juga terbatas, maka belum bisa

melayani seluruh pasien rujukan khususnya yang berada di daerah sulit. Tidak jarang kasus kematian pasien rujukan terjadi di perjalanan sebelum tiba di rumah sakit karena medan yang sulit sehingga jarak tempuh menjadi lama.

Disamping itu, masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta pelayanan medis yang bermutu dan merata di setiap puskesmas. Sarana dan prasarana kesehatan yang ada belum memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Misalnya, masih ada puskesmas yang belum memiliki IPAL, generator set (Genset), sarana air bersih (SAB) seperti sumur bor dalam. Masih ada puskesmas yang tidak memiliki ambulans padahal seluruh puskesmas telah mempunyai pelayanan kegawatdaruratan (UGD), sedangkan puskesmas yang memiliki ambulans kondisinya sudah mulai rusak.

Tabel 2.79
Daftar Ketersediaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Sampah Medis (SW 100)
Kota Dumai Tahun 2019

No	Lokasi	Jenis	Pengadaan Tahun
A	Pengadaan IPL		
1	Laboratorium Dinas Kesehatan	IPAL	2015
2	Puskesmas Bukit Kapur	IPAL MRC 10	2016
3	Puskesmas Medang Kampai	IPAL MRC 10	2016
4	Puskesmas Sungai Sembilan	IPAL MRC 10	2016
5	Puskesmas Dumai Kota	IPAL BARTEC	2017
6	Puskesmas Jayamukti	IPAL BARTEC	2017
7	Puskesmas Dumai Barat	IPAL BARTEC	2017
B	Pengadaan IPL SW 100		
1	Puskesmas Medang Kampai	Steril Wave 100	2019
2	Puskesmas Purnama	Steril Wave 100	2019

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2019

Meskipun 2 dari 10 puskesmas se Kota Dumai telah memiliki alat pengolah sampah medis yakni SW 100, permasalahan pengelolaan sampah medis baik di puskesmas, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan mandiri di Kota Dumai masih menjadi kendala utama karena belum tersedia di Kota Dumai. Padahal permasalahan pengelolaan sampah medis merupakan salah satu prioritas Nasional.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dan hamper miskin tahun 2019 sebesar 5.728 orang khusus jaminan untuk masyarakat miskin berupa Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Jamkesmas dan Jamkesda ini merupakan jaminan kesehatan yang sama-sama diperuntukkan bagi warga miskin. Namun, ruang lingkup berbeda. JAMKESMAS adalah program yang ruang lingkungannya lebih luas yang diperuntukkan untuk warga miskin di seluruh

indonesia. Sesuai namanya, Jamkesda ini diberikan kepada warga miskin oleh pemerintah daerah suatu kabupaten atau provinsi.

Tabel 2.80
Daftar Puskesmas yang memiliki Genset dan Sumur Bor Dalam
Tahun 2019

No.	Nama Puskesmas	Jenis Sarana		Keterangan
		Genset + Rumah	Sumur Bor Dalam	
1.	Dumai Kota	2017/2018	2017	
2.	Dumai Barat	-	2017	
3.	Sungai Sembilan	2017/2019	2017	
4.	Bukit Kapur	2017/2019	2017	Sumur Bor Rusak
5.	Medang Kampai	2017/2019	2017	
6.	Jaya Mukti	2017/2019	2017	
7.	Bumi Ayu	-	-	
8.	Bukit Timah	-	2019	Lokasi baru
9.	Purnama	-	2019	Lokasi baru
10.	Bukit Kayu Kapur	-	-	

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2019

20) Penyakit Menular dan Tidak Menular

Potensi Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya bagi wisatawan asing maupun pelaut asing, serta mobilisasi penduduk dari dan ke kabupaten/kota yang memiliki angka prevalensi HIV/AIDS cukup tinggi akan meningkatkan prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko. Adanya peningkatan prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko dari Tahun 2016 (0,70%), Tahun 2017 (0,96%) dan pada tahun 2018 jumlah kasus HIV di Kota Dumai secara kumulatif ada 260 kasus dengan prevalensi rate 0,79% terhadap penduduk beresiko HIV di Kota Dumai. Jumlah remaja usia 15-24 tahun yg telah mendapatkan penyuluhan HIV/AIDS di Kota Dumai sejak tahun 2015, 2016 dan Tahun 2017 secara berurutan berjumlah 1000 jiwa, 540 jiwa dan 18.305 jiwa . pada tahun 2019 prevalensi HIV di Kota Dumai 1,27% dengan jumlah kasus HIV 298 penderita dari estimasi 23.433 penduduk yang beresiko. Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2019

Kota Dumai merupakan daerah beresiko malaria, merupakan ciri khas daerah tropis dengan hutan bakau, dan letak geografis Kota Dumai yang berbatasan dengan daerah endemis malaria yaitu kabupaten rohil dan Kabupaten bengkalis. Walaupun Kota Dumai sudah eliminasi malaria namun tetap dilakukan penguatan surveilans agar tidak terjadi KLB. Angka kesakitan malaria Kota Dumai Tahun 2017-2019 cenderung statis 0,01 per 1000 penduduk dari target 1/1000 penduduk, dengan jumlah kasus 3 penderita malaria.

Permasalahan kesehatan masyarakat di Kota Dumai yang menjadi perhatian setiap tahunnya adalah penyakit DBD, yang merupakan penyakit potensial terjadinya KLB (Kejadian Luar Biasa). Penyakit DBD sering menyerang anak – anak dan sering menyebabkan kematian. Angka kesakitan demam berdarah dengue pada tahun 2019 mengalami peningkatan kasus yang sangat signifikan ada 992 kasus dengan insidens rate (angka kesakitan sebesar 321,23/100.000. dan jumlah kematian ada 3 kasus dengan CFR Case Fatality Rate sebesar 0,3%. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan PE DBD & lavarsidasi selektif untuk 992 kasus dengan melakukan Penyemprotan/fogging sarang nyamuk.

Meskipun berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit demam berdarah sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai, namun kasus DBD belum bisa ditekan secara maksimal. Masih tingginya angka kesakitan DBD terutama disebabkan oleh faktor perilaku, lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat yang masih mendukung sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk vektor DBD seperti perubahan cuaca yang ekstrim yang berakibat adanya banjir, tingkat mobilitas penduduk masih tinggi, belum tersedianya sarana pembuangan air limbah (SPAL) dan sarana pembuangan sampah yang memenuhi standar dan ± 80% penduduk Kota Dumai masih menggunakan bak/drum sebagai tempat penampungan air, serta rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk. Di samping itu, dampak dari global warming juga memicu meningkatnya angka kesakitan DBD. Dari hasil pengamatan data jumlah kasus DBD dalam kurun waktu tertentu menunjukkan grafik naik turun. Berdasarkan pengamatan tersebut, ada suatu masa yang menunjukkan pola jumlah kasus DBD yang lebih tinggi di banding waktu-waktu lainnya, yang biasanya muncul setiap lima tahun. Inilah yang kemudian di sebut dengan siklus lima tahunan DBD. Kondisi ini menjadikan Kota Dumai sebagai daerah endemis penyakit Demam Berdarah dan bila tidak dilakukan upaya-upaya secara intensif dapat terjadi peningkatan kasus dan potensial menimbulkan KLB.

Upaya yang paling efektif untuk mencegah timbulnya penyakit DBD adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk secara serentak oleh seluruh warga masyarakat secara terus menerus. Selain itu perlu juga didukung oleh ketersediaan peralatan fogging yang cukup dan layak. Saat ini peralatan fogging yang tersedia jumlahnya terbatas dan kondisinya sudah banyak yang rusak karena terlalu sering digunakan.

Penyakit TB paru merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Menurut data WHO pada 2015, Indonesia saat

ini menduduki peringkat kedua tertinggi di dunia terkait masalah tuberculosis Dengan kasus terbanyak di negara India, kemudian diikuti oleh Indonesia, Tiongkok, Filipina, Pakistan, Nigeria dan Afrika Selatan.

Permasalahan penyakit TB di Kota Dumai makin kompleks, karena masih banyak penyakit TB yang belum terdeteksi di masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat kurang memahami gejala TB dan juga relevansi terhadap risiko terkena TB dan semakin meningkatnya kasus TB yang resistan (MDR Multy drug Resistan). Pada tahun 2019 Kasus penemuan TB di Kota Dumai masih berkisar 32,2% yaitu ada 338 kasus dari 1048 kasus yang harus ditemukan di Kota Dumai, untuk diobati sehingga dapat memutuskan rantai penularan di Kota Dumai. Pada tahun 2019 angka kesembuhan TB Paru sebesar 83,3% dari target 88%, dari 310 kasus TB BTA (+) yg mengalami kesembuhan ada 258 kasus

Penyebab Diare merupakan penyakit berbasis lingkungan, yang merupakan permasalahan kesehatan masyarakat di Kota Dumai. Diare dapat terjadi karena keracunan makanan, infeksi kuman, dan stres. Angka kesakitan diare semua umur di Kota Dumai selama tahun 2019 sebanyak 8.338 penderita atau IR IR 270/1000.

Gaya hidup sehat bisa mencegah hadirnya berbagai penyakit tidak menular. Hipertensi dan Diabetes malitus. Pada tahun 2019 Hipertensi tercatat 22.478 Penderita (33,6 %) dan Diabetes Melitus tercatat 3.135 Penderita (89,1%) perlu menjadi perhatian karena jika tidak ditanggulangi dengan baik akan menjadi komplikasi lebih berat yang menyebabkan kematian dan beban biaya pengobatan yang sangat besar. Berdasarkan penyebab kematian di Kota Dumai tahun 2019, pada umumnya penyebab kematian didominasi oleh penyakit tidak menular (PTM) seperti Diabetes Militus, Asma, Kecelakaan, Stroke, Hypertensi dan kanker. Penyakit tidak menular (PTM) umumnya dipengaruhi oleh keadaan demografi, sosial ekonomi dan sosial budaya seperti meningkatnya umur harapan hidup, adanya kondisi lingkungan yang merugikan kesehatan seperti pencemaran udara dan rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat serta makin tingginya paparan faktor resiko seperti merokok, pola aktifitas fisik (kurang olah raga), pola makan yang tinggi lemak dan rendah serat. Sebagian besar penderita tidak mengetahui bahwa dirinya menderita penyakit tidak menular. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) untuk saat ini perlu mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, perlu mendapatkan layanan cepat. Pada tahun 2019 Kota Dumai melakukan pelayanan kesehatan jiwa 404 (87,3%). *Screening*, pemeriksaan leher rahim pada tahun 2019 dilaksanakan pada 2.220 (4,5%) dari sasaran 49.589 wanita

kelompok usia reproduktif 30 – 50 tahun dengan IVA positif sebanyak 137 kasus (6,2%) dan terdapat tumor 5 kasus (0,2%).

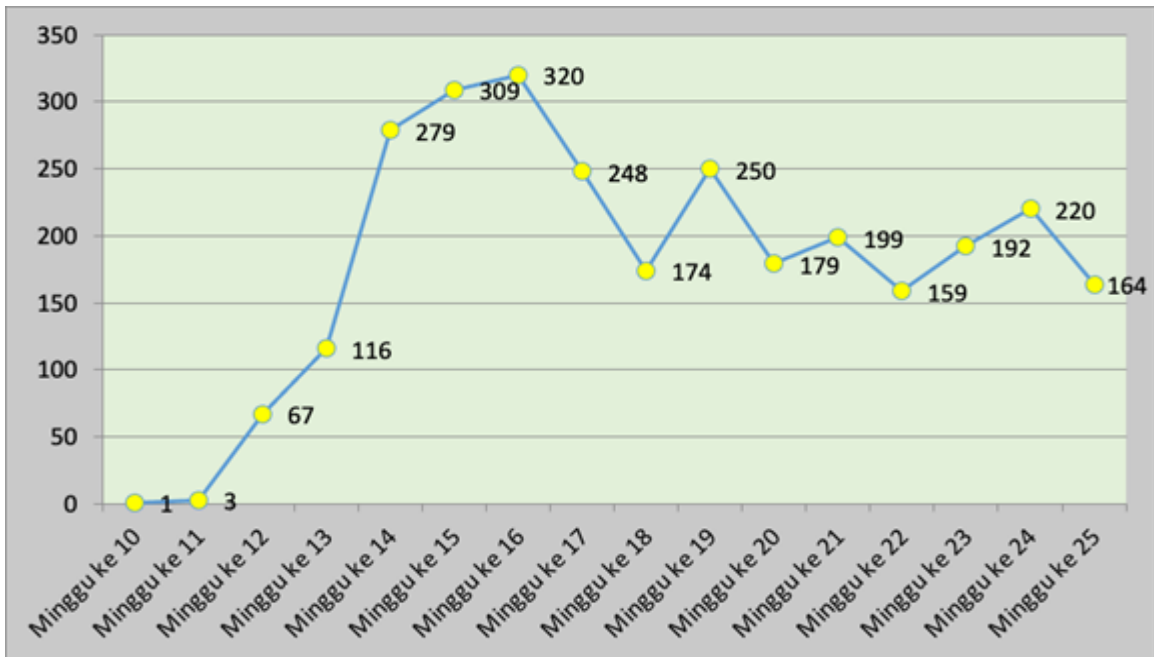
Selama satu dekade terakhir ini, telah terjadi transisi epidemiologis yang signifikan, penyakit tidak menular telah menjadi beban utama, meskipun beban penyakit menular masih berat juga. Kota Dumai sedang mengalami *triple burden* penyakit, yaitu penyakit tidak menular dan penyakit menular sekaligus. Penyakit-penyakit tidak menular (PTM) mulai mendominasi pola penyakit rawat jalan terbesar baik di rumah sakit maupun puskesmas seperti penyakit Hipertensi, Diabetes Mellitus, Gastritis, dan penyakit jantung. Sedangkan penyakit menular baik itu penyakit menular berbasis lingkungan seperti DBD, Malaria, TB Paru dan penyakit menular seksual seperti HIV AIDS masih tetap merupakan permasalahan kesehatan utama di Kota Dumai. Disamping itu penyakit *neglected diseases* seperti kusta dan filariasis masih terus dilakukan pengendalian dan pencegahan. Angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti polio, campak, difteri, pertusis, hepatitis B dan tetanus baik pada maternal maupun neonatal sudah tidak ditemukan lagi kecuali campak. Selain itu, munculnya *new emerging diseases* seperti COVID 19 pada awal tahun 2020 ini menambah lagi permasalahan penyakit menular yang perlu segera mendapatkan penanganan yang serius.

COVID 19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), yang diketahui pertama kali terjangkit di daerah Wuhan – China pada bulan Desember 2019. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *MERS (Middle East Respiratory Syndrome)* dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Sedangkan Novel coronavirus (2019nCoV) atau COVID-19 adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia.

Dewasa ini penyebaran Corona Virus Diseases (COVID) 19 di dunia cenderung meningkat dari waktu ke waktu termasuk di Indonesia. COVID 19 ini telah banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan telah dinyatakan COVID 19 sebagai pandemik oleh WHO dan ditetapkannya Infeksi COVID-19 sebagai BENCANA NASIONAL NON ALAM oleh Pemerintah pada tanggal 15 Maret 2020, maka perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID 19. Lebih lanjut melalui Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 31

Maret 2020 telah ditetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Diseases 2019 (COVID) 19 di Indonesia. Untuk itu, dalam rangka percepatan penanganan COVID 19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta keikutsertaan pihak swasta/BUMN dan masyarakat.

Kasus COVID 19 pertama kali ditemukan di Kota Dumai pada tanggal 3 Maret 2020 sebanyak 1 kasus (minggu ke 10) dan mengalami peningkatan yang signifikan pada minggu ke 12. Karena ada lonjakan kasus yang cukup tinggi tersebut, maka status Kota Dumai dinyatakan Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Corona Virus sesuai dengan Keputusan WaliKota Dumai Nomor 259/BPBD/2020 tanggal tanggal 19 Maret 2020. Peningkatan kasus COVID I9 Kota Dumai mencapai puncak pada minggu ke 16 (11 April 2020) dengan jumlah kasus sebanyak 320, dan setelah itu kasus COVID mulai menurun namun tetap berfluktuasi. Trend penyebaran kasus COVID di Kota Dumai dari sejak ditemukan (minggu ke 10) sampai minggu ke 25 (20 Juni 2020) adalah sebagai berikut:



Gambar 2.38: Trend Penyebaran kasus COVID 19 di Kota Dumai dari minggu ke 10 sampai dengan minggu ke 25 Tahun 2020.
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020

Sampai dengan minggu ke 25 atau per tanggal 20 Juni 2020, jumlah kasus COVID 19 yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 2.880 kasus dengan kasus COVID 19 terkonfirmasi positif sebanyak 19 kasus. Seluruh pasien yang terkonfirmasi positif COVID 19 tersebut sudah dinyatakan sembuh. Berfluktuasinya kasus COVID 19 di Kota Dumai salah satu penyebabnya adalah tidak dipatuhinya protokol kesehatan oleh masyarakat Kota Dumai

seperti tidak menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar rumah, tidak melakukan physical atau social distancing dan tidak melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) misalnya mencuci tangan pakai sabun, olahraga rutin, konsumsi makanan seimbang dengan buah dan sayur serta istirahat yang cukup.

21) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Persentase rumah tangga yang mempraktikkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meningkat, namun pencapaiannya masih jauh dari target yang ditetapkan. Salah satu indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang pencapaiannya rendah adalah perilaku merokok. Konsumsi rokok meningkat secara pesat dari tahun ke tahun dan saat ini Indonesia merupakan negara nomor 3 (tiga) dengan jumlah perokok tertinggi di dunia setelah Cina dan India. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Triwulan III (bulan September) tahun 2015 Propinsi Riau, pada kelompok makanan, pengeluaran untuk tembakau dan sirih menempati urutan ke tiga tertinggi setelah pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi termasuk minuman beralkohol, dan pengeluaran untuk padi-padian. Ini menunjukkan bahwa konsumsi rokok telah sampai pada situasi yang mengkhawatirkan dan merupakan epidemi yang mengancam terutama di bidang kesehatan karena menyebabkan penyakit jantung dan kanker yang dapat berujung pada kematian. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan kesehatan perokok dan orang lain yang terpapar asap rokok, tetapi mengancam ekonomi keluarga masyarakat miskin. Ironisnya, pelaku konsumsi rokok tidak hanya pada orang dewasa, namun juga pada remaja dan anak sekolah. Hal ini sebagai dampak dari maraknya iklan di media penyiaran dan media luar ruang serta pemberian sponsor oleh industri tembakau. Berbagai upaya untuk pengendalian dampak konsumsi rokok bagi kesehatan di Kota Dumai telah dilakukan salah satunya melalui penetapan Peraturan WaliKota Dumai Nomor 11 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota Dumai, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. Meskipun Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 tentang Nomor 7 Tahun 2011.

Pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok telah ditetapkan, namun masih banyak dijumpai orang yang merokok di angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya yang lainnya yang notabene telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Ini menunjukkan kebijakan pengendalian dampak konsumsi rokok belum didukung oleh semua pihak. Oleh sebab itu, upaya pengendalian dampak konsumsi rokok harus

dilaksanakan secara komprehensif sebagai tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat. Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) lainnya yang pencapaiannya juga rendah adalah perilaku memberantas jentik di rumah sekali seminggu. Salah satu penyebab masih tingginya angka kesakitan malaria dan DBD adalah karena masih rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk. Padahal upaya yang paling efektif untuk mencegah timbulnya penyakit DBD dan Malaria adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk secara serentak oleh seluruh warga masyarakat secara terus menerus.

22) Penggunaan Obat Rasional dan Pengawasan Obat dan Makanan

Walaupun ketersediaan obat dan vaksin cukup baik, tetapi pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan pada umumnya masih belum sesuai standar. Penggunaan obat generik sudah cukup tinggi, tetapi penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan belum optimal. Hal ini terutama disebabkan oleh masih rendahnya penerapan formularium dan pedoman penggunaan obat secara rasional. Di lain pihak, penduduk yang mengetahui tentang seluk-beluk dan manfaat obat generik, masih sangat sedikit. Pengetahuan masyarakat tentang obat secara umum juga masih belum baik.

Berdasarkan Laporan Indikator Peresepan di Puskesmas Tahun 2019 ditemukan beberapa puskesmas belum menggunakan obat secara rasional. Hal tersebut ditunjukkan dengan penggunaan obat-obatan antibiotik yang tinggi pada kasus ISPA Non Pneumoni di Puskesmas Dumai Barat (13,42%) dan Puskesmas Bukit Kayu Kapur (19,19%) namun masih di bawah angka batas rasional (20%). Demikian juga penggunaan obat-obatan antibiotik yang tinggi pada kasus Diare Non Spesifik di puskesmas Bukit Kayu Kapur (28,27%) sudah melebihi angka batas rasional (8%). Ditemukan juga penggunaan obat tidak rasional yakni penggunaan injeksi pada kasus myalgia di Puskesmas Bukit Kayu Kapur (7,33%), Puskesmas Sungai Sembilan (3,28%) dan Puskesmas Medang Kampai (1,04%) yang angkanya sudah melebihi angka batas rasional (1%).

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada kegiatan pengawasan obat dan makanan:

a. Apotik

Ditemukannya tidak tertibnya pengadministrasian kartu stok obat, ditemuannya penyimpanan obat yang bercampur dengan produk bukan obat di dalam lemari pendingin, ditemukannya penyimpanan obat tidak dengan wadah asli, dan ditemukannya penjualan produk jamu tanpa izin edar POM. Masih ada ditemukan yang tidak memiliki apoteker penanggung jawab yakni 1 apotik dari 41 apotik yang ada.

b. Toko Obat

Penemuan paling banyak adalah toko obat tidak memiliki izin atau izin toko obat yang sudah mati dan belum diperpanjang, tidak tertibnya pengadministrasian surat pesanan dan faktur pembelian obat, ditemukannya produk obat yang sudah kadaluarsa, ditemukannya penjualan obat keras (obat daftar G), dan ditemukannya penjualan produk jamu dan kosmetik tanpa izin edar POM. Masih banyak ditemukan toko obat yang tidak memiliki Asisten Apoteker penanggung jawab yakni sebanyak 22 toko obat dari 30 toko obat yang ada

c. Toko Makanan dan Minuman

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan paling banyak adalah kurangnya kebersihan toko dan kerapian penataan/penyusunan barang sehingga terlihat berantakan yang bisa mempengaruhi mutu produk, ditemukannya produk pangan luar negeri tanpa izin edar POM, ditemukannya produk pangan rumah tangga tanpa izin edar IRTP, ditemukannya produk berbahan kimia berdekatan dengan produk makanan, ditemukannya penjualan obat berlogo biru, ditemukannya produk pangan yang rusak dan kadaluarsa, ditemukannya produk pangan frozen menggunakan izin IRTP dan ditemukannya penjualan kosmetik tanpa izin edar POM. Pada tahun 2019, jumlah toko makanan minuman yang ada di Kota Dumai sebanyak 198 sarana.

d. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan paling banyak adalah IRTP tidak memiliki kelengkapan dokumen produksi seperti tidak mencatat jumlah bahan yang digunakan, jumlah yang produksi, jumlah yang diedarkan sehingga tidak bisa menelusuri bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan; ruang produksi yang sempit dan kebanyakan bergabung dengan dapur untuk memasak kebutuhan dibersihkan; tidak tersedianya sarana pembersihan/pencucian sesuai standar.

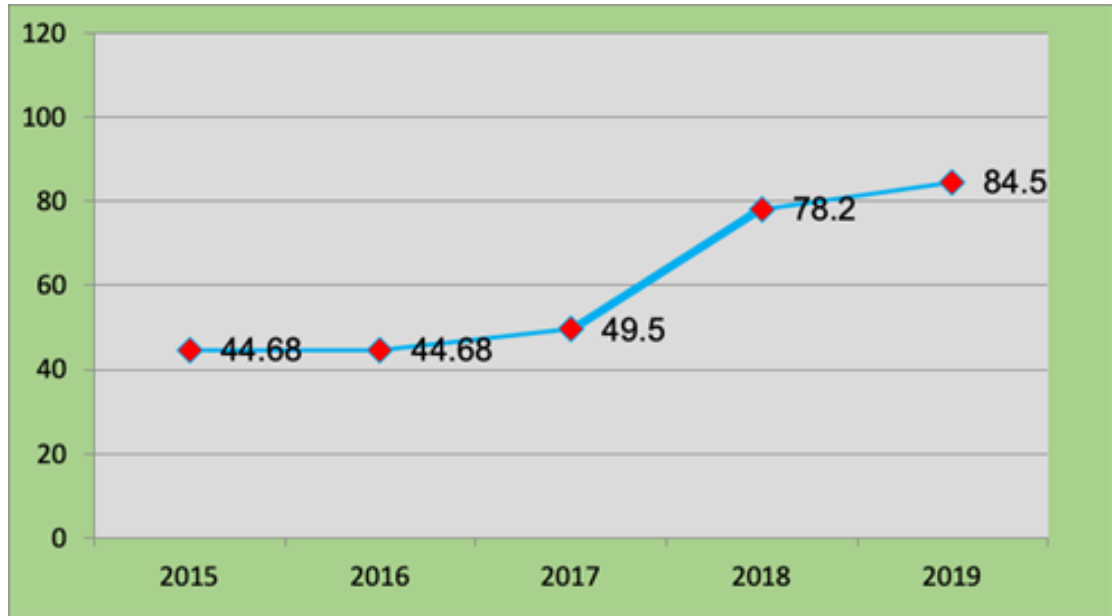
Selain itu, mutu sarana produksi makanan umumnya masih belum baik, akibat kurang efektifnya pengawasan dan pembinaan. Masih ada ditemukan IRTP dan jajanan anak sekolah yang masih menggunakan bahan-bahan berbahaya dalam proses pengolahan makanan dan minumannya seperti formalin, boraks dan bahan pewarna berbahaya. Pada tahun 2019, jumlah IRTP yang ada di Kota Dumai sebanyak 401 sarana.

23) Jaminan Kesehatan

Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis (menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran/PBI) sebanyak 151.547 orang yang terdiri dari Peserta PBI APBN sebanyak 62.249 orang dan peserta PBI APBD sebanyak 89.298 orang. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai pada tahun 2019 yakni sebanyak 146.887 orang, maka telah terealisasi sebesar 103,17% yang artinya telah melebihi target dan tingkat pencapaiannya baik.

Dinas Kesehatan Kota Dumai telah menetapkan kebijakan untuk lebih memfokuskan perhatian pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu. Dasar pemikirannya adalah bukan saja memenuhi kewajiban pemerintah tetapi juga berdasarkan kajian dan pengalaman bahwa akan terjadi percepatan perbaikan indikator kesehatan apabila lebih memperhatikan dan fokus pada pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu. Pada tahun 2019 Dinas Kesehatan Kota Dumai telah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin melalui pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rujukan di puskesmas-puskesmas se Kota Dumai yakni sebanyak 117.860 pasien rawat jalan, sebanyak 611 pasien rawat inap dan sebanyak 5.728 pasien rujukan.

Pertumbuhan penduduk Kota Dumai ditandai dengan adanya *window opportunity* di mana rasio ketergantungannya positif, yaitu jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari pada yang usia non-produktif. Jumlah penduduk Kota Dumai pada tahun 2019 adalah 308.812 orang. Dengan laju pertumbuhan sebesar 1,91% pertahun berdasarkan hasil dari Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2019, maka jumlah penduduk Kota Dumai diperkirakan akan meningkat pada tahun selanjutnya. Demikian juga masalah penduduk miskin yang sulit berkurang akan masih menjadi masalah penting. Secara kuantitas jumlah penduduk miskin dan mendekati miskin bertambah, dan ini menyebabkan permasalahan biaya yang harus ditanggung pemerintah bagi mereka. Tahun 2019 pemerintah baik Kota Dumai, Provinsi Riau dan Pusat harus memberikan uang premium jaminan kesehatan sebanyak 151.547 orang miskin dan mendekati miskin.



Gambar 2.39: Pencapaian Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Dumai Dari Tahun 2015 sampai dengan 2019
 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020)

Sampai dengan tahun 2019 jumlah penduduk Kota Dumai yang telah mempunyai jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS baik itu sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI APBN dan PBI APBD) ada sebanyak 151.547 orang, dan Non PBI (pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah/mandiri dan bukan pekerja) ada sebanyak 109.353 orang, sehingga total peserta Jaminan Kesehatan Kota Dumai ada sebanyak 260.900 orang. Dengan demikian pencapaian cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Dumai sebesar 84,5%. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai yakni sebesar 95%, maka angka tersebut belum mencapai target yang artinya Kota Dumai belum mencapai Universal Health Coverage (UHC).

Menurut peta jalan menuju Jaminan Kesehatan Nasional ditargetkan pada tahun 2019 semua penduduk Indonesia telah tercakup dalam JKN (*Universal Health Coverage-UHC*). Diberlakukannya JKN ini jelas menuntut dilakukannya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, serta perbaikan sistem rujukan pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu kinerja dan penampilan puskesmas perlu terus ditingkatkan yang salah satunya melalui peningkatan dan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya.

2.4.1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Terdapat beberapa indikator dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, yakni indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio tempat ibadah per satuan penduduk, persentase rumah tinggal bersanitasi, rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk, rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, panjang jalan dilalui roda empat, jalan penghubung dari ibukota Kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimal dilalui roda empat).

1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (Realisasi)

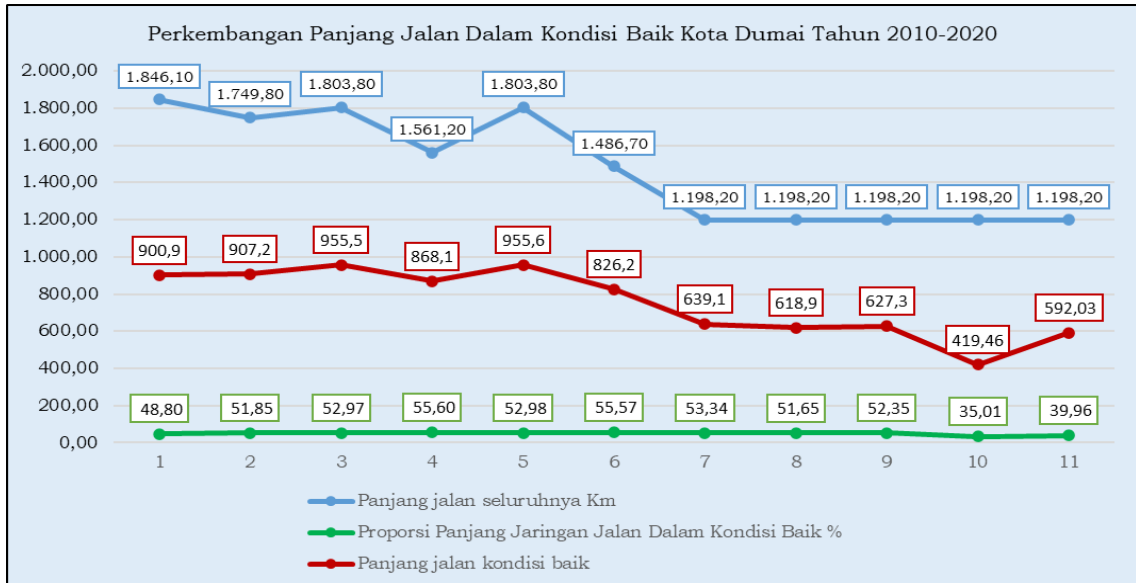
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik didapatkan dari formula panjang jalan kondisi baik (km) dibagi dengan panjang jalan seluruhnya (km). Perhitungan proporsi panjang jaringan jalan mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Tabel 2.81
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Dumai
Tahun 2010-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun										Pertumbuhan/ Tahun (%)	
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
1	Panjang jalan kondisi baik	Km	900,9	907,2	955,5	868,1	955,6	826,2	639,1	618,9	627,3	419,46	478,77	-5,00
2	Panjang jalan seluruhnya	Km	1.846,10	1.749,80	1.803,80	1.561,20	1.803,80	1.486,70	1.198,20	1.198,20	1.198,20	1.198,20	1.198,20	-3,70
3	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	48,80	51,85	52,97	55,60	52,98	55,57	53,34	51,65	52,35	35,01	39,96	-1,13

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021)

Melihat tren yang terjadi di Kota Dumai, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2013, yakni 48,80% pada tahun 2010 naik menjadi 55,60% pada tahun 2013. Pada tahun 2014 turun menjadi 52,97%, kemudian naik kembali pada tahun 2015 menjadi 55,57%. Kembali mengalami penurunan di tahun 2016 dan 2017 berturut-turut menjadi 53,33% dan 51,6%. Di tahun 2018 kondisinya semakin membaik karena terjadi peningkatan persentase panjang jalan dalam kondisi baik menjadi 52,35%. Berikut adalah Gambar 2.40 yang menunjukkan hasil dari indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Dumai.



Gambar 2.40: Perbandingan Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Dengan Panjang Jalan Seluruhnya (KM) di Kota Dumai Tahun 2010-2020 (Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kota Dumai Dalam Angka 2018)

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik diukur untuk menunjukkan gambaran mengenai tingkat pelayanan suatu jalan dalam melayani pergerakan lalu lintas. Pada Tabel 2.80 tersaji kondisi jalan di Kota Dumai per kecamatan pada tahun 2017 dan 2018. Dari tabel tersebut terlihat bahwa lebih dari 51% ruas jalan di Kota Dumai ada pada kondisi baik.

Tabel 2.82
Kondisi Jalan di Kota Dumai Per Kecamatan Tahun 2018-2019

Kecamatan	Panjang Ruas Jalan (KM)	Panjang Ruas Jalan (KM) Tiap Kondisi							
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Bukit Kapur	265,17	77,25	51,16	51,44	38,86	26,17	1,95	16,89	79,80
Dumai Barat	104,25	92,88	77,18	22,19	30,60	32,07	4,16	33,45	68,63
Dumai Kota	81,59	51,00	47,25	5,04	9,84	2,95	2,79	2,28	1,27
Dumai Selatan	88,67	99,47	90,66	11,39	18,93	10,39	1,15	11,42	21,69
Dumai Timur	56,32	95,88	93,41	26,73	31,60	9,79	3,70	10,08	13,61
Medang Kampai	252,83	143,10	33,46	87,86	21,74	40,52	16,05	21,06	220,61
Sungai Sembilan	349,41	67,73	26,44	39,19	10,24	55,78	5,67	56,77	175,88

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka, 2020

Pada tahun 2018 panjang jaringan jalan di Kota Dumai dalam kondisi baik meningkat dari 51,65% di tahun 2017 menjadi 52,35% pada tahun 2018. Begitu pula sebaliknya, pada tahun 2018 terjadi pengurangan panjang ruas jalan, baik dalam kondisi sedang, rusak ringan maupun rusak berat. Meskipun demikian, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Dumai masih jauh berada dibawah angka 0,65.

2) Panjang Jalan yang Dilalui Roda Empat

Indikator panjang jalan dilalui roda empat didapatkan dari hasil pembagian antara jumlah panjang jalan (km) dengan jumlah penduduk. Berikut adalah tabel yang menampilkan hitungan indikator panjang jalan dilalui roda empat di Kota Dumai.

Tabel 2.83
Panjang Jalan yang Dilalui Roda Empat di Kota Dumai
Tahun 2010-2019

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Panjang jalan seluruhnya (km)	900,91	907,19	955,53	868,07	955,550	826,19	639,05	1198,24	1198,24	1198,24
Jumlah Penduduk	254.337	259.913	268.022	274.089	280.109	285.967	291.908	297.638	303.292	303.292
Panjang jalan dilalui roda 4	3,54	3,49	3,57	3,17	3,41	2,89	2,19	4,03	3,99	3,99

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kota Dumai dan Dalam Angka, 2020)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil yang dihasilkan oleh indikator panjang jalan dilalui roda empat berfluktuatif dari 3,54 pada tahun 2010 menjadi 4,03 di tahun 2017 dan pada tahun 2019 panjang jalan yang dilalui roda empat menjadi 3,99. Tidak didapatkan informasi lebih lanjut mengenai indikator ini. apabila digambarkan dengan Gambar maka indikator panjang jalan dilalui roda empat di Kota Dumai.

3) Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk (Realisasi)

Formula yang digunakan untuk penghitungan rasio tempat ibadah persatuan penduduk adalah dengan membagi antara indikator jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk dan kemudian dikalikan dengan bilangan 1000.

Tabel 2.84
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Dumai
Tahun 2011 - 2019

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	1,89	1,94	1,83	1,83	1,79	1,84	1,79	1,89	1,92
Masjid	206	211	196	196	216	216	217	225	221
Mushola	217	219	217	217	216	216	210	242	231
Gereja Kristen	52	71	73	73	74	80	81	81	81
Gereja Katolik	4	6	6	6	8	6	6	6	6
Pura	10	1	1	1	1	1	1	1	1
Vihara	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Klenteng	1	12	12	12	12	10	10	10	47

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka, 2020

Hasil yang ditunjukkan oleh indikator rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Dumai menunjukkan hasil yang fluktuatif dengan

kecenderungan meningkat. Salah satu penyebabnya diduga adanya perubahan jumlah tempat ibadah dari tahun ke tahunnya, namun fluktuasi rasio tempat ibadah tersebut tidak selalu sebanding dengan jumlah tempat ibadah karena ada faktor lain yang berpengaruh, yaitu jumlah penduduk Kota Dumai yang selalu meningkat setiap tahunnya.

Hingga tahun 2019 rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Dumai masih sangat kecil, yakni 1,92. Hal ini berarti dari setiap 1.000 penduduk Kota Dumai, hanya 2 orang saja yang dapat mengakses tempat ibadah tersebut. Namun, sebenarnya ada ukuran lain yang harus diperhatikan, yaitu luas tempat ibadah karena biasanya satu tempat ibadah dapat menampung banyak umat. Selain itu, tempat ibadah juga dapat dipakai berkali-kali dalam satu hari sehingga memungkinkan para umat untuk bergantian dalam menggunakannya.

4) Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Indikator rumah tangga pengguna air bersih didapatkan dari perhitungan formula jumlah rumah tangga pengguna air bersih dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dikalikan dengan bilangan 100. Air minum/air bersih mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Sumber-sumber air yang digunakan oleh rumah tangga sebagai sumber air minum/air bersih antara lain: air kemasan/isi ulang, sumur bor/pompa/leding, sumur terlindung, air hujan, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap sumber utama air minum semakin mudah. Disisi lain juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terkait penggunaan air bersih untuk kesehatan juga semakin meningkat. Berikut Tabel 2.83 yang menguraikan rumah tangga pengguna air bersih di Kota Dumai

Tabel 2.85
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Dumai Tahun 2012-2020

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah rumah tangga pelanggan air bersih PDAM	1.051	1.052	1.052	1.053	1.053	1.052	560	279	672
Jumlah rumah tangga	67.864	70.007	70.027	71.492	78.809	82.478	94.965	91.553	94.441
Persentase Rumah tangga pengguna air (%)	1,55%	1,50%	1,50%	1,47%	1,34%	1,28%	0,59%	0,30%	0,71%

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2013-2021

Dari Tabel 2.85 di atas diketahui bahwa jumlah pelanggan air bersih PDAM di Kota Dumai tahun 2012-2017 terus mengalami peningkatan tetapi

pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan yaitu sebesar 0,59%, 0,80% dan 0,71% . Hal ini seiring dengan perkembangan kota dan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik.

Satu-satunya perusahaan daerah yang menyelenggarakan fungsi memproduksi air minum di Kota Dumai adalah PDAM. Pelanggan pengguna air bersih PDAM Kota Dumai menunjukkan angka yang menurun seperti yang tersaji pada Tabel 2.85.

5) Penyediaan Sumber Air Baku

Pelayanan air minum penduduk perkotaan di Kota Dumai dilakukan oleh PDAM Kota Dumai. Untuk mencukupi kebutuhan air penduduk perkotaan di Kota Dumai, PDAM memanfaatkan sumber air baku dari Sungai Mesjid. Air baku ini diolah di Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Jalan Jend. Sudirman Dumai dengan sistem pengolahan yang digunakan adalah sistem koagulasi, flokulasi, sedimentasi dan filtrasi. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh PDAM Kota Dumai tahun 2017, kapasitas total air baku (Sungai Mesjid) yang tersedia tahun 2017 adalah sebesar 5.321 liter/detik. Namun sampai dengan saat ini PDAM Kota Dumai belum mampu melayani kebutuhan air seluruh penduduk perkotaan di Kota Dumai. Berdasarkan informasi yang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai, pada tahun 2017 PDAM Kota Dumai hanya melayani 400 sambungan rumah, padahal tahun 2016 sudah melayani 1.300 sambungan rumah.

Untuk mencukupi kebutuhan air minum penduduk di Kecamatan Medang Kampai, Dinas PU Kota Dumai telah membangun SPAM IKK Medang Kampai dengan memanfaatkan sumber air baku berupa air permukaan dari Sungai Kemili. Sistem pengambilan menggunakan sistem sumuran/intake yang dibangun tahun 2011 kemudian di transmisikan ke unit produksi secara pompa. Air baku dari Sungai Kemili diolah di Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai dengan sistem pengolahan koagulasi, flokulasi, sedimentasi dan filtrasi. Sejak dibangun tahun 2010 sampai dengan saat ini SPAM IKK Medang Kampai belum melayani kebutuhan air penduduk di Kecamatan Medang Kampai.

6) Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk didapatkan dari formula jumlah daya tampung TPS yang dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan bilangan 1.000. Data mengenai rasio tempat pembuangan sampah sudah merupakan data jadi yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. Berikut adalah data mengenai indikator rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota Dumai.

Dalam rentang waktu tahun 2011-2019 jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rasio TPS per satuan penduduk seperti yang tersaji pada Tabel 2.84 dibawah ini:

Tabel 2.86
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk
Kota Dumai Tahun 2011-2019

Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS per Satuan Penduduk)	Unit TPS	12	12	12	12	12	14	15	15	20

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2019

Sistem pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai sebagaimana yang tertulis dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan sumber penghasil sampahnya. Pertama, sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga/ ruko. Sampah yang dihasilkan sebagian dikumpulkan oleh petugas sampah yang ditunjuk langsung oleh ketua RT, dan sebagian lainnya langsung diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup.

Kedua, sampah yang terdapat di pasar. Pengumpulan sampah pasar dilakukan oleh pengelola pasar yang kemudian dikumpulkan di tempat pembuangan sementara (TPS) yang telah disediakan, lalu kemudian diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup untuk dibawa menuju tempat pembuangan akhir (TPA). Ketiga, sampah yang dihasilkan oleh perusahaan. Sampah perusahaan atau pabrik sebagian dikelola langsung oleh perusahaan dimaksud untuk diangkut langsung ke TPA, sedangkan sebagian perusahaan lainnya langsung dilayani oleh petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup.

7) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Kondisi sanitasi Kota Dumai saat ini masih perlu peningkatan dan perbaikan. Dalam hal perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS), dari tahun ke tahun mengalami penurunan dimana pada tahun 2020 ditargetkan tidak ada lagi masyarakat yang melakukan BABS. Pemerintah Kota Dumai dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah berupaya meningkatkan sanitasi lingkungan baik dalam bentuk sarana dan prasarana fisik maupun bentuk pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2.87
Perkembangan Penyediaan Sanitasi Rumah Tangga Kota Dumai
Tahun 2014-2020

Indikator	Tahun						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase perilaku masyarakat Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	6,87	6,27	5,56	4,97	3,70	5,08	5,36
Persentase kepemilikan jamban cubluk	23,41	18,90	14,50	9,10	5,50	1,50	2,38
Persentase kepemilikan Tangki Septik individual	69,64	74,56	79,31	85,05	90,40	94,93	94,64
Persentase pengolahan air limbah domestic system komunal	0,07	0,27	0,63	0,88	0,50	-	-
Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Statistik Kesejahteraan Provinsi Riau, 2014-2020

Masyarakat di Kota Dumai saat ini masih didapati memiliki jamban cubluk dimana air limbah domestiknya belum diolah sebelum dibuang ke lingkungan. Namun telah terjadi penurunan kepemilikan jamban cubluk dari tahun ke tahun karena adanya program pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) berupa tangki septik individual dan komunal. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2020, sudah mencapai 94,64% masyarakat yang memiliki tangki septik individual. Untuk pengolahan air limbah domestik sistem komunal, mengalami penurunan di tahun 2020.

Kota Dumai saat ini sedang dalam tahap pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sehingga pengolahan air limbah domestik masyarakat akan maksimal dan mengurangi dampak pencemaran lingkungan akibat limbah domestic khususnya limbah tinja manusia.

8) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB didapatkan dari perhitungan luas ruang terbuka hijau dibagi dengan luas wilayah ber HPL/HGB. Data mengenai rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai ini merupakan data jadi, sehingga tidak diketahui mengenai data per sub indikatornya. Berikut adalah data realisasi rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/ HGB Kota Dumai.

Rasio Ruang Terbuka Hijau diatas diperoleh dengan membandingkan luas RTH dengan luas wilayah. Adapun luas wilayah yang digunakan adalah luas wilayah perkotaan Dumai yaitu wilayah diluar kawasan hutan. Dari data yang ditunjukkan oleh gambar di atas menunjukkan bahwa rasio ruang terbuka

hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB di Kota Dumai memiliki kecenderungan yang sama yakni 4,10% pada tahun 2011-2019.

Tabel 2.88
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB Kota Dumai Tahun 2011-2019

Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2019

2.4.1.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1) Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau

Berdasarkan data dari Dumai dalam angka tahun 2021, jumlah kepala keluarga Kota Dumai tahun 2020 yaitu 94.441 KK, terdapat 48.888 unit rumah di Kota Dumai dimana jumlah rumah tidak layak huni hasil verivali oleh pemerintah Kota Dumai adalah 9.724 unit. Dengan menggunakan variabel terkait dapat dihitung jumlah rumah layak huni Kota Dumai tahun 2020 yaitu 39.164 unit, sehingga angka rasio rumah layak huni Kota Dumai tahun 2020 yaitu 0,12.

Tabel 2.89
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	58,36 %	77,56 %	76,6 %	74,2 %	78,61 %	82,31 %

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2021

2) Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin

Pada tahun 2020, jumlah rumah tangga Kota Dumai yaitu 73.670, jika diasumsikan satu rumah tangga sama dengan satu rumah. Namun data dimana jumlah Rumah layak huni hasil verivali oleh pemerintah Kota Dumai 2017 yaitu 80.084 unit, sehingga angka rasio rumah layak huni Kota Dumai tahun 2017 yaitu 0,27. Berdasarkan data tahun 2017 tersebut menunjukkan

bahwa terdapat rumah tangga yang memiliki rumah lebih dari satu karena lebih banyak rumah layak huni dibandingkan dengan jumlah rumah tangga.

Tabel 2.90
Perkembangan Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Penduduk dan Bagi Rumah Tangga Miskin Kota Dumai Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Rumah Tangga	67.908	69.241	70.556	71.480	73.670
Kepemilikan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga termasuk Miskin	17.726	17.559	16.918	18.945	19.349

Sumber: BKKBN dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2019, Tahun 2020 Extrapolasi Tim

3) Jumlah Kawasan Kumuh, Rumah Tidak Layak Huni

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai, pada tahun 2020 tersisa 33,75 Ha kawasan kumuh perkotaan dan Rumah tidak layak huni sebanyak 9.724 pada tahun yang tersaji pada Tabel 2.89 berikut.

Tabel 2.91
Kawasan Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni Kota Dumai Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kawasan Kumuh (Ha)	127,60	127,60	121,23	66,70	38,45	33,75
Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	n/a	n/a	2.432	1.884	1.412	1.068 *)9.724

Keterangan:

*) Update data dari E-RTLH tahun 2020

Sumber: SK Kawasan Kumuh Kota Dumai Tahun 2020 dan Olah Data LKjIP Dinas Perkim Kota Dumai

4) Persentase Luas Permukiman yang Tertata

Formula yang didapatkan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2019 berdasarkan luas kawasan kumuh Kota Dumai yang telah tertata dari luas kawasan kumuh 127,6 Ha yaitu seluas 60,83 Ha. Berdasarkan Rancangan Perda Kota Dumai tentang RTRW Kota Dumai Tahun 2019-2039 luas permukiman Kota Dumai yaitu 27.687,63 Ha sehingga dengan menggunakan variabel terkait dapat disampaikan rasio permukiman layak huni Kota Dumai yaitu 0,99. Hal ini tidak lepas dari kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Dumai untuk mengurangi kawasan kumuh di Kota Dumai sehingga menghasilkan permukiman yang lebih tertata.

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Dumai, pada tahun 2015 terdapat 127,60 hektar kawasan kumuh perkotaan yang tertuang di dalam Surat Keputusan WaliKota Dumai Nomor 448/Bappeda/2015 berikut Surat Keputusan Perubahan Atas Keputusan WaliKota Dumai Nomor 448/BAPPEDA/2015 Tentang Lokasi Lingkungan dan Perumahan Kumuh Perkotaan Kota Dumai Nomor 831/BAPPEDA/2018.

Berdasarkan Tabel 2.88, Surat Keputusan WaliKota Dumai Nomor 448/Bappeda/2015 berikut Surat Keputusan Perubahan Atas Keputusan WaliKota Dumai Nomor 448/BAPPEDA/2015 Tentang Lokasi Lingkungan dan Perumahan Kumuh Perkotaan Kota Dumai Nomor 831/BAPPEDA/2018 dapat dihitung persentase lingkungan permukiman kumuh Kota Dumai tahun 2018 yaitu 0,03%. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Kota Dumai tahun 2018 yaitu 47,67%. Adapun lokasi lokasi lingkungan dan permukiman kumuh perkotaan yang dimaksud tersaji pada Tabel 2.90 berikut.

Tabel 2.92
Lokasi Lingkungan dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Dumai
Tahun 2019

Kawasan	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kawasan (Ha)
Laksamana Rimbas	Dumai Kota	Laksamana dan Rimba Sekampung	21,55
Dumai Kota	Dumai Kota	Dumai Kota	6,32
Bukit Bintan Jadi	Dumai Kota dan Dumai Selatan	Bukit Datuk, Bintan dan Sukajadi	21,46
STDI Rimbas	Dumai Barat dan Dumai Kota	Simpang Tetap Darul Ihsan dan Rimba Sekampung	13,97
Pangkalan	Dumai Barat	Pangkalan Sesai	11,30
Buluh Kasap	Dumai Timur	Buluh Kasap	7,15
Mukti Palas	Dumai Ttimur	Jaya Mukti dan Tanjung Palas	21,00
Teluk Binjai	Dumai Timur	Teluk Binjai	9,16
Bumi Ayu	Dumai Selatan	Bumi Ayu	5,61
Ratu Sima	Dumai Selatan	Ratu Sima	10,08
Total			127,60

5) Prasarana dan Sarana Utilitas

a. Penyediaan Infrastruktur Kawasan Pemukiman

Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas merupakan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan dan acuan dalam penerapan program-program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan.

Meningkatnya jumlah penduduk dan intensitas aktivitas pada kawasan perkotaan ini perlu untuk disikapi dan diantisipasi lebih awal oleh pemerintah daerah terkait. Hal ini perlu dilakukan mengingat fenomena tersebut dapat membangkitkan banyak permasalahan perkotaan terutama yang terkait dengan ketersediaan dukungan permukiman dan infrastruktur perkotaan.

Pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang kurang atau belum mengantisipasi dan mengakomodir perkembangan kawasan perkotaan akan menimbulkan permasalahan antara lain: (a) tidak meratanya penyediaan infrastruktur perkotaan, dan (b) tidak tersedianya lingkungan permukiman yang layak, tidak terkendalinya pembangunan permukiman pada daerah-daerah non-permukiman, dan (d) terjadinya permukiman kumuh.

Tabel 2.93
Perkembangan Penyediaan Jalan Lingkungan Kota Dumai
Tahun 2017-2020

Indikator	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Persentase Infrastruktur dasar dan utilitas umum di Kecamatan (%)	2,73	3,82	3,95	*)0,26
Jumlah Jalan Lingkungan Terbangun	23	81	129	*)129
Jumlah Drainase Lingkungan Terbangun	n/a	16	29	*)33

*) Pada tahun 2020 terjadi *refocusing* anggaran akibat bencana Covid-19 di Indonesia

Sumber: Olah Data LKjIP Dinas Perkim Kota Dumai dan Bidang Kawasan Pemukiman

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional maupun regional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai telah berkontribusi dalam rangka pembangunan/peningkatan infrastruktur dasar di Kota Dumai diantaranya melalui pembangunan jalan (semenisasi) dan drainase lingkungan. Pada tahun 2017, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai telah membangun sebanyak 23 ruas jalan pemukiman yang tersebar di beberapa kelurahan di Kota Dumai. Pada tahun 2018 terdapat penambahan pembangunan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 58 ruas jalan pemukiman serta 16 titik drainase (baik pembangunan baru maupun lanjutan). Selain itu juga terdapat pembangunan peningkatan kualitas kawasan kumuh yang berada di Kelurahan Dumai Kota.

Selanjutnya pada tahun 2019 dilakukan pembangunan infrastruktur jalan sebanyak 48 ruas jalan pemukiman (paving block dan semenisasi) dan 13 titik drainase serta peningkatan kualitas kawasan kumuh berupa pembangunan jalan/perkerasan kaku di Kelurahan Buluh Kasap. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat mendukung kegiatan masyarakat terutama di dalam pemukiman untuk dapat mengakses ke

berbagai lokasi yang berdampak pada peningkatan ekonomi dan sosial di kawasan.

b. Penerangan Jalan Umum (PJU)

Lampu jalan atau dikenal juga sebagai Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan. Fungsi utama lampu penerangan jalan umum (PJU) adalah memberikan pencahayaan buatan bagi pengguna jalan sehingga mereka merasa aman dalam melakukan aktivitas perjalanan di malam hari. Lampu Penerangan Jalan Umum merupakan barang-barang elektronik yang rentan atau dapat dikatakan memiliki umur pakai yang pendek, sehingga kegiatan perbaikan dan pemeliharaan mutlak dibutuhkan. Perbaikan dapat meliputi perbaikan jaringan, penggantian lampu yang mati, atau pun pengecekan kondisi PJU. Berikut disajikan perkembangan penyediaan PJU di Kota Dumai tahun 2017-2020

Tabel 2.94
Perkembangan Penyediaan PJU Kota Dumai Tahun 2017-2020

Indikator	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Ruas Jalan Dengan Sarana Penerangan Jalan Umum	369 Ruas Jalan	392 Ruas Jalan	412 Ruas Jalan	435 Ruas Jalan
Jumlah PJU Terbangun	31 Lokasi	23 Lokasi	20 Lokasi	23 Lokasi

Sumber: Olah Data LKjIP Dinas Perkim Kota Dumai dan Bidang Kawasan Pemukiman, 2021

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa di Kota Dumai, pada tahun 2017 terjadi peningkatan Pembangunan sarana PJU terhadap total Ruas Jalan yang dibangun sarana Penerangan Jalan Umum sebesar 9,17 %, sedangkan pada tahun 2018 pembangunan meningkat sebesar 14,63 %, pada tahun 2019 pembangunan meningkat sebesar 18,87 %, dan pada tahun 2020 pembangunan meningkat sebesar 23,54%

6) Rumah Tangga Pengguna Listrik

Indikator rumah tangga pengguna listrik didapatkan dari perhitungan formula jumlah rumah tangga pengguna listrik dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dikalikan dengan bilangan 100. Berikut adalah Tabel 2.87 rumah tangga pengguna listrik di Kota Dumai tahun 2012-2020.

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah pelanggan listrik di Kota Dumai tahun 2012-2020 terus mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2017 – 2020 mengalami penurunan berturut – turut yaitu sebesar 88,50%, 83,09%, 87,26% dan 89,03%. Hal ini seiring dengan perkembangan kota dan pertumbuhan

ekonomi yang semakin membaik. Pada Tabel 2.87 terlihat bahwa hampir seluruh wilayah Kota Dumai telah teraliri aliran listrik. Pada tahun 2020 sebanyak 89,03% rumah tangga telah teraliri aliran listrik.

Tabel 2.95
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Dumai
Tahun 2012-2020

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pelanggan listrik rumah tangga	48.511	54.873	59.766	64.162	68.432	94.761	74.414	79.890	84.082
Jumlah rumah tangga	67.006	68.522	70.027	71.492	72.977	83.863	89.558	91.553	94.441
Persentase Rumah tangga pengguna listrik (%)	72,40	80,08	85,35	89,75	93,77	88,50	83,09	87,26	89,03

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

7) Rasio Bangunan ber-IMB

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, dari tahun 2013-2018 terdapat 1.231 berkas pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang masuk ke OPD terkait, tetapi hanya sebanyak 32,74% (403 berkas) yang memperoleh izin, 0,89% (11 berkas) ditolak dan sisanya 66,37% (817 berkas) masih *pending*.

2.4.1.5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Rasio jumlah polisi pamong praja merupakan perbandingan antara jumlah polisi pamong praja dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk pada variabel rasio jumlah polisi pamong praja menggunakan data dari Badan Pusat Statistik. Rasio jumlah polisi pamong praja dihitung untuk mencari berapa jumlah petugas per 10.000 penduduk, dengan demikian kita akan mengetahui berapa besar pekerjaan yang dilakukan oleh polisi pamong praja, bila melihat jumlah sumber daya manusia yang terbatas dan jumlah penduduk yang cukup besar.

Rasio jumlah polisi pamong praja di Kota Dumai dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan dari 5,23 satpol PP per 10.000 penduduk tahun 2011 menjadi 1,52 satpol PP per 10.000 penduduk tahun 2020. Hal tersebut karena jumlah pamong praja yang semakin menurun sedangkan jumlah penduduk yang semakin bertambah terus menerus sehingga terjadi ketidakseimbangan rasio jumlah pamong praja di Kota Dumai.

Tabel 2.96
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk
Kota Dumai Tahun 2011-2020

Indikator	Tahun									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Polisi Pamong Praja	136	99	91	86	90	98	26	94	89	48*
Jumlah penduduk per 10.000*	25,99	26,80	27,41	28,01	28,60	29,19	29,76	30,33	30,06	31,68
Rasio jumlah pamong praja	5,23	3,69	3,32	3,07	3,15	3,36	0,87	3,10	2,96	1,52

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, 2019. Kota Dumai Dalam Angka, 2020* hanya data PNS.

2) Persentase Cakupan Patroli Petugas Satpol PP

Berdasarkan Permendagri No. 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri No.62 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, target nasional pelaksanaan patroli siaga trantibum adalah sebanyak 3 X dalam sehari. Cakupan patroli petugas Satpol PP Kota Dumai dari dapat dilihat pada Tabel 2.95.

Tabel 2.97
Persentase Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kota Dumai
Tahun 2011-2020

Indikator	Satuan	Tahun									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Cakupan patroli petugas Satpol PP	%	49,00	92,00	90,00	95,00	96,00	75,00	81,00	92,00	80,00	97,25

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, 2019 Data Tahun 2020 Kota Dumai Dalam Angka, 2021

Pada tahun 2019 terdapat 1.007 kegiatan penertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, dimana 80% jenis kegiatan penertibannya adalah penertiban PKL. Pada tahun 2020 jumlah penertiban sebanyak 4.043 dan 10,69% merupakan kegiatan penertiban PKL dan Baliho Kampanye sebanyak 86,57%.

3) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)

Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) merupakan perbandingan antara pelanggaran K3 yang

terselesaikan dengan Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP.

Berdasarkan data dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kota Dumai pada tahun 2011 ada sebanyak 132 kasus dan pada tahun 2019 kasus pelanggaran K3 di Kota Dumai berhasil diselesaikan sebanyak 166 kasus. Data selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.96 berikut.

Tabel 2.98
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Dumai Tahun 2011-2020

Indikator	Tahun									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	132	231	236	235	238	238	155	156	166	178

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, 2019 Data Tahun 2020 merupakan Extrapolasi Tim.

4) Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Dari data kantor kesbanglinmas Kota Dumai, petugas Linmas yang secara langsung berinteraksi dengan pada tahun 2011 adalah sebanyak 1.584 orang dan tahun 2020 menjadi 1.598 orang. Karena interaksi dengan masyarakat, maka anggota Linmas bertugas untuk membantu tugas polisi untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

Tabel 2.99
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Dumai Tahun 2011-2020

Indikator	Tahun									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1.584	1.584	1.590	1.593	1.599	1.599	1.590	1.590	1.597	1.598

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai, 2019. Data Tahun 2020 merupakan Extrapolasi Tim.

5) Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) merupakan perbandingan antara 100 orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota daerah pemekaran baru dengan 1 Wilayah kerja kabupaten /Kota. Adapun realisasi cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) adalah sebesar 30%. Cakupan ini adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat kegiatan

sosial kemasyarakatan. Perlindungan masyarakat terhadap bencana dimulai sejak Pra Bencana, Pada saat Bencana, Pasca Bencana secara terencana, terpadu dan terkoordinir.

6) Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dari rentang waktu tahun 2011-2019 menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif. Data Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.98 berikut.

Tabel 2.100
Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kota Dumai
Tahun 2011-2018

Indikator	Tahun							
	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2019
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	123	60	25	23	29	19	8	8

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, 2019

7) Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Kegiatan pembinaan politik daerah di Kota Dumai dari rentang tahun 2011-2019 berjumlah 1 (satu) kegiatan, kecuali pada tahun 2014, 2018 dan 2019 yang tanpa adanya kegiatan. Data Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.99 berikut.

Tabel 2.101
Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Dumai Tahun 2011-2019

Indikator	Tahun								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kegiatan pembinaan politik daerah	1 Keg	-	1 Keg	-	1 Keg	1 Keg	1 Keg	-	-

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, 2019

8) Resiko Bencana Kebakaran Permukiman

Salah satu permasalahan yang sampai saat ini menjadi isu penting untuk ditangani dalam urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah meningkatnya resiko bencana kebakaran yang disebabkan karena kepadatan pertumbuhan permukiman. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya manajemen pengurangan resiko bencana, khususnya kebakaran rumah penduduk/permukiman. Untuk Kota Dumai angka kejadian bencana kebakaran rumah penduduk/permukiman telah terjadi penurunan pada tahun 2018 yaitu sebanyak 10 unit rumah yang terbakar yang jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan kejadian kebakaran rumah penduduk/permukiman pada tahun 2016 dan 2017 yaitu sebanyak 66

unit dan 26 unit. Banyaknya kejadian kebakaran rumah penduduk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.100.

Tabel 2.102
Rekapitulasi Kejadian Kebakaran Permukiman di Kota Dumai Tahun 2013-2018

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Banyak Kejadian Kebakaran Rumah Penduduk	63 unit	34 unit	38 unit	66 unit	26 unit	10 unit

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2019

9) Persentase Penegakan PERDA

Persentase penegakan PERDA merupakan perbandingan antara Jumlah penyelesaian penegakan PERDA dengan Jumlah pelanggaran PERDA. Adapun realisasi Jumlah Pelanggaran PERDA pada tahun 2018 adalah sebesar 100% dapat diselesaikan. Pengawasan Terhadap Penegakan Perda Perizinan dan non Perizinan di Kota Dumai dengan target pengawasan sebesar 200 Pengusaha terealisasi juga 200 pengusaha dengan capaian kinerja 100%.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah.

2.4.1.6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Peningkatan sarana sosial di Kota Dumai terus ditingkatkan melalui proses pembangunan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial. Diharapkan melalui pembangunan sarana dan prasarana ini, diharapkan dapat memadukan penanganan berbagai aspek sosial serta dapat membantu masyarakat yang termarginalkan di Kota Dumai. Untuk jenis PD pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan pengemis di dalam panti. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota. Adapun kondisi aspek sosial di Kota Dumai dalam kurun waktu tahun 2012-2018 tersaji pada Tabel 2.101.

1) Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Sosial

Penerima bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari 26 Kategori yang ada hanya 24 Kategori yang termasuk dalam data

PMKS antara lain anak balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan kestabilan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, panyakid disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban penyalahgunaan narkoba, korban bencana alam, perempuan rawan sosial, keluarga fakir miskin, dan keluarga bermasalah sosial psikologis. Adapun saat ini kategori yang memperoleh bantuan sosial yaitu keluarga fakir miskin yang berjumlah sebanyak 17.882 KK tahun 2018. Pelaksanaan PMKS masing-masing indikator dapat dilihat pada Tabel 2.101.

2) Persentase PMKS yang Tertangani

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Berdasarkan Tabel 2.101 menunjukkan bahwa persentase PMKS yang tertangani pada tahun 2012 sebesar 33,06% kemudian pada tahun 2018 sebesar 40,19%.

Tabel 2.103
Aspek Sosial Kota Dumai Tahun 2012-2018

Uraian	Tahun							SAT
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Penduduk Penyandang Masalah Sosial								
Penduduk rawan Sosial dan Sarana								
1). Anak Jalanan	35	35	35	8	8	4	4	Jiwa
2). Gepeng (Gembel dan Pengemis)	81	106	106	27	27	12	12	Jiwa
3). Fakir Miskin	9,423	9,423	9,423	9,423	9,423	15.882	17.998	KK
4). Bayi Terlantar	18	18	18	32	32	334	307	Jiwa
5). Anak Terlantar	87	87	87	151	151	2292	2132	Jiwa
6). Lanjut Usia Terlantar	191	191	191	760	760	595	571	Jiwa
7). Penyandang Cacat Jiwa	392	392	392	122	122	423	424	Jiwa
8). Penyandang Cacat Ganda	0	0	0	0	0	0	0	Jiwa
9). Tuna Susila	96	96	96	356	356	0	0	Jiwa
10). Bekas Narapidana	61	61	61	38	38	0	0	Jiwa
11). Pengidap HIV/AIDS	159	159	159	159	0	0	0	Jiwa
12). Korban Penyalahgunaan NAPZA	23	23	23	30	30	196	196	Jiwa
Jumlah Panti Asuhan	0	0	0	0	0	0	0	
1). Panti Sosial Asuhan Anak	12	12	12	12	11	11	11	Buah
2). Panti Sosial Bina Remaja	0	0	0	1				Buah
3). Panti Sosial Tresna Wirda	0	0	0	0	1	1	1	Buah
Rumah singgah	0	0	1	1	1	1	1	Buah
Jumlah PMKS	0	182.074	183.963	0	182.009	19.738	21.644	Orang
1). PMKS Yang Tertangani	0	60.194	61.124	0	60.453	127	87	Orang
2). PMKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan	0	61.686	61.715	0	61.103	19.738	21.644	Orang
3). PMKS Yang Diberikan Bantuan	0	60.194	61.124	0	60.453	12.389	14.430	KK
4). Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	0	97,58	99,04	0	98,99	62,77	66,67	%
5) Persentase PMKS yang tertangani	0	33,06	33,23	0	33,21	64,34	40,19	%
1). Karang Taruna	33	33	33	33	33	33	33	KT
2). Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)	7	7	7	7	7	7	7	Orang
3). Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	64	64	66	66	66	66	66	Orang
4). Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	30	30	30	30	34	32	52	Orang
5). Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	12	12	12	12	12	11	11	LKS
6). Pekerja Sosial dan Pendamping PKH	5	5	5	6	14	30	31	Orang
7). Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	1	1	1	1	1	1	Lembaga
8). Keluarga Pioner	0	0	0	0	0	0	0	Buah
9). Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	5	5	5	5	5	4	4	Buah
10). Penyuluh Sosial	8	8	8	8	11	11	11	Orang
11). Wanita Pemimpin Kesjahteraan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	Orang
12). Dunia Usaha	0	0	0	0	0	0	0	Buah

2.4.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.4.2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

1) Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Tenaga kerja adalah modal dasar bagi pembangunan. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

TPAK dapat dipengaruhi oleh tingkat upah karena tingkat upah dapat mempengaruhi orang untuk masuk atau tidak ke pasar tenaga kerja, dimana tingkat jika upah tinggi maka makin banyak masyarakat akan masuk ke dalam pasar tenaga kerja dan secara otomatis meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Oleh karena itu upaya pemerintah Kota Dumai dalam rangka meningkatkan TPAK adalah dengan kebijakan upah minimum kota.

Dalam mengimplementasikan Kebijakan tentang Upah Minimum Kota, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai harus memiliki kesiapan kelembagaan mulai dari pengsosialisasian kebijakan, prosedur pelaksanaannya dan sistem pengawasan serta penindakan. Komitmen Birokrasi dan Komitmen dan perusahaan untuk melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, akan menghasilkan kinerja yang baik sehingga kebijakan ini akan terlaksana seoptimal mungkin.

Sementara dari sisi perusahaan atau pengusaha dengan adanya UMK tersebut mengharapkan terjadinya peningkatan kinerja dan perbaikan upah. Perbaikan upah berarti peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan permintaan barang dan jasa yang kemudian pada gilirannya secara makro mendorong perusahaan untuk menambah produksi.

Oleh karena itu pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai harus terus melakukan pengawasan dan hendaknya dilakukan secara merata dengan mengontrol seluruh perusahaan yang ada di Kota Dumai dengan inisiatif sendiri tanpa menunggu laporan terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.102 berikut.

Tabel 2.104
Data Ketenagakerjaan Kota Dumai Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	
Angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	65,55	65,53	64,17	69,28	67,15	
PHK	18	32	46	28	19	
Kasus PHK	18	32	26	17	19	
Orang Terkena PHK	65 Orang	75 Orang	46	28	49	
Rata-rata Kebutuhan Hidup Minimum	Berdasarkan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinyatakan bahwa survey untuk kebutuhan hidup individu minimum dilakukan selama 5 tahun kemudian		Berdasarkan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinyatakan bahwa survey untuk kebutuhan hidup individu minimum dilakukan selama 5 tahun kemudian		Berdasarkan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinyatakan bahwa survey untuk kebutuhan hidup individu minimum dilakukan selama 5 tahun kemudian	
Rata-rata Upah Minimum	2.453.000,00	2.655.372,50	2.886.655,44	3.118.453,87	3.383.834,29	
L. Usaha Angkutan, Penggundangan dan Komunikasi	16	Berdasarkan UU No 7 Tahun 1981 tentang wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan dimana sudah menjadi kewenangan Provinsi sehingga data untuk tahun 2017 yang ada tidak pernah disampaikan ke Kab/Kota		Berdasarkan UU No 7 Tahun 1981 tentang wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan dimana sudah menjadi kewenangan Provinsi sehingga data untuk tahun 2017 yang ada tidak pernah disampaikan ke Kab/Kota		
L. Usaha Bangunan	41			sda		sda
L. Usaha Industri Pengolahan	14			sda		sda
L. Usaha Jasa Kemasyarakatan	3			sda		sda
Kuangan Asuransi, Usaha Sewa Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	16			sda		sda
L. Usaha Listrik, Gas dan Air	137			sda		sda

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
L. Usaha Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dari Hotel	27			sda	sda
L. Usaha Pertambangan dan Penggalan	7			sda	sda
L. Usaha Pertanian, Perhutanan, Perburuhan dan Perikanan	11			sda	sda

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2019 dan Kota Dumai Dalam Angka 2021

2) Pencari Kerja yang Ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan adalah perbandingan jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar. Dalam rangka mengatasi dan menanggulangi pengangguran. Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) merupakan salah satu alternatif strategis yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Dumai, dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai. Penempatan tenaga kerja AKAD ini memiliki berbagai dimensi kepentingan, bagi tenaga kerja itu sendiri merupakan hak untuk mendapatkan pekerjaan, meningkatkan keterampilan, dan meningkatkan kesejahteraan. Sementara bagi Pemerintah Kota Dumai sebagai penyelenggara program ini bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran di daerah dan memperluas kesempatan kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.103 berikut.

Tabel 2.105
Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Dumai Tahun 2016- 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Pencari Kerja Yang Mendaftar	Orang	5.167	5.646	4.861	5.531	4.878	-0,66
2	Pencari Kerja Yang Ditempatkan	Orang	1.200	1.210	2.112	1.524	5.474	76,68
3	Rasio Pencari Kerja yang Ditempatkan	%	23,22	21,43	43,45	27,55	112,22	91,42

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

3) Jumlah Pengangguran Terbuka

Sektor formal hanya mampu menyerap sekitar 30% angkatan kerja. Sekitar 70% angkatan kerja tetap bekerja di sektor pertanian dan sektor informal lainnya. Keberhasilan Pemerintah menekan laju inflasi dan tingkat bunga patut terus ditingkatkan. Namun, itu saja tidak cukup mengatasi pengangguran. Manfaatnya baru dinikmati sekelompok kecil pengusaha besar dan menengah. Pengusaha kecil dan pekerja keluarga atau pekerja mandiri di sektor informal belum menikmatinya secara signifikan. Oleh sebab itu, untuk 5 tahun yang akan datang, kebijakan penanggulangan pengangguran harus diarahkan pada: pertama, meningkatkan daya serap sektor formal dengan mendorong dunia usaha yang bersifat padat karya seperti agrobisnis dan industri kecil. Pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia.

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15-64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Data jumlah pengangguran terbuka selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.106
Perkembangan Jumlah Pengangguran Terbuka di Kota Dumai
Tahun 2014-2020

Indikator	Tahun							Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Laki-laki	3.174	3.461	3.511	8.288	4.869	5.513	6.961	24,13
Perempuan	1.378	1.757	1.656	3.846	3.346	4.210	5.044	31,11
Jumlah	4.552	5.218	5.167	12.134	8.215	9.723	12.005	26,34

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 2021

Pada saat yang sama, akses pengusaha kecil dan pekerja mandiri memperoleh pelatihan serta kompetensi SDM untuk itu harus ditingkatkan dengan tetap menekankan ketrampilan untuk berwirausaha sebagai prioritas dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

Berbagai laporan dari lembaga studi yang menganalisis dampak Covid-19 menyatakan bahwa akan terjadi pelambatan ekonomi dunia di tahun 2020 ini, tidak terkecuali Indonesia. Lebih khusus tentang dampak pada sektor ketenagakerjaan, kontraksi ekonomi secara langsung mempengaruhi penyempitan lapangan Kerja. Diperkirakan ada beberapa sektor tertentu yang menjadi penyumbang mayoritas hilangnya pekerjaan dan penurunan jam kerja diantaranya meliputi sektor perdagangan ritel, akomodasi dan makanan, dan manufaktur. Pada negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah, sektor- sektor yang terkena dampak besar umumnya memiliki proporsi pekerja informal yang tinggi dimana para pekerjanya tidak memiliki jaminan sosial, atau punya tetapi dalam keadaan minimal. Para pekerja ini kini berada dalam kondisi paling rentan di antara kelompok pekerja lainnya (Muhyiddin, 2020)

4) Keselamatan dan Perlindungan

Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja adalah dengan memberikan perlindungan pada pekerja selama dia bekerja. Maksud dari pemberian perlindungan ini adalah agar pekerja merasa aman dan nyaman dalam bekerja dan merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan instrumen yang melindungi

pekerja, perusahaan, lingkungan, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.105 berikut.

Tabel 2.107
Keselamatan dan Perlindungan di Kota Dumai Tahun 2014- 2020

Indikator	Tahun						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Keselamatan dan Perlindungan	151	165	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan dimana keselamatan dan perlindungan tenaga kerja sudah menjadi kewenangan provinsi sehingga data untuk tahun 2016-2020 tidak lagi menjadi urusan pemerintahan Kota Dumai.

5) Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Perselisihan buruh dan pengusaha yang biasa terjadi adalah masalah upah minimum. Penentuan besaran upah yang dapat memuaskan kedua pihak sangat sulit dilakukan sehingga dibutuhkan kearifan dari keduanya. Di Kota Dumai hampir setiap perselisihan dapat diselesaikan dan tidak menimbulkan dampak berkepanjangan sehingga semua masalah 100% dapat diselesaikan. Data selengkapnya mengenai angka perselisihan buruh dan pengusaha dapat dilihat dalam Tabel 2.106 berikut.

Tabel 2.108
Perselisihan Buruh dan Pengusaha di Kota Dumai Tahun 2014-2020

Indikator	Tahun						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha	19	39	12	14	55	49	38

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

6) Rasio Lulusan S1, S2 dan S3

Tingkat pendidikan tenaga kerja dapat diukur dari persentase Angkatan Kerja Kota Dumai yang berasal dari Lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai Tahun 2017-2020 jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pendidikan SLTA ke bawah. Pendidikan dan Keterampilan rendah, menurut BPS Tahun 2020,

jumlah penduduk usia kerja 15 tahun keatas (tenaga kerja) Kota Dumai yang berpendidikan SMP ke bawah sebanyak 22.899 orang 25,49% (Dumai Dalam Angka, 2021). Kesan kalah sebelum bertanding cukup memberikan warna bagi tenaga kerja di daerah ini untuk bersaing dengan tenaga kerja dari luar. Keberpihakan terhadap tenaga kerja tempatan perlu, tetapi harus diberikan secara profesional dengan tetap mempertimbangkan aspek persaingan yang sehat.

Dengan data tersebut, kebijakan ketenagakerjaan khususnya untuk menekan angka pengangguran di Kota Dumai, maka sebagian besar angkatan kerja berpendidikan rendah tersebut harus dipersiapkan menjadi pekerja mandiri atau menciptakan kesempatan kerja melalui usaha-usaha kecil. Untuk itu perlu ditingkatkan latihan kewirausahaan dengan dukungan penyediaan modal usaha mandiri dan usaha kecil.

Tabel 2.109
Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Dumai Tahun 2017-2020

Pendidikan tertinggi	2017					2018					2019					2020				
	Angkatan Kerja					Angkatan Kerja					Angkatan Kerja					Angkatan Kerja				
	Bekerja		Pengangguran terbuka		Jumlah Total	Bekerja		Pengangguran terbuka		Jumlah Total	Bekerja		Pengangguran terbuka		Jumlah Total	Bekerja		Pengangguran terbuka		Jumlah Total
	Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%	Jumlah	%	
Tidak Pernah Sekolah/Belum Tamat SD/Tamat Sekolah Dasar	33.198	26,87	2.353	19,39	35.551	30.039	23,49	1.263	15,37	31.302	31.233	22,21	815	8,38	32.048	28.281	21,01	1.951	16,25	30.232
Sekolah Menengah Pertama	21.084	17,07	2.474	20,39	23.558	21.850	17,08	2.900	35,30	24.750	22.923	16,30	1.222	12,57	24.145	21.781	16,18	1.118	9,31	22.899
Sekolah Menengah Atas	30.682	24,83	5.540	45,66	36.222	36.802	28,77	1.267	15,42	38.069	33.771	24,02	1.479	15,21	35.250	34.754	25,82	3.291	27,41	38.045
Sekolah Menengah Atas Kejuruan	19.894	16,10	1.485	12,24	21.379	20.389	15,94	1.473	17,93	21.862	23.521	16,73	4.058	41,74	27.579	24.715	18,36	3.104	25,86	27.819
Diploma I/II/III/Akademi	5.699	4,61	143	1,18	5.842	6.586	5,15	230	2,80	6.816	8.330	5,92	1.114	11,46	9.444	6.248	4,64	859	7,16	7.107
Universitas	12.993	10,52	139	1,15	13.132	12.231	9,56	1.082	13,17	13.313	20.822	14,81	1.035	10,64	21.857	18.802	13,97	1.682	14,01	20.484
Jumlah/Total	123.550	100,00	12.134	100,00	135.684	127.897	100,00	8.215	100,00	136.112	140.600	100,00	9.723	100,00	150.323	134.581	100,00	12.005	100,00	146.586
TPT				8,94					6,04					6,47					8,19	

Sumber: BPS Kota Dumai, 2020

Tabel 2.110
Perkembangan Rasio Jumlah Lulusan Sarjana S1 dan S2 terhadap Jumlah Penduduk Kota Dumai

Indikator	Tahun						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Lulusan S1 / S2 / S3	678	725	705	496	568	555	554
Jumlah Penduduk	280.109	285.967	291.908	297.638	303.292	302.070	316.782
Persentase Pekerja Lulusan S1 / S2 / S3	0,24%	0,25%	0,24%	0,17%	0,19%	0,18%	0,17%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 2021

Tabel 2.111
Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Yang Dilatih Kota Dumai Tahun 2011-2019

No	Tahun	Pendaftar Pelatihan Berbasis Masyarakat	Tenaga Kerja yang dilatih	Sajian data dimaksud diatas
1	2011	196	50	25,51
2	2012	215	60	27,91
3	2013	206	56	27,18
4	2014	297	96	32,32
5	2015	166	32	19,28
6	2016	204	80	39,22
7	2017	147	16	10,88
8	2018	161	58	36,02
9	2019	186	48	25,81

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2020

2.4.2.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah upaya terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan untuk meningkatkan wawasan, kepedulian, perhatian, kapasitas perempuan, dan perlindungan anak. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender.

1) Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan di beberapa instansi yang ada di Kota Dumai cenderung mengalami peningkatan yang diukur dalam persentase partisipasi perempuan di 166ngkata pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada 166ngkata pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan.

Pekerja perempuan di 167ngkata pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan PNS dan Non PNS serta di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). Berdasarkan Tabel 2.110 menunjukkan selama periode tahun 2015-2020 terjadinya penurunan jumlah PNS perempuan di 167ngkata pemerintah dengan pertumbuhan -2,91%. Walaupun terjadi penurunan jumlah PNS perempuan selama periode tersebut, namun partisipasi perempuan di 167ngkata pemerintah mengalami peningkatan dari 64,18% tahun 2015 menjadi 66,27% tahun 2020 dengan pertumbuhan 0,65% per tahun. Kondisi ini disebabkan oleh penurunan jumlah PNS secara keseluruhan sebesar -3,51% per tahun. Sementara di Lembaga DPRD turun sebesar -11,33% selama tahun 2015-2020. Berikut disajikan data partisipasi perempuan yang bekerja di beberapa instansi pemerintah dan Lembaga DPRD di Kota Dumai.

Tabel 2.112
Partisipasi Perempuan di Instansi Pemerintah Kota Dumai
Tahun 2015-2020

Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah Pegawai di Lembaga Pemerintah	Orang	4.746	4.661	4.094	4.008	4.087	3.946	-3,51
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah PNS	Orang	3.046	2.969	2.665	2.612	2.684	2.615	-2,91
Partisipasi perempuan dilembaga swasta	%	64,18	63,70	65,10	65,17	65,67	66,27	0,65
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	14,29	13,33	13,33	13,33	13,33	6,67	-11,33

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2016-2021

2) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi 167ngkatan kerja perempuan adalah proporsi jumlah partisipasi 167ngkatan kerja perempuan terhadap jumlah 167ngkatan kerja perempuan. Partisipasi 167ngkatan kerja perempuan ini menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total penduduk perempuan usia kerja.

PAK perempuan dihitung dengan membandingkan antara jumlah 167ngkatan kerja perempuan dengan penduduk perempuan usia kerja. Semakin besar PAK perempuan, maka semakin banyak penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, pada tahun 2014 partisipasi 167ngkatan kerja

perempuan dari yang semula 1.378 pada naik menjadi 11.198 pada tahun 2019. Berikut data partisipasi angkatan kerja perempuan Kota Dumai tahun 2014-2019.

Tabel 2.113
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Dumai
Tahun 2014-2019

Indikator	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	1.378	3.857	10.442	10.442	10.442	11.198

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020

3) Cakupan Kekerasan Seksual

Adanya seks bebas dan pengaruh negatif globalisasi bagi anak dan remaja menjadi salah satu isu strategis di daerah maupun di pusat akan memicu adanya kekerasan seksual. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, pada tahun 2014 jumlah pelaku seks bebas bagi remaja di sebanyak 30 pelaku dan tahun 2018 menurun menjadi 26 pelaku. Sedangkan pengaruh negatif globalisasi bagi anak dan remaja sebesar 140 pada tahun 2014 dan menurun menjadi 38 pada tahun 2018 yang dapat dilihat pada Tabel 2.112 dibawah ini:

Tabel 2.114
Jumlah Pelaku Seks Bebas Bagi Remaja dan Pengaruh Negatif Globalisasi
Bagi Anak dan Remaja Tahun 2014-2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah pelaku seks bebas bagi remaja	30	32	36	63	26
Pengaruh negatif globalisasi bagi anak dan remaja	140	167	198	320	38

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020

4) Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender menjadi salah satu isu strategis di daerah maupun di pusat. Sampai tahun 2016 di Kota Dumai terdapat beberapa permasalahan terkait pengarusutamaan gender yang perlu diperhatikan bersama, diantaranya:

1. Dari 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Dumai, masih ada OPD yang belum melaksanakan/menyusun anggaran pembangunan

berdasarkan analisis gender pada program/kegiatan di OPD yang bersangkutan dengan rincian:

- a. Dari 34 OPD yang ada, baru 2 OPD yang responsif gender;
 - b. Dari total 33 kantor kelurahan di Kota Dumai, seluruhnya belum responsif gender;
 - c. Dari 10 Puskesmas yang ada, baru 7 Puskesmas yang responsif gender.
2. Sarana dan prasarana belum memenuhi setiap kalangan. Dari 152 sekolah yang terdaftar di Dinas Pendidikan Kota Dumai, baru 5 sekolah yang responsif gender.
 3. Fasilitas umum belum menyediakan tempat-tempat privasi/khusus seperti ruang laktasi, toilet untuk penyandang disabilitas, dll.
 - a. Dari 2 pelabuhan penumpang yang ada, baru 1 pelabuhan penumpang yang sudah responsif gender;
 - b. Dari 1 terminal penumpang yang ada, belum responsif gender;
 - c. Dari 1 bandara yang ada, belum responsif gender;
 - d. Dari 4 taman wisata milik pemerintah yang ada, belum responsif gender.
 4. Belum semua SDM aparatur perencanaan paham tentang perencanaan dan penganggaran terkait program/kegiatan responsive gender.
 5. Masih kurangnya ketersediaan SDM aparatur yang memahami, mampu mengadvokasikan dan melakukan sosialisasi serta pendampingan terkait penyusunan GAP dan GBS.

5) Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan dua ukuran yang selalu digunakan untuk menilai keberdayaan perempuan dan kontribusi pembangunan kepada perempuan. Beberapa kalimat pembuka pada Human Development Report (HDR) pertama yang dipublikasikan oleh UNDP pada tahun 1990 tersebut menekankan bahwa pada hakikatnya pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan dan bukan sebagai alat bagi pembangunan. Disadari, keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung pada peran serta seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan. Selain sebagai pelaku, perempuan dan laki-laki sekaligus sebagai pemanfaat hasil akhir dari

pembangunan. Berikut disajikan data Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang ada di Kota Dumai.

Tabel 2.115
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IGD) Kota Dumai Tahun 2017-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja			
			2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,97	90,52	90,82	90,86
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	59,49	59,90	56,78	52,97
3	Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD	%	na	na	na	4,57
4	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten/Kota	%	0,05	0,05	0,11	0,06
5	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	7,97	9,98	9,53	10,29

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Indikator gender digunakan untuk mengetahui perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Keadilan gender merupakan kondisi adil yang diharapkan pada sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan dan laki-laki memiliki peluang sama pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmoni.

Untuk itu statistik gender menjadi hal krusial untuk semakin di lengkap, sehingga bisa di lakukan analisa mendalam sebagai pijakan untuk pembuatan kebijakan yang tepat sasaran dan sudah pasti ber-responsive gender. Berikut beberapa indikator yang menggambarkan perkembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Dumai selama kurun waktu 2016-2019, antara lain:

Tabel 2.116
Indikator Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak Kota Dumai 2016-2019

Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Rasio KDRT	0,01	0,008	0,01	0,01
Cakupan perempuan korban kekerasan terlatih (%)	Na	Na	4,40	6,07
Jumlah SDM yang terlatih KTP/KTA (orang)	Na	Na	20	150
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	Na	Na	82,76	93,8
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan terlatih di puskesmas mampu KTP/A dan PPT/PKT di rumah sakit (%)	Na	Na	31,03	91,42
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu (%)	Na	Na	Na	18
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyediaan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	Na	Na	34,48	92
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	Na	Na	60,34	100
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	Na	Na	0	0,78
Cakupan layanan terintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	Na	Na	96,55	82
Rasio APM perempuan/laki-laki di SD (%)	96,54	101	91,5	97,48
Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP (%)	88,53	103	78,53	115,90
Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA (%)	69,15	103	71,56	136,87
Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi (%)	Na	Na	16,74	Na
Rasio mlekk huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun (%)	Na	Na	97,52	99,55
Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan sektor non pertanian (%)	0,13	0,08	45	0,08
Persentase SDM terlatih KTP/KTA (%)	0	0	77,7	57,14
Cakupan perempuan korban KDRT yang terlatih (%)	0	0	4,40	6,07
Persentase perangkat daerah yang responsif gender (%)	Na	Na	29,4	61,8
Cakupan puskesmas ramah anak (%)	40	40	100	100
Cakupan sekolah ramah anak (%)	1,6	3,5	5,7	37
Jumlah taman bermain ramah anak	2	2	1	1
Jumlah ruang bermain ramah anak	2	6	10	17
Cakupan kelurahan layak anak (%)	24	24	24	100
Cakupan Kecamatan layak anak (%)	71	71	71	100
Cakupan forum anak tingkat kelurahan (%)	24	24	24	100
Cakupan forum anak tingkat Kecamatan (%)	71	71	71	100
Jumlah kader kami berlian	20	20	140	200
Jumlah informasi layak anak (ILA)	16	28	30	34

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, 2020

2.4.2.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

1) Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama dihitung berdasarkan rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (Kg) dibagi dengan jumlah penduduk. Ketersediaan pangan utama ini perlu menjadi perhatian karena pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap orang. Persentase ketersediaan pangan utama di Kota Dumai dari tahun 2010-2020 tersaji pada Tabel 2.115.

Tabel 2.117
Ketersediaan Pangan Utama Kota Dumai Tahun 2010-2020

Indikator	Tahun										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Ketersediaan Pangan Utama* (%)	42,44	46,15	36,84	26,50	41,36	35,54	38,08	15,18	16,91	2,26	6,98

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai dan Riau Dalam Angka, 2021. Catatan Tahun 2019-2020 Hanya Menghitung Dari Jumlah Produksi Beras Lokal.

Bahan pangan utama (beras) persentasenya diambil dari rata-rata stok akhir data penerimaan dan penyaluran beras perum BULOG ditambah dgn produksi beras Kota Dumai per jumlah penduduk Kota Dumai. Terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkatkan tekanan pada kebutuhan pangan.

Berdasarkan Tabel 2.116 tersebut terlihat bahwa hanya ada 3 komoditi pangan (ubi kayu, buah-buahan dan daging ayam) yang ketersediaannya surplus, dengan kata lain kebutuhan pangan masyarakat Dumai terhadap komoditi tersebut dapat terpenuhi, bahkan ketiga komoditi tersebut berpotensi untuk diekspor ke daerah lain. Sedangkan untuk komoditi kedelai, kacang hijau, sagu, dan telur ketersediaannya harus sepenuhnya diimpor dari luar Dumai.

Tingginya ketergantungan impor pangan khususnya terhadap komoditi beras dikarenakan kebutuhan konsumsinya di tingkat masyarakat sangat tinggi. Hal ini terbukti dari besarnya konsumsi beras masyarakat Dumai (89,40 kg/kapita/tahun) yang melebihi rata-rata tingkat konsumsi beras dunia yaitu sebesar 60 kg/kapita/tahun. Meskipun angka tersebut masih berada di bawah rata-rata tingkat konsumsi beras nasional 104 kg/kapita/tahun.

Tabel 2.118
Jumlah Produksi, Kebutuhan Konsumsi dan Pasokan Komoditas Pangan
(Ton) Kota Dumai Tahun 2018 dan 2020

No.	Komoditi Pangan	Produksi	Kebutuhan Konsumsi	Pasokan Pangan	Keterangan
1	Beras	1.975,70	28.320,31	-26.344,61	Defisit
2	Jagung	1.004,30	537,31	466,99	Surplus
3	Kedelai	-	2.039,09	(2.039,09)	Defisit
4	Kacang tanah	31,25	457,85	(426,60)	Defisit
5	Kacang Hijau	1,00	149	(148)	Defisit
6	Ubi jalar	-	671,87	(671,87)	Defisit
7	Ubi kayu	4.265,51	997,87	3.267,64	Surplus
8	Sagu	0,00	117,00	(117,00)	Defisit
9	Buah-buahan	1.204,75	20.876,00	(19.671,25)	Defisit
10	Sayuran	4.404,60	26.094,00	(21.689,4)	Defisit
11	Daging sapi	542,29	506,20	36,09	Surplus
12	Daging ayam	1.623,50	1.278,30	345,2	Surplus
13	Telur	67,57	2.173,30	(2.105,73)	Defisit
14	Ikan	564,77	9.217,00	(8.652,23)	Defisit

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, 2019 dan Provinsi Riau Dalam Angka, 2021. Untuk beras menggunakan data tahun 2020, sementara komoditas lainnya data tahun 2018.

Tingginya impor beras ini terjadi karena belum optimalnya penganekaragaman/diversifikasi konsumsi pangan lokal. Dengan kata lain, masyarakat masih beranggapan bahwa beras merupakan makanan pokok dimana kebutuhannya tidak dapat digantikan oleh pangan lokal lainnya. Berikut adalah tabel pencapaian skor pola harapan pangan Kota Dumai.

Tabel 2.119
Pencapaian Skor pola Harapan Pangan Kota Dumai
Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun		
	2017	2018	2021
Skor PPH Konsumsi	81,70	101,01	98,04

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Dumai Tahun 2021

Disisi lain, rendahnya produksi pangan khususnya beras terjadi karena terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Sementara untuk menambah luasan kawasan pertanian ini sangat sulit dikarenakan kebanyakan lahan yang berpotensi untuk dijadikan sebagai lahan pertanian merupakan kawasan hutan. Agar luas kawasan pertanian ini ke depannya

tidak semakin berkurang, maka sebaiknya lahan pertanian yang ada ditetapkan sebagai lahan pertanian abadi atau berkelanjutan.

Hal ini sangat diperlukan dalam rangka tidak dialih fungsikan ke sector non pertanian. Jumlah alih fungsi lahan dari Lahan Pertanian menjadi Non Pertanian Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, pada tahun 2011 berjumlah 4.139 dan pada tahun 2017 menurun menjadi 2.774,30 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.118 berikut.

Tabel 2.120
Jumlah Alih Fungsi Lahan dari Pertanian menjadi Non Pertanian Kota Dumai Tahun 2011–2017

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dari Pertanian menjadi non pertanian	4.139	3.586	3.045	2.804	2.614	3.038	2.774,30

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2019

2) Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Konsumsi energi dari umbi-umbian sebagai salah satu pangan utama masih cukup rendah sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi sehingga terjadi peningkatan peralihan konsumsi pangan padi-padian (beras) ke konsumsi umbi-umbian dan pati (sagu) sebagai salah satu usaha diversifikasi pangan di Provinsi Riau. Hal ini sangat potensial dilaksanakan karena:

- a. Potensi produksi pangan pokok padi sudah semakin terbatas karena lahan untuk pengembangan sangat terbatas dan jumlah penduduk semakin meningkat;
- b. Komoditi sagu memiliki potensi produksi yang tinggi sehingga sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi pangan alternatif;
- c. Sagu sudah menjadi makanan budaya masyarakat Riau sehingga dapat dikembangkan dan disosialisasikan dengan cepat di masyarakat;
- d. Sudah dimulainya pengembangan pangan alternatif sagu di Provinsi Riau;
- e. Komitmen pemerintah untuk mengangkat komoditi ini menjadi titik awal kebangkitan sagu sebagai pangan alternatif sumber karbohidrat.

Konsumsi protein Kota Dumai tahun 2016-2020 memperlihatkan tren yang cenderung menurun, namun terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2020. Pada tahun 2020, total konsumsi protein Kota Dumai sebesar 60,27 gram/kapita/hari berada diatas standar Widyakarya Pangan dan Gizi untuk konsumsi protein sebesar 52 gram/kapita/hari. Penurunan

yang cukup signifikan tahun 2016-2019 hingga dibawah standar konsumsi protein telah menjadi perhatian dan evaluasi terhadap pola konsumsi masyarakat. Telah dilakukan dorongan peningkatan dengan melaksanakan sosialisasi di tengah masyarakat, agar meningkatkan konsumsi protein. dimana protein dari pangan hewani harus lebih ditingkatkan, seperti daging ruminansia, daging unggas, telur dan ikan, sehingga pada tahun 2020 peningkatan terealisasi, seperti dijabarkan pada tabel diatas. Untuk mendukung ini produksi untuk komoditas tersebut tetap harus lebih ditingkatkan sehingga konsumsi protein dapat kembali berada di atas standar anjuran.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah bertanggungjawab atas tercukupinya pangan bagi setiap individu. Demikian pula bahwa UU RI No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah Daerah dalam hal ini menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan wajib untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak bencana. tentunya terutama dari sisi pangan. Terkait dengan hal itu maka setiap Pemerintah Kota Dumai harus memiliki cadangan pangan.

2.4.2.4 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Pada dasarnya tanah mempunyai makna dan nilai strategis yang tinggi, baik dari sisi historis, politik, sosial budaya, terlebih ekonomi karena didalamnya tidak saja terdapat aspek fisik, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, budaya, politik serta hukum, sedangkan banyak pihak memiliki kepentingan terhadap tanah, sehingga tanah merupakan sumber daya yang rawan konflik.

Di Kota Dumai terdapat beberapa status tanah antara lain:

- a. Tanah Kawasan Hak Pakai PT. Cevron Fasific Indonesia
- b. Tanah Kawasan Hak Pakai PT. Pertamina
- c. Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah yang merupakan asset Pemerintah Daerah
- d. Tanah Warga Masyarakat adalah tanah milik perseorangan
- e. Tanah – tanah perusahaan yang berstatus hak guna usaha yang bergerak di bidang HPH/HPHTI yaitu:
 1. PT. Suntara Gaja Pati di Sungai Sembilan
 2. PT Ruas Utama Jaya di Sungai Sembilan

3. PT. Diamond Raya Timber di Sungai Sembilan

4. PT. Arara Abadi Di Bukit Kapur

Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi terutama dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, tanah-tanah yang ada di Daerah Kota Dumai dimungkinkan untuk dimanfaatkan, baik untuk dipakai sendiri atau disewakan, dilepaskan kepada Pemerintah, maupun Pihak Swasta yang berbadan hukum.

Untuk menjaga suasana tetap kondusif maka konflik tersebut perlu di fasilitasi Pemerintah Kota Dumai agar tidak menjurus ke hal-hal yang bersifat kekerasan. Adapun konflik tanah masyarakat dengan tanah perusahaan yang selama ini di fasilitasi oleh Pemerintah Kota Dumai yaitu. yaitu:

1. PT. Suntara Gaja Pati Di Kecamatan Sungai Sembilan

2. PT Ruas Utama Jaya Di Kecamatan Sungai Sembilan

3. PT. Diamond Jaya Timbers Di Kecamatan Sungai Sembilan

4. PT. Pertamina Persero Di Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Dumai Selatan

5. PT. Chevron Pacifik Indonesia Di Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Dumai Selatan

6. PT. Arara Abadi di Kecamatan Bukit Kapur

Sedangkan konflik/permasalahan tanah lain yang ditangani oleh Pemerintah Kota Dumai adalah konflik/permasalahan tanah antara masyarakat dengan Tanah Aset Pemko Dumai. Adapun rekapitulasi permasalahan pertanahan yang sedang ditangani sampai dengan Tahun 2017 tersaji pada Tabel 2.119.

Tabel 2.121
Permasalahan Pertanahan yang Sedang Ditangani

No	Objek Permasalahan	Hasil/Progres	Keterangan
1.	Tanah Bekas Hak Pakai PT. CPI	<p>a. Satuan Tugas yang telah dibentuk telah melaksanakan tugas dari tanggal 1 November 2011 sampai dengan 3 bulan dengan hasil pendataan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah persil = 4.361 - Luas penguasaan tanah seluas: 3.283.084,06 M <p>b. Saatini sedang disusun proposal hilir mengenai formulasi kebijakan yang akan diambil dalam menyelesaikan permasalahan tanah yang sudah diduduki oleh masyarakat. Studi konfrehensif bagi penyelesaian tersebut sedang dilaksanakan dengan memperbandingkan pada daerah-daerah yang mempunyai masalah serupa. Proposal tersebut direncanakan akan selesai pada bulan Februari 2013.</p> <p>c. Setelah proposal hilir tersebut selesai maka akan dilanjutkan dengan penyerahan proposal dan hasil pendataan kepada pihak-pihak terkait di Jakarta untuk proses penyerahan tanah tersebut kepada negara</p> <p>d. Setelah tanah tersebut diserahkan kepada Negara, maka Pemerintah Kota Dumai akan mengajukan proposalpermintaan/peruntukan tanah lengkap dengan master plan/strategi, termasuk pengaturan penyelesaian terhadap tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat.</p> <p>e. Permohonan hibah terhadap 44 bidang tanah yang di atasnya berdiri fasilitas Pemko Dumai</p>	<p>Rincian 4.361 persil terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rumah Tinggal 3.867 unit - Sekolah/Perguruan Tinggi (Negeri) 8 unit - Sekolah/Perguruan Tinggi (Swasta) 6 unit - Fasilitas Pemerintah 25 unit - Usaha Pribadi 184 unit - Perusahaan swasta 3 unit - Fasilitas Umum/Sosial 14 unit - Rumah Ibadah 33 unit - Lainnya 221 <p>Isi Bangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan Permanen 2.356 unit - Bangunan Semi Permanen 1.728 unit - Bangunan Terbengkalai 93 unit - Lahan Kosong 3 persil - Lainnya 217 <p>Dengan dikabulkanya pinjam pakai atas tanah yang di atasnya telah berdiri aset Pemko Dumai maka sebagian permasalahan tanah hak pakai PT. CPI dpt terlesaikan. Dan untuk perpanjangan pinjam pakai 5 tahun kedepan akan diajukan permohonan hibah atas obyek tanah tsb.</p>

No	Objek Permasalahan	Hasil/Progres	Keterangan
		<p>telah diajukan hibahnya sejak tahun 2015 dengan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan. Dan saat ini telah final dan menunggu penyerahan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.</p> <p>f. PSP diajukan oleh masing-masing Instansi Vertikal</p> <p>g. Perpres tentang penyelesaian permasalahan tanah yang dikuasai oleh masyarakat sedang disusun dengan difasilitasi oleh KOMNAS HAM RI.</p> <p>h. Permohonan hibah atas 44 bidang tanah sebagaimana huruf e dikabulkan tidak dengan hibah, tetapi dengan Pinjam Pakai selama 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali. Dari 44 bidang yang diajukan hanya 39 bidang yang disetujui, sementara 5 bidang lagi merupakan tanah kosong belum dapat disetujui dan masih dalam proses.</p> <p>Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Negara Berupa Tanah yang berasal dari KKKS PT. CPI antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Dumai dilaksanakan pada hari Rabu 21 Nopember 2018 di Gedung Pendopo Sri Bunga Tanjung, diserahkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan negara KEMENKEU kepada WaliKota Dumai dengan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor:PRJ 11/KN/2018 dan Nomor 24/P-PJMK/BKPAD/2018 Tanggal 21 November 2018.</p>	<p>Sedangkan untuk tanah fasilitas sosial dan perkantoran vertikal diajukan PSP nya oleh yang bersangkutan dan sdh berjalan sesuai ketentuan.</p> <p>Sementara untuk tanah yang dikuasai oleh masyarakat akan disusun PERPRES tentang penyelesaian permasalahan Tanah Hak Pakai yang dikuasai Masyarakat dimohon kepada Kementerian Keuangan untuk memimpin penyusunannya.</p>

No	Objek Permasalahan	Hasil/Progres	Keterangan
2.	Tanah yang berada di Taman Wisata Alam Sungai Dumai	<p>Hasilnya: Hasil pendataan tahun 2013: Penggunaan Lahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah, Sawit diatas umur 3 tahun, Hutan, Belukar 2. Rumah, Sawit diatas umur 3 tahun, Hutan, Belukar 3. Rumah, Sawit diatas umur 3 tahun, Hutan, Belukar 4. Rumah, Sawit diatas umur 3 tahun 5. Sawit diatas umur 3 tahun, Kebun, Hutan, Belukar 6. Sawit diatas umur 3 tahun, kebun, Hutan, Belukar 7. Hasilnya sampai saat ini Tim Tersebut belum terbentuk 8. BBKSDA Prov.Riau secara lisan meminta agar Pemko Dumai bersedia memfasilitasi pertemuan dengan mengundang pihak-pihak terkait termasuk Kementrian LHK Jakarta untuk melakukan pertemuan di Kota Dumai dalam rangka membahas pembentukan tim tersebut sekaligus melakukan peninjauan dilapangan <p>Hasil Pendataan: Luas areal yang di data: 69.112 Jumlah pemilik lahan: 83 KK Peruntukan lahan: Pemukiman masyarakat, kebun dan lain-lain.</p> <p>Hasil pendataan ini akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait di Kementerian LHK sebagai</p>	Kewenangan penyelesaian permasalahan ini berada di kementerian LHK tepatnya di Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Provinsi Riau dan Balai Penegakan Hukum LHK. Pemko Dumai hanya melakukan upaya permohonan penyelesaian permasalahan ini dengan melampirkan data-data terkait kondisi TWA tersebut.

No	Objek Permasalahan	Hasil/Progres	Keterangan
		laporan untuk tindak lanjut penanganan permasalahan tanah, terkhusus di depan bandara Pinang Kampai.	
3.	Permasalahan tanah asrama haji dumai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disepakati untuk melakukan penelusuran kronologis perolehan tanah tersebut dengan menghubungi para sempadan dan pihak-pihak terkait 2. Hasil penelusuran sementara menyatakan bahwa tanah tersebut tidak tercatat di aset Pemerintah Kota Dumai dan di BPN Kota Dumai juga tidak ditemui dokumen pertanahannya dan kemungkinan besar dicatat di Kementerian Agama Pusat 3. Hasil Penelusuran terakhir Tanah dan bangunan tersebut tercatat di Kartu Identitas Barang (KIB) Kantor Kementerian Agama Kota Dumai, namun dokumen-dokumen surat tanahnya tidak ditemukan 4. Dipertemuan 4 Desember tsb direkomendasikan penyelesaian masalah ini dengan memproses penerbitan Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah (SKRPT) sesuai ketentuan PERWKO Dumai nomor 14 Tahun 2018 tentang SOP Pelayanan Administrasi Pertanahan di Kecamatan dan Kelurahan. 	Permasalahan ini selesai dan saat ini sedang dalam proses Penerbitan SKRPT pihak Kelurahan Laksamana dan Kecamatan Dumai Kota
4.	Permasalahan tanah untuk jalan Abdulrab Khan Kelurahan Bukit Timah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusannya masih menunggu hasil kajian teknis dari PT.CPI tentang kelayakan dan hal-hal lain Setelah Konsultasi internal akan dilakukan pertemuan dengan DJKN Kementerian Keuangan sesuai dengan waktu yang akan ditentukan 	1. Permasalahan dapat diselesaikan.

No	Objek Permasalahan	Hasil/Progres	Keterangan
		<p>2. PPLB yang telah disusun belum dapat disetujui karena terdapat beberapa hal yang belum dapat disepakati diantaranya Pemko Dumai diminta untuk membangun pagar pengaman pipa disepanjang jalan Abdulrab khan yang akan ditingkatkan. Sedangkan Pemko Dumai meminta pagar tersebut dibangun oleh PT.CPI karena tidak mungkin pemko Dumai membangun pagar untuk melindungi asset PT. CPI.</p> <p>3. Perkembangan terakhir di internal PT. CPI, disampaikan melalui pertemuan dengan WaliKota Dumai pada Desember 2018 di Kediaman Walikota bahwa PT. CPI telah menyetujui untuk langsung membangun Jalan tersebut.</p> <p>4. Rencana pengerjaan jalan tersebut akan dilaksanakan pada minggu kedua Januari 2019.</p>	
5.	Permasalahan tanah rencana pengembangan RSUD Kota Dumai kelurahan Buluh Kasab Kecamatan Dumai Kota	<p>1. Hasil penelusuran DiBPKAD Prov Riau tidak ditemukan Daftar Tanah Aset tersebut.</p> <p>2. Hasil penelusuran ke PT. CPI menyatakan bahwa tanah tersebut juga tidak termasuk dalam tanah Hak Pakai PT> CPI</p>	1. Masih melakukan telaah dan penelusuran tentang status tanah tersebut.
6.	Permasalahan Ganti rugi tanah yang terkena jalur kereta api trans sumatera	<p>1. Hasil dari pertemuan tersebut didapati bahwa untuk proyek kereta api Trans Sumatera wilayah Kota Dumai tidak lagi termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga tidak tersedia anggaran Ganti rugi dalam tahun ini.</p> <p>2. Mengusahakan Proyek tersebut dapat dimasukkan kembali kedalam PSN atau dianggarkan dalam APBN murni 2019</p>	<p>1. Dikhawatirkan terjadi gejolak Masyarakat atas tidak jelasnya status ganti rugi ini</p> <p>2. Sampai saat ini belum Jelas kelanjutannya.</p>

No	Objek Permasalahan	Hasil/Progres	Keterangan
7.	Permasalahan tanah masyarakat atas SUJONO dikelurahan lubuk gaung Kecamatan Sei Sembilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat pertama merekomendasikan untuk melakukan kunjungan lapangan di Lokasi yang disengketakan 2. Kunjungan ke lokasi perusahaan tidak dapat dilakukan karena perusahaan keberatan dengan berbagai pertimbangan 3. Pertemuan terakhir, tidak terdapat kesepakatan antara para pihak, karena masing-masing pihak memiliki data dan argument bertahan, sehingga rapat memutuskan dan merekomendasikan agar permasalahan ini diselesaikan melalui jalur hukum (ke Pengadilan) 4. Informasi terakhir pihak Sujono mengajukan permohonan kepada ketua DPRD Kota Dumai untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan ini 	1. Upaya fasilitasi penyelesaian permasalahan ini di tingkat Pemerintah Kota Dumai telah selesai
8	Permasalahan tanah yang berada di areal Kelurahan bukit batrem yang diklaim oleh masyarakat telah digadaikan ke KSU Bona Mandiri yang terletak di jalan merdeka	Hasil kunjungan klarifikasi dan pengukuran didapati bahwa tanah yang diklaim oleh KSU Bona Mandiri tersebut tidak berada di lokasi tanah kantor Lurah Bukit Batrem, tapi berada di posisi lain (salah patok)	Permasalahan telah selesai
9.	Permasalahan, Tanah antara Masyarakat RT 08. Kel Bukit Nenas dengan PT. ARARA ABADI Distrik Bukit Kapur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil kunjungan lapangan mendapati bahwa seluruh tanah yang diklaim oleh masyarakat berada di Areal Konsesi PT.Arara Abadi dengan kondisi Tanaman Hutan Akasia 2. Akan dibentuk Tim bersama Masyarakat dan PT Arara Abadi dengan difasilitasi oleh Pemko Dumai untuk menyusun Formulasi penyelesaian Masalah 3. Pada pertemuan terakhir disepakati pola penyelesaian dengan Pola Kemitraan yaitu: lahan yang disengketakan dikelola masyarakat dengan tanaman kehidupan produk perusahaan dan 	1. Permasalahan dapat diselesaikan. Bagian pertengahan akan memantau perkembangannya.

No	Objek Permasalahan	Hasil/Progres	Keterangan
		<p>perusahaan membantu perlengkapan tanaman dan hasilnya akan ditampung oleh perusahaan.</p> <p>4. Perusahaan juga menawarkan program dana CSR perusahaan untuk bantuan dana pembinaan berbagai usaha masyarakat tempatan.</p> <p>5. Masyarakat dan perusahaan akan melakukan pertemuan-pertemuan formal dan informal untuk menyusun pola kerja sama tersebut</p>	

Sumber: Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Dumai, 2021

Tabel 2.122
Permasalahan Pertanahan yang Sedang Ditangani

No	Lokasi	Luas Total (M ²)	Luas Lahan (M ²) yang masuk TWA	Jumlah Pemilk	
				Kelompok	Orang/instansi
1	Kel.Gurun Panjang	6.173.576	4.695.215	4	13
2	Kel. Bukit Timah	3.885.903	3.675.767	2	21
3	Kel.Bumi Ayu	3.613.765	2.206.002	2	2
4	Kel.Bukit Batrem	80.468	41.090	-	11
5	Kel.Tanjung Palas	13.248.608	11.910.033	5	49
6	Kel. Mundam	3.828.432	955.102	2	2
Total		30.830.752	23.483.209		

Penyelesaian kasus tanah negara Pemerintah Kota Dumai tahun 2018 dari sembilan kasus telah diselesaikan sebanyak 2 kasus dengan persentase 22,22 % dan ini merupakan kebutuhan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Kota Dumai saat ini. Sedangkan permasalahan yang telah diselesaikan pada Tahun 2018 berikut adalah Tabel 2.121.

Tabel 2.123
Permasalahan Pertanahan Yang Sudah Diselesaikan

No	Objek Permasalahan	Keterangan
1.	Permasalahan tanah yang berada di areal Kelurahan bukit batrem yang diklaim oleh masyarakat telah digadaikan ke KSU Bona Mandiri yang terletak di jalan merdeka	Permasalahan telah selesai
2.	Permasalahan Tanah Hibah Haji Andi Firman kepada Pemko Dumai	Permasalahan telah selesai

Sumber: Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Dumai, 2020

2.4.2.5 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

1) Indek Kualitas Air

a. Kualitas Air Tanah

Kualitas air tanah yang diproduksi dari kualitas air sumur di Kota Dumai dipengaruhi oleh karakteristik tanah yang pada umumnya merupakan tanah gambut, sehingga membuat tingginya nilai kekeruhan dan warna, serta mengandung besi dan zat organik yang tinggi seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.122. Bahan buangan organik ini berasal dari limbah industri yang menggunakan unsur-unsur logam seperti timbal.

Tabel 2.124
Hasil Pengujian Kualitas Air Sumur di Kota Dumai
Tahun 2017-2019

Titik Pengujian Sampel	Hasil Pengujian Parameter											
	pH			Kekeruhan (NTU)			Warna (PtCo)			Besi (mg/L)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Air Sumur Kel. Tanjung Palas	6,05			31,8			1.752					
Air Sumur Kel. Teluk Makmur	3,27	3,84		98,0	7,70		1.726	25			0,13	0,13
Air Sumur Kel. Bukit Kapur	6,37			<0,1			0,1					
Air Sumur Kel. Dumai Selatan	4,18	6,80		<0,1	0,87		6	10			0,0228	0,0228
Air Sumur Kel. Dumai Barat	4,68	4,99		24,2	10,9		21	121			0,744	0,744
Air Sumur Kantor Camat Sungai Sembilan	5,10			48,0			405					
Air Sumur Kel. Dumai Kota	5,63	3,04		38,0	2,85		79	12				0,863
Titik Pengujian Sampel	Hasil Pengujian Parameter											
	Besi (mg/L)			Kadmium (mg/L)			Nitrat (mg/L)			KmnO4 (mg/L)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Air Sumur Kel. Tanjung Palas	3,707			0,011	<0,003		4,9					
Air Sumur Kel. Teluk Makmur	8,126	0,1300		0,012			1,9	12,7				
Air Sumur Kel. Bukit Kapur	0,093			0,016	<0,003		2,0					
Air Sumur Kel. Dumai Selatan	0,084	0,0228		0,011	<0,003		5,8	12				
Air Sumur Kec. Dumai Barat	0,172	0,7444	0,732	0,017		0,003	0,4	0,7	0,017	5,58	0,732	2,844
Air Sumur Kantor Camat Sungai Sembilan	3,547			0,010	<0,003		0,8	0,5				
Air Sumur Kec. Dumai Kota	9,715	0,8630		<0,003			0,5					

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas air sumur di Kota Dumai masih rendah karena melebihi batas ambang baku mutu air sumur seperti yang tersaji pada Tabel 2.123.

Tabel 2.125
Ambang Batas Baku Mutu Air Sumur

Parameter	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu
pH		6,5-9
Kekeruhan	NTU	25
Warna	PtCo	50
Besi	mg/L	1
Kadmium	mg/L	0,005
Nitrat	mg/L	10
KMNO ₄	mg/L	10

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2019

Dari hasil pengujian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, pada tahun 2017-2018 kualitas air hujan di Kota Dumai bersifat asam, hal ini disebabkan oleh kontaminasi atmosfer yang berasal dari tingginya pencemaran udara yang disebabkan oleh aktivitas pabrik maupun asap kendaraan.

b. Kualitas Air Laut dan Air Sungai di Kota Dumai

Pertambahan penduduk, banyaknya jenis usaha dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan di Kota Dumai menyebabkan semakin banyak limbah yang dihasilkan sehingga mempengaruhi kualitas air di Kota Dumai. Wilayah Kota Dumai berada di pesisir pantai (laut) sehingga berperan menjadi tempat pembuangan akhir dari berbagai limbah cair industri dan limbah domestik. Wilayah pesisir ini menjadi pilihan lokasi bagi para pengusaha industri karena pesisir pantai Kota Dumai berpotensi besar untuk dijadikan sebagai pelabuhan, sehingga memudahkan pengusaha dalam mendistribusikan hasil olahannya. Tingginya aktifitas industri di wilayah pesisir ini mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan di daerah pesisir yang salah satunya tergambar dari penurunan kualitas air di wilayah pesisir seperti yang tersaji pada Tabel 2.124.

Dari Tabel 2.124 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 terjadi penurunan kualitas air laut, hal ini terlihat dari hasil pengukuran parameter Padatan Tersuspensi Total (TSS) yang melebihi ambang batas baku mutu (80 mg/L) di semua titik pengujian sampel.

Tabel 2.126
Perkembangan Hasil Pengujian Kualitas Air Laut di Kota Dumai
Tahun 2017-2019

Titik Pengujian Sampel	Hasil Pengujian Parameter					
	pH			TSS (mg/L)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Air Dermaga PT. Ivo Mas Tunggal	7,13	7,80	7,75	60	144	80
Air Dermaga PT. Sari Dumai Sejati	7,15	7,85	-	124	112	-
Air Dermaga PT. Pacific Indopalm Industries	7,51	7,81	-	134	108	-
Air Dermaga PT. Inti Benua Perkasatama	7,67	7,85	7,87	98	116	102
Air Dermaga PT. Semen Padang	7,26	7,85	7,89	68	116	80
Air Dermaga PT. Meridan Sejati Surya Plantation	7,14	7,85	-	120	108	-
Air Dermaga PT. Pelindo Cab. Dumai	7,49	7,87	7,86	114	104	80
Air Dermaga PT. Pelindo Cab. Dumai Ujung	7,58	-	-	20	-	-
Air Dermaga PT. CPI	7,68	7,88	7,85	26	108	80
Air Dermaga PT. Pertamina RU II Dumai	7,72	7,85	7,88	30	122	80

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, 2019

Kualitas air sungai dan drainase di Kota Dumai dipengaruhi oleh karakteristik tanah yang pada umumnya merupakan tanah gambut. Disamping itu juga dipengaruhi oleh limbah dari kegiatan domestik, doorsmer, hotel, klinik, dll yang tidak melalui proses pengelolaan dan pengolahan limbah cair. Dari hasil pengujian air sungai seperti yang tersaji pada Tabel 2.125 disimpulkan bahwa ada beberapa parameter yang melebihi ambang batas baku mutu.

Tabel 2.127
Ambang Batas Baku Mutu Air Sungai Kota Dumai Tahun 2019

Parameter	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu	Parameter	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu
BOD	mg/L	12	Mangan	mg/L	0,1
COD	mg/L	100	Klorida	mg/L	600
P	mg/L	5	Flourida	mg/L	1,5
pH		6 – 9	Sulfat	mg/L	400
DO	mg/L	3	Belerang	mg/L	0,002
NO ₃	mg/L	20	NH ₃	mg/L	0,5
Nitrit	mg/L	0,06	Besi	mg/L	0,3

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2019

2) Indeks Kualitas Udara

Kota Dumai beriklim tropis dengan rata-rata suhu udara antara 21°C -36°C seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.126 (tanpa data tahun 2011). Rata-rata suhu udara tahun 2010-2020 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2010, kemudian terus mengalami penurunan sampai tahun 2020 menjadi 27,11 °C. Secara umum rata-rata suhu udara di Kota Dumai selama kurun waktu 2010-2020 setinggi 27,90°C dan masih berada dalam kondisi normal.

Tabel 2.128
Perkembangan Suhu Rata-rata di Kota Dumai
Tahun 2010-2020

Indikator	Tahun									
	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Suhu rata-rata (°C)	27,64	28,32	28,32	28,32	28,32	28,2	28,09	27,43	27,30	27,11

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2019

Pada tahun 2020, suhu udara tertinggi terjadi di bulan Maret dan Agustus yaitu setinggi 27,80°C. Sedangkan di tahun 2016, suhu udara tertinggi terjadi di bulan Maret yaitu sebesar 29,00°C. Perkembangan suhu udara setiap bulan selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.127 berikut.

Tabel 2.129
Perkembangan Suhu Rata-rata di Kota Dumai
Tahun 2016-2020

Bulan	Suhu Udara Rata-rata (°C)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	28,00	26,80	26,80	28,00	27,40
Februari	28,10	28,00	27,80	27,80	27,50
Maret	29,00	28,00	27,60	27,70	27,80
April	28,90	27,60	27,90	26,70	26,60
Mei	28,20	27,80	27,00	27,20	27,80
Juni	27,50	28,20	28,30	27,40	27,10
Juli	28,50	28,20	27,90	27,60	26,80
Agustus	28,50	27,30	27,90	27,40	27,80
September	27,50	29,60	27,40	27,40	26,30
Oktober	28,20	27,50	27,10	26,80	27,20
November	27,80	28,90	27,10	26,70	26,70
Desember	27,90	29,20	26,40	26,90	26,30
Rata-rata	28,18	28,09	27,43	27,30	27,11

Berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup tahun 2019, disimpulkan bahwa kualitas udara ambien di Kota Dumai masih baik, dimana hasil pengukuran terhadap beberapa parameter seperti yang tersaji pada Tabel 2.128 berada di bawah ambang batas baku mutu yang dipersyaratkan.

Tabel 2.130
Hasil Analisa Polusi Udara Ambien di Kota Dumai Tahun 2019

Titik Pengujian Sampel	Nilai Parameter Yang Diuji									
	SO ₂	CO	NO ₂	O ₃	Pb	HC	NH ₃	H ₂ S	TSP	Kebisi- ngan
	µg/Nm ³	µg/Nm ³	µg/Nm ³	µg/Nm ³	µg/Nm ³	µg/Nm ³	ppm	ppm	µg/Nm ³	dBA
Simpang Polres Dumai	35,31	956,87	17,81	20,30	0,11	24,63	0,05	<0,0014	151,88	68,00
KLK Dumai	29,47	1.025,7	15,18	22,80	0,05	73,64	0,07	<0,0014	133,07	68,00
Bukit Batrem	25,26	1.124,6	13,17	31,70	0,05	46,24	0,56	<0,0014	102,90	55,00
TPA Mekarsari	23,82	863,74	10,42	37,50	0,02	54,88	0,05	<0,0014	60,26	40,00
Kawasan Industri Dumai (KID)	39,29	1.136,5	7,02	25,70	<0,0006 g	71,25	0,06	<0,0014	78,00	57,00
Depan Gedung BKD	24,98	865,50	16,24	22,70	0,11	36,36	0,06	<0,0014	105,58	52,00

PT. IBP Industri Lubuk Gaung	27,93	869,40	17,30	27,50	0,15	52,55	0,04	<0,0014	118,32	57,00
Jl. Dermaga ke Purnama	23,82	893,40	10,90	31,30	0,04	34,55	0,05	<0,0014	76,46	65,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2019

Hanya ada dua parameter yang mendekati ambang batas baku mutu yaitu kebisingan (ambang batas baku mutu kebisingan 70 dBA) dan TSP (ambang batas baku mutu debu total/TSP 230 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$). Dampak kebisingan bagi kesehatan dapat menyebabkan berbagai gangguan seperti gangguan fisiologis, gangguan psikologis, gangguan komunikasi, hingga ketulian. Sedangkan tingginya nilai TSP berdampak terhadap gangguan pernapasan manusia, menurunkan jarak pandang dan menghalangi sinar matahari, serta berdampak terhadap kerusakan beberapa material.

3) Persentase Penanganan Sampah

Formula yang dipergunakan untuk menghitung persentase penanganan sampah adalah merupakan hasil bagi antara volume tempat sampah yang ditangani dengan volume produksi sampah dikalikan dengan bilangan 100. Tidak dijelaskan secara terperinci yang tertulis dalam mengenai definisi volume sampah yang ditangani, apakah memiliki pengertian volume sampah yang dibuang ke TPA atau volume sampah yang diolah. Data yang tertulis dalam tabel dibawah ini merupakan data jadi mengenai persentase penanganan sampah yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.

Tabel 2.131
Persentase Penanganan Sampah di Kota Dumai Tahun 2010-2019

Indikator	Tahun									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase penanganan sampah (%)	48	48	50	50	50	50	50	50	53	56

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tren perkembangan indikator persentase penanganan sampah di Kota Dumai menunjukkan kecenderungan semakin meningkat dari kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2019, yakni dari 48% di tahun 2010 meningkat menjadi 50% di tahun 2019.

4) Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk telah dibahas pada salah satu indikator dalam pokok bahasan pekerjaan umum. Terdapat kesamaan diantara keduanya, yakni didapatkan dari formula jumlah daya tampung TPS yang dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan bilangan 1000. Data mengenai rasio tempat pembuangan sampah sudah merupakan data jadi yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. Berikut adalah Tabel 2.123 data

mengenai indikator rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota Dumai.

Tabel 2.132
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk
di Kota Dumai Tahun 2010-2019

Indikator	Tahun									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	12 (TPS)	12 (TPS)	12 (TPS)	12 (TPS)	12 (TPS)	12 (TPS)	15 (TPS)	18 (TPS)	19 (TPS)	20 (TPS)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2019

Selama periode 2010-2019 perkembangan indikator rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota Dumai memiliki kecenderungan meningkat, yakni 12 TPS persatuan penduduk di tahun 2010 meningkat menjadi 20 TPS di tahun 2019.

Sistem pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai sebagaimana yang tertulis dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan sumber penghasil sampahnya. Pertama, sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga/ ruko. Sampah yang dihasilkan sebagian dikumpulkan oleh petugas sampah yang ditunjuk langsung oleh ketua RT, dan sebagian lainnya langsung diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup.

Kedua, sampah yang terdapat di pasar. Pengumpulan sampah pasar dilakukan oleh pengelola pasar yang kemudian dikumpulkan di tempat pembuangan sementara (TPS) yang telah disediakan, lalu kemudian diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup untuk dibawa menuju tempat pembuangan akhir (TPA). Ketiga, sampah yang dihasilkan oleh perusahaan. Sampah perusahaan atau pabrik sebagian dikelola langsung oleh perusahaan dimaksud untuk diangkut langsung ke TPA, sedangkan sebagian perusahaan lainnya langsung dilayani oleh petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup.

2.4.2.6 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah masih adanya sebagian masyarakat yang belum menyadari arti pentingnya kepemilikan identitas kependudukan maupun akta Pencatatan Sipil serta masih adanya sebagian masyarakat yang belum melaksanakan kewajibannya untuk segera melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

1) Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepemilikan KTP adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki KTP terhadap jumlah penduduk wajib KTP (berusia 17 tahun ke atas dan atau pernah/sudah menikah).

Dari data yang tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dari tahun 2014-2020 (tanpa data tahun 2016) persentase penduduk yang telah memiliki KTP semakin meningkat. Pada tahun 2014 rasio penduduk yang ber-KTP sebesar 47,95%, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 96,21%.

Tabel 2.133
Kepemilikan KTP Tahun 2014-2020

Indikator	Tahun					2020
	2014	2015	2017	2018	2019	
Kepemilikan KTP (%)	47,95	94,27	94,27	94,82	96,00	96,21

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2021

2) Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

Data mengenai ketersediaan *database* kependudukan skala nasional berdasarkan informasi dari instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai sudah ada sejak tahun 2010. Database kependudukan di Kota Dumai dilakukan secara rutin melalui program SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang dijalankan secara online dan terpadu. Melalui program tersebut, *database* kependudukan di Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel 2.132 secara berkala dan dapat diakses oleh siapa pun yang berkepentingan dengan data tersebut.

Tabel 2.134
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi
Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ketersediaan <i>database</i> kependudukan skala nasional	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai, 2020

3) Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

KTP diberlakukan dalam skala nasional yang bertujuan sebagai pengenalan yang mengandung keterangan domisili yang sah. Masa berlaku KTP adalah seumur hidup. Setiap warga negara hanya diperbolehkan mempunyai satu KTP. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Dumai.

Tabel 2.135
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai, 2021

Melalui data kependudukan tersebut, Ditjen Dukcapil sedang menyiapkan peradaban baru Indonesia dengan data penduduk yang kuat berbasis *single identity number* (SIN). Sehingga setiap penduduk hanya memiliki satu identitas Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK). Implementasi SIN tersebut, sejalan dengan sistem yang diamanatkan undang-undang, yaitu *one data policy*. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengamankan data kependudukan milik Kemendagri sebagai satu-satunya data yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan secara terintegrasi dan online oleh instansi-instansi terkait sebagai *Single Identity Number*.

Tabel 2.136
Jumlah Kerjasama Pemanfaatan Data dan Pelayanan Dokumen Kependudukan

No.	Jenis Kerjasama	Tahun					Ket.
		2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Pemanfaatan data kependudukan	-	-	2 OPD	2 OPD	3 OPD	DPMPTSP Dinkes, Diskominfo
2.	Pelayanan dokumen Kependudukan (KIA dan Akta kelahiran)	-	-	2 OPD	2 OPD	2 OPD	RSUD dan unit Disdik (sekolah)

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai, 2020

Rendahannya kesadaran masyarakat terhadap arti penting dokumen kependudukan. Cakupan penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) dari tahun 2016-2019 naik dari 2,30% pada tahun 2016 menjadi 30,20% tahun 2019.

Tabel 2.137
Jumlah Cakupan penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)

No.	Rincian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2016	2017	2018	2019	2020*	
1.	Cakupan penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki KIA	%	2,30	22,20	25,60	30,20	41,85	234,27

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai, 2020 *Tahun 2020 merupakan angka extrapolasi tim, 2021

2.4.2.7 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa

Beberapa indikator terkait aspek pemberdayaan masyarakat dan desa diantaranya: (1) Jumlah kelompok binaan PKK; (2) Posyandu aktif; (3) Kualitas sumber daya lembaga masyarakat; dan (4) Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.136 berikut.

Tabel 2.138
Perkembangan Indikator Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Dumai Tahun 2010-2020

Indikator	Satuan	Tahun										
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah kelompok binaan PKK	%	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Jumlah PKK	PKK	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah Posyandu	Posyandu	241	241	241	241	241	241	241	241	241	196	197
Persentase Posyandu Aktif	%	97	97	98	98	99	100	100	100	100	100	100
Persentase LSM yang Dibina	%	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Persentase Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	%	96	96	97	97	97	97	97	97	97	97	97

Sumber: Bagian Pemberdayaan Masyarakat Setdako dan Kota Dumai Dalam Angka, 2021

1) Persentase PKK Aktif

Selama kurun waktu 2010-2020 terdapat 41 PKK aktif dengan persentase jumlah kelompok binaan PKK selama kurun waktu tersebut adalah sebesar 100%. Tim penggerak PKK, harus lebih lagi memotivasi atau mendorong masyarakat untuk mau terlibat dalam semua kegiatan yang ada untuk meningkatkan kualitas kehidupan bagi Lembaga PKK.

2) Persentase LSM di Bina

Munculnya gerakan sosial masyarakat sipil yang berlangsung di negara berkembang dapat dipandang sebagai alternatif pendekatan perubahan sosial yang dominan (*mainstream approach*) atau lebih dikenal dengan perubahan sosial

yang direkayasa oleh negara melalui apa yang disebut dengan pembangunan. Peran pemerintah Kota Dumai dalam pembinaan LSM sangat baik hal tersebut dapat dilihat dari persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dibina selama kurun waktu 2010-2020 sudah mencapai 90%.

3) Persentase Posyandu Aktif

Salah satu program kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal ini adalah pelaksanaan Posyandu yang beraktivitas hingga di ruang lingkup desa yang memberikan pelayanan kesehatan bagi anak-anak dan juga para lansia. Posyandu memiliki peran yang sangat penting untuk pengawasan pertumbuhan dan juga perkembangan bagi anak yang masih berusia di bawah 3 tahun. Periode pertumbuhan anak pada 3 tahun pertamanya adalah periode emas alias yang paling penting terutama untuk pertumbuhan intelektual, mental, fisik, dan juga pertumbuhan dan perkembangan emosional anak. Faktor pendukung pertumbuhan anak yang baik adalah asupan gizi yang cukup, menjaga kebersihan, dan juga tak lupa mendapatkan imunisasi. Selain itu pemberian vitamin A juga penting yang ditambah dengan pelayanan kesehatan yang bermutu.

Jumlah posyandu selama kurun waktu 2010-2020 adalah sebanyak 241 posyandu dengan persentase posyandu aktif mulai tahun 2015 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 100%.

4) Persentase Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat

Pembinaan kemasyarakatan merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Pembinaan kemasyarakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui pelatihan, rapat, lomba, peringatan hari besar dan lain-lain. Persentase pembinaan pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2012 sampai saat ini adalah sebesar 97%.

2.4.2.8 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Kota Dumai selama periode 2010-2020 sebesar 2,27% per tahun akibat adanya penambahan jumlah penduduk dari 253.178 Jiwa tahun 2010 menjadi 316.782 jiwa pada tahun 2020. Penyumbang utama tingginya pertumbuhan penduduk adalah peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk perempuan yang tumbuh lebih tinggi yaitu sebesar 2,34% per tahun sementara peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk laki-laki hanya sebesar 2,21% per tahun selama periode tahun 2010-2020

2) Total Fertility Rate

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Sedangkan ASFR adalah banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-49 tahun. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya. Seperti yang dijelaskan pada Tabel 2.137 dibawah ini:

Tabel 2.139
Total Fertility Rate Kota Dumai Tahun 2020

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Wanita Usia Subur (Jiwa)	Jumlah Kelahiran Tahun 2020	ASFR
15-19	12.873	350	27,19
20-24	13.150	2.018	153,46
25-29	13.124	2.180	166,11
30-34	12.957	1.162	89,68
35-39	13.919	418	30,03
40-44	12.344	174	14,10
45-49	10.292	40	3,89
Jumlah	88.659	6.342	71,53

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PK, 2021

3) Cakupan Peserta KB Aktif

Dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu cara yang digunakan adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Peserta KB aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Cakupan peserta KB aktif adalah proporsi jumlah peserta program KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur. Jumlah peserta KB aktif dari tahun 2012- 2015 terus mengalami peningkatan, namun di tahun 2016 jumlah pesertanya turun drastis sebanyak 29.287, namun sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 peserta KB aktif mengalami peningkatan dari 33.059 peserta menjadi 35.923 orang tahun 2020 dengan pertumbuhan 40,81.

Tabel 2.140
Cakupan Peserta KB Aktif Kota Dumai Tahun 2012-2020

Indikator	Tahun									Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Cakupan peserta KB aktif	8.863	35.597	45.344	55.628	29.287	33.059	30.571	32.836	35.923	40,81

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2013-2021

4) Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Per Kecamatan, PUS bukan peserta KB, unmetneed dan PUS yang bukan target Program KB

Cakupan pemakaian kontrasepsi di Kota Dumai pada bulan Desember Tahun 2019 71.9% (33.605 orang peserta aktif) dengan capaian tertinggi di Kecamatan Sungai Sembilan yaitu 4.780 PUS (79.3%), pada bulan Desember Tahun 2020 75.5% (35.923 orang peserta aktif) dengan capaian tertinggi di Kecamatan Sungai Sembilan yaitu 6.027 PUS (80.2%) dan pada bulan Juni 2021 74.9% (36.132 orang peserta aktif) dengan capaian tertinggi di Kecamatan Sungai Sembilan yaitu 5.032 PUS (82.4%). Sedangkan cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang bukan peserta KB pada tahun 2019 adalah 13.132 PUS (28.1%) dengan angka unmetneed tertinggi yang harus diintervensi yaitu Kecamatan Dumai Barat 21.6% dengan jumlah 1.443 PUS, tahun 2020 cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang bukan peserta KB adalah 11.625 PUS (24.5%) dengan angka unmetneed tertinggi yang harus diintervensi yaitu Kecamatan Dumai Barat 18.1 % dengan jumlah 1.212 PUS dan tahun 2021 cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang bukan peserta KB adalah 12.122 PUS (25.1%) dengan angka unmetneed tertinggi yang harus diintervensi yaitu Kecamatan Dumai Barat 16 % dengan jumlah 1.069 PUS.

Tabel 2.141
Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR), PUS bukan peserta KB, Unmetneed dan PUS yang Bukan Target Program KB Per Kecamatan Tahun 2019-2021

KECAMATAN	PUS			CPR						PUS BUKAN PESERTA KB						UNMET NEED						PUS YANG BUKAN TARGET PROGRAM KB					
				Peserta Aktif			%			Jumlah			%			Jumlah			%			Hamil dan IAS			%		
	PA / PUS X 100			PUS bukan Peserta KB/PUS x 100			Unmetneed/PUS x 100						Hamil dan IAS/PUS x 100														
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Dumai Kota	6.098	6.680	6.680	4.489	5.117	5.267	73,6	76,6	78,8	1.609	1.563	1.413	26,4	23,4	21,2	795	1.212	1.069	13	18,1	16	814	351	344	13,3	5,3	5,1
Dumai Timur	9.876	9.984	10.008	7.219	7.852	7.810	73,1	78,6	78	2.657	2.132	2.198	26,9	21,4	22	1.337	1.015	1.208	13,5	10,2	12,1	1.320	1.117	990	13,4	11,2	9,9
Dumai Barat	6.674	8.441	8.761	4.859	5.897	5.973	72,8	69,9	68,2	1.815	2.544	2.788	27,2	30,1	31,8	1.443	1.383	1.336	21,6	16,4	15,2	372	1.161	1.452	5,6	13,8	16,6
Dumai Selatan	6.549	6.027	6.104	4.268	4.831	5.032	65,2	80,2	82,4	2.281	1.196	1.072	34,8	19,8	17,6	1.373	625	507	21	10,4	8,3	908	571	565	13,9	9,5	9,3
Bukit Kapur	8.461	3.493	3.797	5.749	2.705	3.024	67,9	77,4	79,6	2.712	788	773	32,1	22,6	20,4	1.442	547	531	17	15,7	14	1.270	241	242	15	6,9	6,4
Medang Kampai	3.052	6.272	6.079	2.241	4.886	4.242	73,4	77,9	69,8	811	1.386	1.837	26,6	22,1	30,2	548	623	912	18	9,9	15	263	763	925	8,6	12,2	15,2
Sungai Sembilan	6.027	6.678	6.825	4.780	4.635	4.784	79,3	69,4	70,1	1.247	2.043	2.041	20,7	30,6	29,9	634	893	789	10,5	13,4	11,6	613	1.150	1.252	10,2	17,2	18,3
Kota Dumai	46.737	47.575	48.254	33.605	35.923	36.132	71,9	75,5	74,9	13.132	11.652	12.122	28,1	24,5	25,1	7.572	6.298	6.352	16,2	13,2	13,2	5.560	5.354	5.770	11,9	11,3	12

5) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari lima kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai keluarga Sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan. Adapun untuk keluarga sejahtera I memiliki kriteria sebagai berikut serta Tabel 2.138.

- a. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih;
- b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan bepergian;
- c. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik;
- d. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan;
- e. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi;
- f. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Tabel 2.142
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Dumai
Tahun 2010-2018

Indikator	Tahun									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
Jumlah Keluarga	50.586	55.051	55.051	55.051	55.051	63.527	78.809	82.478	82.478	54.982
Keluarga Pra Sejahtera	4.642	4.118	4.118	4.118	4.118	4.118	2.871	2.871	2.871	6.369
Keluarga Sejahtera I	11.509	11.138	11.138	11.138	11.138	11.138	4.503	4.503	4.503	30.371

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PK, 2019

2.4.2.9 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Pada pokok bahasan mengenai perhubungan akan dibahas secara terinci indikator-indikator seperti jumlah arus penumpang umum, jumlah uji KIR angkutan umum, jumlah pelabuhan laut/ udara/ terminal bis, kepemilikan KIR angkutan umum, lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR), biaya pengujian kelayakan angkutan umum, serta pemasangan rambu-rambu.

1) Jumlah Arus Penumpang Umum

Jumlah arus penumpang umum yang dimaksudkan adalah jumlah arus penumpang angkutan umum baik yang melalui pelabuhan, bandar udara, maupun terminal yang masuk/keluar daerah selama satu tahun. Berikut adalah Tabel 2.141 yang menyajikan data jumlah arus penumpang umum di Kota Dumai.

Tabel 2.143
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Baik Penumpang Masuk (Datang) Maupun Keluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2012-2020

Jenis Angkutan	Jenis Keberangkatan	Tahun								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Terminal	Berangkat	174.680	116.080	120.225	106.390	105.890	102.670	-	-	-
	Datang	176.902	116.025	120.401	108.116	108.008	105.532	-	-	-
Pelabuhan	Berangkat	270.503	269.925	233.365	123.971	130.789	129.135	119.796	134.526	24.587
	Datang	273.990	253.645	211.070	103.876	100.342	102.586	103.876	115.611	24.691
Bandara	Berangkat	22.163	22.116	10.625	123.971	12.465	11.856	60.090	53.547	14.082
	Datang	21.320	20.852	10.876	103876	11.782	10.354	58.470	54.748	14.957
Jumlah keberangkatan (Orang)		467.346	408.121	364.215	354.332	249.144	243.661	179.886	188.073	38.669
Jumlah kedatangan (Orang)		472.212	390.522	342.347	315.868	220.132	218.472	162.346	170.359	39.648
Jumlah keberangkatan (%)		49,74	51,10	51,55	52,87	53,09	52,73	52,56	52,47	49,37
Jumlah kedatangan (%)		50,26	48,90	48,45	47,13	46,91	47,27	47,44	47,53	50,63

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai dan Kota Dumai Dalam Angka, 2013-2021

Dari Tabel 2.141 diatas dapat dilihat bahwa jumlah arus penumpang angkutan umum baik melalui terminal, pelabuhan, maupun bandara di Kota Dumai dalam rentang waktu 2012-2020 mengalami fluktuasi. Namun apabila dilihat secara lebih lanjut, jumlah penumpang angkutan laut (pelabuhan) masih mendominasi diantara angkutan lainnya di Kota Dumai. Terlihat sejak tahun 2012-2020 jumlah penumpang angkutan yang melalui pelabuhan kapal lebih banyak apabila dibandingkan dengan penumpang melalui terminal (bis) dan bandar udara (pesawat). Persentase kedatangan hanya pada tahun 2012 dan 2020 jumlah kedatangan lebih banyak dibandingkan dengan keberangkatan masing-masing (49,74% tahun 2012) lebih rendah dibandingkan dengan keberangkatan sebesar 50,26% pada tahun 2012 demikian halnya pada tahun 2020.

2) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Adanya pelabuhan laut, udara, dan terminal bis dapat dikatakan menjadi salah satu sarana perhubungan yang memegang peranan penting dalam perkembangan suatu daerah. Kota Dumai memiliki pelabuhan yang merupakan salah satu “pintu masuk” bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan 80% kegiatan ekspor impor dilakukan melalui pelabuhan ini.

Dari Tabel 2.142 diketahui bahwa terdapat masing-masing satu buah pelabuhan penumpang yakni Pelindo, satu buah pelabuhan Ro-ro, satu buah bandara yakni Pinang Kampai, serta satu buah terminal penumpang yakni yang terdapat di jalan Kelakap Tujuh. Disamping dari keempat tersebut masih terdapat beberapa pelabuhan dan terminal di Kota Dumai, diantaranya tiga buah pelabuhan yang dikelola oleh swasta (perusahaan) yakni Pelabuhan Caltex/ Chevron yang khusus untuk mengangkut minyak mentah dan BBM,

Pelabuhan Pertamina yang juga dipergunakan untuk mengangkut minyak mentah dan BBM, serta Pelabuhan Kawasan Industri Dumai yang mengangkut minyak nabati dan pupuk NPK. Selain itu juga terdapat terminal barang yang terletak di Bukit Jin, Jalan Kelurahan Bukit Datuk.

Tabel 2.144
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2010-2020

Indikator	Tahun										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pelabuhan Penumpang	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pelabuhan Ro-Ro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bandara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Terminal Penumpang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Perhubungan, 2019

3) Aspek Peningkatan Kualitas Pelayanan Angkutan Umum Dan Barang

Beberapa aspek yang mempengaruhi angkutan umum dan barang adalah keberadaan terminal atau pelabuhan, angkutan umum dan ketertiban dalam berlalu lintas. tabel dibawah berikut menggambarkan kondisi aspek-aspek tersebut:

Tabel 2.145
Aspek Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Angkutan Umum Dan Barang Di Kota Dumai Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Terminal Type C	0	0	0	0	0
Angkutan Kota (Oplet)	114	86	52	35	35
Becak Motor	0	0	20	53	53
Angkutan Online	0	0	0	0	251
Pelabuhan Rakyat	9	9	9	9	9
Jumlah Kecelakaan	77	71	69	67	64
Jumlah Pelanggaran	7.000	5.796	7.933	6.581	12.395

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai, 2016-2021

4) Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah Uji KIR angkutan umum yang dimaksud di sini merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Data jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel 2.144 berikut ini.

Tabel 2.146
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Dumai
Tahun 2010-2018

Indikator	Tahun								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	4.898	9.898	4.898	4.898	4.762	5.103	4.078	4.075	3.395

Sumber: Dinas Perhubungan, 2019

Jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Dumai dalam kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2018 menunjukkan angka yang fluktuatif seperti yang tersaji pada Tabel 2.142. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai fluktuasi jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Dumai ini, apakah karena pengujian KIR tidak terikat batasan administrasi sehingga kendaraan dari luar kota dapat melakukan pengujian KIR di Kota Dumai, atau ada terdapat alasan yang lainnya.

5) Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Kepemilikan KIR angkutan umum didapatkan dari hasil perhitungan jumlah angkutan umum yang melakukan uji KIR. Berikut adalah Tabel 2.145 data indikator kepemilikan KIR angkutan umum.

Tabel 2.147
Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Dumai
Tahun 2010-2020

Indikator	Tahun										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kepemilikan KIR Angkutan Umum	9.797	9.797	9.797	9.797	9.523	10.206	10.741	9.171	9.274	9.456	9.708

Hasil yang ditunjukkan oleh tabel kepemilikan KIR angkutan umum di Kota Dumai menunjukkan hasil yang fluktuatif dengan kecenderungan penurunan dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020 terjadi penutupan kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dikarenakan alat pengujian yang belum memenuhi standard yang ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat.

6) Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum

Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi menyusun perencanaan dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melaksanakan penetapan kebijakan dan menyelenggarakan kegiatan di bidang pengujian kendaraan bermotor, penerangan jalan umum, dan bina keselamatan jalan dan perlintasan sebidang. Waktu yang dibutuhkan untuk pengujian kendaraan bermotor. Lama

pengujian kelayakan angkutan umum di Kota Dumai sejak tahun 2010 -2019 tersaji pada Tabel 2.146 berikut.

Tabel 2.148
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai
Tahun 2010-2019

Indikator	Tahun									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	30 Menit	30 Menit	30 Menit	30 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit

Sumber: Dinas Perhubungan, 2020

7) Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum

Pengujian kendaraan bermotor tersebut berada di bawah otoritas Dinas Perhubungan (Dishub) dan biasanya diterapkan pada kendaraan-kendaraan pelat kuning atau angkutan umum. Jika suatu kendaraan umum tidak lolos uji kir, maka kendaraan tersebut tak boleh beroperasi untuk mengangkut penumpang dan diharuskan untuk memperbaiki bagian-bagian yang tidak lolos dalam uji kir. Berikut disajikan Tabel 2.147 perkembangan biaya KIR 2011-2020.

Tabel 2.149
Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai (Rp.)
Tahun 2010-2020

Indikator	Tahun										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	29.000	29.000	29.000	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	82.500	82.500

Sumber: Dinas Perhubungan, 2011-2020

Besarnya biaya pengujian yang ditetapkan dari tahun 2010 hingga tahun 2013 adalah sebesar Rp 29.000,-. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi Rp 40.000,- dan biaya tersebut masih dipergunakan hingga 2018 dan tahun 2019-2020 naik menjadi Rp. 82.500,

8) Pemasangan Rambu-Rambu

Formula yang digunakan untuk perhitungan indikator pemasangan rambu-rambu adalah jumlah pemasangan rambu-rambu dibagi dengan jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia dikalikan dengan bilangan 100. Pemasangan rambu-rambu di berbagai titik strategis dan beberapa ruas jalan, serta lingkungan permukiman penduduk sangat penting dilakukan untuk memberikan petunjuk dan mempermudah pengguna jalan dalam mencari tempat tujuan. Selain itu, rambu-rambu tersebut juga berfungsi untuk

memberikan peringatan bagi pengguna jalan agar lebih waspada terhadap sesuatu yang berbahaya di ruas jalan.

Data yang bersumber dari Dinas Perhubungan Kota Dumai yaitu: jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun 2015 terpasang rambu lalu lintas tiang tunggal sebanyak 952 unit, dan rambu cantilever type F sebanyak 389 unit, RPPJ sebanyak 87 unit, serta RPPJ portal bentang sebanyak 4 unit; jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun 2016 sebanyak 334 unit; tahun 2017 sebanyak 892 unit; tahun 2018 sebanyak 15 unit; tahun 2019 sebanyak 88 unit; dan tahun 2020 sebanyak 340 unit. Terkait formulasi perhitungan indikator pemasangan rambu-rambu belum bisa ditampilkan dikarenakan belum terdapat dokumen perencanaan terkait jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia.

Tabel 2.150
Perkembangan Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu di Kota Dumai,
2015-2020

No	Rambu-Rambu Lalin	Satuan	Tahun						Pertumbuhan / Tahun (%)
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Pemasangan Rambu-rambu Jalan	Unit	952	334	892	15	88	340	-122,62
2	Persentase Pertumbuhan pemasangan Rambu-rambu	%		-65	167	-98	487	286	-288,09

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai, 2016-2021

2.4.2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

1) Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi sangat membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah baik dalam manajemen internal organisasi maupun dalam pelaksanaan pelayanan public kepada masyarakat. Data aplikasi fungsional yang telah diterapkan pada Perangkat Daerah di Kota Dumai pada Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.149 berikut.

Tabel 2.151
Aplikasi Fungsional yang Digunakan Perangkat Daerah Kota Dumai
Tahun 2020

No	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah Pengelola
I	Layanan Publik		
1	Sistem Informasi Pendidikan	- Dapodik (Data Pokok Tenaga Kependidikan) - SIMDIK (Sistem Informasi Pendidikan) - BeeSMART (ujian try out online)	Disdikbud Kota Dumai
2	Sistem Informasi Kesehatan	- SIMRS (Sistem Informasi Rumah Sakit)	RSUD Kota Dumai

No	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah Pengelola
		- ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana dan Perlatan Kesehatan) - SIPERMON (Sistem Informasi Perencanaan dan Monitoring Evaluasi)	
3	Sistem Informasi Kesehatan Daerah Optimal- Sistem Informasi Daerah Binaan	- SIKDA-OPTIMA. (Sistem Informasi Kesehatan Daerah Optima) - SIDARBIN (Sistem Informasi Daerah Binaan)	Dinas Kesehatan Kota Dumai
4	Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak	- SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
5	Sistem Informasi Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kemiskinan	- SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation)	Dinsos Kota Dumai
6	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	- Sistem Perencanaan Daerah (SIMREDA) - <i>E-Database</i>	BAPPEDA Kota Dumai
7	Sistem Informasi Penanaman Modal/Perizinan	- Sistem Informasi Perizinan (SiPERI) - SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secar Elektronik) - OSS (Online Single Submission)	DPMPTSP Kota Dumai
8	Sistem Informasi Pendapatan Daerah	- E-Paddum (Elektronik Pendapatan Asli Dumai) - E-Billing (Elektronik Pajak Online untuk Hotel, Restoran, dan Hiburan - SIMPATDA (Sistem Informasi Majemen Pendapatan Daerah)	BAPENDA Kota Dumai
9	CCTV Online	- cctv.dumaikota.go.id	Dinas Perhubungan Kota Dumai
II Administrasi dan Manajemen Umum			
1	Sistem Informasi Aset dan Barang Daerah	- Simda-BMD (Sistem Manajemen Daerah-Barang Milik Daerah)	BPKAD Kota Dumai
2	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	- e-budgeting.dumaikota.go.id	BAPPEDA Kota Dumai
3	Sistem Informasi Pengadaan	- www.lpse.dumaikota.go.id	Bagian Adm. Pembangunan Setdako Dumai
4	Sistem Informasi Pembangunan	- Sistem Perencanaan Daerah (SIMREDA) - <i>E-Database</i>	BAPPEDA Kota Dumai
5	Sistem Informasi Legislasi	- www.dprd.dumaikota.go.id - www.jdih.dumaikota.go.id	- Setwan Kota Dumai - Bagian Hukum dan HAM Setdako Dumai
6	Sistem Informasi Kearsipan	- Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) (Pasif)	DISPERSIP Kota Dumai

No	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah Pengelola
7	Sistem Informasi Perpustakaan	- Integrated Libery Sistem (INLIS lite)	DISPERSIP Kota Dumai
8	Sistem Informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	- E-LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) - E-SAKIP (Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Inspektorat
9	Sistem Aplikasi Perkantoran surat-menyurat	- E-Office	Bagian Umum Setdako Dumai
10	Sistem Administrasi Kependudukan	- siak.depdagri.go.id	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
III	Administrasi Legislasi		
1	Sistem Informasi Jaringan dan Dokumentasi Hukum	www.jdih.dumaikota.go.id	Bagian Hukum Setdako Dumai
IV	Manajemen Keuangan		
1	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	e-budgeting.dumaikota.go.id	BAPPEDA Kota Dumai
2	BPKAD, Bappeda, Biro AP, Biro Organisasi dan Dispenda	SIMDA-Keuangan	BPKAD Kota Dumai
3	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	SIMDA-Keuangan	BPKAD Kota Dumai
VI	Manajemen Kepegawaian		
1	Sistem Informasi Kepegawaian	- Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) - Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (simpeg.dumaikota.go.id)	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Setdako Dumai, 2021

Dari data diatas dapat diketahui bahwa belum semua perangkat daerah yang menggunakan teknologi informasi dalam manajemen internal organisasi maupun pelayanan publik.

2) Website Milik Pemerintah Daerah

Website milik Pemerintah Kota Dumai ada sejak tahun 2002, dan berisikan informasi tentang fasilitas kota, pemerintahan, pelayanan, dan informasi-informasi aktual yang selalu di-*update* hampir setiap hari. Dapat dikatakan situs resmi milik Pemerintah Kota Dumai ini selalu menayangkan informasi terbaru dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala informasi dan berita yang terjadi di Kota Dumai ini hanya dengan memantau *website* ini.

Tabel 2.152
Website Milik Pemerintah Daerah di Kota Dumai Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Website milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai, 2020

2.4.2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1) Koperasi Aktif

Pertumbuhan usaha kecil menengah dan koperasi memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan kehidupan masyarakat. Fungsi dari koperasi adalah sebagai sarana pendukung perekonomian dan usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha kecil mikro menengah atau informal sebagai bentuk perekonomian rakyat yang mampu bertahan ketika usaha formal tidak mampu memenuhi lapangan pekerjaan. Pertumbuhan koperasi aktif di Kota Dumai dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan sebesar 3,15% per tahun atau naik dari 147 unit tahun 2016 menjadi 163 unit tahun 2020 dengan pertumbuhan persentase koperasi aktif rata-rata sebesar 8,20%, sesuai Tabel 2.151 dibawah ini.

Tabel 2.153
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah Koperasi	Unit	272,00	199,00	213,00	225,00	245,00	-1,32
2	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	147,00	161,00	177,00	190,00	163,00	3,15
3	Persentase Koperasi Aktif	%	54,04	80,90	83,10	84,44	66,53	8,20

Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM dan Dumai Dalam Angka, 2021

Dari data di atas dapat diketahui bahwa perkembangan koperasi aktif di Kota Dumai perkembangannya sangat fluktuatif, namun secara rata-rata kecenderungannya meningkat sampai dengan tahun 2020, walaupun jumlah koperasi mengalami penurunan sebesar -1,32% per tahun.

Berdasarkan Tabel 2.152 menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah koperasi aktif tertinggi terdapat di Kecamatan Sungai Sembilan sebesar 20,76% per tahun atau bertambah dari 21 unit pada tahun 2016 menjadi 44 unit pada tahun 2020. Koperasi tersebut mempunyai peranan dalam sebagai berikut: Membantu anggota untuk peningkatan pendapatan/penghasilan; Menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan; Meningkatkan taraf hidup masyarakat; Turut mencerdaskan bangsa; Mempersatukan dan mengembangkan daya

usaha dari orang, baik perseorangan maupun warga masyarakat; Menyelenggarakan kehidupan ekonomi secara demokrasi.

Tabel 2.154
Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Bukit Kapur	Unit	12	12	13	14	13	2,22
2	Medang Kampai	Unit	8	9	10	11	9	3,86
3	Sungai Sembilan	Unit	21	29	35	39	44	20,76
4	Dumai Barat	Unit	13	14	14	15	17	7,04
5	Dumai selatan	Unit	24	26	28	28	23	-0,46
6	Dumai Timur	Unit	33	34	38	41	30	-1,03
7	Dumai Kota	Unit	36	37	39	42	27	-4,96
	Kota Dumai	Unit	147	161	177	190	163	3,15

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2017-2021

2) Usaha Mikro dan Kecil

UMKM secara umum berarti usaha produktif yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sendiri membedakan usaha menjadi empat jenis, yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan memberikan kontribusi perekonomian masyarakat menengah ke bawah. UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar, selain itu kelompok UMKM tahan terhadap tekanan krisis ekonomi. Kota Dumai memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang kecil dari tahun ke tahun. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) banyak bergerak di bidang industri kecil, perdagangan kecil dan kerajinan. Perkembangan UMKM tahun 2011-2020 dengan pertumbuhan sebesar 6,97% per tahun.

Tabel 2.155
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2011-2020

Indikator	Satuan	Tahun										Pertumbuhan / Tahun (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Usaha Mikro dan Kecil	Unit	8.949	10.700	11.232	11.797	11.797	12.497	12.672	14.874	16.324	16.116	6,97

Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Dumai, 2019 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020. Catatan 2020 Estimasi Tim.

Adapun jumlah pendamping UMKM Kota Dumai dari tahun 2015-2020 hanya berjumlah 7 orang, dengan 1 Kecamatan 1 orang pendamping, dan apabila dibandingkan dengan jumlah UKM yang ada maka jumlah pendamping

ini belum memadai dengan rasio 1: 2.304. Adapun rincian jumlah pendamping per tahun tersaji pada Tabel 2.154 berikut:

Tabel 2.156
Jumlah Pendamping Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2015-2020

Indikator	Satuan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pendamping UKM	Orang	7	7	7	8	7	7

Sumber: Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM 2020

Selanjutnya Rekapitulasi perkembangan jumlah UMKM Kota Dumai Tahun 2019. Berdasarkan rekapitulasi perkembangan UMKM Kota Dumai tahun 2016-2019 mengalami kenaikan yang signifikan, pada tahun 2016 terdapat 12.497 UMKM, tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 12.497 UMKM dan pada tahun 2019 jumlah UMKM di Kota Dumai mengalami pertumbuhan yang signifikan yakni naik menjadi 16.324 UMKM jika dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan Jumlah UMKM per kecamatan tersaji pada Tabel 2.155 berikut.

Tabel 2.157
Rekapitulasi Perkembangan UMKM Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2016-2019

No	Kecamatan	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Dumai Barat	2.377	2.402	2.657	2.837
2	Dumai Timur	2.713	2.738	3.051	3.231
3	Bukit Kapur	1.683	1.708	2.002	2.182
4	Medang Kampai	1.118	1.143	1.476	1.656
5	Dumai Selatan	964	989	1.317	1.497
6	Dumai Kota	2.153	2.178	2.521	2.701
7	Sungai Sembilan	1.489	1.514	1.850	2.030
	Jumlah	12.497	12.672	14.874	16.324

Sumber: Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM, 2020

2.4.2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

1) Jumlah Investor Berskala Nasional PMDN dan PMA

Investasi mempunyai peranan penting dalam proses pembangunan karena menentukan dinamika pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik, maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien. Pada dasarnya kegiatan investasi dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan swasta. Penanaman modal di Kota

Dumai dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi para investor didalam menanamkan usahanya di Kota Dumai. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Dari tahun 2010-2019, jumlah investor PMDN dan PMA menunjukkan perkembangan yang positif. Data selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.156 berikut.

Tabel 2.158
Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Dumai
Tahun 2010 – 2019

Indikator	Tahun									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Perusahaan PMDN	32	42	47	53	57	60	63	64	24	91
Jumlah Perusahaan PMA	43	52	56	62	66	69	76	84	4	44

Sumber: Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, 2020

2) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA

PMA (Penanaman Modal Asing) merupakan pembentukan modal bisnis di Indonesia yang ditujukan untuk investor asing, dengan sepenuhnya menggunakan modal asing atau sebagian dengan investor domestik. PMDN merupakan bentuk entitas bisnis terpopuler dan paling banyak digunakan untuk berbagai macam aktivitas bisnis di Indonesia. Jumlah nilai investasi PMA/PMDN berskala nasional di Kota Dumai mengalami perkembangan yang fluktuatif selama periode 2016-2020. Nilai investasi PMA dan PMDN tahun 2016 sebesar Rp. 5.56 triliun kemudian meningkat menjadi 12,96 triliun tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 59,73%. Tabel 2.157. Berdasarkan data Dumai Dalam Angka Tahun 2020. Berikut data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, nilai investasi PMDN dan PMA tahun 2020 sebesar Rp. 12,96 triliun.

Tabel 2.159
Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Dumai Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
PMA (Rp. Juta)	3.244.520,66	2.390.904,98	1.635.027,80	3.699.939,00	5.844.192,48	31,58
PMDN (Rp. Juta)	2.318.981,60	2.007.203,80	371.285,60	2.237.451,80	7.117.105,50	156,44
Jumlah	5.563.502,26	4.398.108,78	2.006.313,40	5.937.390,80	12.961.297,98	59,73

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

3) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Rasio daya serap tenaga kerja di Kota Dumai mengalami perkembangan fluktuatif dengan perkembangan naik-turun. Jumlah perusahaan tidak menentukan jumlah tenaga kerja yang tinggi juga di Kota Dumai, karena ada beberapa perusahaan besar yang menyerap tenaga kerja yang besar tetapi ada perusahaan yang hanya menyerap tenaga kerja yang sedikit. Perusahaan PMDN dan PMA ini juga melibatkan tenaga kerja asing (TKA) dan tenaga kerja Indonesia (TKI). Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020, jumlah TKI/TKA yang bekerja pada perusahaan PMDN tahun 2019 dan tahun 2018 berturut-turut sebanyak 749/10 orang dan 871/0 orang. Sedangkan untuk jumlah TKI/TKA yang bekerja pada perusahaan PMA tahun 2018-2019 berturut-turut sebanyak 410/7 orang dan 618/6 orang. Berdasarkan data tersebut, maka rasio daya serap tenaga kerja tahun 2018 dan 2019 berturut-turut adalah 9,57 dan 14,18.

4) Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN dan PMA

Realisasi nilai investasi PMA dan PMDN mengalami perubahan setiap tahunnya seperti yang tersaji pada Tabel 2.158. Pada tahun 2016-2020, Kota Dumai mengalami peningkatan nilai investasi PMA sebesar 31,58% dan PMDN mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 156,44%. Peningkatan nilai investasi yang tinggi menyiratkan bahwa kondisi wilayah Kota Dumai memberikan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan investasi.

Tabel 2.160
Persentase Nilai Realisasi PMA dan PMDN Kota Dumai Tahun 2011-2020

Indikator	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
PMA (Rp. Juta)	3.244.520,66	2.390.904,98	1.635.027,80	3.699.939,00	5.844.192,48	31,58
PMDN (Rp. Juta)	2.318.981,60	2.007.203,80	371.285,60	2.237.451,80	7.117.105,50	156,44

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

2.4.2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

1) Jumlah Organisasi Pemuda

Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif dibutuhkan pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif

(pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental).

Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat dan terlarang dan perilaku beresiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipatif dan keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio-ekonomi dan politik.

Tabel 2.161
Jumlah Organisasi Pemuda Kota Dumai Tahun 2010-2019

Indikator	Tahun									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah organisasi pemuda	52	52	52	52	52	52	55	55	47	47

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 2019

2) Jumlah Organisasi Olahraga

Jumlah organisasi olahraga di Kota Dumai pada tahun 2019 berjumlah 29 organisasi, data ini didapatkan dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai. Adapun bentuk pembinaan yang diberikan oleh pemerintah daerah pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga, pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah, pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat, Penyelenggaraan pekan olahraga pelajar daerah dan pembinaan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan pembinaan olahraga. Namun begitu yang selalu menjadi kendala dan pembinaan adalah fasilitas sarana dan prasarana latihan atlet belum memadai.

Tabel 2.162
Jumlah Organisasi Olahraga Kota Dumai Tahun 2010-2019

Indikator	Tahun									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah organisasi olahraga	25	25	25	25	29	29	29	29	29	29

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 2019

3) Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan pada tahun 2011 adalah 3 kegiatan dan pada tahun 2019 berjumlah 2 kegiatan kepemudaan, data ini didapatkan dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan.

Tabel 2.163
Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2010-2018

Indikator	Tahun								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah kegiatan kepemudaan	1	3	2	2	3	2	1	2	2

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 2019

Rendahnya kegiatan kepemudaan ini ternyata berdampak terhadap tingginya penggunaan narkoba di kalangan pemuda di Kota Dumai. Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Dumai, jumlah pengguna narkoba di kalangan pelajar, mahasiswa dan pemuda di Kota Dumai pada tahun 2017 adalah sebanyak 984 orang.

4) Jumlah Kegiatan Olahraga

Jumlah kegiatan olahraga pada tahun 2010 adalah 2 kegiatan dan pada tahun 2019 berjumlah 3 kegiatan kepemudaan, data ini didapatkan dari Jumlah lapangan olahraga sampai tahun 2019 berjumlah 1 lapangan olahraga, data ini didapatkan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

Tabel 2.164
Jumlah Kegiatan Olahraga Kota Dumai 2010-2019

Indikator	Tahun									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah kegiatan olahraga	2	5	8	4	4	4	5	3	6	3

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 2019

2.4.2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

1) Tersedianya Sistem Data dan Statistik Yang Terintegrasi

Ketersediaan data statistik yang terintegasi melalui implementasi teknologi informasi sangat membantu dalam perencanaan pembangunan baik bagi pemerintah maupun pihak swasta. Namun demikian banyak faktor-faktor yang sangat berpengaruh di dalamnya yakni pengguna komputer, dukungan dari manajemen, transfer pengetahuan dari konsultan teknologi informasi sendiri, desain bisnis proses, struktur organisasi dan budaya yang ada pada sebuah lembaga. Meskipun keuntungan dari sistem teknologi informasi dilihat secara signifikan dan jelas, namun biaya dari pengimplementasian sistem teknologi informasi ini sangat besar.

2) Tersedianya Buku Kabupaten/Kota Dalam Angka

Indikator pada aspek statistik Kota Dumai yang terdiri dari tersedianya buku “Kota Dalam Angka” telah terpenuhi, yakni dalam rentang waktu 2010-

2020 tersedia dapat diakses secara online, namun demikian waktu ketersediaannya belum sesuai dengan waktu kebutuhan penggunaan data untuk perencanaan.

3) Tersedianya Buku PDRB Kabupaten Kota

Indikator pada aspek statistik Kota Dumai yang terdiri dari tersedianya buku buku “PDRB Kota” telah terpenuhi, yakni dalam rentang waktu 2010-2020 tersedia dapat diakses secara online, namun demikian waktu ketersediaannya belum sesuai dengan waktu kebutuhan penggunaan data untuk perencanaan.

Tabel 2.165
Publikasi Buku Statistik Kota Dumai Tahun 2010-2020

Indikator	Tahun										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Buku “Kota Dalam Angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku “PDRB Kota”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: BPS Kota Dumai dan Bappeda Kota Dumai, 2011-2021

2.4.2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Penyelenggaraan pengamanan persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara.

Pengelolaan persandian di pemerintah daerah dapat dikategorikan bersifat spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun bersifat spesifik, bukan berarti publik dilarang untuk mengawasi pengelolaannya agar tidak terjadi penyalahgunaan. Dengan dimensi pengaturan yang dianut dalam kebebasan Informasi publik, informasi dan transaksi elektronik, serta substansi pengecualian kerahasiaan negara, maka pemda bukan tidak mungkin berada dalam dilema untuk mengelolanya lebih lanjut di tingkat kewenangan yang ada. Hal ini mengingat dibandingkan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah cenderung lebih besar muatan tuntutan keterbukaan informasinya bagi publik.

Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan

teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), keuangan (*e-budgetting*) dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa resiko seperti penyadapan, *hacking* dan berbagai ancaman lainnya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi terasa lebih penting.

Persandian sebagai urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan tidak tergolong pelayanan dasar adalah salah satu instrumen pmda dalam menjaga integrasi bangsa. Namun demikian Kota Dumai pola penggunaan teknologi informasi belum dilakukan secara penuh dan Sebagian masih dilakukan secara manual.

Ketidakmerataan penggunaan teknologi informasi di semua OPD menyebabkan pelaksanaan urusan persandian belum terlaksana secara maksimal. Hal ini yang menyebabkan timbulnya subjektivitas persandian yang terbatas pada tujuan menjaga kerahasiaan informasi semata.

Urusan persandian bagi pemerintah daerah memegang peranan yang cukup penting, terutama dikaitkan dengan bagaimana keamanan atau kerahasiaan data dan informasi pemerintah daerah dapat terlindungi. Namun disisi yang lain, urusan persandian juga berhadapan dengan era keterbukaan informasi yang sudah meliputi semua aspek kehidupan bermasyarakat. Penataan pengaturannya harus baik dan lengkap, karena persandian harus berhadapan dengan bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintah daerah yang bersih dan terbuka.

2.4.2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

1) Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang ada di Kota Dumai dalam rentang waktu 2010-2018 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2010 jumlah festival seni dan budaya berjumlah 2 kegiatan, sempat naik pada tahun 2012 menjadi 4 kegiatan, namun terus turun hingga pada tahun 2016 hanya tinggal 2 kegiatan saja. Tetapi kembali mengalami peningkatan di tahun 2017 dan 2018 menjadi 5 kegiatan. Adapun bentuk dari penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah tahun 2018 adalah panggung seni rakyat, festival lampu colok, festival layang dan gasing, festival masakan tradisional, dan malam resepsi kenegaraan. Ini membuktikan bahwa upaya penyelenggaraan festival seni dan budaya yang diwujudkan melalui festival dan

lomba mulai menumbuhkan minat dan antusiasme masyarakat dalam melestarikan kebudayaan melayu.

Tabel 2.166
Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kota Dumai
Tahun 2010-2018

Indikator	Tahun								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	2	2	4	1	2	2	2	5	5

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2019

2) Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi

Selama 5 tahun, sudah 153 karya seni di Kota Dumai yang berbasis Melayu diinventarisasi dan direvitalisasi. Sesungguhnya potensi karya seni dan budaya Melayu yang sejatinya direvitalisasi masih sangat banyak. Basis budaya Melayu yang berada pada aliran sungai sebagai tempat peradaban budaya Melayu masa lalu harus menjadi sumber revitalisasi dan inventarisasi. Sungai besar harus menjadi fokus dalam pelestarian budaya melayu, terutama budaya lisan dan karya seni budaya Melayu lainnya. Hal ini mengingat generasi tua yang tahu persis tentang budaya lisan dan karya seni budaya Melayu sudah mulai berangsur-angsur termakan usia tua (Sumber: RPJMD Provinsi Riau 2019-2024).

2.4.2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

1) Jumlah Perpustakaan

Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa belum semua fungsi tersebut dilaksanakan oleh perpustakaan. Fungsi rekreasi seringkali diabaikan oleh pengelola perpustakaan maupun badan yang menaunginya. Fungsi rekreasi di perpustakaan dapat mengacu pada semua hal dalam perpustakaan. Beberapa aspek yang diperlukan dalam mengoptimalkan fungsi rekreasi diperpustakaan antara lain: birokrasi, anggaran, SDM, serta manajemen yang bagus, prosentase perimbangan jumlah koleksi, serta keterbatasan anggaran sehingga untuk membeli bahan bacaan ringan dan santai tidak tercukupi menjadi salah satu kendala dalam mengoptimalkan fungsi rekreasi di perpustakaan. Perlu strategi khusus untuk untuk menggaet masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan antara lain dengan cara mengikuti kegiatan pameran buku, workshop, pasar murah atau yang lainnya dengan berlandaskan fungsi rekreasi. Beberapa pengembangan berdasarkan pada konsep fungsi rekreasi diantaranya meliputi program edu-tourism,

keberagaman layanan perpustakaan baik di dalam kegiatan utama perpustakaan, maupun di luar kegiatan dasar perpustakaan, persentase perimbangan koleksi, tata ruang, lighting dan pewarnaan ruangan yang memberikan kesan nyaman dan tidak membosankan serta Perabotan dan perlengkapan yang tidak terlalu kaku dan formal.

Jumlah perpustakaan yang ada di Kota Dumai dalam rentang waktu 2011 hingga tahun 2015 relatif mengalami penambahan. Pada tahun 2011 jumlah perpustakaan adalah 9 perpustakaan, dan pada tahun 2018 jumlah perpustakaan naik menjadi 15 begitu pula pada tahun 2019 belum mengalami penambahan. Jumlah Perpustakaan di Kota Dumai Tahun 2010-2019.

Tabel 2.167
Jumlah Perpustakaan Kota Dumai Tahun 2010-2019

Indikator	Tahun									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Perpustakaan	9	12	16	15	15	15	15	15	15	15

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2019

2) Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk

Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk di Kota Dumai dari tahun 2011-2019 menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2011 rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk adalah sebesar 0,35 dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 0,49, namun terus terjadi penurunan karena penambahan jumlah penduduk. Berikut Tabel 2.166 Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk.

Tabel 2.168
Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk
Tahun 2011-2019

Indikator	Tahun									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Jumlah Perpustakaan	9	12	16	15	15	15	15	15	15	
Jumlah Penduduk per 10.000	25,99	26,80	27,41	28,01	28,60	29,19	29,76	30,33	30,06	
Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk	0,35	0,45	0,58	0,54	0,52	0,51	0,50	0,49	0,49	

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai dan Kota Dumai Dalam Angka, 2019, diolah)

3) Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun merupakan perbandingan antara jumlah pengunjung perpustakaan selama 1 tahun dengan jumlah penduduk per 10.000. Adapun perkembangan rasio jumlah

pengunjung perpustakaan per tahun di Kota Dumai dari rentang waktu 2016-2019 terus mengalami peningkatan seperti yang tersaji pada Tabel 2.167.

Tabel 2.169
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kota Dumai 2016-2019

No	Indikator	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	24.902	28.242	29.370	37.710
2	Jumlah Anggota Perpustakaan	111	205	178	132

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai dan Kota Dumai Dalam Angka, diolah

4) Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah di Kota Dumai dari rentang waktu tahun 2016-2020 sebanyak 53.557, baik melalui pembelian buku oleh perpustakaan daerah sendiri maupun hibah buku ke perpustakaan daerah oleh pihak lain. Tetapi ada hibah buku langsung oleh pihak lain ke perpustakaan kelurahan maupun ke perpustakaan rutan. Pada tahun 2018 jumlah buku menjadi 51.097 dan pada tahun 2019 Dinas Perpustakaan mendapat penambahan buku berupa *e-book* yang dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus sebanyak 2.460 eksemplar sehingga jumlah buku yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai sebanyak 53.557 eksemplar.

Tabel 2.170
Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Kota Dumai Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Exemplar	48.447	48.447	51.097	53.557	53.557	2,57

2.4.2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Pengelolaan catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi yang memiliki nilai kegunaan dengan teratur dan terencana baik itu arsip yang dibuat maupun diterima, agar mudah ditemukan kembali jika diperlukan. Sistem kearsipan yang diselenggarakan secara optimal akan memperlancar kegiatan dan tujuan lembaga, organisasi, badan maupun perseorangan. Kegiatan pengelolaan arsip secara baku yang dilakukan oleh OPD yang ada di Kota Dumai, berdasarkan data dari Dinas Perpustakaan dan Arsip untuk persentase arsip daerah yang dapat dikelola seperti yang terlihat pada Tabel 2.169.

Tabel 2.171
Dokumen Arsip yang Tersimpan di Dinas Perpustakaan dan Arsip
Tahun 2012-2019

Tahun	Jumlah Dokumen Arsip
2012	83
2013	102
2014	1006
2015	748
2016	1590
2017	1791
2018	1.824
2019	1.710

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2020

2.4.3 Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

1) Produksi Perikanan Laut

Kota Dumai memiliki laut yang cukup berpotensi sebagai wadah produksi perikanan laut. Perikanan laut di Kota Dumai memiliki potensi untuk dikembangkan karena memiliki produksi perikanan laut yang memiliki banyak jenis ikan dan produksi perikanan laut yang tinggi setiap tahunnya. Kota Dumai memiliki beragam jenis perikanan laut yang memiliki produksi yang besar setiap tahunnya dibandingkan dengan perikanan budidaya.

Tabel 2.172
Jumlah Produksi Perikanan, Cakupan Konsumsi Ikan dan Cakupan
Binaan Kelompok Nelayan

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Konsumsi Ikan Perkapita	45	32	41	40	46	45
Produksi Perikanan Budidaya	194,70	260,90	342,36	265,31	329,78	293,78
Cakupan Binaan Kelompok Nelayan	26	26	26	28	29	29
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Ton)	594,00	533,60	945,20	1.832,65	1.426,74	978,52

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, 2021

Dari tahun ketahun, perkembangan produksi perikanan laut fluktuatif. Pada tahun 2011 produksi perikanan laut mencapai 1.099.625 Kg kemudian turun menjadi 585.791 kg tahun 2020. Produksinya mengalami penurunan kemudian terjadi kenaikan dan turun kembali hal ini dapat dicermati karena

kenaikan karena tahun 2011 masih banyaknya armada penangkapan ikan dan alat tangkap yang masih baik, kemudian tahun berikutnya adanya pelarangan alat tambah berdasarkan undang-undang sementara alat tersebut menjadi alat tangkap yang cukup populer di kalangan masyarakat nelayan sehingga harus ada perubahan alat tangkap, kemudian adanya perbaikan pola mendata statistik yang berdasarkan kawasan tempat melelangkan atau menjual ikan seperti tidak mendata lagi ikan yang masuk ke Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang menjadi pengelolaannya di bawah provinsi. Untuk lebih jelasnya produksi perikanan laut Kota Dumai Tahun 2011-2020. Data selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.171 berikut ini.

Tabel 2.173
Produksi Perikanan Laut (Kg) di Kota Dumai Tahun 2011-2020

No	Jenis Ikan	Tahun										Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Tenggiri	11.097	29.641	222.000	17.100	30.300	40.300	69.811	7.728	404.013	36.372	-294,94
2	Parang-parang	8.946	25.052	248.000	5.300	12.300	14.200	41.887	6.955	12.297	16.808	-524,52
3	Senangin	9.332	20.189	171.000	15.900	24.000	17.700	0	8.500	12.537	11.283	-79,36
4	Kakap hitam/putih	8.692	20.338	170.000	12.200	9.700	8.000	0	7.728	8.690	7.821	-121,69
5	Gulama	13.538	27.724	218.000	20.600	12.400	0	0	0	2.223	2.001	-88,56
7	Lomek	12.681	31.149	235.000	17.000	27.200	57.000	125.660	11.591	5.825	64.584	-220,45
8	Biang	12.404	32.582	216.000	15.700	0	0	0	13.910	0	62.890	-103,22
9	Pari	8.458	22.946	146.000	13.000	14.000	0	0	6.182	23.155	20.840	-78,48
10	Bawal	9.332	21.271	163.000	13.000	13.210	4.400	52.498	7.728	3.364	3.028	-204,21
11	Ikan lainnya	191.922	166.164	1.642.000	159.800	63.700	67.300	49.705	0	276.160	115.326	-119,28
12	Udang lainnya	813.223	533.702	5.781.000	376.600	43.000	151.100	223.489	494.444	271.592	244.838	-234,08
Jumlah		1.099.625	930.758	9.212.000	666.200	249.810	360.000	563.050	564.766	1.019.856	585.791	-148,91

Dinas Perikanan Kota Dumai, 2021

2) Produksi Perikanan Budidaya

Kota Dumai memiliki potensi perikanan lain seperti perikanan darat dalam bentuk perikanan kolam dan tambak tetapi perikanan darat Kota Dumai lebih didominasi oleh budidaya kolam. Perikanan budidaya kolam di Kota Dumai memiliki potensi untuk dikembangkan karena memiliki banyak jenis ikan yang dapat dikembangkan. Walaupun produksi tidak sebanyak perikanan laut, perikanan budidaya kolam memiliki nilai produksi yang cukup besar di Kota Dumai.

Perikanan darat yang ada di Kota Dumai adalah berupa budidaya dalam kolam/tambak. Produksi perikanan budidaya ini cukup beraneka ragam dengan perkembangan produksi perikanan budidaya dari tahun 2011 sampai tahun 2018 mengalami naik-turun. Pada Tahun 2011 produksi perikanan budidaya mencapai 53.096 Kg, kemudian mengalami perkembangan produksi yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, hingga tahun 2018 produksi perikanan budidaya di Kota Dumai mencapai 342.358 Kg. Berikut disajikan Tabel 2.172 Produksi Perikanan Kolam (Kg) di Kota Dumai.

Tabel 2.174
Produksi Perikanan Budidaya (Kg) di Kota Dumai
Tahun 2011 – 2020

No	Jenis Ikan	Tahun										Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Ikan Mas	400	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0,00
2	Ikan Nila	2.723	2.710	850	400	1.000	270	2.534	2.750	345	9.660	379,39
3	Gurami	1.240	1.450	1.350	-	-	1.360	942	1.478	318	373	-2,78
4	Lele	33.920	106.380	138.297	128.522	111.160	197.110	314.456	177.330	275.500	164.964	36,84
5	Patin	13.343	41.370	18.848	8.000	-	10.300	7.430	9.470	7760	2.942	1,94
6	Bawal	200	3.120	3.700	800	-	500	-	-	0	0	155,58
7	Bandeng	960	6.330	4.950	16.827	4.816	1.240	860	1.585	0	0	65,06
8	Udang (Windu/Wanname)	310	3.020	2.410	4.373	5.570	7.620	16.136	21.259	18147	11061	121,05
	Jumlah	53.096	164.380	170.405	158.922	122.546	218.400	342.358	213.872	302.070	189.000	31,65

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai, 2021

2.3.3.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor pendukung perekonomian Kota Dumai. Sektor ini memiliki relasi yang kuat dengan sektor-sektor lainnya dan memiliki kontribusi cukup besar bagi perekonomian daerah, sehingga sektor pariwisata dikembangkan menjadi salah satu potensi daerah.

1) Jenis Destinasi Wisata

Pariwisata merupakan hal yang berhubungan dengan kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan/jasa yang disediakan oleh pihak-pihak terkait seperti masyarakat, pengusaha, pemerintah maupun pemerintah daerah.

Keberadaan potensi pariwisata yang unik dan menarik di suatu daerah seharusnya dapat dimanfaatkan melalui pengembangan pariwisata yang baik. Kota Dumai memiliki 4 jenis Portofolio produk yaitu wisata alam, wisata budaya, wisata buatan dan wisata kuliner. Adapun jenis-jenis wisata tersebut terdapat pada Tabel 2.173 sebagai berikut:

Tabel 2.175
Jenis Destinasi Wisata Kota Dumai Tahun 2011-2019

Alam	Budaya	Buatan	Kuliner
• Bandar Bakau Hutan Mangrove	• Makam Pawing Lion	• Taman Bukit Gelanggang	• Dekranasda Kota Dumai
• Pantai Puak Teluk Makmur	• Batu Telapak Harimau Sakti		• Wisata Kuliner Ombak
• Pantai Purnama	• Makam Tuk Kedondong		• Oleh-oleh Khas Dumai
• Pantai Koneng Pelintung	• Makam Tuk Syech Umar		• Restoran dan Rumah Makan
	• Pesanggrahan Putri Tujuh		

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2019

2) Jumlah Kunjungan Wisatawan

Jumlah kunjungan wisata dari tahun 2011-2019 mengalami perkembangan yang fluktuatif seperti yang tersaji pada Tabel 2.174. Jumlah kunjungan wisata tertinggi terjadi pada tahun 2015 seiring dengan meningkatnya daya tarik dan jenis pariwisata yang ada di Kota Dumai yaitu sebesar 122.627 orang. Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2011 yaitu wisata domestik sebanyak 54.497 dan wisatawan mancanegara sebanyak 14.388. Sedangkan, tahun 2019 yaitu wisata domestik sebanyak 54.497 dan wisatawan mancanegara sebanyak 15.658. data data ini didapatkan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

Tabel 2.176
Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Dumai Tahun 2011-2019

Indikator	Tahun									Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Wisatawan Domestik	54.497	50.751	63.038	47.254	96.475	39.263	32.825	33.572	20.825	-1,87
Wisatawan Mancanegara	15.658	16.489	13.781	14.384	26.152	12.757	12.512	12.908	9.056	-4,99
Jumlah	70.155	67.240	76.819	61.638	122.627	52.020	45.337	46.480	29.881	-1,79

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2020

2.3.3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

1) Produktivitas Padi

Produksi padi dan bahan pangan utama lokal lainnya di Kota Dumai di pengaruhi oleh besarnya luas panen dan produktivitas. Luas panen yang berhasil

dilakukan tergantung tersedianya lahan sawah maupun lahan bukan sawah serta indeks pertanaman, sedangkan produktivitas padi dan palawija tergantung cara tanam atau paket teknologi yang dilakukan oleh petani di Kota Dumai. Peningkatan produktivitas padi dan palawija cenderung mengalami naik-turun pada. Data selengkapnya mengenai persentase produksi padi dan bahan pangan utama lokal.

Produksi padi dan bahan pangan utama lokal lainnya di Kota Dumai mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun 2011-2019 dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2011 produktivitas padi hanya 2,86 ton/ha kemudian tahun 2019 sebesar 3,35 ton/ha.

Tabel 2.177
Produktivitas Tanaman Padi Di Kota Dumai Tahun 2011-2019

Indikator	Tahun								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Produktivitas Padi (Ton/Ha)	2,86	2,74	2,74	2,62	2,77	3,25	3,33	3,35	3,35

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, 2019

2) Luas, Produksi dan Produktivitas Perkebunan

Berdasarkan kondisi topografi, kemampuan lahan di Kota Dumai berada pada tingkat kemampuan rendah sampai sedang. Kondisi ini membuat lahan di Kota berpotensi untuk pengembangan tanaman perkebunan. Adapun luas areal perkebunan menurut jenis tanaman di Kota Dumai tersaji pada Tabel 2.176. Dari tabel terlihat bahwa jenis tanaman perkebunan yang dominan dikembangkan di Kota Dumai adalah kelapa sawit. Hasil produksi dari perkebunan kelapa sawit ini digunakan sebagai bahan baku pada industri pengolahan kelapa sawit yang ada di Dumai.

Tabel 2.178
Luas, Prosuksi dan Produktivitas Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kota Dumai Tahun 2015-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan /Tahun (%)
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Luas Panen	Ha	41.601,00	41.850,50	42.087,50	42.331,50	42.539,50	42.619,50	0,49
	Kelapa Sawit	Ha	37.521,00	37.795,00	38.079,00	38.350,00	38.569,00	38.665,50	0,60
	Karet	Ha	2.416,50	2.448,00	2.443,00	2.441,00	2.449,00	2.448,00	0,26
	Kelapa	Ha	1.638,00	1.585,00	1.539,00	1.514,00	1.495,00	1.481,50	-1,98
	Kakao	Ha	25,50	22,50	26,50	26,50	26,50	24,50	-0,31
2	Produksi	Ton	82.963,97	80.843,29	81.886,72	84.807,84	84.973,59	85.283,55	0,57
	Kelapa Sawit	Ton	80.387,64	78.306,04	79.326,36	82.121,05	82.248,17	82.544,47	0,55
	Karet	Ton	1.691,64	1.659,98	1.688,68	1.799,44	1.839,88	1.850,44	1,85
	Kelapa	Ton	876,28	868,35	862,03	877,28	874,15	876,98	0,02
	Kakao	Ton	8,41	8,92	9,65	10,07	11,39	11,66	6,82
3	Produktivitas								
	Kelapa Sawit	Ton/ha	2,14	2,07	2,08	2,14	2,13	2,13	-0,05
	Karet	Ton/ha	0,70	0,68	0,69	0,74	0,75	0,76	1,60
	Kelapa	Ton/ha	0,53	0,55	0,56	0,58	0,58	0,59	2,05
	Kakao	Ton/ha	0,33	0,40	0,36	0,38	0,43	0,48	8,05

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2016-2021

Selain kelapa sawit, areal perkebunan di Kota Dumai ditanami karet, kelapa, dan kakao. Untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan maka perlu dilakukan peremajaan tanaman. Peremajaan tanaman ini difokuskan untuk tanaman perkebunan yang sudah tua dan atau perkebunan yang ditanami dengan bibit yang tidak unggul.

3) Populasi dan Produksi Ternak

Perkembangan jumlah ternak unggulan 2015-2020 tumbuh sebesar 10,67% per tahun dengan pertumbuhan positif terdapat pada ternak unggas yaitu ayam kampung tumbuh sebesar 2,68% per tahun, ayam pedaging tumbuh 79,00% dan itik tumbuh 21,58% per tahun. Sementara ternak ruminansia mengalami pertumbuhan negative masing-masing -11,44% untuk ternak sapi, -14,54% untuk ternak kerbau dan 13,28% untuk ternak kambing. Kondisi ini harus menjadi perhatian karena perkembangan jumlah ternak lebih rendah dibandingkan dengan jumlah produksi melalui pemotongan dimana semua ternak unggas dan ruminansia mengalami pertumbuhan positif pemotongan kecuali sapi potong. Jelasnya perkembangan jumlah dan produksi ternak ruminansia dan unggas dapat dilihat pada Tabel 2.177 berikut.

Tabel 2.179
Populasi dan Produksi Ternak Menurut Jenis Ternak
di Kota Dumai Tahun 2015-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan /Tahun (%)
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Populasi Ternak								
1)	Sapi Potong	Ekor	4.407	5.061	4.806	4.891	5.117	1.362	-11,44
2)	Kerbau	Ekor	45	51	72	72	51	1	-14,54
3)	Kambing/Domba	Ekor	6.283	6.447	6.748	13.070	4.264	0	-13,28
4)	Ayam Kampung	Ekor	25.755	13.562	23.347	30.716	16.941	17.260	2,68
5)	Ayam Ras Pedaging	Ekor	159.649	104.614	191.082	573.000	916.492	1.714.000	79,00
6)	Itik	Ekor	2.507	5.553	7.316	8.822	2.733	2.818	21,58
2	Produksi Daging								
1)	Sapi Potong	Ekor	2.577,00	3.015,00	2.684,00	4.891,00	3.026,00	1.362,00	-0,98
2)	Kerbau	Ekor	9,00	29,00	30,00	72,00	7,00	1,00	37,94
3)	Kambing/Domba	Ekor	443,00	608,00	670,00	6.906,00	913,00	-	158,28
4)	Ayam Kampung	Ton	11,73	41,72	11,33	29,18	444,00	454,00	352,84
5)	Telur Ayam Kampung	Butir	253.567	901.262	114.130	290.125	166.957	170.103	56,35
6)	Ayam Ras Pedaging	Ton	703,88	461,00	960,12	444,35	1.100,00	2.056,00	50,90
7)	Itik	Ton	1,15	2,54	43,82	10,58	5.466,00	2.818,00	10637,06
8)	Telur Itik	Butir	1.430	4.059	58.583	1.084.471	19.122	19.716	636,63

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2016-2021

Upaya peningkatan produksi daging dan telur harus terus dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan protein masyarakat. Berdasarkan tabel Angka Kecukupan Gizi (AKG) Kemenkes RI, standar angka kecukupan protein bagi masyarakat Indonesia adalah sekitar 56-59 gram per hari untuk perempuan dan 62-66 gram per hari untuk laki-laki. Hal tersebut berguna dalam rangka mengganti sel yang sudah mati dan mengangkut berbagai zat ke seluruh tubuh, dan membantu pertumbuhan dan perbaikan sel-sel yang rusak.

4) Penyuluh Pertanian

Dalam rangka meningkatkan produksi pertanian, harus banyak yang dibenahi dan salah satu hal pentingnya adalah kualitas sumber daya manusia, karena jika dilihat masalah utama petani adalah rendahnya pengetahuan dan kreativitas dari petani agar pembangunan pertanian terus berkembang. Begitu pentingnya peran penyuluh pertanian membuat pemerintah mengambil langkah untuk lebih memberdayakan para penyuluh. Peran penyuluh pertanian sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. Peran penyuluh pertanian dapat dikatakan sebagai garda terdepan untuk meningkatkan kualitas petani saat ini. Penyuluh berperan sebagai perantara dan penghubung informasi untuk petani maupun dari petani. Penyuluh menyampaikan informasi dari balai pengkajian maupun peneliti ke petani dan menyampaikan aspirasi dari petani ke pembuat kebijakan. Karena di sini penyuluh langsung terjun ke petani dan masyarakat sehingga akan lebih mengetahui kondisi di lapangan yang sebenarnya.

Penyuluh pertanian adalah orang yang bertugas dalam memberikan dorongan kepada petani agar mampu mengubah cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup yang lebih sesuai dengan perkembangan, baik pengetahuan budidaya maupun teknologi. Peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) menitikberatkan pada pesan yang disampaikan. Jika pesan yang disampaikan penyuluh dapat diterima dan diterapkan masyarakat desa dengan baik dan sukarela, berarti tugas penyuluhan telah terlaksana. Faktanya, kesuksesan tugas penyuluh tergantung pada kredibilitas penyuluh.

Peran penyuluhan antara lain sebagai penyebarluasan informasi, penerangan, proses perubahan perilaku, pendidikan, dan proses rekayasa sosial. Pada peran penyuluhan sebagai penyebarluasan informasi, penyuluh diharapkan mampu menyebarluaskan informasi berupa inovasi dengan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat petani desa secara maksimal. Peran penyuluhan sebagai proses penerangan memiliki makna penyuluh harus memberi penerangan atau kejelasan pada petani desa tentang hal-hal yang belum diketahui. Peran penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku berhubungan dengan keterampilan dan sikap mental petani yang membuat mereka menjadi tahu, mau, dan mampu melakukan perubahan untuk usaha tani mereka. Penyuluhan sebagai proses pendidikan membuat masyarakat tani mampu berswadaya dalam upaya peningkatan produksi. Terakhir peran penyuluhan sebagai rekayasa sosial menciptakan perubahan perilaku dari petani desa, terutama peningkatan kesejahteraan. Untuk gambaran kondisi jumlah penyuluh pertanian dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.180
Perkembangan Jumlah Penyuluh Pertanian di Kota Dumai
Tahun 2017 – 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	KJF Penyuluh	2	2	2	2	2
2	Kepala Balai Penyuluh Pertanian	5	5	6	6	6
3	PPL PNS	8	8	7	7	5*
4	PPL THL-TBPP	6	5	5	5	5
5	PPL Kontrak	1	1	3	3	3
Jumlah		21	21	23	23	21

*) Pada tahun 2021 akan ada Penyuluh PNS yang pensiun sebanyak 2 Orang

Di Kota Dumai Jumlah penyuluh pertanian semakin hari semakin sedikit. Idealnya setiap satu kelurahan dibawah oleh satu Penyuluh Pertanian. Sehingga untuk Kota Dumai dengan 34 Kelurahan harus memiliki 34 Orang penyuluh pertanian diluar Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala Balai Penyuluh Pertanian. Jika dilihat dari tabel di atas maka untuk tahun 2021 jumlah penyuluh pertanian yang masih aktif berjumlah sebanyak 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari Penyuluh Pertanian PNS 5 Orang, Penyuluh Pertanian THL-TBPP 5 Orang dan Penyuluh Pertanian Kontrak 3 Orang. Jumlah tersebut sangatlah kurang jika dibandingkan jumlah kelurahan yang ada di Kota Dumai sebanyak 34 kelurahan.

Kebutuhan Sumber Daya Manusia khususnya Penyuluh Pertanian masih sangat penting guna menunjang pengembangan pertanian di Kota Dumai. Kedepan disarankan agar dalam pengangkatan ASN dimohon untuk memasukan alokasi Penyuluh Pertanian dalam formasi tenaga ASN yang dibutuhkan atau jika dimungkinkan diusahakan adanya penambahan alokasi anggaran untuk rekrutmen penyuluh kontrak baru. Sehingga kebutuhan akan Penyuluh Pertanian yang ideal sesuai jumlah kelurahan yang ada dapat terpenuhi.

Produktivitas hasil pertanian juga dipengaruhi oleh sumber daya petani yang handal, tabel berikut menyajikan jumlah petani yang pernah mengikuti pelatihan-pelatihan pertanian.

Tabel 2.181
Rekapitulasi Kelompok Tani Berdasarkan Kelas Kelompok Kota Dumai
Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Kelompok Tani (Poktan)	Jumlah Kelas Kelompok				Belum Memiliki Kelas
			Pemula	Lanjut	Madya	Utama	
1	Bukit Kapur	122	95	14	1	0	12
2	Dumai Barat	36	32	0	0	0	4
3	Dumai Kota	12	12	0	0	0	0
4	Dumai Selatan	35	31	3	0	0	1
5	Dumai Timur	41	31	1	0	0	9
6	Medang Kampai	48	40	4	0	0	4
7	Sungai Sembilan	125	78	30	0	0	17
Total		419	319	48	1	0	47

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, 2019

Adapun jumlah sebanyak 419 kelompok tani yang tersebar di tujuh Kecamatan. Jumlah kelompok tani terbanyak terdapat di Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 125 dan paling sedikit di Kecamatan Dumai Kota sebanyak 12, jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.179 yang merupakan Rekapitulasi Kelompok Tani Berdasarkan Kelas Kelompok.

Adapun jumlah kelompok tani yang telah dibina sampai dengan tahun 2015-2019 tersaji pada Tabel 2.180 tersebut dapat disimpulkan bahwa sampai tahun 2019 jumlah kelompok tani yang telah bina sejumlah 21,00 % dari seluruh kelompok tani yang ada.

Jumlah kelompok tani yang telah diberi bantuan pada tahun 2015-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.180. Pada Tahun 2019 jumlah kelompok tani yang diberi bantuan sebanyak 88 kelompok tani. Bantuan yang diberikan berupa sarana produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Tabel 2.182
Rekapitulasi Kelompok Tani yang Telah Dibina
2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Kelompok Tani yang Telah Dibina	130	33	33	88	88

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, 2020

5) Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB ADHB dan ADHK.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Dumai. Kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB Kota Dumai fluktuatif dari tahun ke tahun dengan kecenderungan penurunan dengan rata-rata sebesar -0,94% per tahun pada PDRB ADHB dan -1,78% per tahun pada PDRB ADHK. Kondisi ini menggambarkan bahwa adanya kecenderungan sector lain yang mengalami peningkatan kontribusi baik disebabkan oleh peningkatan harga maupun oleh peningkatan produksi barang dan jasa yang lebih cepat dibandingkan dengan sektor pertanian, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.181 berikut.

Tabel 2.183
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Dumai Tahun
2010-2020 (%)

Indikator	Tahun											Pertumbuhan /Tahun (%)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan PDRB-ADHB	6,35	6,50	6,58	6,08	6,08	6,10	6,04	5,96	5,67	5,32	5,72	-0,94
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan PDRB-ADHK	6,35	6,21	5,98	5,71	5,65	5,55	5,37	5,33	5,20	5,02	5,28	-1,78

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2021

2.3.3.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

1) Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang relatif berkembang di Kota Dumai. Namun demikian selama tahun 2010-2020 terjadinya penurunan kontribusi sector tersebut sebesar -2,80% atau turun dari 19,45% tahun 2010 menjadi 14,48% tahun 2020 pada PDRB ADHB sedangkan pada PDRB ADHK juga turun dari 19,39% tahun 2010 menjadi 15,17% tahun 2020. Berikut Tabel 2.182 menjelaskan kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB Kota Dumai Tahun 2010-2020.

Tabel 2.184
Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB Kota Dumai Tahun 2010-2020

Indikator	Tahun											Pertumbuhan /Tahun (%)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor PDRB ADHB	19,39	20,00	20,37	18,91	19,42	18,45	17,89	17,33	16,37	15,87	14,48	-2,80
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor PDRB ADHK	19,39	19,43	19,32	19,05	18,73	18,40	18,11	17,75	17,18	16,73	15,17	-2,40

Sumber: BPS Kota Dumai Dalam Angka, 2021

2) Ekspor Bersih

Nilai ekspor Kota Dumai berfluktuatif dari 2016-2020. Nilai ekspor tahun 2016 mencapai USD 890.665,48 kemudian turun menjadi USD 9.999,77 juta tahun 2020 dengan pertumbuhan sebesar. Nilai ekspor membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Dumai. Berikut Tabel 2.183 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Dumai.

Tabel 2.185
Ekspor Bersih Perdagangan Kota Dumai Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Net Ekspor Barang dan Jasa (USD Juta)	890.655,48	2.008.641,32	11.946,45	8.538,83	9.999,77

Sumber: BPS Kota Dumai Dalam Angka, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat ekspor bersih perdagangan di Kota Dumai selalu bernilai positif, hal tersebut karena kegiatan ekspor di Kota Dumai memiliki nilai yang cukup tinggi dibandingkan dengan kegiatan impor.

2.3.3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

1) Kontribusi Sektor Perindustrian dalam PDRB

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDRB Kota Dumai selama tahun 2010-2020, dimana

pada tahun 2010 sebesar 52,74% kemudian naik menjadi 59,97% tahun 2020 pada PDRB ADHB dengan pertumbuhan sebesar 1,33% per tahun sedangkan pada PDRB ADHK naik dari 52,74 tahun 2010 menjadi 61,06% tahun 2020.

Kondisi ini menggambarkan terjadinya percepatan pertumbuhan kontribusi sektor industri pengolahan lebih cepat dibandingkan dengan sector lainnya yang disebabkan oleh peningkatan produksi barang dan jasa serta harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi sector lainnya. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kota Dumai dapat dilihat dalam Table 2.184 berikut ini.

Tabel 2.186
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB Kota Dumai
Tahun 2010-2020

Indikator	Tahun											Pertumbuhan /Tahun (%)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Industri Pengolahan PDRB ADHB	52,74	51,44	49,30	51,38	52,90	53,17	53,88	54,67	56,42	57,73	59,97	1,33
Industri Pengolahan PDRB ADHK	52,74	53,57	53,07	53,12	54,93	55,36	56,22	56,64	57,80	58,66	61,06	1,49

Sumber: BPS Kota Dumai Dalam Angka, 2020

2) Pertumbuhan Industri

Sektor industri pengolahan di Kota Dumai mengalami pertumbuhan yang positif dengan tren peningkatan atau naik dari 0,51% pada tahun 2015 menjadi 3,89% pada tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,12% per tahun. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.188 berikut.

Tabel 2.187
Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Dumai
Tahun 2015-2020

Sektor	Satuan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Industri Pengolahan	%	0,51	1,34	1,46	3,19	2,32	3,89

Sumber: BPS Kota Dumai Dalam Angka, 2020

Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang menjanjikan untuk mendapatkan perhatian oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Pengembangan ekonomi kreatif dalam dekade terakhir menjadi alternatif solusi sekaligus strategi global dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah pelambatan ekonomi global. Berikut Tabel 2.186 Jumlah dan Jenis Industri Kreatif di Kota Dumai.

Tabel 2.188
Jumlah dan Jenis Industri Kreatif di Kota Dumai Tahun 2019

No	Bidang Usaha	Jumlah Pengrajin	Jenis Produksi	Lokasi
I. Industri Kerajinan				
1	Kerajinan Tenun	15	Tempat Air Mineral	Kel. Purnama
			Tempat tisu	Kel. Bagan Keladi
			Tempat telur	Kel. Stdi
			Kain songket	Kel. Laksamana
			Tepak sirih	Kel. Rimba Sekampung
			Tempat buah	Kel. Bukit Timah

No	Bidang Usaha	Jumlah Pengrajin	Jenis Produksi	Lokasi
2	Kerajinan Kristal	14	Tempat Air Mineral	Kel. Purnama
			Gehal	Kel. Bagan Keladi
			Tempat telur	Kel. Bintang
			Bunga Kristal	Kel. Rimba Sekampung
			Tepak sirih	Kel. Bukit Datuk
			Tempat buah	
3	Kerajinan Manik Manik	3	Tempat tisu	Kel. Bukit Datuk
			Tempat bunga	Kel. Bagan Besar
			Tempat Air Mineral	Kel. Ratu Sima
4	Kerajinan Buah Para dan Kelapa	5	Alas Kaki	Kel. Mundam
			Hiasan dinding	Kel. Purnama
5	Kerajinan Pembuatan Bunga dan Bros Jilbab	2	Bunga	Kel. Rimba Sekampung
			Hiasan jilbab	Kel. Ratu Sima
6	Kerajinan Anyaman Pandan	10	Tikar	Kel. Mundam
7	Kerajinan Limbah Plastik	7	Bunga	Kel. Rimba Sekampung
			Tas	Kel. Sukajadi
8	Kerajinan plastic tali rafia	5	Bunga	Kel. Mundam
9	Kerajinan Bordir	25	Topi	Kel. Jaya Mukti
			Pakaian	Kel. Buluh Kasap
			Lambang	Kel. Teluk Binjai
			Mukena	Kel. Bintang
			Jilbab	Kel. Ratu Sima
				Kel. Purnama
				Kel. Bukit Datuk
				Kel. Sukajadi
10	Kerajinan Konveksi	50	Kemeja	Kel. Sukajadi
			Pakaian olah Raga	Kel. Buluh Kasap
			Celana	Kel. Bintang
			Jas	Kel. Purnama
			Bajukaos	Kel. Dumai Kota
				Kel. Rimba Sekampung
				Kel. Jaya Mukti
				Kel. Bukit Nenas
				Kel. Pelintung
				Kel. Lubuk Gaung
				Kel. Basilam Baru
				Kel. Ratu Sima
				Kel. Kayu Kapur
				Kel. Bagan Besar
	Kel. Bukit Timah			
	Kel. Mekar Sari			
11	Kerajinan Limbah Kayu dan Bambu	3	Kapal	Kel. Ratu Sima
			Sovenir	Kel. Mundam
			Meja	Kel. Kayu Kapur
			Bunga	
12	Kerajinan Batik	8	Kain Panjang	Kel. Purnama
			Bahan Baju	Kel. Bagan Keladi
			Hiasan Dinding	
13	Kerajinan Rotan	2	Kursi, Meja, Fertisi	Kel. Bintang
			Keranjang Parsel	Kel. Dumai Kota
			DII	
II. Industri Percetakan Dan Advertising				
14	Ind. Percetakan	18	Barang Cetak	Kel. Telukbinjai
				Kl. Rimbasekampng
				Kel. Sukajadi
15	Ind. Advertising	25	Baleho	Kel. Dumai Kota
				Kel. Bintang
				Kel. Sukajadi
				Kel. Laksamana
				Kel. Jayamukti
			Plakat	

No	Bidang Usaha	Jumlah Pengrajin	Jenis Produksi	Lokasi
			Cendramata/Pamphlet	
			Banner	
Jumlah Pengrajin		192		

Sumber: Dinas Perindustri, Koperasi dan UKM, 2019

2.3.3.6 Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Pertumbuhan sektor penggalian dalam PDRB kontribusi sektor pertambangan dan penggalian di Kota Dumai hanya terdapat pada sub sektor penggalian. Adapun kontribusi subsektor penggalian di Kota Dumai relatif mengalami peningkatan.

Tabel 2.189
Pertumbuhan Sektor Penggalian Kota Dumai 2015-2020

Sektor	Satuan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pertambangan dan Penggalian	%	2,78	(7,95)	(11,60)	(5,85)	(2,29)	0,61

2.4.4 Fokus Urusan Penunjang

2.4.4.1 Bidang Perencanaan Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai telah disahkan menjadi Perda, yaitu melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025. Perda ini menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Dumai untuk melakukan Perubahan RPJMD periode 2016-2021 sehingga dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang dapat diacu dan terlegitimasi. Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan perda nomor 02 Tahun 2018.

Selama periode 2016-2021 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota (Perwako). RKPD merupakan Penjabaran program RPJMD ke dalam bentuk dokumen satu tahunan. Dokumen RKPD menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS dan APBD Kota Dumai setiap tahunnya. RKPD Kota Dumai Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 tahun 2017 lampiran V dan hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah. RKPD Kota Dumai ditetapkan dengan Peraturan Walikota setiap tahunnya.

2.4.4.2 Bidang Keuangan Daerah

Indikator pada aspek keuangan antara lain: (1) persentase peningkatan PAD dari sektor pajak dan retribusi; (2) peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan; (3) Persentase belanja pendidikan; dan (4) Persentase belanja

kesehatan. Perkembangan keempat indikator ini dari tahun 2011-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.188.

Tabel 2.190
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Belanja Pendidikan, dan Belanja Kesehatan Kota Dumai Tahun 2011-2020

Indikator	Tahun									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PAD (Milyar Rp.)	113,39	115,40	157,47	153,22	162,54	192,76	229,54	279,65	291,62	378,34
Pajak Daerah (Milyar Rp.)	26,19	18,06	65,84	59,24	64,44	77,26	94,99	127,96	141,15	165,26
Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%)	157,46	(31,03)	264,48	(10,02)	8,78	19,89	22,95	34,71	48,40	43,68
Retribusi Daerah (Milyar Rp.)	32,57	45,27	35,67	25,67	15,22	25,27	35,86	30,68	31,10	32,67
Persentase Peningkatan Retribusi Daerah (%)	59,23	39,00	(21,02)	(28,04)	(40,71)	66,03	41,93	(14,45)	10,66	8,64
Penerimaan PBB (Milyar Rp.)	N/A	N/A	26,53	29,34	29,23	34,67	50,42	74,44		
Persentase Peningkatan PBB (%)	N/A	N/A	N/A	10,59	(0,39)	18,61	45,44	47,64		
Belanja Daerah Kota Dumai (Milyar Rp.)	751,14	952,16	1.212,89	1.291,02	1.044,12	1.259,20	1.203,26	1.142,38	1.311,59	1.424,70
Belanja Pendidikan (Milyar Rp.)	229,33	269,15	318,88	338,19	382,06	381,54	370,73	228,48	231,70	
Persentase Belanja Pendidikan (%)	30,53	28,27	26,29	26,20	36,59	30,30	32,46	25,86	20,33	
Belanja Kesehatan (Milyar Rp.)	100,39	136,94	173,27	192,67	216,83	260,62	270,31	243,77		
Persentase Belanja Kesehatan (%)	13,36	14,38	14,29	14,92	20,77	20,70	21,78	21,34		

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2021

Dari Tabel 2.190 di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai tahun 2020 senilai Rp. 378,34 milyar meningkat dari 113,39 milyar tahun 2011. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah pada PAD Kota Dumai tahun 2020 berturut-turut adalah sebesar 165,26 milyar naik dari 26,19 milyar tahun 2011 selengkapnya tersaji pada Tabel 2.188. Berdasarkan Tabel 2.189 tersebut juga dapat dilihat perkembangan penerimaan retribusi daerah dari tahun 2011 senilai Rp. 32,57 milyar meningkat menjadi 32,67 milyar tahun 2020. Untuk penerimaan PBB, pada tahun 2015 penerimaan PBB mengalami penurunan sebesar 115 juta Rupiah, namun pada tahun 2016 kinerjanya kian membaik karena terjadi peningkatan penerimaan PBB sebesar 18,61% dari tahun sebelumnya dan terus meningkat pada tahun 2018 yaitu sebesar 47,64% dari tahun sebelumnya.

Disisi lain, dari Tabel 2.188 di atas juga terlihat bahwa selama periode 2011-2020 lebih dari 29,42% belanja daerah Kota Dumai disalurkan untuk pemenuhan belanja pendidikan, tetapi perkembangan fluktuatif. Pada tahun 2011 persentase belanja pendidikan sebesar 30,53% kemudian menurun menjadi 20,33% pada tahun 2019. Penurunan ini juga terjadi pada belanja kesehatan, tetapi penurunannya tidak signifikan, hanya sebesar 0,44% yaitu dari 21,78% pada tahun 2011 turun menjadi 21,34% di tahun 2020 (Sumber BPKAD Kota Dumai, 2021)

2.4.4.3 Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Indikator pada aspek kepegawaian antara lain: (1) Persentase pelanggaran disiplin; (2) Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural; (3) Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah.

Pasca disahkannya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka indikator kinerja terkait aspek kepegawaian diantaranya: (1) Persentase pelanggaran disiplin; (2) Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural; (3) Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah. Adapun jumlah ASN yang mendapat teguran karena melakukan pelanggaran disiplin selama periode 2011-2019 dan jumlah ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tahun 2010-2019 tersaji pada Tabel 2.189.

Tabel 2.191
Jumlah ASN Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin dan Jumlah ASN
Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (PIM) Kota
Dumai Tahun 2011-2019

Indikator	Tahun								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah ASN Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin	3	6	18	12	6	6	12	2	1
- PIM II	8	5	-	-	2	-	-	2	5
- PIM III	-	40	11	2	5	2	-	15	11
- PIM IV	-	160	80	30	40	-	-	-	20

Sumber: BKPSDM Kota Dumai Tahun 2019

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2013 sampai tahun 2019 tingkat disiplin ASN kian membaik yang tercermin dari kasus pelanggaran disiplin yang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun di tahun 2017 jumlah ASN yang melakukan pelanggaran disiplin terjadi peningkatan yaitu sebanyak 12 orang. Kemudian pada tahun 2019 terjadi penurunan signifikan ASN yang melakukan pelanggaran disiplin yaitu sebanyak 1 orang.

Selama periode 2010-2020 telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural untuk peningkatan kapasitas pejabat ASN di Kota Dumai, baik itu dalam bentuk Diklat PIM II, PIM III, dan PIM IV seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.190. Namun pada tahun 2017 diklat-diklat tersebut tidak bisa terselenggara karena terdapatnya beberapa kendala ataupun keterbatasan. Kondisi sampai tahun 2017, masih terdapat ASN yang belum mengikuti Diklat PIM dengan rincian yang belum mengikuti Diklat PIM II sebanyak 12 orang, PIM III sebanyak 32 orang, dan PIM IV sebanyak 115 orang. Kemudian pada tahun 2019 telah dilaksanakan kembali pendidikan dan pelatihan struktural untuk peningkatan kapasitas pejabat ASN dengan rincian untuk Diklat PIM II sebanyak 5 orang, Diklat PIM III sebanyak 11 orang. Dalam rangka peningkatan kapasitas pejabat ASN di Kota Dumai maka dirasa perlu untuk melaksanakan program-program terkait peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Selama periode 2010-2020 jumlah pejabat eselon II di Kota Dumai tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.192
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah (Pejabat Eselon
II) Kota Dumai Tahun 2010-2020

Indikator	Tahun										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pejabat Eselon II	26	28	25	24	29	24	24	21	31	29	24

Sumber: BKPSDM Tahun 2021 dan Kota Dumai Dalam Angka, 2021

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa salah satu tujuan dari UU tersebut adalah membangun Aparatur Sipil Negara yang profesional. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa.

Untuk melihat sejauhmana tujuan ini tercapai maka perlu ditetapkan indikator tingkat profesionalitas ASN berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Dalam peraturan dijelaskan bahwa Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

A. Kualifikasi

Diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai meliputi Pendidikan S-3 sampai dengan Pendidikan dibawah SLTA;

B. Kompetensi

Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis dan seminar/workshop/konferensi/setara;

C. Kinerja

Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS yang meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja;

D. Disiplin

Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi tidak pernah dijatuhi hukuma disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Tabel 2.193
Indeks Profesionalitas ASN Kota Dumai Tahun 2017-2021

Dimensi IPA	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kualifikasi	-	12.37	12.77	-	-
Kompetensi	-	1.5	8.06	-	-
Kinerja	-	7.06	17.35	-	-
Disiplin	-	4.99	4.99	-	-
IP ASN	-	25.92	43.18	-	-

Sumber: BKPSDM Kota Dumai, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN diatas dapat disimpulkan bahwa Indeks Profesionalitas ASN Kota Dumai dikategorikan **“sangat rendah”** karena memiliki rentang nilai 60 ke bawah.

Salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah membangun Aparatur Sipil Negara yang professional Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

2.4.4.4 Bidang Pengawasan

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Dumai merupakan salah satu indikator pada aspek pengawasan. Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Dumai dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Riau atas nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Evaluasi ini ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan oleh Pemerintah Kota Dumai. Adapun hasil penilaian SAKIP Kota Dumai tahun 2015-2020 tersaji pada Tabel 2.192.

Tabel 2.194
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2015-2020

Uraian	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah					
	SAKIP 2015	SAKIP 2016	SAKIP 2017	SAKIP 2018	SAKIP 2019	SAKIP 2020
Nilai	50,20	51,76	54,02	58,46	61,15	61,33
Predikat	CC	CC	CC	CC	B	B

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan nuntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan keunggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel. Agar terwujud pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan

daerah, salah satunya yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Indikator lainnya pada aspek pengawasan adalah persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dan jumlah dokumen yang direview setiap tahunnya. Kedua indikator ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Dumai mulai tahun 2016. Berdasarkan data dari Inspektorat Kota Dumai, pada tahun 2016 persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti adalah sebesar 67,32%, naik menjadi 69,15% pada tahun 2017. Sedangkan untuk indikator jumlah dokumen yang direview, capaiannya pada tahun 2016 dan 2017 berturut-turut adalah sebanyak 2 dokumen (Rencana Kerja Anggaran dan LKPD) dan 3 dokumen (Rencana Kerja Anggaran, LKPD dan Laporan Kinerja).

Inspektorat Kota Dumai persentase yang selesai ditindaklanjuti masih dibawah 100% adapun persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.193 dibawah ini.

Tabel 2.195
Persentase Rekomendasi yang Selesai Ditindaklanjuti
Tahun 2015-2020

Uraian	Persentase Rekomendasi Yang Selesai					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti	56,90	67,32	69,15	67,44	68,03	72,48

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Dumai, 2021, Data tahun 2020 Extrapolasi Tim

Berdasarkan data diatas bahwa OPD tidak sungguh- sungguh menyelesaikan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Dumai. Inspektorat berharap Kepada OPD untuk bekerja sama menyelesaikan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan tahun sebelumnya.

2.4.4.5 Sekretariat Daerah (Administrasi Pemerintahan)

Salah satu permasalahan dari aspek administrasi pemerintahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Dumai sampai saat ini adalah belum ditetapkannya garis batas wilayah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Bengkalis dengan Peraturan Menteri, maupungaris batas wilayah antar Kecamatan dan kelurahan di Kota Dumai.

Sesuai dengan amanat pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah menegaskan bahwa “Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis”.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai, daerah berkewajiban untuk menentukan batas secara pasti dilapangan, yang selanjutnya hasil penentuan batas tersebut ditetapkan dalam suatu bentuk Peraturan Menteri, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Guna untuk memenuhi amanat tersebut Pemerintah Kota Dumai membentuk Tim Tata Batas melalui Surat Keputusan WaliKota Dumai No. 299/PEM/2001 dan Surat Keputusan WaliKota Dumai No. 365 Tahun 2004 tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kota Dumai. Terhitung mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kota Dumai melakukan pembahasan tentang batas, baik batas daerah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis maupun dengan Kabupaten Rokan Hilir.

Dari tahun 2017-2021 upaya penyelesaian masalah perbatasan wilayah tersebut tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota Dumai, untuk batas wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya sepakat dengan hasil kesepakatan yang telah ditandatangani bersama pada tanggal 19 April 2012 dan Berita Acara Rapat Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penegasan Batas Daerah Nomor: 40/BA-PERM/BAD.I/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014. Sedangkan untuk batas wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya berpegang teguh pada hasil kesepakatan sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Rapat Koordinasi Tapal Batas antara Tim PPBD Kabupaten Rokan Hilir dengan Tim PPBD Kota Dumai Tanggal 27 Januari 2006 di Pekanbaru yang telah ditandatangani bersama dan berharap agar permasalahan batas daerah ini dapat diselesaikan dan ditetapkan secara definitive dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Batas antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis adalah sepanjang 63.614,489 meter dimana wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkalis adalah Kecamatan Bukit Kapur pada wilayah Kelurahan Gurun Panjang dan Kelurahan Bukit Kayu Kapur. Sedangkan batas dengan Kabupaten Rokan Hilir adalah sepanjang 100.242,098 meter dimana wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Rokan Hilir adalah Kecamatan Sungai Sembilan pada Kelurahan Batu Teritip.

Kesepakatan tentang batas wilayah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir maupun Kabupaten Bengkalis memang sudah menghasilkan beberapa kesepakatan, tetapi sampai saat ini permasalahan batas wilayah tersebut belum ditetapkan dengan Peraturan Menteri, bahkan masih terjadi negosiasi-negosiasi terkait penetapan batas wilayah tersebut.

Dalam hal batas wilayah antar kelurahan dan antar Kecamatan, sampai saat ini belum secara keseluruhan dilakukan penegasan batas, namun untuk tertib administrasi dan untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan yang tidak diinginkan maka penegasan batas wilayah secara pasti dilapangan akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sampai selesai.

2.5 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah membahas beberapa indikator terkait dengan fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus infrastruktur wilayah, fokus iklim investasi dan Focus SDM.

2.5.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus kemampuan ekonomi daerah menguraikan tentang kinerja indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, nilai tukar petani, produktivitas total daerah, rasio perdagangan terhadap PDRB, rasio LDR.

2.5.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (RT) Per Kapita

Perkembangan pengeluaran konsumsi RT per kapita Kota Dumai selama tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.194 yang memperlihatkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kota Dumai terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Selama periode 2016–2020, pengeluaran konsumsi rumah tangga pada harga berlaku terus mengalami peningkatan Rp 34,35 juta/Kapita tahun 2016 meningkat menjadi Rp 38,76 juta/kapita pada tahun 2020. Selama periode ini, rata-rata laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi RT per kapita sebesar 3,09% per tahun.

Demikian juga halnya dengan rasio pengeluaran konsumsi RT per kapita pada harga konstan selama periode 2016-2020 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, rasio pengeluaran konsumsi RT per kapita harga konstan sebesar Rp 23,49 juta/Kapita dan meningkat menjadi Rp 23,71 juta/kapita pada tahun 2020. Selama periode tersebut rata-rata laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kota Dumai meningkat sebesar 0,26% per tahun.

Tabel 2.196
Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Kota Dumai Tahun 2016-2020

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
PDRB-ADHB							
Pengeluaran Konsumsi RT	Rp. Milyar	10.026,52	10.683,92	11.410,84	12.088,24	12.277,82	5,22
Konsumsi RT Per Kapita	Rp. Juta	34,35	35,90	37,62	39,14	38,76	3,09
PDRB-ADHK							
Pengeluaran Konsumsi RT	Rp. Milyar	6.856,03	7.119,37	7.395,15	7.619,29	7.509,54	2,33
Konsumsi RT Per Kapita	Rp. Juta	23,49	23,92	24,38	24,67	23,71	0,26

Sumber: BPS, PDRB Kota Dumai Menurut Pengeluaran 2016-2020 dan Olahan)

2.5.1.2 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan RT per Kapita

Pengeluaran per kapita merupakan pendekatan untuk mengetahui pendapatan seseorang. Pendekatan ini digunakan karena data riil pendapatan perorangan sulit didapatkan. Dengan data pengeluaran per kapita ini diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui. Pada PDRB ADHB pengeluaran, rata-rata pengeluaran konsumsi non pangan RT masyarakat Kota Dumai sebesar Rp.1.570.132/kapita/bulan tahun 2016 kemudian meningkat menjadi Rp.1.663.602/kapita/bulan tahun 2020 atau naik sebesar 1,56% per tahun.

Sedangkan besaran pengeluaran konsumsi pangan RT mengalami dengan peningkatan dari Rp. 1.292.219/kapita/bulan tahun 2016 kemudian meningkat menjadi Rp. 1.566.227/kapita/bulan tahun 2020 dengan pertumbuhan 4,93% per tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadinya penurunan rasio pengeluaran konsumsi non pangan RT dari 54,85% pada tahun 2016 menjadi 51,51% pada tahun 2020 atau turun sebesar 1,54% pertahun. Kondisi ini menggambarkan terjadinya penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat karena pada tahun 2020 sebanyak 48,49% pengeluaran konsumsi RT digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sementara tahun 2016 pengeluaran konsumsi pangan RT hanya 45,15% dari total pengeluaran RT setiap bulan.

Sementara itu pada PDRB ADHK pengeluaran, rata-rata pengeluaran konsumsi non pangan RT masyarakat Kota Dumai sebesar Rp. 1.115.120/kapita/bulan tahun 2016 kemudian menurun menjadi Rp. 1.067.309 /kapita/bulan tahun 2020 atau turun sebesar -1,00% per tahun. Sedangkan besaran pengeluaran konsumsi pangan RT mengalami dengan peningkatan dari Rp. 842.126/kapita/bulan tahun 2016 kemudian meningkat menjadi Rp. 908.167/kapita/bulan tahun 2020 dengan pertumbuhan 1,91% per tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadinya penurunan rasio pengeluaran konsumsi non pangan RT dari 56,97% pada tahun 2016 menjadi 54,03% pada tahun 2020. Kondisi ini menggambarkan terjadinya peningkatan rasio belanja kebutuhan pangan dibandingkan dengan pengeluaran non pangan RT seperti Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatan Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga,

Kesehatan dan Pendidikan, Transportasi dan Komunikasi, Restoran dan Hotel dan Lainnya setiap bulan. Berikut Tabel 2.195 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Kota Dumai.

Tabel 2.197
Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Non Pangan dan Pangan Rumah Tangga Per Kapita Kota Dumai Tahun 2016-2020

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
PDRB-ADHB							
Pengeluaran Konsumsi RT	Rp. Milyar	10.026,52	10.683,92	11.410,84	12.088,24	12.277,82	5,22
Pengeluaran Konsumsi Pangan	Rp. Milyar	4.526,51	4.827,60	5.185,52	5.516,40	5.953,83	7,09
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan	Rp. Milyar	5.500,01	5.856,32	6.225,32	6.571,84	6.323,99	3,64
Rasio Konsumsi Non Pangan Terhadap Total Konsumsi	%	54,85	54,81	54,56	54,37	51,51	-1,54
Konsumsi RT	Rp. Juta/Kapita/Tahun	34,35	35,90	37,62	39,14	38,76	3,09
Konsumsi Non Pangan RT	Rp/Kapita/Bulan	1.570.132	1.639.665	1.710.486	1.773.420	1.663.602	1,56
Konsumsi Pangan RT	Rp/Kapita/Bulan	1.292.219	1.351.642	1.424.788	1.488.608	1.566.227	4,93
PDRB-ADHK							
Pengeluaran Konsumsi RT	Rp. Milyar	6.856,03	7.119,37	7.395,15	7.619,29	7.509,54	2,33
Pengeluaran Konsumsi Pangan	Rp. Milyar	2.949,88	3.070,82	3.199,01	3.310,98	3.452,29	4,01
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan	Rp. Milyar	3.906,15	4.048,55	4.196,14	4.308,31	4.057,25	1,03
Rasio Konsumsi Non Pangan Terhadap Total Konsumsi	%	56,97	56,87	56,74	56,54	54,03	-1,30
Konsumsi RT	Rp. Juta/Kapita/Tahun	23,49	23,92	24,38	24,67	23,71	0,26
Konsumsi Non Pangan RT	Rp/Kapita/Bulan	1.115.120	1.133.522	1.152.943	1.162.603	1.067.309	-1,00
Konsumsi Pangan RT	Rp/Kapita/Bulan	842.126	859.775	878.969	893.472	908.167	1,91

Sumber: BPS, PDRB Kota Dumai Menurut Pengeluaran 2016-2020 dan Olahan)

Oleh karena itu upaya yang harus dilakukan kedepan untuk meningkatkan kesejahteraan adalah peningkatan pendapatan per kapita agar rasio pengeluaran konsumsi RT non pangan dapat ditingkatkan disamping menjaga stabilitas harga pangan agar rasio pengeluaran konsumsi pangan RT dapat diturunkan tanpa mengurangi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

2.5.1.3 Nilai Tukar Petani (NTP)

Konsep Nilai Tukar Petani (NTP) dikembangkan sebagai alat ukur untuk melihat perbandingan relatif kesejahteraan petani. NTP merupakan perbandingan antara nilai yang diterima dengan nilai yang dibayarkan oleh petani dalam melaksanakan usaha taninya. Mencermati komponen perhitungan NTP yaitu Indeks yang diterima (IT) dan indeks yang harus dibayar (IB), tampak bahwa terdapat faktor-faktor harga maupun biaya yang berada di luar jangkauan petani untuk mengendalikannya, NTP mencerminkan efisiensi usaha tani dan daya beli petani.

Keberhasilan dari kebijakan pembangunan pertanian dilihat dari pertumbuhan ekonomi, juga diukur dari tingkat kesejahteraan penduduk khususnya petani. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat

pula tingkat kemampuan atau daya beli petani. NTP diperoleh dari persentase IT dengan indeks harga yang dibayar petani (IB), $NTP > 100$ menunjukkan kemampuan atau daya beli (kesejahteraan) petani lebih baik dibandingkan keadaan pada tahun dasar, yaitu tahun 2010, $NTP = 100$ berarti kemampuan/daya beli petani sama dengan keadaan pada tahun dasar. Sedangkan $NTP < 100$ menunjukkan kemampuan/daya beli (kesejahteraan) petani menurun dibandingkan keadaan pada tahun dasar.

Berdasarkan Tabel 2.196 menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan nilai NTP dari tahun 2016 sebesar 100,20 menjadi sebesar 100,91 pada tahun 2020, hal ini menerangkan bahwa telah terjadi keberhasilan daerah dalam meningkatkan produktivitas pertanian, dengan dukungan pembangunan sektor infrastruktur dan bantuan terhadap petani sehingga meningkatkan nilai tukar petani. Tabel 2.195 disajikan NTP Kota Dumai selama tahun 2016-2020

Tabel 2.198
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Dumai
Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Indeks yang diterima petani (It)	109,81	104,90	101,24	100,76	104,88	-1,09
2.	Indeks yang dibayar petani (Ib)	109,60	104,67	101,33	100,76	103,94	-1,27
3.	NTP	100,20	100,22	99,90	100,00	100,91	0,18

Sumber: BPS, Kota Dumai (Riau Dalam Angka Tahun 2015-2019) dan BRS, dan olahan 2020. Catatan, Estimasi Tim 2021

2.5.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

2.5.2.1 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan hal yang esensial dalam pengembangan suatu wilayah. Jalan merupakan infrastruktur pendukung mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Peningkatan infrastruktur jalan dapat berdampak pada peningkatan ekonomi disuatu wilayah. Untuk mengevaluasi manfaat jalan maka dilakukan perhitungan rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan. Panjang jalan yang dihitung adalah panjang jalan Kota Dumai sepanjang 1.198,20 km. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Berikut adalah Tabel 2.197 yang menyajikan mengenai rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Dumai.

Tabel 2.199
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Dumai
Tahun 2016-2020

Komponen	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
Panjang Jalan (JK)	Km	1.198,20	1.198,20	1.198,20	1.198,20	1.198,20	0
Mobil Penumpang	Unit	13.576	15.013	16.450	17.964	19.449	8,74
Bus	Unit	172	182	193	210	214	5,36
Truk	Unit	7.619	8.241	8.863	9.428	10.150	7,02
Sepeda Motor	Unit	78.409	89.279	100.150	112.877	123.036	10,85
Jumlah	Unit	99.776	112.715	125.656	140.479	152.849	10,30
Rasio Kendaraan Per Panjang Jalan	Unit/km	83,27	94,07	104,87	117,24	127,57	10,30

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2020

Perkembangan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Dumai dalam rentang waktu tahun 2016-2020 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, yakni dari 1:83 di tahun 2016 menjadi 1:127 pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan jumlah kendaraan yang terdaftar setiap tahunnya. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang paling banyak adalah kendaraan pribadi, terutama roda dua yang harganya lebih terjangkau, irit bahan bakar, dan dapat melewati ruas-ruas jalan yang sempit. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan semakin memperparah kemacetan yang sering terjadi terutama di beberapa ruas jalan utama pada saat jam-jam sibuk.

2.5.2.2 Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah arus penumpang umum yang dimaksudkan adalah jumlah arus penumpang angkutan umum baik yang melalui pelabuhan, bandar udara, maupun terminal yang masuk/keluar daerah selama satu tahun.

Dari Tabel 2.198 dapat dilihat bahwa jumlah arus penumpang angkutan umum baik melalui terminal, pelabuhan, maupun bandara di Kota Dumai dalam rentang waktu 2012-2020 mengalami fluktuasi. Namun apabila dilihat secara lebih lanjut, jumlah penumpang angkutan laut (pelabuhan) masih mendominasi diantara angkutan lainnya di Kota Dumai. Terlihat sejak tahun 2012-2020 jumlah penumpang angkutan yang melalui pelabuhan kapal lebih banyak apabila dibandingkan dengan penumpang melalui terminal (bis) dan bandar udara (pesawat). Persentase kedatangan hanya pada tahun 2012 dan 2020 jumlah kedatangan lebih banyak dibandingkan dengan keberangkatan masing-masing (49,74% tahun 2012) lebih rendah dibandingkan dengan keberangkatan sebesar 50,26% pada tahun 2012 demikian halnya pada tahun 2020. Berikut adalah Tabel 2.197 yang menyajikan data jumlah arus penumpang umum di Kota Dumai.

Tabel 2.200
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Baik Penumpang Masuk (Datang) maupun Keluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2012-2020

Jenis Angkutan	Jenis Keberangkatan	Tahun								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Terminal	Berangkat	174.680	116.080	120.225	106.390	105.890	102.670	-	-	-
	Datang	176.902	116.025	120.401	108.116	108.008	105.532	-	-	-
Pelabuhan	Berangkat	270.503	269.925	233.365	123.971	130.789	129.135	119.796	134.526	24.587
	Datang	273.990	253.645	211.070	103.876	100.342	102.586	103.876	115.611	24.691
Bandara	Berangkat	22.163	22.116	10.625	123.971	12.465	11.856	60.090	53.547	14.082
	Datang	21.320	20.852	10.876	103876	11.782	10.354	58.470	54.748	14.957
Jumlah keberangkatan (Orang)		467.346	408.121	364.215	354.332	249.144	243.661	179.886	188.073	38.669
Jumlah kedatangan (Orang)		472.212	390.522	342.347	315.868	220.132	218.472	162.346	170.359	39.648
Jumlah keberangkatan (%)		49,74	51,10	51,55	52,87	53,09	52,73	52,56	52,47	49,37
Jumlah kedatangan (%)		50,26	48,90	48,45	47,13	46,91	47,27	47,44	47,53	50,63

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai dan Kota Dumai Dalam Angka, 2013-2021

2.5.2.3 Ketaatan Terhadap RTRW

Dalam pokok bahasan penataan ruang dibagi menjadi enam indikator yang terdiri dari ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah banjir, luas wilayah kekeringan, dan luas wilayah perkotaan. Namun dalam laporan antara ini hanya akan dibahas lima dari enam indikator tersebut, karena indikator ketaatan terhadap RTRW tidak ditemukan datanya.

Dari data yang bersumber dari rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai diketahui Luas wilayah produktif di Kota Dumai adalah seluas 50.844,42 Ha. Adapun Luas kawasan budidaya Kota Dumai sesuai draf RTRW adalah 202.199 Ha. Sedangkan luas wilayah banjir adalah 20.653,87. Serta luas wilayah perkotaan Kota Dumai hanya sebesar 44.952,37 Ha atau 23 % dari seluruh wilayah budidaya di Kota Dumai (Draf RTRW).

2.5.2.4 Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif yang digunakan dalam analisis terdiri dari data sektor pertanian dari sub sektor tanaman pangan terdiri dari padi. Sementara dari sub sektor perkebunan seperti komoditas Kelapa Sawit Karet, Kelapa dan Kakao.

Rasio luas wilayah produktif di Kota Dumai mengalami peningkatan sebesar 0,56% per tahun atau naik dari 20,73% pada tahun 2016 menjadi 21,19% pada tahun 2020. Berikut Tabel 2.199 disajikan data luas wilayah produktif sektor pertanian Kota Dumai tahun 2016-2020.

Tabel 2.201
Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Dumai
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Luas Wilayah Produktif	Hektar	41.908	42.158	42.395	42.639	42.847	0,56
2	Luas Seluruh Budidaya	Hektar	202.199	202.199	202.199	202.199	202.199	-
3	Rasio	%	20,73	20,85	20,97	21,09	21,19	0,56

Sumber: Dinas Pertanian dan Bappeda Kota Dumai, 2021

2.5.2.5 Luas Wilayah Industri

Peruntukan lahan kawasan industri Kota Dumai selama tahun 2019-2030 sebagai dalam dokumen RTRW, dengan pemanfaatan selama periode 2016-2020 seluas 2.911,43 hektar yang terdiri dari Kawasan industri PT. KID, Kawasan Lubuk Gaung, Permina dan Chevron yang didalamnya kawasan industri besar dan kecil menengah. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Sedangkan peruntukan industri adalah lahan yang diperuntukan untuk kegiatan industri dalam skala kecil. Berikut disajikan Luas Wilayah Industri di Kota Dumai tahun 2016-2020.

Tabel 2. 202
Persentase Luas Wilayah Industri Kota Dumai
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Wilayah Industri	Hektar	7.602,83	7.602,83	7.602,83	7.602,83	7.602,83
2	Luas Kawasan Industri produktif	Hektar	2.911,43	2.911,43	2.911,43	2.911,43	2.911,43
3	Luas Seluruh Budidaya	Hektar	202.199	202.199	202.199	202.199	202.199
4	Rasio Wilayah Industri	%	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76
5	Rasio Kawasan Industri produktif	%	38,29	38,29	38,29	38,29	38,29

Sumber: Dinas Perindustrian dan Bappeda Kota Dumai, 2021

Peruntukan luas wilayah industri di Kota Dumai seluas 7.602,83 hektar. Luas Kawasan peruntukan industry tersebut akan digunakan untuk pengembangan industri besar. Kawasan peruntukan Industri merupakan sektor usaha yang menunjang dalam sistem agribisnis, sebagian besar industri merupakan industri yang mendukung pengolahan hasil perkebunan dan kehutanan seperti hasil produksi kelapa sawit, dan migas.

2.5.2.6 Jumlah Restoran Usaha Jasa Makanan/ Minum

Selain akomodasi penginapan dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata Pemerintah Kota Dumai juga giat mendorong masyarakat untuk

mendirikan usaha kuliner. Lokasi restoran merupakan pilihan utama yang mempengaruhi konsumen dan membuat keputusan pemilihan kuliner. Selain tempat yang strategis, fasilitas dan sarana penunjang wisata seperti arena bermain, spot-spot khusus untuk selfi yang saat ini paling digemari wisatawan. Berdasarkan pada Tabel 2.201 menunjukkan pertumbuhan jumlah restoran, rumah makan, warung dan kafe sebesar 20,64% per tahun atau naik dari 252 unit pada tahun 2015 bertambah menjadi 533 unit pada tahun 2019. Pertambahan unit usaha kuliner makanan dan minum di wilayah ini didorong oleh peningkatan sector ekonomi lainnya selama periode 2015-2019. Berikut perkembangan data jumlah restoran, rumah makan, warung dan kafe Kota Dumai tahun 2015-2019

Tabel 2.203
Data Jumlah Restoran Jasa Makanan/Minum
Kota Dumai Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Restoran/Rumah Makan/Warung/Kafe	Unit	252	310	377	433	533	20,64

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2020

2.5.2.7 Penginapan/Hotel

Hotel merupakan sarana penting untuk mendukung kegiatan ekonomi Kota Dumai, antara lain kegiatan perdagangan dan pariwisata. Pada tahun 2015, hotel yang terdapat di Kota Dumai berjumlah 28 unit. Jumlah hotel terbanyak terdapat di Kecamatan Dumai Kota. Berikut tabel 2.202 Banyaknya Hotel di Kota Dumai.

Tabel 2.204
Perkembangan Jumlah Hotel di Kota Dumai

No.	Uraian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan / Tahun (%)
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Hotel Bintang dan Non Bintang	Unit	28	29	34	35	36	36	6,65
2.	Jumlah Kamar	Unit	932	923	1728	1197	1161	1471	13,15
3.	Jumlah Tempat Tidur	Unit	1.505	1.426	2.599	1.775	1.733	2.212	10,73

Sumber: BPS Kota Dumai Tahun 2016 -2021

2.5.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.5.3.1 Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas di Kota Dumai mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, angka kriminalitas Kota Dumai mencapai 459 kasus. Kondisi tersebut semakin meningkat hingga tahun 2014 menjadi 861 dan kemudian menurun tahun 2020 hanya sebanyak 411 kasus. Peningkatan

Jumlah kasus kriminalitas Kota Dumai salah satunya diakibatkan karena Kota Dumai merupakan kota perlintasan (transit) dan tujuan para pencari kerja didaerah atau provinsi sekitar Riau. Meskipun tingkat kriminalitas Kota Dumai cenderung meningkat, namun tingkat penyelesaiannya rata-rata hingga tahun 2020 sebesar 74,94% dengan rata-rata pertumbuhan penyelesaian angka kriminalitas sebesar 6,275 per tahun. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.203 berikut.

Tabel 2.205
Angka Kriminalitas di Kota Dumai 2010-2020

Indikator	Tahun											Pertumbuhan /Tahun (%)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Angka kriminalitas	459	446	454	642	861	707	681	665	650	594	411	4,41
Diselesaikan	229	328	306	454	597	569	554	496	497	468	308	10,33
% Diselesaikan	49,89	73,54	67,40	70,72	69,34	80,48	81,35	74,59	76,46	78,79	74,94	6,27

Sumber: Kota Dumai Angka, 2021

Upaya penurunan angka kriminalitas diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi karena Menurut Mauro dan Carmeci (2007), kejadian kriminalitas dapat mengakibatkan kondisi ekonomi yang buruk secara terus-menerus termasuk investasi. Selain itu, kriminalitas dapat pula menyebabkan terjadinya jebakan kemiskinan (*poverty trap*) yang mengakibatkan perekonomian berada dalam dua ekuilibrium yang berbeda, yakni kriminalitas yang tinggi dan produksi yang rendah; dan pendapatan yang tinggi dengan tingkat kriminalitas yang rendah (Mehlum et al., 2005).

2.5.3.2 Lama Proses Perijinan

Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari). Berdasarkan Peraturan WaliKota Dumai Nomor 24 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, terdapat 74 jenis izin yang dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dengan lama proses perijinan 5 hari kerja seperti yang tersaji pada Tabel 2.204.

Tabel 2.206
Lama Proses Perijinan di Kota Dumai

No.	Jenis Izin	Lama Proses Izin (dalam hari)
1	Pendaftaran Penanaman Modal	5 hari
2	Izin Prinsip Penanaman Modal	5 hari
3	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	5 hari
4	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	5 hari
5	Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger), Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	5 hari
6	Izin Lokasi	5 hari

No.	Jenis Izin	Lama Proses Izin (dalam hari)
7	Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	5 hari
8	Izin Klinik	5 hari
9	Izin Klinik Gigi	5 hari
10	Izin Penyelenggaraan Optical	5 hari
11	Izin Apotik	5 hari
12	Izin Toko Obat	5 hari
13	Izin Laboratorium	5 hari
14	Izin Rumah Bersalin	5 hari
15	Izin Praktek Terapi Wicara	5 hari
16	Izin Praktek Fisioterapis	5 hari
17	Izin Praktek Bidan	5 hari
18	Izin Dokter Spesialis	5 hari
19	Izin Dokter Umum	5 hari
20	Izin Dokter Gigi	5 hari
21	Izin Praktek Perawat Gigi	5 hari
22	Izin Refraksionis Opician	5 hari
23	Izin Pengobatan Tradisional	5 hari
24	Izin Depot Air Isi Ulang	5 hari
25	Izin Operasional Rumah Sakit	5 hari
26	Izin Praktek Perawat Mandiri	5 hari
27	Izin Praktek Tukang Gigi	5 hari
28	Izin Praktek Apoteker	5 hari
29	Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	5 hari
30	Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum	5 hari
31	Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan	5 hari
32	Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan	5 hari
33	Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan	5 hari
34	Perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan	5 hari
35	Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan Taksi Dalam Wilayah Kota Dumai	5 hari
36	Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi dalam Wilayah Kota Dumai dan Kartu Pengawasan Angkutan Taksi Dalam Wilayah Kota Dumai	5 hari
37	Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi dalam Wilayah Kota Dumai	5 hari
38	Perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Taksi dalam Wilayah Kota Dumai	5 hari
39	Izin Masuk Kota	5 hari
40	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	5 hari
41	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	5 hari
42	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	5 hari
43	Tanda Daftar Gudang (TDG)	5 hari
44	Izin Usaha Industri (IUI)	5 hari
45	Izin Usaha Toko Modern	5 hari
46	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	5 hari
47	Izin Usaha Perkebunan	5 hari
48	Izin Pengelolaan Sarang Burung Wallow	5 hari
49	Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (STD-P)	5 hari
50	Izin Usaha Penyelenggaraan Bengkel Umum	5 hari
51	Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja	5 hari
52	Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	5 hari
53	Izin Penggunaan Tower Crane	5 hari
54	Izin Penggunaan Bejana Tekan	5 hari
55	Izin Penggunaan Instalasi Listrik	5 hari
56	Izin Penggunaan Motor Diesel	5 hari
57	Izin Penggunaan Penyalur Petir	5 hari
58	Izin Lingkungan (AMDAL)	5 hari
59	Izin Lingkungan (UKP-UPL)	5 hari
60	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	5 hari

No.	Jenis Izin	Lama Proses Izin (dalam hari)
61	Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3)	5 hari
62	Izin Pembuangan Air Limbah	5 hari
63	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan	5 hari
64	Izin Turap	5 hari
65	Izin Bukti Pencatatan Kapal Perikanan	5 hari
66	Izin Usaha Peternakan	5 hari
67	Izin Pendirian Sekolah Swasta (IPSS)	5 hari
68	Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal (IPLNF)	5 hari
69	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	5 hari
70	Izin Penggunaan Racun Api	5 hari
71	Izin Reklame/Spanduk	5 hari
72	Izin Warnet	5 hari
73	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	5 hari
74	Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI)	5 hari

Data perizinan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Dumai dari Tahun 2011-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.205 berikut ini:

Tabel 2.207
Perizinan yang Diberikan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2011-2019

No	Jenis Izin	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	983	934	698	-	-	-	-	-	-
2	Izin Undang-Undang Gangguan (HO)	952	1191	1010	1087	1029	1275	591	-	-
3	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	765	744	839	1038	878	1055	795	711	-
4	TDP PO	239	212	248	413	313	-	-	-	-
5	TDP CV	343	416	375	347	338	-	-	-	-
6	TDP PT. Non Berbadan Hukum	37	50	60	98	60	-	-	-	-
7	TDP PT. Berbadan Hukum	83	63	206	145	230	-	-	-	-
8	TDP PT. Perubahan	53	51	37	64	23	-	-	-	-
9	TDP Koperasi	38	72	21	15	29	-	-	-	-
10	TDP Perusahaan Lain	1	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Tanda Daftar Gudang (TDG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Tanda Daftar Industri (TDI)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Izin Usaha Industri (IUI) (500 jt-15 M)	-	-	-	-	-	-	-	-	1
14	Izin Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	10
15	Izin Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	9
16	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	353	313	267	58	32	-	-	235	-
17	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sementara	-	-	-	-	-	-	-	-	306
18	Izin Praktek Dokter	-	87	-	-	-	-	-	74	-
19	Izin Penggunaan Bangunan (IPB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Izin Berkelompok Dokter Spesiali-okter Gigi Spesialis	-	-	-	74	-	-	-	-	-
21	Izin Praktek Apoteker (SIPA)	-	-	-	-	-	-	-	-	30
22	Izin Penyelenggaraan Optical	-	2	2	6	5	-	1	1	6
23	Izin Apotik	-	8	-	9	5	-	13	6	13
24	Izin Toko Obat	-	13	13	9	10	1	11	9	10
25	Izin Praktek Laboratorium	-	-	-	-	-	-	1	-	-
26	Izin Klinik/Balai Pengobatan	-	5	6	6	9	-	-	8	-

No	Jenis Izin	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
27	Izin Klinik	-	-	-	-	-	-	-	-	7
28	Izin Klinik Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	1
29	Izin Rumah Bersalin	-	1	-	-	-	-	-	-	-
30	Izin Praktek Terapi Wicara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Izin Praktek Fisioterapis	-	-	-	-	-	-	-	-	2
32	Izin Praktek Bidan	-	22	5	20	25	-	57	36	18
33	Izin Usaha Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Izin Kendaraan Tidak Bermotor (Becak)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Izin Usaha Penyelenggaraan Bengkel Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Izin Racun Api	-	115	289	496	515	477	262	154	-
38	Izin Penggunaan Racun Api	-	-	-	-	-	-	-	-	104
39	Izin Minuman Beralkohol	-	-	11	1	17	-	-	-	-
40	SIUP-Minuman Beralkohol Gol B dan C	-	-	-	-	-	-	-	-	5
41	Izin Reklame	-	4	18	74	56	-	26	60	42
42	Surat Izin Praktek Dokter Umum & Spesialis	-	-	35	-	121	-	143	12	-
43	Izin Praktek Dokter Spesialis	-	-	-	-	-	-	-	-	25
44	Izin Praktek Dokter Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	110
45	Izin Usaha Transportasi	-	-	-	-	12	-	-	-	-
46	Izin Panti Pijat	-	-	-	-	3	-	-	-	-
47	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	-	410	226	80	364	296	166	211	140
48	Izin Usaha Industri Perkebunan	-	-	1	-	-	-	-	-	-
49	Izin Pendidikan Non Formal	-	9	-	-	4	-	-	-	-
50	Izin Pendirian Program dan Satuan Pendidikan Formal (IPSPF)	-	-	-	-	-	-	-	-	4
51	Izin Pengambilan Air	-	-	3	-	-	-	-	-	-
52	Izin Galian C Tanah Timbun	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Izin Ketenagalistrikan Sendiri	-	-	1	-	-	-	-	-	-
54	Sertifikat Laik Operasi	-	-	3	-	-	-	-	-	-
55	Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal (IPLPNF)	-	-	2	8	22	30	27	20	-
56	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	-	-	-	-	-	-	-	-	7
57	Taman kanak-kanak	-	-	-	-	-	1	-	-	-
58	Surat Penangkapan Ikan	-	20	5	-	-	-	-	-	-
59	Surat Izin Usaha Perikanan	-	6	5	-	-	-	-	-	-
60	Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP)	-	-	-	-	-	-	-	-	9
61	SIUP Cabang	13	53	-	-	-	-	-	-	-
62	Izin Restoran/Rumah Makan	-	-	-	-	-	21	-	-	-
63	Izin Karoke	-	-	-	-	-	35	-	-	-
64	Izin Salon	-	-	-	-	-	1	-	-	-
65	Izin Permainan	-	-	-	-	-	1	-	-	-
66	Legalisasi Izin Usaha Perdagangan	-	-	-	-	-	37	17	28	-
67	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-	-	-	-	-	1144	890	764	-
68	Izin Pendirian Sekolah Swasta	-	-	-	-	-	4	1	2	-
69	Izin Klinik Rawat Jalan	-	-	-	-	-	-	4	-	-

No	Jenis Izin	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
70	Izin Dokter Gigi	-	-	-	-	-	-	13	18	-
71	Izin Praktek Dokter Gigi	-	-	-	-	-	-	-	-	22
72	Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	-	-	-	-	-	-	-	-	5
73	Izin Praktek Perawat Gigi	-	-	-	-	-	-	-	-	1
74	Izin Praktek Perawat Mandiri	-	-	-	-	-	-	-	-	4
75	Izin Perawat	-	-	-	-	-	-	2	-	-
76	Izin Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar	-	-	-	-	-	-	1	-	-
77	Izin Pengobatan Tradisional	-	-	-	-	-	-	1	-	2
78	Izin Depot Air Isi Ulang	-	-	-	-	-	-	3	4	1
79	izin Praktek Tukang Gigi	-	-	-	-	-	-	10	-	15
80	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)	-	-	-	-	-	-	5	-	-
81	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	-	-	-	-	-	-	12	25	21
82	Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3)	-	-	-	-	-	-	6	9	2
83	Izin Pembuangan Air Limbah	-	-	-	-	-	-	4	-	-
84	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB)	-	-	-	-	-	-	211	283	-
85	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	-	-	-	-	-	-	-	85	51
86	Pendaftaran Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	-	24	-
87	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPT)	-	-	-	-	-	-	-	-	7
88	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	-	-	-	-	-	-	-	-	47
89	Surat Keterangan Pembangunan Perumahan Sehat Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Jumlah		3862	4801	4386	4048	4100	4378	3273	2779	1038

2.5.3.3 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Jumlah pajak dan retribusi daerah yang dipungut di Kota Dumai mengalami peningkatan seiring dengan adanya perubahan peraturan perpajakan. Beberapa pajak yang dahulu dipungut oleh pemerintah pusat, saat ini menjadi pajak daerah, antara lain PBB

dan pajak BPHTB. Besar kecilnya hasil pajak dan retribusi daerah akan mempengaruhinya besaran Pendapatan Asli Daerah, yang nantinya akan mencerminkan kemampuan keuangan daerah dalam mencukupi kebutuhan pembangunannya.

2.5.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.5.4.1 Kualitas Ketenagakerjaan

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

2.5.4.2 Persentase Lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.

Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Jumlah lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 jumlahnya mencapai 607 orang, pada tahun 2020 berkurang menjadi 554 orang, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.206.

Tabel 2.208
Persentase Lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai Tahun 2011-2020

Indikator	Tahun									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah lulusan S1/S2/S3	607	702	817	678	725	705	496	568	555	554
Jumlah Penduduk	262.976	271.523	280.027	280.109	285.967	291.908	297.638	303.292	302.070	316.782
Persentase Pekerja Lulusan S1/S2/S3	0,23%	0,26%	0,29%	0,24%	0,25%	0,24%	0,17%	0,19%	0,18%	0,17%

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, Diolah, 2021

2.5.4.3 Tingkat atau Rasio Ketergantungan

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif. Penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas) merupakan beban atau tanggungan dalam pembangunan. Sedangkan usia produktif (14-64 tahun) merupakan modal dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang, dengan harapan produktivitas dan efektivitas yang terjadi ditunjang pula dengan sarana dan prasarana pembangunan.

Tabel 2.209
Persentase Rasio Ketergantungan di Kota Dumai Tahun 2015-2020

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Umur Produktif	189.162	193.709	198.148	202.496	206.744	213.253	2,43
2	Umur Belum Produktif	89.404	90.358	91.171	91.941	92.616	92.060	0,59
3	Umur Tidak Produktif	7.401	7.841	8.319	8.855	9.452	11.469	9,31
4	Persentase Umur Produktif	66,15	66,36	66,57	66,77	66,95	67,32	0,35
5	Rasio Ketergantungan	51,18	50,69	50,21	49,78	49,37	48,55	-1,05
6	Jumlah Penduduk	285.967	291.908	297.638	303.292	308.812	316.782	2,07

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2016-2021 dan Olahan 2021

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15-65 tahun dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kota Dumai pada tahun 2015 adalah 51,18% yang artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 51 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 51,18% ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda dan penduduk tua. Sedangkan pada tahun 2020 rasio ketergantungan hanya 48,55%. Berdasarkan Tabel 2.207 tersebut dapat dilihat terjadinya perbaikan dari rasio ini dengan penurunan pertumbuhan sebesar -1,05% per tahun. Walaupun demikian penduduk usia kerja di Kota Dumai masih menanggung beban hampir separuh dari jumlah penduduk umur belum dan tidak produktif.

2.5.4.4 Rasio Penduduk Yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan

penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja. Berikut Tabel 2.208 rasio penduduk yang bekerja di Kota Dumai tahun 2016 sebesar 78,30% dan kemudian meningkat menjadi 82,68% dengan pertumbuhan sebesar 1,52% per tahun. Namun demikian kesempatan dan peluang kerja harus diciptakan agar memberikan dampak positif secara sosial dan ekonomi pada masyarakat dan daerah.

Tabel 2.210
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Dumai Tahun 2016-2020

Indikator Kependudukan	Satuan	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah Penduduk	Jiwa	291.908	297.638	303.292	308.812	316.782	2,07
Angkatan Kerja	Orang	149.791	152.731	155.638	158.287	162.769	2,10
Jumlah Bekerja	Orang	117.280	123.550	127.897	140.600	134.581	3,63
Persentase Penduduk Bekerja	%	78,30	80,89	82,18	88,83	82,68	1,52

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2017-2021 dan Olahan 2021

Perkembangan trend positif terhadap persentase jumlah orang bekerja secara sosial akan membuat adanya aktifitas, menantang dan memberi sarana untuk mengembangkan diri sendiri, memberi rasa bangga, identitas, dan pencapaian pribadi, memungkinkan bersosialisasi, membangun kontak, dan mencari dukungan, memberi penghasilan untuk menghidupi diri sendiri dan menjelajahi minat, bangun keterampilan dan pengetahuan, dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental, meningkatnya kebahagiaan karena rasa memiliki, mengurangi angka kriminalitas dan meningkatkan keamanan dari penghasilan tetap dan dapat diandalkan, menambah riwayat pekerjaan memperkuat resume untuk peluang kerja di masa depan, peningkatan harga diri karena tujuan sehari-hari dan kontribusi kepada masyarakat. Secara ekonomi akan mengurangi angka pengangguran, meningkatkan produktivitas ekonomi wilayah dan pengembangan teknologi dan skill serta dapat meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat.

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1.1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1.1.1.1.	Pertumbuhan PDRB	2,03%	4,14%	4,46%	5,35%	5,61%	-1,07%
1.1.1.2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	1,91%	4,64%	4,09%	5,33%	5,60%	-1,12%
1.1.1.3.	PDRB per kapita	89,01	95,79	101,95	109,11	117,20	114,66
1.1.1.4.	Laju inflasi	2,63	3,98	4,85	1,85	1,28	0,19
1.1.1.5.	Indeks Gini	0,54	0,45	0,33	0,34	0,33	0,33
1.1.1.6.	Persentase Penduduk Miskin	5,26	4,74	4,57	3,71	3,56	3,16
1.2.	Kesejahteraan Sosial						
1.2.1.	Indeks Pembangunan Manusia	72,20	72,96	73,46	74,06	74,64	74,40
1.2.2.	Angka Harapan Lama Sekolah	12,46	12,75	12,97	12,98	13,10	13,12
1.2.3.	Angka rata-rata lama sekolah	9,57	9,58	9,67	9,84	9,85	10,07
1.2.4.	Angka Usia Harapan Hidup	70,25	70,31	70,37	70,55	70,82	70,93
1.2.5.	Pengeluaran Per Kapita (Rp Juta)	11.058	11.531	11.699	12.063	12.453	11.751
1.2.6.	Angka melek huruf	-	98,10	98,45	98,36	99,05	99,94
1.2.7.	Angka Balita Gizi Buruk	-	3,00	5,00	6,00	7,00	3,00
1.2.8.	Perkembangan Penerima PBI APBD-APBN	128.271	126.672	126.363	127.366	151.547	158.823
1.2.9.	Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Dumai	61,18	65,55	65,72	64,40	69,53	65,23
1.2.10.	Persentase Jumlah Penduduk Bekerja	97,53	88,77	91,06	93,96	93,53	91,81
1.2.11.	Tingkat Pengangguran Terbuka	11,23	8,98	8,94	6,04	6,47	8,19
1.2.12.	Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	-	9,89	2,92	5,46	(0,59)	4,99
1.3.	Seni Budaya dan Olahraga						
1.3.1.	Implementasi Budaya Melayu Riau dalam Kurikulum Pendidikan SD	4,67	61,68	95,33	96,26	100	100
1.3.2.	Implementasi Budaya Melayu Riau dalam Kurikulum Pendidikan SMP	64,86	75,68	75,68	75,68	75,68	78,38
1.3.3.	Rata - Rata Nilai Agama pada Pendidikan SD/MI	70,24	72,86	80,71	81,90	81,43	85,95
1.3.4.	Rata - Rata Nilai-nilai Agama pada SMP	74,29	84,29	93,65	100	100	100
1.3.5.	Jumlah Pembinaan Cabang Olahraga	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	29,00
1.3.6.	Jumlah cabang olahraga yang dibina	0,00	9,00	0,00	32,00	33,00	34,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.	PELAYANAN UMUM						
2.1.	Pelayanan Urusan Wajib						
2.1.1.	Pendidikan						
2.1.1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini	-	79	79	101	134	96
2.1.1.2.	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	107,2	107,79	111,92	100	108,33	108,86
2.1.1.3.	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	91,58	100,18	95,6	78,89	89,16	88,66
2.1.1.4.	APM SD/MI/Paket A	96,37	96,5	99,46	98,77	98,93	99
2.1.1.5.	APM SMP/MTs/Paket B	76,99	88,5	87,66	84,73	84,19	83,24
2.1.1.6.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0	0,003	0,013	0,09	0,052	0,096
2.1.1.7.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0	0,049	0,025	0,025	0,098	0,086
2.1.1.8.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100	100
2.1.1.9.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	99,96	100	99,98	100	100
2.1.1.10.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	0	83,8	99,86	97,38	87,73	94,52
2.1.1.11.	Rasio Siswa/RK SD	-	35,58	33,54	32,83	32,69	31,13
2.1.1.12.	Rasio Siswa/RK SMP	-	34,34	32,54	30,23	29,76	29,69
2.1.1.13.	Sekolah Pendidikan SD Kondisi Bangunan Baik	-	345	437	476	462	260
2.1.1.14.	Sekolah Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik	-	98	81	143	162	40
2.1.1.13.	Rasio Guru/Murid SD	16,84	19,61	17,16	20,72	18,23	17,31
2.1.1.14.	Rasio Guru/Murid SMP	12,74	17,98	17,72	15,06	16,19	14,37
2.1.1.15.	Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	-	86,40	79,50	90,20	90,70	92,60
2.1.1.16.	Persentase Guru SD Sertifikasi	-	54,65	54,65	51,90	53,20	60,53
2.1.1.17.	Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	-	93,10	88,80	90,30	91,80	95,40
2.1.1.18.	Persentase Guru SMP Sertifikasi	-	60,00	60,00	49,30	53,20	47,85
2.1.2 .	Kesehatan						
2.1.2.1.	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	-	14,61	11,63	7,10	7,22	7,35
2.1.2.2.	Angka Kematian Balita	-	16,88	13,44	9,00	9,22	8,81
2.1.2.3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	-	109	142	63	125	37
2.1.2.4.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,001	0,001	0,001	0,009	0,009	0,001
2.1.2.5.	Rasio dokter per satuan penduduk	0,451	0,48	0,544	0,557	0,567	0,436
2.1.2.6.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	3,763	3,707	3,726	4,075	4,436	3,722

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.1.2.7.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	86,23	73,70	87,11	95,60	95,40	99,68
2.1.2.8.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	91,83	89,3	93,20	97,28	93,30	96,26
2.1.2.9.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	100	100	54,55	0,00
2.1.2.10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	-	24,5	45,1	14,3	50,40	39,40
2.1.2.11.	Cakupan kunjungan bayi	-	91,17	94,30	96,70	94,40	92,70
2.1.2.12.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	-	86,20	94,60	99,50	99,00	73,50
2.1.2.13.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	-	96,80	96,90	88,70	96,40	0,00
2.1.2.14.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	-	93,60	92,40	96,10	96,30	43,00
2.1.2.15.	Rasio puskesmas per 100.000 penduduk	3,50	3,43	3,36	3,30	3,24	3,24
2.1.2.16.	Rasio puskesmas pembantu	39,39	39,39	39,39	39,39	42,09	39,39
2.1.2.17.	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	44,68	44,68	49,5	78,2	84,5	-
2.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
2.1.3.1.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	55,57	53,34	51,65	52,35	35,01	39,96
2.1.3.2.	Panjang jalan dilalui roda 4	2,89	2,19	4,03	3,99	3,99	-
2.1.3.3.	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	1,79	1,84	1,79	1,89	1,92	-
2.1.3.4.	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih	1,47%	1,34%	1,28%	0,59%	0,30%	0,71%
2.1.3.5.	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	12 TPS	14 TPS	15 TPS	15 TPS	20 TPS	22 TPS
2.1.3.6.	Persentase perilaku masyarakat Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	6,27	5,56	4,97	3,7	5,08	5,36
2.1.3.7.	Persentase kepemilikan jamban cubluk	18,90	14,50	9,10	5,50	1,50	2,38
2.1.3.8.	Persentase kepemilikan Tangki Septik individual	74,56	79,31	85,05	90,40	94,93	94,64
2.1.3.9.	Persentase pengolahan air limbah domestic system komunal	0,27	0,63	0,88	0,50	-	-
2.1.3.10.	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.11.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	-
2.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
2.1.4.1.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	58,36	77,56	76,6	74,2	78,61	82,31
2.1.4.2.	Kepemilikan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga termasuk Miskin	n/a	17.726	17.559	16.918	18.945	19.349

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.1.4.3.	Jumlah Kawasan Kumuh (Ha)	127,60	127,60	121,23	66,70	38,45	33,75
2.1.4.4.	Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	n/a	n/a	2432	1884	1412	1068
2.1.4.5.	Persentase Infrastruktur dasar dan utilitas umum di Kecamatan (%)	-	-	2,73	3,82	3,95	0,26
2.1.4.6.	Jumlah Jalan Lingkungan Terbangun	-	-	23	81	129	129
2.1.4.7.	Jumlah Drainase Ligkungan Terbangun	-	-	n/a	16	29	33
2.1.4.8.	Ruas Jalan Dengan Sarana Penerangan Jalan Umum	-	-	369 Ruas	392 Ruas	412 Ruas	435 Ruas
2.1.4.9.	Jumlah PJU Terbangun	-	-	31 Lokasi	23 Lokasi	20 Lokasi	23 Lokasi
2.1.4.10.	Persentase Rumah tangga pengguna listrik	89,75	93,77	88,50	83,09	87,26	89,03
2.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
2.1.5.1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	3, 15	3,36	3,23	3,1	2,96	3,24
2.1.5.2.	Persentase Cakupan patroli petugas Satpol PP	0,96	0,75	0,81	0,92	0,80	0,9725
2.1.5.3.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	238	238	155	156	166	178
2.1.5.4.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1599	1599	1590,00	1590	1597,00	1598
2.1.5.5.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	29	-	19	8	8	-
2.1.5.6.	Kegiatan pembinaan politik daerah	1 Keg	1 Keg	1 Keg	-	-	-
2.1.5.5.	Banyak Kejadian Kebakaran Rumah Penduduk	38 unit	66 unit	26 unit	10 unit	-	-
2.1.6	Sosial						
2.1.6.1.	Jumlah Panti Asuhan	13	12	12	12	-	-
2.1.6.2.	Rumah Singgah	1	1	1	1	-	-
2.1.6.3.	Jumlah PMKS	0	182.009	19.738	21.644	-	-
3	PELAYANAN DASAR						
3.1.	Urusan Pemerintahan						
3.1.1.	Ketenagakerjaan						
3.1.1.1.	Rasio Pencari Kerja yang Ditempatkan	-	23,22	21,43	43,45	27,55	112,22
3.1.1.2.	Jumlah Pengangguran Terbuka	5.218	5.167	12.134	8.215	9.723	12.005
3.1.1.3.	Keselamatan dan Perlindungan	165	-	-	-	-	-
3.1.1.4.	Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha	39	12	14	55	36	38
3.1.1.5.	Persentase Pekerja Lulusan S1 / S2 / S3	0,25%	0,24%	0,17%	0,19%	0,18%	0,17%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.1.1.6.	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Yang Dilatih	19,28%	39,22%	10,88%	36,02%	25,81%	-
3.1.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
3.1.2.1.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	3.046	2.969	2.665	2.612	2.684	2.615
3.1.2.2.	Partisipasi perempuan dilembaga swasta (%)	64,18	63,70	65,10	65,17	65,67	66,27
3.1.2.3.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	14,29	13,33	13,33	13,33	13,33	6,67
3.1.2.4.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	3.857	10.442	10.442	10.442	11.198	-
3.1.2.5.	Jumlah pelaku seks bebas bagi remaja	-	32	36	63	-	-
3.1.2.6.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	-	89,97	90,52	90,82	90,86
3.1.2.7.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	-	59,49	59,90	56,78	52,97
3.1.2.8.	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten/Kota	-	-	0,05	0,05	0,11	0,06
3.1.2.9.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	-	-	7,97	9,98	9,53	10,29
3.1.3	Ketahanan Pangan						
3.1.3.1.	Persentase Ketersediaan Pangan Utama*	35,54	38,08	15,18	16,91	2,26	6,98
3.1.3.2.	Skor PPH Konsumsi	-	-	81,7	101,01	-	-
3.1.3.3.	Jumlah Alih Fungsi Lahan dari Pertanian menjadi Non Pertanian	2614	3038	2774,30	-	-	-
3.1.4.	Lingkungan Hidup						
3.1.4.1.	Perkembangan Suhu Rata-rata	28,32	28,20	28,09	27,43	27,30	27,11
3.1.4.2.	Persentase penanganan sampah	50	50	50	53	56	71
3.1.4.3.	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	12 TPS	14 TPS	15 TPS	15 TPS	20 TPS	22 TPS
3.1.5	Kependudukan dan catatan Sipil						
3.1.5.1.	Kepemilikan KTP	94,27	-	94,27	94,82	96,00	96,21
3.1.5.2.	Ketersediaan database kependudukan skala Nasional	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.1.5.3.	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
3.1.5.4.	Pemanfaatan data kependudukan	-	-	2 OPD	2 OPD	3 OPD	-
3.1.5.5.	Pelayanan dokumen Kependudukan (KIA dan Akta kelahiran)	-	-	2 OPD	2 OPD	2 OPD	-
3.1.5.6.	Cakupan penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki KIA	-	2,30	22,20	25,60	30,20	41,85

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.1.6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
3.1.6.1.	Persentase Jumlah kelompok binaan PKK	99	99	99	99	99	99
3.1.6.2.	Persentase PKK Aktif	100	100	100	100	100	100
3.1.6.3.	Persentase Posyandu Aktif	100	100	100	100	100	100
3.1.6.4.	Persentase LSM yang Dibina	90	90	90	90	90	90
3.1.6.5.	Persentase Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	97	97	97	97	97	97
3.1.7	Keluarga Berencana						
3.1.7.1.	Cakupan peserta KB aktif	55.628	29.287	33.059	30.571	32.836	35.923
3.1.7.2.	Jumlah Keluarga	63.527	78.809	82.478	82.478	54.982	54.982
3.1.7.3.	Keluarga Pra Sejahtera	4.118	2.871	2.871	2.871	6.369	6.369
3.1.7.4.	Keluarga Sejahtera I	11.138	4.503	4.503	4.503	30.371	30.071
3.1.8	Perhubungan						
3.1.8.1.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal						
	BERANGKAT	106.390	105.890	102.670	-	-	-
	DATANG	108.116	108.008	105.532	-	-	-
3.1.8.2.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal Pelabuhan						
	BERANGKAT	123.971	130.789	129.135	119.796	134.526	24.587
	DATANG	103.876	100.342	102.586	103.876	115.611	24.691
3.1.8.3.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal Bandara						
	BERANGKAT	123.971	12.465	11.856	60.090	53.547	14.082
	DATANG	103.879	11.782	10.354	58.470	54.748	14.997
3.1.8.4.	Pelabuhan Penumpang	2	2	2	2	2	2
3.1.8.5.	Pelabuhan Ro-Ro	1	1	1	1	1	1
3.1.8.6.	Bandara	1	1	1	1	1	1
3.1.8.7.	Terminal Penumpang	1	1	1	1	1	1
3.1.8.8.	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	5.103	4.078	4.075	3.395	-	-
3.1.8.9.	Kepemilikan KIR Angkutan Umum	10.206	10.741	9.171	9.274	9.456	9.708
3.1.8.10.	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	28 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit
3.1.8.11.	Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	40.000	40.000	40.000	40.000	82.500	82.500
3.1.8.12.	Pemasangan Rambu - Rambu Jalan	952	334	892	15	88	340

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.1.8.13.	Persentase Pertumbuhan Pemasangan Rambu - Rambu	0	-65	167	-98	487	286
3.1.9	Komunikasi dan Informatika						
3.1.9.1.	Web Site Milik Pemerintah Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.1.10	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						
3.1.10.1.	Jumlah Koperasi	-	272	199	213	225	245
3.1.10.2.	Jumlah Koperasi Aktif	-	147	161	177	190	163
3.1.10.3.	Persentase Koperasi Aktif	-	54,04	80,9	83,1	84,44	66,53
3.1.10.4.	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	11.797	12.497	12.672	14.874	16.324	16.116
3.1.10.5.	Jumlah Pendamping UKM	7	7	7	7	7	7
3.1.11	Penanaman Modal						
3.1.11.1.	Jumlah Perusahaan PMDN	60	63	64	24	91	-
3.1.11.2.	Jumlah Perusahaan PMA	69	76	84	4	44	-
3.1.11.3.	Nilai Investasi PMDN (Rp. Juta)	-	3.244,6 6	2.390,9 8	1.635, 80	3.699,0 0	5.844,48
3.1.11.4.	Nilai Investasi PMA (Rp. Juta)	-	2.318,6 0	2.007,8 0	371,60	2.237,8 0	7.117,50
3.1.11.5.	Persentase Nilai Realisasi PMDN (Rp. Juta)	-	3.244,6 6	2.390,9 8	1.635, 80	3.699,0 0	5.844,48
3.1.11.6.	Persentase Nilai Realisasi PMA (Rp. Juta)	-	2.318,6 0	2.007,8 0	371,60	2.237,8 0	7.117,50
3.1.12	Kepemudaan dan Olahraga						
3.1.12.1.	Jumlah organisasi pemuda	52	55	55	47	47	-
3.1.12.2.	Jumlah organisasi olahraga	29	29	29	29	29	-
3.1.12.3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	2	1	2	2	-	-
3.1.12.4.	Jumlah kegiatan olahraga	4	5	3	6	3	-
3.1.13	Statistik						
3.1.13.1.	Buku "Kota Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.1.13.2.	Buku "PDRB Kota"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.1.14	Kebudayaan						
3.1.14.1.	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	2	2	5	5	-	-
3.1.14.2.	Buku "PDRB Kota"	0	0	0	0	0	0

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.1.15	Perpustakaan						
3.1.15.1.	Jumlah perpustakaan	15	15	15	15	15	-
3.1.15.2.	Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk	0,52	0,51	0,5	0,49	0,49	-
3.1.15.3.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	-	24.902	28.242	29.370	37.710	-
3.1.15.4.	Jumlah Anggota Perpustakaan	-	111	205	178	132	-
3.1.15.5.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	-	48.447	48.447	51.097	53.557	53.557
3.1.16	Kearsipan						
3.1.16.1	Dokumen Arsip yang Tersimpan	748	1590	1791	1824	1710	-
4	URUSAN PEMERINTAHAH						
4.1	PILIHAN						
4.1.1	Kelautan dan Perikanan						
4.1.1.1.	Angka Konsumsi Ikan Perkapita	45	32	41	40	46	45
4.1.1.2.	Produksi Perikanan Budidaya	194,70	260,90	342,36	265,31	329,78	293,78
4.1.1.3.	Cakupan Binaan Kelompok Nelayan	26	26	26	28	29	29
4.1.1.4.	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Ton)	594,00	533,60	945,20	1.832,65	1.426,74	978,52
4.1.1.5.	Produksi Perikanan Laut (Kg)	249.810	360.000	563.050	564.766	1.019.856	858.791
4.1.2	Pariwisata						
4.1.2.1	Kunjungan Wisatawan (orang)	122.627	52.020	45.337	46.480	29.881	-
4.1.3	Pertanian						
4.1.3.1.	Rasio produktivitas padi(Ton/Ha)*	2,77	3,25	3,33	3,35	3,35	-
4.1.3.2.	Perkembangan Jumlah Penyuluh Pertanian	-	-	21	21	23	23
4.1.3.3.	Jumlah Kelompok Tani Yang Dibina	130	33	33	88	88	-
4.1.3.4.	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan PDRB - ADHB (%)	6,10	6,04	5,96	5,67	5,32	5,72
4.1.3.5.	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan PDRB - ADHK (%)	5,55	5,37	5,33	5,20	5,02	5,28
4.1.4	Perdagangan						
4.1.4.1.	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor PDRB - ADHB (%)	18,45	17,89	17,33	16,37	15,87	14,48

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4.1.4.2.	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor PDRB - ADHK (%)	18,40	18,11	17,75	17,18	16,73	15,17
4.1.4.3.	Net Ekspor Barang dan Jasa	-	890.655,48	2.008.641,32	11.946,45	8.538,83	9.999,77
4.1.5	Perindustrian						
4.1.5.1.	Kontribusi sektor industri pengolahan PDRB - ADHB	53,17	53,88	54,67	56,42	57,73	59,97
4.1.5.2.	Kontribusi sektor industri pengolahan PDRB - ADHK	55,36	56,22	56,64	57,8	58,66	61,06
4.1.5.3.	Persentase Pertumbuhan Industri terhadap PDRB	0,51	1,34	1,46	3,19	2,32	3,89
4.1.6	Energi dan SDM						
4.1.6.1.	Pertambangan dan Penggalian	2,78	-7,95	-11,60	-5,85	-2,29	0,61
5	URUSAN PENUNJANG						
5.1	Penunjang						
5.1.1	Kepegawaian dan Diklat						
5.1.1.1.	Jumlah ASN Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin	6	6	12	2	1	-
5.1.1.2.	PIM II	2	-	-	2	5	-
5.1.1.3.	PIM III	5	2	-	15	11	-
5.1.1.4.	PIM IV	40	-	-	-	20	-
5.1.1.5.	Jumlah Pejabat Eselon II	24	24	21	31	29	24
5.1.1.6.	Indeks Profesionalisme ASN	-	-	-	25,92	43,18	-
5.1.2	Pengawasan						
5.1.2.1.	Predikat SAKIP Kota Dumai	CC	CC	CC	CC	B	B
5.1.2.2.	Nilai SAKIP Kota Dumai	50,2	51,76	54,02	58,46	61,15	61,33
5.1.2.3.	Persentase Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti	56,9	67,32	69,15	67,44	68,03	72,48
6	DAYA SAING						
6.1.	DAYA SAING DAERAH						
6.1.1	Kemampuan Ekonomi Daerah						
3.1.1	Konsumsi RT perkapita PDRB - ADHB (Rp Juta)	-	34,35	35,90	97,62	39,14	38,76
3.1.2	Konsumsi RT perkapita PDRB - ADHK (Rp Juta)	-	23,49	23,92	24,38	24,67	23,71
3.1.3	Pengeluaran Konsumsi RT PDRB - ADHB (Rp Milyar)	-	10026,52	10683,92	11410,84	12088,24	12277,82
3.1.4	Pengeluaran Konsumsi RT PDRB - ADHK (Rp Milyar)	-	6856,03	7119,37	7395,15	7619,29	7509,54

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.1.5	NTP	-	100,2	100,22	99,9	100	100,91
6.1.2	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur						
6.1.2.1.	Rasio Panjang Jalan Per Jmlh Kendaraan	83,27	94,07	104,87	117,24	127,57	0,00
6.1.2.2.	Rasio Luas Wilayah Produktif	-	20,73	20,85	20,97	21,09	21,19
6.1.2.3.	Rasio Kawasan Industri produktif (%)	-	38,29	38,29	38,29	38,29	38,29
6.1.2.4.	Restoran/Rumah Makan/Warung/ Kafe	252	310	377	433	533	-
6.1.2.5.	Jumlah Penginapan/ Hotel	28	29	34	35	36	36
6.1.2.6.	Angka kriminalitas	707	681	665	650	594	411
6.1.2.7.	Persentase Lulusan S1/S2/S3	0,25%	0,24%	0,17%	0,19%	0,18%	0,17%
6.1.2.8.	Rasio penduduk yang bekerja		78,30	80,89	82,18	88,83	82,68
6.1.2.9.	Rasio Ketergantungan	51,18	50,69	50,21	49,78	49,37	48,55



BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran umum keuangan daerah untuk memberikan gambaran perkiraan indikatif baik pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang dibutuhkan selama lima tahun ke depan untuk melaksanakan urusan pembangunan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya. Adapun aspek-aspek yang dianalisa adalah kinerja masa lalu dan proyek selama tahun rencana yang terdiri dari: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Analisis juga dilakukan terhadap perkembangan neraca daerah, meliputi: aset dan hutang daerah serta ekuitas dana. Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap Kapasitas keuangan daerah yang pada dasarnya digunakan untuk mengetahui sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah yang selanjutnya digunakan untuk menganalisis dan mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Selain analisa diatas, kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah terkait mitigasi dampak Covid 19 agar dampak ekonomi dan sosial akibat wabah Covid 19 juga menjadi hal penting dalam melakukan analisa pengelolaan keuangan daerah untuk 5 tahun kedepan. Dengan kejadian Wabah Covid 19 yang merupakan bencana non alam, tentunya hal ini menjadi pertimbangan tersendiri bagi pemerintah kota Dumai dalam merencanakan pengelolaan keuangan daerah berkenaan dengan kejadian bencana baik yang disebabkan oleh alam maupun non alam.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu (2016-2020)

Sejak Terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan diikuti dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, maka mulai tahun 2007 sampai saat ini Pengelolaan keuangan daerah kota Dumai telah mempedomani kedua peraturan perundang-undangan tersebut disamping peraturan lainnya. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 13 tahun 2006 telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang merupakan penjabaran paket regulasi keuangan bidang pengelolaan keuangan daerah.

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Dumai merupakan manifestasi dari hasil musyawarah yang sekaligus merupakan harapan dari masyarakat Kota Dumai. Sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional maupun Provinsi Riau, maka upaya-upaya peningkatan perekonomian Kota Dumai diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdimensi pemerataan agar mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang mendasar terutama pengangguran dan kemiskinan. pertumbuhan ekonomi tersebut, diwujudkan melalui usaha mengembangkan sektor jasa, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, serta pertanian agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun selama tahun perencanaan pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik dan akuntabel. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

A. Pendapatan Daerah

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah diarahkan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi aset dan kekayaan pemerintah dengan menganut prinsip (1). Tidak memberatkan masyarakat (2). Potensial yang lebih menitik beratkan pada potensinya dari pada jumlah atau jenis pungutan, (3). Tidak merusak lingkungan (4). Mudah diterapkan/ diaplikasikan, mudah dilaksanakan, (5). Penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif dan

materinya. Dibawah ini digambarkan penerimaan pendapatan Kota Dumai dari tahun 2016-2020.

Anggaran Pendapatan Daerah Kota Dumai diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- 2) Dana Perimbangan, yang meliputi Bagian Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, dan penerimaan daerah lainnya yang sah.

Selanjutnya penjelasan masing-masing komponen Anggaran Pendapatan Daerah Kota Dumai diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah antara lain:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Dumai dalam upaya meningkatkan PAD adalah:

- a. Intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
- b. Penegakan hukum terkait pelaksanaan Peraturan Daerah tentang PAD.
- c. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyediaan sarana-prasarana pelayanan.
- d. Menentukan ulang hitungan besaran basis pajak sesuai dengan peruntukan wilayah

Kebijakan tersebut telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan PAD selama tahun 2016-2020. Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai pada tahun 2016 sebesar Rp. 192.760.175.685,61 dan kemudian meningkat menjadi Rp. 378.738.044.466,72 pada tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan selama periode 2016-2020 sebesar 19,30%. Meningkatnya kinerja Pendapatan Asli Daerah dalam struktur pendapatan Kota Dumai diharapkan mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Sementara itu dalam periode yang sama tahun 2016-2020 struktur PAD yang memberikan kontribusi tertinggi secara berurutan antara lain Pajak daerah sebesar 42,73%, retribusi daerah sebesar 11,38%; Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 0,60% dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 45,29%.

Selanjutnya pertumbuhan kontribusi masing-masing struktur PAD selama tahun 2016-2020 menunjukkan terdapat tiga sector yang mengalami

pertumbuhan positif antara lain pajak daerah mengalami peningkatan kontribusi sebesar 3,27% per tahun; Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan peningkatan kontribusi sebesar 0,30% per tahun dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 1,38% tahun. Namun retribusi daerah mengalami penurunan kontribusi -9,41% per tahun. Penurunan kontribusi retribusi daerah tidak terlepas dari penurunan percepatan penerimaan pada struktur PAD tersebut dibandingkan dengan struktur PAD lainnya.

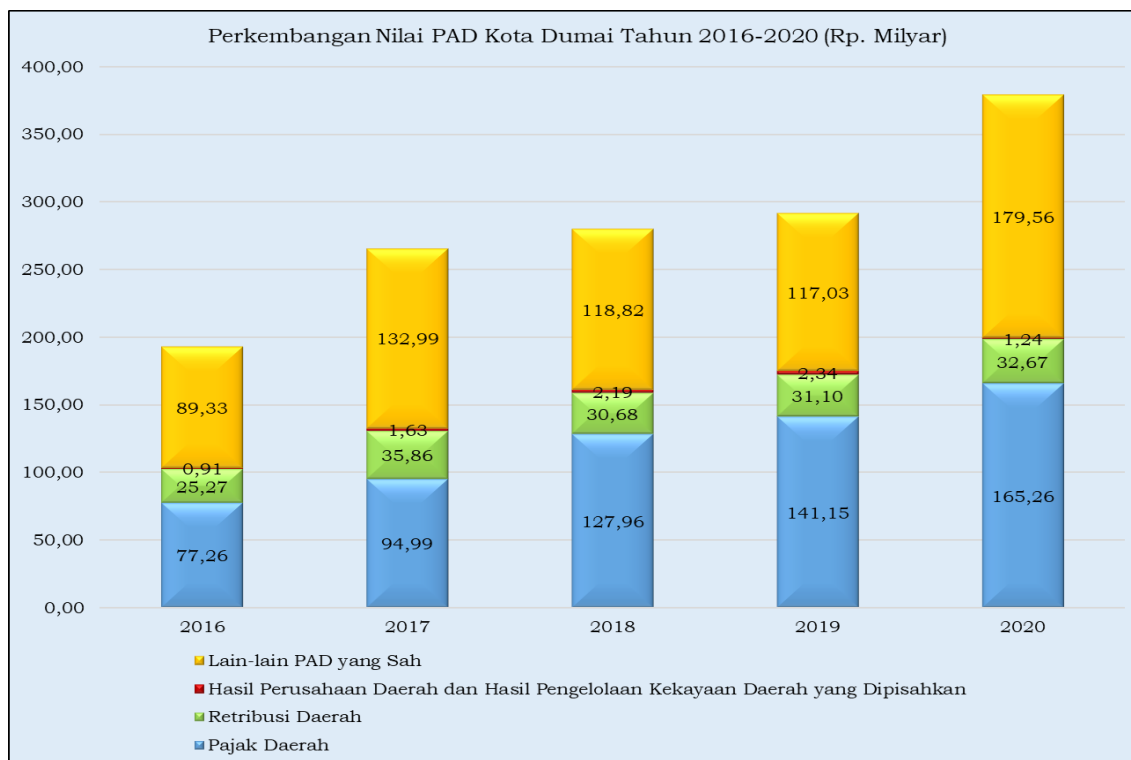
Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah menurut strukturnya di Kota Dumai tahun anggaran 2016 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1. Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2020

No	URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020		Pertumbuhan Nilai/Tahun (%)
		Realisasi	Kontribusi %	Realisasi	Kontribusi %	Realisasi	Kontribusi %	Realisasi	Kontribusi %	Realisasi	Kontribusi %	
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	192.760.175.685,61	100,00	265.472.760.817,81	100,00	279.654.914.441,64	100,00	291.620.030.783,75	100,00	378.738.044.466,72	100,00	19,30
1	Pajak Daerah	77.259.466.863,00	40,08	94.993.765.288,91	35,78	127.964.097.216,00	45,76	141.149.748.921,00	48,40	165.259.957.085,00	43,63	21,26
2	Retribusi Daerah	25.266.371.726,00	13,11	35.859.444.250,00	13,51	30.677.523.061,00	10,97	31.101.350.827,00	10,67	32.672.832.980,00	8,63	8,48
3	Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	908.686.971,00	0,47	1.626.568.826,00	0,61	2.189.648.098,00	0,78	2.342.756.372,00	0,80	1.242.457.348,00	0,33	18,41
4	Lain-lain PAD yang Sah	89.325.650.125,61	46,34	132.992.982.452,90	50,10	118.823.646.066,64	42,49	117.026.174.663,75	40,13	179.562.797.053,72	47,41	22,54

Sumber: BPKAD dan Bapenda Kota Dumai, 2021

Adapun gambaran peningkatan nilai setiap komponen pendapatan asli daerah selama kurun waktu tersebut dapat dilihat pada diagram batang berikut:



Sumber: BPKAD, 2021

Gambar 31: Perkembangan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2020

a. Realisasi PAD

Salah satu indikator kinerja optimalisasi penerimaan daerah adalah peningkatan PAD. Berikut disajikan tabel 3.2 yang menggambarkan target dan realisasi PAD Kota Dumai selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan bulan Desember 2020:

Tabel 3.2. Target dan Realisasi PAD TA. 2016 - 2020

Tahun	Target	Realisasi	%	Pertumbuhan (%)
2016	182.351.688.061,00	192.760.175.685,61	105,71	
2017	264.152.850.400,85	265.472.760.817,81	100,50	37,72
2018	245.309.400.186,50	279.654.914.441,64	114,00	5,34
2019	283.564.474.752,00	291.620.030.783,75	102,84	4,28
2020	335.378.618.821,49	378.738.044.466,72	112,93	29,87
Rata-rata pertumbuhan				19,30

Sumber: BPKAD Kota Dumai Tahun 2021

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi PAD dari tahun 2016-2020 selalu melebihi target, hal ini mengindikasikan bahwa target Pendapatan Asli Daerah masih berpeluang untuk ditingkatkan.

b. Kontribusi Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan

Untuk melihat kontribusi Realisasi PAD terhadap realisasi pendapatan, berikut disajikan tabel 3.3 rasio realisasi PAD terhadap realisasi pendapatan Kota Dumai selama Tahun Anggaran 2016 – 2020.

Tabel 3.3. Kontribusi Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan TA. 2016-2020 (Rupiah)

Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi PAD	Kontribusi PAD (%)
2016	1.062.040.946.926	192.760.175.685,61	18,15
2017	1.185.013.276.652	265.472.760.817,81	22,40
2018	1.225.296.406.098	279.654.914.441,64	22,82
2019	1.326.357.465.591	291.620.030.784,75	21,99
2020	1.465.674.372.306	378.738.044.467,72	25,84
Rata-rata kontribusi			22,24

Sumber: BPKAD Kota Dumai Tahun 2021

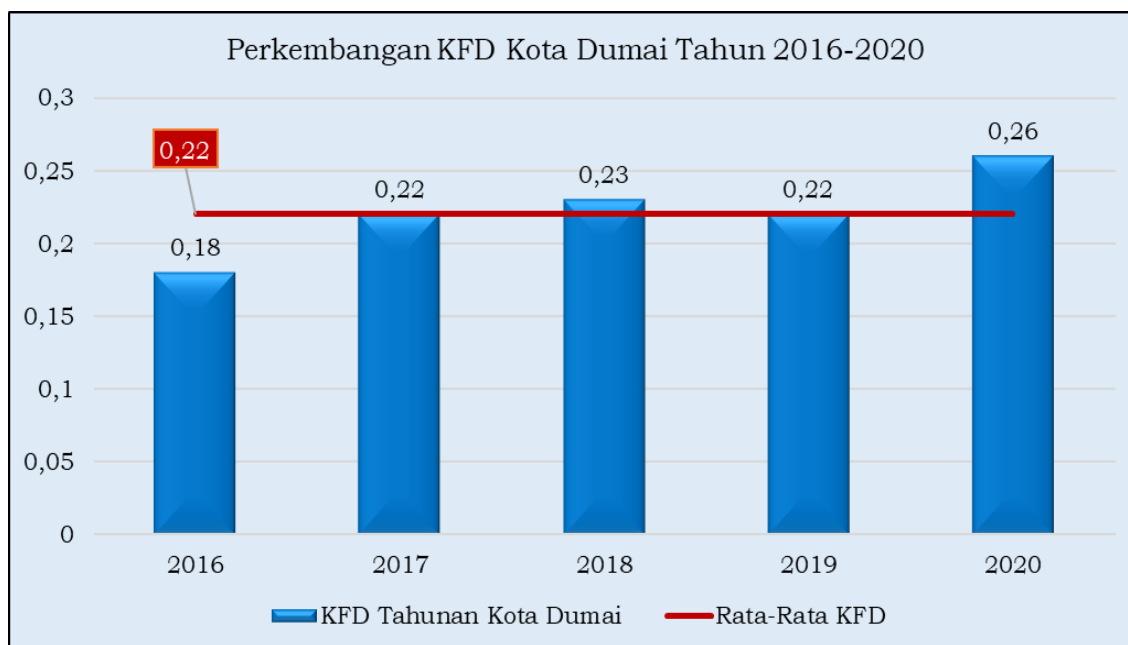
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan berfluktuasi setiap tahunnya dengan rata-rata 22,24%. Hal ini menunjukkan bahwa dana perimbangan dan penerimaan lainnya yang berasal dari pusat masih dominan dalam APBD Kota Dumai. Adapun Kapasitas Fiskal Kota Dumai dari Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.4 sebagai berikut

Tabel 3.4. Perkembangan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai 2016-2020

Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi PAD	KFD
2016	1.062.040.946.926	192.760.175.685,61	0,18
2017	1.185.013.276.652	265.472.760.817,81	0,22
2018	1.225.296.406.098	279.654.914.441,64	0,23
2019	1.326.357.465.591	291.620.030.784,75	0,22
2020	1.465.674.372.306	378.738.044.467,72	0,26
Rata-rata KFD			0,22

Nilai Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) mempunyai *range* antara 0-1, jika KFD mendekati 1 maka kemampuan fiskal daerah dan tingkat kemandirian semakin bagus yang menggambarkan bahwa tingkat *dependency* terhadap pusat dan provinsi semakin berkurang (muta'ali, 2015). Jika dilihat nilai kapasitas fiskal daerah kota Dumai dari tahun 2016-2020, maka dapat dilihat bahwa Tingkat ketergantungan kota Dumai terhadap pihak eksternal terutama pemerintah pusat dan provinsi masih tinggi (rasio tingkat kemandirian masih rendah). Hal ini juga mengindikasikan bahwa dengan rendahnya rasio kemandirian daerah, maka partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah juga masih rendah dan kemungkinan potensi Pendapatan Asli Daerah belum maksimal dimanfaatkan. Namun jika diperhatikan tren rasio

kemandirian keuangan daerah tersebut selama tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 10,15% per tahun atau naik dari 18% tahun 2016 menjadi 26% tahun 2020. Berikut Gambar 3.2 perkembangan KFD Kota Dumai tahun 2016-2020.



Gambar 3.2: Perkembangan KFD Kota Dumai tahun 2016-2020

2. Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan)

Dana perimbangan merupakan dana bagi hasil dari pemerintah pusat untuk proses penyelenggaraan pemerintah di daerah. Adapun dana perimbangan tersebut meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Bagi Hasil Pajak Propinsi, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Insentif Daerah.

Kebijakan umum untuk meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanakan intensifikasi pemungutan PBB,
- b. Peningkatan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- c. Mendorong peningkatan penerimaan dari provinsi meliputi PKB/BBNKB, PBBKB, dan pengambilan serta pemanfaatan air bawah tanah.

Sebagai sumber pendapatan terbesar bagi Kota Dumai dana perimbangan selama periode 2016-2020, besaran dana perimbangan yang diterima kota Dumai sangat berfluktuatif. Selama kurun waktu 2016-2020 berkisar antara ± 600 – 900 miliar rupiah atau jika dirata-rata setiap meningkat sebesar 7,43%. Pertumbuhan dana perimbangan yang diterima Kota Dumai terus mengalami perubahan setiap tahunnya, adapun dana perimbangan terbesar yang didapatkan selama kurun waktu 2016-2020 yaitu pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 917.175.087.631,00 sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 689.119.140.681,00.

Sementara itu dalam periode yang sama tahun 2016-2020 struktur dana perimbangan yang memberikan kontribusi tertinggi secara berurutan antara lain Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 52,82%, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 11,99%; Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) sebesar 19,65%, Hasil Bagi Pajak sebesar 6,05%. Khusus untuk Dana Insentif Daerah (DID) sebesar 3,72% baru diperoleh selama tahun 2019-2020.

Selanjutnya pertumbuhan kontribusi masing-masing struktur dana perimbangan selama tahun 2016-2020 menunjukkan terdapat tiga sector yang mengalami pertumbuhan positif antara lain Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) mengalami peningkatan kontribusi sebesar 1,48% per tahun; Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan peningkatan kontribusi sebesar 10,09% per tahun dan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar 25,95% tahun selama tahun 201-2020. Namun Hasil Bagi Pajak sebesar mengalami penurunan kontribusi -4,04% per tahun dan Dana Alokasi Umum (DAU) turun sebesar 5,79% per tahun. Penurunan kontribusi Hasil Bagi Pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak terlepas fluktuasi dari penurunan percepatan penerimaan pada struktur dana perimbangan tersebut dibandingkan dengan struktur dana perimbangan lainnya.

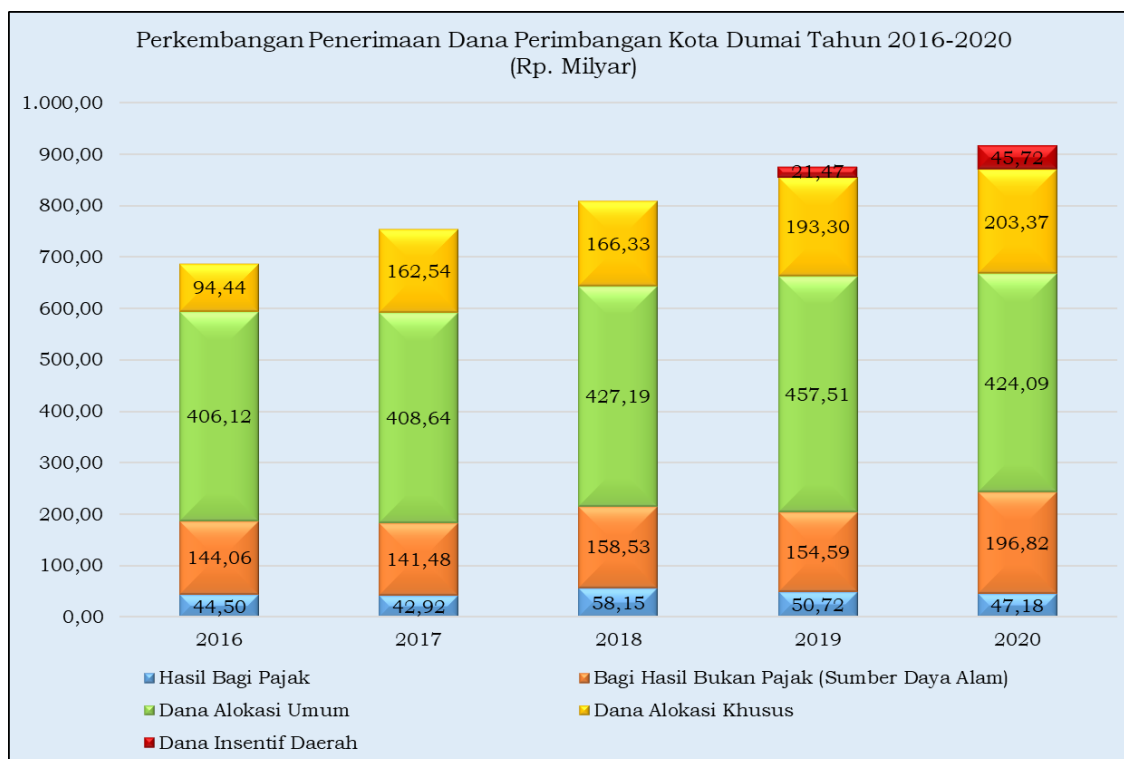
Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan (Pendapatan Transfer) dari Pemerintah Pusat selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.5. berikut ini:

Tabel 3.5. Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan (Pendapatan Transfer) Tahun 2016 -2020

No	URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020		Pertumbuhan Nilai/ Tahun (%)
		Realisasi	Kontribusi %	Realisasi	Kontribusi %	Realisasi	Kontribusi %	Realisasi	Kontribusi %	Realisasi	Kontribusi %	
II	DANA PERIMBANGAN	689.119.140.681	100,00	755.592.886.590	100,00	810.190.491.050	100,00	877.596.885.781	100,00	917.175.087.631	100,00	7,43
1	Hasil Bagi Pajak	44.500.051.885	6,46	42.924.641.373	5,68	58.145.053.156	7,18	50.720.828.653	5,78	47.181.306.000	5,14	3,04
2	Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	144.064.130.023	20,91	141.483.331.564	18,72	158.526.075.439	19,57	154.593.569.010	17,62	196.815.267.029	21,46	8,77
3	Dana Alokasi Umum	406.116.504.000	58,93	408.643.780.000	54,08	427.188.089.000	52,73	457.514.401.000	52,13	424.090.440.000	46,24	1,24
4	Dana Alokasi Khusus	94.438.454.773	13,70	162.541.133.653	21,51	166.331.273.455	20,53	193.300.558.118	22,03	203.368.509.602	22,17	23,97
5	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	-	-	21.467.529.000	2,45	45.719.565.000	4,98	28,24

Sumber: BAPENDA & BPKAD Kota Dumai Tahun 2021

Adapun gambaran setiap komponen Dana Perimbangan selama kurun waktu tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.3diberikut:



Gambar 3.3: Perkembangan Komponen Dana Perimbangan Kota Dumai tahun 2016-2020.

Realisasi Dana Perimbangan dari tahun 2016-2020 terhadap Realisasi Pendapatan dari tahun ke tahunnya mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 64,70%. Perkembangan rasio dana perimbangan terhadap realisasi pendapatan dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut ini:

Tabel 3.6. Rasio Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan TA. 2016-2020

Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi Dana Perimbangan	Kontribusi Dana Perimbangan (%)
2016	1.062.040.946.926	689.119.140.681,00	64,89
2017	1.185.013.276.652	755.592.886.590,00	63,76
2018	1.225.296.406.098	810.190.491.050,00	66,12
2019	1.326.357.465.591	877.596.885.781,00	66,17
2020	1.465.674.372.306	917.175.087.631,00	62,58
Rata-rata kontribusi			64,70

Sumber: BPKAD Kota Dumai Tahun 2021

Dana perimbangan memberikan kontribusi yang paling besar dalam struktur APBD Kota Dumai, selama tahun 2016-2020 rata-rata kontribusi dana perimbangan sebesar 64,70% dari total realisasi pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan Pemda Kota Dumai terhadap Pemerintah pusat dan Provinsi khususnya dalam sektor keuangan masih sangat dominan namun dalam kurun waktu 2016-2020 mulai ketergantungan tersebut mulai berkurang. Dari tabel 3.6 diatas, dapat diketahui tingkat ketergantungan fiskal

Kota Dumai terhadap pusat yang dihitung melalui perbandingan antara kemampuan keuangan daerah atau Pendapatan Asli Daerah dengan Penerimaan Daerah yang berasal dari pusat atau Dana Perimbangan.

Tabel 3.7. Perkembangan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Dana Perimbangan Kota Dumai 2016-2020

Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi Dana Perimbangan (DP)	KFDP ₁ = Ketergantungan fiskal daerah pusat
2016	1.062.040.946.926	689.119.140.681,00	0,28
2017	1.185.013.276.652	755.592.886.590,00	0,35
2018	1.225.296.406.098	810.190.491.050,00	0,35
2019	1.326.357.465.591	877.596.885.781,00	0,33
2020	1.465.674.372.306	917.175.087.631,00	0,41
Rata-rata KFD _{Pi}			

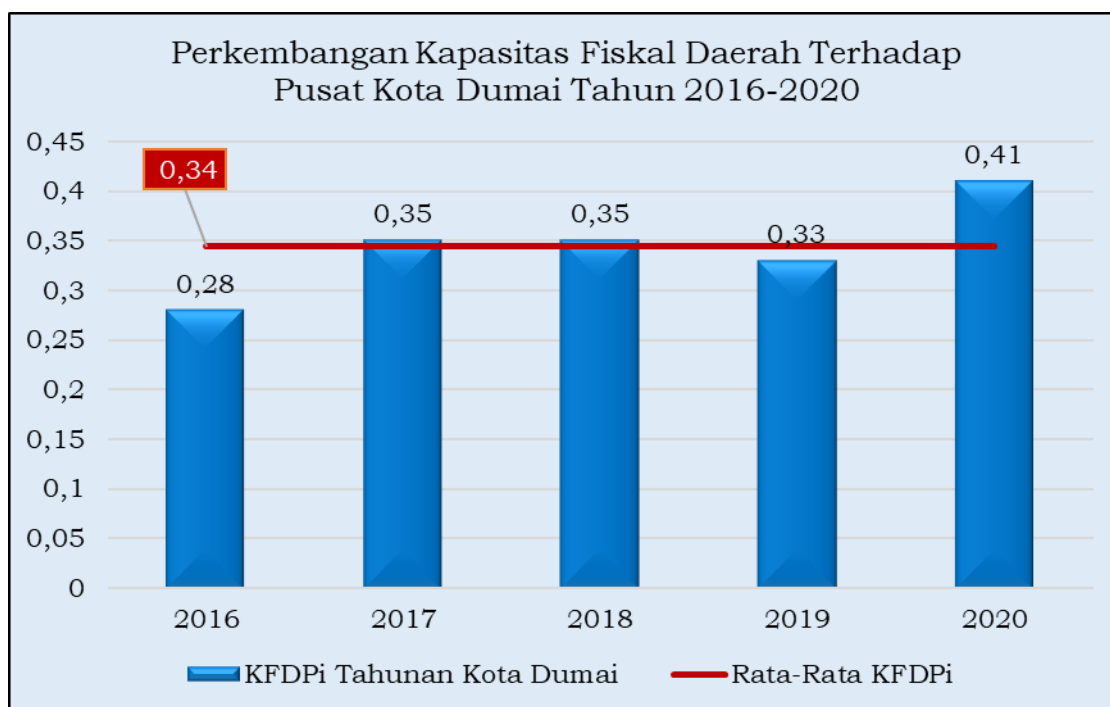
Menurut muta'ali (2015), besaran nilai ketergantungan fiskal pusat-daerah mempunyai *range* antara 0-1. Jika nilai terbut mendekati 1 maka tingkat kemandirian suatu daerah sangat tinggi dan sebaliknya. Muta'ali menambahkan bahwa kalsifikasi ketergantungan fiskal daerah-pusat terbagi kedalam 4 kategori yaitu sebagai berikut:

1. < 0,25 = Sangat tidak mandiri
2. 0,25-0,50 = Tindak mandiri
3. 0,51-0,75 = Mandiri
4. > 0,75 = Sangat mandiri.

Jika dilihat dari analisa Ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat, maka dapat diartikan bahwa dalam rentang waktu 2016-2020 maka tingkat ketergantungan kota Dumai terhadap pusat masih tinggi namun secara perlahan tren tingkat kemandirian kota Dumai terhadap pusat mulai membaik meskipun masih masuk kategori tidak mandiri (0,25-0,50).

Kondisi ini mengindikasi bahwa pola hubungan antara pemerintah Kota Dumai dengan pemerintah pusat dalam hubungan keuangan daerah masih bersifat instruktif (Pemerintah Kota Dumai belum mampu melaksanakan otonomi sepenuhnya) atau Peranan Pemerintah Pusat masih sangat dominan dalam keuangan daerah Kota Dumai (Paul hersey dan Kenneth blanchard dalam Nataluddin, 2001 dalam Muta'ali, 2015).

Jika dilihat nilai kapasitas fiskal daerah kota Dumai dari tahun 2016-2020, maka dapat dilihat bahwa Tingkat ketergantungan kota Dumai terhadap pihak eksternal terutama pemerintah pusat dan provinsi masih tinggi (rasio tingkat kemandirian masih rendah). Berikut Gambar 3.4 perkembangan KFD_{Pi} Kota Dumai tahun 2016-2020.



Gambar 3.4: Perkembangan KFDPI Kota Dumai tahun 2016-2020

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas:(a) Pendapatan Hibah, (b) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, (c) Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota/Lainnya, (d) Dana Transfer Pusat, (e) Dana Insentif Daerah (DID), dan (f) Lain-lain Penerimaan. Bagi Hasil Pajak Propinsi merupakan salah satu komponen yang membentuk dana perimbangan, namun mulai tahun 2007 komponen ini tidak dimasukkan dalam dana perimbangan namun menjadi lain-lain pendapatan daerah yang sah. Bagi hasil pajak propinsi merupakan pendapatan pajak yang dipungut langsung oleh propinsi sedangkan daerah kabupaten/kota mendapatkan persentase bagi hasil dari pendapatan pajak tersebut, yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak air bawah tanah dan pajak air permukaan. Untuk mengetahui kontribusi bagi hasil pajak Propinsi terhadap dana perimbangan dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami fluktuasi mengingat keberadaannya dan jumlahnya tidak dapat diprediksikan atau dipastikan. Berdasarkan nomenklatur struktur APBD mengikuti peraturan yang baru, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi masuk sebagai komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Sementara itu dalam periode yang sama tahun 2016-2020 struktur Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang memberikan kontribusi tertinggi secara berurutan antara lain Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Propinsi sebesar 57,19%, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 27,82%;

Pendapatan Hibah sebesar 14,99%. Khusus untuk pendapatan hibah baru diperoleh selama tahun 2018-2020.

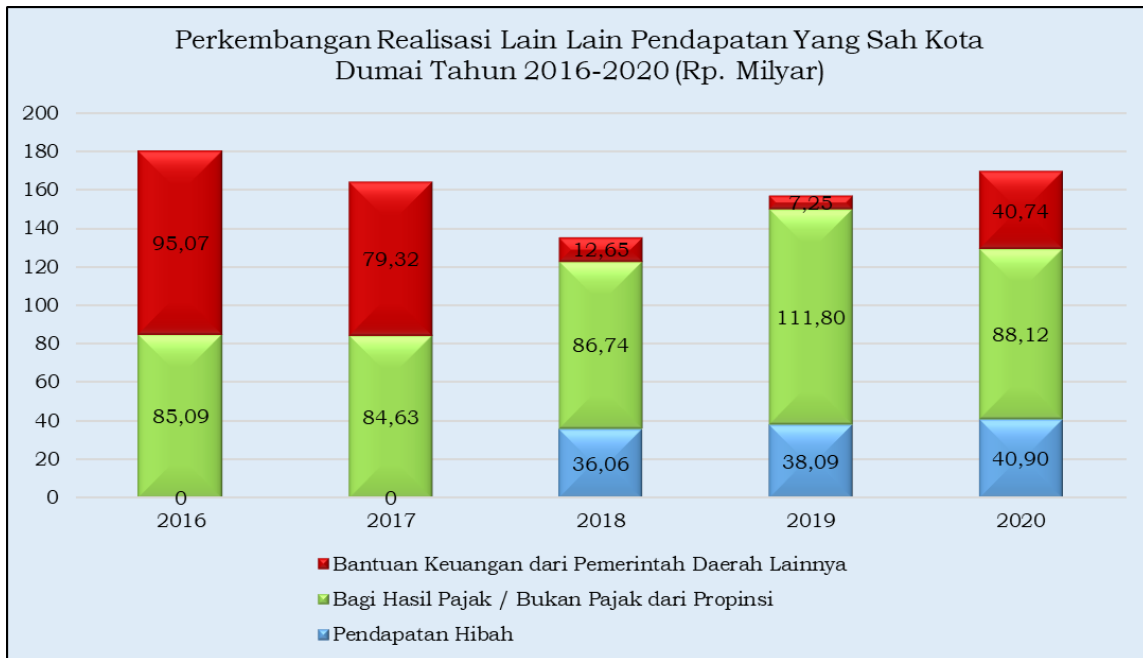
Selanjutnya pertumbuhan kontribusi masing-masing struktur Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah selama tahun 2016-2020 menunjukkan terdapat dua sector yang mengalami pertumbuhan positif antara lain Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak dari Propinsi. Namun pendapatan Hibah mengalami penurunan kontribusi -4,78% per tahun.

Tabel 3.8. Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2016 – 2020

No	URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020		Pertumbuhan Nilai/ Tahun (%)
		Realisasi	Kontribusi %	Realisasi	Kontribusi %	Realisasi	Kontribusi %	Realisasi	Kontribusi %	Realisasi	Kontribusi %	
III	LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH	180.161.630.559,51	100	163.947.629.244,00	100	135.451.000.606,23	100	157.140.549.025,78	100	169.761.240.208,61	100	-0,58
1	Pendapatan Hibah	0	-	0	-	36.059.720.000,00	26,62	38.089.929.579,00	24,24	40.900.800.000,00	24,09	3,25
2	Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak dari Propinsi	85.088.317.014,44	47,23	84.630.386.181,00	51,62	86.741.473.606,23	64,04	111.798.200.446,78	71,15	88.124.940.208,61	51,91	2,42
3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	95.073.313.545,07	52,77	79.317.243.063,00	48,38	12.649.807.000,00	9,34	7.252.419.000,00	4,62	40.735.500.000,00	24,00	-57,15

Sumber: BAPENDA & BPKAD Tahun 2021

Adapun gambaran realisasi setiap komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah selama rentang 2016-2020 tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.5 berikut:



Gambar 3.5: Realisasi Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020

B. Belanja Daerah

Belanja atau pengeluaran daerah dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh efektifitas pencapaian hasil pembangunan suatu daerah. Secara umum belanja/klasifikasi belanja dalam APBD Kota Dumai terdiri belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari (a) belanja pegawai (gaji dan tunjangan), (b) belanja hibah, (c) belanja bantuan sosial, (d) belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa serta (e) belanja tak terduga. Belanja langsung terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai (honor tim pelaksanaan kegiatan dan gaji tenaga kerja sukarela), (b) Belanja barang dan jasa, (c) belanja modal. Dapat dijelaskan bahwa belanja modal merupakan Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri dari Belanja tanah, Belanja peralatan dan mesin, Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, dan Belanja aset tetap lainnya.

Dalam kurun waktu 2016-2020 realisasi belanja daerah kota Dumai cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertumbuhan adalah sebesar 6,74%. Peningkatan ini terjadi sebagai efek meningkatnya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan kota yang diperoleh kota Dumai. Seperti yang telah dijelaskan pada subbab pendapatan yang berasal dari dana perimbangan pusat ke daerah bahwa tingkat ketergantungan kota Dumai kepada pemerintah pusat untuk pendapatan daerah

sangat besar. Untuk belanja langsung rata-rata pertumbuhan adalah 7,56% sedangkan pada belanja tidak langsung engan rata-rata pertumbuhan 6,75%. Adapun realisasi belanja daerah kota Dumai dalam kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.9 dan 3.10 berikut.

Tabel 3.9
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
BELANJA	1.114.972.852.847,61	1.203.255.387.073,93	1.112.399.051.890,74	1.311.558.856.077,06	1.424.703.116.633,85	6,74
Belanja Tidak Langsung	490.261.650.988,00	475.370.758.398,00	478.490.986.107,00	527.609.559.159,00	674.246.573.387,00	6,75
Belanja Pegawai	482.812.209.388,00	462.005.443.318,00	465.147.119.027,00	502.619.658.039,00	516.330.812.752,00	1,98
Belanja Subsidi	-	2.442.348.000,00	-	-	-	-
Belanja Hibah	5.370.000.000,00	7.645.200.000,00	11.098.600.000,00	20.282.212.800,00	35.706.875.500,00	33,16
Belanja Bantuan Sosial	-	1.032.500.000,00	-	2.520.000.000,00	3.844.800.000,00	-49,14
Belanja Bantuan Keuangan	2.055.441.600,00	2.245.267.080,00	2.245.267.080,00	2.187.688.320,00	-	-16,96
Belanja Tidak Terduga	24.000.000,00	-	-	-	118.364.085.135,00	
Belanja Langsung	624.711.201.859,61	727.884.628.675,93	633.908.065.783,74	783.949.296.918,06	750.456.543.246,85	7,56
Belanja Pegawai	157.875.160.174,00	150.930.292.060,00	81.765.530.048,00	90.259.997.069,16	79.700.014.854,00	-8,94
Belanja Barang dan Jasa	266.720.007.290,99	304.333.455.458,10	377.918.301.553,74	427.867.059.655,55	426.049.898.518,52	11,33
Belanja Modal	200.116.034.394,62	272.620.881.157,83	174.224.234.182,00	265.822.240.193,35	244.706.629.874,33	16,77

Sumber: BPKAD Kota Dumai 2021

Jika diperhatikan pada Tabel 3.10 dapat dijelaskan bahwa perbandingan komposisi (persentase) belanja tidak langsung dan belanja langsung pemerintah kota Dumai pada struktur belanja daerah secara tidak langsung menggambarkan bahwa penggunaan anggaran untuk kepentingan rutin pemerintah kota lebih kecil daripada anggaran untuk kepentingan publik.

Tabel 3.10 Perbandingan antara Belanja Tidak langsung (BTL) dengan Belanja Langsung (BL) Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016-2020

Belanja	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
Belanja Tidak Langsung	%	44	40	43	40	47	5,26
Belanja Langsung	%	56	60	57	60	53	-1,07

Sumber: BPKAD Kota Dumai Tahun 2021, data diolah

Secara umum belanja daerah mencakup belanja yang bertujuan untuk membiaya belanja rutin pemerintah daerah dan belanja pembangunan daerah. Tujuan penganggaran belanja rutin adalah untuk menjamin agar fungsi pemerintah daerah tetap berjalan dalam menjalankan pemerintahan daerah yang terdiri dari belanja pegawai pada belanja tidak langsung dan belanja langsung dan belanja untuk kebutuhan rutin lainnya, sedangkan belanja pembangunan daerah bertujuan untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah daerah yang terdiri dari komponen belanja selain belanja pegawai pada belanja tidak langsung dan belanja langsung serta belanja untuk kebutuhan rutin lainnya. Tabel berikut menyajikan data realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur kota Dumai selama kurun waktu tahun 2016-2020.

Tabel 3.11 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Dumai Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Belanja Tidak Langsung	482.812.209.388,00	462.005.443.318,00	465.147.119.027,00	502.619.658.039,00	516.330.812.752,00	1,98
Belanja Gaji dan Tunjangan	277.941.532.866,00	244.169.740.319,00	249.453.369.429,00	263.623.068.161,00	273.225.650.758,00	1,30
Belanja Tambahan Penghasilan	198.033.057.924,00	208.115.975.125,00	204.543.049.250,00	226.928.573.849,00	175.426.203.300,00	-2,35
Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	3.137.880.000,00	4.475.760.000,00	5.526.600.000,00	5.178.000.000,00	5.096.100.000,00	12,19
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	-	-	-	-	61.981.160.944,00	
Biaya Pemungutan Pajak Daerah		1.881.735.996,00	2.790.666.659,00	6.093.154.286,00	-	-8,34
Insetif Pemungutan Pajak Daerah	2.809.264.249,00	1.788.050.656,00	1.935.860.656,00	-	-	-2,50
Insetif Pemungutan Retribusi Daerah	890.474.349,00	1.574.181.222,00	897.573.033,00	796.861.743,00	601.697.750,00	30,28
Belanja Langsung	244.022.819.275,00	257.084.101.712,00	197.929.113.281,00	211.631.410.121,00	170.482.497.917,31	-7,30
Belanja Honorarium PNS	29.476.678.148,00	22.859.330.047,00	24.649.892.934,00	22.387.782.834,00	6.681.400.000,00	-20,66
Belanja Honorarium Non PNS	86.553.078.822,00	81.590.222.863,00	6.568.924.580,00	2.948.253.500,00	-	-49,61
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	443.750.000,00	185.450.000,00	173.000.000,00	83.000.000,00	39.000.000,00	-40,52
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.721.503.000,00	3.959.377.694,00	2.966.456.000,00	4.857.317.855,00	1.247.140.157,00	-0,80
Belanja Premi Asuransi Kesehatan	15.251.693.144,00	14.063.426.586,00	15.504.024.491,00	13.786.714.776,00	18.421.096.820,00	22,19
Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	18.321.294.460,00	19.114.243.636,00	18.170.686.339,00	17.746.826.332,00	11.655.022.981,00	-6,56
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	529.730.000,00	431.605.000,00	418.970.000,00	955.913.000,00	448.174.200,00	9,85
Belanja Pakaian Kerja	1.013.748.300,00	800.523.300,00	1.183.908.000,00	1.531.968.859,00	2.478.882.800,00	25,70
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.642.403.000,00	2.448.695.250,00	3.235.518.000,00	2.062.412.100,00	666.779.250,00	-1,28
Belanja Perjalanan Dinas	52.737.545.115,00	52.999.638.598,00	57.276.754.451,00	68.367.623.189,00	48.673.247.074,50	2,59
Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	0	0	0	3.743.294.855	7.670.958.000	104,93
Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan)	35.331.395.286,00	58.631.588.738,00	67.780.978.486,00	73.160.302.821,00	72.500.796.634,81	8,33
TOTAL	726.835.028.663,00	719.089.545.030,00	663.076.232.308,00	714.251.068.160,00	686.813.310.669,31	-1,09

Semakin tinggi dana APBD yang diperuntukan pada belanja pembangunan, maka semakin tinggi kinerja pembangunan daerah dan sebaliknya (Muta'ali, 2015). Secara matematis rumus kinerja pembangunan daerah dapat dihitung melalui:

$$KPD1 = \frac{\text{Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja Daerah}}, \quad KPD2 = \frac{\text{Belanja Pembangunan}}{\text{Belanja Rutin}}$$

KPD1 : Kinerja Pembangunan Daerah Model Pertama

KPD 2 : Kinerja Pembangunan Daerah Model Kedua

Adapun klasifikasi kinerja pembiayaan pembangunan daerah berdasarkan rumusan diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12 Klasifikasi Kinerja Pendanaan Pembangunan Daerah

Klasifikasi	KPD1	KPD2
Sangat tinggi	>0,5	>0,75
Tinggi	0,5-0,36	0,51-0,75
Rendah	0,35-0,20	0,25-0,50
Sangat Rendah	<0,20	<0,25

Sumber: (Muta'ali, 2015)

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan persamaan diatas maka dapat dilihat bahwa klasifikasi pembiayaan pembangunan kota Dumai selama kurun waktu 2016-2021 cenderung berada pada klasifikasi tinggi dan sangat tinggi. Tabel 3.12 menggambarkan Kinerja Pendanaan Pembangunan Daerah .

Tabel 3.13 Kinerja Pendanaan Pembangunan Daerah

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Belanja Rutin (Belanja Pemenuhan aparatur)	726.835.028.663,00	719.089.545.030,00	663.076.232.308,00	714.251.068.160,00	686.813.310.669,31
Belanja pembangunan (selain Belanja aparatur)	388.137.824.184,61	484.165.842.043,93	449.322.819.582,74	597.307.787.917,06	737.889.805.964,54
Total Belanja	1.114.972.852.847,61	1.203.255.387.073,93	1.112.399.051.890,74	1.311.558.856.077,06	1.424.703.116.633,85
KPD1	0,35	0,40	0,40	0,46	0,52
KPD2	0,53	0,67	0,68	0,84	1,07

Sumber: BPKAD 2020, data diolah

3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk memanfaatkan surplus atau untuk menutup defisit. Surplus atau defisit terjadi apabila ada selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Analisis pembiayaan daerah Kota Dumai bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah. Selain itu, sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan Kota Dumai dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Besarnya realisasi pendapatan daerah dikurangi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah menunjukkan besarnya nilai defisit riil yang terwujud.

Selama rentang waktu Tahun 2016-2020 realisasi pendapatan daerah Kota Dumai berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Adapun rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah selama kurun waktu tersebut adalah 8,43%. Sedangkan realisasi belanja daerah dalam rentang waktu tersebut justru mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 6,74%.

Pada tahun 2016 realisasi pendapatan daerah Kota Dumai adalah sebesar Rp. 1.062.040.946.926,12 dan pada tahun 2020 meingkatkan menjadi 1.465.674.372.306,33.

Jika diperhatikan lebih lanjut, pada tahun 2016-2020 Realisasi pendapatan daerah Kota Dumai pada tahun 2016-2017 lebih rendah dari belanja daerah yang menyebabkan terjadinya defisit. Adapun defisit tersebut ditutup dengan kebijakan pembiayaan melalui SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Lebih lanjut defisit riil dan komponen penutup defisit riil dapat dilihat pada tabel 3.14 dan 3.15 berikut:

Tabel 3.14 Defisit Riil Anggaran Kota Dumai Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.062.040.946.926,12	1.185.013.276.651,81	1.225.296.406.097,87	1.326.357.465.591	1.465.674.372.306	11,17%
	Dikurangi Realisasi						
2	Belanja Daerah	1.114.972.852.847,61	1.203.255.387.073,93	1.112.399.051.890,74	1.311.558.856.077,06	1.424.703.116.633,85	5,02%
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah						
A	Defisit Riil	(52.931.905.921,49)	(18.242.110.422,12)	112.897.354.207,13	14.798.609.513,47	40.971.255.672,48	-343,69%
	Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan:						
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	95.076.456.348,70	41.896.118.427,21	23.470.008.005,09	136.367.362.212,22	151.195.171.725,69	26,94%
5	Pencairan Dana Cadangan						
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	90.000.000,00	50.000.000,00		29.200.000,00		
8	Penerimaan kembali Investasi Non Permanen						
9	Penerimaan Piutang Daerah						
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	95.166.456.348,70	41.946.118.427,21	23.470.008.005,09	136.396.562.212,22	151.195.171.725,69	26,96%
A+B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	42.234.550.427,21	23.704.008.005,09	136.367.362.212,22	151.195.171.725,69	192.166.427.398,17	71,81%

Sumber: BPKAD Kota Dumai, 2021

Tabel 3.15 Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kota Dumai Tahun 2016-2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	95.076.456.348,70	41.896.118.427,21	23.470.008.005,09	136.367.362.212,22	151.195.171.725,69
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
7	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	42.234.550.427,21	23.704.008.005,09	136.367.362.212,22	151.195.171.725,69	192.166.427.398,17

Sumber: BPKAD Kota Dumai, 2021

Penerimaan pembiayaan dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran. Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); (2) Pencairan Dana Cadangan; (3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; (4) Penerimaan Pinjaman Daerah; (5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; (6) Penerimaan Piutang Daerah; (7) Penerimaan Dana Bergulir; dan (8) Penerimaan Hasil Penarikan.

Realisasi capaian Pembiayaan Daerah APBD Kota Dumai dalam kurun waktu 2016 – 20120 bersumber dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Tabel 3.16 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Dumai tahun 2016-2020

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020		Rata-rata Pertumbuhan
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
	Jumlah SiLPA	42.234.550.427,21		23.704.008.005,09		136.367.362.212,22		136.367.362.212,22		151.195.171.725,69		
1	Pelampauan Penerimaan PAD	10.408.487.624,61	24,64	1.319.910.416,96	5,57	34.345.514.255,14	25,19	8.055.556.031,75	5,91	43.359.425.645,23	28,68	603,77
2	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	(118.411.549.156,12)	(280,37)	(99.843.022.515,13)	(421,21)	(6.876.065.538,48)	(5,04)	(95.791.134.095,00)	(70,24)	9.568.756.320,00	6,33	205,95
3	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	(25.987.211.092,66)	(61,53)	(11.915.739.854,02)	(50,27)	35.809.237.766,64	26,26	27.607.549.025,78	20,24	3.245.883.844,610	2,15	(106,37)
4	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya											
5	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan	85.430.107.087,04	202,28	32.873.821.074,23	138,68	48.523.936.881,98	35,58	59.503.424.608	43,63	61.756.297.794	40,85	(57,55)
6	Kegiatan Lanjutan											

Sumber: BPKAD Kota Dumai, 2021

3.1.3 Neraca Daerah

Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada pasal 320 disebutkan kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah daerah adalah laporan Neraca daerah. Laporan Neraca terdiri dari akun aset, akun kewajiban, dan akun ekuitas dana.

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Analisis rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Sedangkan analisis rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah.

Selama kurun waktu 2016-2020, nilai aset Pemerintah Kota Dumai berfluktuasi namun menunjukkan tren kenaikan dengan rata pertumbuhan 0,5%. Aset ini dalam bentuk aset lancar, aset tetap, aset lainnya maupun yang diinvestasikan dalam jangka panjang. Selama kurun 2016-2020, Aset Lancar Pemerintah Kota Dumai mengalami pertumbuhan rata-rata 35,1% sedangkan aset tetap mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,7%. Kondisi yang sama juga terjadi dengan investasi jangka panjang yang mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar -6,2%.

Adapun rata-rata pertumbuhan kewajiban pemerintah kota Dumai selama kurun waktu 2016-2020 adalah sebesar 62,6% sedangkan jumlah kewajiban dan ekuitas dana Pemerintah Kota Dumai memiliki rata-rata pertumbuhan 0,5% . Tabel 3.17 menggambarkan neraca daerah kota Dumai tahun 2016-2020.

Tabel 3.17 Neraca Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata Pertumbuhan
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	40.401.401.649,31	16.052.857.478,52	116.017.573.189,01	153.585.951.100	177.208.493.117	152,55
Kas di Bendahara Penerimaan	130.305,00	75,54	-	-	6.754	-24,99
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	58.000.000,00	3.519.591,00	175.694.586	-	1199,49
Kas di BLUD	2.378.761.415,90	7.720.939.176,64	20.258.261.206,21	5.415.648.628	14.858.775.822	122,01
Kas di Bendahara FKTP		-	-	2.989.731.487	-	0,00
Kas di Bendahara BOS		58.371.062,00	88.167.317,00	2.256.076.734	108.834.592	603,68
Kas Lainnya		-	-	-	-	0,00
Setara Kas		-	-	-	-	0,00
Investasi Jangka Pendek		-	-	-	-	0,00
Piutang Pendapatan	68.633.233.397,91	76.260.689.561,11	105.076.619.482,30	212.208.348.605	112.254.806.725	25,94
Piutang Lainnya	23.839.927.974,64	27.493.803.943,50	36.468.870.699,41	57.872.619.201	61.252.866.854	28,13
Penyisihan Piutang	(42.050.061.858,91)	(51.695.435.666,55)	(56.183.505.320,84)	- 64.591.628.350	- 72.556.838.116	14,73
Beban Dibayar Dimuka		107.364.963,17	132.185.800,84	389.407.163	157.562.437	0,00
Persediaan	10.823.486.648,86	13.952.807.193,67	14.877.142.210,08	16.956.020.769	40.538.678.407	47,15
JUMLAH ASET LANCAR	104.165.835.515,71	90.009.397.787,60	236.738.834.175,01	387.257.869.923	333.823.186.591	35,1%
INVESTASI JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-	-	-	
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	-	-	-	-	-	
Investasi dalam Obligasi	-	-	-	-	-	
Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-	

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata Pertumbuhan
Dana Bergulir	-	-	-	-	-	
Deposito Jangka Panjang	-	-	-	-	-	
Investasi Non Permanen Lainnya	8.965.980.000,00	8.915.980.000,00	8.917.780.000,00	8.888.580.000,00	8.888.580.000	-0,22
Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	(8.655.980.000,00)	(8.655.980.000,00)	(8.657.780.000,00)	(8.655.580.000,00)	- 8.655.580.000	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	310.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	233.000.000,00	233.000.000	-6,63
Investasi Jangka Panjang Permanen						0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	93.043.244.362,86	89.193.413.003,66	83.944.398.346,11	80.657.970.988,62	73.385.148.333	-5,78
Investasi Permanen Lainnya		-	-	-	-	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	93.043.244.362,86	89.193.413.003,66	83.944.398.346,11	80.657.970.988,62	73.385.148.333	5,78
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	93.043.244.362,86	89.453.413.003,66	84.204.398.346,11	80.890.970.989	73.618.148.333	-6,2%
ASET TETAP						
Tanah	327.740.579.783,00	315.801.435.970,00	574.877.948.914,11	852.659.530.644	653.472.484.715	25,84
Peralatan dan Mesin	466.828.563.579,00	535.374.716.324,56	550.163.057.868,88	626.327.338.378	697.885.087.456	10,68
Gedung dan Bangunan	802.753.620.708,72	788.877.396.830,23	804.630.710.921,33	860.771.539.966	936.022.032.999	4,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.970.755.067.116,13	2.063.566.603.064,09	2.142.448.007.445,24	2.242.983.512.120	2.331.528.624.883	4,29
Aset Tetap Lainnya	16.426.116.101,81	24.317.205.372,87	31.685.503.907,87	40.679.358.229	50.807.956.456	32,91
Konstruksi Dalam Pengerjaan	198.590.607.496,00	206.189.872.475,87	212.826.622.471,92	206.253.821.953	211.542.081.251	1,63
Akumulasi Penyusutan	(785.266.267.185,71)	(1.657.431.365.475,00)	(1.905.369.343.685,15)	- 2.084.675.529.683	- 2.263.660.718.706	-36,01
JUMLAH ASET TETAP	2.997.828.287.598,95	2.276.695.864.562,62	2.411.262.507.844,19	2.744.999.571.607	2.617.597.549.054	-0,7%

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata Pertumbuhan
DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
JUMLAH DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	-
ASET LAINNYA						
Tagihan Jangka Panjang	2.852.720.312,50	5.364.021.000,00	4.517.732.500,00	69.300.000,00	69.300.000	-6,55
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah				846.288.500,00	846.288.500	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	8.962.120.000,00	8.262.120.000,00	17.232.681.084,08	17.232.681.084,08	17.232.681.084	25,19
Aset Tidak Berwujud	4.206.517.628,72	2.934.988.718,20	3.006.367.767,50	6.214.677.438,09	6.435.043.468	20,62
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud				(4.489.546.974,05)	(5.192.739.701,85)	3,92
Aset Lain-lain	28.033.795.182,42	36.398.744.860,51	24.920.209.173,09	46.746.955.810,96	20.784.237.194	7,59
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain				(21.886.103.710,77)	(15.757.905.497,43)	-7,00
Dana CD Pertamina	2.989.216.391,00	3.080.136.127,00	3.173.821.310,00	3.249.119.897,00	3.314.882.575	2,62
JUMLAH ASET LAINNYA	47.044.369.514,64	56.040.010.705,71	52.850.811.834,67	47.983.372.045,32	27.731.787.622	-9,50
JUMLAH ASET	3.242.391.736.992,16	2.512.198.686.059,59	2.785.056.552.199,97	3.261.131.784.563,59	3.052.770.671.600	0,5%
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-	-	90.909,00	9.682.886	2637,80
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	545.742.943,00	186.159.787,61	159.091,00	-	-	-41,45
Utang Bunga	-	-	-	-	-	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	
Pendapatan Diterima Dimuka	53.125.000,00	706.256.126,33	283.333.334,00	209.583.334,00	11.412.854.600	1622,25
Utang Beban	52.854.545.390,10	31.981.405.160,29	46.760.612.541,98	45.488.444.550,00	48.711.796.400	2,77
Utang Jangka Pendek Lainnya	31.976.693.753,94	-	1.479.831.915,00	13.805.305.815,00	1.621.963.908	186,16
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	85.430.107.087,04	32.873.821.074,23	48.523.936.881,98	59.503.424.608,00	61.756.297.794	62,6%

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata Pertumbuhan
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	0,00
Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	85.430.107.087,04	32.873.821.074,23	48.523.936.881,98	59.503.424.608,00	61.756.297.794	3,13
EKUITAS						
EKUITAS	3.156.961.629.905,12	2.479.324.864.985,37	2.736.532.615.318,00	3.201.628.359.955,59	-0,17	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.242.391.736.992,16	2.512.198.686.059,60	2.785.056.552.199,98	3.261.131.784.563,59	3.052.770.671.600	-0,24

Sumber: BPKAD Kota Dumai, 2021

Jika dilihat dari tabel diatas, pada tahun 2016 aset kota Dumai sebesar Rp. 3.242.391.736.992,16 kemudian berturut-turut tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan. Pada Tahun 2019 Aset Kota Dumai meningkat menjadi 3.261.131.784.563,59 dan pada tahun 2020 kembali turun menjadi Rp. 3.052.770.671.599,86

Selain aset daerah dalam neraca juga menggambarkan besarnya kewajiban dan ekuitas dana daerah. Besarnya kewajiban daerah pada kurun waktu tahun 2016-2020 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2016 kewajiban kota Dumai sebesar Rp. 85.430.107.087,04. Kemudian turun pada tahun 2017 menjadi Rp. 32.873.821.074,23. Pada Tahun 2018 dan 2019 berturut-turut kewajiban pemerintah Kota Dumai terus meningkat, terakhir pada tahun 2020 kewajiban Pemerintah Kota Dumai adalah sebesar Rp. 61.756.297.793,55. Kewajiban tersebut merupakan dalam kewajiban jangka pendek seperti Utang perhitungan pihak ketiga, Utang Bunga, pendapatan diterima dimuka, utang beban dan utang jangka pendek lainnya.

Ekuitas dana daerah juga mencerminkan besarnya modal yang dimiliki pemerintah daerah. Pada tahun 2016, ekuitas dana daerah Kota Dumai sebesar Rp. 3.156.961.629.905,12 dan turun menjadi sebesar Rp. 2.991.014.373.806,31 atau terjadi penurunan rata-rata setiap tahun sebesar 6,58%. Sebagian besar ekuitas dana pemerintah Kota Dumai dalam bentuk ekuitas dana investasi seperti diinvestasikan dalam aset tetap, diinvestasikan dalam aset lainnya, dan diinvestasikan dalam investasi jangka panjang.

Rasio Likuiditas Pemerintah Kota Dumai berfluktuatif memiliki kecenderungan yang meningkat, dimana pada tahun 2016 rasio lancar sebesar 1,22 dan pada tahun 2020 naik menjadi 5,41. Angka ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kota Dumai dalam memenuhi kewajiban jangka pendek masih baik meskipun cenderung rendah. Demikian juga rasio quick yang menggambarkan kemampuan aktiva lancar setelah dikurangi persediaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016 ratio quick pemerintah Kota Dumai sebesar 1,09 dan cenderung naik sampai dengan tahun 2020 menjadi sebesar 4,75. Peningkatan ini juga menunjukkan kemampuan pemerintah daerah Kota Dumai dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Tabel 3.18 Ratio Keuangan Kota Dumai Tahun 2016-2020.

Tabel 3.18 Ratio Keuangan Kota Dumai Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Likuiditas					
Rasio Lancar	1,22	2,74	4,88	6,51	5,41
Rasio Quick	1,09	2,31	4,57	6,22	4,75
Rasio Solvabilitas					
Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset	2,63	1,31	1,74	1,82	2,02
Rasio Hutang Terhadap Modal	2,71	1,33	1,77	1,86	2,06

Sumber: BPKAD Kota Dumai 2021, data diolah

Tabel 3.18 juga menggambarkan Kemampuan Pemerintah Kota Dumai dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Hal ini dapat dilihat dari ratio solvabilitas. Indikator ini dapat tercermin dari ratio total hutang terhadap total aset dan ratio total hutang terhadap total modal. Kemampuan Pemerintah Kota Dumai dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya masih sangat baik. Rasio total hutang terhadap total aset tergolong sangat kecil, demikian juga ratio hutang terhadap modal tergolong kecil yaitu dibawah 3. Namun demikian, trendnya terus meningkat. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pertumbuhan hutang pemerintah Kota Dumai tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan total aset maupun modal. Pada tahun 2016 ratio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kota Dumai sebesar 2,63 dan pada tahun 2020 turun menjadi sebesar 2,02. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada ratio hutang terhadap modal Pemerintah Kota Dumai, dimana pada tahun 2016 sebesar 2,71 dan turun menjadi sebesar 2,06 pada tahun 2020.

Mencermati hasil analisis keuangan Tabel 3.16 di atas dapat dilihat bahwa bahwa rasio likuiditas yang menunjukkan kemampuan Keuangan Pemerintah Kota Dumai untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya selama kurun waktu 2016-2020 menunjukkan trend yang semakin meningkat. Kenyataan ini dapat dilihat dari current ratio yang senantiasa semakin meningkat dari 1,22 pada tahun 2016 naik secara tajam menjadi 5,41 pada tahun 2020. Besaran current ratio 1,22 pada tahun 2020 ini berarti bahwa Rp 1 kewajiban dijamin dengan Rp. 1,22 pada asset lancar. Tidak jauh berbeda dengan current ratio pada Rasio likuiditas yaitu quick ratio juga menunjukkan trend peningkatan dari 1,09 pada tahun 2016 menurun menjadi 4,75 pada tahun 2020. Besaran rasio cepat 4,75 tahun 2020 berarti Rp 61.756.297.794 kewajiban dijamin dengan Rp. 333.823.186.591 asset lancar termasuk persediaan. Kedua rasio likuiditas tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemampuan Kota Dumai untuk membayar kewajiban jangka pendeknya rendah atau kurang baik.

Selanjutnya rasio solvabilitas yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Dumai dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya selama

kurun waktu 2016-2020 juga menunjukkan kecenderungan yang menurun. Hal ini dilihat rasio solvabilitas yang ditunjukkan dari rasio total hutang terhadap total asset dari 2,63% pada tahun 2016 kemudian menurun menjadi 1,82% pada tahun 2020. Artinya pada tahun 2020, dari Rp 61.756.297.794 hutang dijamin dengan total asset senilai Rp 3.052.770.671.600.

Rasio solvabilitas lainnya yaitu rasio hutang terhadap total modal (ekuitas) juga mengalami peningkatan dengan nilai yang sama dengan rasio hutang dengan total asset. Dari informasi rasio solvabilitas yang diuraikan diatas, memberikan gambaran bahwa kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Dumai sangat baik. Keadaan ini memungkinkan bagi Pemerintah Kota Dumai apabila berkeinginan membuat kebijakan peminjaman uang dalam rangka mempercepat proses pembangunan.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran daerah harus mampu menciptakan keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur. Seiring dengan meningkatnya perkembangan kehidupan masyarakat Kota Dumai, maka kebutuhan terhadap tersedianya pelayanan publik yang berkualitas terus meningkat. Pelayanan publik yang baik tidak dapat berjalan lancar apabila tidak tersedia sumberdaya aparatur yang profesional.

Dalam rangka mewujudkan sumberdaya aparatur yang profesional juga membutuhkan alokasi anggaran yang tidak kecil. Dalam upaya efisiensi dan menerapkan kebijakan pembangunan yang menekankan pada pelayanan publik, maka perlu terus diupayakan peningkatan terhadap proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan publik. Pemerintah Kota Dumai terus berupaya meningkatkan proporsi belanja publik dengan mengefisiensikan penggunaan belanja pemenuhan kebutuhan aparatur. Namun upaya tersebut belum dapat dijalankan secara konsisten. Hal ini tercermin dari proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur yang berfluktuatif. Pada tahun 2016 proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar 65,19% dan berturut-turut turun menjadi 59,76% pada tahun 2017, 59,61% pada tahun 2018, 54,46% pada tahun 2019 dan 48,21% pada tahun 2020. Tabel 3.19 menunjukkan Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Dumai Tahun 2016-2020

Tabel 3.19 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Dumai Tahun 2016-2020

No	Uraian	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Persentase
		(b)	(a)	(a)/(b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2020	1.424.703.116.633,85	686.813.310.669,31	48,21%
2	Tahun Anggaran 2019	1.311.558.856.077,06	714.251.068.160,00	54,46%
3	Tahun Anggaran 2018	1.112.399.051.890,74	663.076.232.308,00	59,61%
4	Tahun Anggaran 2017	1.203.255.387.073,93	719.089.545.030,00	59,76%
5	Tahun Anggaran 2016	1.114.972.852.847,61	726.835.028.663,00	65,19%

Sumber: BPKAD Kota Dumai, 2021, data diolah

Jika dilihat dari tabel diatas, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi belanja pemenuhan aparatur mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar (1,09) %. Adapun realisasi belanja pemenuhan aparatur dari komponen belanja tidak langsung rata-rata mengalami peningkatan selama kurun waktu 2016-2020 sebesar 1,98 % sedangkan darikomponen belanja langsung mengalami penurunan sebesar (7,98%). Ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Dumai terus berusaha meningkatkan porsi belanja publik

Untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama digunakan analisa proyeksi belanja daerah. Tabel 3.20 berikut memperlihatkan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Dumai selama kurun waktu Tahun 2016-2020

**Tabel 3.20 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Dumai
Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
A	Belanja Tidak Langsung	483.977.176.639,00	460.794.793.180,00	463.704.146.415,00	504.807.346.359,00	518.650.375.552,00	2,06%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	277.941.532.866,00	244.169.740.319,00	249.453.369.429,00	263.623.068.161,00	273.225.650.758,00	1,30%
2	Tambahan Penghasilan PNS	198.033.057.924,00	208.115.975.125,00	204.543.049.250,00	226.928.573.849,00	175.426.203.300,00	-2,35%
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	3.137.880.000,00	4.475.760.000,00	5.526.600.000,00	5.178.000.000,00	5.096.100.000,00	12,19%
4	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	-	-	-	-	61.981.160.944,00	
5	Biaya Pemungutan Pajak Daerah				6.093.154.286,00		-100,00%
6	Insetif Pemungutan Pajak Daerah	2.809.264.249,00	1.788.050.656,00	1.935.860.656,00	-		-2,00%
7	Insetif Pemungutan Retribusi Daerah				796.861.743,00	601.697.750,00	
8	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	-	-	
9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota (kepada Parpol)/Belanja Hibah (Kepada Parpol)	2.055.441.600,00	2.245.267.080,00	2.245.267.080,00	2.187.688.320,00	2.319.562.800,00	4,25%
10	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
B	Pembiayaan Pengeluaran	-	-	-	-	-	-
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
2	Pembayaran Pokok Hutang	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (A+B)	483.977.176.639,00	460.794.793.180,00	463.704.146.415,00	504.807.346.359,00	518.650.375.552,00	2,06%

Sumber: BPKAD Kota Dumai Tahun 2021, Data diolah

Pada Tabel 3.20 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Dumai Tahun 2016-2020 cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu tersebut adalah 2,06%. Pada Tahun 2016 total Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Dumai sebesar Rp. 483.977.176.639,00 dan tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 518.650.375.552,00. Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Dumai hanya terdiri dari realiasi komponen belanja tidak langsung sedangkan realisasi dari komponen pembiayaan pengeluaran tidak ada.

Dari keseluruhan komponen Belanja tidak langsung tahun 2016-2020 gaji dan tunjangan dan tambahan penghasilan PNS merupakan pengeluaran terbesar dibandingkan dengan belanja lainnya.

3.3. Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2026

3.3.1. Proyeksi Pendapatan Dan Belanja

Pemerintah Daerah memerlukan Pendanaan untuk menyelenggarakan Pemerintahan. Untuk mengelola dana dengan baik, maka diperlukan sistem keuangan yang baik pula. agar rangkaian kegiatan dan prosedur dalam mengelola keuangan (penerimaan dan pengeluaran) tertib, sah, hemat, berdaya guna, serta berhasil guna.

Penganggaran atau Penetapan Target hendaknya dikaitkan dengan potensi – potensi yang nyata dan dapat direalisasikan, sehingga dapat diharapkan menjadi modal untuk segala pembiayaan.

1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan segala Penerimaan Daerah yang berasal dari pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain yang sah, yang selanjutnya digunakan untuk Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan Daerah Kota Dumai diperoleh dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- b. Dana Perimbangan, yang meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Dumai dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah adalah:

- a. Melakukan Intensifikasi maupun ekstensifikasi di Bidang Pendapatan;
- b. Melakukan terobosan kepada Pemerintah Pusat dalam rangka pelimpahan kewenangan pusat ke daerah terkait dengan PAD;

- c. Meningkatkan kualitas data dan kualitas koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait porsi dana transfer daerah
- d. Menyiapkan data-data penerimaan secara akurat sebagai bahan analisis potensi penerimaan atau PAD;
- e. Melakukan Pengawasan dan Penertiban terhadap PAD;
- f. Penegakan hukum terkait pelaksanaan Peraturan Daerah tentang PAD;
- g. Peningkatan pelayanan dengan perbaikan sistem dan prosedur yang lebih baik
- h. Koordinasi antar OPD ditingkatkan sebagai upaya Peningkatan PAD
- i. Peningkat kinerja BUMD dalam rangka optimalisasi pendapatan dari unit usaha sebagai salah satu sumber Pendapatan daerah.
- j. Melakukan kajian terhadap regulasi yang mendorong peningkatan PAD.
- k. Mendorong investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari beberapa sektor antara lain industri, infrastruktur, pariwisata dan lain-lain
- l. Melakukan koordinasi dan Rekonsiliasi dengan pemerintah provinsi dan pusat terkait dengan dana transfer
- m. Penyempurnaan landasan hukum dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah
- n. Sosialisasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah
- o. Peningkatan kualitas aparat pajak dan retribusi daerah
- p. Penyederhanaan dan modernisasi sistem Pajak dan retribusi daerah serta mengurangi kontak langsung wajib pajak dengan aparat.
- q. Updating Basis Data pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data Pajak dan Retribusi Daerah
- r. Pengkajian ulang penerapan tarif pajak dan retribusi daerah
- s. Melaksanakan pemeriksaan dan penagihan pajak dan Retribusi daerah.
- t. Pemanfaatan teknologi informasi dan telematika di bidang Pendapatan.

Dari gambaran proyeksi lima tahun berjalan dapat diperkirakan pendapatan lima tahun kedepan (2021 – 2025) pada tabel 3.22 berikut.

Tabel 3.21 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2021 s/d 2026 Kota Dumai

U R A I A N	APBD Thn. 2021	2022	2023	2024	2025	2026
PENDAPATAN DAERAH	1.181.028.560.529,00	1.783.319.523.803,02	1.931.829.922.390,78	1.947.600.754.307,97	1.978.774.709.409,61	1.978.774.709.409,61
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	345.725.526.611,00	345.718.553.138,02	398.562.895.721,78	428.757.375.382,97	463.123.255.193,61	463.123.255.193,61
Pajak Daerah	163.180.200.000,00	175.990.540.009,02	194.023.947.755,78	215.216.478.867,97	238.752.500.484,61	238.752.500.484,61
Retribusi Daerah	39.199.304.600,00	45.191.539.936,00	46.624.980.067,00	48.103.887.793,00	49.629.705.309,00	49.629.705.309,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.600.830.961,00	2.645.933.246,00	2.668.776.849,00	2.691.817.672,00	2.715.057.417,00	2.715.057.417,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	140.745.191.050,00	121.890.539.947,00	155.245.191.050,00	162.745.191.050,00	172.025.991.983,00	172.025.991.983,00
Pendapatan Transfer	795.339.433.918,00	1.401.565.943.450,00	1.497.232.985.806,00	1.482.810.324.388,00	1.479.619.385.977,00	1.479.619.385.977,00
Transfer Pemerintah Pusat	713.840.094.218,00	1.293.799.547.798,00	1.385.161.422.372,00	1.366.260.079.554,00	1.358.409.905.545,00	1.358.409.905.545,00
Dana Perimbangan	682.251.941.143,00	1.261.103.958.325,00	1.354.177.492.755,00	1.336.898.202.005,00	1.330.585.163.368,00	1.330.585.163.368,00
Dana Insentif Daerah	31.588.153.075,00	32.695.589.473,00	30.983.929.617,00	29.361.877.549,00	27.824.742.177,00	27.824.742.177,00
Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0
Dana Keistimewaan	0	0	0	0	0	0
Dana Desa	0	0	0	0	0	0
Transfer antar daerah	81.499.339.700,00	107.766.395.652,00	112.071.563.434,00	116.550.244.834,00	121.209.480.432,00	121.209.480.432,00
Pendapatan Bagi Hasil	81.499.339.700,00	94.346.975.265,00	98.249.951.746,00	102.314.387.834,00	106.546.962.841,00	106.546.962.841,00
Bantuan Keuangan		13.419.420.387,00	13.821.611.688,00	14.235.857.000,00	14.662.517.591,00	14.662.517.591,00
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	39.963.600.000,00	36.035.027.215,00	36.034.040.863,00	36.033.054.537,00	36.032.068.239,00	36.032.068.239,00
Hibah	0	0	0	0	0	0
Dana Darurat	0	0	0	0	0	0
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	39.963.600.000	36.035.027.215,00	36.034.040.863,00	36.033.054.537,00	36.032.068.239,00	36.032.068.239,00
TOTAL PENDAPATAN	1.181.028.560.529,00	1.783.319.523.803,02	1.931.829.922.390,78	1.947.600.754.307,97	1.978.774.709.409,61	1.978.774.709.409,61

Berdasarkan Tabel 3.21 dijelaskan bahwa pendapatan kota Dumai diperkirakan mengalami peningkatan selama 5 tahun kedepan yaitu mulai tahun 2021-2026. Perkiraan peningkatan ini terjadi akibat adanya kecenderungan Peningkatan Pendapatan Daerah dari Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Peningkatan target ini juga dipicunya akan dioperasionalkannya jalan Tol Pekanbaru Dumai pada Tahun 2021, beroperasionalnya pelabuhan ro-ro Dumai Melaka, ditetapkannya RTRW Kota Dumai serta adanya kebijakan pemangkasan dan penyederhaan birokrasi didaerah oleh pemerintah pusat.

Dana perimbangan merupakan dana bagi hasil dari pemerintah pusat untuk proses penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dana perimbangan memberikan kontribusi yang paling besar dalam struktur APBD Kota Dumai, Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Kota Dumai terhadap Pemerintah pusat dan Provinsi khususnya dalam sektor keuangan masih sangat dominan.

Namun terdapat beberapa komponen pendapatan yang diperkirakan mengalami penurunan. Perkiraan penurunan pendapatan dari dana bagi hasil minyak bumi dan gas merupakan imbas dari krisis harga minyak mentah dunia yang sangat rendah dalam dua tahun terakhir yang berimbas pada kabupaten/kota yang ketergantungan fiskalnya sangat besar terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Kondisi ini sesuai dengan analisa ketergantungan fiskal kota Dumai yang telah dibahas sebelumnya. Berdasarkan analisa ketergantungan fiskal dan kondisi harga minyak dunia yang cenderung turun, maka Perkiraan pendapatan daerah yang berasal dari dana bagi hasil migas diperkirakan mengalami penurunan (bagi hasil bukan pajak). Dana perimbangan yang berasal dari dana bagi hasil pajak juga diperkirakan cenderung menurun selama 5 tahun kedepan.

Bagi Hasil Pajak Provinsi merupakan salah satu Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Bagi Hasil Pajak Provinsi merupakan pendapatan pajak yang dipungut langsung oleh provinsi sedangkan daerah kabupaten/kota mendapatkan persentase bagi hasil dari pendapatan pajak tersebut, yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak air permukaan dan DBH Pajak Rokok.

Sedangkan perkiraan kenaikan pendapatan dari komponen Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya merupakan efek *derivatif* dari peningkatan pendapatan daerah provinsi Riau yang diperkirakan akan meningkat.

2. Proyeksi Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (*Public Accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip *value for money*. Disamping itu, pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran Kinerja (*Performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung, dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*) melalui pendekatan kinerja (*performance oriented*).

Disamping itu, pengeluaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait, mendasarkan pada, standar analisa belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip *value for money*. Identifikasi belanja pengeluaran akan dibedakan menurut belanja langsung dan tidak langsung guna meningkatkan aspek transparansi. Kriteria tersebut bertitik tolak dari kegiatan yang dilakukan.

Dalam hal kepentingan tertentu, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah dapat pula membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran. Mencermati besarnya belanja yang harus dikeluarkan pada lima tahun mendatang diperlukan upaya secara serius untuk mengelola belanja daerah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Belanja Daerah dialokasikan dengan pengaturan pola yang menganut azas proporsional, efisien dan efektif dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Penentuan alokasi anggaran belanja sejalan dengan prioritas pembangunan sebagai langkah berkelanjutan dalam upaya pencapaian dengan visi Kota Dumai;
- b. Penerapan alokasi belanja berbasis output/outcomes.
- c. Penerapan standar harga dan biaya dilakukan secara optimal agar terjadi efisiensi anggaran.

- d. Belanja Pegawai diarahkan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai serta honorarium kegiatan dengan menerapkan asas efisiensi dan ekonomis serta efektif dalam pengertian seluruh program kerja dapat dituntaskan tanpa mengesampingkan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan serta pemenuhan kebutuhan unit kerja dan masyarakat.
- e. Belanja Barang dan Jasa pada kegiatan-kegiatan ditujukan untuk operasional rutin kegiatan, menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan dan menambah atau mengganti inventaris yang sudah tidak layak pakai.
- f. Belanja Modal diarahkan untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, serta pembangunan sarana dan prasarana yang bersifat menambah aset bagi Pemerintah Kota Dumai.
- g. Belanja Tidak Terduga diprioritaskan untuk penanganan pasca bencana alam, bencana sosial dan penanganan lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
- h. Bantuan Keuangan disalurkan kepada kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan kepada masyarakat secara transparan dan tepat sasaran, termasuk didalamnya *block grant* yang penggunaannya didasarkan atas permintaan masyarakat pada kelurahan sehingga terjadi sinkronisasi implementasi antara rencana pembangunan Kota Dumai dengan masyarakat melalui kelurahan.
- i. Perbaikan penghasilan Pegawai Non-PNS dengan menambah penghasilan sesuai UMR.

3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun Pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Adapun penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA; Pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjamandaerah dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; penyertaan modal daerah; pemberian pinjaman daerah dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan netto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Dalam rangka mendanai program-program pembangunan daerah, Pemerintah Kota Dumai merencanakan melakukan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Kerjasama Daerah, Pinjaman Daerah, KPBU, Penugasan BUMD, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR, Sumbangan Pihak ketiga dan lain lain.

Berikut tabel 3.22 Perkiraan Belanja Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Tabel 3. 22 Perkiraan Belanja Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021-2026

Uraian	APBD 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Belanja Operasional	1.073.637.505.134	1.293.228.081.785	1.436.454.312.549	1.478.578.381.006	1.478.126.201.536	1.478.126.201.536
Belanja Pegawai	596.120.076.218	783.692.754.175	787.276.217.763	790.108.458.653	791.617.610.437	791.617.610.437
BelanjaBarang dan jasa	436.228.936.807	470.252.244.940	607.689.227.156	615.642.922.665	640.203.171.430	640.203.171.430
Belanja bunga	0	0	0	0	0	0
Belanja subsidi	0	0	0	0	0	0
Belanja hibah	41.198.492.109	36.763.082.670	38.968.867.630	70.306.999.688	43.785.419.669	43.785.419.669
Belanja bantuan sosial	90.000.000	2.520.000.000	2.520.000.000	2.520.000.000	2.520.000.000	2.520.000.000
Belanja Modal	165.619.072.594	470.091.442.018	475.375.609.842	449.022.373.302	480.648.507.874	480.648.507.874
BelanjaTidak Terduga	7.086.058.256	20.000.000.000,00	20.000.000.000	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
Belanja Transfer	0	0	0	0	0	0
Total	1.246.342.635.984	1.783.319.523.803	1.931.829.922.391	1.947.600.754.308	1.978.774.709.410	1.978.774.709.410

*besaran belanja bunga disesuaikan dengan perencanaan/penganggaran tahunan

Tabel 3.23 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Dumai Tahun 2021-2026

Uraian	APBD 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Belanja Operasional	637.408.568.327	822.975.836.845	828.765.085.393	862.935.458.341	837.923.030.106	837.923.030.106
Belanja Pegawai	596.120.076.218	783.692.754.175	787.276.217.763	790.108.458.653	791.617.610.437	791.617.610.437
Belanja bunga*	0	0	0	0	0	0
Belanja subsidi	0	0	0	0	0	0
Belanja hibah	41.198.492.109	36.763.082.670	38.968.867.630	70.306.999.688	43.785.419.669	43.785.419.669
Belanja bantuan sosial	90.000.000	2.520.000.000	2.520.000.000	2.520.000.000	2.520.000.000	2.520.000.000
Belanja Tidak Terduga	7.086.058.256	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0	0	0
Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
Pembayaran pokok utang*	0	0	0	0	0	0
Total	644.494.626.583	842.975.836.845	848.765.085.393	882.935.458.341	857.923.030.106	857.923.030.106

*besaran belanja bunga dan pembayaran pokok utang disesuaikan dengan perencanaan/penganggaran tahunan

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Berikut tabel 3.24 Perkiraan Kapasitas Riil Keuangan Daerah dan Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Tahun 2021-2026 dan Tabel 3.23 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Dumai.

Tabel 3.24 Perkiraan Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Uraian	Perkiraan				
	2022	2023	2024	2025	2026
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Pendapatan	1.783.319.523.803,02	1.931.829.922.390,78	1.947.600.754.307,97	1.978.774.709.409,61	1.978.774.709.409,61
Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0	0	0	0	0
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
Total penerimaan	1.833.319.523.803,02	1.981.829.922.390,78	1.997.600.754.307,97	2.028.774.709.409,61	2.028.774.709.409,61
Dikurangi:					
Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	842.975.836.845	848.765.085.393	882.935.458.341	857.923.030.106	857.923.030.106
Kapasitas riil kemampuan keuangan	990.343.686.958,02	1.133.064.836.997,78	1.114.665.295.966,97	1.170.851.679.303,61	1.170.851.679.303,61

Tabel 3.25 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Dumai

Uraian	Perkiraan				
	2022	2023	2024	2025	2026
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Kapasitas riil kemampuan keuangan	990.343.686.958,02	1.133.064.836.997,78	1.114.665.295.966,97	1.170.851.679.303,61	1.170.851.679.303,61
Prioritas I	594.206.212.174,81	679.838.902.198,67	668.799.177.580,18	702.511.007.582,17	702.511.007.582,17
Prioritas II	396.137.474.783,21	453.225.934.799,11	445.866.118.386,79	468.340.671.721,44	468.340.671.721,44

Arah kebijakan ekonomi daerah adalah mewujudkan ekonomi daerah yang mencakup peningkatan perekonomian kota yang tangguh, sehat dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap peningkatan kegiatan ekonomi akan berpengaruh pada peningkatan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yg pada akhirnya akan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Maksudnya bahwa setiap potensi ekonomi yang dimiliki harus dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan peluang-peluang yang ada guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka peningkatan dan pemanfaatan anggaran dalam melaksanakan kegiatan Pemerintah Kota Dumai perlu diambil langkah-langkah:

- a. Pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik (*public oriented*) melalui program dan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat
- b. Jelasnya misi pengelolaan keuangan daerah guna mengemban kinerja pencapaian kearah tujuan strategis daerah, juga kejelasan dalam pembagian kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran sehingga transparan dan akuntabel
- c. Melakukan pembinaan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi dan anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat daerah.
- d. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada upaya memperbesar dinamika perekonomian daerah dan kesertaan masyarakat.
- e. Memperkecil derajat ketergantungan pendapatan daerah pada kucuran sumber dana perimbangan yang tidak konsisten, dengan memperbesar kemandirian keuangan daerah melalui upaya optimalisasi pengelolaan sumber pendapatan daerah.
- f. Memperingan beban APBD dengan memperbesar kontribusi APBD provinsi, APBN, dan CSR dalam mendanai pelaksanaan mandat pemerintahan.
- g. Menggesa seluruh OPD untuk lebih aktif mensinergikan program dan kegiatan dengan berbagai sumber pendanaan.
- h. Rumusan indikator capaian kinerja pada tataran output dan outcome harus didasari pada persoalan yang akan diselesaikan dan berkelanjutan.
- i. Membangun kerjasama antar wilayah Kabupaten Hinterland dalam mengoptimal potensi daerah.

Jika dilihat dari kerangka pendanaan tersebut maka setiap tahun terjadi defisit anggaran yang meningkat setiap tahunnya sampai tahun 2026. Alternatif untuk menutupi defisit ini adalah dengan memanfaatkan SILPA. Kondisi defisit dalam anggaran dapat saja menyisakan dana pada akhir tahun dalam bentuk

SILPA karena pelampauan target pendapatan dan tidak tercapainya target realisasi belanja. Pelampauan target pendapatan bisa disebabkan beberapa hal, seperti PAD yang ditargetnya di bawah potensi riil, informasi tentang penerimaan daerah dari Pemerintah diperoleh setelah penetapan Perda APBD-P, dan diterimanya lain-lain pendapatan yang sah setelah APBD-P ditetapkan. Sedangkan ketidaktercapaian target belanja bisa disebabkan karena efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan (*output* kegiatan tercapai, tetapi anggarannya tidak terealisasi seluruhnya), kegiatan belum selesai (sehingga anggaran yang belum digunakan “dibawa” ke tahun anggaran berikutnya), dan kegiatan yang batal dilaksanakan.

Hal ini sangat mungkin terjadi karena kecenderungan OPD yang bersifat *budget maximizer* dalam artian mengusulkan kebutuhan anggaran target belanja dalam nilai maksimal. Pengaruh dari sifat *budget maximizer* ini adalah terjadinya sisa anggaran baik ketika output kegiatan sudah tercapai atau belum. Ketika output anggaran tercapai, maka sisa anggaran sering disebut sebagai hasil dari efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga bersifat bebas untuk digunakan bagi kegiatan lain pada tahun anggaran berikutnya (*free cash flow*).

Adapun alternatif lain dalam mengatasi defisit anggaran sampai tahun 2026 adalah dengan mengoptimalkan pendapatan dari komponen dana perimbangan pusat dan dari dana yang bersumber Pemerintah Provinsi Riau.



BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah merupakan salah satu bagian terpenting pada dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian permasalahan dan isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis.

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

4.1.1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual yang dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

4.1.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

4.1.2.1 Aspek Pelayanan Umum

4.1.2.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang pendidikan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Belum proporsionalnya perbandingan jumlah siswa dengan jumlah sekolah di tingkat TK, SD dan SMP.

- b. Menurunnya angka melanjutkan pendidikan jenjang Pendidikan SMP.
- c. Terjadinya peningkatan angka putus sekolah jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs
- d. Bertambahnya rasio siswa/ruang kelas SD/MI untuk SD sudah melebihi SPM 28 siswa per kelas yaitu 31,13 siswa/kelas tahun 2020
- e. Persentase ruang kelas SD/MI yang dalam kondisi baik masih dibawah 30% di tahun 2020
- f. Persentase ruang kelas SMP yang dalam kondisi baik masih dibawah 20% di tahun 2020
- g. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya.
- h. Guru yang bersertifikasi jenjang Pendidikan SD baru mencapai 60,53% dan jenjang Pendidikan SMP sebesar 47,85%.
- i. Rendahnya atau terbatasnya penyediaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan internet dalam proses belajar mengajar di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Dumai.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di seluruh Kota Dumai, terutama di wilayah kerja puskesmas yang memiliki daerah sulit dijangkau karena kondisi geografis, terbatasnya transportasi dan infrastruktur (jalan, jembatan dan listrik) seperti wilayah kerja puskesmas Sungai Sembilan, Bukit Kapur, Bukit Kayu Kapur dan Medang Kampai.
- b. Bangunan puskesmas pembantu dan poskeskel yang ada sudah berumur tua sehingga sudah mulai rusak.
- c. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta pelayanan medis yang bermutu dan merata di setiap puskesmas, Sarana dan prasarana kesehatan yang ada belum memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
- d. Masih belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM kesehatan sesuai kompetensi serta ketersediaan SDM Kesehatan belum sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

- e. Masih terdapat Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita terutama di Kecamatan Dumai Barat.
- f. Adanya *triple burden* penyakit akibat adanya transisi epidemiologi penyakit yang signifikan dimana penyakit tidak menular telah menjadi beban utama, meskipun beban penyakit menular masih berat juga seperti Malaria, TB Paru, HIV/AIDS dan DBD. Disamping itu, munculnya *new emerging diseases* seperti COVID 19.
- g. Masih terdapat jumlah kasus balita dengan gizi buruk dan gizi kurang selama periode 2016-2020.
- h. Masih ada penduduk Kota Dumai yang belum memiliki jaminan kesehatan yang mengakibatkan belum tercapainya Universal Health Coverage (UHC).
- i. Penggunaan Obat Rasional dan Pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.
- j. Masih rendahnya peran serta aktif masyarakat (PHBS) dalam pembangunan kesehatan.
- k. Menurunnya cakupan pelayanan kesehatan di beberapa indikator pelayanan kesehatan tahun 2020 akibat Pandemi Covid 19.

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Panjang jalan dengan kondisi baik hanya mencapai 40% dan yang paling rendah ada di kecamatan sungai sembilan, dan Medang Kampai (49,03%).
- b. Belum optimalnya jumlah dan kualitas infrastruktur jalan daerah (Kondisi jaringan jalan yang mengalami kerusakan sedang dan berat tersebar di hampir seluruh wilayah sebagai konsekwensi angkutan darat tonase tinggi yang melewati ruas-ruas jalan di Kota Dumai dan juga sebagai akibat banjir rob yang menggerus jalan).
- c. Tingkat kerusakan infrastruktur (jalan, drainase dll) tidak sebanding dengan pembangunannya.
- d. Belum optimalnya pemanfaatan infastruktur jalan akibat kualitas jalan yang menuju ke sumber-sumber potensi

perekonomian seperti pertanian, wisata dan industri yang masih rendah.

- e. Rendahnya pelayanan sambungan rumah air bersih yang dirasakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primer dan trennya mengalami penurunan.
- f. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur air bersih yang merata.
- g. Kerentanan resiko genangan banjir yang bisa mencapai ketinggian 0,25 sampai 0,50 meter.
- h. Kawasan Pusat kota yang belum tertata secara optimal dan belum memenuhi kaidah-kaidah ketataruangan yang baik untuk menciptakan kawasan *better space better living*.
- i. Ruang terbuka hijau masih sangat kurang.
- j. Terbatasnya luasan dan sebaran ruang publik di Kota Dumai sehingga memicu ketidakadilan ruang untuk masyarakat khususnya anak-anak.

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapatnya rumah tidak layak huni sebanyak 17,69% dari jumlah RT
- b. Rendahnya tingkat kepemilikan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin atau baru mencapai lebih kurang 26%.
- c. Menurunnya persentase rumah tangga pengguna listrik di Kota Dumai
- d. Terbatasnya Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik
- e. Terbatasnya penyediaan Infrastruktur Kawasan Pemukiman
- f. Menurun dan terbatasnya kapasitas pembangunan sarana PSU

5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Menurunnya rasio polisi pamong praja dengan jumlah penduduk

- b. Masih tingginya potensi kebakaran lahan, hutan dan Kawasan pemukiman.
- c. Masih belum tertatanya pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
- d. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana daerah
- e. Belum adanya Peningkatan Status Kelembagaan

6) Urusan Pemerintahan Bidang sosial

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapat PMKS yang belum tertangani dengan baik atau yang disebabkan aksesibilitas infrastruktur kota bagi penyandang difabel sangat kurang sehingga mempengaruhi kemandirian dan produktivitas mereka.
- b. Meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di tengah-tengah masyarakat.
- c. Meningkatnya keberadaan gelandangan, pengemis, anak jalanan dan PSK.
- d. Semakin meningkatnya usia harapan hidup yang berarti semakin banyaknya penduduk lanjut usia yang memerlukan perhatian dan pelayanan pembangunan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia.
- e. Belum fokus dan lokus serta terintegrasinya penanggulangan kemiskinan.
- f. Belum optimalnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.
- g. Kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat belum efektif.
- h. Jumlah kualitas tenaga pelayanan sosial masih sangat terbatas.
- i. Belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

4.1.2.1.2 Urusan Pemerintahan Bidang Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Tingginya tingkat pengangguran Kota Dumai dibanding Provinsi Riau dan Nasional.
- b. Rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja hal tersebut dilihat dari menurunnya rasio lulusan S1, S2 dan S3 terhadap jumlah Angkatan kerja.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sudah mencapai 66,27% tahun 2020, namun anggota legislatif perempuan mengalami penurunan dari 14,29% tahun 2015 menjadi 6,67% tahun 2020.
- b. Masih adanya KDRT yang terjadi terutama kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Dumai tahun 2020 sebesar 10,29% naik dibandingkan tahun 2017 hanya 7,97%.
- c. Belum semua korban kekerasan pada perempuan mendapatkan layanan bantuan pemulihan.
- d. Masih rendahnya perangkat daerah terhadap yang responsive gender dimana pada tahun 2020 baru mencapai 5,88%.
- e. Belum semua sekolah yang ada ramah anak di Kota Dumai
- f. Minimnya taman dan ruang bermain yang ramah anak di Kota Dumai.

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Terjadinya penurunan rasio produksi terhadap pemenuhan konsumsi terutama pangan utama.
- b. Sumber produksi dan distribusi pangan belum diatur secara baik sehingga akses produksi dan konsumsi belum terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
- c. Tingginya ketergantungan impor pangan akibat dari rasio produksi pangan yang hanya dua surplus dari 14 sumber pangan.

- d. Penganekaragaman/diversifikasi pangan masih terbatas akibat belum optimalnya diversifikasi konsumsi pangan lokal.
- e. Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan.
- f. Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih kurang.
- g. Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang.
- h. Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian.

4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang pertanahan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Masih tingginya konflik lahan atau pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan.
- b. Perlunya pembenahan administrasi pertanahan untuk mengurangi permasalahan pertanahan

5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Belum semua dokumen lingkungan hidup tersedia sesuai regulai pemerintah
- b. Kualitas air tanah, air sumur bor masih rendah karena tingginya nilai kekeruhan dan warna serta unsur-unsur logam. Demikian halnya kualitas air laut dan air sungai yang menurun.
- c. Masih rendahnya rasio TPS persatuan penduduk (1000 penduduk) atau masih terdapat 44% yang belum tertangani dengan baik
- d. Pengawasan limbah B3 yang masih terbatas dan kondisi ini berkontribusi terhadap kualitas lingkungan hidup
- e. Belum optimalnya penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat
- f. Belum semua sekolah berbudaya lingkungan

6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapat 3,79% penduduk yang wajib KTP belum memiliki KTP.
- b. Cakupan penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)
- c. Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan secara terintegrasi dan online oleh instansi-instansi terkait sebagai *Single Identity Number*
- d. Sarana dan prasarana yang tersedia kurang mendukung dalam percepatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan kurang mencerminkan *responsive gender*.
- e. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting dokumen kependudukan.

7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya peningkatan kualitas pengembangan PKK, pelayanan Posyandu dan Pembinaan Masyarakat.
- b. Masih belum optimalnya fungsi lembaga-lembaga masyarakat di tingkat kelurahan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.
- c. Sebagian besar Kelurahan masih dalam kategori berkembang, hanya sebagian kecil kelurahan yang berkategori cepat berkembang.
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna masih rendah.
- e. Terjadinya penurunan semangat swadaya dan gotong royong masyarakat.
- f. Belum berfungsinya kader pemberdayaan masyarakat karena belum adanya pelatihan dan pembinaan yang dilakukan.
- g. Kurangnya tenaga pendamping UEK-SP.

8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk
- b. Minimnya pemanfaatan data dan informasi kependudukan serta sinergitas pendataan keluarga antar lintas sector
- c. Kurangnya perluasan akses dan kualitas pelayanan KB & kesehatan reproduksi sesuai karakteristik wilayah sehingga terjadinya penurunan Peserta KB aktif
- d. Meningkatnya jumlah keluarga pra sejahtera.

9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Belum tersedianya terminal Type C sebagai simpul transportasi perkotaan untuk menata trayek angkutan kota dan pedesaan
- b. Belum adanya revitalisasi angkutan kota dan angkutan yang tidak memiliki izin (Becak Motor, Kendaraan Online) yang dapat merusak trayek dan operasional angkutan kota
- c. Masih rendahnya penertiban dan pengendalian terhadap Angkutan Sewa, Angkutan Karyawan dan Angkutan Sekolah di area Kota Dumai
- d. Belum adanya Penertiban terhadap Pelabuhan rakyat yang beroperasi di Kota Dumai Jumlah Pelabuhan Rakyat DiKota Dumai
- e. Rendahnya investasi Pemerintah Daerah pada Sub Sektor Perparkiran
- f. Pengelolaan parkir masih dilakukan secara konvensional serta minim penggunaan dan pemanfaatan teknologi
- g. Fasilitas parkir yang masih menggunakan bahu jalan yang dapat mengurangi kapasitas jalan
- h. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya fasilitas keselamatan jalan yang meningkatkan angka kecelakaan di Kota Dumai
- i. Kurangnya Fasilitas Keselamatan jalan

- j. Masih adanya pos pembantu pemungutan retribusi belum memiliki fasilitas pelayanan yang representatif sehingga dapat menimbulkan kemacetan.

10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan menyangkut komunikasi dan Informatika adalah:

- a. Belum semua organisasi perangkat daerah yang menggunakan Teknologi informasi dalam manajemen internal organisasi maupun pelayanan publik.
- b. Informasi pada Web site Pemerintah Kota Dumai belum lengkap sepenuhnya
- c. Belum optimalnya Portal Pelayanan Publik yang Terintegrasi
- d. Belum optimalnya penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai
- e. Belum semua Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi
- f. Memastikan Struktur Diskominfo dan Tupoksinya sudah memenuhi semua peraturan pemerintah yang ada dan sesuai dengan best practice TIK seperti terdapat Bidang/Seksi yang mengurus khusus Infrastruktur. Keamanan Informasi. Aplikasi. Monitoring, Perawatan, dan Operasional Sistem dan Layanan TIK. Tata Kelola & Manajemen TIK. Integrasi Data. Pengolahan dan Penyajian Data. Komunikasi Publik. dan Service Desk semua layanan TIK.
- g. Belum handalnya data statistik yang bersumber dari Pemerintah daerah (Statistik) yang menjadi pendukung informasi.
- h. Belum optimalnya Informasi dan Komunikasi Publik
- i. Kurang dan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapat 33,47% koperasi yang belum aktif sehingga menyebabkan masih rendahnya kontribusi koperasi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

- b. Terbatasnya jumlah pendamping UMKM dan masih sulitnya permodalan bagi UMKM
- c. Masih belum optimalnya pemberdayaan koperasi dan UMKM

12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Rendah kualitas infrastruktur pendukung peningkatan daya saing investasi.
- b. Kurangnya informasi tentang peluang investasi dan regulasi, dikarenakan masih terbatasnya jaringan informasi berbasis teknologi informasi oleh instansi terkait.
- c. Belum optimalnya pengembangan sistem insentif terhadap investasi.
- d. Menurunnya jumlah perusahaan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di Dumai.
- e. Belum optimalnya kontribusi investasi terhadap peningkatan PDRB.

13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Menurunnya jumlah organisasi kepemudaan yang menyebabkan terjadinya pengurangan jumlah kegiatan kepemudaan.
- b. Minimnya jumlah kegiatan keolahragaan di Kota Dumai.
- c. Belum terdapatnya pembinaan olahraga secara sistematis sehingga berakibat pada rendah prestasi olahraga.

14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Belum tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi
- b. Kurang tersedianya dan updatenya data sektoral untuk menunjang data perencanaan pembangunan.

15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Belum terlaksananya tata kelola keamanan informasi persandian di pemerintah daerah.
- b. Terbatasnya Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah

16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi
- b. Pemahaman masyarakat tentang nilai – nilai budaya masih rendah.
- c. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal.
- d. Konten pembelajaran belum relevan, kontekstual, dan memiliki makna sosial yang sesuai dengan kekhasan persoalan sosial dan budaya daerah.
- e. Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan serta menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional.
- f. Minimnya festival kebudayaan di Kota Dumai.
- g. Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik yang fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa.
- h. Kurangnya fasilitasi sarana dan prasarana untuk pengembangan apresiasi seni budaya.
- i. Terbatasnya kerjasama dengan stakeholder (Perusahaan dan hotel) untk promosi pariwisata Kota Dumai.
- j. Terbatasnya Sumber Daya Manusia bidang kesenian dan kebudayaan daerah.

17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a Keterbatasan sarana dan prasarana.
- b Koleksi Buku perpustakaan masih sangat terbatas.
- c Keterbatasan tenaga fungsional pengelola perpustakaan.
- d Berkurangnya jumlah pengunjung perpustakaan.
- e Kurangnya kegiatan pengembangan perpustakaan.
- f Belum berkembangnya layanan perpustakaan berbasis IT (*Ebook*) sehingga jumlah kunjungan perpustakaan hanya berbasis *offline*

18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a Penataan arsip belum optimal pada setiap OPD sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- b Menurunnya dokumen arsip yang tersimpan.
- a Tenaga arsiparis masih sangat terbatas hal ini disebabkan karena minat pegawai sangat rendah untuk menduduki jabatan fungsional arsiparis.

4.1.2.1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pilihan

1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Menurunnya produksi perikanan laut pada semua jenis ikan termasuk udang.
- b. Produksi perikanan budidaya mengalami penurunan terutama pada produksi gurami.
- c. Permasalahan kelembagaan pada pembudidaya ikan di Kota Dumai masih bersifat tradisional, sulitnya memberikan pemahaman karena sifat penyampaian informasi yang masih dari rumah ke rumah, disamping memakan waktu lama, juga

informasi atau introduksi teknologi diterjemahkan sendiri-sendiri oleh pembudidaya tersebut.

- d. Produk yang dihasilkan oleh pembudidaya ikan belum menjadi produk unggulan, sifatnya masih memenuhi kebutuhan ikan segar yang dihasilkan dalam jumlah cukup kecil, atau belum menjadi bahan baku industri perikanan.
- e. Terbatasnya prasarana yang tersedia dalam mengelola usaha perikanan.
- f. Kurangnya sarana dan prasarana bagi usaha perikanan laut dan perairan umum.
- g. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan.
- h. Tingginya biaya logistik penangkapan perikanan laut dan perairan umum akibat rendah pemanfaatan teknologi penangkapan.
- i. Distribusi dan kapasitas kelembagaan pemasaran yang rendah. Belum berkembangnya industri pengolahan ikan berskala sedang dan besar akibat keterbatasan infrastruktur.
- j. Keterampilan pendamping yang masih harus di benahi, sehingga pendamping tidak memiliki satuan indikator yang harus diselesaikan.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Menurunnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara.
- b. Belum terhitungnya kontribusi pendapatan pariwisata pada PAD Kota Dumai.

3) Urusan Pemerintahan Bidang pertanian

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Tekanan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian yang dapat menimbulkan dampak terhadap kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem lingkungan.
- b. Masih terdapatnya kasus hewan menular zoonosis pada ternak unggulan di Kota Dumai (Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis ini tetap sama di tahun 2016, dan di tahun

2017 terjadi penurunan jumlah kasus menjadi 29 kasus serta terus menurun pada tahun 2018 yaitu menjadi 23 kasus.

- c. Masih terbatasnya tenaga penyuluh dan trendahnya kompetensi penyuluh pertanian terutama terkait pembinaan kelembagaan petani.
- d. Semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Sektor perdagangan belum dimanfaatkan secara optimal terutama perdagangan produk UMKM dan IKM
- b. Menurunnya kontribusi sektor perdagangan sebesar -2,80% selama tahun 2010-2020.

5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan teknis bidang perindustrian dan kerjasama industri belum berjalan secara optimal terutama pengembangan produk IKM.
- b. Masih rendahnya peningkatan volume produksi barang-barang industri yang hanya tumbuh sebesar 1,49% per tahun selama tahun 2010-2020.

4.1.2.1.4 Urusan Pemerintahan Bidang Fungsi Penunjang

1) Administrasi Pemerintahan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (*Electronic Government*) belum optimal.
- b. Pelayanan publik masih memerlukan perbaikan di semua lini.
- c. Masih terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi di dalam menjalankan tugas dalam pembangunan daerah.

- d. Penyelesaian batas wilayah dengan Kabupaten Bengkalis belum selesai serta penyelesaian batas wilayah antar kecamatan dan kelurahan.
- e. Banyak lahan yang belum bersertifikat dan potensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
- f. Keberadaan Kecamatan dan Kelurahan kerap diposisikan sebagai salah satu instansi yang hanya berperan dalam pelayanan masyarakat seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan bagi masyarakat serta penggerak masa dalam berbagai kegiatan Pemerintah.
- g. Belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah.
- h. Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip *good governance*.
- i. Kurangnya pemahaman penyedia jasa konstruksi tentang regulasi jasa konstruksi.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antara pusat dan daerah belum optimal.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan rapat koordinasi dalam merencanakan dan merumuskan penyelesaian masalah dan prioritas pembangunan.
- c. Masih belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pembangunan.
- d. Belum optimalnya ketersediaan dan validitas informasi untuk proses penyusunan dokumen perencanaan.
- e. Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan yang masih rendah.
- f. Kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya data masih sangat rendah.
- g. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang.
- h. Belum terlaksananya bidang kelitbangan sebagai dasar dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan.

3) Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Belum terlaksananya analisis kajian potensi PAD Kota Dumai
- b. Masih terjadi deviasi penganggaran terhadap perencanaan terkait target yang telah ditentukan dalam perencanaan.
- c. Belum Optimalnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai
- d. Masih kurangnya sumber daya manusia aparatur yang membidangi masalah keuangan baik dari segi kualitas maupun segi jumlah.
- e. Menurunnya kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

4) Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Profesionalitas ASN Kota Dumai dikategorikan sangat rendah
- b. Manajemen kepegawaian belum berjalan secara optimal.
- c. Belum terpetanya dengan baik terhadap kebutuhan pegawai masih belum mengacu pada visi dan misi pemerintah daerah.

5) Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- b. Persentase Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti masih dibawah 100%.
- c. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum Optimal.
- d. Monitoring dan evaluasi bantuan provinsi riau wajib dilaksanakan setiap triwulan, untuk mengawasi kegiatan-kegiatan provinsi di Kota Dumai.
- e. Kurangnya Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan.

4.1.2.2 Aspek Daya Saing

Permasalahan aspek daya saing daerah menurut fokus di Kota Dumai sebagai berikut.

4.1.2.2.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

- 1) Rendah peningkatan volume konsumsi perkapita berdasarkan harga konstan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan nilai konsumsi Rumah Tangga.
- 2) Terjadinya penurunan kesejahteraan masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dari rasio konsumsi perkapita non pangan berdasarkan harga berlaku dan harga konstan yang mengalami penurunan.
- 3) Rendahnya NTP, maka diperlukan perbaikan infrastruktur pada sektor pertanian, transformasi dan input pertanian lainnya agar biaya logistik sektor pertanian dapat dikurangi sehingga beban yang dibayar petani semakin turun baik dalam pengadaan input maupun dalam distribusi output.

4.1.2.2.2 Fokus Infrastruktur Wilayah

- 1) Terjadinya peningkatan rasio jumlah kendaraan terhadap panjang jalan. Namun belum dibarengi dengan kecepatan peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik, sehingga berisiko pada peningkatan angka kecelakaan transportasi.
- 2) Rendahnya peningkatan rasio luas wilayah produktif. Artinya terdapat wilayah peruntukan penggunaan yang belum dioptimalkan pemanfaatannya. Sehingga kondisi ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Luas wilayah industri yang ada belum dioptimalkan pemanfaatannya, hal tersebut dapat dilihat dari luas peruntukan kawasan industri yang belum dimanfaatkan.

4.1.2.2.3 Fokus Iklim Berinvestasi

- 1) Masih terdapatnya Angka kriminalitas yang belum terselesaikan. Tentunya kondisi ini kurang menunjang untuk mengundang investor untuk melakukan investasi di wilayah ini. Namun upaya lain yang harus diperhatikan adalah ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang terutama seperti kesetersediaan jalan kawasan, air bersih, tenaga listrik, pengolahan limbah dan sarana pendukung lainnya di wilayah peruntukan kawasan industri.

- 2) Belum optimalnya pengelolaan perizinan terutama pelayanan perizinan secara online.

4.1.2.2.4 Fokus Sumberdaya Manusia

- 1) Masih rendahnya rasio pendidikan tinggi terhadap jumlah ketenagakerjaan yang terdapat di Kota Dumai. Kondisi menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja masih mengalami kendala dalam kualitas SDM. Oleh karena itu program jangka pendek yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan produktifitas tenaga kerja dalam pengelolaan sumberdaya secara optimal dengan melaksanakan magang dan pelatihan.
- 2) Masih tingginya Rasio ketergantungan hingga tahun 2020 masih mencapai 48,55% dari jumlah penduduk. Rasio ketergantungan didominasi oleh penduduk yang belum produktif atau usia dini dan usia sekolah. Dengan rasio ketergantungan yang tinggi menyebabkan penduduk usia produktif akan menanggung beban penduduk usia nonproduktif yang lebih tinggi. Maka beban pembiayaan jaminan sosial yang harus ditanggung akan terus meningkat.

4.2 Isu-Isu Strategis

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan daerah, internasional, kebijakan nasional dan provinsi. Hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar dan signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik.
4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.
6. Janji politik dalam penyampaian Visi dan Misi serta Program Unggulan Walikota Terpilih yang perlu diwujudkan selama proses pemilukada Kota Dumai Tahun 2020.

4.2.1 Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Aspek pembangunan berkelanjutan mengusung 4 pilar, yaitu: aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan hukum serta tata kelola. Keempat pilar pembangunan tersebut dijelaskan kedalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Penelaahan KLHS dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilaksanakan secara bersama-sama yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah menyusun RPJMD adalah dengan memperhatikan prinsip dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yaitu untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan. Oleh karena itu dalam penyusunan RPJMD dibutuhkan KLHS sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dan sebagai bahan masukan bagi Kebijakan, Rencana, Program (KRP) dalam RPJMD, sehingga dampak dan/atau risiko lingkungan dapat diminimalkan dengan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan atau program yang menimbulkan dampak dan atau resiko negatif terhadap lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan disebutkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030, yang mencakup 5 pilar dan 17 tujuan dari aspek kehidupan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian *Millennium Development Goals (MDGs)* yang berakhir akhir pada tahun 2015. Lebih jauh dijelaskan didalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 bahwa KLHS dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan 319 indikatornya, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai, maka dirumsukan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan daerah sebagai berikut:

1. Rawan bencana (Kebakaran hutam dan lahan, banjir, abrasi, rob dan lain-lain)
2. Pencemaran lingkungan
3. Infrastruktur belum optimal
4. Penyediaan air bersih yang belum optimal
5. Penegakkan hukum dan tata kelola belum optimal
6. Kualitas Sumber daya manusia yang rendah (pendidikan dan kesehatan).

Berdasarkan dokumen KLHS menunjukkan bahwa terdapat 106 Indikator TPB yang terkait dengan Isu Utama Pembangunan Berkelanjutan di Kota Dumai sebanyak 15 indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, 39 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, 14 indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan 38 indikator tidak ada data. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional menjadi prioritas untuk perumusan skenario tanpa upaya tambahan, sedangkan indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional menjadi prioritas untuk perumusan skenario dengan upaya tambahan. Indikator TPB yang belum ada data dan masuk dalam isu utama diharapkan dapat

dijadikan acuan untuk dilaksanakan dalam RPJMD Kota Dumai 2021 – 2026.

Namun juga dengan tetap memperhatikan isu-isu lainnya yang sudah ditangani dan dilaksanakan baik yang sudah atau belum mencapai target capaian dalam pelaksanaan pembangunan. Berikut disajikan isu-isu strategis yang harus menjadi focus utama dalam isu pembangunan berkelanjutan terutama terhadap beberapa isu-isu yang hasil evaluasinya memerlukan upaya tambahan dan perhatian khusus terutama terkait isu-isu yang belum adanya data baseline sebagai acuan pengukuran kemajuan terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota Dumai.

Tabel 4.1: Rekomendasi KLHS terhadap RPJMD Yang Harus Disesuaikan

No	TPB	Isu Strategis	Rekomendasi Upaya Tambahan
1	6	Penyediaan Air Bersih yang Belum Optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. 2. Peningkatan jumlah Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. 3. Peningkatan Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. 4. Peningkatan Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.
2	13	Rawan Bencana (Karhutla, Banjir, Abrasi, Rob, dll)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pengurangan risiko bencana daerah disetiap lokasi. 2. Pengurangan risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. 3. Penyusunan dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. 4. Penambahan jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. 5. Peningkatan proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. 6. Pemantauan terhadap Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). 7. Penambahan jumlah wilayah kota tangguh bencana yang terbentuk. 8. Penambahan jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. 9. Peningkatan proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. 10. Penyusunan dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.

No	TPB	Isu Strategis	Rekomendasi Upaya Tambahan
3	9	Infrastruktur Kota Belum Optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. 2. Peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). 3. Peningkatan proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. 4. Peningkatan jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP). 5. Peningkatan jumlah wilayah kota yang terpenuhi SPP. 6. Peningkatan persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.
4	16	Penegakan Hukum dan Tata Kelola Belum Optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. 2. Penurunan proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. 3. Peningkatan keamanan penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. 4. Perbaikan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). 5. Peningkatan proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui terutama belanja publik 6. Peningkatan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 7. Peningkatan keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). 8. Peningkatan jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
5	14&15	Pencemaran Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. 2. Peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. 3. Peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku. 4. Pemberian Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri. 5. Penyusunan dan implementasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 6. Penambahan jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. 7. Penglibatan dan penambahan jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau. 8. Peningkatan persentase sampah perkotaan yang tertangani.

No	TPB	Isu Strategis	Rekomendasi Upaya Tambahan
6	3&4	Kualitas SDM yang Rendah (Pendidikan dan Kesehatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. 2. Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. 3. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. 4. Peningkatan rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. 5. Penurunan Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). 6. Prevalensi anemia pada ibu hamil 7. Peningkatan jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif 8. Peningkatan kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. 9. Peningkatan Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja). 10. Peningkatan imunisasi dasar lengkap pada bayi 11. Penurunan Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. 12. Peningkatan jumlah yang mencapai eliminasi malaria. 13. Peningkatan Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). 14. Penurunan jumlah perokok pada penduduk umur ≤18 tahun. 15. Penurunan jumlah obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun. 16. Penurunan penyalahgunaan narkoba. 17. Penurunan konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir. 18. Peningkatan angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern. 19. Penstabilan Total Fertility Rate (TFR). 20. Unmet need pelayanan Kesehatan 21. Peningkatan jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. 22. Peningkatan Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 23. Proporsi kematian akibat keracunan. 24. Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun. 25. Peningkatan proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. 26. Peningkatan jumlah SD/MI berakreditasi minimal B. 27. Peningkatan jumlah SMP/MTs berakreditasi minimal B. 28. Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK)

No	TPB	Isu Strategis	Rekomendasi Upaya Tambahan
			SD/MI/ sederajat. 29. Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat. 30. Peningkatan Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi. 31. Peningkatan jumlah guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. 32. Peningkatan jumlah perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. 33. Penurunan Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). 34. Peningkatan populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. 35. Peningkatan lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin. 36. Peningkatan jumlah tenaga kerja formal. 37. Peningkatan tenaga kerja informal sektor pertanian. 38. Peningkatan Upah rata-rata per jam pekerja. 39. Penurunan Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. 40. Peningkatan jumlah usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah untuk bersekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). 41. Peningkatan jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja. 42. Peningkatan jumlah tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.

Sumber: Dokumen KHLHS Kota Dumai.

4.2.2 Isu Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039, dijelaskan bahwa isu strategis penataan ruang Kota Dumai dikelompokkan kedalam 2 aspek yaitu aspek lingkungan dan aspek sosial ekonomi. Adapun penjabaran kedua aspek tersebut adaah sebagai berikut:

1. Aspek Lingkungan

Isu-isu pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan aspek lingkungan dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Degradasi dan alih fungsi hutan

- 1) Degradasi dan alih fungsi hutan akibat rendahnya kepedulian komunitas dunia usaha dan masyarakat.

- b. Konversi dan alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan
 - 1) Sering terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan ke perkebunan kelapa sawit dan tambang.
- c. Kualitas dan cadangan air baku
 - 1) Pada tahun 2020 diperkirakan Kota Dumai akan mengalami kekurangan ketersediaan air bersih. Pada saat ini sumber air bersih Kota Dumai berasal dari air tanah dangkal maupun air tanah dalam yang kondisinya kurang baik (payau). Satu-satunya sumber air bersih di utara Kota Dumai juga dipakai oleh PT. Pertamina.
- d. Potensi banjir di dataran rendah
 - 1) Ancaman limpasan air pasang laut terhadap wilayah permukiman penduduk.
- e. Kualitas udara
 - 1) Rencana Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih belum menghasilkan arahan penetapan kawasan yang jelas, dikarenakan banyaknya lahan terbangun di kawasan RTH yang belum ditindak sesuai peraturan terkait, sehingga rencana pola ruang harus mencakup batasan yang jelas untuk peruntukan kawasan RTH yang sesuai dengan fungsinya. Dengan tidak sesuainya proporsi RTH akan mempengaruhi kualitas udara.

2. Aspek Sosial Ekonomi

Isu-isu pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Aspek sosial
 - 1) Tingginya arus migrasi dari berbagai wilayah hinterland dan provinsi tetangga sebagai konsekuensi wilayah bandar dan pusat kegiatan industri dan perdagangan.
 - 2) Belum optimal pengelolaan keragaman etnis sehingga menimbulkan kerentanan terhadap letupan konflik horisontal antar etnis dengan keragaman berjumlah 16 suku.
 - 3) **Beban psikologi sebagian besar masyarakat Dumai akibat ancaman ledakan pipa sepanjang 60 km membelah wilayah kota dan kemungkinan terjadi ledakan pada unit refinery pengolahan BBM dengan radius 25 km Pemerataan pembangunan**

- 4) Kota Dumai ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berkaitan langsung dengan Malaysia, Thailand dan Singapura. Oleh karena itu, Kota Dumai menjadi tempat penyeberangan atau pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Sebagai kota yang berhubungan langsung dengan luar negeri, maka kapal-kapal luar negeri pada saatnya nanti akan hilir-mudik di perairan Kota Dumai.
- 5) Kota Dumai ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat koleksi distribusi produksi antardaerah. Barang-barang produksi pertanian industri hulu harus dikirim dalam bentuk bahan mentah dan/atau terolah, sedangkan Kota Dumai masih belum mempunyai terminal khusus untuk menampungnya.
- 6) Beberapa tahun kedepan diperkirakan kawasan tengah Kota Dumai akan menjadi kawasan padat sehingga dirasakan perlu mencari kawasan khusus untuk pengembangan industri karena salah satu potensi pengembangan ekonomi yang dimiliki Kota Dumai adalah di bidang industri. Selain penyediaan lahan juga perlu disediakan prasarana dan sarana pendukung lainnya untuk mempermudah proses produksi sampai distribusi hasil industri nantinya.
- 7) Kota Dumai direncanakan sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Indonesia yang akan berhubungan langsung dengan dunia perdagangan internasional, sedangkan prasarana dan sarana pendukungnya masih belum memadai baik kualitas maupun kuantitas.
- 8) Jaringan transportasi darat Kota Dumai sudah tidak memadai. Jaringan jalan yang menghubungkan Kota Dumai dengan kota-kota lainnya di tingkat regional masih tergolong rendah dan perlu ditingkatkan lagi baik kualitas maupun fungsi jalannya, daya tampung dan daya dukungnya, yang nantinya akan sangat berguna dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerahnya sendiri serta pertumbuhan ekonomi daerah sekitarnya.
- 9) Pemanfaatan limbah dari adanya pembangunan Jalan Tol yang menghubungkan Pekanbaru – Duri – Dumai untuk mempercepat pergerakan penumpang dan barang dari dan ke Dumai melalui sistem transportasi darat bebas hambatan.

- 10) Selain itu, volume kendaraan sudah mencapai batas jenuh daya tampung (kapasitas) jalan. Dalam sistem transportasi nasional, saat ini pemerintah Kota Dumai berencana menghidupkan kembali jalur kereta api Pekan Baru – Duri – Dumai – Rantau Prapat untuk angkutan barang/ kargo.
 - 11) Terjadinya penumpukan barang di pelabuhan Kota Dumai karena kapal yang tersedia hanya kapal biasa yang tidak dapat mengangkut dalam jumlah besar. Oleh karena itu dibutuhkan kapal berukuran besar (RORO) yang mampu membawa kontainer sekaligus juga menyesuaikan kapasitas dermaganya.
 - 12) Bandara Pinang Kampai sebagai pusat penyebaran tersier yang merupakan satu-satunya bandara di Kota Dumai adalah milik PT. Pertamina yang **tidak dapat dipakai** umum sehingga dapat menghambat kelancaran dalam berhubungan dengan dunia internasional. Bandara internasional yang terdekat adalah Hang Nadim di Batam dan Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru.
 - 13) Pengembangan pembangunan Pelabuhan berskala internasional penunjang kegiatan transportasi laut.
 - 14) Pembangunan Roro Dumai-Melaka untuk menunjang aktifitas Perdagangan dan jasa antar negara.
 - 15) Peningkatan dan percepatan akses Dumai Rupert dalam rangka menunjang pengembangan sector pariwisata Rupert.
- b. Aspek ekonomi dengan peningkatan taraf hidup masyarakat
- 1) Pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu Lubuk Gaung dan Pelintung serta pengembangan kawasan industri lainnya.
 - 2) Peningkatan dan percepatan keterlibatan IKM dalam Kawasan industri yang sudah berjalan saat ini.
 - 3) Masih rendahnya kualitas tenaga kerja di Kota Dumai sedangkan untuk saat mendatang dibutuhkan tenaga kerja yang berkualitas tinggi untuk mampu mendukung perkembangan Kota Dumai yang sangat pesat yang salah satunya akan direncanakan sebagai pusat jasa dan perdagangan, sehingga mampu bersaing dengan daerah lainnya.
 - 4) Peningkatan produktivitas tanaman baik pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam

rangka peningkatan ketersediaan pangan masyarakat kota terutama adanya peluang terhadap pangsa bagi pekerja sector industri yang terus mengalami peningkatan.

4.2.3 Isu Pembangunan Daerah Dengan Kabupaten Tetangga

Salah satu data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah informasi yang berkenaan dengan RPJMD daerah yang berbatasan langsung. Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan antara Pemerintah Kota Dumai yang diwakili oleh Bappeda Kota Dumai dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang diwakili oleh Bappeda Kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang diwakili oleh Bappeda Kabupaten Rokan Hilir yang pada saat bersamaan juga sedang menyusun rancangan teknokratik RPJMD, didapat kesimpulan bahwa isu pembangunan daerah dengan kabupaten yang berbatasan langsung adalah sebagai berikut:

a. Isu pembangunan daerah dengan Kabupaten Bengkalis

1) Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah

1. Perbedaan Konfigurasi Pola ruang Kota Dumai dengan daerah perbatasan Kabupaten Bengkalis
2. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan Dumai-Sepahat
3. Penguatan kerjasama SPAM Regional DUROLIS
4. Konektivitas Antar Pulau (Ro-Ro)
5. Penetapan batas wilayah
6. Kebakaran hutan dan lahan
7. Pencemaran lingkungan
8. Pengembangan pemukiman
9. Kapasitas eksisting jalan tidak sesuai dengan tonase kendaraan yang akan melewati Ro-Ro
10. Peningkatan sarana dan prasarana Ro-Ro
11. Manajemen antrian barang dan orang yang akan masuk ke kapal di Ro-Ro

2) Bidang Sosial dan Budaya

1. Kerjasama Even Olahraga Dan Pariwisata
2. Hutang Klaim BPJS Bengkalis Ke RSUD Kota Dumai
3. Ketersediaan Kamar / Ruang Perawatan Di RSUD Kota Dumai Untuk Pasien Rujukan

4. Hutang Jampersal (Jaminan Persalinan) Di RSUD Kota Dumai
 5. Zonasi Sekolah Di Daerah Perbatasan
 6. Kerjasama Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Narkoba
- 3) Bidang Ekonomi
1. Pengembangan PPI Kota Dumai menjadi sarana prasarana pelabuhan perikanan menjadi pusat pengembangan perikanan tangkap di wilayah pesisir Provinsi Riau
 2. Peningkatan kapasitas dan jadwal ro-ro Dumai-Rupat terkait distribusi bahan pokok, sawit serta mendukung pariwisata
 3. Promosi dan pengembangan daerah wisata di Rupat
 4. Rupat sebagai sentra pertanian (sawah) dan peternakan
 5. Pembudidayaan udang vaname dan pengembangan perikanan di Rupat
 6. Kerja sama regional kedua daerah
- b. Isu pembangunan daerah dengan Kabupaten Rokan Hilir
- 1) Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah
 1. Perbedaan Konfigurasi Pola ruang Dumai dengan Rohil di daerah perbatasan
 2. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan Dumai-Rohil (lb. Gaung-Sinaboi)
 3. Penguatan kerjasama SPAM Regional DUROLIS
 4. Kebakaran hutan dan lahan
 - 2) Bidang Sosial dan Budaya
 1. Penguatan Kerjasama Sekolah Kejuruan (Perikanan)
 2. Penyelesaian Tapal Batas Administrasi Kabupaten Rokan Hilir Dan Kota Dumai
 - 3) Bidang Ekonomi
 1. Peningkatan industri hilir perikanan laut
 2. Banyaknya alih fungsi lahan tanaman pangan ke perkebunan kelapa sawit. Perlunya peraturan yang lebih jelas terkait sanksi ini.
 3. Rohil sebagai penyangga ketahanan pangan Kota Dumai
 4. Perdagangan lintas batas negara

4.2.4 Isu Strategis Kebijakan Nasional yang terkait dengan Kota Dumai

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kota Dumai ditetapkan telah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang diarahkan sebagai salah satu pusat pertumbuhan nasional dimana diarahkan sebagai pusat perdagangan, jasa dan industri dan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yakni kota utama kawasan perbatasan. Adapun lokasi prioritas perbatasan negara yang berada di Kota Dumai adalah Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Sungai sembilan.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 56 Tahun 2018, Kawasan Industri Kota Dumai ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional. Selain Kawasan Industri Dumai, Jalan tol Pekanbaru-Dumai dan Jalan Tol-Sp. Sigambal-Rantau Prapat juga ditetapkan sebagai Proyek Strategis nasional

Sedangkan Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 pada lampiran II dijelaskan bahwa pada proyek Prioritas Strategis (*major Project*) RPJMN 2020-2024, dimana Kota Dumai menjadi bagian dari:

1. Jalan tol trans Sumatera Aceh-Lampung, Kota Dumai termasuk bagian dari jalan tol Pekanbaru-Medan (Rantau Parapat-Sp.Sigambal-Dumai dan Dumai-Kandins-Pekanbaru) dimana manfaat pembangunan jalan tol trans sumatera adalah:
 - 1) untuk menurunkan waktu tempuh lampung-aceh dari 48 jam menjadi 30 jam.
 - 2) menjadi *enabler* bagi pengembangan kawasan industri Dumai dan pariwisata di Sumatera.
 - 3) dan menghubungkan koridor timur dan barat Sumatera.
2. Pada Pembangunan dan pengembangan kilang minyak (Kilang RDMP), dimana manfaat proyek ini adalah untuk:
 - 1) Menambah kapasitas produksi minyak menjadi 1,9juta barrel per hari ditahun 2026.
 - 2) Memperbaiki neraca perdagangan disektor migas

Selain infrastruktur minyak bumi, pada matrik Pembangunan nasional sebagaimana yang tertuang Pada lampiran III RPJMN tahun 2020-2024 dijelaskan bahwa Kota Dumai menjadi bagian dari

pengurangan risiko krisis kesehatan nasional dimana indikatornya adalah peningkatan kapasitas daerah dalam upaya pengurangan risiko kesehatan.

Sedangkan pada arah pembangunan wilayah nasional sebagaimana yang tertuang dalam lampiran IV RPJMN tahun 2020-2024, Kota Dumai ditetapkan sebagai bagian dari koridor pertumbuhan untuk wilayah Sumatera. Selain hal tersebut, pada matrik pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, Kota Dumai juga termasuk daerah untuk proyek prioritas pengembangan kota besar, kota sedang dan kota kecil di provinsi riau. Adapun proyek prioritas dimaksud adalah:

1. Jalan tol trans sumatera.
2. SPALD-S skala kota (Pembangunan dan Rehabilitasi IPLT).
3. Sistem Pengelolaan Persampahan skala kota (TPA)

4.2.5 Isu Strategis Kebijakan Provinsi yang terkait dengan Kota Dumai (RPJM Provinsi Riau 2019-2024)

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019–2024 dijelaskan bahwa terdapat beberapa kebijakan pembangunan Provinsi Riau di Kota Dumai, antara lain:

1. Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Kereta Api Dumai-Bukit Kayu Kapur 24 km pada tahun 2017 melalui SK Gubernur Riau nomor Kpts.584/VII/2017 Tanggal 25 Juli 2017.
2. Dumai sebagai pelabuhan utama di tatanan kepelabuhanan Provinsi Riau
3. Kota Dumai juga ditetapkan sebagai salah satu daerah Pengembangan Kawasan Pengembangan Perikanan Terpadu berbasis masyarakat.
4. Pantai Puak – Dumai termasuk Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN).
5. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Budidaya tambak dan laut di Kota Dumai sesuai dengan RZWP3K
6. Pemulihan kawasan Restorasi Mangrove dan pengamanan pantai
7. Adaptasi kebijakan baru, Kota Dumai perlu memperkuat data profil penduduk yang terdampak covid-19
8. Pendataan labour skill/ tenaga kerja yang menunjang pengembangan sektor industri
9. Konsep pengembangan industri Kota Dumai termasuk membangun kawasan industri Selinsing

10. Peningkatan Kualitas jaringan jalan Provinsi Di Dumai
11. Penguatan kerjasama SPAM Regional DUROLIS
12. Konektivitas Antar Pulau (Ro-Ro)
13. Penetapan batas wilayah (dengan Bengkalis)
14. Kebakaran hutan dan lahan
15. Pencemaran lingkungan
16. Pengembangan pemukiman
17. Pengembangan kepariwisataan fokus pada destinasi pariwisata yang eksis/sudah ada embrionya
18. Penyelesaian tapal batas wilayah administrasi kabupaten/kota
19. Penyediaan data dan prognosis lulusan smp untuk sinkronisasi data angka putus sekolah yang tidak bisa melanjutkan ke SMA/SMK
20. Peningkatan kualitas data profil kependudukan untukantisipasi kejadian luar biasa seperti covid-19, pemerintah daerah tidak mengalami kesulitan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat
21. Pengembangan umum sebagai etalase promosi di rest area jalan tol Dumai-Pekanbaru
22. Analisa dampak fungsional tol Pekanbaru – Dumai dan ksn (kawasan strategis nasional) rupaat terhadap akomodasi/perhotelan untuk menunjang pariwisata di Kota Dumai
23. Peningkatan belanja Urusan Pemerintahan Bidang pemerintah daerah yang berhubungan dengan standar pelayanan minimal (SPM)

4.2.6 Isu-Isu Strategis Kota Dumai

Berdasarkan telaahan permasalahan setiap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang daerah maupun telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai dan dokumen rencana pembangunan nasional serta provinsi, serta hasil diskusi dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir sebagai kabupaten tetangga maka dapat disimpulkan isu-isu strategis pembangunan Kota Dumai tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan usaha mikro, kecil menengah (UMKM/IKM) dan peningkatan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta kemudahan investasi.
2. Optimalisasi pembangunan dan pengembangan sektor pertanian daerah untuk ketahanan pangan daerah
3. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata.
4. Peningkatan kehidupan sosial, keagamaan dan penerapan budaya melayu

5. Peningkatan Kualitas, kuantitas dan pemerataan insfrastruktur kota dalam rangka pemenuhan akses kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan penunjang lain di berbagai bidang.
6. Peningkatan kualitas pengelolaan ruang, lingkungan hidup daerah dan upaya penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan termasuk kebakaran perkotaan. banjir dan rob. serta potensi penurunan muka tanah
7. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.



BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi Pembangunan Kota Dumai

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (*stakeholders*) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah.

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Visi pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai dimasa depan (*desired future*) dalam 5 (lima) tahun ke depan. Visi yang dituangkan dalam RPJMD, dirumuskan, dibahas dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah secara partisipatif. Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan menterjemahkan sasaran pokok dan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025.

Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 juga mempedomani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024

Adapun Visi RPJMN Provinsi Riau adalah “*Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*”. Sedangkan Visi RPJMD Provinsi Riau adalah “*Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat, dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)*”.

Mengacu pada kedua Visi tersebut di atas dan memperhatikan kondisi *existing* maka rumusan Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

“*Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)*”

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri unggul merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang terletak di pesisir timur pulau Sumatera dan merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri yang bertumpu pada sektor pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri.
2. Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai dimana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan dapat meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.
3. Tahun 2026: Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

5.2 Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026

Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik

Penjabaran masing-masing misi untuk mewujudkan visi pembangunan daerah selama periode pemerintahan tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Misi 1: Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri

Misi ini akan ditempuh dengan mendorong terciptanya Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri yang produktif melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peluang usaha yang lebih besar dengan prinsip cooperative (persaingan menggapai tujuan dengan kebersamaan), perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga professional. Adapun

Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah diarahkan untuk meningkatkan peranannya dalam berbagai kegiatan ekonomi rakyat dan sebagai *supporting agent* bagi kegiatan industri dan kepelabuhanan yang ada di Kota Dumai sehingga dapat menjadi roda penggerak ekonomi yang efisien dan berdaya saing tinggi. Pengembangan usaha skala kecil dan menengah yang berbasis lokal diharapkan menjadi tulang punggung daerah, baik dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja maupun peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat.

Selanjutnya optimalisasi peran Sektor-sektor informal yang kreatif dan inovatif dalam skala UMKM juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kesenjangan pendapatan masyarakat sehingga diharapkan mampu menjadi alternatif membuka kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga mampu menciptakan kemandirian secara swadaya didalam masyarakat. Kemudian, secara eksternal penguatan simpul dan peningkatan produktivitas dan daya saing akan dipacu dengan menjalin hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak lain (baik pemerintah maupun swasta) dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi lokal dan regional. Disisi lain, untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif akan dilaksanakan melalui peningkatan daya saing kota dari sisi penyediaan infrastruktur perekonomian serta proses perizinan usaha.

Untuk menunjang dan mempercepat penanggulangan kemiskinan yang komprehensif akan ditunjang melalui penguatan data dan peningkatan program perlindungan sosial, peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta menciptakan pembangunan yang inklusif yang disinergiskan dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Dumai.

Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu

Misi ini mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan. Hal ini disadari karena manusia sebagai Objek dan Subjek dalam pembangunan yang diarahkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif dalam mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam memacu pelaksanaan pembangunan nasional dan berdaya saing global.

Misi ini ditempuh melalui upaya perwujudan sumberdaya manusia yang memiliki kualitas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat,

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan profesional sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan global. Hal ini mencakup pematapan aspek pendidikan umum, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan keagamaan.

Misi kedua ini juga mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sektor prioritas yang akan dilakukan Pemerintah Kota Dumai untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus maupun agama, serta penguasaan teknologi yang dihasilkan melalui pendidikan formal maupun informal serta melalui pelatihan-pelatihan keahlian ketenagakerjaan sesuai kebutuhan dan kompetensi guna mengisi peluang kerja. Disisi lain pemerintah juga mempersiapkan peningkatan kualitas Sumber daya manusia Kota Dumai melalui pengiriman putra-putri terbaik untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang umum/kejuruan maupun agama ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mempersiapkan diri pulang ke kampung untuk membangun Kota Dumai .

Budaya Melayu juga menjadi ruh bagi perilaku masyarakat dan pemerintahan dalam karsa dan karya pembangunan di Kota Dumai. Sebagai sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada. Kota Dumai merupakan salah satu gerbang masuk dan keluarnya wisatawan yang berdampak masuknya budaya asing di tanah Melayu ini, sehingga hal ini dapat diantisipasi dengan mengembangkan tatanan budaya Melayu melalui lembaga seni dan sanggar-sanggar sehingga budaya Melayu tetap eksis, dan tetap menghargai serta menjunjung keragaman budaya suku-suku daerah lainnya.

Misi 3: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas

Misi ini mengandung makna bahwa kondisi infrastruktur yang baik merupakan faktor pendukung yang sangat penting bagi Kota Dumai dalam rangka menciptakan kenyamanan, ketertiban dan keamanan bagi masyarakat kota Dumai sehingga menjadi sebuah lingkungan yang nyaman bagi masyarakat (*Liveable*). Kondisi infrastruktur yang baik juga akan menjamin kelancaran mobilitas orang maupun barang khususnya dan meningkatkan daya saing kota secara ekonomi sehingga akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kota Dumai dan dapat mendorong perekonomian daerah khususnya bagi masyarakat guna mendukung perkembangan dan kesuksesan pembangunan sektor pelabuhan dan industry (*Investability dan Visitability*).

Adapun Infrastruktur yang perlu ditingkatkan meliputi: penyediaan air bersih; penambahan dan peningkatan kualitas jalan/jembatan; Drainase serta fasilitas umum perkotaan lainnya. Kondisi lainnya yang harus menjadi perhatian khusus adalah upaya meminimalisir kejadian bencana banjir dan kebakaran lahan/hutan. Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan secara khusus mengembangkan identitas diri Kota Dumai dengan dukungan kawasan pelabuhan dan infrastruktur yang memadai guna menjamin kelancaran perdagangan lokal, regional, nasional, dan internasional.

Kondisi Infrastruktur lain yang perlu ditingkatkan adalah pengelolaan sumberdaya air, lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang yang harus dilakukan secara terpadu, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk menciptakan sinergi dan menjamin keberlanjutan daya dukung untuk pendukung kualitas kehidupan. Disamping hal tersebut, peningkatan kesadaran akan kualitas lingkungan hidup dan keterpaduan pengelolaan kawasan rawan bencana di kota Dumai juga menjadi faktor penting untuk mewujudkan keberlanjutan dan keseimbangan antara lingkungan hidup dan pemangunan daerah

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik

Misi ini ditempuh dengan mengedepankan aspek kualitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelayanan publik yang sekarang ada akan diperbaiki secara sistematis dengan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah (peningkatan profesionalitas) serta mengembangkan sistem pelayanan publik yang efektif, transparan, terbuka, akuntabel, partisipatif, fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan visi dan misi diatas, maka *taglines* pembangunan Kota Dumai tahun 2021-2026 adalah Kota IDAMAN yang merupakan akronim dari kota tujuan **I**nvestasi yang ber**D**aya saing dengan pemerintahan **A**manah yang didukung oleh masyarakat **M**andiri dan ber**A**dab serta lingkungan yang **N**yaman.

5.3 Keselarasan Visi dan Misi RPJPD dengan Visi dan Misi RPJMD Kota Dumai

Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 tidak terlepas dari visi dan misi Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 Kota Dumai. Visi jangka menengah adalah bentuk dari sebuah visi antara menuju visi jangka panjang. Misi yang dibawa/diemban dalam jangka menengah adalah misi antara yang mendukung misi jangka panjang. Visi jangka panjang Kota Dumai 2005-2025 adalah **“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Kokoh, Dengan Masyarakat Yang Bertumpu Pada Budaya Melayu, Menuju Dumai Madani Yang Hijau”** di wujudkan melalui Visi Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Visi Menjadikan **Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman).**

Tabel 5.1 berikut menyajikan keselarasan dan konsistensi serta hubungan antara misi pada RPJPD Kota Dumai dengan misi RPJMD. Untuk memastikan terwujudnya visi tersebut maka perlunya keselarasan dan konsistensi antara misi RPJPD tahun 2005-2025 dengan misi RPJMD 2021-2026 sebagai bagian dari perencanaan yang berkualitas dan berkelanjutan. Keselarasan dan konsistensi hubungan antara misi RPJPD Kota Dumai dengan misi RPJMD Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1: Keselarasan Misi RPJPD 2005-2025 dengan Misi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026

Misi RPJPD Tahun 2005-2025		Misi RPJMD Tahun 2021-2026	
Misi 1:	Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri	Misi 1:	Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri
Misi 2:	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, agamis dan berjati diri Melayu	Misi 2:	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu
Misi 3:	Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang	Misi 3:	Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
Misi 5:	Mewujudkan Dumai sebagai lingkungan yang hijau.		
Misi 4:	Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik.	Misi 4:	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik

5.4 Keselarasan Misi RPJMD Kota Dumai dengan Misi RPJMD Provinsi Riau

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan dan bersinergi, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan antara misi RPJMD Kota Dumai Tahun 201-2026 dengan misi RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2: Keselarasan Misi RPJMD Kota Dumai 2021-2026 dengan Misi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024

Misi RPJMD Kota Dumai 2021-2026	Misi RPJMD Provinsi Riau 2019-2024
Misi 1: Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri	Misi 3: Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.
Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu	Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya
	Misi 4: Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing
Misi 3: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas	Misi 2: Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
Misi 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik	Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi

5.5 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021 – 2026, maka tujuan pembangunan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera dengan indikator keberhasilan adalah laju pertumbuhan ekonomi. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:
 - a) Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah dengan indikator keberhasilan yaitu nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB perkapita
 - b) Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu tingkat kemiskinan, Indeks Gini dan Tingkat Pengangguran Terbuka
 - c) Terjaminnya ketersediaan pangan daerah dengan indikator keberhasilan yaitu ketersediaan pangan utama
2. Membangun masyarakat Dumai yang Produktif, berdaya saing dan sejahtera dengan indikator keberhasilan adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:
 - a) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Kesehatan
 - b) Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Pendidikan
 - c) Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Pengeluaran
 - d) Meningkatnya penerapan budaya melayu dengan indikator keberhasilan Jenis Budaya melayu yang diterapkan
3. Mewujudkan infrastruktur dan ruang Kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan dengan indikator keberhasilan adalah Indeks Infrastruktur Kota Dumai dan Cakupan wilayah penanganan bencana. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:
 - a) Meningkatnya infrastruktur Kota dengan indikator keberhasilan yaitu tingkat pelayanan infrastruktur daerah ;

- b) Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten dengan indikator keberhasilan yaitu Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan
 - c) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks kualitas lingkungan Hidup, penurunan emisi gas rumah kaca, Cakupan pelayanan persampahan dan Cakupan Jenis Bencana Daerah yang diselesaikan
4. Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan indikator keberhasilan adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:
- a) Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Daerah dengan indikator keberhasilan yaitu Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah setiap tahun dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
 - b) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Indeks layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tabel 5.3
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020						Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu											
Misi 1	Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri										
	Tujuan	Mewujudkan Perekonomian Yang Mandiri Dan Masyarakat Yang Sejahtera	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,05	3,54	4,36	4,7	4,8	5,04	5,04
	Sasaran	Meningkatnya Perekonomian Dan Daya Saing Daerah	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK	Rp. Triliun	24,6	26,29	27,44	28,73	30,11	31,63	31,63
			Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB	Rp. Triliun	36,32	38,9	41,52	43,52	46,61	48,93	48,93
			PDRB Perkapita ADHK	Rp. Juta	77,64	80,98	83,48	86,34	89,37	92,73	92,73
			PDRB Perkapita ADHB	Rp. Juta	114,66	119,809	126,301	130,794	138,351	143,466	143,466
	Sasaran	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Gini	Poin	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,19	7,79	7,54	7,29	7,04	6,79	6,79
			Tingkat Kemiskinan	%	3,16	3,51	3,49	3,47	3,45	3,43	3,43

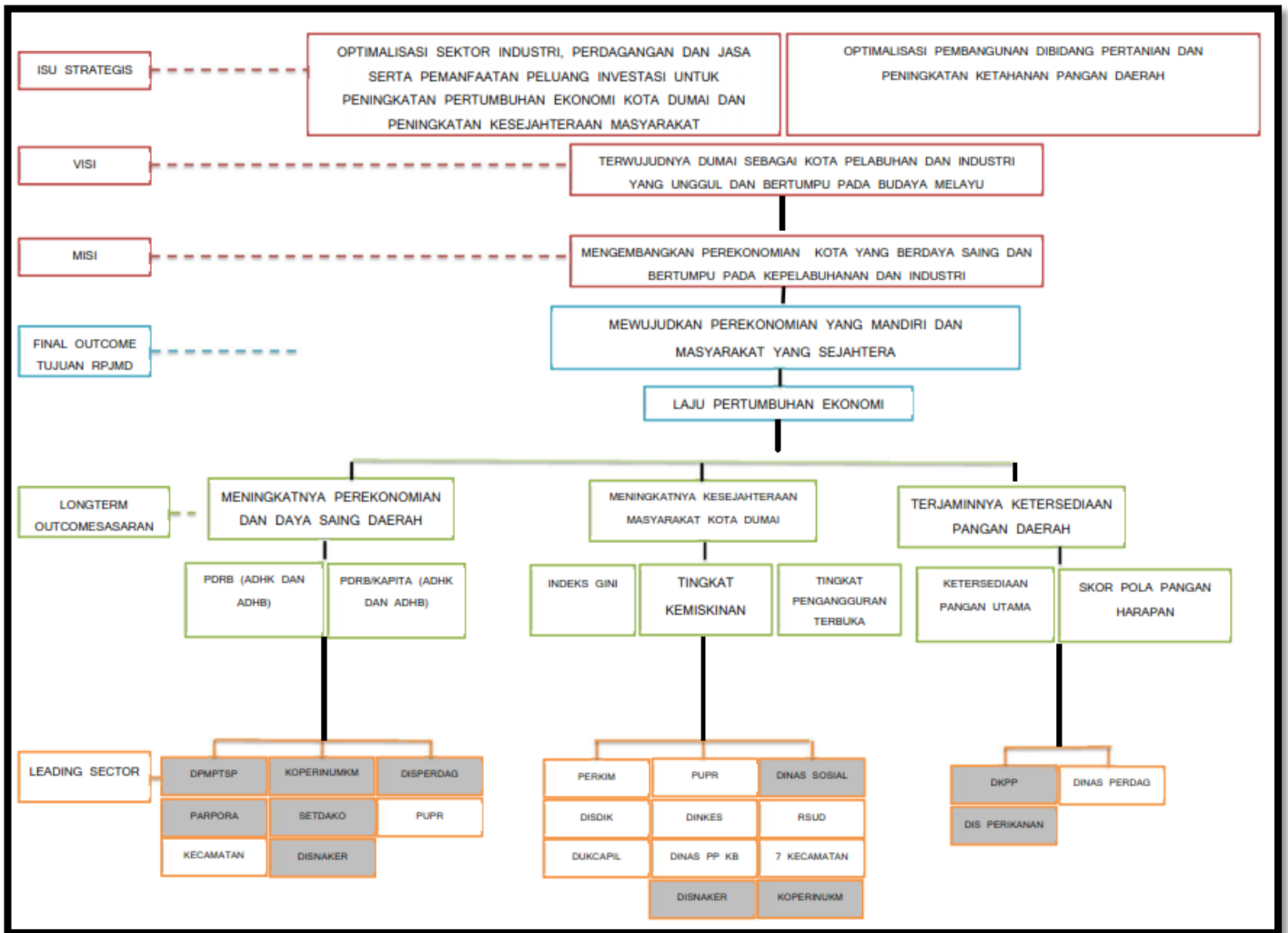
Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020						Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
	Sasaran	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	82,91	83,75	84,58	85,41	86,24	87,07	87,07
			Ketersediaan Pangan Utama	%	32,78	36,03	37,7	39,37	41,03	42,7	42,7
Misi 2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu										
	Tujuan	Membangun Masyarakat Dumai Yang Produktif, Berdaya Saing Dan Sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,4	74,826	75,04	75,254	75,468	75,683	75,683
	Sasaran	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Kesehatan	Indeks	0,784	0,785	0,786	0,786	0,787	0,788	0,788
	Sasaran	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Pendidikan	Indeks	0,7	0,706	0,709	0,712	0,715	0,718	0,718
	Sasaran	Meningkatnya Standard Hidup Layak Masyarakat Kota Dumai	Indeks Pengeluaran	Indeks	0,751	0,756	0,759	0,762	0,764	0,767	0,767
	Sasaran	Meningkatnya penerapan budaya melayu	Persentase penerapan 4 Jenis Budaya melayu	Persentase	25	50	50	75	75	100	100
Misi 3	Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas										
	Tujuan	Mewujudkan Infrastruktural Dan Ruang Kota Dumai Yang Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	39,27	52,46	59,26	64,41	69,3	74,21	74,21
	Sasaran	Meningkatnya Infrastruktur Kota	Tingkat Pelayanan Infrastruktur daerah	%	32,71	60,77	66,33	71,18	75,51	80,01	80,01
	Sasaran	Terwujudnya Penataan Ruang Daerah Yang Konsisten	Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai	%	10	20	30	45	60	75	75

Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020						Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
			Dengan Aturan								
	Sasaran	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan penanganan bencana	Indeks kualitas lingkungan Hidup	Indeks	61	69,97	70,19	70,41	70,41	70,41	70,41
			Cakupan pelayanan persampahan	%	51	57	63	69	75	81	81
			Penurunan Emisi gas rumah kaca	GgCO2-e	N/A	7.195,43	7.194,06	6.826,22	6.758,14	6.573,53	6.573,53
			Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang ditangani	%	60	75	80	85	90	95	95
Misi 4	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik										
	Tujuan	Meningkatkan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	C	CC	B	B	B	B	B
	Sasaran	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Setiap Tahun,	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	B	B	B	B	B	B	B

Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020						Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
			Daerah								
			Indeks Manajemen Resiko	Indeks	2	2	3	3	3	3	3
	Sasaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81	81	81	82	82	82	82
			Indeks Layanan SPBE	Indeks	2,25	2,83	2,85	2,9	2,96	3	3

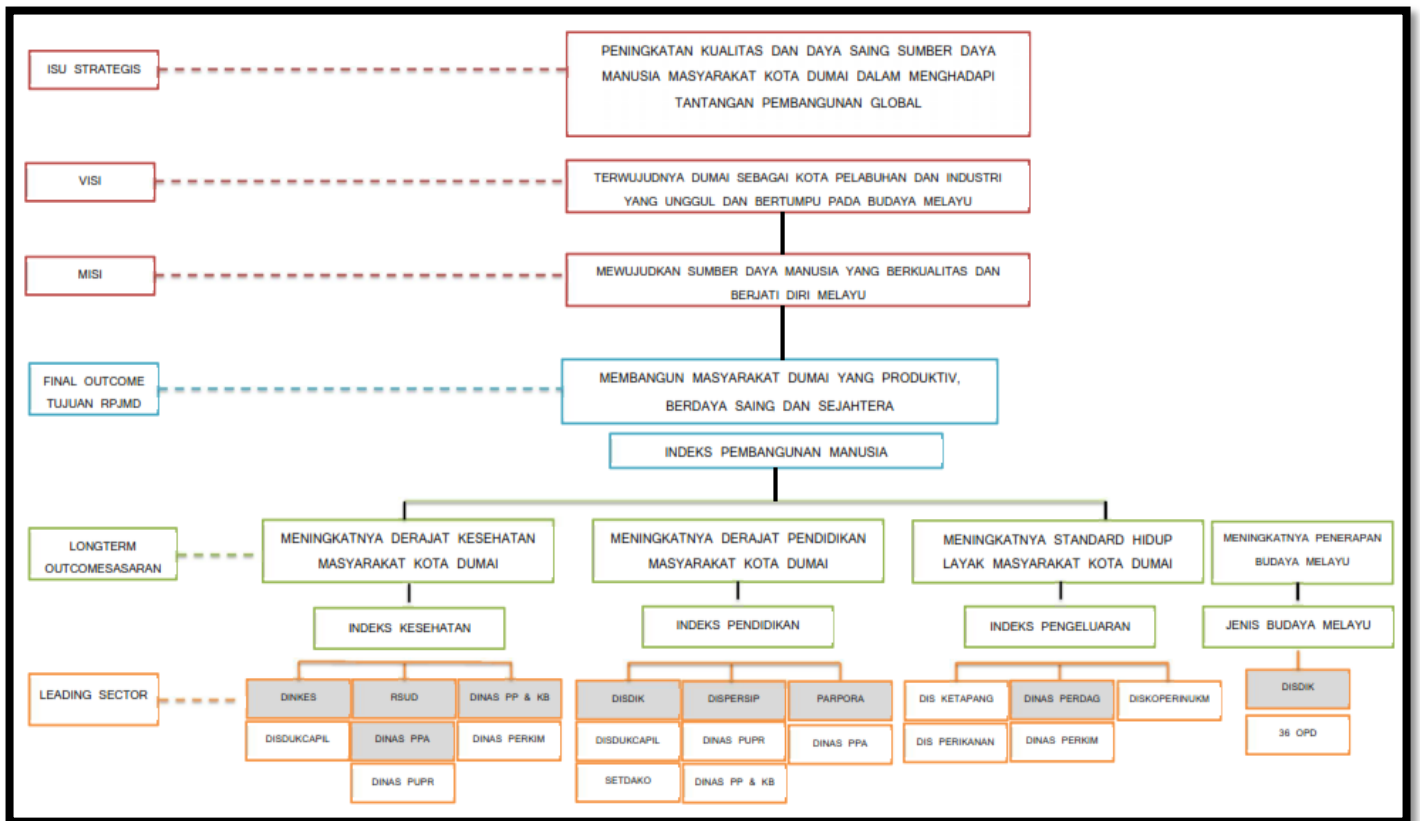
Selanjutnya untuk mencapai target misi “Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri” diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam kerangka pendekatan perencanaan *tematik, holistik, integrated, spasial* yang dapat dilihat dalam gambar pemetaan kinerja berikut.

Gambar 5.1 Pemetaan Kinerja Misi 1



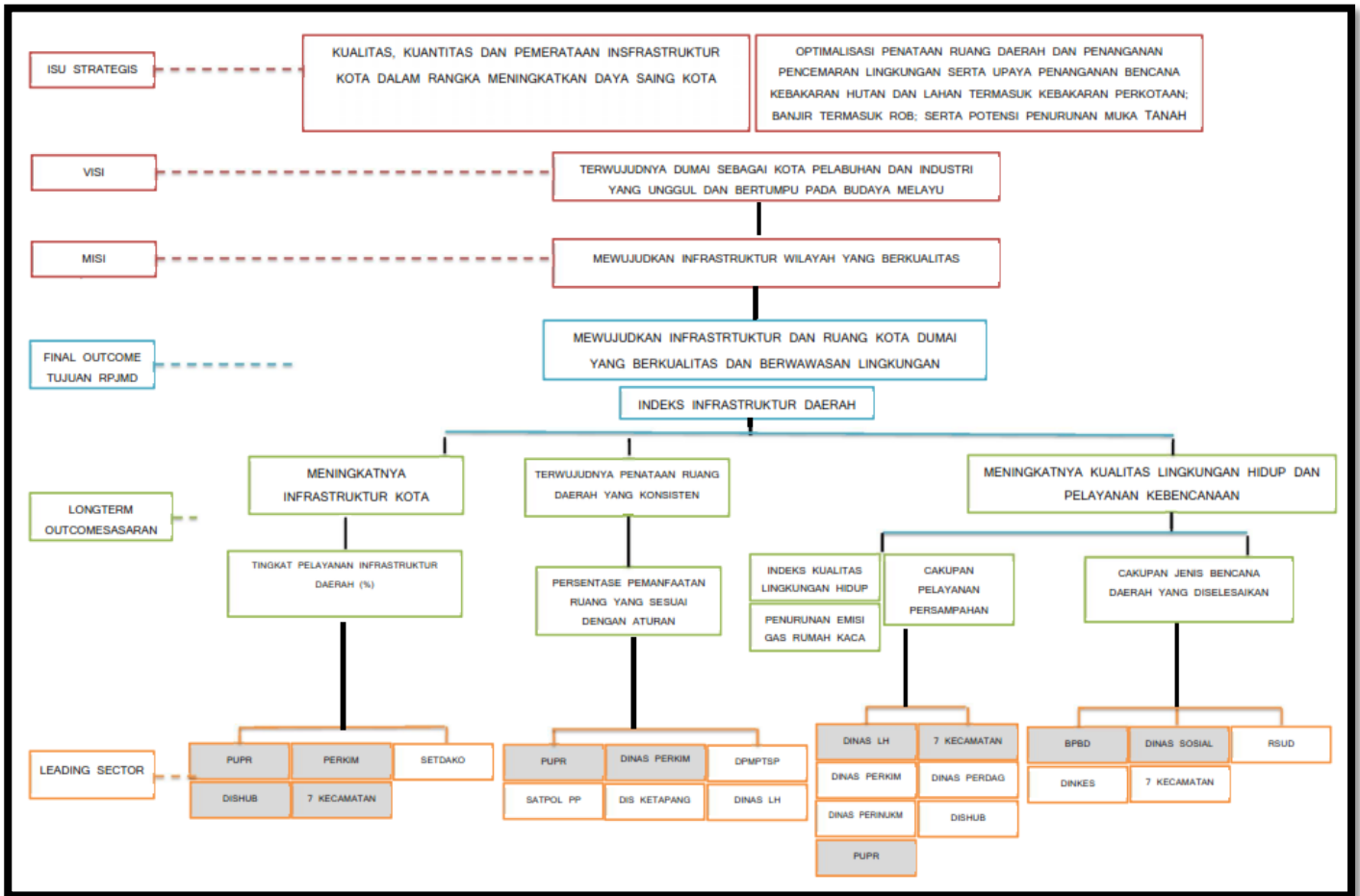
Untuk mencapai target misi “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu” diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam kerangka pendekatan perencanaan *tematik, holistik, integrated, spasial* yang dapat dilihat dalam gambar pemetaan kinerja berikut.

Gambar 5.2 Pemetaan Kinerja Misi 2



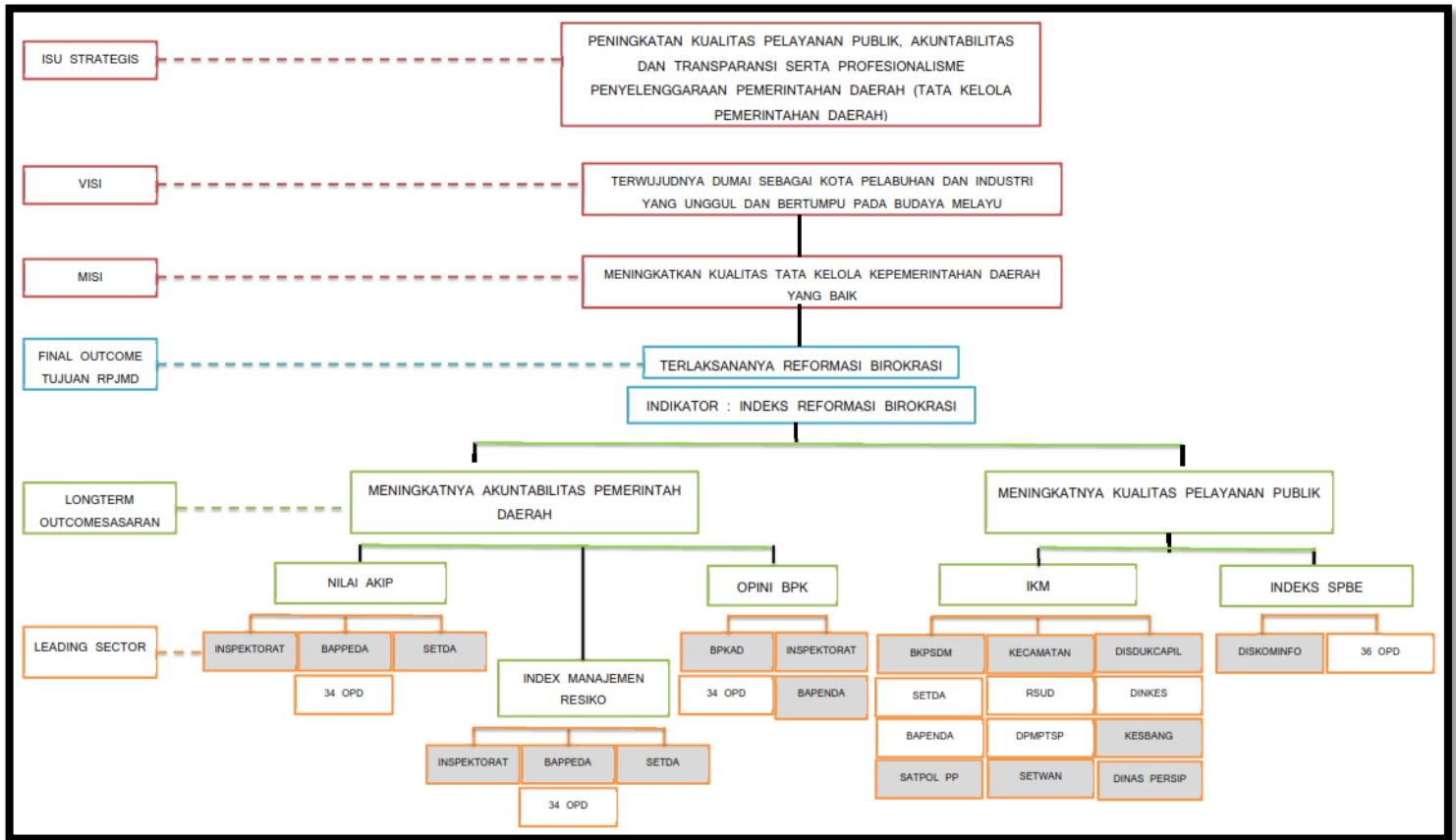
Untuk mencapai target misi “Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas” diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam kerangka pendekatan perencanaan *tematik, holistik, integrated, spasial* yang dapat dilihat dalam gambar pemetaan kinerja berikut.

Gambar 5.3 Pemetaan Kinerja Misi 3



Untuk mencapai target misi “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik” diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam kerangka pendekatan perencanaan *tematik, holistik, integrated, spasial* yang dapat dilihat dalam gambar pemetaan kinerja berikut

Gambar 5.4 Pemetaan Kinerja Misi 4





BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1 Strategi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka strategi pembangunan daerah Kota Dumai tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Misi: Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri dengan strategi:

- 1) Peningkatan Perekonomian kota melalui optimalisasi peran seluruh stake holder
- 2) Peningkatan Produktivitas masyarakat
- 3) Peningkatan Daya saing daerah dan Iklim berusaha
- 4) Peningkatan perlindungan sosial
- 5) Peningkatan Peluang Kerja Bagi Masyarakat
- 6) Peningkatan Koordinasi dan sinergitas lintas sektor untuk ketersediaan pangan daerah.

2. Misi: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu dengan strategi:

- 1) Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang merata dan berkualitas.
- 2) Peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat yang merata dan berkualitas.
- 3) Peningkatan daya beli Masyarakat.
- 4) Peningkatan penerapan budaya melayu di kehidupan masyarakat dan pemerintahan

3. Misi: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas dengan strategi:

- 1) Peningkatan aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah
- 2) Peningkatan sistem pengendalian banjir Kota Dumai
- 3) Peningkatan kuantitas dan kualitas kawasan perumahan dan permukiman
- 4) Peningkatan kualitas sanitasi perumahan dan pemukiman
- 5) Peningkatan kerjasama daerah dalam pembangunan infrastruktur
- 6) Peningkatan kinerja sistem penyediaan air bersih kota Dumai
- 7) Mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan
- 8) Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari
- 9) Optimalisasi upaya penanganan saat kejadian bencana
- 10) Optimalisasi penanganan pasca kejadian bencana

4. Misi: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik dengan strategi:

- 1) Peningkatan Profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 2) Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis IT

Tabel 6.1
Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah
Kota Dumai 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1: Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri		
1. Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera	1.1 Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah	1.1.1 Peningkatan perekonomian kota melalui optimalisasi peran seluruh stake holder
		1.1.2 Peningkatan daya saing daerah dan iklim berusaha
		1.1.3 Peningkatan produktivitas masyarakat
	1.2 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	1.2.1 Peningkatan perlindungan sosial
		1.2.2 Peningkatan peluang kerja bagi masyarakat
	1.3 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	1.3.1 Peningkatan koordinasi dan sinergitas lintas sektor untuk ketersediaan pangan daerah
Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu		
1. Membangun masyarakat Dumai yang Produktif, berdaya saing dan sejahtera	1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai	1.1.1 Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang merata dan berkualitas
	1.2 Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	1.2.1 Peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat yang merata dan berkualitas
	1.3 Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai	1.3.1 Peningkatan daya Beli Masyarakat
	1.4 Meningkatkan penerapan budaya melayu	1.4.1 Peningkatan penerapan budaya melayu di kehidupan masyarakat dan pemerintahan
Misi 3: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas		
1. Mewujudkan infrastruktur dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	1.1 Meningkatnya infrastruktur Kota	1.1.1 Peningkatan aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah
		1.1.2 Peningkatan sistem pengendalian banjir Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	Strategi	
		1.1.3 Peningkatan kuantitas dan kualitas kawasan perumahan dan permukiman	
		1.1.4 Peningkatan kualitas sanitasi perumahan dan permukiman	
		1.1.5 Peningkatan kinerja sistem penyediaan air bersih kota Dumai	
		1.1.6 Peningkatan kerjasama daerah dalam pembangunan infrastruktur	
	1.2 Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten	1.2.1 Pemanfaatan tata ruang secara aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	
	1.3 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan penanganan bencana	1.3.1 Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari	
		1.3.2 Optimalisasi upaya penanganan saat kejadian bencana	
		1.3.3 Optimalisasi penanganan pasca kejadian bencana	
	Misi 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik		
	1. Meningkatkan Reformasi Birokrasi	1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	1.1.1 Peningkatan Profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah
1.1.2 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah			
1.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		1.2.1 Pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis IT	

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Adapun kebijakan umum dalam pembangunan Kota Dumai Lima Tahun kedepan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian daerah melalui penguatan usaha mikro,kecil menengah(UMKM/IKM) dan peningkatan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta kemudahan investasi.
2. Mengoptimalkan pembangunan sektor pertanian daerah untuk ketahanan pangan daerah
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata.
4. Meningkatkan kehidupan sosial, keagamaan dan penerapan budaya melayu
5. Meningkatkan Kualitas, kuantitas dan pemerataan insfrastruktur kota dalam rangka pemenuhan akses kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan penunjang lain di berbagai bidang.
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan ruang, lingkungan hidup daerah dan upaya penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan termasuk kebakaran perkotaan; banjir dan rob; serta potensi penurunan muka tanah
7. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Jika diurai kebijakan umum pembangunan kota Dumai selama lima tahun diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Umum Pembangunan Kota Dumai
Tahun 2021-2026

Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Tahap Penataan	Tahap Pengembangan	Tahap Penguatan	Tahap Pematapan	Tahap Pematangan
Menata berbagai sistem, sumber daya sarana dan dan prasarana pendukung untuk mengembangkan Kota Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)	Mengembangkan berbagai sistem, sarana dan prasarana , potensi, sumber daya serta instrumen pendukung yang kondusif untuk memperkuat Kota Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)	Memperkuat instrumen pendukung yang kondusif bagi untuk memantapkan Kota Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)	Melakukan pematapan terhadap sistem, sarana, potensi dan sumber daya pendukung untuk mewujudkan Kota Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)	Mematangkan sistem, sarana, potensi dan sumber daya pendukung untuk Kota Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)

Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Fokus Pembangunan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Janji 3 semester pertama ▪ Pencapaian target rpjmd tahun 2022 ▪ Penataan ekonomi dan reformasi sosial 	Fokus Pembangunan pada pencapaian Target RPJMD Tahun 2023	Fokus Pembangunan pada Pencapaian target RPJMD Tahun 2024	Fokus Pembangunan pada pencapaian target RPJMD Tahun 2025	Fokus Pembangunan pada pencapaian target RPJMD Tahun 2026

Sedangkan Berdasarkan arah kebijakan pembangunan jangka panjang telah diuraikan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan yang lain. Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang Kota Dumai maka skala prioritas masing-masing tahapan pembangunan jangka menengah akan memiliki tekanan yang berbeda, akan tetapi skala prioritas tersebut harus tetap memiliki kesinambungan dari periode ke periode berikutnya. Tahapan pembangunan jangka menengah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 6.3.

Tahapan Kebijakan Tahap IV (2021-2026) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Dumai 2005-2025

Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Misi 1: Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri		
Tahapan ke-4 (2021-2026)	Berkembangnya Kawasan Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantapkan kawasan industri menjadi kawasan ekonomi khusus 2. Memantapkan kelembagaan yang diikuti dengan meningkatnya daya saing produk-produk unggulan
	Terwujudnya sektor industri dan perdagangan, serta jasa yang kokoh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan promosi dan pemasaran hasil-hasil industri dan usaha mikro, kecil, dan menengah pada tingkat nasional dan internasional 2. Memperkuat daya saing produk industri dan usaha mikro, kecil, dan menengah 3. Mengoptimalkan kegiatan jasa kepelabuhanan 4. Pemantapan pembangunan pertanian yang bertumpu pada sistem agrobisnis guna menjamin ketahanan serta peningkatan nilai tambah produk 5. Memperkuat koperasi dan lembaga keuangan sebagai mitra dunia usaha
	Terwujudnya investasi yang mendorong berkembangnya perekonomian daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan kelembagaan yang tanggap dan tangguh untuk kemajuan investasi Dumai 2. Peningkatan kualitas pelayanan investasi 3. Terpeliharanya kondisi pembangunan yang kondusif di Kota Dumai yang mampu bersaing dengan wilayah lainnya
	Terciptanya kesempatan kerja yang didukung oleh tenaga kerja yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyaluran tenaga kerja pada pasar lapangan kerja industrial yang memadai 2. Memantapkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program yang mengembangkan investasi dan kegiatan industri di daerah yang menyerap tenaga kerja lokal
Misi 2: Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, agamis dan berjiwa Melayu		
Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Tahapan ke 4 (2021-2026)	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperluas akses, pemerataan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenjang 2. Mengoptimalkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program pendidikan yang bertumpu pada potensi dan daya saing daerah 3. Mewujudkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompetensi sesuai potensi dan daya saing daerah 4. Mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan masyarakat yang berkualitas

Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
		5. Mewujudkan masyarakat yang mampu dan dapat memanfaatkan akses pendidikan di semua jenjang
	Terwujudnya masyarakat Dumai Sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan kemandirian dalam penjaagaan kesehatan dan pemeliharaan gizi keluarga dan pola hidup sehat 2. Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat 3. Memantapkan fasilitas pendukung dan pelayanan tenaga medis 4. Terciptanya keluarga yang sehat dan sejahtera
	Terwujudnya jati diri masyarakat yang agamis dan berbudi pekerti luhur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan implementasi kebijakan, strategi, dan program-program pendidikan keagamaan dan karakter bangsa yang mendukung perilaku yang berbudi pekerti luhur 2. Meningkatkan etos kerja pembangunan daerah yang berlandaskan nilai agama
	Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginternalisasikan filosofi Budaya Melayu menjadi roh pembangunan masyarakat. 2. Meningkatkan cipta, rasa, dan karsa budaya Melayu 3. Mengoptimalkan implementasi kebijakan, strategi dan program- program pengembangan dan aktualisasi seni budaya Melayu
Misi 3: Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang		
Tahapan ke-4 (2021 – 2025)	Terwujudnya aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah	1. Mengoptimalkan jaringan transportasi guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa
	Terpenuhinya ketersediaan sumber air baku untuk air bersih	1. Mengoptimalkan distribusi air bersih secara merata
	Terpenuhinya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan cakupan energi dan ketenagalistrikan di seluruh wilayah Kota Dumai 2. Mewujudkan ketersediaan energi dan mengembangkan sumber energi alternatif terbarukan 3. Mengoptimalkan sarana penerangan jalan umum (Saluran Kabel Udara Tegangan Menengah/SKUTM dan Saluran Kabel Udara Tegangan Rendah/SKUTR) pada wilayah yang belum terjangkau jaringan PLN
	Terwujudnya dukungan pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi	1. Mengoptimalkan jaringan transportasi guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa

Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
	Terwujudnya pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman 2. Mengoptimalkan cakupan pelayanan persampahan, air bersih, dan air limbah domestik 3. Mengoptimalkan lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas 4. Meningkatkan sistem jaringan drainase secara bertahap pada daerah rawan banjir dan mengurangi daerah genangan air pada kawasan permukiman
	Terpenuhinya kualitas dan kuantitas fasilitas sosial dan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan ketersediaan fasilitas sosial dan ekonomi yang menjangkau permukiman penduduk
Misi 4: Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik		
Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Tahapan ke-4 (2021-2026)	Terwujudnya sumberdaya aparatur yang profesional dan memiliki kompetensi di bidangnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan tata laksana aparatur daerah yang penuh lima syarat profesionalisme 2. Memantapkan implementasi kebijakan, strategi dan program program <i>recruitment</i>, pembekalan, pendidikan, pelatihan dan pengembangan yang mendorong motivasi dan dedikasi pegawai di semua jenjang 3. Mewujudkan sistem organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien 4. Mewujudkan SDM aparatur pemerintahan daerah yang berkualitas 5. Mewujudkan kapasitas kepemimpinan dalam mencapai <i>good governance</i> dan <i>clean government</i>
	Terwujudnya pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan kondisi pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima 2. Melaksanakan akses masyarakat pada sistem informasi manajemen daerah 3. Mewujudkan saluran akses formal aspirasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
Misi 5: Mewujudkan Dumai sebagai lingkungan yang hijau		
Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Tahapan ke-4 (2021-2026)	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang lestari (Pemanfaatan Ruang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan ruang secara bijaksana 2. Memanfaatkan sumberdaya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga lingkungan yang lestari 4. Mengembangkan pengendalian lingkungan yang efektif 5. Mengoptimalkan peran serta swasta dalam pengelolaan lingkungan
	Terwujudnya perangkat pengelolaan/kelembagaan daerah yang tangguh untuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengedepankan perilaku masyarakat yang berwawasan lingkungan dalam pengelolaan lingkungan. 2. Mengoptimalkan peran serta swasta dalam pengelolaan lingkungan

Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
	menjaga lingkungan pembangunan berkelanjutan (Kelembagaan)	<ol style="list-style-type: none"> 3. Mengembangkan pengendalian lingkungan yang efektif 4. Mengembangkan kelembagaan pengelolaan lingkungan dan pengendalian dampak kerusakan lingkungan 5. Mengoptimalkan peran masyarakat dan LSM dalam pembinaan dan penyuluhan pengelolaan lingkungan hidup
	Terwujudnya tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan (Tata Ruang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga konsistensi pola penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 2. Mengembangkan pranata pembangunan yang lebih rinci 3. Meningkatkan perangkat pengelolaan/kelembagaan daerah yang tangguh untuk mengelola lingkungan pembangunan berkelanjutan 4. Mengoptimalkan peran masyarakat dan LSM dalam pengelolaan lingkungan hidup

Arah Kebijakan umum di atas dijabarkan ke dalam arah kebijakan setiap misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditargetkan dan akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai tabel berikut ini:

1. Misi: Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri

- 1) Meningkatkan daya saing IKM/UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif dan supporting bagi Industri Besar dan mengoptimalkan kegiatan jasa kepelabuhanan
- 2) Memantapkan kawasan Industri menjadi kawasan ekonomi khusus
- 3) Meningkatkan Kualitas Kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan daya saing produk-produk unggulan
- 4) Memperkuat koperasi dan lembaga keuangan sebagai mitra dunia usaha
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan investasi
- 6) Mewujudkan kelembagaan yang tanggap dan tangguh untuk kemajuan investasi Dumai
- 7) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang kondusif untuk meningkatkan daya saing pendukung ekonomi daerah
- 8) Meningkatkan pelayanan dasar bagi warga miskin
- 9) Meningkatkan jaminan sosial bagi masyarakat yang mempunyai masalah kesejahteraan sosial
- 10) Meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal berbasis kompetensi dan keunggulan daerah
- 11) Meningkatkan Penyaluran Tenaga kerja pada pasar lapangan kerja industri yang memadai
- 12) Memantapkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program yang mengembangkan investasi dan kegiatan industri didaerah yang menyerap tenaga kerja lokal
- 13) Menjaga stabilitas distribusi/pasokan pangan
- 14) Memantapkan pembangunan pertanian yang bertumpu pada sistem agribisnis guna menjamin ketahanan pangan serta peningkatan nilai tambah produk

2. Misi: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu

- 1) Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat
- 2) Memantapkan fasilitas pendukung dan pelayanan tenaga medis

- 3) Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan kemandirian dalam penjagaan kesehatan dan pemeliharaan gizi keluarga dan pola hidup sehat
- 4) Meningkatkan kualitas lingkungan sehat
- 5) Mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera
- 6) Memperluas akses, pemerataan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenjang
- 7) Mengoptimalkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program pendidikan yang bertumpu pada potensi dan daya saing daerah
- 8) Mewujudkan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang berkompentensi sesuai potensi dan daya saing daerah
- 9) Mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan masyarakat yang berkualitas
- 10) Menginternalisasikan filosofi budaya melayu menjadi roh pembangunan masyarakat
- 11) Meningkatkan cipta, rasa dan karsa budaya melayu
- 12) Mengoptimalkan kebijakan, strategi dan program-program pengembangan dan aktualisasi seni dan budaya melayu
- 13) Menjamin distribusi bahan pokok
- 14) Meningkatkan Pendapatan masyarakat

3. Misi: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas

- 1) Mengoptimalkan jaringan transportasi guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa
- 2) Meningkatkan sistem jaringan drainase secara bertahap pada daerah rawan banjir dan mengurangi daerah genangan air pada kawasan permukiman
- 3) Mengoptimalkan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman
- 4) Mengoptimalkan lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas
- 5) Mengoptimalkan cakupan pelayanan persampahan, air bersih dan air limbah domestik
- 6) Mengoptimalkan distribusi air bersih secara merata
- 7) Mengembangkan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah sesuai peraturan perundang undangan
- 8) Memanfaatkan ruang secara bijaksana/Menjaga konsistensi pola penataan ruang sesuai dengan RTRW

- 9) Memanfaatkan SDA secara optimal dengan prinsip pembangunan berkelanjutan
- 10) Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga lingkungan hidup yang lestari
- 11) Mengoptimalkan peran swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup yang lestari
- 12) Meningkatkan penanganan sampah dan pengurangan sampah dari sumbernya
- 13) Menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terintegrasi dan lintas sektoral
- 14) Meningkatkan koordinasi penanganan bagi masyarakat terdampak bencana

4. Misi: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik

- 1) Mewujudkan sistem organisasi tata kerja yang efektif dan efisien
- 2) Meningkatkan kondisi pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima
- 3) Meningkatkan kapasitas dan manajemen pengawasan internal
- 4) Mewujudkan tata laksana aparatur daerah yang memenuhi 5 syarat profesionalisme (menguasai pekerjaan, loyalitas-integritas, visi, motivasi-komitmen, kebanggaan)
- 5) Meningkatkan pengelolaan asset daerah
- 6) Optimalisasi pendapatan daerah
- 7) Optimalisasi BUMD sebagai sumber pendapatan daerah
- 8) Meningkatkan akses masyarakat pada Sistem Informasi manajemen daerah
- 9) Mewujudkan saluran akses formal aspirasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public

Tabel 6.4

Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kota Dumai 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1: Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan dan Industri			
1. Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera	1.1 Meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah	1.1.1 Peningkatan Perekonomian kota melalui optimalisasi peran seluruh stake holder	1.1.1.1 Meningkatkan daya saing IKM/UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif dan supporting bagi Industri Besar dan mengoptimalkan kegiatan jasa kepelabuhanan
			1.1.1.2 Memantapkan kawasan Industri menjadi kawasan ekonomi khusus
		1.1.2 Peningkatan Produktivitas masyarakat	1.1.2.1 Memperkuat daya saing produk industri dan UMKM
			1.1.2.2 Meningkatkan kualitas pengelolaan Kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan daya saing produk-produk unggulan
			1.1.2.3 Memperkuat koperasi dan lembaga keuangan sebagai mitra dunia usaha
		1.1.3 Peningkatan Daya saing daerah dan Iklim berusaha	1.1.3.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan investasi
	1.1.3.2 Mewujudkan kelembagaan yang tanggap dan tangguh untuk kemajuan investasi Dumai		
	1.1.3.3 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang kondusif untuk meningkatkan daya saing pendukung ekonomi daerah		
	1.2 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	1.2.1 Peningkatan perlindungan sosial	1.1.1.1 Meningkatkan pelayanan dasar bagi warga miskin
			1.2.1.2 Meningkatkan jaminan sosial bagi masyarakat yang mempunyai masalah kesejahteraan sosial
		1.2.2 Peningkatan Peluang Kerja Bagi Masyarakat	1.2.2.1 Meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal berbasis kompetensi dan keunggulan daerah
			1.2.2.2 Meningkatkan Penyaluran Tenaga kerja pada pasar lapangan kerja industri yang memadai
1.2.2.3 Memantapkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program yang mengembangkan investasi dan kegiatan industri didaerah yang menyerap tenaga kerja lokal			
1.3 Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	1.3.1 Peningkatan Koordinasi dan sinergitas lintas sektor untuk ketersediaan pangan daerah	1.3.1.1 Menjaga stabilitas distribusi/pasokan pangan	
		1.3.1.2 Memantapkan pembangunan pertanian yang bertumpu pada sistem agribisnis guna menjamin ketahanan pangan dan peningkatan nilai tambah produk	
Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu			
1. Membangun masyarakat dumai yang Produktif, berdaya saing dan sejahtera	1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai	1.1.1 Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang merata dan berkualitas	1.1.1.1 Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat
			1.1.1.2 Memantapkan fasilitas pendukung dan pelayana tenaga medis
			1.1.1.3 Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan kemandirian dalam penjaagaan kesehatan dan pemeliharaan gizi keluarga dan pola hidup sehat
			1.1.1.4 Meningkatkan kualitas lingkungan sehat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			1.1.1.5Mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera
	1.2 Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	1.2.1 Peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat yang merata dan berkualitas	1.2.1.1Memperluas akses secara merata dan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenjang
			1.2.1.2Mewujudkan masyarakat yang mampu dan dapat memanfaatkan akses pendidikan di semua jenjang
			1.2.1.3Mengoptimalkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program pendidikan yang bertumpu pada potensi dan daya saing daerah
			1.2.1.4Mewujudkan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang berkompetensi sesuai potensi dan daya saing daerah
			1.2.1.5Mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan masyarakat yang berkualitas
			1.2.1.6Menginternalisasikan filosofi budaya melayu menjadi roh pembangunan masyarakat
			1.2.1.7Meningkatkan cipta, rasa dan karsa budaya melayu
			1.2.1.8Mengoptimalkan kebijakan, strategi dan program-program pengembangan dan aktualisasi seni dan budaya melayu
	1.3 Meningkatkan standard hidup layak masyarakat Kota Dumai	1.3.1 Peningkatan daya Beli Masyarakat	1.3.1.1Menjamin distribusi bahan pokok
			1.3.1.2Meningkatkan Pendapatan masyarakat
Misi 3: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas			
1.Mewujudkan infrastruktural dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	1.1 Meningkatkan infrastruktural Kota	1.1.1 Peningkatan aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah	1.1.1.1Mengoptimalkan jaringan transportasi guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa
		1.1.2 Peningkatan sistem pengendalian banjir Kota Dumai	1.1.2.1Meningkatkan sistem jaringan drainase secara bertahap pada daerah rawan banjir dan mengurangi daerah genangan air pada kawasan permukiman
		1.1.3 Peningkatan kuantitas dan kualitas kawasan perumahan dan permukiman	1.1.3.1 Mengoptimalkan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman
			1.1.3.2 Mengoptimalkan lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas
		1.1.4 Peningkatan kualitas sanitasi perumahan dan permukiman	1.1.4.1Mengoptimalkan cakupan pelayanan persampahan, air bersih dan air limbah domestik
		1.1.5 Peningkatan kinerja sistem penyediaan air bersih kota Dumai	1.1.5.1Mengoptimalkan distribusi air bersih secara merata
	1.1.6 Peningkatan kerjasama daerah dalam pembangunan infrastruktural	1.1.6.1Mengembangkan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan infrastruktural daerah sesuai peraturan perundang undangan (Kerjasama Daerah, Pinjaman Daerah, KPBU, Penugasan BUMD, TJSL/CSR, Sumbangan Pihak ketiga dan lain lain)	
	1.2 Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten	1.2.1 Mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif,	1.2.1.1Memanfaatkan ruang secara bijaksana/Menjaga konsistensi pola penataan ruang sesuai dengan RTRW

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		dan berkelanjutan	1.2.1.2Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga lingkungan hidup yang lestari
			1.2.1.3Memanfaatkan SDA dengan prinsip pembangunan berkelanjutan
	1.3 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan penanganan bencana	1.3.1 Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari	1.3.1.1Mengoptimalkan peran swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup
			1.3.1.2Meningkatkan penanganan sampah dan pengurangan sampah dari sumbernya
		1.3.2 Mengoptimalkan upaya penanganan saat kejadian bencana	1.3.2.1 Menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terintegrasi dan lintas sektoral
		1.3.3 Mengoptimalkan penanganan pasca kejadian bencana	1.3.1.1 Meningkatkan koordinasi penanganan bagi masyarakat terdampak bencana
Misi 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik			
1. Meningkatkan Reformasi Birokrasi	1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	1.1.1 Peningkatan Profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.1.1.1Mewujudkan sistem organisasi tata kerja yang efektif dan efisien
			1.1.1.2Meningkatkan kondisi pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima
			1.1.1.3Meningkatkan kapasitas dan manajemen pengawasan internal
			1.1.1.4Mewujudkan tata laksana aparatur daerah yang memenuhi 5 syarat profesionalisme (menguasai pekerjaan, loyalitas-integritas, visi, motivasi, komitmen, kebanggaan)
	1.1.2 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	1.1.2.1Meningkatkan pengelolaan asset daerah	
		1.1.2.2Mengoptimalkan pendapatan daerah	
		1.1.2.3Mengoptimalkan BUMD sebagai sumber pendapatan daerah	
		1.1.2.4Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	
	1.2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1.2.1 Pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis IT	1.2.1.1Meningkatkan Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
			1.2.1.2Mewujudkan saluran akses formal aspirasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public

Selain dalam rangka menjawab isu strategis daerah, program pembangunan daerah juga diarahkan untuk penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Tabel 6.5
Standard Pelayanan Minimal

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PEMBANGUNAN
1	PENDIDIKAN DASAR	PERSENTASE WARGA NEGARA USIA 7-15 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN DASAR (SD/MI, SMP/MTS)	100%	SETIAP TAHUN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN, PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM, PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2	PENDIDIKAN KESETARAAN	PERSENTASE WARGA NEGARA USIA 7-18 TAHUN YANG BELUM MENYELESAIKAN PENDIDIKAN DASAR DAN ATAU MENENGAH YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN KESATARAAN	100%	SETIAP TAHUN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
3	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	PERSENTASE WARGA NEGARA USIA 5-6 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN PAUD	100%	SETIAP TAHUN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
4	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	PERSENTASE IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%	SETIAP TAHUN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
5	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	PERSENTASE IBU BERSALIN YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%	SETIAP TAHUN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
6	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	PERSENTASE BAYI BARU LAHIR YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%	SETIAP TAHUN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PEMBANGUNAN
7	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	PERSENTASE BALITA YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%	SETIAP TAHUN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
8	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	PERSENTASE WARGA NEGARA USIA PENDIDIKAN DASAR YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%	SETIAP TAHUN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
9	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF,	PERSENTASE WARGA NEGARA USIA PRODUKTIF YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%	SETIAP TAHUN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
10	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT;	PERSENTASE WARGA NEGARA USIA LANJUT YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%	SETIAP TAHUN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
11	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	PERSENTASE WARGA NEGARA PENDERITA HIPERTENSI YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%	SETIAP TAHUN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
12	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	PERSENTASE WARGA NEGARA PENDERITA DIABETES MELITUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%	SETIAP TAHUN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
13	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	PERSENTASE WARGA NEGARA DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT YANG TERLAYANI KESEHATAN	100%	SETIAP TAHUN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
14	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	PERSENTASE WARGA NEGARA TERDUGA TUBERKULOSIS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%	SETIAP TAHUN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
15	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH	PERSENTASE WARGA NEGARA DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN	100%	SETIAP TAHUN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PEMBANGUNAN
	MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)	TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS) YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN				
16	PENYEDIAAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI	PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI	100%	SETIAP TAHUN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
17	PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	100%	SETIAP TAHUN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
18	PENYEDIAAN & REHABILITASI RUMAH YG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA KAB/KOTA	PERSENTASE WARGA NEGARA KORBAN BENCANA YANG MEMPEROLEH RUMAH LAYAK HUNI	100%	SETIAP TAHUN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
19	FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE WARGA NEGARA YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA YANG MEMPEROLEH FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI	100%	SETIAP TAHUN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
20	PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN AKIBAT DARI PENEGAKAN HUKUM PERDA DAN PERKADA	100%	SETIAP TAHUN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
21	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA	PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA	100%	SETIAP TAHUN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
22	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP	PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH	100%	SETIAP TAHUN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PEMBANGUNAN
	BENCANA	H LAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAN TERHADAP BENCANA			KETERTIBAN UMUM	
23	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN	PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN	100%	SETIAP TAHUN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
24	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TELANTAR DI LUAR PANTI	PERSENTASE WARGA NEGARA PENYANDANG DISABILITAS YANG MEMPEROLEH REHABILITASI SOSIAL DILUAR PANTI	100%	SETIAP TAHUN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
25	REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TELANTAR DI LUAR PANTI	PERSENTASE ANAK TELANTAR YANG MEMPEROLEH REHABILITASI SOSIAL DILUAR PANTI	100%	SETIAP TAHUN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
26	REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DILUAR PANTI	PERSENTASE WARGA NEGARA LANJUT USIA TERLANTAR YANG MEMPEROLEH REHABILITASI SOSIAL DILUAR PANTI	100%	SETIAP TAHUN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
27	REHABILITASI SOSIAL DASAR TUNA SOSIAL KHUSUSNYA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI LUAR PANTI	PERSENTASE WARGA NEGARA/ GELANDANGAN DAN PENGEMIS YANG MEMPEROLEH REHABILITASI SOSIAL DASAR TUNA SOSIAL DILUAR PANTI	100%	SETIAP TAHUN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
28	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA SAAT TANGGAP & PASKA BENCANA BAGI KORBAN BENCANA KAB/KOTA	PERSENTASE WARGA NEGARA KORBAN BENCANA KAB/KOTA YANG MEMPEROLEH PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	100%	SETIAP TAHUN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Selain dalam rangka menjawab isu strategis daerah, program pembangunan daerah juga dilaksanakan untuk menjawab program prioritas kepala daerah yang telah disampaikan pada proses politik. Adapun program prioritas kepala daerah Kota Dumai diantaranya:

Tabel 6.6
Program Prioritas Kepala Daerah

NO	PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
BIDANG KESEHATAN		
1	GRATIS BIAYA PELAYANAN EMERGENCY	RSUD
2	GRATIS BIAYA PELAYANAN KELAS III DENGAN KTP DAN BIAYA AMBULANCE UNTUK RUJUKAN KE PEKANBARU	RSUD
3	AMBULANCE 24 JAM DI TINGKAT KECAMATAN	DINKES
4	MEMBANTU PREMI PESERTA BPJS KESEHATAN YANG MENUNGGAK	DINKES
5	MEMBERIKAN KEMUDAHAN LAYANAN DI PUSKESMAS DAN RSUD KOTA DUMAI	DINKES-RSUD
BIDANG PENDIDIKAN		
1	BEASISWA PENUH BAGI SISWA/I KURANG MAMPU DAN BERPRESTASI UNTUK JENJANG S-1 50 ORANG	SETDA
2	PENINGKATAN FREKUENSI PELATIHAN GURU SD DAN SMP	DIKBUD
3	BEBAS BUTA AKSARA ALQURAN SISWA SD-SMP DAN PEMBINAAN ROHANI PELAJAR NON MUSLIM	DIKBUD
BIDANG PEMERINTAHAN		
1	MEMANGKAS PELAYANAN BIROKRASI AGAR LEBIH MUDAH, CEPAT DAN TRANSPARAN	SETDA
2	MENINGKATKAN INTEGRITAS ASN PADA OPD PELAYANAN	OPD PELAYANAN
3	PEMUTIHAN KTP BAGI WARGA SUDAH BERDOMISILI DIDUMAI LEBIH DARI 5 TAHUN	DUKCAPIL
4	MENYEDIKAKAN DATA AKURAT MASYARAKAT MISKIN UNTUK MEMUDAHKAN PENYALURAN SUBSIDI	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BIDANG PARIWISATA		
1	WISATA BUKIT GELANGGANG	DINAS KOPAR
2	WISATA KULINER JALAN OMBAK; DOCK, JANUR KUNING, JALAN DAN KELAKAP TUJUH	DINAS KOPAR -PUPR-DISHUB
3	WISATA RELIGI SULUK BASILAM BARU	DINAS PUPR-SETDA-DISHUB
4	WISATA PANTAI PUAK	DINAS PARPORA-PUPR
BIDANG TENAGA KERJA		
1	MENAMBAH JENIS PELATIHAN SESUAI KEBUTUHAN INDUSTRI DAN PELABUHAN DIKOTA DUMAI DENGAN MEMFUNGSIKAN 4 RUMAH TERAMPIL DI DUMAI TIMUR, SUNGAI SEMBILAN, MEDANG KAMPAI DAN BUKIT KAPUR	DISNAKER
2	MENGUTAMAKAN PENYERAPAN TENAGA KERJA LOKAL OLEH PERUSAHAAN YANG BEROPERASI DI KOTA DUMAI	DISNAKER
3	MENGEMBANGKAN DAN MEMPERBANYAK USAHA YANG MENYERAP BANYAKTENAGA KERJA	DISNAKER
BIDANG INFRASTRUKTUR		
1	PEMERATAAN PEMBANGUNAN JALAN SAMPAI TINGKAT KELURAHAN	PUPR-PERKIM PERTANAHAN-KECAMATAN
2	PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR BERSIH	PUPR
3	PERCEPATAN PEMBANGUNAN AKSES JALAN DARI KECAMATAN BUKIT KAPUR-KECAMATAN MEDANG KAMPAI DAN KECAMATAN BUKIT KAPUR-SUNGAI SEMBILAN	PUPR
4	MEMBANGUN SARPRAS OAHRAKA KECAMATAN	DINAS KOPAR
5	PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER DAN MAL PELAYANAN PUBLIK	PUPR
6	PEMERATAAN PEMBANGUNAN JALAN SAMPAI TINGKAT KELURAHAN	PUPR-PERKIM PERTANAHAN-KECAMATAN
BIDANG SOSIAL EKONOMI		
1	PENGEMBANGAN POTENSI PEMUDA MELALUI PELATIHAN SESUAI DENGAN KOMPETENSI DAN KEBUTUHAN DUNIA USAHA	DINAS KOPAR - DISNAKER
2	PENINGKATAN BANTUAN UNTUK RUMAH IBADAH SELURUH	SETDA

NO	PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
	AGAMA	
3	BANTUAN MODAL USAHA UNTUK UMKM RINTISAN PEMASARAN DENGAN E-COMMERCE	DISPERINKOPUKM-SETDA
4	BANTUAN TEKNOLOGI MODERN UNTUK PETANI, PETERNAK DAN NELAYAN	DKPP-DINAS PERIKANAN

TABEL. 6.7 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF KOTA DUMAI

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
TERWUJUDNYA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI YANG UNGGUL DAN BERTUMPU PADA BUDAYA MELAYU																	
MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN KOTA YANG BERDAYA SAING DAN BERTUMPU PADA KEPELABUHANAN DAN INDUSTRI																	
	TUJUAN	MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG MANDIRI DAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	%	-1,05	3,54		4,36		4,7		4,8		5,04		5,04	
	SASARAN	MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	NILAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) ADHK	RP. TRILIUN	24,6	26,29		27,44		28,73		30,11		31,63		31,63	
			NILAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) ADHB	RP. TRILIUN	36,32	38,9		41,52		43,52		46,61		48,93		48,93	
			PDRB PERKAPITA ADHK	RP. JUTA	77,64	80,98		83,48		86,34		89,37		92,73		92,73	
			PDRB PERKAPITA ADHB	RP. JUTA	114,66	119,809		126,301		130,794		138,351		143,466		143,466	
2.17.07	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA	PERSENTASE JUMLAH		5%	10%	2.550.000.000	15%	2.522.000.000	20%	2.764.200.000	20%	2.438.900.000	20%	2.988.900.000	20%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
		MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	USAHA MIKRO YANG BERMITRA														DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.17.08	2	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PERSENTASE JUMLAH UMKM YANG DIBINA		2%	3%	700.000.000	4%	350.000.000	5%	385.000.000	7%	523.500.000	10%	2.073.500.000	10%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3.31.02	3	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE TERSELESAIKANNYA DOKUMEN RPIK SAMPAI DENGAN DITETAPKANNYA MENJADI PERDA		40%	50%	750.000.000	75%	2.310.000.000	100%	2.571.000.000	100%	1.881.100.000	100%	1.931.100.000	100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3.31.03	4	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE JUMLAH INDUSTRI YANG DIPANTAU		10%	15%	300.000.000	20%	260.000.000	25%	286.000.000	30%	254.100.000	35%	304.100.000	35%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
3.31.04	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PERSENTASE DATA PERUSAHAAN INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI DI KAB/KOTA YANG MASUK DALAM SII NAS TERHADAP TOTAL POPULASI PERUSAHAAN INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN PERUSAHAAN KAWASANI NDUSTRI DI KAB/KOTA		50%	55%	150.000.000	60%	215.000.000	65%	286.500.000	70%	199.650.000	75%	199.650.000	75%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.18.02	6	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PROYEK		56,64%	36,6%	1.300.000.000	40,26%	1.250.000.000	44,29%	1.400.000.000	48,71%	1.355.873.959	53,59%	1.355.873.959	53,59%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			INVESTASI														
2.18.03	7	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE MINAT INVESTOR TERHADAP PENINGKATAN INVESTASI		NA	10%	800.000.000	10%	1.000.000.000	10%	1.000.000.000	10%	1.000.000.000	10%	1.000.000.000	10%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04	8	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT YANG MENERIMA LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN		78%	80%	1.100.000.000	85%	1.500.000.000	85%	1.500.000.000	90%	1.550.000.000	90%	1.550.000.000	90%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05	9	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN		100%	100%	900.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.650.000.000	100%	1.650.000.000	100%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06	10	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI YANG DIPUBLIKASI		75%	100%	250.000.000	100%	289.294.324	100%	289.294.324	100%	289.294.324	100%	289.294.324	100%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
3.26.02	11	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASE PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATA DOMESTIK DAN MANCANE GARA		60%	70%	7.474.189.000	75%	5.848.434.825	80%	4.837.999.049,00	85%	4.079.099.675,00	90%	3.291.600.000	90%	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.03	12	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PERSENTASE PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA		60%	70%	328.000.000	75%	1.169.640.000	80%	1.263.211.200,00	85%	1.341.099.136,00	90%	1.341.099.136	90%	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.04	13	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	PERSENTASE PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF		N/A	0%	0	40%	1.620.000.000	45%	1.749.600.000,00	50%	1.749.600.000,00	55%	1.749.600.000	55%	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.05	14	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PERSENTASE PENINGKATAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN		60%	70%	755.000.000	75%	815.400.000	80%	880.632.000,00	85%	927.913.600,00	90%	927.913.600	90%	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			EKONOMI KREATIF														
3.30.02	15	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE REALISASI PELAYANAN DOKUMEN SKA		5%	5%	50.000.000	5%	52.000.000	5%	55.000.000	5%	60.000.000	5%	60.000.000	5%	DINAS PERDAGANGAN
3.30.03	16	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE PASAR TRADISIONAL PEMERINTAH YANG TERTIB, BERSIH DAN AMAN		100%	100%	1.830.000.000	100%	1.946.000.000	100%	1.948.000.000	100%	1.965.000.000	100%	1.965.000.000	100%	DINAS PERDAGANGAN
3.30.05	17	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PERSENTASE VOLUME EKSPOR		1,5%	1,5%	120.000.000	1,5%	135.000.000	1,5%	138.000.000	1,5%	150.000.000	1,5%	150.000.000	1,5%	DINAS PERDAGANGAN
3.30.06	18	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE ALAT UTTP YANG DITERAKAN ULANG DAN DILAKUKAN PENGAWASAN/PENYULUHAN		16,67%	16,67%	760.000.000	16,67%	810.000.000	16,67%	825.000.000	16,67%	860.000.000	16,67%	860.000.000	16,67%	DINAS PERDAGANGAN

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
3.30.07	19	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG IKUT PROMOSI PRODUK DALAM NEGERI		14%	14%	175.000.000	14%	178.950.418	14%	181.683.631	14%	193.194.570	14%	193.194.570	14%	DINAS PERDAGANGAN
4.01.03	20	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE MENINGKATNYA CAPAIAN KINERJA DI BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		100%	100%	2.780.000.000	100%	2.760.000.000	100%	2.600.000.000	100%	3.060.000.000	100%	2.600.000.000	100%	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	SASARAN	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI	INDEKS GINI	POIN	0,36	0,36		0,36		0,35		0,35		0,35		0,35	
			TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	%	8,19	7,79		7,54		7,29		7,04		6,79		6,79	
			TINGKAT KEMISKINAN	%	3,16	3,51		3,49		3,47		3,45		3,43		3,43	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1.06.02	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIBERDAYAKAN		100%	100 PER SEN	560.000.000	100 PER SEN	560.000.000	100 PER SEN	560.000.000	100 PER SEN	560.000.000	100 PER SEN	635.000.000	100 PER SEN	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.03	2	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	PERSENTASE WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG DIPULANGKAN DARI TITIK DEBARKAS DI DAERAH KABUPATEN/KOTA KE DESA/KELURAHAN ASAL		100%	100 PER SEN	80.000.000	100 PER SEN	80.000.000	100 PER SEN	80.000.000	100 PER SEN	80.000.000	100 PER SEN	100.000.000	100 PER SEN	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1.06.04	3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS YANG TERTANGANI DI LUAR PANTI SOSIAL		NA	100 PER SEN	1.950.000.000	100 PER SEN	1.950.000.000	100 PER SEN	1.950.000.000	100 PER SEN	1.950.000.000	100 PER SEN	2.045.000.000	100 PERS EN	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.05	4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PERSENTASE PMKS YANG MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		NA	100 PER SEN	1.705.000.000	100 PER SEN	1.775.000.000	100 PER SEN	1.775.000.000	100 PER SEN	1.775.000.000	100 PER SEN	1.850.000.000	100 PERS EN	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.13.04	5	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE KINERJA DAN MANAJEMEN APARATUR		NA	100 PER SEN	300.000.000	100 PER SEN	300.000.000	100 PER SEN	300.000.000	100 PER SEN	380.000.000	100 PER SEN	380.000.000	100 PERS EN	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN														
2.13.05	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE LPM YANG LEBIH PRODUKTIF DAN MANDIRI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN		NA	100 PER SEN	1.480.000.000	100 PER SEN	1.480.000.000	100 PER SEN	1.480.000.000	100 PER SEN	1.605.000.000	100 PER SEN	1.605.000.000	100 PERS EN	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.07.02	7	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENYUSUNAN RTKD		N/A	100	309.300.000	100	80.000.000	100	180.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03	8	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE BESARAN TENAGA KERJA YANG MENDAPAT PELATIHAN		N/A	10	5.043.745.054	10	4.360.000.000	10	4.360.000.000	10	4.650.000.000	10	5.650.000.000	10	DINAS TENAGA KERJA

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
2.07.04	9	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE PENEMPATAN TENAGA KERJA		63	25	2.845.954.946	30	3.355.000.000	35	3.765.000.000	40	4.155.000.000	45	4.655.000.000	45	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05	10	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN		87	80	1.406.000.000	85	1.495.000.000	90	1.595.000.000	95	1.595.000.000	100	2.095.000.000	100	DINAS TENAGA KERJA
2.17.03	11	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PERSENTASE PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA		24,5%	30%	500.000.000	35,50%	700.000.000	40%	770.000.000	40%	947.000.000	40%	947.000.000	40%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
2.17.04	12	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PERSENTASE USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI YANG DINILAI KESEHATANNYA UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA		6,53%	7,13 %	350.000.000	7,13 %	585.000.000	7,13 %	643.500.000	7,13 %	757.850.000	7,13 %	736.850.000	7,13%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.17.05	13	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PERSENTASE KOPERASI YANG MENGIKUTI PELATIHAN UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA		17,55%	19,55 %	450.000.000	21,55 %	495.000.000	23,55 %	544.500.000	23,55 %	598.950.000	23,55 %	598.950.000	23,55 %	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
2.17.06	14	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PERSENTASE YANG DIBERIKAN DUKUNGAN FASILITASI PENDAMPINGAN KELEMBAGAAAN DAN USAHA UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA		24,50%	30%	200.000.000	35,50%	250.000.000	40%	275.000.000	40%	302.500.000	40%	250.100.000	40%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	SASARAN	MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN DAERAH	SKOR POLA PANGAN HARAP	SKOR	82,91	83,75		84,58		85,41		86,24		87,07		87,07	
			KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA	%	32,78	36,03		37,7		39,37		41,03		42,7		42,7	
2.09.02	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN	PERSENTASE PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARAN		N/A	-	0	50%	750.000.000	-	0	-	0	50%	750.000.000	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
		DAN KEMANDIRIAN PANGAN	A LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT														
2.09.03	2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PERSENTASE PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		44%	9%	3.828.100.000	9%	1.996.366.930	10%	2.188.000.000	10%	2.350.000.000	11%	1.308.000.000	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.04	3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PERSENTASE PENYEDIAAN SARANA PENGEMBANGAN TANAMAN PEKARANGAN PADA DAERAH STUNTING		22%	9%	150.000.000	13%	200.000.000	16%	360.000.000	19%	450.000.000	22%	450.000.000	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.05	4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PERSENTASE PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR		20%	13%	220.000.000	13%	300.000.000	13%	300.000.000	13%	300.000.000	13%	300.000.000	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.02	5	PROGRAM PENYEDIAAN	PERSENTASE		42%	9%	1.513.100.000	10%	2.350.000.000	10%	2.360.000.000	10%	2.540.000.000	11%	3.300.000.000	100%	DINAS KETAHANAN

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
		DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PENINGKATAN SARANA PERTANIAN														PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.03	6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENYEDIAAN PRASARANA DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN		26%	13%	2.250.000.000	13%	1.450.000.000	13%	1.800.000.000	13%	2.100.000.000	13%	1.960.000.000	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.04	7	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENANGANAN KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR		84%	3%	632.001.000	3%	1.050.000.000	2%	1.150.000.000	2%	1.200.000.000	1%	1.300.000.000	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.05	8	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		40%	10%	665.000.000	10%	750.000.000	10%	750.000.000	10%	750.000.000	10%	750.000.000	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.07	9	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSENTASE PELAKSANAAN FUNGSI PENYULUHAN		30%	11%	700.000.000	12%	1.050.000.000	12%	1.100.259.969	12%	1.148.090.333	13%	1.450.090.333	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.25.03	10	PROGRAM	CAKUPAN		18%	18%		20%		22%		24%		26%		26%	DINAS

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
		PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	KELOMPOK NELAYAN TERBINA				1.025.000.000		1.725.000.000		1.725.000.000		1.725.000.000		1.725.000.000		PERIKANAN
3.25.04	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	CAKUPAN KELOMPOK AKTIF BUDIDAYA TERBINA		26%	28%	2.966.000.000	31%	3.568.000.000	34%	3.542.000.000	37%	3.870.375.038	40%	3.855.991.838	40%	DINAS PERIKANAN
3.25.05	12	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERSENTASE REKOMENDASI YANG DIKELUARKAN		100%	100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	DINAS PERIKANAN
3.25.06	13	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PERSENTASE WILAYAH SAMPEL AKI		100%	100%	678.310.000	100%	1.215.582.295	100%	1.313.633.426	100%	1.230.582.295	100%	1.220.384.127	100%	DINAS PERIKANAN
MISI 2	MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERJATI DIRI MELAYU																
	TUJUAN	MEMBANGUN MASYARAKAT DUMAI YANG PRODUKTIF, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	IND EKS	74,4	74,826		75,04		75,254		75,468		75,683		75,683	
	SASARAN	MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA DUMAI	INDEKS KESEHATAN	IND EKS	0,784	0,785		0,786		0,786		0,787		0,788		0,788	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1.02.02	1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		78%	80%	73.563.246.604	82%	77.097.894.249	84%	75.907.855.531	86%	75.566.256.089	86%	75.776.191.415	86%	DINKES DAN RSUD
1.02.03	2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		80%	82%	350.000.000	83%	385.000.000	84%	395.500.000	85%	406.000.000	85%	416.500.000	85%	DINKES DAN RSUD

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			PUSKESMAS DAN JARINGANNYA SESUAI STANDAR														
			PRESENTASE KETERSEDIAAN TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT SESUAI STANDAR		87%	88.3% 1.230.821.645	90%	2.071.014.225	92%	1.270.000.000	94%	1.509.818.534	96%	1.524.767.962	96%	DINKES DAN RSUD	
1.02.04	3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PERSENTASE FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN (APOTIK DAN TOKO OBAT) YANG MEMENUHI STANDAR DAN PERSYARATAN PERIZINAN		33,34%	49% 1.255.926.044	49%	1.381.518.648	49%	1.516.870.513	49%	1.665.707.565	49%	1.829.378.321	49%	DINKES DAN RSUD	
1.02.05	4	PROGRAM PEMBERDAYAA	RASIO POSYANDU		4,68	4,68 850.000.000	4,68	935.000.000	4,68	1.028.500	4,68	1.131.350	4,68	1.244.485.000	4,68	DINKES DAN RSUD	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
		N MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PER 1000 BALITA								.000		.000				
2.14.02	5	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH (DINAS/BADAN) YANG MENYUSUN DAN MEMANFAATKAN RANCANGAN INDUK PENGENDALIAN PENDUDUK		0%	40%	275.000.000	50,00%	511.500.000	60,00%	516.103.500	70,00%	520.748.432	80,00%	525.870.335	80,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			PERSENTASE PERANGKAT DAERAH (DINAS/BADAN) YANG BERPERAN AKTIF DALAM PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI KAMPUNG KB		36%	50%	275.000.000	51%	511.500.000	52%	516.103.500	53%	520.748.431	54%	525.000.000	54%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03	6	PROGRAM PEMBINAAN	ANGKA KELAHIRA		4,90%	2,56%	345.000.000	2,54%	540.000.000	2,52%	543.000.000	2,50%	553.304.700	2,48%	548.000.000	2,48%	DINAS PENGENDALIAN

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
		KELUARGA BERENCANA (KB)	N TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/TFR) PER WUS USIA 15-49 TAHUN								00		64		00		N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			ASFR 15-19		14,62%	14,00%	34500000	12,67%	540000000	11,30%	543.000.000	10,00%	553.304.764	9,80%	548.000.000	9,80%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			UKP		22 USIA	22 USIA	34500000	22 USIA	537500000	22 USIA	545.643.500	22 USIA	553.304.764	22 USIA	548.313.520	22 USIA	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	CAKUPAN KELOMPOK KEGIATAN YANG MELAKUKAKAN PEMBINAAN KELUARGA MELALUI 8 FUNGSI KELUARGA		72%	75%	1.139.940.000	78%	840.000.000	80%	847.560.000	82%	855.188.040	85%	862.884.732	85%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	SASARAN	MENINGKATKAN DERAJAT PENDIDIKAN MASYARAKAT	INDEKS PENDIDIKAN	INDEKS	0,7	0,706		0,709		0,712		0,715		0,718	0,718		

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
		KOTA DUMAI															
1.01.02	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	TERPENUHNYA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN		N/A	100 %	97.812.116.750	100 %	109.160.145.280	100 %	108.546.903.184	100 %	114.420.868.491	100 %	114.317.921.650	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.03	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PERSENTASE TERSUSUNNYA DAN TERLAKSANANYA KURIKULUM MUATAN LOKAL		N/A	100 %	500.000.000	100 %	175.000.000	100 %	1.875.000.000	100 %	1.875.000.000	100 %	1.875.000.000	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.04	3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PERSENTASE KEBUTUHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP SATUAN PENDIDIKAN		N/A	0	0	0	0	100 %	400.000.000	100 %	400.000.000	0	0	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.05	4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN MEDIA		N/A	100	250.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	700.000.000	100	500.000.000	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			PEMBELAJARAN														
1.01.06	5	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	PERSENTASE TERSUSUNNYA KAMUS BAHASA DAERAH		N/A	0	0	0	0	0	0	95%	384.000.000	0	0	95%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.08.02	6	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERSENTASE ARG DI KOTA DUMAI (%)		1,07%	10%	425.380.970	15%	617.792.330	20%	650.000.000	25%	662.500.000	30%	662.500.000	30%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03	7	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	MENINGKATNYA PERLINDUNGAN BAGI PEREMPUAN (%)		10%	20%	271.279.590	30%	425.000.000	40%	465.000.000	50%	480.000.000	60%	480.000.000	60%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04	8	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PERSENTASE LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		55%	70%	66.182.730	80%	275.000.000	90%	305.000.000	95%	316.000.000	100%	316.000.000	100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05	9	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN	MENINGKATNYA PEMANFAATAN DATA		20%	30%	83.725.248	35%	195.000.000	40%	201.000.000	45%	203.000.000	50%	203.000.000	50%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
		ANAK	TERPILAH GENDER DAN ANAK (%)														DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06	10	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	MENINGKATNYA CAPAIAN KOTA LAYAK ANAK (%)		65%	70%	561.120.995	75%	635.000.000	80%	661.000.000	85%	672.000.000	90%	672.000.000	90%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07	11	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	MENINGKATNYA PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (%)		25%	40%	243.776.910	50%	295.000.000	60%	325.000.000	70%	339.000.000	80%	339.000.000	80%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.19.02	12	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PERSENTASE PEMUDA YANG MENGIKUTI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		60%	70%	1.540.000.000	75%	1.119.200.000	80%	1.208.736.000	85%	1.305.434.880	90%	1.409.869.670	90%	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.03	13	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAA	PERSENTASE DOKUMEN /LAPORAN PELAKSAN		60%	70%	4.120.000.000	75%	2.446.200.000	80%	2.641.896.000	85%	2.853.247.680	90%	2.718.122.625	90%	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
		N	AAN, JUMLAH CABOR YANG DIKUTI														
2.23.02	14	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG BERBASIS SNP (STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN)		20% (10 PERPUS TAKAAN)	1.020.000.000	40% (10 PERPUS TAKAAN)	1.271.600.000	60% (10 PERPUS TAKAAN)	1.366.600.000	80% (10 PERPUS TAKAAN)	1.336.600.000	100% (10 PERPUS TAKAAN)	1.336.600.000	100%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.03	15	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	PERSENTASE NASKAH KUNO YANG DIAKUISISI / SIALIHMEDIAKAN (DIGITALISASI) / TERDAFTAR YANG ADA DI WILAYAH KOTA DUMAI		0%	20.000.000	40%	120.000.000	60%	200.000.000	80%	320.000.000	100%	320.000.000	100%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	SASARAN	MENINGKATNYA STANDARD	INDEKS PENGELUA	IND EKS	0,751	0,756	0,759	0,762	0,764	0,767	0,767	0,767	0,767	0,767	0,767		

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
		HIDUP LAYAK MASYARAKAT KOTA DUMAI	RAN														
3.30.04	1	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE PENGAWASAN DISTRIBUSI BAHAN POKOK MASYARAKAT DAN BARANG PENTING DI 7 KECAMATAN		100%	100%	275.000.000	100%	288.000.000	100%	290.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	DINAS PERDAGANGAN
	SASARAN	MENINGKATNYA PENERAPAN BUDAYA MELAYU	PERSENTASE PENERAPAN 4 JENIS BUDAYA MELAYU	PERSENTASE	25	50		50		75		75		100		100	
2.22.02	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	PERSENTASE PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN		N/A	95	3.617.125.184	95	4.633.239.322	95	5.033.125.184	95	5.833.125.184	95	5.833.125.184	95	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.03	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN	PERSENTASE PARTISIPASI		N/A	0	0	95	550.000.000	95	445.805.793	95	550.000.000	95	550.000.000	95	DINAS PENDIDIKAN DAN

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
		TRADISIONAL	SI DAN PELAKSANAAN EVENT SENI BUDAYA TRADISIONAL														KEBUDAYAAN
2.22.05	3	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	PERSENTASE BENDA, SITUS DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DITETAPKAN MELALUI PERATURAN KEPALA DAERAH		N/A	75	400.000.000	80	425.000.000	85	375.000.000	95	425.000.000	95	440.936.406	95	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.06	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	PERSENTASE MUSEUM TEMATIK YANG DIBANGUN		N/A	0	0	25	150.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
MISI 3 MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG BERKUALITAS																	
	TUJUAN	MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR DAN RUANG KOTA DUMAI YANG BERKUALITAS DAN	INDEKS INFRASTRUKTUR DAERAH	IND EKS	39,27	52,46		59,26		64,41		69,3		74,21		74,21	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
		BERWAWASAN LINGKUNGAN															
	SASARAN	MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR KOTA	TINGKAT PELAYANAN INFRASTRUKTUR DAERAH	%	32,71	60,77	66,33	71,18	75,51	80,01	80,01						
1.03.02	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PERSENTASE PENINGKATAN LUAS WILAYAH BANJIR YANG DITANGANI		3,79%	7%	34.509.980.115	14,00%	27.500.000.000	21,00%	28.250.000.000	28,00%	33.275.000.000	35,00%	36.602.500.000	35,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03	2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PERSENTASE PENDUDUK TERLAYANI SPAM JARINGAN PERPIPAAN		9,32%	17,36%	7.150.000.000	29,68%	10.000.000.000	37,38%	10.000.000.000	43,51%	10.000.000.000	49,50%	10.000.000.000	49,50%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PERSENTASE RUMAH YANG MENDAPAT AKSES LAYAK SANITASI		N/A	100%	400.000.000	100,00%	3.000.000.000	100,00%	3.000.000.000	100,00%	5.000.000.000	100,00%	5.000.000.000	100,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06	4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	PERSENTASE PENGELOLAAN DAN		N/A	20%	32.608.766.872	40%	18.000.000.000	60%	20.000.000.000	80%	25.000.000.000	100,00%	24.000.000.000	100,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
		N SISTEM DRAINASE	PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE														RUANG
1.03.07	5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	PERSENTASE PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		100%	100%	3.680.000.000	100,00%	7.000.000.000	100,00%	7.000.000.000	100,00%	7.000.000.000	100,00%	7.000.000.000	100,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08	6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PERSENTASE PENINGKATAN PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		10%	10%	99.767.688.000	15,00%	57.000.000.000	20,00%	24.000.000.000	25,00%	27.000.000.000	30,00%	27.000.000.000	30,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.09	7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PERSENTASE PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		N/A	14,29%	429.740.000	42,86%	2.500.000.000	71,43%	5.000.000.000	85,71%	5.000.000.000	100,00%	5.000.000.000	100,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10	8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PERSENTASE PENINGKATAN JALAN DALAM KONDISI BAIK		2%	2%	80.946.285.658	4,00%	65.000.000.000	8,00%	65.000.000.000	12,00%	94.000.000.000	16,00%	94.000.000.000	16,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11	9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PERSENTASE PENGEMBANGAN		100%	100%	1.031.291.550	100,00%	3.900.000.000	100,00%	4.000.000.000	100,00%	4.100.000.000	100,00%	3.800.000.000	100,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			JASA KONSTRUKSI														RUANG
1.04.02	10	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE PENYEDIAAN REHABILITASI, RUMAH KHUSUS DAN PSU BAGI KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA		N/A	100%	960.000.000	100%	1.925.086.200	100%	2.015.800.000	100%	2.653.426.202	100%	2.069.829.600	100%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
1.04.03	11	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PERSENTASE LUAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH YANG DITANGANI		N/A	28,92%	4.394.111.087	46,55%	4.010.990.246	62,15%	4.226.452.542	85,18%	5.054.360.852	100%	4.575.752.378	100%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
1.04.04	12	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PERSENTASE PENINGKATAN PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN		N/A	9%	887.661.450	19%	2.500.000.000	33%	2.900.000.000	52%	3.300.000.000	74%	3.700.000.000	74%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DILUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA DALAM BENTUK RUMAH LAYAK HUNI														
1.04.05	13	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PERSENTASE PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		N/A	35%	11.958.984.590	48%	7.104.563.576	62%	6.316.790.529	86%	6.842.521.387	100%	7.004.893.963	100%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
1.04.06	14	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN	PERSENTASE PENERBITAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI PENGEMBANGAN		N/A	20%	300.000.000	40%	500.000.000	60%	500.000.000	80%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
		DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PERUMAHAN														
2.15.02	15	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PRESENTASE TERSEDIA NYA PRASANA PERHUBUNGAN DARAT YANG LAYAK		95%	95%	30.269.416.000	95%	27.500.000.000	95%	27.916.518.711	95%	28.500.000.000	95%	28.500.000.000	95%	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03	16	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	PRESENTASE TERSEDIA ANYA PRASANA PERHUBUNGAN LAUT YANG LAYAK SESUAI KEWENANGAN KOTA		20%	20%	40.000.000	20%	150.000.000	20%	150.000.000	20%	150.000.000	20%	150.000.000	20%	DINAS PERHUBUNGAN
	SASARAN	TERWUJUDNYA PENATAAN RUANG DAERAH YANG KONSISTEN	PERSENTASE PEMANFAAN RUANG YANG SESUAI DENGAN ATURAN	%	10	20		30		45		60		75			

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1.03.12	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PERSENTASE PENINGKATAN KESESUAIAN PENATAAN RUANG		54,99%	57,49%	4.500.000.000	59,99%	5.500.000.000	62,49%	10.000.000.000	64,99%	10.000.000.000	67,49%	10.000.000.000	67,49%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.10.04	2	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	PERSENTASE PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		N/A	20%	332.338.550	40%	715.000.000	60%	786.500.000	80%	865.150.000	100%	951.665.000	100%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
2.10.10	3	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	PERSENTASE PENATAGUNAAN TANAH		N/A	20%	300.000.000	40%	1.155.000.000	60%	1.270.500.000	80%	1.397.550.000	100%	1.537.305.000	100%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	SASARAN	MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGANAN BENCANA	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	IND EKS	61	69,97		70,19		70,41		70,41		70,41		70,41	
			CAKUPAN PELAYANAN PERSAMPAHAN	%	51	57		63		69		75		81		81	
			PENURUNAN EMISI	GGC O2-	N/A	7,195,43		7,194,06		6,826,22		6,758,14		6,573,53		6,573,53	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			GAS RUMAH KACA	E													
2.11.02	1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		65%	70%	800.000.000	75%	977.500.000	80%	977.500.000	85%	977.500.000	85%	977.500.000	85%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		65%	70%	1.205.000.000	75%	1.918.000.000	80%	1.918.000.000	85%	2.162.500.000	85%	2.162.500.000	85%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04	3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PERSENTASE PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI		65%	70%	3.800.000.000	70%	5.200.000.000	72%	5.200.000.000	75%	5.500.000.000	80%	5.500.000.000	80%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05	4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	PERSENTASE PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA		65%	70%	110.000.000	70%	271.325.000	72%	271.325.000	75%	286.745.627	80%	286.745.627	80%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
		(LIMBAH B3)	LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN														
2.11.06	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		65%	70%	210.000.000	73%	327.750.000	75%	327.750.000	80%	330.000.000	85%	330.000.000	85%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08	6	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERSENTASE PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		65%	70%	250.000.000	73%	287.500.000	75%	287.500.000	80%	350.000.000	85%	350.000.000	85%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			AT														
2.11.09	7	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERSENTASE PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		65%	70%	200.000.000	75%	230.000.000	75%	250.000.000	80%	280.000.000	85%	280.000.000	85%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10	8	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE MONITORING EVALUASI TERHADAP PENGADUAN MASYARAKAT		65%	70%	130.000.000	75%	201.250.000	75%	201.250.000	80%	201.250.000	85%	201.250.000	85%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11	9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE TIMBULAN SAMPAH YANG TERTANGANI		57%	57%	12.580.000.000	65,70%	13.966.750.000	65,70%	14.097.850.000	71,40%	14.097.850.000	71,40%	14.097.850.000	71,40%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1.03.04	10	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	PERSENTASE PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		N/A	100%	6.300.000.000	100,00%	10.000.000.000	100,00%	10.000.000.000	100,00%	12.000.000.000	100,00%	12.000.000.000	100,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			PERSENTASE 4 JENIS BENCANA DAERAH YANG DITANGANI	%	60	75		80		85		90		95		95	
1.05.03	1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		85%	85%	6.865.643.559	85%	5.361.488.534	85%	5.323.400.303	90%	5.279.420.350	90%	5.038.155.715	90%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04	2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PERSENTASE PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN		85%	85%	1.387.851.073	85%	3.266.073.444	85%	3.262.971.568	90%	3.257.135.870	90%	3.257.135.870	90%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			NON KEBAKARAN														
1.06.06	3	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KAB/KOTA YANG TERTANGANI		100%	100 PER SEN	2.000.000.000	100 PER SEN	2.300.000.000	100 PER SEN	2.300.000.000	100 PER SEN	2.300.000.000	100 PER SEN	2.360.000.000	100 PERS EN	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MISI 4	MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KEPEREMINTAHAN DAERAH YANG BAIK																
	TUJUAN	MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	IND EKS	C	CC		B		B		B		B		B	
	SASARAN	MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH	OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SETIAP TAHUN,	OPI NI	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	
			NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINT	NIL AI	B	B		B		B		B		B		B	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			AH DAERAH														
			INDEKS MANAJEMEN RESIKO	IND EKS	2	2		3		3		3		3		3	
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DAERAH		100%	100%	55.174.642.138	100%	51.369.484.622	100%	46.246.000.000	100%	50.090.677.449	100%	49.073.677.449	100%	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
5.01.02	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KESELARASAN PROGRAM RKPD DENGAN PROGRAM RPJMD		N/A	100%	1.525.000.000	100%	1.600.000.000	100%	1.600.000.000	100%	1.600.000.000	100%	1.600.000.000	100%	
			PERSENTASE RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DITETAPKAN SESUAI DENGAN		N/A	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			PERATURAN PERUNDANGAN														
5.01.03	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KEGIATAN PRIORITAS KEPALA DAERAH YANG DIIMPLEMENTASIKAN		N/A	100 %	1.847.281.449	100 %	3.150.000.000	100 %	3.150.000.000	100 %	3.150.000.000	100 %	3.150.000.000	100%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
			PERSENTASE SINKRONISASI RENCANA PEMBANGUNAN KOTA DUMAI TERHADAP PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI		N/A	100 %	1.847.281.448	100 %	3.150.000.000	100 %	3.150.000.000	100 %	3.150.000.000	100 %	3.150.000.000	100%	
5.02.02	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		100%	100 %	24.670.000.000	100 %	59.670.000.000	100 %	60.249.966.984	100 %	61.341.084.695	100 %	61.341.084.695	100%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
5.02.03	5	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PERSENTASE ASET YANG DILAPORKAN DENGAN TERTIB		100%	100%	3.440.000.000	100%	3.440.000.000	100%	3.440.000.000	100%	3.440.000.000	100%	3.440.000.000	100%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04	6	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN DAERAH KOTA		100%	100,00%	4.343.815.460	100%	4.410.898.405	100%	4.406.273.155	100%	4.445.314.060	100%	4.422.071.905	100%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
6.01.02	7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		100%	100%	2.587.882.000	100%	3.345.000.000	100%	4.252.110.842	100%	4.252.110.842	100%	4.252.110.842	100%	INSPEKTORAT
6.01.03	8	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PERSENTASE PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		100%	100%	2.347.818.000	100%	2.590.000.000	100%	2.900.000.000	100%	2.900.000.000	100%	2.900.000.000	100%	INSPEKTORAT
	SASARAN	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	IND EKS	81	81		81		82		82		82		82	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1.05.02	1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	100%	1.390.798.000	100%	1.390.800.000	100%	9.395.800.000	100%	1.405.850.000	100%	1.401.350.000	100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.06.07	2	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	PERSENTASE PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA		100%	100 PER SEN	550.000.000	100 PER SEN	550.000.000	100 PER SEN	550.000.000	100 PER SEN	550.000.000	100 PER SEN	570.000.000	100 PERS EN	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.12.02	3	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	CAKUPAN PENDUDUK YANG TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		0%	82%	677.000.000	85%	688.000.000	87%	777.000.000	88%	847.000.000	90%	847.000.000	90%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.03	4	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	CAKUPAN PENDUDUK YANG TERTIB ADMINISTRASI PENCATATAN SIPIL		N/A	80%	292.000.000	85%	283.000.000	87%	387.000.000	88%	407.000.000	90%	387.000.000	90%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.04	5	PROGRAM PENGELOLAAN	CAKUPAN KERJASAM		13%	56%	390.000.000	69%	380.000.000	81%	415.000.000	94%	462.463.811	100%	439.463.811	100%	DINAS KEPENDUDUK

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
		INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	A PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN														AN DAN CATATAN SIPIL
2.12.05	6	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PERSENTASE DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN YANG DISAJIKAN		33%	33%	60.000.000	67%	60.000.000	67%	80.000.000	100%	90.000.000	100%	100.000.000	100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.24.02	7	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		14%	19%	968.320.000	38%	836.147.162	58%	973.000.000	77%	830.000.000	100%	805.000.000	100%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03	8	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DI KOTA DUMAI		0%	0%	0	40%	473.000.000	60%	347.720.000	80%	493.198.000	100%	518.198.000	100%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
4.01.02	9	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERA	PERSENTASE MENINGKATNYA		100%	100%	23.007.271.000	100%	28.559.446.000	100%	55.650.000.000	100%	32.714.446.000	100%	34.191.446.000	100%	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
		AN RAKYAT	CAPAIAN KINERJA DI BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT														
5.06.02	10	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	PERSENTASE PENGELOLAAN DAERAH PERBATASAN		0%	100% 320.412.558	100% 320.412.558	100% 320.412.558	100% 320.412.558	100% 320.412.558	100% 320.412.558	100% 320.412.558	100% 320.412.558	100% 320.412.558	100%		SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
4.02.02	11	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		100%	100% 12.137.360.729	100% 13.307.727.595	100% 14.341.187.083	100% 15.133.119.070	100% 15.133.119.070	100% 15.133.119.070	100% 15.133.119.070	100% 15.133.119.070	100%		SEKRETARIAT DPRD	
5.03.02	12	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PERSENTASE PENEMPATAN ASN SESUAI DENGAN KOMPETENSI, PEMENUHAN KEBUTUHAN		92,78%	93,78% 2.593.509.120	94,48% 2.543.509.120	95,18% 2.543.509.120	95,88% 2.543.509.120	95,88% 2.543.509.120	96,58% 2.543.509.120	96,58% 2.543.509.120	96,58% 2.543.509.120	96,58%		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			N APARATUR SESUAI FORMASI, DAN PEGAWAI YANG MENCAPAI TARGET KINERJA DENGAN NILAI BAIK														
5.04.02	13	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PERSENTASE APARATUR YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS, MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL		3%	4%	3.630.383.201	5%	4.348.711.505	6%	4.471.472.898	7%	4.774.929.373	8%	4.802.429.373	8%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
7.01.02	14	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI BARAT		100%	100%	217.500.000	100%	563.114.324	100%	497.951.176	100%	640.000.000	100%	560.000.000	100%	KECAMATAN DUMAI BARAT

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
7.01.03	15	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI BARAT		100%	100%	4.055.000.000	100%	4.920.000.000	100%	4.920.000.000	100%	4.940.000.000	100%	4.250.409.014	100%	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.04	16	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI BARAT		100%	100%	10.000.000	100%	600.000.000	100%	500.000.000	100%	612.894.294	100%	600.000.000	100%	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.05	17	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATA	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATA		100%	100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	KECAMATAN DUMAI BARAT

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			N DUMAI BARAT														
7.01.02	18	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI TIMUR	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI TIMUR		100%	100% 170.800.000	100% 695.000.000	100% 695.000.000	100% 695.000.000	100% 695.000.000	100% 695.000.000	100% 695.000.000	100% 695.000.000	100%		KECAMATAN DUMAI TIMUR	
7.01.03	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI TIMUR		100%	100% 5.050.000.000	100% 5.450.000.000	100% 5.450.000.000	100% 5.450.000.000	100% 5.450.000.000	100% 5.450.000.000	100% 5.450.000.000	100% 5.450.000.000	100%		KECAMATAN DUMAI TIMUR	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
7.01.04	20	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI TIMUR		100%	100%	10.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	170.000.000	100%	170.000.000	100%	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7.01.05	21	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI TIMUR		100%	100%	80.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7.01.02	22	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK UNSUR KEWILAYAHAN		100%	100%	70.000.000	100%	73.859.000	100%	75.000.000	100%	78.000.000	100%	78.000.000	100%	KECAMATAN BUKIT KAPUR

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			KECAMATAN BUKIT KAPUR														
7.01.03	23	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN BUKIT KAPUR		100%	100% 7.233.000.000	100% 8.200.486.189	100% 8.235.800.012	100% 8.378.797.513	100% 8.378.797.513	100%						KECAMATAN BUKIT KAPUR
7.01.04	24	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN BUKIT KAPUR		100%	0%	100% 10.000.000	100% 15.000.000	100% 20.000.000	100% 20.000.000	100%						KECAMATAN BUKIT KAPUR

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
7.01.05	25	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN BUKIT KAPUR	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN BUKIT KAPUR		100%	100%	126.000.000	100%	160.000.000	100%	175.000.000	100%	190.000.000	100%	190.000.000	100%	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7.01.02	26	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA		100%	100%	250.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.03	27	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN		100%	100%	5.090.000.000	100%	5.500.000.000	100%	5.500.000.000	100%	5.500.000.000	100%	5.500.000.000	100%	KECAMATAN DUMAI KOTA

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			KECAMATAN DUMAI KOTA														
7.01.04	28	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA		100%	100% 20.000.000	100% 125.000.000	100% 125.000.000	100% 125.000.000	100% 125.000.000	100% 125.000.000	100% 125.000.000	100% 125.000.000	100%	KECAMATAN DUMAI KOTA		
7.01.05	29	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA		100%	100% 135.000.000	100% 150.000.000	100% 150.000.000	100% 150.000.000	100% 150.000.000	100% 150.000.000	100% 150.000.000	100% 150.000.000	100%	KECAMATAN DUMAI KOTA		

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
7.01.02	30	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI SELATAN		100%	100%	167.000.000	100%	433.720.000	100%	433.720.000	100%	433.720.000	100%	433.720.000	100%	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7.01.03	31	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI SELATAN		100%	100%	5.100.000.000	100%	5.271.500.000	100%	5.271.500.000	100%	5.271.500.000	100%	5.271.500.000	100%	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7.01.04	32	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN		100%	100%	10.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	KECAMATAN DUMAI SELATAN

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			N DUMAI SELATAN														
7.01.05	33	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN DUMAI SELATAN	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN DUMAI SELATAN		100%	100% 150.000.000	100% 208.175.810	100% 208.175.810	100% 208.175.810	100% 208.175.810	100% 208.175.810	100% 208.175.810	100% 208.175.810	100%	KECAMATAN DUMAI SELATAN		
7.01.02	34	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN MEDANG KAMPAI	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN MEDANG KAMPAI		100%	100% 128.500.000	100% 580.000.000	100% 580.000.000	100% 580.000.000	100% 595.000.000	100% 595.000.000	100% 595.000.000	100% 595.000.000	100%	KECAMATAN MEDANG KAMPAI		

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
7.01.03	35	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		100%	100%	4.098.000.000	100%	6.300.000.000	100%	6.300.000.000	100%	6.600.000.000	100%	6.600.000.000	100%	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7.01.04	36	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		100%	100%	10.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7.01.05	37	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN		100%	100%	130.000.000	100%	354.000.000	100%	354.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	KECAMATAN MEDANG KAMPAI

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			N MEDANG KAMPAI														
7.01.02	38	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		100%	100% 400.000.000	100% 1.356.260.037	100% 1.368.871.438	100% 1.392.597.827	100% 1.392.597.827	100% 1.392.597.827	100% 1.392.597.827	100%		KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		
7.01.03	39	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		100%	100% 6.260.000.000	100% 6.714.598.872	100% 6.777.035.642	100% 6.894.500.718	100% 6.894.500.718	100% 6.894.500.718	100% 6.894.500.718	100%		KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
7.01.04	40	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		100%	100%	200.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.05	41	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN		100%	100%	400.000.000	100%	514.456.693	100%	515.985.919	100%	518.862.922	100%	518.862.922	100%	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
8.01.02	42	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PERSENTASE PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		100%	100%	250.000.000	100%	280.000.000	100%	340.000.000	100%	340.000.000	100%	340.000.000	100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
8.01.03	43	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PERSENTASE PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		100%	100%	2.469.562.800	100%	2.499.562.800	100%	2.802.686.002	100%	2.599.562.800	100%	2.599.562.800	100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04	44	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		100%	100%	150.000.000	100%	277.314.068	100%	777.357.519	100%	786.760.272	100%	786.760.272	100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05	45	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN		100%	100%	700.000.000	100%	710.000.000	100%	770.000.000	100%	770.000.000	100%	770.000.000	100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
		EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	ANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA														
8.01.06	46	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PERSENTASE PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		100%	100% 950.000.000	100% 1.170.000.000	100% 1.310.000.000	100% 1.440.000.000	100% 1.440.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			INDEKS LAYANAN SPBE	IND EKS	2,25	2,83	2,85	2,9	2,96	3	3						
2.16.02	1	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PERSENTASE INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		80%	80% 3.335.000.000	85% 3.990.000.000	90% 4.062.000.000	95% 4.220.000.000	100% 4.072.500.000	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
2.16.03	2	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI		13%	13%	5.700.000.000	19%	6.015.000.000	22%	5.915.000.000	19%	5.920.000.000	27%	6.000.000.000	27%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20.02	3	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PERSENTASE PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		75%	75%	350.000.000	75%	905.000.000	80%	952.000.000	80%	1.008.300.000	80%	1.068.470.000	80%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.21.02	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		75%	75%	350.000.000	80%	550.000.000	80%	615.000.000	80%	682.000.000	80%	777.000.000	80%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
5.05.02	5	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE HASIL KELITBANGAN YANG IMPLEMENTATIF		N/A	20%	720.000.000	25%	2.340.000.000	30%	2.340.000.000	35%	2.340.000.000	40%	2.340.000.000	40%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Setelah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dijabarkan pada BAB III Gambaran Keuangan Daerah, berikutnya dilakukan pengalokasian sumber penerimaan tersebut sesuai dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah, sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kota Dumai Tahun 2021 – 2026

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Kapasitas Riil Keuangan	990.343.686.958,02	1.133.064.836.997,78	1.114.665.295.966,97	1.170.851.679.303,61	1.174.851.679.303,61
Belanja	1.783.319.523.803	1.931.829.922.391	1.947.600.754.308	1.978.774.709.410	1.983.774.709.410
Belanja Operasional	1.293.228.081.785	1.436.454.312.549	1.478.578.381.006	1.478.126.201.536	1.482.126.201.536
Belanja Pegawai	783.692.754.175	787.276.217.763	790.108.458.653	791.617.610.437	792.617.610.437
BelanjaBarang dan jasa	470.252.244.940	607.689.227.156	615.642.922.665	640.203.171.430	643.203.171.430
Belanja bunga	0	0	0	0	0
Belanja subsidi	0	0	0	0	0
Belanja hibah	36.763.082.670	38.968.867.630	70.306.999.688	43.785.419.669	43.785.419.669
Belanja bantuan sosial	2.520.000.000	2.520.000.000	2.520.000.000	2.520.000.000	2.520.000.000
Belanja Modal	470.091.442.018	475.375.609.842	449.022.373.302	480.648.507.874	481.648.507.874
BelanjaTidak Terduga	20.000.000.000,00	20.000.000.000	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
Belanja Transfer	0	0	0	0	0

Untuk menterjemahkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan kedalam bentuk yang lebih operasional, maka indikasi rencana program prioritas perlu disusun sesuai dengan kebutuhan pendanaan (anggaran) yang diperlukan. Indikasi program ini disusun dalam bentuk rencana program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) dan diharapkan akan dapat dicapai selama lima tahun. Perkiraan kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kapasitas keuangan daerah setelah dikurangi dengan belanja wajib untuk membiayai gaji pegawai dan kegiatan rutin pemerintahan. Namun demikian, untuk program-program tertentu kebutuhan pendanaan dari sumber pemerintah lainnya seperti APBD Provinsi dan APBN juga ikut dimanfaatkan untuk mendorong proses pembangunan Kota Dumai secara maksimal. Hal ini penting artinya untuk mewujudkan keterpaduan dan sinergi antara proses pembangunan Kota Dumai dengan pembangunan Provinsi Riau serta pembangunan nasional Indonesia secara keseluruhan.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala OPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala OPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek atrategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis serta dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan).Tabel 7.2 memberikan rincian rencana program prioritas kebutuhan pendanaan Kota Dumai untuk periode 2021-2026.

Tabel 7.2
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kota Dumai Tahun 2021 - 2026

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
PENDIDIKAN																
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN BIDANG KEBUDAYAAN	100%	100%	262.747.808.200	100%	263.812.501.876	100%	265.444.149.369	100%	264.216.948.207	100%	265.287.958.642	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	TERPENUHINYA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN	N/A	100%	97.812.116.750	100%	109.160.145.280	100%	108.546.903.184	100%	114.420.868.491	100%	114.317.921.650	100%	
1.01.03	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PERSENTASE TERSUSUNNYA DAN TERLAKSANANYA KURIKULUM MUATAN LOKAL	N/A	100%	500.000.000	100%	175.000.000	100%	1.875.000.000	100%	1.875.000.000	100%	1.875.000.000	100%	
1.01.04	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PERSENTASE KEBUTUHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP SATUAN PENDIDIKAN	N/A	0	0	0	0	100%	400.000.000	100%	400.000.000	0	0	100%	
1.01.05	5	PROGRAM PENGENDALIAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN	N/A	100	250.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	700.000.000	100	500.000.000	100	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		PERIZINAN PENDIDIKAN	MEDIA PEMBELAJARAN													
1.01.06	6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	PERSENTASE TERSUSUNNYA KAMUS BAHASA DAERAH	N/A	0	0	0	0	0	0	95%	384.000.000	0	0	95%	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
KEBUDAYAAN																
2.22.02	7	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	PERSENTASE PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN	N/A	95	3.617.125.184	95	4.633.239.322	95	5.033.125.184	95	5.833.125.184	95	5.833.125.184	95	
2.22.03	8	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	PERSENTASE PARTISIPASI DAN PELAKSANAAN EVENT SENI BUDAYA TRADISIONAL	N/A	0	0	95	550.000.000	95	445.805.793	95	550.000.000	95	550.000.000	95	
2.22.05	9	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	PERSENTASE BENDA, SITUS DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DITETAPKAN MELALUI PERATURAN KEPALA DAERAH	N/A	75	400.000.000	80	425.000.000	85	375.000.000	95	425.000.000	95	440.936.406	95	
2.22.06	10	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	PERSENTASE MUSEUM TEMATIK YANG DIBANGUN	N/A	0	0	25	150.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	
	TOTAL					365.327.050.134		379.405.886.478		382.719.983.530		388.954.941.882		388.954.941.882		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
KESEHATAN																
																DINAS KESEHATAN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (DINAS KESEHATAN)	100%	100%	76.090.000.000	100%	83.155.750.713	100%	85.519.825.784	100%	88.258.308.362	100%	87.761.067.280	100%	
			PRESENTASE DUKUNGAN UNTUK ADMINISTRASI PENUNJANG URUSAN KESEHATAN PADA RSUD KOTA DUMAI	100%	100%	186.448.006.336	100%	205.979.915.896	100%	212.016.946.744	100%	215.675.542.826	100%	215.678.387.767	100%	
1.02.02	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (DINAS KESEHATAN)	PERSENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (DINAS KESEHATAN)	78%	80%	73.563.246.604	82%	77.097.894.249	84%	75.907.855.531	86%	75.566.256.089	86%	75.776.191.415	86%	
			PRESENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	83%	85.7%	50.306.999.007	87%	57.275.580.973	89%	49.251.259.332	91%	47.312.316.122	93%	47.294.521.753	93%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.03	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA SESUAI STANDAR	80%	82%	350.000.000	83%	385.000.000	84%	395.500.000	85%	406.000.000	85%	416.500.000	85%	
			PRESENTASE KETERSEDIAAN TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT SESUAI STANDAR	87%	88.3%	1.230.821.645	90%	2.071.014.225	92%	1.270.000.000	94%	1.509.818.534	96%	1.524.767.962	96%	
1.02.04	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PERSENTASE FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN (APOTIK DAN TOKO OBAT) YANG MEMENUHI STANDAR DAN PERSYARATAN PERIZINAN	33,34%	49%	1.255.926.044	49%	1.381.518.648	49%	1.516.870.513	49%	1.665.707.565	49%	1.829.378.321	49%	
1.02.05	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	RASIO POSYANDU PER 1000 BALITA	4,68	4,68	850.000.000	4,68	935.000.000	4,68	1.028.500.000	4,68	1.131.350.000	4,68	1.244.485.000	4,68	
		TOTAL				390.094.999.636		428.281.674.704		426.906.757.904		431.525.299.498		431.525.299.498		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															DINAS PEKERJAAN	
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	100%	100%	21.391.440.782	100,00%	75.654.414.859	100,00%	70.289.987.647	100,00 %	59.841.206.411	100,00 %	57.813.706.411	100,00 %	UMUM DAN PENTATAAN RUANG
1.03.02	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PERSENTASE PENINGKATAN LUAS WILAYAH BANJIR YANG DITANGANI	3,79%	7%	34.509.980.115	14,00%	27.500.000.000	21,00%	28.250.000.000	28,00%	33.275.000.000	35,00%	36.602.500.000	35,00%	
1.03.03	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PERSENTASE PENDUDUK TERLAYANI SPAM JARINGAN PERPIPAAN	9,32%	17,36%	7.150.000.000	29,68%	10.000.000.000	37,38%	10.000.000.000	43,51%	10.000.000.000	49,50%	10.000.000.000	49,50%	
1.03.04	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	PERSENTASE PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	N/A	100%	6.300.000.000	100,00%	10.000.000.000	100,00%	10.000.000.000	100,00 %	12.000.000.000	100,00 %	12.000.000.000	100,00 %	
1.03.05	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENDAPAT AKSES LAYAK SANITASI	N/A	100%	400.000.000	100,00%	3.000.000.000	100,00%	3.000.000.000	100,00 %	5.000.000.000	100,00 %	5.000.000.000	100,00 %	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.06	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PERSENTASE PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	N/A	20%	32.608.766.872	40%	18.000.000.000	60%	20.000.000.000	80%	25.000.000.000	100,00%	24.000.000.000	100,00%	
1.03.07	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	PERSENTASE PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	100%	100%	3.680.000.000	100,00%	7.000.000.000	100,00%	7.000.000.000	100,00%	7.000.000.000	100,00%	7.000.000.000	100,00%	
1.03.08	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PERSENTASE PENINGKATAN PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	10%	10%	99.767.688.000	15,00%	57.000.000.000	20,00%	24.000.000.000	25,00%	27.000.000.000	30,00%	27.000.000.000	30,00%	
1.03.09	9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PERSENTASE PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	N/A	14,29%	429.740.000	42,86%	2.500.000.000	71,43%	5.000.000.000	85,71%	5.000.000.000	100,00%	5.000.000.000	100,00%	
1.03.10	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PERSENTASE PENINGKATAN JALAN DALAM KONDISI BAIK	2%	2%	80.946.285.658	4,00%	65.000.000.000	8,00%	65.000.000.000	12,00%	94.000.000.000	16,00%	94.000.000.000	16,00%	
1.03.11	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PERSENTASE PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	100%	100%	1.031.291.550	100,00%	3.900.000.000	100,00%	4.000.000.000	100,00%	4.100.000.000	100,00%	3.800.000.000	100,00%	
1.03.12	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PERSENTASE PENINGKATAN KESESUAIAN PENATAAN RUANG	54,99%	57,49%	4.500.000.000	59,99%	5.500.000.000	62,49%	10.000.000.000	64,99%	10.000.000.000	67,49%	10.000.000.000	67,49%	
	TOTAL					292.715.192.977		285.054.414.859		256.539.987.647		292.216.206.411		292.216.206.411		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																DINAS

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN															PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA BIDANG PERTANAHAN	100%	100%	7.772.36 3.711	100%	10.700.1 98.535	100%	10.537.9 55.694	100%	9.152.47 0.932	100%	9.426.03 3.432		100%
1.04.02	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE PENYEDIAAN REHABILITASI, RUMAH KHUSUS DAN PSU BAGI KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	N/A	100%	960.000. 000	100%	1.925.08 6.200	100%	2.015.80 0.000	100%	2.653.42 6.202	100%	2.069.82 9.600		100%
1.04.03	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PERSENTASE LUAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH YANG DITANGANI	N/A	28,92%	4.394.11 1.087	46,55%	4.010.99 0.246	62,15%	4.226.45 2.542	85,18%	5.054.36 0.852	100%	4.575.75 2.378	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.04.04	4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PERSENTASE PENINGKATAN PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DILUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA DALAM BENTUK RUMAH LAYAK HUNI	N/A	9%	887.661.450	19%	2.500.000.000	33%	2.900.000.000	52%	3.300.000.000	74%	3.700.000.000	74%	
1.04.05	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PERSENTASE PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	N/A	35%	11.958.984.590	48%	7.104.563.576	62%	6.316.790.529	86%	6.842.521.387	100%	7.004.893.963	100%	
1.04.06	6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PERSENTASE PENERBITAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI PENGEMBANG PERUMAHAN	N/A	20%	300.000.000	40%	500.000.000	60%	500.000.000	80%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
PERTANAHAN																

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.10.04	7	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	PERSENTASE PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	N/A	20%	332.338.550	40%	715.000.000	60%	786.500.000	80%	865.150.000	100%	951.665.000	100%	
2.10.10	8	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	PERSENTASE PENATAGUNAAN TANAH	N/A	20%	300.000.000	40%	1.155.000.000	60%	1.270.500.000	80%	1.397.550.000	100%	1.537.305.000	100%	
	TOTAL					26.905.459.388		28.610.838.557		28.553.998.765		29.815.479.373		29.815.479.373		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATPOL PP)	100%	100%	10.608.851.584	100%	11.306.695.677	100%	11.413.195.615	100%	11.612.915.413	100%	11.617.415.413	100%	
1.05.02	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	100%	1.390.798.000	100%	1.390.800.000	100%	9.395.800.000	100%	1.405.850.000	100%	1.401.350.000	100%	
	TOTAL					11.999.649.584		12.697.495.677		20.808.995.615		13.018.765.413		13.018.765.413		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (BPBD)	100%	100%	5.679.23 6.906	100%	6.115.43 5.076	100%	6.286.08 7.189	100%	6.579.46 5.476	100%	6.820.73 0.111	100%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03	2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	85%	85%	6.865.64 3.559	85%	5.361.48 8.534	85%	5.323.40 0.303	90%	5.279.42 0.350	90%	5.038.15 5.715	90%	
1.05.04	3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PERSENTASE PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN	85%	85%	1.387.85 1.073	85%	3.266.07 3.444	85%	3.262.97 1.568	90%	3.257.13 5.870	90%	3.257.13 5.870	90%	
TOTAL						13.932.7 31.538		14.742.9 97.054		14.872.4 59.060		15.116.0 21.696		15.116.0 21.696		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
SOSIAL																
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL DAN BIDANG PEMBERDAYAAN	100 PERSEN	100 PERSEN	5.525.00 0.000	100 PERSEN	5.977.90 0.881	100 PERSEN	6.109.38 1.730	100 PERSEN	6.151.74 2.508	100 PERSEN	5.806.74 2.508	100 PERSEN	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			MASYARAKAT													
1.06.02	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIBERDAYAKAN	100%	100 PERSEN	560.000.000	100 PERSEN	560.000.000	100 PERSEN	560.000.000	100 PERSEN	560.000.000	100 PERSEN	635.000.000	100 PERSEN	
1.06.03	3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	PERSENTASE WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG DIPULANGKAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA KE DESA/KELURAHAN ASAL	100%	100 PERSEN	80.000.000	100 PERSEN	80.000.000	100 PERSEN	80.000.000	100 PERSEN	80.000.000	100 PERSEN	100.000.000	100 PERSEN	
1.06.04	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS YANG TERTANGANI DI	NA	100 PERSEN	1.950.000.000	100 PERSEN	1.950.000.000	100 PERSEN	1.950.000.000	100 PERSEN	1.950.000.000	100 PERSEN	2.045.000.000	100 PERSEN	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			LUAR PANTI SOSIAL													
1.06.05	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PERSENTASE PMKS YANG MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	NA	100 PERSEN	1.705.000.000	100 PERSEN	1.775.000.000	100 PERSEN	1.775.000.000	100 PERSEN	1.775.000.000	100 PERSEN	1.850.000.000	100 PERSEN	
1.06.06	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KAB/KOTA YANG TERTANGANI	100%	100 PERSEN	2.000.000.000	100 PERSEN	2.300.000.000	100 PERSEN	2.300.000.000	100 PERSEN	2.300.000.000	100 PERSEN	2.360.000.000	100 PERSEN	
1.06.07	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	PERSENTASE PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	100%	100 PERSEN	550.000.000	100 PERSEN	550.000.000	100 PERSEN	550.000.000	100 PERSEN	550.000.000	100 PERSEN	570.000.000	100 PERSEN	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
2.13.04	8	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE KINERJA DAN MANAJEMEN APARATUR PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	NA	100 PERSEN	300.000.000	100 PERSEN	300.000.000	100 PERSEN	300.000.000	100 PERSEN	380.000.000	100 PERSEN	380.000.000	100 PERSEN	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.13.05	9	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE LPM YANG LEBIH PRODUKTIF DAN MANDIRI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	NA	100 PERSEN	1.480.000.000	100 PERSEN	1.480.000.000	100 PERSEN	1.480.000.000	100 PERSEN	1.605.000.000	100 PERSEN	1.605.000.000	100 PERSEN	
TOTAL						14.150.000.000		14.972.900.881		15.104.381.730		15.351.742.508		15.351.742.508		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
TENAGA KERJA																
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	100	100	7.255.337.546	100	8.550.859.568	100	8.097.524.692	100	7.812.265.767	100	7.812.265.767	100	
2.07.02	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENYUSUNAN RTKD	N/A	100	309.300.000	100	80.000.000	100	180.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	
2.07.03	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE BESARAN TENAGA KERJA YANG MENDAPAT PELATIHAN	N/A	10	5.043.745.054	10	4.360.000.000	10	4.360.000.000	10	4.650.000.000	10	5.650.000.000	10	
2.07.04	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE PENEMPATAN TENAGA KERJA	63	25	2.845.954.946	30	3.355.000.000	35	3.765.000.000	40	4.155.000.000	45	4.655.000.000	45	
2.07.05	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PEKERJA	87	80	1.406.000.000	85	1.495.000.000	90	1.595.000.000	95	1.595.000.000	100	2.095.000.000	100	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			DENGAN PERUSAHAAN													
	TOTAL					16.860.37.546		17.840.859.568		17.997.524.692		18.292.265.767		20.292.265.767		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	100%	100%	7.341.997.455	100%	8.073.691.311	100%	7.993.050.303	100%	8.084.767.987	100%	8.084.767.987	100%	
2.08.02	2	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERSENTASE ARG DI KOTA DUMAI (%)	1,07%	10%	425.380.970	15%	617.792.330	20%	650.000.000	25%	662.500.000	30%	662.500.000	30%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	MENINGKATNYA PERLINDUNGAN BAGI PEREMPUAN (%)	10%	20%	271.279.590	30%	425.000.000	40%	465.000.000	50%	480.000.000	60%	480.000.000	60%	
2.08.04	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PERSENTASE LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	55%	70%	66.182.730	80%	275.000.000	90%	305.000.000	95%	316.000.000	100%	316.000.000	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.05	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	MENINGKATNYA PEMANFAATAN DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK (%)	20%	30%	83.725.248	35%	195.000.000	40%	201.000.000	45%	203.000.000	50%	203.000.000	50%	
2.08.06	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	MENINGKATNYA CAPAIAN KOTA LAYAK ANAK (%)	65%	70%	561.120.995	75%	635.000.000	80%	661.000.000	85%	672.000.000	90%	672.000.000	90%	
2.08.07	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	MENINGKATNYA PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (%)	25%	40%	243.776.910	50%	295.000.000	60%	325.000.000	70%	339.000.000	80%	339.000.000	80%	
TOTAL						8.993.463.898		10.516.483.641		10.600.050.303		10.757.267.987		10.757.267.987		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
PANGAN																
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN DAN BIDANG PERTANIAN	90%	100%	11.769.575.378	100%	15.595.000.000	100%	15.685.000.000	100%	15.235.000.000	100%	15.505.000.000	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.02	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	PERSENTASE PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT	N/A	-	0	50%	750.000.000	-	0	-	0	50%	750.000.000	100%	
2.09.03	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PERSENTASE PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	44%	9%	3.828.100.000	9%	1.996.366.930	10%	2.188.000.000	10%	2.350.000.000	11%	1.308.000.000	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.09.04	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PERSENTASE PENYEDIAAN SARANA PENGEMBANGAN TANAMAN PEKARANGAN PADA DAERAH STUNTING	22%	9%	150.000.000	13%	200.000.000	16%	360.000.000	19%	450.000.000	22%	450.000.000	100%	
2.09.05	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PERSENTASE PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR	20%	13%	220.000.000	13%	300.000.000	13%	300.000.000	13%	300.000.000	13%	300.000.000	100%	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
PERTANIAN																
3.27.02	6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN SARANA PERTANIAN	42%	9%	1.513.100.000	10%	2.350.000.000	10%	2.360.000.000	10%	2.540.000.000	11%	3.300.000.000	100%	
3.27.03	7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENYEDIAAN PRASARANA DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	26%	13%	2.250.000.000	13%	1.450.000.000	13%	1.800.000.000	13%	2.100.000.000	13%	1.960.000.000	100%	
3.27.04	8	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENANGANAN KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR	84%	3%	632.001.000	3%	1.050.000.000	2%	1.150.000.000	2%	1.200.000.000	1%	1.300.000.000	100%	
3.27.05	9	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	40%	10%	665.000.000	10%	750.000.000	10%	750.000.000	10%	750.000.000	10%	750.000.000	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		PERTANIAN	PERTANIAN													
3.27.07	10	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSENTASE PELAKSANAAN FUNGSI PENYULUHAN	30%	11%	700.000.000	12%	1.050.000.000	12%	1.100.259.969	12%	1.148.090.333	13%	1.450.090.333	100%	
	TOTAL					21.727.776.378		25.491.366.930		25.693.259.969		26.073.090.333		27.073.090.333		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
LINGKUNGAN HIDUP																
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	100%	100%	12.705.572.382	100%	16.247.543.080	100%	16.444.423.271	100%	16.444.423.271	100%	16.444.423.271	100%	
2.11.02	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	65%	70%	800.000.000	75%	977.500.000	80%	977.500.000	85%	977.500.000	85%	977.500.000	85%	
2.11.03	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	65%	70%	1.205.000.000	75%	1.918.000.000	80%	1.918.000.000	85%	2.162.500.000	85%	2.162.500.000	85%	
2.11.04	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PERSENTASE PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	65%	70%	3.800.000.000	70%	5.200.000.000	72%	5.200.000.000	75%	5.500.000.000	80%	5.500.000.000	80%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11.05	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PERSENTASE PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	65%	70%	110.000.000	70%	271.325.000	72%	271.325.000	75%	286.745.627	80%	286.745.627	80%	
2.11.06	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	65%	70%	210.000.000	73%	327.750.000	75%	327.750.000	80%	330.000.000	85%	330.000.000	85%	
2.11.08	7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERSENTASE PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	65%	70%	250.000.000	73%	287.500.000	75%	287.500.000	80%	350.000.000	85%	350.000.000	85%	
2.11.09	8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERSENTASE PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	65%	70%	200.000.000	75%	230.000.000	75%	250.000.000	80%	280.000.000	85%	280.000.000	85%	
2.11.10	9	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE MONITORING EVALUASI TERHADAP PENGADUAN	65%	70%	130.000.000	75%	201.250.000	75%	201.250.000	80%	201.250.000	85%	201.250.000	85%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			MASYARAKAT													
2.11.11	10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE TIMBULAN SAMPAH YANG TERTANGANI	57%	57%	12.580.000.000	65,70%	13.966.750.000	65,70%	14.097.850.000	71,40%	14.097.850.000	71,40%	14.097.850.000	71,40%	
	TOTAL					31.990.572.382		39.627.618.080		39.975.598.271		40.630.268.898		40.630.268.898		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	97%		10.914.900.728	100%	10.854.691.311	100%	10.714.399.465	100%	10.769.571.800	100%	10.802.571.800	100%	
2.12.02	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	CAKUPAN PENDUDUK YANG TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	0%	82%	677.000.000	85%	688.000.000	87%	777.000.000	88%	847.000.000	90%	847.000.000	90%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.03	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	CAKUPAN PENDUDUK YANG TERTIB ADMINISTRASI PENCATATAN SIPIL	N/A	80%	292.000.000	85%	283.000.000	87%	387.000.000	88%	407.000.000	90%	387.000.000	90%	
2.12.04	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	KERJASAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	13%	56%	390.000.000	69%	380.000.000	81%	415.000.000	94%	462.463.811	100%	439.463.811	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.12.05	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PERSENTASE DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN YANG DISAJIKAN	33%	33%	60.000.000	67%	60.000.000	67%	80.000.000	100%	90.000.000	100%	100.000.000	367%	
	TOTAL					12.333.900.728		12.265.691.311		12.373.399.465		12.576.035.611		12.576.035.611		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	100%	100%	5.563.253.592	100%	6.289.697.960	100%	6.335.800.798	100%	6.435.500.726	100%	6.434.031.334	100%	
2.14.02	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH (DINAS/BADAN) YANG MENYUSUN DAN MEMANFAATKAN RANCANGAN INDUK PENGENDALIAN PENDUDUK	0,00%	40%	275.000.000	50,00%	511.500.000	60,00%	516.103.500	70,00%	520.748.432	80,00%	525.870.335	80,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			PERSENTASE PERANGKAT DAERAH (DINAS/BADAN) YANG BERPERAN AKTIF DALAM PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI	36,00%	50%	275.000.000	51%	511.500.000	52%	516.103.500	53%	520.748.431	54%	525.000.000	54%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			KAMPUNG KB													
2.14.03	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/TFR) PER WUS USIA 15-49 TAHUN	4,90%	2,56%	345.000.000	2,54%	540.000.000	2,52%	543.000.000	2,50%	553.304.764	2,48%	548.000.000	2,48%	
			ASFR 15-19	14,62%	14,00%	34500000	12,67%	54000000	11,30%	543.000.000	10,00%	553.304.764	9,80%	548.000.000	9,80%	
			UKP	22 USIA	22 USIA	34500000	22 USIA	53750000	22 USIA	545.643.500	22 USIA	553.304.764	22 USIA	548.313.520	22 USIA	
2.14.04	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	CAKUPAN KELOMPOK KEGIATAN YANG MELAKUKAN PEMBINAAN KELUARGA MELALUI 8 FUNGSI KELUARGA	72,00%	75%	1.139.940.000	78%	840.000.000	80%	847.560.000	82%	855.188.040	85%	862.884.732	85%	
	TOTAL					8.288.193.592		9.770.197.960		9.847.211.298		9.992.099.921		9.992.099.921		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															DINAS PERHUBUNGA	
PERHUBUNGAN																

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	100%	100%	24.686.9 87.735	100%	25.186.8 24.107	100%	25.234.2 78.983	100%	25.523.6 91.863	100%	25.523.6 91.863	100%	N
2.15.02	2	PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PRESENTASE TERSEDIAANYA PRASANA PERHUBUNGAN DARAT YANG LAYAK	95%	95%	30.269.4 16.000	95%	27.500.0 00.000	95%	27.916.5 18.711	95%	28.500.0 00.000	95%	28.500.0 00.000	95%	
2.15.03	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	PRESENTASE TERSEDIAANYA PRASANA PERHUBUNGAN LAUT YANG LAYAK SESUAI KEWENANGAN KOTA	20%	20%	40.000.0 00	20%	150.000. 000	20%	150.000. 000	20%	150.000. 000	20%	150.000. 000	20%	
TOTAL						54.996.4 03.735		52.836.8 24.107		53.300.7 97.694		54.173.6 91.863		54.173.6 91.863		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BIDANG STATISTIK, DAN BIDANG PERSANDIAN	100%	100%	6.790.98 7.926	100%	7.410.29 4.324	100%	7.491.99 9.176	100%	7.517.44 7.094	100%	7.429.77 7.094	100%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.16.02	2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PERSENTASE INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	80%	80%	3.335.000.000	85%	3.990.000.000	90%	4.062.000.000	95%	4.220.000.000	100%	4.072.500.000	100%	
2.16.03	3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	13%	13%	5.700.000.000	19%	6.015.000.000	22%	5.915.000.000	19%	5.920.000.000	27%	6.000.000.000	27%	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
STATISTIK																
2.20.02	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PERSENTASE PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	75%	75%	350.000.000	75%	905.000.000	80%	952.000.000	80%	1.008.300.000	80%	1.068.470.000	80%	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
PERSANDIAN																
2.21.02	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	75%	75%	350.000.000	80%	550.000.000	80%	615.000.000	80%	682.000.000	80%	777.000.000	80%	
		TOTAL				16.525.987.926		18.870.294.324		19.035.999.176		19.347.747.094		19.347.747.094		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																
																DINAS KOPERASI,

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA BIDANG PERINDUSTRIAN	100%	100%	8.929.773.822	100%	12.058.115.093	100%	11.357.676.952	100%	12.239.945.144	100%	12.113.345.144	100%	USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.17.03	2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PERSENTASE PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	24,5%	30%	500.000.000	35,50%	700.000.000	40%	770.000.000	40%	947.000.000	40%	947.000.000	40%	
2.17.04	3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PERSENTASE USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI YANG DINILAI KESEHATANNYA UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,53%	7,13%	350.000.000	7,13%	585.000.000	7,13%	643.500.000	7,13%	757.850.000	7,13%	736.850.000	7,13%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.17.05	4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PERSENTASE KOPERASI YANG MENGIKUTI PELATIHAN UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	17,55%	19,55%	450.000.000	21,55%	495.000.000	23,55%	544.500.000	23,55%	598.950.000	23,55%	598.950.000	23,55%	
2.17.06	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PERSENTASE YANG DIBERIKAN DUKUNGAN FASILITASI PENDAMPINGAN KELEMBAGAAN DAN USAHA UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	24,50%	30%	200.000.000	35,50%	250.000.000	40%	275.000.000	40%	302.500.000	40%	250.100.000	40%	
2.17.07	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSENTASE JUMLAH USAHA MIKRO YANG BERMITRA	5%	10%	2.550.000.000	15%	2.522.000.000	20%	2.764.200.000	20%	2.438.900.000	20%	2.988.900.000	20%	
2.17.08	7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PERSENTASE JUMLAH UMKM YANG DIBINA	2%	3%	700.000.000	4%	350.000.000	5%	385.000.000	7%	523.500.000	10%	2.073.500.000	10%	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
PERINDUSTRIAN																

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.31.02	8	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE TERSELESAIKAN NYA DOKUMEN RPIK SAMPAI DENGAN DITETAPKANNYA MENJADI PERDA	40%	50%	750.000.000	75%	2.310.000.000	100%	2.571.000.000	100%	1.881.100.000	100%	1.931.100.000	100%	
3.31.03	9	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PERSENTASE JUMLAH INDUSTRI YANG DIPANTAU	10%	15%	300.000.000	20%	260.000.000	25%	286.000.000	30%	254.100.000	35%	304.100.000	35%	
3.31.04	10	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PERSENTASE DATA PERUSAHAAN INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSRI DI KAB/KOTA YG MASUK DALAM SII NAS TERHADAP TOTAL POPULASI PERUSAHAAN INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN PERUSAHAAN KAWASANINDUSTRI DI KAB/KOTA	50%	55%	150.000.000	60%	215.000.000	65%	286.500.000	70%	199.650.000	75%	199.650.000	75%	
TOTAL						14.879.773.822		19.745.115.093		19.883.376.952		20.143.495.144		22.143.495.144		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
PENANAMAN MODAL																
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	100%	100%	11.843.693.277	100%	13.631.000.000	100%	13.346.704.852	100%	13.502.578.811	100%	13.502.578.811	100%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		KABUPATEN /KOTA	PENANAMAN MODAL													
2.18.02	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PROYEK INVESTASI	56,64%	36,6%	1.300.000.000	40,26%	1.250.000.000	44,29%	1.400.000.000	48,71%	1.355.873.959	53,59%	1.355.873.959	53,59%	
2.18.03	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE MINAT INVESTOR TERHADAP PENINGKATAN INVESTASI	NA	10%	800.000.000	10%	1.000.000.000	10%	1.000.000.000	10%	1.000.000.000	10%	1.000.000.000	10%	
2.18.04	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT YANG MENERIMA LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	78%	80%	1.100.000.000	85 %	1.500.000.000	85 %	1.500.000.000	90 %	1.550.000.000	90 %	1.550.000.000	90 %	
2.18.05	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	100%	100%	900.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.650.000.000	100%	1.650.000.000	100%	
2.18.06	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI YANG DIPUBLIKASI	75%	100%	250.000.000	100%	289.294.324	100%	289.294.324	100%	289.294.324	100%	289.294.324	100%	
	TOTAL					16.193.693.277		18.870.294.324		19.035.999.176		19.347.747.094		19.347.747.094		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																DINAS

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA															KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA BIDANG PARIWISATA	60%	70%	6.595.78 6.047	75%	7.738.44 8.931	80%	8.357.52 4.845	85%	9.026.12 6.833	90%	9.844.31 6.773		90%
2.19.02	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PERSENTASE PEMUDA YANG MENGIKUTI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	60%	70%	1.540.00 0.000	75%	1.119.20 0.000	80%	1.208.73 6.000	85%	1.305.43 4.880	90%	1.409.86 9.670		90%
2.19.03	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PERSENTASE DOKUMEN/LAPORAN PELAKSANAAN, JUMLAH CABOR YANG DIKUTI	60%	70%	4.120.00 0.000	75%	2.446.20 0.000	80%	2.641.89 6.000	85%	2.853.24 7.680	90%	2.718.12 2.625		90%
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
PARIWISATA																
3.26.02	4	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASE PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATA DOMESTIK DAN MANCANEGARA	60%	70%	7.474.18 9.000	75%	5.848.43 4.825	80%	4.837.99 9.049,00	85%	4.079.09 9.675,00	90%	3.291.60 0.000	90%	
3.26.03	5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PERSENTASE PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	60%	70%	328.000. 000	75%	1.169.64 0.000	80%	1.263.21 1.200,00	85%	1.341.09 9.136,00	90%	1.341.09 9.136	90%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.26.04	6	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	PERSENTASE PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	N/A	0%	0	40%	1.620.000.000	45%	1.749.600.000,00	50%	1.749.600.000,00	55%	1.749.600.000	55%	
3.26.05	7	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PERSENTASE PENINGKATAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	60%	70%	755.000.000	75%	815.400.000	80%	880.632.000,00	85%	927.913.600,00	90%	927.913.600	90%	
	TOTAL					20.812.975.047		20.757.323.756		20.939.599.094		21.282.521.804		21.282.521.804		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
PERPUSTAKAAN																
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN DAN BIDANG KEARSIPAN	100%	100%	15.414.582.951	100%	6.734.400.000	100%	6.630.679.588	100%	6.694.075.547	100%	6.694.075.547	100%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG BERBASIS SNP (STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN)	20% (10 PERPUSTAKAAN)	20% (10 PERPUSTAKAAN)	1.020.000.000	40% (10 PERPUSTAKAAN)	1.271.600.000	60% (10 PERPUSTAKAAN)	1.366.600.000	80% (10 PERPUSTAKAAN)	1.336.600.000	100% (10 PERPUSTAKAAN)	1.336.600.000	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.23.03	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	PERSENTASE NASKAH KUNO YANG DIAKUISISI/ SIALIHMEDESIAN (DIGITALISASI) / TERDAFTAR YANG ADA DI WILAYAH KOTA DUMAI	0%	20%	20.000.000	40%	120.000.000	60%	200.000.000	80%	320.000.000	100%	320.000.000	100%	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
KEARSIPAN																
2.24.02	4	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	14%	19%	968.320.000	38%	836.147.162	58%	973.000.000	77%	830.000.000	100%	805.000.000	100%	
2.24.03	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DI KOTA DUMAI	0%	0%	0	40%	473.000.000	60%	347.720.000	80%	493.198.000	100%	518.198.000	100%	
	TOTAL					17.422.902.951		9.435.147.162		9.517.999.588		9.673.873.547		9.673.873.547		
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
KELAUTAN DAN PERIKANAN																
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	100	100	7.699.918.219	100	6.535.800.615	100	6.579.612.716	100	6.552.267.465	100	6.576.848.833	100	DINAS PERIKANAN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.25.03	2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	CAKUPAN KELOMPOK NELAYAN TERBINA	18	18	1.025.000.000	20	1.725.000.000	22	1.725.000.000	24	1.725.000.000	26	1.725.000.000	26	
3.25.04	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	CAKUPAN KELOMPOK AKTIF BUDIDAYA TERBINA	26	28	2.966.000.000	31	3.568.000.000	34	3.542.000.000	37	3.870.375.038	40	3.855.991.838	40	
3.25.05	4	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERSENTASE REKOMENDASI YANG DIKELUARKAN	100	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	
3.25.06	5	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PERSENTASE WILAYAH SAMPEL AKI	100	100	678.310.000	100	1.215.582.295	100	1.313.633.426	100	1.230.582.295	100	1.220.384.127	100	
TOTAL						12.469.228.219		13.194.382.910		13.310.246.142		13.528.224.798		13.528.224.798		
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
PERDAGANGAN																
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	100%;	100%;	10.294.293.395	100%;	10.742.770.325	100%;	10.839.315.751	100%;	10.982.615.751	100%;	10.982.615.751	100%	DINAS PERDAGANGAN
3.30.02	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE REALISASI PELAYANAN DOKUMEN SKA	5%	5%	50.000.000	5%	52.000.000	5%	55.000.000	5%	60.000.000	5%	60.000.000	5%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.30.03	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE PASAR TRADISIONAL PEMERINTAH YANG TERTIB, BERSIH DAN AMAN	100%	100%	1.830.000.000	100%	1.946.000.000	100%	1.948.000.000	100%	1.965.000.000	100%	1.965.000.000	100%	
3.30.04	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE PENGAWASAN DISTRIBUSI BAHAN POKOK MASYARAKAT DAN BARANG PENTING DI 7 KECAMATAN	100%	100%	275.000.000	100%	288.000.000	100%	290.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	
3.30.05	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PERSENTASE VOLUME EKSPOR	1,5%	1.5%	120.000.000	1.5%	135.000.000	1.5%	138.000.000	1.5%	150.000.000	1.5%	150.000.000	1.5%	
3.30.06	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE ALAT UTTP YANG DITERA/TERA ULANG DAN DILAKUKAN PENGAWASAN/P ENYULUHAN	16,67%	16,67%	760.000.000	16,67%	810.000.000	16,67%	825.000.000	16,67%	860.000.000	16,67%	860.000.000	16,67%	
3.30.07	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG IKUT PROMOSI PRODUK DALAM NEGERI	14%	14%	175.000.000	14%	178.950.418	14%	181.683.631	14%	193.194.570	14%	193.194.570	14%	
	TOTAL					13.504.293.395		14.152.720.743		14.276.999.382		14.510.810.321		14.510.810.321		
UNSUR PENDUKUNG															SEKRETARIAT DAERAH KOTA	
SEKRETARIAT DAERAH																

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DAERAH	100%	100%	55.174.6 42.138	100%	51.369.4 84.622	100%	46.246.0 00.000	100%	50.090.6 77.449	100%	49.073.6 77.449	100%	DUMAI
4.01.02	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE MENINGKATNYA CAPAIAN KINERJA DI BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	100%	100%	23.007.2 71.000	100%	28.559.4 46.000	100%	55.650.0 00.000	100%	32.714.4 46.000	100%	34.191.4 46.000	100%	
4.01.03	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE MENINGKATNYA CAPAIAN KINERJA DI BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	100%	100%	2.780.00 0.000	100%	2.760.00 0.000	100%	2.600.00 0.000	100%	3.060.00 0.000	100%	2.600.00 0.000	100%	
5.06.02	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	PERSENTASE PENGELOLAAN DAERAH PERBATASAN	0%	100%	320.412. 558	100%	320.412. 558	100%	320.412. 558	100%	320.412. 558	100%	320.412. 558	100%	
TOTAL						81.282.3 25.696		83.009.3 43.180		104.816. 412.558		86.185.5 36.007		86.185.5 36.007		
UNSUR PENDUKUNG																
SEKRETARIAT DPRD																
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG	100%	100%	48.041.6 72.844	100%	50.371.0 50.128	100%	55.896.7 70.179	100%	55.156.8 47.557	100%	55.156.8 47.557	100%	SEKRETARIAT DPRD

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		/KOTA	SEKRETARIAT DPRD													
4.02.02	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100%	100%	12.137.360.729	100%	13.307.727.595	100%	14.341.187.083	100%	15.133.119.070	100%	15.133.119.070	100%	
	TOTAL					60.179.033.573		63.678.777.723		70.237.957.262		70.289.966.627		70.289.966.627		
UNSUR PENUNJANG																
PERENCANAAN																
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENUNJANG PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN	N/A	100%	10.297.419.153	100%	11.704.353.189	100%	11.903.199.012	100%	12.277.296.513	100%	12.277.296.513	100%	
5.01.02	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KESELARASAN PROGRAM RKPD DENGAN PROGRAM RPJMD	N/A	100%	1.525.000.000	100%	1.600.000.000	100%	1.600.000.000	100%	1.600.000.000	100%	1.600.000.000	100%	
			PERSENTASE RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DITETAPKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	N/A	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5.01.03	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KEGIATAN PRIORITAS KEPALA DAERAH YANG DIIMPLEMENTASIKAN	N/A	100%	1.847.28 1.449	100%	3.150.00 0.000	100%	3.150.00 0.000	100%	3.150.00 0.000	100%	3.150.00 0.000	100%		
			PERSENTASE SINKRONISASI RENCANA PEMBANGUNAN KOTA DUMAI TERHADAP PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI	N/A	100%	1.847.28 1.448	100%	3.150.00 0.000	100%	3.150.00 0.000	100%	3.150.00 0.000	100%	3.150.00 0.000	100%		
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	
5.05.02	4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE HASIL KELITBANGAN YANG IMPLEMENTATIF	N/A	20%	720.000. 000	25%	2.340.00 0.000	30%	2.340.00 0.000	35%	2.340.00 0.000	40%	2.340.00 0.000	150%		
	TOTAL					16.936.9 82.050		22.644.3 53.189		22.843.1 99.012		23.217.2 96.513		23.217.2 96.513			
UNSUR PENUNJANG																	
KEUANGAN																	
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENUNJANG KEUANGAN (BPKAD)	100%	100%	34.529.3 66.346	100%	36.936.0 30.134	100%	36.936.0 30.134	100%	36.936.0 30.134	100%	36.936.0 30.134	100%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	100%	100%	24.670.0 00.000	100%	59.670.0 00.000	100%	60.249.9 66.984	100%	61.341.0 84.695	100%	61.341.0 84.695	100%		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.02.03	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PERSENTASE ASET YANG DILAPORKAN DENGAN TERTIB	100%	100%	3.440.000.000	100%	3.440.000.000	100%	3.440.000.000	100%	3.440.000.000	100%	3.440.000.000	100%	
	TOTAL					62.639.366.346		100.046.030.134		100.625.997.118		101.717.114.829		101.717.114.829		
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENUNJANG KEUANGAN (BAPENDA)	100%	100%	18.928.007.107	100%	24.714.309.553	100%	24.935.175.016	100%	25.302.956.451	100%	25.326.198.606	100%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN DAERAH KOTA	100%	100,00 %	4.343.815.460	100%	4.410.898.405	100%	4.406.273.155	100%	4.445.314.060	100%	4.422.071.905	100%	
	TOTAL					23.271.822.567		29.125.207.958		29.341.448.171		29.748.270.511		29.748.270.511		
UNSUR PENUNJANG																
KEPEGAWAIAN																
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENUNJANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	100%	100%	6.987.717.685	100%	7.087.717.685	100%	7.087.717.685	100%	7.015.217.685	100%	6.987.717.685	100%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.03.02	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PERSENTASE PENEMPATAN ASN SESUAI DENGAN KOMPETENSI, PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR SESUAI FORMASI, DAN PEGAWAI YANG MENCAPAI TARGET KINERJA DENGAN NILAI BAIK	92,78%	93,78%	2.593.50 9.120	94,48%	2.543.50 9.120	95,18%	2.543.50 9.120	95,88%	2.543.50 9.120	96,58%	2.543.50 9.120	96,58%	
UNSUR PENUNJANG																
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
5.04.02	3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PERSENTASE APARATUR YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS, MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	3%	4%	3.630.38 3.201	5%	4.348.71 1.505	6%	4.471.47 2.898	7%	4.774.92 9.373	8%	4.802.42 9.373	8%	
	TO TA L					13.211.6 10.006		13.979.9 38.310		14.102.6 99.703		14.333.6 56.178		14.333.6 56.178		
UNSUR PENGAWAS																
INSPEKTORAT																
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENGAWAS	100%	100%	19.432.7 12.987	100%	19.850.5 71.185	100%	18.859.8 90.000	100%	19.285.8 82.196	100%	19.285.8 82.196	100%	INSPEKTORAT

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		/KOTA	INSPEKTORAT													
6.01.02	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	100%	100%	2.587.88 2.000	100%	3.345.00 0.000	100%	4.252.11 0.842	100%	4.252.11 0.842	100%	4.252.11 0.842	100%	
6.01.03	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PERSENTASE PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	100%	100%	2.347.81 8.000	100%	2.590.00 0.000	100%	2.900.00 0.000	100%	2.900.00 0.000	100%	2.900.00 0.000	100%	
	TOTAL					24.368.4 12.987		25.785.5 71.185		26.012.0 00.842		26.437.9 93.038		26.437.9 93.038		
UNSUR KEWILAYAHAN																
KECAMATAN																
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI BARAT	100%	100%	9.465.02 6.800	100%	12.637.1 80.000	100%	12.968.0 48.000	100%	13.004.8 52.800	100%	13.787.3 38.080	100%	KECAMATAN DUMAI BARAT

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.02	2	PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI BARAT	100%	100%	217.500.000	100%	563.114.324	100%	497.951.176	100%	640.000.000	100%	560.000.000	100%	
7.01.03	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI BARAT	100%	100%	4.055.000.000	100%	4.920.000.000	100%	4.920.000.000	100%	4.940.000.000	100%	4.250.409.014	100%	
7.01.04	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI BARAT	100%	100%	10.000.000	100%	600.000.000	100%	500.000.000	100%	612.894.294	100%	600.000.000	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.05	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI BARAT	100%	100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	
	TOTAL					13.847.526.800		18.870.294.324		19.035.999.176		19.347.747.094		19.347.747.094		
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI TIMUR	100%	100%	9.640.504.954	100%	12.425.294.324	100%	12.590.999.176	100%	12.882.747.094	100%	12.882.747.094	100%	
7.01.02	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI TIMUR	100%	100%	170.800.000	100%	695.000.000	100%	695.000.000	100%	695.000.000	100%	695.000.000	100%	

KECAMATAN DUMAI TIMUR

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.03	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI TIMUR	100%	100%	5.050.000.000	100%	5.450.000.000	100%	5.450.000.000	100%	5.450.000.000	100%	5.450.000.000	100%	
7.01.04	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI TIMUR	100%	100%	10.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	170.000.000	100%	170.000.000	100%	
7.01.05	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI TIMUR	100%	100%	80.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	
TOTAL						14.951.304.954		18.870.294.324		19.035.999.176		19.347.747.094		19.347.747.094		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN BUKIT KAPUR	100%	100%	11.417.918.876	100%	14.200.008.000	100%	14.342.399.000	100%	14.550.499.000	100%	14.550.499.000	100%	KECAMATAN BUKIT KAPUR
7.01.02	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN BUKIT KAPUR	100%	100%	70.000.000	100%	73.859.000	100%	75.000.000	100%	78.000.000	100%	78.000.000	100%	
7.01.03	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN BUKIT KAPUR	100%	100%	7.233.000.000	100%	8.200.486.189	100%	8.235.800.012	100%	8.378.797.513	100%	8.378.797.513	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.04	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN BUKIT KAPUR	100%	0%	0	100%	10.000.000	100%	15.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	
7.01.05	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN BUKIT KAPUR	100%	100%	126.000.000	100%	160.000.000	100%	175.000.000	100%	190.000.000	100%	190.000.000	100%	
TOTAL						18.846.918.876		22.644.353.189		22.843.199.012		23.217.296.513		23.217.296.513		
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA	100%	100%	10.612.199.732	100%	12.745.294.324	100%	12.910.999.176	100%	13.222.747.094	100%	13.222.747.094	100%	KECAMATAN DUMAI KOTA

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.02	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA	100%	100%	250.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	
7.01.03	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA	100%	100%	5.090.000.000	100%	5.500.000.000	100%	5.500.000.000	100%	5.500.000.000	100%	5.500.000.000	100%	
7.01.04	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA	100%	100%	20.000.000	100%	125.000.000	100%	125.000.000	100%	125.000.000	100%	125.000.000	100%	
7.01.05	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA	100%	100%	135.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	
TOTAL						16.107.1		18.870.2		19.035.9		19.347.7		19.347.7		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						99.732		94.324		99.176		47.094		47.094		
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI SELATAN	100%	100%	10.127.020.247	100%	12.856.898.514	100%	13.022.603.366	100%	13.334.351.284	100%	13.334.351.284	100%	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7.01.02	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI SELATAN	100%	100%	167.000.000	100%	433.720.000	100%	433.720.000	100%	433.720.000	100%	433.720.000	100%	
7.01.03	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI SELATAN	100%	100%	5.100.000.000	100%	5.271.500.000	100%	5.271.500.000	100%	5.271.500.000	100%	5.271.500.000	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.04	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI SELATAN	100%	100%	10.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	
7.01.05	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI SELATAN	100%	100%	150.000.000	100%	208.175.810	100%	208.175.810	100%	208.175.810	100%	208.175.810	100%	
	TOTAL					15.554.020.247		18.870.294.324		19.035.999.176		19.347.747.094		19.347.747.094		
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	100%	100%	8.861.482.312	100%	11.536.294.324	100%	11.701.999.176	100%	11.702.747.094	100%	11.702.747.094	100%	KECAMATAN MEDANG KAMPAI

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.02	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	100%	100%	128.500.000	100%	580.000.000	100%	580.000.000	100%	595.000.000	100%	595.000.000	100%	
7.01.03	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	100%	100%	4.098.000.000	100%	6.300.000.000	100%	6.300.000.000	100%	6.600.000.000	100%	6.600.000.000	100%	
7.01.04	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	100%	100%	10.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.05	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	100%	100%	130.000.000	100%	354.000.000	100%	354.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	
	TOTAL					13.227.982.312		18.870.294.324		19.035.999.176		19.347.747.094		19.347.747.094		
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	100%	100%	9.819.934.142	100%	9.584.978.722	100%	9.674.106.177	100%	9.841.785.627	100%	9.841.785.627	100%	
7.01.02	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	100%	100%	400.000.000	100%	1.356.260.037	100%	1.368.871.438	100%	1.392.597.827	100%	1.392.597.827	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.03	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	100%	100%	6.260.000.000	100%	6.714.598.872	100%	6.777.035.642	100%	6.894.500.718	100%	6.894.500.718	100%	BADAN KESATUAN
7.01.04	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	100%	100%	200.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	
7.01.05	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	100%	100%	400.000.000	100%	514.456.693	100%	515.985.919	100%	518.862.922	100%	518.862.922	100%	
TOTAL						17.079.934.142		18.870.294.324		19.035.999.176		19.347.747.094		19.347.747.094		
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																BADAN KESATUAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	100%	100%	5.170.93 4.562	100%	5.617.17 6.594	100%	5.267.17 6.594	100%	5.277.17 6.594	100%	5.277.17 6.594	100%	BANGSA DAN POLITIK
8.01.02	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PERSENTASE PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	100%	100%	250.000. 000	100%	280.000. 000	100%	340.000. 000	100%	340.000. 000	100%	340.000. 000	100%	
8.01.03	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PERSENTASE PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	100%	100%	2.469.56 2.800	100%	2.499.56 2.800	100%	2.802.68 6.002	100%	2.599.56 2.800	100%	2.599.56 2.800	100%	
8.01.04	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	100%	100%	150.000. 000	100%	277.314. 068	100%	777.357. 519	100%	786.760. 272	100%	786.760. 272	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.01.05	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	100%	100%	700.000.000	100%	710.000.000	100%	770.000.000	100%	770.000.000	100%	770.000.000	100%	
8.01.06	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PERSENTASE PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100%	100%	950.000.000	100%	1.170.000.000	100%	1.310.000.000	100%	1.440.000.000	100%	1.440.000.000	100%	
	TOTAL					9.690.497.362		10.554.053.462		11.267.220.115		11.213.499.666		11.213.499.666		



BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Penetapan indikator kinerja pembangunan daerah didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 dan lampiran I permendagri nomor 86 tahun 2017 serta Permendagri nomor 18 Tahun 2020.

8.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Lebih lanjut penetapan indikator kinerja utama Kota Dumai tahun 2022-2026 disajikan dalam Tabel 8.1 sebagai berikut:

**Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kota Dumai Tahun 2022-2026**

Indikator	Satuan						Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,54	4,36	4,7	4,8	5,04	5,04
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Adhk	Rp. Triliun	26,29	27,44	28,73	30,11	31,63	31,63
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Adhb	Rp. Triliun	38,9	41,52	43,52	46,61	48,93	48,93
Pdrb Perkapita Adhk	Rp. Juta	80,98	83,48	86,34	89,37	92,73	92,73
Pdrb Perkapita Adhb	Rp. Juta	119,809	126,301	130,794	138,351	143,466	143,466
Indeks Gini	Poin	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35
Tingkat Kemiskinan	%	3,51	3,49	3,47	3,45	3,43	3,43
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,79	7,54	7,29	7,04	6,79	6,79
Skor Pola Pangan Harapan (Pph)	Skor	83,75	84,58	85,41	86,24	87,07	87,07
Ketersediaan Pangan Utama	%	34,37	36,03	37,7	39,37	41,03	42,7
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,826	75,04	75,254	75,468	75,683	75,683
Indeks Kesehatan	Indeks	0,785	0,786	0,786	0,787	0,788	0,788
Indeks Pendidikan	Indeks	0,706	0,709	0,712	0,715	0,718	0,718
Indeks Pengeluaran	Indeks	0,756	0,759	0,762	0,764	0,767	0,767
Persentase penerapan 4 Jenis Budaya melayu	%	50	50	75	75	100	100
Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	52,46	59,26	64,41	69,3	74,21	74,21

Indikator	Satuan						Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	
Tingkat Pelayanan Infrastruktur Daerah	%	60,77	66,33	71,18	75,51	80,01	80,01
Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Aturan	%	20	30	45	60	75	75
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	69,97	70,19	70,41	70,41	70,41	70,41
Cakupan Pelayanan Persampahan	%	57	63	69	75	81	81
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	GgCO ₂ -e	7.195,43	7.194,06	6.826,22	6.758,14	6.573,53	6.573,53
Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang ditangani	%	75	80	85	90	95	95
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	B	B	B	B	B
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81	81	82	82	82	82
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Setiap Tahun,	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai	B	B	B	B	B	B
Indeks Manajemen Resiko	Indeks	2	2	3	3	3	3
Indeks Layanan SPBE	Indeks	2,83	2,85	2,9	2,96	3	3

Indikator kinerja pembangunan daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja daerah secara makro (*outcome*). Indikator kinerja daerah ini meliputi 3 aspek utama pembangunan daerah yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi: Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Fokus Kesejahteraan Sosial dan Fokus Seni Budaya dan Olahraga. Sedangkan Aspek Pelayanan Umum meliputi: Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan. Aspek daya saing meliputi: Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah, Fokus Infrastruktur Wilayah, Fokus Iklim Berinvestasi dan Fokus Sumber Daya Manusia.

8.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Penetapan indikator kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Penetapan indikator kinerja daerah dilakukan berdasarkan kondisi tahun awal 2020, kecenderungan perkembangan di masa lalu dan kemampuan keuangan daerah. Guna dapat mewujudkan kinerja pembangunan daerah yang terukur, maka target kinerja yang ditetapkan diupayakan semaksimal mungkin dalam bentuk kuantitatif, kecuali untuk aspek-aspek yang ternyata sangat sulit dikuantifikasikan seperti agama dan budaya. Sedangkan indikator kinerja yang digunakan dalam RPJMD ini disesuaikan dengan program dan kegiatan yang

dijabarkan dari visi dan misi kepala daerah terpilih dan kondisi sosial ekonomi dan pembangunan Kota Dumai. Berdasarkan pertimbangan tersebut. Lebih lanjut Tabel 8.2 memberikan rincian penetapan semua indikator dan target kinerja pembangunan Kota Dumai untuk periode 2022-2026.

Tabel 8.2 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kota Dumai Tahun 2022-2026

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	2022	2023	2024	2025	2026
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI								
1.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN							
1.1	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	%	-1,05	3,54	4,36	4,7	4,8	5,04
1.2	TINGKAT KEMISKINAN	%	3,16	3,51	3,49	3,47	3,45	3,43
1.3	NILAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) ADHK	RP. TRILIUN	24,6	26,29	27,44	28,73	30,11	31,63
1.4	NILAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) ADHB	RP. TRILIUN	36,32	38,9	41,52	43,52	46,61	48,93
1.5	PDRB PERKAPITA ADHK	RP. JUTA	77,64	80,98	83,48	86,34	89,37	92,73
1.6	PDRB PERKAPITA ADHB	RP. JUTA	114,66	119,809	126,301	130,794	138,351	143,466
1.7	INDEKS GINI	POIN	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35
1.8	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	%	8,19	7,79	7,54	7,29	7,04	6,79
1.9	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	INDEKS	74,4	74,826	75,04	75,254	75,468	75,683
1.10	INDEKS PENGELUARAN	INDEKS	0,751	0,756	0,759	0,762	0,764	0,767
FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL								
1.	PENDIDIKAN							
1.1.	INDEKS PENDIDIKAN	INDEKS	0,7	0,706	0,709	0,712	0,715	0,718
1.2.	ANGKA PARTISIPASI KASAR PAUD	%	33,46	35,46	37,46	39,46	41,46	43,46
1.3.	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SD	%	95,28	97,28	99,28	101,28	103,28	105,28
1.4.	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMP	%	74,38	76,38	78,38	80,38	82,38	84,38

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	2022	2023	2024	2025	2026
1.5.	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SD	%	88,78	90,78	92,78	94,78	96,78	98,76
1.6.	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SMP	%	62,66	64,66	66,66	68,66	70,66	72,66
2.	KESEHATAN							
2.1.	INDEKS KESEHATAN	INDEKS	0,784	0,785	0,786	0,786	0,787	0,788
2.2.	ANGKA HARAPAN HIDUP	TAHUN	70,93	71,1	71,15	71,2	71,25	71,25
3.	KETENAGAKERJAAN							
3.1.	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	%	8,19	7,79	7,54	7,29	7,04	6,79
FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA								
1.	KEBUDAYAAN							
1.1	PERSENTASE PENERAPAN 4 JENIS BUDAYA MELAYU	PERSENTASE	25	50	50	75	75	100
1.2.	PERSENTASE PENEMPATAN KEBUDAYAAN MELAYU PADA FASILITAS UMUM/RUANG PUBLIK	%	N/A	75	80	85	90	95
ASPEK PELAYANAN UMUM								
LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
1.	PENDIDIKAN							
1.1.	GURU YANG MEMENUHI KUALIFIKASI S1/D-IV	%	N/A	94,55	95,05	95,05	96,05	96,05
1.2.	GURU YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKASI PENDIDIK	%	N/A	52,55	53,55	54,55	55,55	56,55
1.3.	RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH/PENDUDUK USIA SEKOLAH SD	PER 10.000 SISWA	380	-	289,19	303,65	318,83	334,77

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	2022	2023	2024	2025	2026
1.4.	RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH/PENDUDUK USIA SEKOLAH SMP	PER 10.000 SISWA	388	-	31	34	37	40
1.5.	LULUSAN MEMILIKI KOMPETENSI PADA DIMENSI SIKAP	%	100	100	100	100	100	100
1.6.	LULUSAN MEMILIKI KOMPETENSI PADA DIMENSI PENGETAHUAN	%	100	100	100	100	100	100
1.7.	LULUSAN MEMILIKI KOMPETENSI PADA DIMENSI KETRAMPILAN	%	100	100	100	100	100	100
2.	KESEHATAN							
2.1.	ANGKA KEMATIAN BAYI PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP	PER 1.000 KH	7,35	17,5	17	16,5	16	16
2.2.	ANGKA KEMATIAN BALITA PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP	PER 1.000 KH	8,81	24,5	24	23,5	23	23
2.4.	UMUR HARAPAN HIDUP	TAHUN	70,93	71,1	71,15	71,2	71,25	71,25
2.5.	ANGKA KESAKITAN MALARIA (API) PER 1.000 PENDUDUK	PER 1.000 PENDUDUK	0,01	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6
2.6.	PERSENTASE ANGKA KESEMBUHAN PENDERITA TB PARU BTA +	%	66,57	88	88	88	88	88
2.7.	PREVALENSI PENDERITA HIV TERHADAP PENDUDUK BERESIKO	%	2,03	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
2.8.	ANGKA KESAKITAN DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) PER 100.000 PENDUDUK	PER 100.000 PENDUDUK	114,27	55	55	54	54	54
2.9.	PERSENTASE BALITA DENGAN GIZI BURUK	%	0,01	1	1	1	1	1
2.10.	PERSENTASE BALITA DENGAN GIZI KURANG	%	0,41	3	3	2	2	2
2.11.	CAKUPAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI KOTA DUMAI	%	85,52	92,2	92,4	92,6	92,8	92,8

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	2022	2023	2024	2025	2026
2.12.	BOR, PERSENTASE PEMAKAIAN TEMPAT TIDUR DI RSUD KOTA DUMAI	%	75%	75%	75%	75,00%	75%	75%
2.13.	ALOS, LAMANYA SEORANG PASIEN DIRAWAT RSUD KOTA DUMAI	HARI	3 HARI	4 HARI	5 HARI	5 HARI	6 HARI	6 HARI
2.14.	TOI, RATA-RATA DIMANA TEMPAT TIDUR TIDAK DITEMPATI DARI TELAH DIISI KE SAAT TERISI DI RSUD KOTA DUMAI	HARI	1,5 HARI	1,5 HARI	2 HARI	2 HARI	2,5 HARI	2,5 HARI
2.15.	BTO, FREKUENSI PEMAKAIAN TEMPAT TIDUR	KALI	65 KALI	45 KALI	45 KALI	48 KALI	48 KALI	50 KALI
2.16.	GDR (GROSS DEATH RATE), ANGKA KEMATIAN UMUM UNTUK SETIAP 1.000 PENDERITA KELUAR DARI RUMAH SAKIT	%	44,86 ‰	34 ‰	33 ‰	32 ‰	31 ‰	31 ‰
2.17.	NDR (NETT DEATH RATE), ANGKA KEMATIAN 48 JAM SETELAH DIRAWAT UNTUK TIAP-TIAP 1.000 PENDERITA KELUAR DARI RUMAH SAKIT	%	18 ‰	24 ‰	23 ‰	22 ‰	21 ‰	20 ‰
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
3.1.	PEKERJAAN UMUM							
3.1.1.	TINGKAT PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR BIDANG PEKERJAAN UMUM	%	40,51	64,69	68,41	71,2	73,73	75,36
3.1.2.	PERSENTASE PENDUDUK BERAKSES AIR MINUM	%	29,53	40,79	53,72	61,54	68,21	74,68
3.1.3.	PERSENTASE PENDUDUK YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	%	-	100	100	100	100	100
3.1.4.	PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG DAN SARANA STRATEGIS KOTA YANG DISELENGGARAKAN	%	60,24	66,27	66,27	66,27	66,27	66,27
3.1.5.	PERSENTASE KEMANTAPAN JALAN	%	48,58	53,82	54,12	54,42	54,72	55,02
3.1.6.	TIDAK TERJADI GENANGAN >2 KALI DALAM SETAHUN	%		93	86	79	72	65

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	2022	2023	2024	2025	2026
3.1.7.	TINGKAT PENGENDALIAN JASA KONSTRUKSI DAERAH	%		100	100	100	100	100
3.2.	PENATAAN RUANG							
3.2.1	PERSENTASE KESESUAIAN TATA RUANG	%	0,25	5,25	7,75	10,25	12,75	15,25
3.2.2.	PERSENTASE KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG DENGAN PERUNTUKANNYA	%	0,25	5,25	7,75	10,25	12,75	15,25
4.	PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN							
4.1.	TINGKAT PELAYANAN INFRASTRUKTUR PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	%	19,95	61,35	69,98	78,61	88,47	97,14
4.2.	PERSENTASE KOTA DUMAI TANPA KUMUH	%	99,73	22,7	39,96	57,22	76,94	94,28
4.3.	PERSENTASE RUMAH YANG AMAN PASCA BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTAA	%	N/A	100	100	100	100	100
4.4	PERSENTASE PENINGKATAN PSU	%		35,22	48,23	61,51	86,17	100
4.5	CAKUPAN LINGKUNGAN YANG SEHAT DAN AMAN YANG DIDUKUNG DENGAN PSU	%	0	35,2	48,2	61,5	86,2	100
5.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
5.1.	PERSENTASE 4 JENIS BENCANA DAERAH YANG DITANGANI	%	60	75	80	85	90	95
5.2.	PERSENTASE PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN BENCANA	%	78,21	78,21	78,21	78,21	78,21	78,21
5.3.	RESPONSE TIME RATE KEJADIAN BENCANA	%	100	100	100	100	100	100
5.4.	CAKUPAN WILAYAH PENANGANAN BENCANA	%	56,42	56,42	56,42	56,42	56,42	56,42
5.5.	PERSENTASE PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN, DAN PERLINDUNGAN	%	100	100	100	100	100	100

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	2022	2023	2024	2025	2026
	MASYARAKAT							
5.6.	TINGKAT PENYELESAIAN PELANGGARAN K3 (KETERTIBAN, KETENTRAMAN, DAN KEINDAHAN)	%	100	100	100	100	100	100
5.7.	PERSENTASE PENEGAKAN PERATURAN DAERAH	%	100	100	100	100	100	100
6.	SOSIAL							
6.1.	PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, DAN GELANDANGAN PENGEMIS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI LUAR PANTI	N/A	100	100	100	100	100	100
6.2.	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH KAB/KOTA	100	100	100	100	100	100	100
LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR								
1.	TENAGA KERJA							
1.1.	PERTUMBUHAN BESARAN PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR YANG DITEMPATKAN	%	10	10	10	10	10	10
1.2.	PENINGKATAN PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK	%	10	10	10	10	10	10
1.3.	PERTUMBUHAN BESARAN TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN	%	0	15	15	15	15	15
1.4.	PERSENTASE PENEMPATAN TENAGA KERJA	%	0	10	10	10	10	10
1.5.	MENURUNNYA ANGKA SENGKETA PENGUSAHA DG PEKERJA PER TAHUN	%	22	30	32	35	35	40

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	2022	2023	2024	2025	2026
2.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
2.1.	SKOR PENCAPAIAN ANUGRAH PARAHITA EKAPRAYA (APE)	SKOR	N/A	3187	3862	3870	4000	4300
2.2.	SKOR PENCAPAIAN KOTA LAYAK ANAK	SKOR	N/A	700	750	800	850	900
2.3.	CAKUPAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPAT PENANGANAN PENGADUAN OLEH PETUGAS TERLATIH DI DALAM UNIT PELAYANAN TERPADU SESUAI STANDAR	%	N/A	95	95	95	95	95
3.	PANGAN							
3.1.	SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH)	SKOR	82,91	84,58	85,41	86,24	87,07	87,07
3.2.	KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA	%	32,78	36,03	37,7	39,37	41,03	42,7
3.2.	PENGUATAN CADANGAN PANGAN	%	18,1	22,5	25	27,5	30	32,5
3.3.	KETERSEDIAAN PROTEIN / ANGKA KECUKUPAN PROTEIN	GRAM/KAPITA/HARI	52	52,5	52,75	53	53,25	53,5
4.	PERTANAHAN							
4.1.	PERSENTASE PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN PER TAHUN	%	0	20	40	60	80	100
4.2.	PENYELESAIAN KASUS TANAH PEMRINTAH, PEMDA DAN MASYARAKAT	%	0	20	40	60	80	100
5.	LINGKUNGAN HIDUP							
5.1.	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS	61.00	61,36	61,69	61,77	62,18	62,21
5.2.	CAKUPAN PELAYANAN PERSAMPAHAN	%	51	57	63	69	75	81
5.3.	PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA	GGCO2-E	NA	7.195,43	7.194,06	6.826,22	6.758,14	6.573,53

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	2022	2023	2024	2025	2026
5.4.	RASIO DAYA TAMPUNG TPA	RASIO	600.000 M ³ : 57.813 TON	600.000 M ³ : 61.942 TON	600.000 M ³ : 64.117 TON	600.000 M ³ : 66.367 TON	600.000 M ³ : 68.697 TON	600.000 M ³ : 71.108 TON
5.5.	PERSENTASE TERBANGUNNYA TPA/TPST/STA/TPS3R/TPS KOTA DUMAI	%	36,111	41,667	46,296	50,926	55,556	60,185
5.6.	INDEKS KUALITAS AIR	INDEKS	53,1	53,2	53,3	53,4	53,5	53,6
5.7.	INDEKS KUALITAS UDARA	INDEKS	70	70	71	70,5	71,1	71,1
5.8.	INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN	INDEKS	60,73	61	61	61,5	62	62
5.9.	PERSENTASE JUMLAH SAMPAHAN YANG TERTANGANI	%	51,4	57	65,7	65,7	71,4	71,4
5.10.	PERSENTASE CAKUPAN AREA PELAYANAN PERSAMPAHAN	%	51,4	57	65,7	65,7	71,4	71,4
6.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
6.1.	JENIS DATA KEPENDUDUKAN YANG DAPAT DIAKSES OLEH PENGGUNA	JENIS	2 JENIS	2 JENIS	2 JENIS	2 JENIS	2 JENIS	2 JENIS
6.2.	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERKAIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	INDEKS	83,41	86	88	90	91	92
6.3.	PERSENTASE OPD YANG MELAKUKAN PELAYANAN TERINTEGRASI	%	44%	56%	63%	75%	88%	100%
6.4.	PERSENTASE PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	%	0%	50%	80%	100%	100%	100%
7.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
7.1.	PERSENTASE PENGENTASAN DESA/KELURAHAN TERTINGGAL	N/A	47	42	36	30	25	25

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	2022	2023	2024	2025	2026
	(KURANG BERKEMBANG)							
7.2.	PERSENTASE LPM (LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT) BERPRESTASI/AKTIF	N/A	100	100	100	100	100	100
8.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
8.1.	PERSENTASE LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (LPP)	%	2.22	2.12	2.08	2.04	2.01	1.98
8.2.	PERSENTASE KEBUTUHAN BER-KB YANG TIDAK TERPENUHI (UNMET NEED)(%)	%	29.92	22.36	19.93	17.94	16.26	15.30
8.3.	PERSENTASE PEMAKAIAN KONTRASEPSI (CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE/CPR) (%)	%	41,7	45,2	46,6	47,7	48,8	49,9
9.	PERHUBUNGAN							
9.1.	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	%	50	60	65	70	75	80
9.2.	PERSENTASE KEPEMILIKAN KIR ANGKUTAN UMUM	%	45,6	60	70	75	80	86
9.3.	PRESENTASE PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN	%	46	56	61	66	71	76
9.4.	PRESENTASE PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN	%	45	48	48	48	50	55
9.5.	RASIO PANJANG JALAN PER JUMLAH KENDARAAN	%	46	50	52	53	55	60
10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
10.1.	INDEKS LAYANAN SPBE	INDEKS	2,25	2,83	2,85	2,9	2,96	3
10.2.	AKSES JARINGAN INTERNET YANG DISEDIAKAN PEMERINTAH DAERAH	AKSES INTERNET	32	90	94	99	105	110

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	2022	2023	2024	2025	2026
10.3.	PERSENTASE INFORMASI PEMERINTAH DAERAH YANG DISAMPAIKAN MELALUI MEDIA	PERSEN	95	85	88	92	96	98
11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							
11.1.	PERSENTASE KOPERASI AKTIF	%	88,20%	68,53%	70,58%	74%	77%	80%
11.2.	PERSENTASE USAHA MIKRO DAN KECIL	%	78,39%	35%	45%	55%	55%	55%
12.	PENANAMAN MODAL							
12.1.	INVESTOR BARU BERSKALA NASIONAL (PMDN/PMA)	PERUSAHAAN	1	1	2	2	2	2
12.2.	NILAI INVESTASI BERSKALA NASIONAL (PMDN/PMA)	RUPIAH	8.527.947.320,-	8.505.000.000.000,-	9.450.000.000.000,-	10.500.000.000.000,-	11.550.000.000.000,-	12.705.000.000.000,-
13.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA							
13.1.	PERSENTASE ORGANISASI PEMUDA YANG AKTIF	%	55	55	60	65	70	75
13.2.	PRESENTASE WIRUSAHA MUDA	%	70	70	75	80	85	90
13.3.	CAKUPAN PEMBINAAN OLAH RAGA	%	25	25	26	27	28	29
13.4.	JUMLAH PRESTASI OLAH RAGA	CABANG	1	2	3	4	5	6
14.	STATISTIK							
14.1.	PERSENTASE PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	%	N/A	75	75	80	80	80
15.	PERSANDIAN							
15.1.	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN	%	N/A	75	75	80	80	80

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	2022	2023	2024	2025	2026
	INFORMASI							
16.	KEBUDAYAAN							
16.1.	PERSENTASE PENERAPAN KEBUDAYAAN MELAYU PADA FASILITAS UMUM/RUANG PUBLIK	%	N/A	80	85	90	95	95
16.2.	PERSENTASE PENYELENGGARAAN FESTIVAL SENI DAN BUDAYA	KEGIATAN	N/A	95	95	95	95	95
16.3.	PERSENTASE SANGGAR SENI DAN BUDAYA YANG DIBINA	SANGGAR	N/A	85	90	90	95	95
16.4.	PERSENTASE BENDA, SITUS DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DITETAPKAN	OBJEK	N/A	80	85	95	100	100
16.5.	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MUSEUM	MUSEUM	N/A	25	100	100	100	100
16.6.	PERSENTASE PENETAPAN OBJEK WARISAN BUDAYA TAK BENDA (WBTB)	OBJEK	N/A	50	50	50	50	50
17	PERPUSTAKAAN							
17.1	PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG SESUAI SNP (STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN)	%	-	20	40	60	80	100
17.2.	PERSENTASE NASKAH KUNO YANG DIAKUISISI / DIALIH MEDIA (DIGITALISASI) /TERDAFTAR YANG ADA DI WILAYAH KOTA DUMAI	%	-	20 %	40%	60%	80%	100%
18	KEARSIPAN							

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	2022	2023	2024	2025	2026
18.1	PERSENTASE OPD/INSTANSI PEMERINTAH / PERUSAHAAN/ ORGANISASI SOSIAL POLITIK/ ORMAS/ PERSEORANGAN YANG MELAKSANAKAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN SECARA NSPK	%	-	19%	38%	58%	77%	100%
18.2.	INDEKS PENGAWASAN KEARSIPAN TERHADAP OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI	POIN	-	70 POIN	75 POIN	80 POIN	80 POIN	80 POIN
LAYANAN URUSAN PILIHAN								
1.	PERIKANAN DAN KELAUTAN							
1.1.	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN	TON	626,95	994	1.049	1107,7	1.170	1.229
1.2.	PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	TON	286,55	287,545	307,673	329,21	352,255	377
1.3.	PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	TON	585,79	706,349	741,666	778,49	817,686	852,57
1.4.	CAKUPAN BINA KELOMPOK BUDIDAYA	KELOMPOK	28	31	34	37	40	43
1.5.	CAKUPAN BINA KELOMPOK NELAYAN	KELOMPOK	18	18	20	22	24	26
1.6.	ANGKA KONSUMSI IKAN	KG/KAPITA/TAHUN	103,26	42	42	42	42	42
2.	PARIWISATA							
2.1.	KUNJUNGAN WISATA	%	48%	48%	49%	50%	51%	52%
		ORANG DOMESTIK	39.325	39.325	39.718	40.112	40.505	40.898
		ORANG LUAR NEGERI	3.834	3.834	3.872	3.911	3.949	3.987
2.2.	LAMA KUNJUNGAN WISATA	HARI		2	2	3	3	4
2.3.	PAD SEKTOR PARIWISATA	RP.	14.862.500.000	14.936.812.500	15.086.180.625	15.237.047.431	15.389.412.856	15.543.306.984

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	2022	2023	2024	2025	2026
3.	PERTANIAN							
3.1.	PENDAPATAN PERKAPITA PETANI	RP JUTA	210,3	228,82	234,54	240,41	246,42	252,58
3.2.	CAKUPAN BINA KELOMPOK TANI	KELOMPOK	126	165	170	175	180	185
3.3.	PRODUKSI SEKTOR PERKEBUNAN	TON	84.756	85.500	85.750	86.000	86.250	86.500
3.4.	PRODUKSI SEKTOR PERTANIAN	TON	20.818	21.250	21.500	21.750	22.000	22.250
3.5.	POPULASI TERNAK	SATUAN TERNAK	6.303	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
3.6.	PRODUKTIVITAS PADI ATAU BAHAN PANGAN UTAMA LAINNYA	TON/HA	3,3	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
3.7.	JUMLAH PENGGUNAAN ALAT MESIN PERTANIAN	UNIT	8	12	14	16	18	20
3.8.	JUMLAH KASUS HEWAN MENULAR	KASUS	17	13	11	9	7	5
3.9.	JUMLAH KASUS CEMARAN PANGAN ASAL HEWAN (PAH)	KASUS	10	7	6	5	4	3
4.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							
5.	PERDAGANGAN							
5.1.	PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB	%	21,47%	21,48%	21,49%	21,50%	21,51%	21,52%
5.2.	EKSPOR BERSIH PERDAGANGAN	NILAI	RP. 4909,91 M	RP. 4934,46 M	RP. 4959,13 M	RP. 4983,92 M	RP. 5008,84 M	RP. 5033,88 M
5.3.	CAKUPAN BINA KELOMPOK PEDAGANG/USAHA INFORMAL	KELOMPOK	3 KELOMPOK	3 KELOMPOK	3 KELOMPOK	3 KELOMPOK	3 KELOMPOK	3 KELOMPOK
6.	PERINDUSTRIAN							

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	2022	2023	2024	2025	2026
6.1.	PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDRB	%	59,90%	61,90%	63,90%	65,90%	65,90%	65,90%
6.2.	PERSENTASE CAKUPAN BINA KELOMPOK PENGRAJIN	%	4%	9%	13%	18%	18%	18%
PENUNJANG URUSAN								
1.	PERENCANAAN							
1.1.	INDEKS PERENCANAAN	%	N/A	84	85	86	87	88
1.2.	PERSENTASE KESELARASAN PROGRAM RKPD DENGAN PROGRAM RPJMD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.3.	PERSENTASE SINKRONISASI RENCANA PEMBANGUNAN KOTA DUMAI TERHADAP PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.4.	PERSENTASE KEGIATAN PRIORITAS KEPALA DAERAH DIIMPLEMENTASIKAN	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.5.	PERSENTASE RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DITETAPKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	KEUANGAN							
2.1.	OPINI BPK TERHADAP LAPORAN	OPINI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2.	PERSENTASE PAD TERHADAP PENDAPATAN	%	26	19	20	21	23	24
2.3.	PERSENTASE PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	%	44	51	52	53	54	54
2.4.	PERSENTASE SILPA	%	N/A	14	13,7	13,84	12,91	12,39

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	2022	2023	2024	2025	2026
2.5.	PERSENTASE DOKUMEN ANGGARAN YANG DISAMPAIKAN TEPAT WAKTU DAN SESUAI STANDAR	%	N/A	100	100	100	100	100
2.6.	PERSENTASE DOKUMEN PENCAIRAN ANGGARAN SESUAI STANDAR KEUANGAN DAN TEPAT WAKTU	%	N/A	100	100	100	100	100
2.7.	PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN DAERAH YANG DISAMPAIKAN TEPAT WAKTU DAN SESUAI STANDAR	%	N/A	100	100	100	100	100
2.8.	PERSENTASE ASET YANG DILAPORKAN DENGAN TERTIB	%	N/A	100	100	100	100	100
3. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
3.1.	INDEKS KEPUASAN APARATUR	INDEKS	NA	81	84	86	88	90
3.2.	INDEKS PROFESIONALITAS ASN	INDEKS	60,71	68,71	70,71	78,71	80	81,5
3.3.	PERSENTASE PELAYANAN KEPEGAWAIAN YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	%	100	100	100	100	100	100
3.4.	PERSENTASE PEJABAT PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR, DAN FUNGSIONAL SESUAI DENGAN PETA JABATAN	%	82	82	84	86	88	90
3.5.	PERSENTASE PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN	%	90	92	93,5	95	96,5	98
3.6.	PERSENTASE PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	%	3	4	5	6	7	8
4. PENGAWASAN								
4.1.	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	INDEKS	C	CC	B	B	B	B
4.2.	NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH	NILAI	B	B	B	B	B	B

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	2022	2023	2024	2025	2026
4.3.	INDEKS MANAJEMEN RESIKO	INDEKS	-	2	2	3	3	3
4.4.	LEVEL MATURITAS SPIP	LEVEL	2	3	3	3	4	4
4.5.	LEVEL KAPABILITAS APIP	LEVEL	2	3	3	3	4	4
4.6.	NILAI SAKIP OPD	NILAI	B	A	A	A	A	A
4.7.	PERSENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL TEMUAN BPK - RI	PERSENTASE	75	90	95	95	95	95
4.8.	PERSENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL TEMUAN APIP	PERSENTASE	75	90	95	95	95	95
4.9.	PERSENTASE WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)	PERSENTASE	80	90	100	100	100	100
5.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
5.1.	PERSENTASE HASIL KELITBANGAN YANG IMPLEMENTATIF	%	N/A	20%	25%	30%	35%	40%
6.	SEKRETARIAT DAERAH							
6.1.	TERLAKSANANYA KERJA SAMA ANTAR DAERAH	NASKAH KERJASAMA	2	2	2	3	3	4
6.2.	TERLAKSANANYA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA	NASKAH KERJASAMA	5	5	6	7	8	10
6.3.	TERLAKSANANYA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI	NASKAH KERJASAMA	1	1	1	1	1	1
6.4.	TERCAPAINYA PEMBINAAN BUMD	BUMD	3	3	3	3	3	3
6.5.	JUMLAH MAHASISWA YANG MEMPEROLEH BEASISWA BERPRESTASI	MAHASISWA	20	20	30	50	50	50
6.6.	JUMLAH KERJA SAMA DAEAH DENGAN INSTITUSI / LEMBAGA PENDIDIKAN	NASKAH KERJASAMA	5	5	6	7	8	9

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	2022	2023	2024	2025	2026
6.7.	PERSENTASE CAPAIAN PENEGASAN BATAS ANTAR KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI	PERSEN	20,83	25	29,2	33,3	37,5	41,7
6.8.	JUMLAH STRUKTUR PERANGKAT DAERAH YANG DISEDERHANAAN	PERANGKAT DAERAH	10	30	30	30	30	30
7.	SEKRETARIAT DPRD							
7.1	CAPAIAN PELAYANAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	%	100%	95%	95%	95%	95%	100%
7.2.	TERSEDIAANYA RENCANA KERJA TAHUNAN PADA SETIAP ALAT-ALAT KELENGKAPAN DPRD, SATUANNYA RKT	ADA/TIDAK ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
7.3.	TERSUSUNNYA DAN TERINTEGRASINYA PROGRAM-PROGRAM KERJA DPRD UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN, FUNGSI PEMBENTUKAN PERDA DAN FUNGSI ANGGARAN DALAM DOKUMEN RENCANA LIMA TAHUNAN (RPJM) MAUPUN DOKUMEN RENCANA TAHUNAN	ADA/TIDAK ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
7.4.	TERINTEGRASINYA PROGRAM-PROGRAM KERJA DPRD UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN, PEMBENTUKAN PERDA DAN ANGGARAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN DOKUMEN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD	ADA/TIDAK ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
8.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
8.1.	PERSENTASE PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RANGKA MENDUKUNG SUKSES PEMILU DAN PILKADA TAHUN 2024	%	80	85	90	95	100	100
8.2.	PERSENTASE PENINGKATAN STABILITAS POLITIK DALAM NEGERI	%	90	90	95	100	100	100

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	2022	2023	2024	2025	2026
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR								
1.	INFRASTRUKTUR							
1.1.	INDEKS INFRASTRUKTUR DAERAH	INDEKS	39,27	52,46	59,26	64,41	69,3	74,21
1.2.	TINGKAT PELAYANAN INFRASTRUKTUR DAERAH	%	32,71	60,77	66,33	71,18	75,51	80,01
FOKUS IKLIM BERINVESTASI								
1.	PENANAMAN MODAL							
1.1.	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS	80	81	82	82	82	82
1.2.	TINGKAT PENURUNAN ANGKA KRIMINALITAS	%	5	5	5	5	5	5
UNSUR KEWILAYAHAN								
1.	KECAMATAN DUMAI BARAT							
1.1.	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100	100	100	100	100	100
1.2.	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS	80,86	87	87	88	88	88
1.3.	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM DAN TRANTIBUM	%	100	100	100	100	100	100
1.4.	PERSENTASE PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT	%	80	100	100	100	100	100
2.	KECAMATAN BUKIT KAPUR							

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	2022	2023	2024	2025	2026
2.1.	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	75,13	85	85	85	85	85
2.2.	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS	75,13	85	85	85	85	85
2.3.	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM DAN TRANTIBUM	%	100	100	100	100	100	100
2.4.	PERSENTASE PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT	%	75,13	85	85	85	85	85
3.	KECAMATAN DUMAI KOTA							
3.1.	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100	100	100	100	100	100
3.2.	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS	87	87	87	88	88	88
3.3.	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM DAN TRANTIBUM	%	100	100	100	100	100	100
3.4.	PERSENTASE PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT	%	100	100	100	100	100	100
4.	KECAMATAN MEDANG KAMPAI							
4.1.	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100	100	100	100	100	100
4.2.	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS	82	84	85	86	87	88
4.3.	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM DAN TRANTIBUM	%	100	100	100	100	100	100

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	2022	2023	2024	2025	2026
4.4.	PERSENTASE PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT	%	80	100	100	100	100	100
5.	KECAMATAN DUMAI SELATAN							
5.1.	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100	100	100	100	100	100
5.2.	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS	80	82	85	87	90	92
5.3.	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM DAN TRANTIBUM	%	100	100	100	100	100	100
5.4.	PERSENTASE PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT	%	100	100	100	100	100	100
6.	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN							
6.1.	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100	100	100	100	100	100
6.2.	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS	87	87	88	88	88	89
6.3.	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM DAN TRANTIBUM	%	100	100	100	100	100	100
6.4.	PERSENTASE PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT	%	80	85	90	90	95	100
3.	KECAMATAN DUMAI TIMUR							
7.1.	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100	100	100	100	100	100

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	2022	2023	2024	2025	2026
7.2.	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS	76	100	100	100	100	100
7.3.	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM DAN TRANTIBUM	%	100	100	100	100	100	100
7.4.	PERSENTASE PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT	%	76	100	100	100	100	100



BAB IX PENUTUP

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025, dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024, Rencana Pembangunan Jangka Nasional (RPMN) Tahun 2020 – 2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025.

9.1 Program Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dijabarkan kedalam kegiatan dan sub kegiatan tahunan yang menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sampai dengan tahun 2026. Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Dumai Tahun tahap berikutnya maka penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Dumai 20 tahun berikut arah kebijakan dan isu strategis Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Kota Dumai dengan pembangunan nasional serta kepada Visi dan misi kepala daerah.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan Kota Dumai Tahun 2027 (Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027 serta dengan mengingat waktu yang sangat sempit, maka Pemerintah Kota Dumai menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 sesuai dengan jadwal dan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam Tahun 2027. Selanjutnya Walikota dan wakil Walikota terpilih dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 untuk pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih baik sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pembangunan, diterapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam Perubahan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021 - 2026. Pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran harus memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dan sub kegiatan yang melekat pada masing-masing unit kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai tahun 2021-2026 merupakan pedoman atau acuan bagi organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai maupun masyarakat termasuk dunia usaha dalam pelaksanaan program pembangunan sehingga tercapai sinergi antar pelaku pembangunan dalam rangka pencapaian visi Kota Dumai. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

- a. Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program pembangunan sesuai dengan Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
- b. Sebagai implementasi RPJMD, maka Pemerintah Kota Dumai wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen operasional pelaksanaan pembangunan tahunan sebagai acuan dalam penyusunan APBD Kota Dumai;
- c. Bagi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai, RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Kota Dumai. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tiap program maka dalam kerangka koordinasi perencanaan masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Dumai, wajib menyesuaikan Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) dengan Dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026. Selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah sebagai dasar dalam penyusunan APBD Kota Dumai.
- d. Masyarakat termasuk dunia usaha dapat berperanserta dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk Peraturan Daerah. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan masyarakat termasuk dunia usaha dapat berperanserta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan berdasarkan rencana

peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.

- e. Pada akhir tahun perencanaan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Dumai wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur APBD dan peraturan lainnya.
- f. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan serta tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasilnya kepada Walikota Dumai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.